BUPATI TAPANULI UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tarutung, 26 Mei 2026

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dr. Jonius TP. Hutabarat, S.Si., M.Si

Jalan Letjen. Suprapto Nomor 1 Tarutung, Sumatera Utara 22411
Telp (0633) 20719; Faksimile (0633) 21440,
Laman www. taputkab.go.id Pos-el bupati@taputkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun buku yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 telah dapat disusun. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2025 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo anggaran lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain.
3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025.
4. Laporan Operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.
5. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan, Saldo Akhir Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Disertai penjelasan pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran sehingga penyusunan laporan keuangan pemerintah ini dapat disajikan. Kiranya dengan tersusunnya laporan keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian kepemerintahan yang baik.

Tarutung, 26 Mei 2026

BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. Jonrus T.P. Hutabarat, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGUNG JAWAB ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
LAPORAN KEUANGAN **1**
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2
3. NERACA 3
4. LAPORAN OPERASIONAL 6
5. LAPORAN ARUS KAS 8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 11
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 12
   - BAB I PENDAHULUAN 12
   - BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 18
   - BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 45
   - BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 50
   - BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 121
   - BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 229
   - BAB VII PENUTUP 232

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara 18
Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Perkapita 20
Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan 22
Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan 22
Tabel 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan 23
Tabel 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran Penanganan Inflasi 23
Tabel 7. Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 25
Tabel 8. Perhitungan Mandatory Spending Belanja Pegawai Tahun 2025 25
Tabel 9. Struktur Perubahan APBD TA 2025 26
Tabel 10. Perubahan Pendapatan Daerah TA 2025 26
Tabel 11. Perubahan Belanja Daerah TA 2025 27
Tabel 12. Perincian Realisasi APBD TA 2025 44
Tabel 13. Perincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2025 45
Tabel 14. Perincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2025 46
Tabel 15. Perincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2025 47
Tabel 16. Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 50
Tabel 17. Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran 72
Tabel 18. Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap 74
Tabel 19. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap (Capitalization Thresholds) 77
Tabel 20. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 121
Tabel 21. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 121
Tabel 22. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 122
Tabel 23. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 123
Tabel 24. Perincian Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 123
Tabel 25. Perincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 124
Tabel 26. Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 125
Tabel 27. Daftar Perincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 125
Tabel 28. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 125

Tabel 29. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 126
Tabel 30. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Tahun 2025 127
Tabel 31. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 127
Tabel 32. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 128
Tabel 33. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus 128
Tabel 34. Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2025 130
Tabel 35. Realisasi Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah Tahun 2025 131
Tabel 36. Realisasi Belanja Tahun 2025 131
Tabel 37. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 132
Tabel 38. Perincian Belanja Pegawai per Objek Tahun 2025 132
Tabel 39. Perincian Belanja Barang dan Jasa per Objek Tahun 2025 133
Tabel 40. Perincian Belanja Barang Tahun 2025 133
Tabel 41. Perincian Belanja Jasa Tahun 2025 136
Tabel 42. Perincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 136
Tabel 43. Perincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 137
Tabel 44. Perincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 137
Tabel 45. Perincian Pembayaran Belanja Bunga Tahun 2025 138
Tabel 46. Perincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 139
Tabel 47. Perincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 139
Tabel 48. Realisasi Belanja Modal TA 2025 140
Tabel 49. Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 141
Tabel 50. Perincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 141
Tabel 51. Perincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 142
Tabel 52. Perincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 142
Tabel 53. Perincian Penggunaan Bantuan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi TA 2025 143
Tabel 54. Perincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 145
Tabel 55. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 146
Tabel 56. Laporan Penggunaan Saldo Awal (LPSAL) 146
Tabel 57. Perincian Aset Lancar Tahun 2025 147
Tabel 58. Perincian Kas dan Setara Kas Tahun 2025 148

Tabel 59. Daftar Kas pada Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 148
Tabel 60. Perincian Kas Berdasarkan Penggunaannya per 31 Desember 2025..... 149
Tabel 61. Perincian Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2025 150
Tabel 62. Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi JKN Tahun 2025 151
Tabel 63. Anggaran dan Realisasi Dana BOK Puskesmas Tahun 2025..... 152
Tabel 64. Anggaran dan Realisasi Dana Non Kapitasi Puskesmas Tahun 2025 153
Tabel 65. Mutasi Rekening Donasi Bencana Kab. Taput 2025..... 154
Tabel 66. Daftar Piutang Daerah TA 2025 155
Tabel 67. Daftar Piutang Pajak Daerah TA 2025 155
Tabel 68. Daftar Piutang Retribusi Daerah TA 2025 156
Tabel 69. Dana Bergulir 157
Tabel 70. Daftar Piutang BLUD RSU Daerah Tarutung Tahun 2025..... 157
Tabel 71. Daftar Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025..... 158
Tabel 72. Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan TA 2025..... 159
Tabel 73. Perincian Persediaan TA 2025..... 159
Tabel 74. Daftar Investasi Jangka Panjang TA 2025..... 161
Tabel 75. Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2025 161
Tabel 76. Penyertaan Modal pada PDAM Mual Natio..... 162
Tabel 77. Perincian Penyertaan Modal Perseroda Pertanian Tahun 2025 163
Tabel 78. Jumlah Lembar Saham Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut..... 163
Tabel 79. Daftar Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut..... 164
Tabel 80. Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2025..... 165
Tabel 81. Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah..... 165
Tabel 82. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025..... 165
Tabel 83. Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tanah Tahun 2025 166
Tabel 84. Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tanah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 166
Tabel 85. Reklasifikasi Aset Tanah ke Aset Properti Investasi 166
Tabel 86. Potensi PSU dari Pengembang 167
Tabel 87. Daftar Aset Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Tahun 2025..... 167
Tabel 88. Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin 168

Tabel 89. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 168
Tabel 90. Daftar Hibah Peralatan dan Mesin 2025 169
Tabel 91. Daftar Peralatan dan Mesin Bersumber dari Beban Tidak Terduga Tahun 2025 169
Tabel 92. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa Ekstrakomptabel ke KIB B Tahun 2025 169
Tabel 93. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban Barang Pakai Habis ke KIB B Tahun 2025 169
Tabel 94. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban ke KIB B Setelah Nilai Kapitalisasi Tahun 2025 170
Tabel 95. Rekapitulasi Koreksi Aset Ekstrakomptabel ke Intra Sesuai Nilai Kapitalisasi di bawah Tahun 2025 170
Tabel 96. Daftar Reklasifikasi KIB B ke KIB E Tahun 2025 171
Tabel 97. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB B ke Beban barang dan jasa ekstrakomptabel Tahun 2025 171
Tabel 98. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB B ke Beban Barang Pakai Habis Tahun 2025 172
Tabel 99. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB B ke Rusak Berat 172
Tabel 100. Daftar Perincian Aset Peralatan dan Mesin terdampak bencana Tahun 2025 173
Tabel 101. Daftar Hibah Peralatan dan Mesin kepada Masyarakat/ pihak ketiga 2025 174
Tabel 102. Daftar Hibah Smart TV Tahun 2025 175
Tabel 103. Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan 175
Tabel 104. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 175
Tabel 105. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban Barang/Jasa ke Aset KIB C Tahun 2025 176
Tabel 106. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB C ke Beban Ekstrakomptabel Tahun 2025 177
Tabel 107. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB C ke Rusak Berat Tahun 2025 177
Tabel 108. Aset Gedung/Bangunan yang Terdampak Bencana Tahun 2025 177
Tabel 109. Koreksi Temuan BPK atas Kurang Volume Pekerjaan Tahun 2025 177
Tabel 110. Daftar Revitalisasi Gedung Bangunan Sekolah Tahun 2025 178
Tabel 111. Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 178
Tabel 112. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 178
Tabel 113. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban Tidak Terduga ke Aset KIB D Tahun 2025 179
Tabel 114. Rekapitulasi Reklasifikasi dari Beban Ekstrakomptabel ke KIB D Tahun 2025 179
Tabel 115. Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang terdampak Bencana Tahun 2025 180
Tabel 116. Koreksi Ekuitas KIB D ke Persediaan Tahun 2025 180

Tabel 117. Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya 181
Tabel 118. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025..... 181
Tabel 119. Daftar Reklasifikasi KIB B ke KIB E Tahun 2025 182
Tabel 120. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB E ke Aset Rusak Berat Tahun 2025 182
Tabel 121. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2025 183
Tabel 122. Perincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 183
Tabel 123. Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel..... 184
Tabel 124. Daftar Aset Lainnya TA 2025 185
Tabel 125. Saldo Aset Tidak Berwujud..... 185
Tabel 126. Daftar Aset Lain-lain Tahun 2025..... 187
Tabel 127. Penambahan/Pengurangan Aset Properti..... 188
Tabel 128. Rekapitulasi Mutasi Aset Properti Tahun 2025..... 188
Tabel 129. Perincian Aset Properti Tahun 2025..... 188
Tabel 130. Nilai Kewajiban Tahun 2025..... 191
Tabel 131. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025..... 191
Tabel 132. Skema Pembayaran Utang Bunga Pinjaman PEN 2021 192
Tabel 133. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 192
Tabel 134. Utang Belanja Tahun 2025 193
Tabel 135. Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 194
Tabel 136. Saldo Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2025..... 194
Tabel 137. Skema Pembayaran Pinjaman PEN 2020 195
Tabel 138. Skema Pembayaran Pinjaman PEN 2021 196
Tabel 139. Skema Pembayaran Biaya Pengelolaan PEN 2020 196
Tabel 140. Skema Pembayaran Biaya Pengelolaan PEN 2021 197
Tabel 141. Pendapatan – LO Tahun 2025 198
Tabel 142. Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 198
Tabel 143. Perincian Pendapatan Pajak Daerah – LO 199
Tabel 144. Perincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO 200
Tabel 145. Perincian Lain-lain PAD yang sah – LO 202
Tabel 146. Perincian Pendapatan Transfer – LO..... 203
Tabel 147. Perincian Transfer Pemerintah Pusat – LO..... 203

Tabel 148. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO 204
Tabel 149. Perincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO 206
Tabel 150. Perincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 207
Tabel 151. Perincian Beban – LO 208
Tabel 152. Perincian Beban Operasi - LO Tahun 2025 208
Tabel 153. Perincian Beban Pegawai – LO 209
Tabel 154. Perincian Beban Barang dan Jasa- LO Tahun 2025 210
Tabel 155. Perincian Beban Barang– LO 210
Tabel 156. Perincian Beban Jasa – LO 213
Tabel 157. Perincian Beban Pemeliharaan – LO 214
Tabel 158. Perincian Beban Perjalanan Dinas – LO 215
Tabel 159. Perincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO 215
Tabel 160. Perincian Beban Barang dan Jasa BOS 216
Tabel 161. Perincian Beban Barang dan Jasa BLUD 216
Tabel 162. Perincian Beban Bunga 217
Tabel 163. Perincian Beban Hibah 217
Tabel 164. Perincian Beban Bantuan Sosial 218
Tabel 165. Perincian Beban Penyisihan Piutang 219
Tabel 166. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 220
Tabel 167. Perincian Beban Transfer – LO 220
Tabel 168. Perincian Beban Tidak Terduga – LO 221
Tabel 169. Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasi – LO 221
Tabel 170. Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 222
Tabel 171. Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2025 223
Tabel 172. Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi 223
Tabel 173. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 225
Tabel 174. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 225
Tabel 175. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 226
Tabel 176. Perincian PFK yang dikelola oleh BUD selama Tahun 2025 226
Tabel 177. Saldo Akhir Kas 226

Tabel 178. Perincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 227
Tabel 179. Luas Wilayah per Kecamatan 229
Tabel 180. Urusan dan Bidang 230
Tabel 181. Unit Organisasi (SKPD) 230

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Realisasi Retribusi Daerah
Lampiran	2	Rekapitulasi Realisasi Penyaluran Dana Desa
Lampiran	3	Daftar Realisasi Anggaran Dana Hibah
Lampiran	4	Daftar Realisasi Anggaran Dana Bantuan Sosial
Lampiran	5	Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal
Lampiran	6	Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Terduga
Lampiran	7	Rekapitulasi Pendapatan dan Pengeluaran Dana Bos Reguler Dan BOSP Tingkat SD Negeri
Lampiran	8	Rekapitulasi Pendapatan dan Pengeluaran Dana BOS Reguler dan BOSP Kinerja Tingkat SMP Negeri
Lampiran	9	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Lampiran	10	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
Lampiran	11	Rekapitulasi Piutang Lainnya (TGR Kerugian Daerah)
Lampiran	12	Penyisihan Piutang Tahun 2025
Lampiran	13	Rekapitulasi Laporan Persediaan Barang
Lampiran	14	Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Lampiran	15	Daftar Saldo Aset Tetap
Lampiran	16	Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah
Lampiran	17	Daftar Aset Tetap Tanah Bersertifikat
Lampiran	18	Daftar Aset Tetap Tanah Yang Belum Bersertifikat
Lampiran	19	Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Lampiran	20	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dikuasai Pihak Ketiga dan Status Pinjam Pakai Tidak Memiliki Perjanjian
Lampiran	21	Rincian Aset Hibah Smart TV Tahun 2025
Lampiran	22	Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan
Lampiran	23	Rincian Penerima Revitalisasi Tahun 2025
Lampiran	24	Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi
Lampiran	25	Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Lampiran	26	Daftar Aset Lainnya
Lampiran	27	Rekapitulasi Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran	28	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Lampiran	29	Perincian Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran	30	Daftar Utang Belanja Tahun 2025
Lampiran	31	Laporan Keuangan Perumda PDAM Mual Natio
Lampiran	32	Laporan Keuangan Perseroda Pertanian

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam rupiah)

Rek	Uraian	CaLK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	**PENDAPATAN - LRA**	**5.1.1**	**1.449.723.647.639,00**	**1.439.479.093.114,60**	**99,29**	**1.437.280.040.724,40**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**5.1.1.1**	**154.000.000.000,00**	**156.677.606.847,60**	**101,73**	**133.655.052.931,40**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	38.503.750.000,00	37.626.009.620,67	97,72	27.663.738.746,01
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	94.877.368.000,00	96.559.544.688,00	101,77	93.784.976.878,78
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	9.057.524.807,00	9.057.524.807,00	100,00	8.451.510.307,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	11.561.357.193,00	13.434.527.722,93	116,20	3.754.826.999,61
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	**5.1.1.2**	**1.261.743.272.124,00**	**1.249.320.018.091,00**	**99,01**	**1.281.410.872.862,00**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA**	**5.1.1.2.1**	**976.179.427.000,00**	**995.460.589.375,00**	**101,97**	**1.029.717.245.029,00**
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1	75.444.726.000,00	75.444.726.000,00	100,00	84.828.799.000,00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1	675.701.250.000,00	696.974.246.628,00	103,14	681.275.700.613,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1	4.805.395.000,00	4.772.399.978,00	99,31	92.466.086.003,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1	220.228.056.000,00	218.269.216.769,00	99,11	191.346.659.413,00
4.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA**	**5.1.1.2.2**	**207.905.004.000,00**	**178.830.291.034,00**	**86,01**	**205.997.222.200,00**
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.1	14.881.571.000,00	14.881.571.000,00	100,00	6.867.270.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	5.1.1.2.1	193.023.433.000,00	163.948.720.034,00	84,93	199.129.952.200,00
4.2.3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA**	**5.1.1.2.3**	**77.658.841.124,00**	**75.029.137.682,00**	**96,61**	**45.696.405.633,00**
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2	71.662.700.124,00	68.532.996.682,00	95,63	45.696.405.633,00
4.2.3.2	Pendapatan Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2	5.996.141.000,00	6.496.141.000,00	108,33	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**5.1.1.3**	**33.980.375.515,00**	**33.481.468.176,00**	**98,53**	**22.214.114.931,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	8.818.078.129,00
4.3.2	Dana Darurat	5.1.1.3	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3	28.980.375.515,00	28.481.468.176,00	98,27	13.396.036.802,00
5	**BELANJA**	**5.1.2**	**1.394.378.083.538,86**	**1.339.060.114.362,91**	**96,03**	**1.375.858.189.855,41**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**1.029.204.042.106,86**	**1.011.039.649.562,83**	**98,23**	**1.014.674.115.403,47**
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	695.133.162.874,84	680.660.593.870,00	97,91	621.410.779.418,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	315.377.058.947,02	312.600.485.856,83	99,11	318.291.641.973,47
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	1.305.525.006,00	1.305.525.006,00	100,00	2.207.835.420,00
5.1.4	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	15.790.059.080,00	15.127.032.130,00	95,80	71.990.363.892,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	1.598.236.199,00	1.346.012.700,00	84,21	773.494.700,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**63.350.601.533,00**	**60.428.751.848,08**	**95,38**	**99.079.324.655,94**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	22.663.056.681,00	20.939.549.180,71	92,84	26.958.423.144,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	7.497.281.776,00	6.342.671.277,29	84,59	14.949.241.861,74
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	18.859.905.960,00	18.687.651.374,08	99,08	56.854.991.209,34
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.440.357.116,00	14.456.880.016,00	100,12	111.469.430,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	41.199.010,86
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**20.482.560.075,00**	**15.383.387.034,00**	**75,10**	**3.454.947.220,00**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	20.482.560.075,00	15.383.387.034,00	75,10	3.454.947.220,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**281.340.879.824,00**	**252.208.325.918,00**	**89,64**	**258.649.802.576,00**
5.4.1.1	Belanja Bagi Hasil	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4	281.340.879.824,00	252.208.325.918,00	89,64	258.649.802.576,00
	JUMLAH BELANJA	**-**	**1.394.378.083.538,86**	**1.339.060.114.362,91**	**96,03**	**1.375.858.189.855,41**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-**	**55.345.564.100,14**	**100.418.978.751,69**	**181,43**	**61.421.850.868,99**
6	**PEMBIAYAAN**	**5.1.3**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.1**	**10.404.650.909,86**	**10.624.390.091,06**	**102,11**	**18.264.856.637,87**
6.1.01	Penggunaan SILPA	5.1.3.1	10.404.650.909,86	10.624.390.091,06	102,11	18.264.856.637,87
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.2**	**65.750.215.010,00**	**51.437.488.606,00**	**78,23**	**69.282.056.597,00**
6.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pinjaman Daerah	5.1.3.2	64.750.215.010,00	51.437.488.606,00	79,43	69.282.056.597,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**5.1.3.2**	**(55.345.564.100,14)**	**(40.813.098.514,94)**	**73,74**	**(51.017.199.959,13)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**5.1.4**	**0,00**	**59.605.880.236,75**	**0,00**	**10.404.650.909,86**

BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. Jonius T.P. Hutabarat, S.Si., M.Si

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	CaLK	2025	2024
1	Sisa Anggaran Lebih Awal	5.2	10.404.650.909,86	18.272.950.856,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.1	10.624.390.091,06	18.264.856.637,87
3	Subtotal (1 - 2)		(219.739.181,20)	8.094.218,13
4	Sisa Lebih/Kurang Anggaran (SILPA/SiKPA)	5.2.2	59.605.880.236,75	10.404.650.909,86
5	Subtotal (3 +4)		59.386.141.055,55	10.412.745.127,99
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.3	219.739.181,20	(8.094.218,13)
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**		**59.605.880.236,75**	**10.404.650.909,86**

BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. Jonius T.P. Hutabarat, S.Si., M.Si

3. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	CaLK	2025	2024
1	**ASET**			
2				
3	**ASET LANCAR**	**5.3.1**		
4	**Kas dan Setara Kas**	**5.3.1.1**	**59.639.288.144,75**	**10.683.462.109,98**
5	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	49.786.382.574,55	8.338.721.467,86
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	49.129.000,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	108.939.603,00
8	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	8.081.257.623,00	805.407.416,00
9	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5	320.845.765,80	439.505.723,80
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.6	807.533.610,20	50.024.510,20
11	Kas BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	163.482.934,00	662.052.189,00
12	Kas Lainnya	5.3.1.1.8	479.785.637,20	229.682.200,12
13	Setara Kas Lainnya	5.3.1.1.9	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.2.1	16.507.122.942,45	15.882.122.971,00
15	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.2.2	1.070.317.474,13	978.590.264,13
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.2.3	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.2.4	14.185.730.743,84	15.570.144.767,00
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.2.5	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.2.6	12.617.465.110,00	46.784.244.939,00
20	Piutang Lainnya	5.3.1.2.7	0,00	6.806.997.786,59
21	Penyisihan Piutang	5.3.1.3	(16.665.496.959,86)	(20.605.304.985,32)
22	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.4	0,00	0,00
23	Persediaan	5.3.1.5	50.023.244.074,47	16.503.252.863,80
24	**Jumlah Aset Lancar**		**137.377.671.529,78**	**92.603.510.716,18**
25				
26	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.3.2**		
27	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**5.3.2.1**		
28	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.2.1	0,00	0,00
29	Investasi Permanen Lainnya	5.3.2.1	0,00	0,00
30	**Jumlah Investasi Non permanen**	5.3.2.1	**0,00**	**0,00**
31				
32	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**5.3.2.2**		
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.2	75.517.540.181,00	76.323.268.075,00
34	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	5.3.2.2	0,00	0,00
35	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen**	5.3.2.2	**75.517.540.181,00**	**76.323.268.075,00**
36	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**		**75.517.540.181,00**	**76.323.268.075,00**
37				
38	**ASET TETAP**	5.3.3		

No	Uraian	CaLK	2025	2024
39	Tanah	5.3.3.1	814.647.758.614,00	851.271.193.314,00
40	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	493.120.971.414,52	454.304.118.366,00
41	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	838.614.196.439,19	816.892.322.252,55
42	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.3.4	1.878.411.126.057,99	1.866.176.536.837,11
43	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	129.491.120.199,01	31.075.123.196,00
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	1.409.927.486,00	0,00
45	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	(1.775.654.217.674,68)	(1.612.384.019.485,52)
46	**Jumlah Aset Tetap**		**2.380.040.882.536,03**	**2.407.335.274.480,14**
47				
48	**DANA CADANGAN**	5.3.4		
49	Dana Cadangan	5.3.4	0,00	0,00
50	**Jumlah Dana Cadangan**		**0,00**	**0,00**
51				
52	**ASET LAINNYA**	5.3.5		
53	Aset Tak Berwujud	5.3.5.1	2.289.011.614,86	2.289.011.614,86
54	Aset Lain-lain	5.3.5.2	86.439.671.543,68	73.677.358.567,17
55	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.5.3	(2.153.614.583,16)	(1.736.290.832,36)
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.5.4	(83.081.414.309,36)	(69.150.157.073,02)
57	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.5.5	43.829.100.000,00	3.318.754.000,00
58	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.5.6	0,00	0,00
59	**Jumlah Aset Lainnya**		**47.322.754.266,02**	**8.398.676.276,65**
60				
61	**ASET PROPERTI**	**5.3.6**		
62	Properti Investasi Tanah	5.3.6	34.135.801.900,00	0,00
63	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.6	0,00	0,00
64	**Jumlah Aset Properti**	**5.3.6**	**34.135.801.900,00**	**0,00**
65				
66	**JUMLAH ASET**		**2.674.394.650.412,83**	**2.584.660.729.547,97**
67				
68	**KEWAJIBAN**	**5.3.7**		
69				
70	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.3.7.1**		
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.7.1.1	0,00	9.943.018,92
72	Utang Bunga	5.3.7.1.2	411.387.506,00	1.305.522.106,00
73	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.7.1.3	14.556.395.511,63	69.154.763.638,00
74	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.7.1.4	379.923.102,26	261.738.734,25
75	Utang Belanja	5.3.7.1.5	42.246.873.308,63	63.961.419.051,63
76	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.7.1.6	12.550.198.000,00	0,00

No	Uraian	CaLK	2025	2024
77	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**70.144.777.428,52**	**134.693.386.548,80**
78				
79	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**5.3.7.2**		
80	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.7.2	181.473.405.750,00	178.246.911.514,00
81	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**	5.3.7.2	**181.473.405.750,00**	**178.246.911.514,00**
82	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**251.618.183.178,52**	**312.940.298.062,80**
83				
84	**EKUITAS**	5.3.8		
85	Ekuitas	5.3.8	2.422.776.467.234,31	2.271.720.431.485,17
86	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**		**2.674.394.650.412,83**	**2.584.660.729.547,97**

BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. Jonius TP. Hutabarat, S.Si., M.Si

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam rupiah)

URAIAN	CALK	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN - LO	**5.4.1**	**1.277.365.947.465,04**	**1.296.265.579.561,53**	**(18.899.632.096,49)**	**(1,46)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	**5.4.1.1**	**147.077.889.169,04**	**136.070.840.715,53**	**11.007.048.453,51**	**8,09**
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	38.234.515.233,11	29.926.455.596,76	8.308.059.636,35	27,76
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	88.089.655.673,00	93.867.166.523,78	(5.777.510.850,78)	(6,15)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	9.057.524.807,00	8.451.510.307,00	606.014.500,00	7,17
Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.4	11.696.193.455,93	3.825.708.287,99	7.870.485.167,94	205,73
PENDAPATAN TRANSFER	**5.4.1.2**	**1.091.714.864.228,00**	**1.122.369.538.601,00**	**(30.654.674.373,00)**	**(2,73)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.1	1.035.970.935.375,00	1.023.021.618.029,00	12.949.317.346,00	1,27
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.2	14.881.571.000,00	6.867.270.000,00	8.014.301.000,00	116,70
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - LO	5.4.1.2.3	36.362.357.853,00	90.484.509.572,00	(54.122.151.719,00)	(59,81)
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.4	4.500.000.000,00	1.996.141.000,00	2.503.859.000,00	125,43
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	**5.4.1.3**	**38.573.194.068,00**	**37.825.200.245,00**	**747.993.823,00**	**1,98**
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3	6.091.725.892,00	24.429.163.443,00	(18.337.437.551,00)	(75,06)
Dana Darurat- LO		4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang	5.4.1.3	28.481.468.176,00	13.396.036.802,00	15.085.431.374,00	112,61
BEBAN	**5.4.2**	**1.222.842.232.234,54**	**1.282.134.240.898,07**	**(59.292.008.663,53)**	**(4,62)**
Beban Operasi	**5.4.2.1**	**1.007.829.501.008,01**	**1.061.196.938.883,63**	**(53.367.437.875,62)**	**(5,03)**
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	671.583.031.270,00	662.968.891.974,39	8.614.139.295,61	1,30
Beban Barang	5.4.2.1.2.1	57.475.304.794,07	91.245.505.894,06	(33.770.201.099,99)	(37,01)
Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	86.337.718.126,00	61.709.679.397,00	24.628.038.729,00	39,91
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	3.924.177.372,03	4.014.095.710,00	(89.918.337,97)	(2,24)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	29.783.112.765,00	35.452.140.075,00	(5.669.027.310,00)	(15,99)
Beban Uang dan atau Jasa kepada Pihak ke-3	5.4.2.1.2.5	9.332.257.790,00	17.433.790.138,01	(8.101.532.348,01)	(46,47)
Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.2.1.2.6	30.280.280.559,00	30.760.541.683,00	(480.261.124,00)	(1,56)
Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.2.1.2.7	82.679.766.869,17	74.669.270.072,20	8.010.496.796,97	10,73
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.4.2.1.2.8	14.995.376.668,00	0,00	14.995.376.668,00	100,00
Beban Bunga	5.4.2.1.3	411.390.406,00	2.207.835.420,00	(1.796.445.014,00)	(81,37)
Beban Hibah	5.4.2.1.4	17.950.224.250,00	71.974.027.092,00	(54.023.802.842,00)	(75,06)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	1.346.012.700,00	773.494.700,00	572.518.000,00	74,02
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	1.730.847.438,74	7.987.666.727,97	(6.256.819.289,23)	(78,33)

URAIAN	CALK	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Lain-lain	5.4.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**5.4.2.2**	**134.220.746.569,60**	**146.728.282.634,44**	**(12.507.536.064,84)**	**(8,52)**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2	38.243.176.264,24	44.020.116.432,14	(5.776.939.167,90)	(13,12)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2	16.664.660.118,88	15.916.420.184,00	740.220.033,80	4,71
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2	78.939.364.726,80	86.118.484.321,51	(7.179.130.591,71)	(8,34)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2	202.660.289,88	510.677.886,95	(308.117.597,07)	(60,34)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2	171.005.166,80	163.574.808,86	7.430.357,05	4,54
Beban Transfer	**5.4.2.3**	**74.671.664.100,00**	**73.107.902.160,00**	**1.563.661.940,00**	**2,14**
Beban Bagi Hasil	5.4.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3	74.671.664.100,00	73.107.902.160,00	1.563.661.940,00	2,14
Beban Tidak Terduga	**5.4.2.4**	**6.120.430.556,93**	**1.101.117.220,00**	**5.019.313.336,93**	**455,84**
Beban Tidak Terduga	5.4.2.4	6.120.430.556,93	1.101.117.220,00	5.019.313.336,93	455,84
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**5.4.2.5**	**54.523.715.230,50**	**14.131.338.663,46**	**40.392.376.567,04**	**285,84**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL	**5.4.3**	**204.327.000,00**	**1.002.247.748,00**	**(797.920.748,00)**	**(79,61)**
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar	5.4.3	204.327.000,00	340.713.000,00	(136.386.000,00)	(40,03)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3	0,00	661.534.748,00	(661.534.748,00)	(100,00)
DEFISIT NON OPERASIONAL	**5.4.3**	**1.143.620.586,00**	**1.034.204.926,00**	**109.415.661,00**	**10,58**
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar	5.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3	1.143.620.586,00	1.034.204.926,00	109.415.661,00	10,58
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OP	**5.4.4**	**(939.293.586,00)**	**(31.957.177,00)**	**(907.336.409,00)**	**2.839,23**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**5.4.5**	**53.584.421.644,50**	**14.099.381.486,46**	**39.485.040.158,04**	**280,05**
POS LUAR BIASA	**5.4.6**				
PENDAPATAN LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Luar Biasa	-	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT - LO	**5.4.6**	**53.584.421.644,50**	**14.099.381.486,46**	**39.485.040.158,04**	**280,05**

BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. Jonius TP. Hutabarat, S.Si., M.Si

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	CaLK	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	5.5		
2	**Arus Kas Masuk**	5.5.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	37.626.009.629,67	27.663.738.746,01
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1	96.559.544.688,00	93.784.976.878,78
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1	9.057.524.807,00	8.451.510.307,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1	13.230.200.722,93	3.371.083.899,61
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1	75.444.726.000,00	64.628.799.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1	696.974.246.628,00	681.275.700.613,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1	4.772.399.978,00	92.466.086.003,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1	218.269.216.769,00	191.346.659.413,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1	14.881.571.000,00	6.867.270.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	5.5.1	163.948.720.034,00	199.129.952.200,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1	68.532.996.682,00	45.696.405.633,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1	6.496.141.000,00	0,00
15	Penerimaan Hibah	5.5.1	1.000.000.000,00	8.818.078.129,00
16	Penerimaan Dana Darurat	5.5.1	4.000.000.000,00	0,00
17	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1	28.481.468.176,00	13.396.036.802,00
18	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**5.5.1**	**1.439.274.766.114,60**	**1.436.896.297.624,40**
19				
20	**Arus Kas Keluar**	5.5.1		
21	Pembayaran Pegawai	5.5.1	680.660.593.870,00	621.410.779.418,00
22	Pembayaran Barang	5.5.1	312.600.485.856,83	318.291.641.973,47
23	Pembayaran Bunga	5.5.1	1.305.525.006,00	2.207.835.420,00
24	Pembayaran Subsidi	5.5.1	0,00	0,00
25	Pembayaran Hibah	5.5.1	15.127.032.130,00	71.990.363.892,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1	1.346.012.700,00	773.494.700,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1	252.208.325.918,00	258.649.802.576,00
28	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1	15.383.387.034,00	3.454.947.220,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1	0,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1	0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.1	0,00	0,00

No	Uraian	CaLK	2025	2024
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.1	0,00	0,00
33	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**5.5.1**	**1.278.631.362.514,83**	**1.276.778.865.199,47**
34	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	**5.5.1**	**160.643.403.599,77**	**160.117.432.424,93**
35	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.5.2		
36	**Arus Kas Masuk**	5.5.2		
37	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	0,00
38	Penjualan atas Tanah	5.5.2	0,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2	149.000.000,00	340.713.000,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2	0,00	0,00
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2	0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap	5.5.2	0,00	0,00
43	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2	55.327.000,00	43.030.100,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2	0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2	0,00	0,00
46	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**5.5.2**	**204.327.000,00**	**383.743.100,00**
47	**Arus Kas Keluar**	**5.5.2**		
48	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2		
49	Perolehan Tanah	5.5.2	0,00	164.000.000,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2	20.939.549.180,71	26.958.423.144,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	6.342.671.277,29	14.949.241.861,74
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2	18.687.651.374,08	56.854.991.209,34
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	14.458.880.016,00	111.469.430,00
54	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2	0,00	41.199.010,86
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2	0,00	0,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2	0,00	0,00
57	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**5.5.2**	**60.428.751.848,08**	**99.079.324.655,94**
58	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	**5.5.2**	**(60.224.424.848,08)**	**(98.695.581.555,94)**
59	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	5.5.3		
60	**Arus Kas Masuk**	5.5.3		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3	0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya	5.5.3	0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3	0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3	0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
71	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**5.5.3**	**0,00**	**0,00**
72	**Arus Kas Keluar**	**5.5.3**		
73	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3	0,00	0,00
74	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3	0,00	0,00

No	Uraian	CaLK	2025	2024
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3	51.437.488.606,00	69.282.056.597,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3	0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3	0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3	0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3	0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	5.5.3	0,00	0,00
84	**Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar**	**5.5.3**	**51.437.488.606,00**	**69.282.056.597,00**
85	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	**5.5.3**	**(51.437.488.606,00)**	**(69.282.056.597,00)**
86	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	5.5.4		
87	**Arus Kas Masuk**	5.5.4		
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	74.725.881.068,02	72.837.615.432,45
89	Uang Masuk	5.5.4	0,00	0,00
90	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**5.5.4**	**74.725.881.068,02**	**72.837.615.432,45**
91	**Arus Kas Keluar**	5.5.4		
92	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	74.735.824.086,94	72.827.672.413,53
93	Uang Keluar	5.5.4	0,00	0,00
94	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**5.5.4**	**74.735.824.086,94**	**72.827.672.413,53**
95	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**	**5.5.4**	**(9.943.018,92)**	**9.943.018,92**
96	**Kenaikan/Penurunan Kas**	**5.5.5**	**48.971.647.126,77**	**(7.850.262.709,09)**
97	**Saldo Awal Kas di BUD Dan Bendahara Pengeluaran**	**5.5.5**	**10.683.462.109,98**	**18.272.950.856,00**
98	**Koreksi SILPA**	**5.5.5**	**219.739.181,20**	**(8.094.218,13)**
99	**Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan**	**5.5.5**	**10.903.201.291,18**	**18.264.856.637,87**
100	**Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran**	**5.5.5**	**59.874.748.417,95**	**10.414.593.928,78**
101	Kas RKUD	5.5.5	49.786.382.574,55	8.338.721.467,86
102	Kas di BLUD	5.5.5	8.081.257.623,00	805.407.416,00
103	Kas di Bendahara FKTP	5.5.5	807.533.610,20	50.024.510,20
104	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	5.5.5	163.482.934,00	662.052.189,00
105	Kas di Bendahara BOSP	5.5.5	320.845.765,80	439.505.723,80
106	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5	0,00	108.939.603,00
107	Kas Lainnya	5.5.5	479.785.637,20	229.682.200,12
108	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.5	0,00	49.129.000,00
109	Setara Kas	5.5.5	0,00	0,00
110	**Saldo Akhir Kas (Neraca)**	**5.5.5**	**59.639.288.144,75**	**10.683.462.109,98**

BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. Jonius T.P. Hutabarat, S.Si., M.Si

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CaLK	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	5.6.1	2.271.720.431.485,17	2.331.755.925.727,85
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	53.584.421.644,50	14.099.381.486,46
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	97.471.614.104,64	(74.134.875.729,14)
EKUITAS AKHIR	**5.6.4**	**2.422.776.467.234,31**	**2.271.720.431.485,17**

BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. Jonius T.P. Hutabarat, S.Si., M.Si.

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, laporan operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam fungsi-fungsi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan berikut penggunaannya yang

telah menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; dan
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 5 Tambahan lembaran negara nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 7 (tujuh) Bab:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Perubahan APB dan Penjelasannya

2.3. Kebijakan Keuangan

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/ Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4. Penjelasan atas Laporan Operasional (LO)

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK)

5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara

6.2. Letak Geografis

6.3. Visi dan Misi

6.4. Organisasi dan Personalia

6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

Bab VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena sangat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Capaian indikator Makro Ekonomi Pembangunan tahun 2025 sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

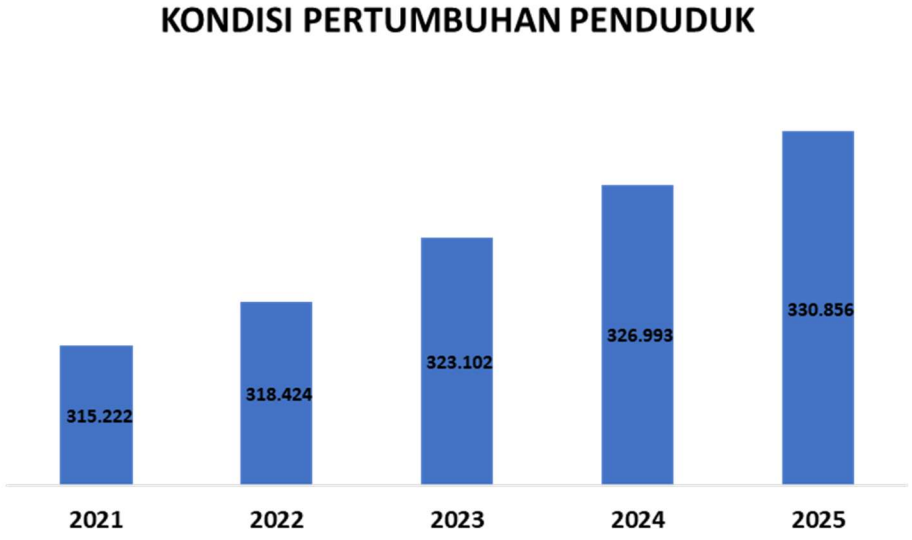
Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	318.424	323.102	326.993	330.856
2	PDRB Harga Berlaku (Rp miliar)	9.645,63	10.489,69	11.226,93	12.051,74
3	PDRB Harga Konstan (Rp miliar)	6.315,72	6.615,95	6.931,24	7.248,51
4	PDRB Perkapita ADHB (Rp Juta)	30.291,80	32.465,60	34.493,55	36.426,00
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,25	4,75	4,77	4,58
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,93	8,54	8,21	7,47
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,07	1,03	1,21	1,10
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	76,43	76,86	77,48	78,09
9	Gini Rasio (%)	0,2420	0,2620	0,2420	0,249

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara mengalami pertumbuhan relatif tidak begitu tinggi dari Tahun ke Tahun. Jumlah penduduk pada Tahun 2023 sebanyak 323.102 jiwa, pada Tahun 2024 sebanyak 326.996 jiwa, dan pada tahun 2025 sebanyak 330.856 atau bertambah sebanyak 3.863 jiwa atau naik 1,18% sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.

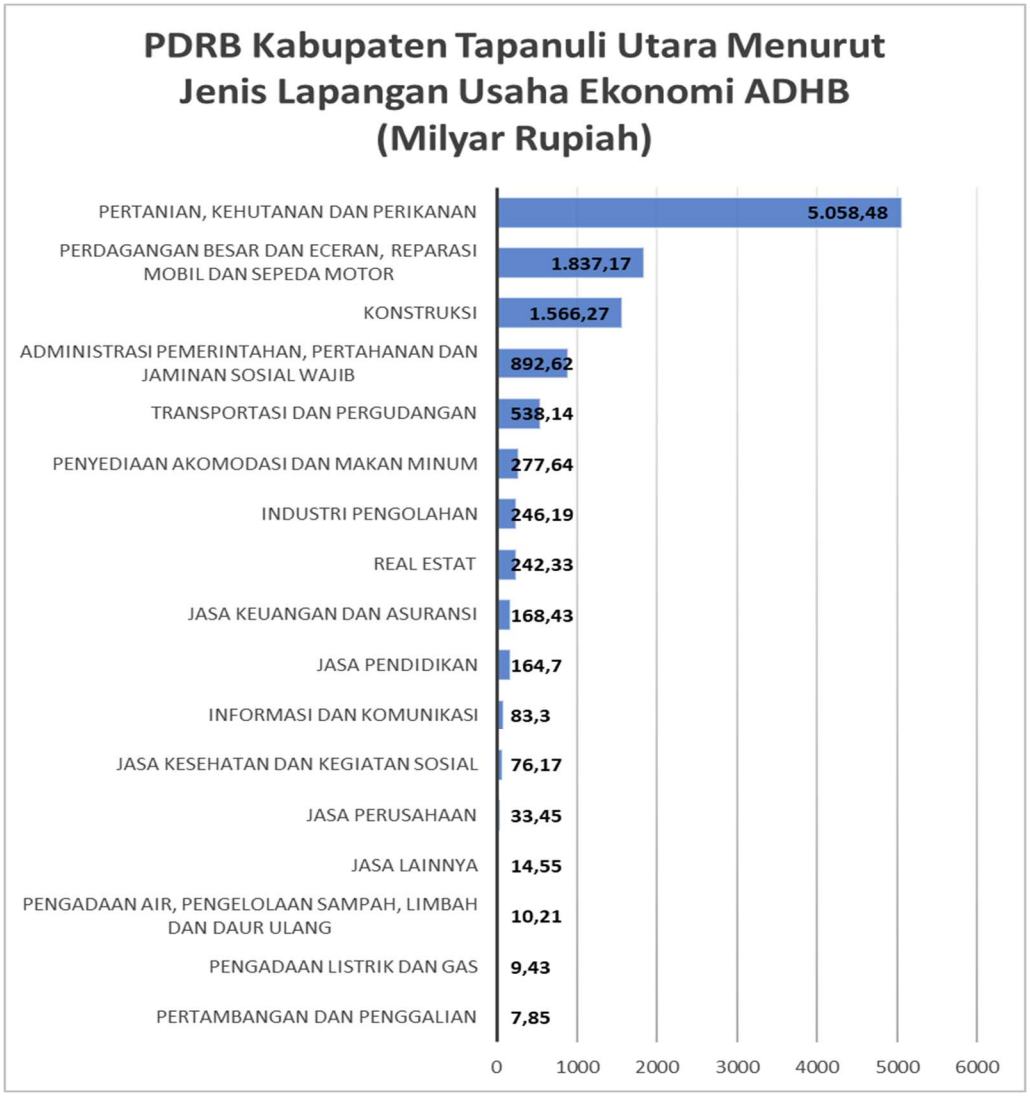


b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Hal tersebut dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa.

Perkembangan PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara setiap Tahunnya menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini dapat dilihat PDRB ADHB pada Tahun 2022 sebesar 9.645,63 miliar/rupiah, Tahun 2023 sebesar 10.489,69 miliar/rupiah, dan Tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 11.279,15 miliar/rupiah.

PDRB Kabupaten Tapanuli Utara menurut jenis lapangan usaha ekonomi ADHB dapat dilihat pada grafik berikut.



c. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah. Semakin tinggi/besar pendapatan per kapita, semakin makmur daerah tersebut, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata.

PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku pada Tahun 2023 sebesar Rp32.465.599,10 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi Rp34.493.551,85 mengalami peningkatan sebesar Rp2.027.952,75.

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Perkapita

No	Uraian	Satuan	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	323.102	326.993	330.856
2	PDRB Perkapita				
	- PDRB Perkapita harga berlaku	Rp.	32.465.599,10	34.493.551,85	36.426.000,00
	- PDRB Perkapita harga Konstan	Rp.	20.476.351,12	21.196.906,36	21.908.000,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan Tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebesar 4,58 persen, sedangkan Tahun 2024 sebesar 4,77 persen.

e. Tingkat Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah seluruh dunia di semua negara. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya mengurangi angka kemiskinan. Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan sebesar 8,54 persen, pada Tahun 2024 menurun menjadi sebesar 8,21 persen dan pada Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar 7,47 persen.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan menurun sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2023 sebesar 1,03 persen dan pada Tahun 2024 menjadi sebesar 1,21 persen dan pada Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,10 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah :

1. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan Angkatan Kerja dengan lapangan kerja yang tersedia;
2. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja sehingga sulit untuk mencari pekerjaan ataupun berwirausaha;
3. Terjadinya PHK atau kontrak kerja yang telah berakhir;
4. Berhenti bekerja atas kemauan sendiri (*resign*) karena faktor tertentu.

g. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapanuli Utara Tahun 2025 mencapai 78,09 persen, meningkat 0,61 poin (0,79%) dibandingkan Tahun sebelumnya (77,48). Selama 2023–2025, IPM Tapanuli Utara mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Apabila dibandingkan nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional pada Tahun 2022-2024, maka capaian nilai IPM masih lebih tinggi, namun masih perlu upaya serius Terutama dalam meningkatkan pemerataan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan sehingga angka rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup meningkat.

Peningkatan IPM didukung oleh semua peningkatan komponen seperti perlunya peningkatan capaian rata-rata lama sekolah untuk mengejar angka minimal wajib belajar 12 Tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMA. Kemudian komponen Harapan Lama Sekolah juga perlu ditingkatkan agar generasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dapat mengenyam pendidikan yang lebih lama sehingga dapat membuka pintu peluang yang lebih besar lagi serta dapat membantu mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang lebih baik untuk kesejahteraan. Dan komponen usia harapan hidup, apabila usia harapan hidup semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula peluang masyarakat untuk berumur panjang sehingga perlu dijaga dan ditingkatkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

h. Gini Rasio

Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tapanuli Utara dari Tahun ke Tahun mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Faktor yang menyebabkan gini ratio meningkat adalah karena berubahnya distribusi pengeluaran pada kelompok-kelompok ekonomi di Tapanuli Utara. Jika gini ratio meningkat, artinya masyarakat dengan ekonomi terbawah, peningkatan pengeluarannya lebih kecil jika dibandingkan dengan kelompok menengah ke atas. Gini ratio meningkat dapat terjadi dikarenakan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat semakin baik terutama di kelompok ekonomi menengah dan tinggi.

Pada Tahun 2025, Rasio Gini Kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2024 yaitu dari angka 0,242 menjadi 0,249. Dengan menurunnya gini rasio dapat menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan semakin merata, kesenjangan sosial semakin mengecil, akses dan kesempatan Pembangunan semakin merata.

i. Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.

1. Fungsi Pendidikan.

Jumlah alokasi anggaran untuk Fungsi Pendidikan pada APBD murni yaitu sebesar Rp496.851.733.567,58 dari total belanja sebesar Rp1.439.983.018.162,20 atau dengan rasio 34,50% sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp475.972.219.467,84 dari total belanja sebesar Rp1.394.378.083.538,86 dengan rasio 34,14%. Alokasi mandatory fungsi pendidikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No.	Uraian	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Total Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan	496.851.733.567,58	475.972.219.467,84	466.249.918.654,00
2	Total Belanja Daerah	1.439.983.018.162,20	1.394.378.083.538,86	1.338.924.060.440,91
3	**Persentase Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan (Minimal 20%)**	**34,50%**	**34,14%**	**34,82%**

2. Fungsi Kesehatan

Jumlah Alokasi Anggaran untuk Fungsi Kesehatan pada APBD sebesar Rp302.964.815.459,00 dengan rasio 32,57% dan realisasi sebesar Rp307.006.906.329,00 atau 101,33% dari target yang ditetapkan. Perhitungan alokasi dan realisasi anggaran fungsi kesehatan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	**a. Belanja pada Dinas Kesehatan:**	**174.881.222.468,00**	**170.175.359.786,00**	**97,31%**
	1) Belanja Operasi:	173.163.916.045,00	168.832.663.384,00	97,50%
	a. belanja pegawai;	93.959.020.063,00	92.197.537.223,00	98,13%
	b. belanja barang dan jasa;	79.204.895.982,00	76.635.126.161,00	96,76%
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00%
	2) Belanja Modal;	1.717.306.423,00	1.342.696.402,00	78,19%
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	**128.083.592.991,00**	**136.831.546.543,00**	**106,83%**
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00%
	2) Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00%
	3) RSUD	114.428.292.020,00	123.420.125.956,00	107,86%
	4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	13.655.300.971,00	13.411.420.587,00	98,21%
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	302.964.815.459,00	307.006.906.329,00	101,33%
3.	**Total Belanja Daerah**	**1.394.378.083.538,86**	**1.338.924.060.440,91**	**96,02%**
4.	**Gaji ASN**	**464.229.530.021**	**455.313.936.002,00**	**98,08%**
5.	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)**	**930.148.553.518,02**	**883.610.124.438,91**	**95,00%**
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	**32,57%**	**34,74%**	

3. Fungsi Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.876.780.800,00 dengan realisasi sebesar Rp3.363.337.668,00 atau 86,76% dari target yang ditetapkan dengan rasio alokasi sebesar 0,28% ***(belum memenuhi)***.

4. Fungsi Infrastruktur

Alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp220.658.376.265,46 dari total belanja daerah diluar belanja transfer sebesar Rp1.170.687.663.062,20 dengan persentase 18,85% sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp204.808.104.782,14 dari total belanja daerah diluar belanja transfer sebesar Rp1.113.037.203.714,86 dengan persentase 18,40% ***(belum memenuhi).*** Perhitungan Alokasi anggaran dan realisasi Belanja Infrastruktur sebagaimana berikut.

Tabel 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No.	Uraian	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Total Alokasi *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	220.658.376.265,46	204.808.104.782,14	207.065.402.874,91
2	Total Belanja Daerah Diluar Belanja Transfer	1.170.687.663.062,20	1.113.037.203.714,86	1.086.715.734.522,91
3	**Persentase Alokasi *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (minimal 40%)**	**18,85%**	**18,40%**	**19,05%**

5. Alokasi Anggaran Penanganan Inflasi

Alokasi anggaran untuk penanganan inflasi Tahun 2025 sebesar Rp32.899.159.207,24 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran Penanganan Inflasi

NO	URAIAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN (Rp)	REALISASI SUB KEGIATAN (Rp)	%
A	*K1 - Ketersediaan Pasokan*	*6.000.000,00*	*0,00*	*0*
1	1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.000.000,00	0,00	0
B	*K2 - Keterjangkauan Harga*	*16.196.475.989,02*	*14.676.611.275,10*	*90,62%*
1	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.038.107.500,00	2.010.120.096,00	98,63%
2	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12.000.000,00	11.304.900,00	94,21%
3	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	110.000.000,00	8.383.817,00	7,62%
4	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.500.000.000,00	2.279.050.000,00	91,16%
5	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	23.612.000,00	18,89%
6	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	25.000.000,00	22.500.000,00	90,00%
7	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	55.000.000,00	54.437.000,00	98,98%
8	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.057.750.000,00	869.957.785,00	82,25%
9	3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	493.267.214,00	487.604.435,00	98,85%
10	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	728.688.000,00	536.625.000,00	73,64%
11	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	880.448.710,00	861.812.179,00	97,88%
12	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	93.935.500,00	93.545.568,00	99,58%
13	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	621.323.995,00	594.624.400,00	95,70%

NO	URAIAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN (Rp)	REALISASI SUB KEGIATAN (Rp)	%
14	3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	250.000.000,00	244.827.730,00	97,93%
15	3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	278.900.000,00	269.315.809,00	96,56%
16	3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	300.000.000,00	298.409.190,00	99,47%
17	3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	7.500.000,00	7.460.000,00	99,47%
18	3.27.02.2.01.0015 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	620.000.000,00	618.345.115,00	99,73%
19	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	32.373.800,02	31.195.800,00	96,36%
20	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	618.536.800,00	617.631.400,00	99,85%
21	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	319.999.600,00	319.522.934,24	99,85%
22	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	959.999.700,00	958.027.093,97	99,79%
23	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	428.546.000,00	419.615.590,00	97,92%
24	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	626.721.300,00	619.143.670,00	98,79%
25	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.240.316.200,00	1.687.369.763,00	75,32%
26	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	125.541.670,00	112.099.999,89	89,29%
27	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	647.520.000,00	620.070.000,00	95,76%
C	*K3 - Kelancaran Distribusi*	*16.613.864.868,22*	*16.458.227.561,95*	*99,06%*
1	1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan	1.936.800.000,00	1.933.591.000,00	99,83%
2	1.03.10.2.01.0033 - Rekonstruksi Jalan	3.668.180.000,00	3.610.279.276,00	98,42%
3	1.03.10.2.01.0040 - Pembangunan Jembatan	1.353.500.000,00	1.344.617.018,00	99,34%
4	1.03.10.2.01.0044 - Rehabilitasi Jalan	4.739.110.668,22	4.669.874.107,00	98,54%
5	1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan	790.656.000,00	782.187.347,00	98,93%
6	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.999.999.700,00	3.992.968.826,00	99,82%
7	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	121.829.000,00	121.207.187,95	99,49%
8	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.789.500,00	3.502.800,00	92,43%

NO	URAIAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN (Rp)	REALISASI SUB KEGIATAN (Rp)	%
D	*K4 - Komunikasi Efektif*	*82.818.350,00*	*78.055.645,00*	*94,25%*
1	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	3.072.000,00	61,44%
2	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	5.000.000,00	4.976.400,00	99,53%
3	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48.034.600,00	46.970.600,00	97,78%
4	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24.783.750,00	23.036.645,00	92,95%
	Total	**32.899.159.207,24**	**31.212.894.482,05**	**94,87%**

6. *Mandatory* Alokasi Dana Desa (ADD)

Anggaran untuk Alokasi Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp74.729.395.040,00 dan realisasi sebesar Rp74.671.554.100,00 atau mencapai 99,92%. Perincian perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 7. Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2025

NO.	URAIAN	TA 2025		
		MURNI (Rp)	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)
1	DAU	698.160.082.000,00	675.701.250.000,00	675.701.250.000,00
2	DBH	69.448.406.000,00	75.444.726.000,00	75.444.726.000,00
3	DBH CHT	(2.189.153.000,00)	(2.258.640.000,00)	(2.258.640.000,00)
4	DBH SAWIT	(2.700.114.000,00)	(2.700.114.000,00)	(2.700.114.000,00)
	Jumlah	**762.719.221.000,00**	**756.104.730.000,00**	**746.187.222.000,00**
I	**Alokasi ADD (10% DARI DAU + DBH - DBH CHT - DBH SAWIT)**	76.271.922.100,00	74.618.722.200,00	74.618.722.200,00
II	**Belanja ADD pada APBD**	76.271.922.100,00	74.729.395.040,00	74.671.554.100,00
III	**Persentase ADD**	**100,00%**	**100,15%**	**100,07%**

7. *Mandatory* Belanja Pegawai

Anggaran untuk *mandatory spending* belanja pegawai pada Tahun 2025 sebesar Rp587.521.436.874,84 dari total belanja sebesar Rp1.394.378.083.538,86 atau dengan rasio 42,14% (***belum memenuhi***). Perincian perhitungan *mandatory spending* Belanja Pegawai Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 8. Perhitungan *Mandatory Spending* Belanja Pegawai Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	**Belanja Pegawai**	**695.133.162.874,84**	
2	Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang):		
	a. Pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	102.209.084.000,00	
	b. Pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.655.500.000,00	
	c. Pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	3.747.142.000,00	
	Jumlah Pengurang (a+b+c)	**107.611.726.000,00**	
3	**Total Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)**	**587.521.436.874,84**	
4	**Total Belanja Daerah**	**1.394.378.083.538,86**	
5	**Persentase (3:4)**	**42,14%**	**Tidak Memenuhi**

2.2. Perubahan APBD dan Penjelasannya

Sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA 2025 baik dari segi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 9. Struktur Perubahan APBD TA 2025

No	Uraian	APBD TA 2025 (Rp)	P-APBD TA 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan	1.497.340.383.213,00	1.445.042.643.252,00	(52.297.739.961,00)
2.	Belanja	1.439.983.018.162,20	1.389.697.079.151,86	(50.285.939.010,34)
3.	Surplus/(Defisit)	57.357.365.050,80	55.345.564.100,14	(2.011.800.950,66)
4.	Pembiayaan:			
	a. Penerimaan	12.826.269.630,20	10.404.650.909,86	(2.421.618.720,34)
	b. Pengeluaran	70.183.634.681,00	65.750.215.010,00	(4.433.419.671,00)
5.	Pembiayaan neto	(57.357.365.050,80)	(55.345.564.100,14)	2.011.800.950,66
6.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp1.445.042.643.252,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.297.739.961,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp1.497.340.383.213,00 atau turun 3,49%.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Perubahan Pendapatan Daerah TA 2025

Kode Rek	Uraian	APBD 2025	P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**155.596.311.586,00**	**154.000.000.000,00**	**(1.596.311.586,00)**
4.1.01	Pajak Daerah	41.393.750.000,00	38.503.750.000,00	(2.890.000.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	96.384.058.000,00	94.877.368.000,00	(1.506.690.000,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.952.342.296,00	9.057.524.807,00	(1.894.817.489,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	6.866.161.290,00	11.561.357.193,00	4.695.195.903,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.318.321.743.127,00**	**1.262.595.437.124,00**	**(55.726.306.003,00)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.239.234.301.000,00	1.188.936.596.000,00	(50.297.705.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.087.442.127,00	73.658.841.124,00	(5.428.601.003,00)
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**23.422.328.500,00**	**28.447.206.128,00**	**5.024.877.628,00**
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.422.328.500,00	28.447.206.128,00	5.024.877.628,00
JUMLAH PENDAPATAN		**1.497.340.383.213,00**	**1.445.042.643.252,00**	**(52.297.739.961,00)**

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

Target pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp52.297.739.961,00 pada Perubahan APBD TA 2025. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi capaian sampai dengan akhir tahun berdasarkan evaluasi atas realisasi pendapatan daerah sampai dengan kondisi semester I TA 2025. Penyesuaian target pendapatan daerah juga dipengaruhi oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana berdasarkan regulasi tersebut terjadi

pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang sebelumnya telah dialokasi pada APBN Tahun Anggaran 2025. Secara garis besar, penyesuaian pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2025 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, mengalami pengurangan target sebesar Rp1.596.311.586,00 yang terdiri dari pengurangan Pajak Daerah sebesar Rp2.890.000.000,00, Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp1.506.690.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang sebesar Rp1.894.817.489,00 serta pertambahan target Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp4.695.195.903,00;
2. Pendapatan Transfer, mengalami pengurangan sebesar Rp55.726.306.003,00 yang terdiri dari pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp50.297.705.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp5.428.601.003,00;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah bertambah sebesar Rp5.024.877.628,00 bersumber dari penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Pendapatan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi.

2) Perubahan Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp50.285.939.010,34 dari target sebelum perubahan sebesar Rp1.439.983.018.162,20 menjadi sebesar Rp1.389.697.079.151,86 atau turun sebesar 3,49 %. Untuk lebih jelasnya anggaran belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Perubahan Belanja Daerah TA 2025

Kode Rek	URAIAN	APBD 2025	P-APBD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.054.749.854.548,20**	**1.034.871.933.325,86**	**(19.877.921.222,34)**
5.1.01	Belanja Pegawai	743.739.784.891,74	700.034.185.582,84	(43.705.599.308,90)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.214.003.870,46	316.143.930.358,02	16.929.926.487,56
5.1.03	Belanja Bunga	1.305.522.106,00	1.305.522.106,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.980.312.480,00	15.790.059.080,00	6.809.746.600,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.510.231.200,00	1.598.236.199,00	88.004.999,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**110.937.808.514,00**	**65.466.288.944,00**	**(45.471.519.570,00)**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.568.879.964,00	23.777.992.589,00	(18.790.887.375,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.942.209.550,00	7.497.281.776,00	555.072.226,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.911.536.000,00	19.537.381.777,00	(14.374.154.223,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.515.183.000,00	14.588.132.802,00	(12.927.050.198,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000,00**	**8.017.977.058,00**	**3.017.977.058,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	8.017.977.058,00	3.017.977.058,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**269.295.355.100,00**	**281.340.879.824,00**	**12.045.524.724,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	269.295.355.100,00	281.340.879.824,00	12.045.524.724,00
JUMLAH BELANJA		**1.439.983.018.162,20**	**1.389.697.079.151,86**	**(50.285.939.010,34)**

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara

3) Perubahan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp10.404.650.909,86 mengalami penurunan sebesar Rp2.421.618.720,34 dari target sebelumnya sebesar Rp12.826.269.630,20 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp65.750.215.010 mengalami penurunan sebesar Rp4.433.419.671,00 dari target sebelumnya sebesar Rp70.183.634.681,00 yang direncanakan untuk penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp1.000.000.000,00 serta untuk pembayaran cicilan pokok utang pinjaman PEN Tahun 2020 dan pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar Rp64.750.215.010,00.

2.3. Kebijakan Keuangan

APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkannya pada APBD Tahun 2025 hingga Semester I, maka perlu dilakukan Perubahan APBD yang disepakati bersama antara Bupati Tapanuli Utara dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun asumsi penyusunan perubahan APBD TA 2025 sebagai berikut:

1. Penyesuaian belanja daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
3. Penyesuaian rincian alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya menurut provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Penyesuaian target penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan mempertimbangkan hasil capaian hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2025;
6. Hasil evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan APBD Tahun 2025 terdapat beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian, pergeseran kode belanja dan perubahan *output* dalam rangka penyesuaian terhadap prioritas dan kapasitas keuangan daerah;
7. Penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 (*Audited*).

Kebijakan keuangan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA. Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.
- Pendapatan pajak dan retribusi meliputi jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, sebagai berikut :
  1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  2) Pajak Reklame;
  3) Pajak Air Tanah (PAT);
  4) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  5) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:

1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri atas:
   - Makanan dan/atau minuman;
   - Tenaga listrik;
   - Jasa perhotelan;
   - Jasa parkir; dan
   - Jasa kesenian dan hiburan;
3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
4) Pajak Sarang Burung Walet.

- Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Retribusi jasa umum, meliputi:
  1) pelayanan kesehatan;
  2) pelayanan kebersihan;
  3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  4) pelayanan pasar; dan
  5) pengendalian lalu lintas.
- Retribusi jasa usaha, meliputi:
  1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  4) penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
  7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  9) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
  10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Retribusi perizinan tertentu, meliputi:

1) persetujuan bangunan gedung;
2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
3) pengelolaan pertambangan rakyat, yang telah ditetapkan dalam satu peraturan daerah pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

- Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsen efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025;
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha. Pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.;
- Penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset

daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

- Kerja sama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;

b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

c) Lain-lain PAD yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah diurai ke dalam objek yang terdiri atas:

- Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
- Hasil Kerja Sama Daerah;
- Jasa Giro;
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- Pendapatan Bunga;
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;

- Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- Pendapatan dari Pengembalian;
- Pendapatan BLUD;
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*);
- Pendapatan Zakat, *Infaq*, *Shadaqah*, dan Wakaf;
- Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
- Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

(1) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(a) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

i. Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

i. DAK Fisik; dan

ii. DAK Non Fisik.

(2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

(3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

(1) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi Tahun Anggaran 2025.

(2) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

- Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah

Pendapatan Hibah kepada Daerah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah kepada Daerah termasuk sumbangan dan/atau bantuan dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri atau pihak lain berupa antara lain tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejenis, bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kecuali lain diamanatkan peraturan perundang-undangan.

b) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi diuraikan ke dalam jenis terdiri dari :

a) Belanja Pegawai

belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran belanja pegawai bagi:

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan

(3) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

(2) Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

(6) Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

(7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta

ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah. Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah. Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:

(a) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

(b) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

(c) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

(10) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif. Kriteria Pemberian TPP ASN berdasarkan :

(a) Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

(b) Tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

(c) Kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;

(d) Kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

(e) Kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;

(f) Kriteria pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

(g) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

c) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah. Belanja Bunga berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman, Belanja Bunga Utang Obligasi dan Belanja Pembayaran Imbalan Sukuk Daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.

d) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

e) Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Belanja Imbalan

Belanja Imbalan Sukuk Daerah digunakan untuk menganggarkan pembayaran imbalan atas penerbitan sukuk daerah. Penganggaran didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian penerbitan sukuk daerah. Pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian sukuk daerah.

2) Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

(1) Belanja modal tanah;

(2) Belanja modal peralatan dan mesin;

(3) Belanja modal bangunan dan gedung;

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

(5) Belanja modal aset tetap lainnya;

(6) Belanja modal aset lainnya.

c) Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan bersifat tidak berulang yang terjadi pada Tahun sebelumnya. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

(1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

(2) Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(1) Bantuan keuangan antardaerah provinsi;

(2) Bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;

(3) Bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

(4) Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya;

(5) Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

a) SiLPA

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam TA berkenaan. Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) TA menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam TA berkenaan. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan pada SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya. Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah. Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah. Nilai bersih

maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) TA terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APBD. Dalam hal tertentu yaitu kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan. Pembiayaan utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya adalah penerimaan pembiayaan di luar pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan pembiayaan hutang daerah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir TA belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a) Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) TA. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dukungan anggaran pendanaan kegiatan pemilihan gubernur/bupati/wali kota. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari: DAK; pinjaman daerah; dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda mengenai pembentukan dana cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; sumber dana cadangan; dan TA pelaksanaan dana cadangan.

b) Penyertaan Modal Daerah.

Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD TA 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda

dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah

(1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.`

(2) Pembelian Kembali Obligasi;

Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkan. Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut.

(3) Pembelian Kembali Sukuk

Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Sukuk Daerah yang diterbitkan. Sukuk Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Sukuk Daerah tersebut.

d) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya merupakan pengeluaran pembiayaan lainnya selain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok pembiayaan utang daerah, pembentukan DAD yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

d. Kebijakan Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. defisit APBD

merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Defisit APBD ditutup dari pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

e. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah Daerah menganggarkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil;

2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan;

3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pendapatan Daerah pada TA 2025 realisasi sebesar Rp1.439.479.093.114,60 atau mencapai 99,29% dari anggaran sebesar Rp1.449.723.647.639,00, belanja daerah pada TA 2025 realisasi sebesar Rp1.339.060.114.362,91 atau mencapai 96,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.394.378.083.538,86.

Penerimaan Pembiayaan di TA 2025 yakni Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp10.624.390.091,06 atau mencapai 102,11% dari anggaran sebesar Rp10.404.650.909,86 sedangkan pengeluaran pembiayaan TA 2025 realisasi sebesar Rp51.437.488.606,00 atau mencapai 78,23% dari anggaran sebesar Rp65.750.215.010,00.

Perincian Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 12. Perincian Realisasi APBD TA 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4	**Pendapatan Daerah**	**1.449.723.647.639,00**	**1.439.479.093.114,60**	**99,29**	**1.437.280.040.724,40**
5	**Belanja Daerah**	**1.394.378.083.538,86**	**1.339.060.114.362,91**	**96,03**	**1.375.858.189.855,41**
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.404.650.909,86	10.624.390.091,06	102,11	18.264.856.637,87
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	65.750.215.010,00	51.437.488.606,00	78,23	69.282.056.597,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**0,00**	**59.605.880.236,75**		**10.404.650.909,86**

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

4.5. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.439.479.093.114,60 atau 99,29% dari target sebesar Rp1.449.723.647.639,00. Perincian realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 13. Perincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4	**Pendapatan Daerah**	**1.449.723.647.639,00**	**1.439.479.093.114,60**	**99,29**	**1.437.280.040.724,40**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**154.000.000.000,00**	**156.677.606.847,60**	**101,73**	**133.655.052.931,40**
4.1.01	Pajak Daerah	38.503.750.000,00	37.626.009.629,67	97,72	27.663.738.746,01
4.1.02	Retribusi Daerah	94.877.368.000,00	96.559.544.688,00	101,77	93.784.976.878,78
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.057.524.807,00	9.057.524.807,00	100,00	8.451.510.307,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.561.357.193,00	13.434.527.722,93	116,20	3.754.826.999,61
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.261.743.272.124,00**	**1.249.320.018.091,00**	**99,01**	**1.281.410.872.862,00**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.184.084.431.000,00**	**1.174.290.880.409,00**	**99,17**	**1.235.714.467.229,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.029.717.245.029,00
4.2.01.05	Dana Desa	193.023.433.000,00	163.948.720.034,00	84,93	199.129.952.200,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.881.571.000,00	14.881.571.000,00	100,00	6.867.270.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	75.444.726.000,00	75.444.726.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	675.701.250.000,00	696.974.246.628,00	103,14	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	225.033.451.000,00	223.041.616.747,00	99,11	0,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**77.658.841.124,00**	**75.029.137.682,00**	**96,61**	**45.696.405.633,00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	71.662.700.124,00	68.532.996.682,00	95,63	45.696.405.633,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.996.141.000,00	6.496.141.000,00	108,33	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**33.980.375.515,00**	**33.481.468.176,00**	**98,53**	**22.214.114.931,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	8.818.078.129,00
4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100	0,00

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.980.375.515,00	28.481.468.176,00	98,27	13.396.036.802,00

Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.339.060.114.362,91 atau mencapai 96,03% dari anggaran sebesar Rp1.394.378.083.538,86. Perincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14. Perincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**1.394.378.083.538,86**	**1.339.060.114.362,91**	**96,03**	**1.375.858.189.855,41**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.029.204.042.106,86**	**1.011.039.649.562,83**	**98,23**	**1.014.674.115.403,47**
5.1.01	Belanja Pegawai	695.133.162.874,84	680.660.593.870,00	97,91	621.410.779.418,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.377.058.947,02	312.600.485.856,83	99,11	318.291.641.973,47
5.1.03	Belanja Bunga	1.305.525.006,00	1.305.525.006,00	100,00	2.207.835.420,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.790.059.080,00	15.127.032.130,00	95,8	71.990.363.892,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.598.236.199,00	1.346.012.700,00	84,21	773.494.700,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**63.350.601.533,00**	**60.432.377.048,08**	**95,39**	**99.079.324.655,94**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.553.056.681,00	20.943.174.380,71	92,86	26.958.423.144,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.497.281.776,00	6.342.671.277,29	84,59	14.949.241.861,74
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.859.905.960,00	18.687.651.374,08	99,08	56.854.991.209,34
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.440.357.116,00	14.458.880.016,00	100,12	111.469.430,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	41.199.010,86
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.482.560.075,00**	**15.383.387.034,00**	**75,1**	**3.454.947.220,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.482.560.075,00	15.383.387.034,00	75,1	3.454.947.220,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**281.340.879.824,00**	**252.208.325.918,00**	**89,64**	**258.649.802.576,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	281.340.879.824,00	252.208.325.918,00	89,64	258.649.802.576,00

Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara

3.1.3. Realisasi Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp10.624.390.091,06 atau 102,11% dari anggaran sebesar Rp10.404.650.909,86 sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp51.437.488.606,00 atau 78,23% dari anggaran sebesar Rp65.750.215.010,00. Perincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 15. Perincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
6	**Pembiayaan Daerah**	**(55.345.564.100,14)**	**(40.813.098.514,94)**	**73,74**	**(51.017.199.959,13)**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**10.404.650.909,86**	**10.624.390.091,06**	**102,11**	**18.264.856.637,87**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.404.650.909,86	10.624.390.091,06	102,11	18.264.856.637,87
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**65.750.215.010,00**	**51.437.488.606,00**	**78,23**	**69.282.056.597,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	64.750.215.010,00	51.437.488.606,00	79,43	69.282.056.597,00

4.5. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 realisasi Pendapatan Transfer masih mendominasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan kontribusi terbanyak yaitu 87,36%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,95% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 1,69% dari total pendapatan. Sedangkan rasio kemandirian daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Dana Perimbangan hanya sebesar 12,53%. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain:

a. Potensi PAD yang terbatas

   Sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya didominasi oleh sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki keterbatasan potensi PAD, khususnya Pajak Daerah. Jumlah objek pajak seperti hotel, restoran, reklame dan hiburan tidaklah sebesar daerah yang pertumbuhan ekonominya sudah ditopang sektor industri dan jasa. Hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sangat bergantung pada jenis Pajak Daerah tertentu, seperti PBB Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maupun penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Data potensi yang belum akurat

   Pendataan potensi PAD belum dilakukan secara komprehensif dan tidak dilaksanakan secara rutin, sehingga objek pajak dan retribusi belum dapat dipetakan dengan baik dan berpotensi tidak tergali secara optimal. Data potensi yang tidak mutakhir berdampak pada proses penetapan target PAD yang cenderung didasarkan pada capaian realisasi tahun sebelumnya.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur pengelola pajak belum memiliki kompetensi yang memadai dalam hal melakukan analisa potensi PAD yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, pemanfaatan teknologi informasi terkini serta keahlian khusus lainnya seperti Penilai Pajak, Pemeriksa Pajak maupun Juru Sita Pajak.

d. Belum Optimalnya Pembayaran Non Tunai

Belum optimalnya transaksi pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai berdampak pada munculnya peluang penyalahgunaan pajak dan retribusi yang dilakukan oleh petugas pemungut. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus terus berupaya mengoptimalkan elektronifikasi transaksi secara non tunai, termasuk penerapan sistem informasi dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

e. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak sesuai dengan harapan sangat mempengaruhi capaian realisasi setiap tahunnya. Masyarakat masih cenderung untuk menghindar dari kewajiban perpajakan dan kepatuhan pelaporan pajak. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus terus melakukan sosialisasi, himbauan, pendekatan persuasif bahkan tindakan penegakan regulasi yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah.

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah terkait dengan belanja daerah antara lain:

a. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib mengikat yang cukup besar yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan ASN, gaji dan tunjangan KDH/ WKDH dan gaji tunjangan DPRD;

b. Penyesuaian program kegiatan berdasarkan sumber dana pembiayaan kegiatan dimaksud;

c. Penyesuaian terhadap pemotongan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020;

d. Belum semua aparat pengelola keuangan khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) memahami dengan baik mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat keterlambatan baik dalam proses pencairan keuangan maupun penyusunan pertanggungjawaban keuangan;

e. Adanya hambatan dan kendala yang bersifat teknis maupun administratif yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan;

f. Sebagian besar SKPD masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual seperti proses jurnal, pemahaman antara beban dan belanja, pengakuan aset tetap, penyusutan aset tetap, pencatatan persediaan dan lainnya;

g. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan belum optimal, sehingga berdampak pada penyelesaian kegiatan yang mengalami kemunduran dari jadwal. Selain itu akan berakibat pada terlambatnya proses penatausahaan dan pelaporan;

h. Kurang optimalnya pemahaman dan penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan dan akuntansi pelaporan oleh para pengguna *(user)*;

i. Kesadaran masyarakat dan lembaga penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan masih rendah;

j. Dukungan infrastruktur yang belum terukur, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan, terutama antar desa/kecamatan;

k. Risiko bencana alam.

3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pengeluaran Pembiayaan meliputi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.5. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 bahwa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan antara lain sebagai berikut.

Tabel 16. Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	RSU Daerah Tarutung
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Ketenagakerjaan
10	Dinas Ketahanan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Dinas Perpustakaan
21	Dinas Pariwisata
22	Dinas Pertanian
23	Sekretariat Daerah
24	Inspektorat
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
27	Badan Pendapatan Daerah
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	Sekretariat DPRD
30	Kantor Kecamatan Tarutung
31	Kantor Kecamatan Siatas Barita
32	Kantor Kecamatan Adiankoting

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
33	Kantor Kecamatan Sipoholon
34	Kantor Kecamatan Pahae Julu
35	Kantor Kecamatan Pahae Jae
36	Kantor Kecamatan Purbatua
37	Kantor Kecamatan Simangumban
38	Kantor Kecamatan Sipahutar
39	Kantor Kecamatan Pangaribuan
40	Kantor Kecamatan Garoga
41	Kantor Kecamatan Siborongborong
42	Kantor Kecamatan Pagaran
43	Kantor Kecamatan Parmonangan
44	Kantor Kecamatan Muara
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD sebagai entitas pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai BUD yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan *(matching cost against revenue principle)* tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah Tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan atau CaLK.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.5. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pendapatan-LRA;
2) Belanja;
3) Surplus/Defisit-LRA;
4) Pembiayaan; dan
5) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1) SAL awal;
2) Penggunaan SAL;

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;

4) Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya;

5) Lain-lain; dan

6) SAL akhir.

Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1) Kas dan setara kas;

2) Investasi jangka pendek;

3) Piutang;

4) Persediaan;

5) Investasi jangka panjang;

6) Aset tetap;

7) Aset lainnya;

8) Kewajiban jangka pendek;

9) Kewajiban jangka panjang; dan

10) Ekuitas.

Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut.

d. Laporan Operasional

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga ,dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu Tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

LO menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2) Beban dari kegiatan operasional;
3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
4) Kegiatan Non Operasional;
5) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga;
6) Pos Tidak Terduga; dan
7) Surplus/defisit-LO.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.

Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut.

e. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi
   a) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
   b) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:
      (1) Penerimaan Pajak Daerah;
      (2) Penerimaan Retribusi Daerah;
      (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
      (4) Penerimaan Transfer;
      (5) Penerimaan Hibah;
      (6) Penerimaan Dana Darurat; dan
      (7) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Tidak Terduga.

c) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

(1) Belanja Pegawai;

(2) Belanja Barang dan Jasa;

(3) Belanja Bunga;

(4) Belanja Subsidi;

(5) Belanja Hibah;

(6) Belanja Bantuan Sosial

(7) Belanja Lain-lain/Tidak Terduga; dan

(8) Belanja Transfer.

2) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

a) Penjualan Aset Tetap; dan

b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

a) Perolehan Aset Tetap; dan

b) Perolehan Aset Lainnya.

3) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

a) Penerimaan Utang Luar Negeri;

b) Penerimaan Utang Obligasi;

c) Pencairan Dana Cadangan;

d) Penerimaan Divestasi;

e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas;

f) Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah;

g) Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain

a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;

b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;

c) Pembentukan Dana Cadangan;

d) Penyertaan Modal Pemerintah;

e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;

f) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan pemerintah daerah;

g) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran Non Anggaran seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan pos-pos:

1) Ekuitas awal;

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir

Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;

4) Kebijakan akuntansi yang penting:
   a) Entitas akuntansi/pelaporan;
   b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
   c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
   d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
   e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
5) Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat tentang:
   a) Perincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; dan
   b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah;
7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:

1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi *(accountancy treatment)* atas transaksi yang terjadi.

a. Kebijakan Akuntansi Aset

1) Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

2) Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3) Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertiannya:

a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

c) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

b. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

a) Definisi Kas dan Setara Kas

(1) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

(3) Kas terdiri dari:

(a) Kas di Kas Daerah;
(b) Kas di Bendahara Penerimaan;
(c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
(d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)/ FKTP;

(e) Kas Dana BOS; dan
(f) Kas lainnya.

(4) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(5) Setara kas terdiri dari:

(a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
(b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

(6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS.

b) Pengakuan Kas dan Setara Kas

(1) Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:

(a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
(b) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

(2) Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

(3) Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(4) Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

c) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca.

d) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

(1) Perincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

(2) Perincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2) Piutang

a) Definisi Piutang

(1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

(2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

(3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

(4) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

b) Pengakuan Piutang

(1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

(a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

(b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

(2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

(a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

(b) Jumlah piutang dapat diukur.

c) Pengukuran Piutang

(1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

(a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

(b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

(c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

(2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan

harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

(a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

(b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan

(c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

(4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

(b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

(5) Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)*

Terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.

(7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

(8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

(a) Kualitas Piutang Lancar;

(b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

(c) Kualitas Piutang Diragukan; dan

(d) Kualitas Piutang Macet.

(9) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

(a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan

(b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

(10) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

i. Umur piutang kurang dari 1 Tahun;

ii. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;

iii. Wajib Pajak kooperatif;

iv. Wajib Pajak likuid; dan/atau

v. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

i. Umur piutang 1 sampai dengan 2 Tahun;

ii. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;

iii. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

iv. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

i. Umur piutang lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun;

ii. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;

iii. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

iv. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

i. Umur piutang diatas 3 Tahun;

ii. Wajib Pajak tidak ditemukan;

iii. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

iv. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure)*.

(11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

i. Umur piutang kurang dari 1 Tahun;

ii. Wajib Pajak kooperatif;

iii. Wajib Pajak likuid; dan/atau

iv. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

i. Umur piutang lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun;

ii. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

iii. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

i. Umur piutang lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun;

ii. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

iii. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

i. Umur piutang diatas 3 Tahun;

ii. Wajib Pajak tidak ditemukan;

iii. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

iv. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure)*.

(12) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

(a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

(b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;

(c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan

(d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

(13) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

(b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

(c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

(d) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

(14) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

(a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;

(b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

(c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

(15) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

(16) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d) Pemberhentian Pengakuan

(1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

(2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

(3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

(4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

(5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

(6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

(a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

i. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

ii. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

iii. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

(b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

(c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku *(write off)*. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

(7) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

(8) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima miliar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima miliar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

(9) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

(a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

(b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

(c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

(d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

(e) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

(f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan /peraturan *write off* di negara lain.

(g) Dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel.*

e) Pengungkapan Piutang

(1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

(b) Perincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

(c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

(d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

(2) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

(3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3) Persediaan

a) Definisi Persediaan

(1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

(1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

(2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

(3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

(3) Klasifikasi persediaan meliputi:

(1) Persediaan Alat Tulis Kantor;

(2) Persediaan Barang Cetakan;

(3) Persediaan Obat dan Alat Kesehatan;

(4) Persediaan Hewan dan Tanaman;

(5) Persediaan Aspal; dan

(6) Persediaan Lain-lain.

b) Pengakuan Persediaan

(1) Persediaan diakui:

(a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

(b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

(2) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c) Pengukuran Persediaan

(1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO.

(2) Persediaan disajikan sebesar:

(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(d) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

i. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

ii. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4) Investasi Jangka Panjang

a) Definisi Investasi Jangka Panjang

(1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

(3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

(4) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

(5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

(6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS.

b) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

(1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

(2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

(a) Deviden tunai;

(b) Deviden saham; dan

(c) Bagian laba.

(3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

(4) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

(5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

(b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

c) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

(1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

(2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non permanen yaitu:

(a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

(b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

(c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

(3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

(4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

(5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya;

(b) Metode ekuitas; dan

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

(7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

(8) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(9) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

d) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan perinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

(1) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

(a) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

(b) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

(c) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.

(d) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut.

Tabel 17. Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran

Uraian	Persentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran				
	Tidak Melampaui Jatuh Tempo	Jatuh Tempo 0-3 Bulan	Jatuh Tempo 4-9 Bulan	Jatuh Tempo 10-12 Bulan	Jatuh Tempo Lebih dari 12 Bulan
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0%	20%	50%	75%	100%

(e) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

c. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

e) Masa manfaat adalah:

(1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

(2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

f) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

h) Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

l) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

(3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

p) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Aset Tetap

a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Berwujud;

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

(6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Pengukuran Aset Tetap

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

f) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 18. Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold.* Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6) Aset Tetap Digunakan Bersama

a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

7) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum

a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

8) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

9) Aset Donasi

a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

10) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (s*ubsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (s*ubsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

(a) Bertambah ekonomis/efisien;

(b) Bertambah umur ekonomis;

(c) Bertambah volume; dan/atau

(d) Bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

(3) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

(4) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 19. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap (*Capitalization Thresholds*)

No	Aset Tetap	Kondisi	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah		**Tidak dibatasi**
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuan barang	**Rp300.000,00**
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin (over haul)	Selain angkutan darat bermotor beroda dua	**Rp5.000.000,00**
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin *(over haul)*	Angkutan darat bermotor beroda dua	**Rp1.000.000,00**
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuan barang	**Rp500.000,00**
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		**Rp10.000.000,00**
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		**Tidak Dibatasi**
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon		**Rp300.000,00**
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan kepustakaan		**Tidak dibatasi**
	Bercorak kesenian /kebudayaan		**Rp300.000,00**
	Hewan/ternak/tanaman	Sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/atau pemberian bantuan	**Tidak dibatasi**
6	**Konstruksi dalam pengerjaan**		**Tidak dibatasi**

d. Penyusutan

1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan tahun perolehan.

2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

   a) Nilai residu 0;

   b) Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang.

3) Untuk aset yang diperoleh pada Tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun berkenaan.

4) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak, dan Tanaman.

5) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

6) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

   a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

   b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

   c) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi.

7) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

   a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

   b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

8) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

   Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

   Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

9) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

   a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan perinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(a) Penambahan;

(b) Pelepasan;

(c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan

(d) Mutasi aset tetap lainnya.

(3) Informasi penyusutan, meliputi:

(a) Nilai penyusutan;

(b) Metode penyusutan yang digunakan;

(c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

(1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode Tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

(3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

(4) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

(5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.

(6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

(7) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

(8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

(9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

e. Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan

1) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

(1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

(1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

(2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

(1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

(2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

(3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;

(4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan

(5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

d) Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

(1) Asuransi;

(2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

(3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

4) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a) Perincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;

d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

e) Retensi.

f. Aset Properti Investasi

1) Definisi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Properti Investasi

Pemerintah Daerah dapat memiliki Properti Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

a) Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau

b) Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

3) Pengakuan

Properti Investasi diakui sebagai Aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu Aset harus memenuhi kriteria:

a) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari Aset Properti Investasi; dan

b) biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

4) Pengukuran

a) Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan Properti Investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

(1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa Properti investasi ke kondisi siap digunakan);

(2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

(3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan Properti Investasi.

b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku. Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas Properti Investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, Properti Investasi telah direvaluasi seluruhnya.

c) Penyajian Properti Investasi

Properti Investasi disajikan sebagai Aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti Investasi disajikan pada neraca terpisah dari kelompok Aset tetap dan Aset lainnya.

d) Pengungkapan

Pengungkapan Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

(2) Metode penyusutan yang digunakan;

(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

(5) Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti investasi pada awal dan akhir periode.

e) Pelepasan

Properti Investasi dihentikan Pengakuannya pada saat:

(1) pelepasan; atau

(2) ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau

(3) tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan Pengakuannya

g. Dana Cadangan

1) Definisi Dana Cadangan

a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun anggaran.

b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

a) Pengukuran Dana Cadangan

(1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

(2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

(3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

(4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

b) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

(1) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Perinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

(2) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK.

h. Aset Lainnya

1) Definisi Aset Lainnya

a) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

(1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

(2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

(4) Aset Tidak Berwujud; dan

(5) Aset Lain-lain.

c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.

e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

(1) Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama /kemitraan.

(2) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.

(3) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

(4) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

(5) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerja sama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.

(6) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

(7) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

(e) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(f) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(g) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(h) *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

(i) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(j) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(8) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

(9) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu Tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam

Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

(10) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

(11) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Aset Lainnya

a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

(1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

(2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

(1) Aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja sama/kemitraan.

(2) Aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

(3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

(4) Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerja sama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

(5) Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerja sama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

(7) Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran Aset Lainnya

a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

(1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerja sama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerja sama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

(3) Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

(1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

(2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan

(c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

(1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

(2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

(3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

j) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

k) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Perinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

(1) Masa manfaat dan metode amortisasi;

(2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud; dan

(3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

g) Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:

(1) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas *(finite life)* yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;

(2) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas *(indefinite life)* yaitu *Goodwill*.

i. Amortisasi

1) Definisi

a) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

b) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

2) Pengakuan Amortisasi

Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir Tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

3) Pengukuran Amortisasi

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

4) Pengungkapan Amortisasi

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai “Beban Amortisasi”.

5) Penyajian Amortisasi

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari “Aset Tidak Berwujud”.

j. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Tujuan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2) Ruang Lingkup

a) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

b) Kebijakan akuntansi ini mengatur:

(1) Akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan

(2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

(3) Definisi Kewajiban

(a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

(b) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

(c) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

k. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan Iuran BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

c) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

(2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2) Utang Bunga (*Accrued Interest)*

a) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

(1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

(2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

b) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Perincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3) Utang Jangka Pendek Lainnya

a) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Perincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

b) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

c) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

d) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

a) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan:

(1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.

(2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu perincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

(3) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

(4) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

b) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

c) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan

(1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

(2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

d) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

l. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. perincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

m. Pendapatan Diterima Di Muka

1) Definisi Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan diterima di muka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Di Muka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan diterima di muka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Perincian pendapatan diterima di muka diungkapkan dalam CaLK.

n. Utang Beban

1) Definisi Utang Beban

Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing- masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, di mana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan perinciannya diungkapkan dalam CaLK.

o. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Perinciannya diungkapkan dalam CaLK.

p. Kewajiban Jangka Panjang

1) Utang Dalam Negeri

a) Definisi Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

(1) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;

(2) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;

(3) Utang Dalam Negeri-obligasi;

(4) Utang Pemerintah Pusat;

(5) Utang Pemerintah Provinsi; dan

(6) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Pengakuan Utang Dalam Negeri

(1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

(2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c) Pengukuran Utang Dalam Negeri

(1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

(2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

(3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Perincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

2) Utang Luar Negeri

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

a) Definisi Utang Luar Negeri

(1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

(2) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

(3) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

(4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

(5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

b) Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c) Pengukuran Utang Luar Negeri

(1) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

(2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

(1) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

(2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

(3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos- pos Neraca yaitu perincian dari masing-masing jenis utang (apabila perinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

3) Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

(1) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

(2) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

(3) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

(4) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

(5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

b) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

(1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

(2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

c) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

(1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

(2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

(1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Perincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.

(2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

q. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1) Tujuan

a) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2) Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3) Definisi Ekuitas

a) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

b) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

c) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

d) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

e) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang perinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada perincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

f) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

4) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

5) Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

6) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan perinciannya dalam CaLK.

r. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

1) Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Ruang Lingkup

a) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.

b) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3) Pendapatan LRA

a) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA Tahun-Tahun anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

b) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

c) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

d) Pendapatan LRA terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah – LRA;

(2) Pendapatan Transfer – LRA; dan

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

4) Pengakuan Pendapatan LRA

a) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

b) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

(1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

(2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

(3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

(4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

(5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5) Pengukuran Pendapatan LRA

a) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

6) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

a) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Perinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

(1) Penerimaan pendapatan Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran;

(2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada Tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

(3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

(4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

s. Pendapatan Asli Daerah–LRA (PAD – LRA)

1) Definisi PAD – LRA.

a) PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

b) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

2) Pengakuan PAD – LRA.

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

3) Pengukuran PAD – LRA

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

4) Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Perinciannya dijelaskan dalam CaLK.

t. Pendapatan Transfer–LRA

1) Definisi Pendapatan Transfer –LRA

Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

a) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

b) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.

3) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Perinciannya dijelaskan dalam CaLK.

u. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

1) Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

a) Pendapatan Hibah – LRA;

b) Dana Darurat – LRA; dan

c) Pendapatan Lainnya – LRA.

2) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.

b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD.

3) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

4) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Perinciannya dijelaskan dalam CaLK.

v. Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

a) Definisi Belanja

(1) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

(2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

(3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

(4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

(5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

(6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

(7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

(8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

(9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

(10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

(11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

(12) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

(13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

(14) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

(a) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran; dan

(b) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

(15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam BAS.

b) Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

(1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

(2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.

(3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

c) Pengukuran Belanja

(1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

(2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d) Penyajian dan Pengungkapan Belanja

(1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

(a) Belanja Operasi;

(b) Belanja Modal;

(c) Belanja Tidak Terduga; dan

(d) Belanja Transfer.

(2) Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

w. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1) Tujuan

a) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2) Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3) Definisi Pembiayaan

a) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

b) Pembiayaan terdiri dari :

(1) Penerimaan pembiayaan; dan

(2) Pengeluaran pembiayaan.

x. Penerimaan Pembiayaan

1) Definisi Penerimaan Pembiayaan

a) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

2) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

3) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4) Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan perinciannya dijelaskan dalam CaLK.

y. Pengeluaran Pembiayaan

1) Definisi Pengeluaran Pembiayaan

a) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD.

2) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

3) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA dan perinciannya dijelaskan dalam CaLK.

5) Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

a) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

b) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

c) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

d) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu Tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

e) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

z. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a) SAL adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

b) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

c) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir Tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

d) SAL terdiri dari:

(1) Surplus/Defisit – LRA;

(2) Pembiayaan Neto;

(3) SiLPA/SiKPA (Tahun berkenaan); dan

(4) Perubahan SAL.

e) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

f) Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

g) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

h) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.

2) Pengakuan SAL

a) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

b) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

3) Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

aa. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

1) Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3) Definisi Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4) Pengakuan Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO diakui pada saat:

(1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

(2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

b) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

(1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

(2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

(3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

(4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

(5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir Tahun. Apabila

sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir Tahun.

c) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

d) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

(1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama Tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

(2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:

(a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) di mana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

(b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

(3) Pengukuran Pendapatan-LO

(a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

(a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Perincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

(b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

i. Penerimaan Pendapatan-LO Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran;
ii. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada Tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
iii. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
iv. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

bb.Kebijakan Akuntansi Beban

1) Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3) Definisi Beban

a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

c) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

d) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

e) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

f) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai,

perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

g) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

h) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

i) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

j) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

k) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

l) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

m) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

n) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

o) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

p) Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

q) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

4) Pengakuan Beban

a) Beban diakui pada:

(1) Saat timbulnya kewajiban;

(2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

(3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

c) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

d) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

e) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

   (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

   (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

   (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

f) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

g) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

h) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

i) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

j) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

k) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

l) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

(4) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

(5) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir Tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

(6) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(7) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(8) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(9) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

5) Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

6) Penyajian dan Pengungkapan Beban

a) Beban disajikan dalam LO. Perincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

(1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain- lain;

(2) Beban Non Operasional;

(3) Beban Tidak Terduga.

b) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

c) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

(1) Pengeluaran beban Tahun berkenaan;

(2) Pengakuan beban Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/Tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan

(3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

cc. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan

1) Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2) Ruang Lingkup

a) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3) Definisi

a) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

b) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

c) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

d) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

e) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

f) Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

4) Koreksi Kesalahan

a) Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

b) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

c) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

(1) Kesalahan yang tidak berulang; dan

(2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

d) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

(1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan

(2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

e) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

f) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

g) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

h) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

i) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

j) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

k) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

a) Menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

b) Menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

c) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai Tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

d) Mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal Tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

e) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap Tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

c) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

a) Menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai Tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.

b) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai Tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

c) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

a) Menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

   (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

   (2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah SAL.

c) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a) Menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

   (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

   (2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

c) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a) Menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman Tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.

b) Mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman Tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a) Menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.

b) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang Tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SAL.

c) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan Tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

c) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

d) Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi

e) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK Tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

f) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

dd. Perubahan Kebijakan Akuntansi

1) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

2) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

3) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.

4) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

b) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

5) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

6) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

ee. Perubahan Estimasi Akuntansi

1) Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO Tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

ff. Operasi yang tidak dilanjutkan:

1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban Tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

3) Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk Tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu Tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir Tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

   a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

   b) Fungsi tersebut tetap ada.

   c) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

   d) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

gg. Peristiwa Luar Biasa

1) Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2) Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4) Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama Tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia.
5) Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
6) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
7) Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
    a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
    b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
    c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
    d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
8) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada

Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian terdahulu. Namun demikian, setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan- kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, Kurs. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam Laporan Keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah;

b) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah;

c) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari Kas Umum Daerah;

d) Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan.

Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Tentang Aset Tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu Tahun. Jenis-jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. Perincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2025. Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi atas jumlah pendapatan, belanja, transfer, surplus/(defisit) dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan Daerah – LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.439.479.093.114,60	Rp1.437.280.040.724,40

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.439.479.093.114,60 atau 99,29% dari anggaran sebesar 1.449.723.647.639,00 mengalami peningkatan sebesar 0,14% dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	154.000.000.000,00	156.677.606.847,60	101,73	133.655.052.931,40
2.	Pendapatan Transfer	1.261.743.272.124,00	1.249.320.018.091,00	99,01	1.281.410.872.862,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.980.375.515,00	33.481.468.176,00	98,53	22.214.114.931,00
TOTAL		**1.449.723.647.639,00**	**1.439.479.093.114,60**	**99,29**	**1.437.280.040.724,40**

Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebagaimana pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp156.677.606.847,60	Rp133.655.052.931,40

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp156.677.606.847,60 atau 101,73% dari target sebesar Rp154.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar 17,22% dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 21. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
1.	Pajak Daerah	38.503.750.000,00	37.626.009.629,67	97,72	27.663.738.746,01
2.	Retribusi Daerah	94.877.368.000,00	96.559.544.688,00	101,77	93.784.976.878,78
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.057.524.807,00	9.057.524.807,00	100,00	8.451.510.307,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	11.561.357.193,00	13.434.527.722,93	116,20	3.754.826.999,61
TOTAL		**154.000.000.000,00**	**156.677.606.847,60**	**101,73**	**133.655.052.931,40**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebagaimana pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp37.626.009.629,67	Rp27.663.738.746,01

Realisasi pajak daerah sebesar Rp37.626.009.629,67 atau 97,72% dari target sebesar Rp38.503.750.000,00 atau kurang realisasi sebesar Rp877.740.370,33 dengan perincian dalam tabel berikut ini.

Tabel 22. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pajak Reklame	850.000.000,00	876.647.815,00	103,1	788.145.744,00
2.	Pajak Air Tanah	160.000.000,00	207.473.983,00	129,7	159.604.485,00
3.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	1.663.407.462,67	83,17	3.245.750.707,81
4.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000,00	4.299.399.651,00	85,98	4.275.385.912,00
5.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.050.000.000,00	6.341.773.385,00	104,8	5.788.319.950,00
6.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) -Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000,00	4.107.410.404,00	102,68	4.125.201.556,20
7.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) -Tenaga Listrik	8.750.000.000,00	8.099.204.936,00	92,56	8.574.206.432,00
8.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) -Jasa Perhotelan	350.000.000,00	244.765.981,00	69,93	344.434.609,00
9.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) -Jasa Parkir	350.000.000,00	328.421.100,00	93,83	314.230.450,00
10.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) -Jasa Kesenian dan Hiburan	50.000.000,00	42.751.500,00	85,50	48.458.900,00
11.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.283.136.000,00	7.632.065.170,00	104,8	0,00
12.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.660.614.000,00	3.782.688.242,00	103,3	0,00
TOTAL		**38.503.750.000,00**	**37.626.009.629,67**	**97,72**	**27.663.738.746,01**

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah - LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp96.559.544.688,00	Rp93.784.976.878,78

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp96.559.544.688,00 atau 101,77% dari target sebesar Rp94.877.368.000,00 atau lebih realisasi sebesar Rp1.682.176.688,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 23. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	89.075.768.000,00	93.649.944.595,00	105,1	89.762.296.464,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	2.283.600.000,00	1.419.929.517,00	62,17	1.417.771.591,78
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.518.000.000,00	1.489.670.576,00	42,34	2.604.908.823,00
TOTAL		**94.877.368.000,00**	**96.559.544.688,00**	**101,8**	**93.784.976.878,78**

Berdasarkan tabel di atas realisasi perincian retribusi daerah adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Umum realisasi sebesar Rp93.649.944.595,00 dari target Rp89.075.768.000,00 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 24. Perincian Retribusi Jasa Umum Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	87.300.000.000,00	92.211.106.795,00	105,62	RSU
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	80.000.000,00	109.742.000,00	137,17	DINAS KESEHATAN
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	112.850.000,00	75,23	DINAS PERHUBUNGAN
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	884.806.000,00	88,48	DINAS KOPERASI
5.	Retribusi Pelayanan Persampahan	150.000.000,00	86.520.000,00	57,68	DINAS KOPERASI
6.	Retribusi Pelayanan Persampahan	345.768.000,00	241.019.800,00	69,70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	3.900.000,00	7,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL		**89.075.768.000,00**	**93.649.944.595,00**	**105,13**	

2. Retribusi Jasa Usaha realisasi sebesar Rp1.419.929.517,00 dari target Rp2.283.600.000,00 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 25. Perincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	7.400.000,00	14,8	SEKRETARIAT DAERAH
2.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	25.000.000,00	23.760.000,00	95,04	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	55.800.000,00	34.900.000,00	62,54	DINAS PARIWISATA
4.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	100.000.000,00	78.642.000,00	78,64	DINAS KOPERASI
5.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	60.000.000,00	37.779.000,00	62,96	DINAS PARIWISATA
6.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	10.000.000,00	10.875.000,00	108,75	DINAS PERHUBUNGAN
7.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	20.000.000,00	13.500.000,00	67,5	DINAS KETAHANAN PANGAN
8.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	400.800.000,00	282.316.126,00	70,43	DINAS PARIWISATA
9.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00	13.200.000,00	44,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
10.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	80.000.000,00	97.486.814,00	121,85	DINAS KOPERASI
11.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	400.000.000,00	126.850.000,00	31,71	DINAS PUTR
12.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	40.000.000,00	47.400.000,00	118,50	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
13.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00	15.637.050,00	52,12	DINAS PERHUBUNGAN
14.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	150.000.000,00	150.505.600,00	100,33	DINAS PERTANIAN
15.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	232.000.000,00	183.962.500,00	79,29	SEKRETARIAT DAERAH
16.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	277.605.687,00	103.439.831,00	37,26	KANTOR CAMAT TARUTUNG
17.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.610.753,00	3.221.506,00	200,00	KANTOR CAMAT PAHAE JAE
18.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.419.000,00	12.428.044,00	193,61	KANTOR CAMAT PANGARIBUAN
19.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.674.560,00	7.132.720,00	266,68	KANTOR CAMAT SIPAHUTAR
20.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	301.690.000,00	169.297.326,00	56,11	KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG
21.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	10.000.000,00	196.000,00	1,96	KANTOR CAMAT MUARA
TOTAL		**2.283.600.000,00**	**1.419.929.517,00**	**62,17**	

3. Retribusi Perizinan Tertentu realisasi sebesar Rp1.489.670.576,00 dari target Rp3.518.000.000,00 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 26. Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	1.430.200.976,00	40,86	DINAS PENANAMAN MODAL
2.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00	59.469.600,00	330,4	DINAS KETENAGAKERJAAN
TOTAL		**3.518.000.000,00**	**1.489.670.576,00**	**42,34**	

Daftar realisasi retribusi dapat dilihat pada **lampiran 1**.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp9.057.524.807,00	Rp8.451.510.307,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasi sebesar Rp9.057.524.807,00 atau 100% dari target dengan perincian dalam tabel berikut.

Tabel 27. Daftar Perincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.057.524.807,00	9.057.524.807,00	100,00	8.451.510.307,00
TOTAL		**9.057.524.807,00**	**9.057.524.807,00**	**100,00**	**8.451.510.307,00**

5.1.1.1.4 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp13.434.527.722,93	Rp3.754.826.999,61

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah realisasi sebesar Rp13.434.527.722,93 atau 116,20% dari target sebesar Rp11.561.357.193,00 atau lebih realisasi sebesar Rp1.873.170.529,93 dengan perincian dalam tabel di bawah ini.

Tabel 28. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	510.000.000,00	204.327.000,00	40,06	383.743.100,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	86.226.195,00	43,11	512.389.735,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	116.161.290,00	47.369.400,00	40,77	103.877.640,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4.	Jasa Giro	385.195.903,00	469.853.845,00	121,97	377.327.454,00
5.	Pendapatan Bunga	100.000.000,00	11.173.304,00	11,17	188.803.053,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.900.000.000,00	2.391.183.523,82	125,85	842.476.529,61
7.	Pendapatan dari Pengembalian	8.200.000.000,00	9.290.519.083,11	113,29	1.346.209.488,00
8.	Pendapatan BLUD	150.000.000,00	933.875.372,00	622,58	0,00
TOTAL		**11.561.357.193,00**	**13.434.527.722,93**	**116,20**	**3.754.826.999,61**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.249.320.018.091,00	Rp1.281.410.872.862,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Transfer ke daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar acuan penganggaran penerimaan transfer pada APBD 2025. Realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.249.320.018.091,00 atau 99,01% dari target sebesar Rp1.261.743.272.124,00 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 29. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.184.084.431.000,00	1.174.290.880.409,00	99,17	1.235.714.467.229,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.658.841.124,00	75.029.137.682,00	96,61	45.696.405.633,00
TOTAL		**1.261.743.272.124,00**	**1.249.320.018.091,00**	**99,01**	**1.281.410.872.862,00**

Pendapatan transfer sebagaimana pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp995.460.589.375,00	Rp1.029.717.245.029,00

Realisasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp995.460.589.375,00 atau 101,97% dari target sebesar Rp976.179.427.000,00 dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 30. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	75.444.726.000,00	75.444.726.000,00	100,00	64.628.799.000,00
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	675.701.250.000,00	696.974.246.628,00	103,14	681.275.700.613,00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.805.395.000,00	4.772.399.978,00	99,31	92.466.086.003,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	220.228.056.000,00	218.269.216.769,00	99,11	191.346.659.413,00
TOTAL		**976.179.427.000,00**	**995.460.589.375,00**	**101,97**	**1.029.717.245.029,00**

Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) realisasi sebesar Rp75.444.726.000,00 atau realisasi 100% dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 31. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH PBB	42.790.071.000,00	42.790.071.000,00	100,00	36.960.795.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	9.961.758.000,00	9.961.758.000,00	100,00	7.912.909.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	655.071.000,00	655.071.000,00	100,00	373.099.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.258.640.000,00	2.258.640.000,00	100,00	1.990.142.000,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	11.281.000,00	11.281.000,00	100,00	244.802.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	5.200.800,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	135.595.000,00	135.595.000,00	100,00	113.922.200,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	312.630.000,00	312.630.000,00	100,00	1.595.527.000,00
9	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	15.117.496.000,00	15.117.496.000,00	100,00	7.098.888.000,00
10	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	649.844.000,00	649.844.000,00	100,00	228.713.000,00
11	DBH SDA Perikanan	851.176.000,00	851.176.000,00	100,00	1.167.186.000,00
12	DBH Sawit	2.700.114.000,00	2.700.114.000,00	100,00	6.937.615.000,00
TOTAL		**75.444.726.000,00**	**75.444.726.000,00**	**100,00**	**64.628.799.000,00**

b) Dana Alokasi Umum (DAU) realisasi sebesar Rp696.974.246.628,00 atau 103,14% dari anggaran sebesar Rp675.701.250.000,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 32. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	586.029.870.000,00	607.302.866.628,00	103,63	566.729.348.613,00
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	100,00	2.200.000.000,00
3.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	52.691.025.000,00	52.691.025.000,00	100,00	64.436.601.000,00
4.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	34.780.355.000,00	34.780.355.000,00	100,00	31.021.365.000,00
5.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	16.888.386.000,00
TOTAL		**675.701.250.000,00**	**696.974.246.628,00**	**103,14**	**681.275.700.613,00**

Pada Tahun 2025, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan pemotongan secara otomatis setiap bulan sebesar Rp4.433.419.671,00 selama 8 bulan dengan jumlah sebesar Rp35.467.357.368,00 untuk pembayaran Pokok Pinjaman PEN Tahun 2020.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) realisasi sebesar Rp223.041.616.747,00 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp225.033.451.000,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 33. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	485.726.000,00	459.449.976,00	94,59
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	4.217.790.000,00	4.214.650.000,00	99,92
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	101.879.000,00	98.300.002,00	96,48
4	DAK Non Fisik-BOS Reguler	60.779.777.000,00	60.779.528.399,00	99,99
5	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.275.750.000,00	2.275.750.000,00	100
6	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.441.920.000,00	5.440.936.692,00	99,98
7	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.475.160.000,00	4.166.567.550,00	93,1
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	769.680.000,00	764.245.500,00	99,29

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100
11	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	11.969.066.000,00	10.658.571.302,00	89,05
12	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	279.958.000,00	279.958.000,00	100
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.321.519.000,00	17.462.426.811,00	95,31
14	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	102.209.084.000,00	102.409.290.500,00	100,2
15	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.655.500.000,00	831.000.000,00	50,19
16	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	3.747.142.000,00	5.189.992.900,00	138,5
17	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.228.500.000,00	7.935.949.115,00	96,44
Total		**225.033.451.000,00**	**223.041.616.747,00**	**99,11**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp178.830.291.034,00	Rp205.997.222.200,00

Pendapatan Transfer Pemerintah pusat lainnya-LRA realisasi sebesar Rp178.830.291.034,00 atau 86,01% dari target sebesar Rp207.905.004.000,00. Transfer Pemerintah Pusat-lainnya LRA terdiri dari:

a) Pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 realisasi sebesar Rp163.948.720.034,00 atau 84,93% dari anggaran sebesar Rp193.023.433.000,00 yang dialokasikan kepada 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara. Perincian Dana Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

b) Pendapatan Insentif fiskal realisasi sebesar Rp14.881.571.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp14.881.571.000,00.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp75.029.137.682,00	Rp45.696.405.633,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah realisasi sebesar Rp75.029.137.682,00 atau 96,61% dari target sebesar Rp77.658.841.124,00. Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa Bagi Hasil Pajak serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan perincian sesuai tabel berikut.

Tabel 34. Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2025

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**77.658.841.124,00**	**75.029.137.682,00**	**96,61**	**45.696.405.633,00**
4.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	**71.662.700.124,00**	**68.532.996.682,00**	**95,63**	**45.696.405.633,00**
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.110.366.965,00	17.110.366.965,00	100	6.172.615.706,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.401.704.734,00	9.401.704.734,00	100	5.027.236.960,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.604.764.744,00	22.191.005.040,00	102,7	11.896.457.190,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.366.082.707,00	1.340.023.332,00	56,63	890.328.673,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.179.780.974,00	18.489.896.611,00	87,29	21.709.767.104,00
4.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**5.996.141.000,00**	**6.496.141.000,00**	**108,3**	**0,00**
1.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.996.141.000,00	1.996.141.000,00	100	0,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.000.000.000,00	4.500.000.000,00	112,5	0,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp33.481.468.176,00	Rp22.214.114.931,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp33.481.468.176,00 atau sebesar 98,53% dari target sebesar Rp33.980.375.515,00 atau kurang realisasi sebesar Rp498.907.339,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 35. Realisasi Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**33.980.375.515,00**	**33.481.468.176,00**	**98,5**	**22.214.114.931,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	8.818.078.129,00
4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.980.375.515,00	28.481.468.176,00	98,27	13.396.036.802,00

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp28.481.468.176,00 terdiri:

1. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp15.575.275.752,00;
2. Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi sebesar Rp1.165.036.701,00; serta
3. Pendapatan dari Bonus Produksi PT. SOL sebesar Rp11.741.155.723,00.

5.1.2. Belanja - LRA

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.339.060.114.362,91	Rp1.375.858.189.855,41

Realisasi belanja yaitu sebesar Rp1.339.060.114.362,91 atau 96,03% dari anggaran sebesar Rp1.394.378.083.538,86 sehingga kurang realisasi sebesar Rp55.317.969.175,95. Realisasi belanja Tahun 2025 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 36. Realisasi Belanja Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**1.394.378.083.538,86**	**1.339.060.114.362,91**	**96,03**	**1.375.858.189.855,41**
5.1	Belanja Operasi	1.029.204.042.106,86	1.011.039.649.562,83	98,23	1.014.674.115.403,47
5.2	Belanja Modal	63.350.601.533,00	60.428.751.848,08	95,38	99.079.324.655,94
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.482.560.075,00	15.383.387.034,00	75,10	3.454.947.220,00
5.4	Belanja Transfer	281.340.879.824,00	252.208.325.918,00	89,64	258.649.802.576,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.011.039.649.562,83	Rp1.014.674.115.403,47

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.011.039.649.562,83 atau 98,23% dari anggaran sebesar Rp1.029.204.042.106,86 sehingga kurang realisasi sebesar Rp18.164.392.544,03 dengan perincian dalam tabel berikut.

Tabel 37. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.029.204.042.106,86**	**1.011.039.649.562,83**	**98,23**	**1.014.674.115.403,47**
5.1.01	Belanja Pegawai	695.133.162.874,84	680.660.593.870,00	97,91	621.410.779.418,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.377.058.947,02	312.600.485.856,83	99,11	318.291.641.973,47
5.1.03	Belanja Bunga	1.305.525.006,00	1.305.525.006,00	100,00	2.207.835.420,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.790.059.080,00	15.127.032.130,00	95,80	71.990.363.892,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.598.236.199,00	1.346.012.700,00	84,21	773.494.700,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp680.660.593.870,00	Rp621.410.779.418,00

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp680.660.593.870,00 atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp695.133.162.874,84 sehingga kurang realisasi sebesar Rp14.472.569.004,84. Realisasi belanja pegawai juga termasuk belanja pegawai yang bersumber dari Dana BOSP sebesar Rp9.780.608.572,00 dan Dana BLUD sebesar Rp5.198.140.976,00. Perincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Perincian Belanja Pegawai per Objek Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**695.133.162.874,84**	**680.660.593.870,00**	**97,91**	**621.410.779.418,00**
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	464.229.530.020,84	455.313.936.002,00	98,07	457.180.855.720,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	199.267.512.970,00	194.592.427.189,00	97,65	57.818.593.212,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	76.034.826.413,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.112.376.912,00	14.970.326.717,00	99,06	13.442.643.929,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.000.000,00	143.514.414,00	80,62	61.323.399,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	661.640.000,00	93,07	532.400.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	11.579.689.400,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	9.780.862.972,00	9.780.608.572,00	99,99	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.854.000.000,00	5.198.140.976,00	88,79	4.760.447.345,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp312.600.485.856,83	Rp318.291.641.973,47

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp312.600.485.856,83 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp315.377.058.947,02 atau kurang realisasi sebesar Rp2.776.573.090,19. Pada realisasi belanja barang dan jasa terdapat belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOSP sebesar Rp30.249.779.814,00, Belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp14.995.376.668,00 dan Dana BLUD sebesar Rp78.188.691.501,00. Perincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39. Perincian Belanja Barang dan Jasa per Objek Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**315.377.058.947,02**	**312.600.485.856,83**	**99,11**	**318.291.641.973,47**
5.1.02.01	Belanja Barang	64.042.526.830,88	59.445.498.684,98	92,82	70.372.129.584,47
5.1.02.02	Belanja Jasa	91.300.270.596,50	86.618.823.916,00	94,87	59.683.262.876,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.346.437.013,64	3.979.954.718,85	91,56	3.979.954.718,85
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.984.046.436,00	29.790.102.764,00	93,14	29.790.102.764,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.622.714.190,00	9.332.257.790,00	87,85	21.425.817.718,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	30.855.196.458,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	30.743.747.880,00	30.249.779.814,00	98,39	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.262.374.000,00	14.995.376.668,00	98,25	16.736.117.496,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.074.942.000,00	78.188.691.501,00	116,56	81.252.485.989,00

Penjelasan realisasi belanja barang dan jasa sebagaimana di atas sebagai berikut:

1) Belanja barang realisasi sebesar Rp59.445.498.684,98 merupakan belanja barang pakai habis sebesar Rp57.402.467.631,98 dan belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp2.047.044.953,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 40. Perincian Belanja Barang Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	900.404.325,32	799.322.577,00	88,77
2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.783.741.837,21	5.533.408.395,00	95,67
3.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	941.923.999,50	840.439.000,00	89,22

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	273.000,00	0,00	0,00
5.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	25.872.800,00	22.305.400,00	86,21
6.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	629.535.000,00	512.444.000,00	81,40
7.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.076.387.613,00	4.809.118.379,00	94,73
8.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.028.622.560,00	984.774.216,00	95,73
9.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	158.500.000,00	153.295.000,00	96,71
10.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	111.521.100,00	95.655.600,00	85,77
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.625.642.769,02	2.070.426.277,00	78,85
12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.844.980.065,61	4.764.811.755,00	98,34
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	93.890.000,00	91.318.000,00	97,26
14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.664.490,00	47.323.000,00	1.014,53
15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	795.225.501,00	792.626.000,00	99,67
16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.399.951.876,00	1.348.537.874,00	96,32
17.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	94.525.500,00	85.527.486,00	90,48
18.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	136.988.800,00	86.988.800,00	63,50
19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	21.300.000,00	21.300.000,00	100,00
20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.324.676.950,00	2.224.481.696,00	95,68
21.	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.847.586.160,00	5.940.378.629,00	86,75
22.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	24.246.650,00	5.899.500,00	24,33
23.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.345.734.510,00	9.807.535.281,09	94,79
24.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	226.040.000,00	225.690.000,00	99,84
25.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	145.911.120,00	136.499.999,89	93,55
26.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.010.848.000,00	4.740.492.817,00	94,60
27.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	192.384.800,00	171.554.000,00	89,17
28.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.058.197.200,00	6.231.183.300,00	88,28

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
29.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.296.012.750,00	1.217.455.600,00	93,93
30.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	110.389.000,00	110.311.600,00	99,92
31.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.566.137.500,00	2.474.774.300,00	96,43
32.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	558.075.000,00	543.317.250,00	97,35
33.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
34.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	177.381.400,00	177.193.000,00	99,89
35.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.850.000,00	35.850.000,00	100,00
36.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	42.925.000,00	42.915.000,00	99,97
37.	Belanja Pakaian Teknik	16.108.000,00	15.415.000,00	95,69
38.	Belanja Pakaian KORPRI	19.960.000,00	19.785.000,00	99,12
39.	Belanja Pakaian Adat Daerah	108.100.000,00	107.100.000,00	99,07
40.	Belanja Pakaian Olahraga	103.997.711,00	29.000.000,00	27,88
41.	Belanja Pakaian Jas/Safari	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
42.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	90.000.000,00	89.450.000,00	99,38
43.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
44.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	8.247.500,00	8.247.500,00	100,00
45.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	13.700.000,00	13.200.000,00	96,35
46.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	79.992.795,00	77.290.045,00	96,62
47.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	142.500.000,00	136.973.988,00	96,12
48.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	101.545.756,00	100.021.500,00	98,49
49.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	46.000.000,00	45.400.000,00	98,69
50.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.550.067.792,22	1.532.501.920,00	98,86
Total		**64.042.526.830,88**	**59.445.498.684,98**	**92,82**

2) Belanja jasa realisasi sebesar Rp86.618.823.916,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 41. Perincian Belanja Jasa Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Jasa Kantor	52.966.380.460,50	49.289.293.954,00	93,05
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.299.994.500,00	33.110.785.570,00	99,43
3.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.238.259.966,00	1.852.575.939,00	82,76
4.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	725.032.670,00	410.799.975,00	56,65
5.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	936.350.000,00	858.213.300,00	91,65
6.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	395.000.000,00	393.053.700,00	99,50
7.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	739.253.000,00	704.101.478,00	95,24
Total		**91.300.270.596,50**	**86.618.823.916,00**	**94,87**

3) Belanja pemeliharaan realisasi sebesar Rp3.979.954.718,85 yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 42. Perincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.739.398.574,00	2.649.039.976,00	96,70
2.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.605.038.439,64	1.329.001.242,85	82,80
3.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000,00	1.913.500,00	95,67
Total		**4.346.437.013,64**	**3.979.954.718,85**	**91,56**

4) Belanja perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2025 realisasi sebesar Rp29.790.102.764,00 yang dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 43. Perincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.841.325.600,00	24.304.820.511,00	94,05
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.142.720.836,00	5.485.282.253,00	89,29
Total		**31.984.046.436,00**	**29.790.102.764,00**	**93,14**

5) Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp9.332.257.790,00 merupakan belanja yang diberikan kepada pihak lain dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 44. Perincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	172.250.000,00	172.250.000,00	100,00
2.	Belanja Beasiswa	237.000.000,00	222.000.000,00	93,67
3.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.875.000.000,00	1.805.000.000,00	96,26
4.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.312.064.190,00	7.108.707.790,00	85,52
5.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	26.400.000,00	24.300.000,00	92,04
Total		**10.622.714.190,00**	**9.332.257.790,00**	**87,85**

6) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp30.249.779.814,00 dari target sebesar Rp30.743.747.880,00 atau 98,39% yang merupakan belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOSP pada unit sekolah SD Negeri dan SMP Negeri.

7) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp14.995.376.668,00 dari target sebesar Rp15.262.374.000,00 atau 98,25% yang merupakan belanja barang dan jasa pada Konsultasi Puskesmas yang bersumber dari Dana BOK Puskesmas DAK Non Fisik.

8) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp78.188.691.501,00 dari target sebesar Rp67.074.942.000,00 atau 116,56% yang merupakan belanja barang dan jasa pada RSU Daerah Tarutung yang bersumber dari Dana BLUD Rumah Sakit.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.305.525.006,00	Rp2.207.835.420,00

Realisasi belanja bunga Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.305.525.006,00 yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero). Perincian pembayaran belanja bunga Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 45. Perincian Pembayaran Belanja Bunga Tahun 2025

No	Uraian	Pembayaran (Rp)
1	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Januari 2025	145.785.015,00
2	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Pebruari 2025	139.446.534,00
3	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Maret 2025	120.226.629,00
4	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan April 2025	126.769.574,00
5	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Mei 2025	116.546.220,00
6	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Juni 2025	114.095.514,00
7	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Juli 2025	104.278.194,00
8	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Agustus 2025	101.415.653,00
9	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan September 2025	95.077.174,00
10	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Oktober 2025	85.876.155,00
11	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Nopember 2025	82.400.214,00
12	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Bulan Desember 2025	73.608.130,00
Total		**1.305.525.006,00**

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp0,00

Realisasi belanja subsidi Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp15.127.032.130,00	Rp71.990.363.892,00

Realisasi belanja hibah sebesar Rp15.127.032.130,00 atau 95,80% dari anggaran sebesar Rp15.790.059.080,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp663.026.950,00. Realisasi belanja hibah dikelola langsung oleh SKPD pengelola belanja hibah dengan uraian belanja hibah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 46. Perincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.453.000.000,00	4.104.000.000,00	92,16
4.	Belanja Hibah Dana BOS	4.928.250.000,00	4.928.250.000,00	100,00
5.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	958.969.080,00	958.969.080,00	100,00
6.	Belanja Hibah Dana BOSP	5.319.840.000,00	5.005.813.050,00	94,09
Total		**15.790.059.080,00**	**15.127.032.130,00**	**95,80**

Perincian realisasi penggunaan Belanja Hibah dapat dilihat pada **lampiran 3**.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.346.012.700,00	Rp773.494.700,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp1.346.012.700,00 atau 84,21% dari anggaran sebesar Rp1.598.236.199,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp252.223.499,00. Perincian realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 47. Perincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	625.023.500,00	512.650.000,00	82,02
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	373.212.699,00	372.862.700,00	99,90
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	600.000.000,00	460.500.000,00	76,75
Total		**1.598.236.199,00**	**1.346.012.700,00**	**84,21**

Perincian realisasi penggunaan Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada **lampiran 4**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp60.428.751.848,08	Rp99.079.324.655,94

Realisasi belanja modal sebesar Rp60.428.751.848,08 atau 95,38% dari anggaran sebesar Rp63.350.601.533,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp2.921.849.684,92 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 48. Realisasi Belanja Modal TA 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2	**BELANJA MODAL**	**63.350.601.533,00**	**60.428.751.848,08**	**95,38**	**99.079.324.655,94**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.553.056.681,00	20.939.549.180,71	92,84	26.958.423.144,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.497.281.776,00	6.342.671.277,29	84,59	14.949.241.861,74
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.859.905.960,00	18.687.651.374,08	99,08	56.854.991.209,34
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.440.357.116,00	14.458.880.016,00	100,12	111.469.430,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	41.199.010,86

Perincian realisasi belanja modal per Perangkat Daerah dapat dilihat dalam **lampiran 5**.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp164.000.000,00

Pada Tahun 2025, belanja modal Tanah sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp20.939.549.180,71	Rp26.958.423.144,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp20.939.549.180,71 atau 92,84% dari anggaran sebesar Rp22.553.056.681,00. Perincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 49. Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**22.553.056.681,00**	**20.939.549.180,71**	**92,84**	**26.958.423.144,00**
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.098.950.000,00	1.096.755.000,00	99,80	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.800.000.000,00	2.557.960.000,00	91,35	1.313.225.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	1.445.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	269.950.000,00	113.950.000,00	42,21	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.749.678.125,00	5.643.780.810,76	83,61	1.396.312.110,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	151.505.000,00	145.999.992,00	96,36	104.160.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.228.179.900,00	4.220.422.000,00	99,81	1.610.729.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	187.579.000,00	187.391.000,00	99,89	172.019.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.292.749.400,00	1.200.831.260,00	92,88	195.300.002,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	117.650.500,00	117.382.195,95	99,77	86.813.318,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	18.028.799.225,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.656.814.756,00	3.671.424.756,00	100,39	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.000.000.000,00	1.983.652.166,00	99,18	2.606.065.489,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp6.342.671.277,29	Rp14.949.241.861,74

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp6.342.671.277,29 atau 84,59% dari anggaran sebesar Rp7.497.281.776,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp1.154.610.498,71. Perincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50. Perincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**7.497.281.776,00**	**6.342.671.277,29**	**84,59**	**14.949.241.861,74**
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.997.281.776,00	5.844.023.960,29	83,51	14.646.040.861,74

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	498.647.317,00	99,72	303.201.000,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp18.687.651.374,08	Rp56.854.991.209,34

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp18.687.651.374,08 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp18.859.905.960,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp172.254.585,92. Perincian realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sesuai tabel berikut.

Tabel 51. Perincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.859.905.960,00	18.687.651.374,08	99,08	56.854.991.209,34
5.2.4.1.1	Belanja Modal Jalan	15.282.316.500,00	15.147.164.260,08	99,11	44.171.658.797,88
5.2.4.1.2	Belanja Modal Jembatan	1.353.500.000,00	1.344.617.018,00	99,34	997.949.554,00
5.2.4.2.1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.224.089.460,00	2.195.870.096,00	98,73	9.214.452.857,46
5.2.4.2.4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	92.930.000,00
5.2.4.3.5	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	2.378.000.000,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp14.458.880.016,00	Rp111.469.430,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp14.458.880.016,00 atau 100,12% dari anggaran sebesar Rp14.440.357.116,00 melebihi realisasi sebesar Rp18.522.900,00. Perincian belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52. Perincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.5	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**14.440.357.116,00**	**14.458.880.016,00**	**100,12**	**111.469.430,00**
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	55.000.000,00	52.930.000,00	96,23	111.469.430,00

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.5.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	14.385.357.116,00	14.405.950.016,00	100,14	0,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp41.199.010,86

Realisasi belanja modal aset lainnya Tahun 2025 adalah Nihil.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp15.383.387.034,00	Rp3.454.947.220,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 adalah sebesar Rp15.383.387.034,00 atau 75,10% dari anggaran sebesar Rp20.482.560.075,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp5.099.173.041,00. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa misalnya untuk penanggulangan bencana alam.

Pada 25 November 2025, terjadi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Adiankoting, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Purbatua, Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung. Dalam hal penanganan tanggap darurat bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan anggaran pada belanja tidak terduga yang bersumber dari Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp4.000.000.000,00, Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi sebesar Rp4.500.000.000,00 dan bantuan pihak ketiga Provinsi sebesar Rp1.000.000.000,00. Adapun penggunaan bantuan penanggulangan bencana hidrometeorologi tersebut sebagai berikut.

Tabel 53. Perincian Penggunaan Bantuan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi TA 2025

No	SKPD	Uraian	Banpres (Rp)	Bankeu/ Pihak ke-3 (Rp)
1	DINAS PUTR	Pembayaran Biaya Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara	0,00	586.355.300,00
		Penambahan Biaya Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	0,00	905.871.094,00
		Jumlah	**0,00**	**1.492.226.394,00**
2	DINAS PERKIM	Pengadaan Peralatan Listrik Penanganan Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara	2.260.100.400,00	0,00
		Pengadaan Mesin Pompa dan Sprayer Penanganan Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara	330.000.000,00	0,00

No	SKPD	Uraian	Banpres (Rp)	Bankeu/ Pihak ke-3 (Rp)
		Jumlah	**2.590.100.400,00**	**0,00**
3	DINAS KETAPANG	Biaya Perbaikan Dan Operasional Alat Berat Excavator Untuk Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Dinas Ketahanan Pangan	0,00	84.400.000,00
		Jumlah	**0,00**	**84.400.000,00**
4	DINAS SOSIAL	Bantuan Kepada Keluarga Terdampak Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Peralatan Keluarga Dan Sandang Keluarga	319.999.600,00	0.00
		Bantuan Kepada Keluarga Terdampak Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Peralatan Keluarga Dan Sandang Keluarga	0.00	489.136.650,00
		Bantuan Kepada Yang Terdampak Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Tapanuli Utara Berupa Kasur Dan Selimut	1.089.900.000,00	0,00
		Jumlah	**1.409.899.600,00**	**489.136.650,00**
5	DINAS KB	Pembayaran Layanan Konseling, Psiko Sosial, Pemulihan Trauma Kepada Anak Yang Terdampak Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Tapanuli Utara	0,00	112.000.000,00
		Jumlah		**112.000.000,00**
6	SATPOL	Dana Pengamanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Tanggal 20 S/D 22 Desember 2025 Di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	0,00	564.614.600,00
		Jumlah	**0,00**	**564.614.600,00**
7	KOMINFO	Pengadaan *Starlink*	0,00	133.725.000,00
		Jumlah		**133.725.000,00**
8	BKAD	Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Tapanuli Utara (BTT)	0,00	400.000.000,00
		Penambahan Biaya Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi Di Kabupaten Tapanuli Utara	0,00	563.000.000,00
		Tambahan Biaya Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi Di Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	436.000.000,00
		Jumlah		**1.399.000.000,00**
		Total	**4.000.000.000,00**	**4.275.102.644,00**
		Total Keseluruhan	**8.275.102.644,00**	

Perincian penggunaan belanja tidak terduga dapat dilihat pada **lampiran 6**.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp252.208.325.918,00	Rp258.649.802.576,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 adalah sebesar Rp252.208.325.918,00 atau 89,64% dari anggaran sebesar Rp281.340.879.824,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp29.132.553.906,00. Belanja transfer merupakan Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD realisasi sebesar Rp88.259.605.884,00 dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN berdasarkan transfer dari Pusat untuk Tahun 2025 realisasi sebesar Rp163.948.720.034,00. Mekanisme penyaluran Dana Desa Kabupaten Tapanuli Utara ditransfer oleh Pemerintah Pusat secara langsung ke Rekening Kas Pemerintah Desa.

5.1.3. Pembiayaan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
(Rp40.813.098.514,94)	(Rp51.017.199.959,13)

Pembiayaan neto sebesar (Rp40.813.098.514,94) adalah selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp10.624.390.091,06 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp51.437.488.606,00 dengan perincian sebagai berikut.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp10.624.390.091,06	Rp18.264.856.637,87

Penerimaan pembiayaan realisasi sebesar Rp10.624.390.091,06 atau 102,11% dari anggaran sebesar Rp10.404.650.909,86 sehingga lebih realisasi sebesar Rp219.739.181,20. Perincian realisasi penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54. Perincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**10.404.650.909,86**	**10.624.390.091,06**	**102,11**	**18.264.856.637,87**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.404.650.909,86	10.624.390.091,06	102,11	18.264.856.637,87

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp51.437.488.606,00	Rp69.282.056.597,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp51.437.488.606,00 atau 78,23% dari anggaran sebesar Rp65.750.215.010,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp14.312.726.404,00. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembayaran cicilan Pinjaman PEN Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan perincian dalam tabel berikut.

Tabel 55. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**65.750.215.010,00**	**51.437.488.606,00**	**78,23**	**69.282.056.597,00**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	64.750.215.010,00	51.437.488.606,00	79,43	69.282.056.597,00

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp59.605.880.236,75	Rp10.404.650.909,86

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp59.605.880.236,75. Hal ini disebabkan adanya surplus APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA 2025 sebesar Rp100.418.978.751,69 dikurangi dengan pembiayaan neto sebesar (Rp40.813.098.514,94).

5.2. Perincian Dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp59.605.880.236,75	Rp10.404.650.909,86

Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2025 sebesar Rp59.605.880.236,75 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 56. Laporan Penggunaan Saldo Awal (LPSAL)

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	10.404.650.909,86	18.272.950.856,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	10.624.390.091,06	18.264.856.637,87
3	**Subtotal (1 - 2)**	**(219.739.181,20)**	**8.094.218,13**
4	Sisa Lebih/Kurang Anggaran (SILPA/SiKPA)	59.605.880.236,75	10.404.650.909,86
5	**Subtotal (3 +4)**	**59.386.141.055,55**	**10.412.745.127,99**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	219.739.181,20	(8.094.218,13)
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**59.605.880.236,75**	**10.404.650.909,86**

5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sebesar Rp10.404.650.909,86 dan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.624.390.091,06 dimana terdapat selisih sebesar (Rp219.739.181,20).

5.2.2. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan realisasi surplus APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA 2025 sebesar Rp100.418.978.751,69 dikurangi dengan pembiayaan neto sebesar (Rp40.813.098.514,94) maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp59.605.880.236,75.

5.2.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp219.739.181,20 merupakan koreksi Kas Lainnya berupa kas non Kapitasi pada Puskesmas yang pengakuannya hanya dicatat pada neraca Tahun 2024.

5.3. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset Lancar

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp137.377.671.529,78	Rp92.603.510.716,18

Saldo Aset Lancar senilai Rp137.377.671.529,78 terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Daerah, Penyisihan Piutang dan Persediaan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 57. Perincian Aset Lancar Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Kas dan Setara Kas	59.639.288.144,75	10.683.462.109,98	48.955.826.034,77
2	Piutang Daerah	44.380.636.270,42	86.022.100.727,72	(41.641.464.457,30)
3	Penyisihan Piutang	(16.665.496.959,86)	(20.605.304.985,32)	3.939.808.025,46
4	Persediaan	50.023.244.074,47	16.503.252.863,80	33.519.991.210,67
Total		**137.377.671.529,78**	**92.603.510.716,18**	**44.774.160.813,60**

Aset lancar sebagaimana pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp59.639.288.144,75	Rp10.683.462.109,98

Saldo kas Tahun 2025 sebesar Rp59.639.288.144,75, dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 58. Perincian Kas dan Setara Kas Tahun 2025

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Kas di Kas Daerah	49.786.382.574,55	8.338.721.467,86	41.447.661.106,69
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	49.129.000,00	(49.129.000,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	108.939.603,00	(108.939.603,00)
4	Kas di BLUD	8.081.257.623,00	805.407.416,00	7.275.850.207,00
5	Kas Dana BOS	0,00	439.505.723,80	(439.505.723,80)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	807.533.610,20	50.024.510,20	757.509.100,00
7	Kas Lainnya	479.785.637,20	229.682.200,12	250.103.437,08
8	Kas Dana BOSP	320.845.765,80	0,00	320.845.765,80
9	Kas Dana BOK Puskesmas	163.482.934,00	662.052.189,00	(498.569.255,00)
Total Kas		**59.639.288.144,75**	**10.683.462.109,98**	**48.955.826.034,77**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp49.786.382.574,55	Rp8.338.721.467,86

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.786.382.574,55 yakni Kas saldo giro bank milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp49.649.429.220,55 dan Kas Pengembalian Dana BOSP sebesar Rp136.953.354,00 yang telah disetor ke Kas daerah pada Tahun 2026. Daftar kas di setiap rekening kas daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 59. Daftar Kas pada Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025

NO	Nama Bank	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320.01.02.000266-0	49.649.429.220,55	8.338.721.467,86
2	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320. 01.02.000001-0	0,00	0,00
3	Bank BRI Cabang Tarutung AC. 0099.01.000027.30.2	0,00	0,00
4	Pengembalian Dana BOSP yang telah disetor ke Kasda pada Tahun 2026	136.953.354,00	0,00
Jumlah		**Rp49.786.382.574,55**	**8.338.721.467,86**

Kas Daerah pada Tahun 2025 merupakan kas yang terdiri dari kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp31.065.597.414,00 dan kas bebas sebesar Rp18.720.785.160,55 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 60. Perincian Kas Berdasarkan Penggunaannya per 31 Desember 2025

NO	Uraian	Sisa Saldo 2025 (Rp)
1	SiLPA DAU Gaji THR dan ke-13 Guru PNS dan PPPK	21.847.583.000,00
2	SiLPA Bantuan Bencana (Banpres dan Bantuan Provinsi)	1.224.897.356,00
3	SiLPA DAU Kesehatan	538.066.726,00
4	SiLPA DAU Pendidikan	97.215.198,00
5	SiLPA DAU Kelurahan	96.650.242,00
6	SiLPA DAK Non Fisik BOK	1.394.679.407,00
7	SiLPA DAK Non Fisik BOK POM	76.234.400,00
8	SiLPA DAK Non Fisik BOKB	174.507.432,00
9	SiLPA DAK Non Fisik Pertanian	27.450.000,00
10	SiLPA DAK Non Fisik Ketapang dan Pertanian	523.962.738,00
11	SiLPA DAK Non Fisik Pangan	220.950.000,00
12	SiLPA TPG Tahun 2025	1.476.970.920,00
13	SiLPA Tambahan Penghasilan Guru	2.612.000.824,00
14	SiLPA DBH Sawit	617.475.817,00
15	SiLPA Dana BOSP	136.953.354,00
16	SiLPA Bebas	18.720.785.160,55
Jumlah		**49.786.382.574,55**

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp49.129.000,00

Saldo kas yang ada di bendahara penerimaan SKPD per 31 Desember 2025 adalah Nihil.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp108.939.603,00

Saldo kas yang ada di bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2025 adalah Nihil.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp8.081.257.623,00	Rp805.407.416,00

Saldo kas di BLUD RSU Daerah Tarutung Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.081.257.263,00 dengan perincian sebagai berikut.

1. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp44.657.810,00;
2. Kas di rekening PT. BRI Tbk AC. 0099-01-001041-30-9 sebesar Rp7.883.109.905,00; dan
3. Kas di rekening PT. Bank SUMUT No. Rek 320.02.04.003687-9 sebesar Rp153.489.908,00.

5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp320.845.765,80	Rp439.505.723,80

Kas Dana BOSP merupakan sisa Kas Dana BOSP yang pengelolaannya melalui rekening Dana BOSP pada SD Negeri, SMP Negeri, dan PAUD Negeri di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Saldo kas di bendahara BOSP sebesar Rp320.845.765,80. Perincian sisa kas di Bendahara BOSP dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 61. Perincian Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	**Perincian Perhitungan Kas Dana BOSP**	
A	**Kas Bendahara BOSP SD**	
1	Saldo Awal	329.123.424,00
2	Autodebit ke Kasda	(109.605.565,00)
3	Koreksi Saldo Kas Dana BOSP	24.327.908,00
4	Pendapatan Dana BOSP	35.261.484.399,00
5	Belanja Dana BOSP	(35.248.453.654,00)
Sisa Dana BOSP SD Tahun 2025		**256.876.512,00**
B	**Kas Bendahara BOSP SMP**	
1	Saldo Awal	110.382.299,80
2	Autodebit ke Kasda	(61.727.542,00)
3	Koreksi Saldo Kas Dana BOSP	9.080.000,00
4	Pendapatan Dana BOSP	22.865.544.000,00
5	Belanja Dana BOSP	(22.859.309.504,00)
Sisa Dana BOSP SMP Tahun 2025		**63.969.253,80**
C	**Kas BOP PAUD**	
1	Saldo Awal	0,00
2	Pendapatan	4.196.567.550,00
3	Belanja	(4.196.567.550,00)
Sisa Dana BOP PAUD Tahun 2025		**0,00**
Total Sisa Dana BOSP SD + BOSP SMP + BOP PAUD		**320.845.765,80**

Realisasi penggunaan Dana BOSP tingkat SD Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 7** dan Realisasi penggunaan Dana BOSP tingkat SMP Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp807.533.610,20	Rp50.024.510,20

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan sisa Dana Kapitasi BPJS yang masih berada pada Bendahara Dana JKN sebesar Rp807.533.610,20.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara mengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS). Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana JKN memedomani Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, Realisasi Dana Kapitasi BPJS di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 62. Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi JKN Tahun 2025

No.	FKTP	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Puskesmas Parmonangan	488.469,00	365.101.142,00	(347.310.131,00)	18.279.480,00
2	Puskesmas Siatas Barita	4.673.039,00	873.567.240,00	(834.328.264,00)	43.912.015,00
3	Puskesmas Siborongborong	3.839.655,00	1.696.641.261,00	(1.611.808.811,00)	88.672.105,00
4	Puskesmas Aek Raja	135.905,00	429.106.829,00	(406.911.028,00)	22.331.706,00
5	Puskesmas Janji Angkola	621.694,00	376.339.668,00	(357.522.887,00)	19.438.475,00
6	Puskesmas Sipahutar	10.093.858,00	1.310.668.926,00	(1.251.046.654,00)	69.716.130,00
7	Puskesmas Hutabaginda	5.528.243,00	1.995.330.977,00	(1.900.819.260,00)	100.039.960,00
8	Puskesmas Pangaribuan	1.112.135,00	794.038.715,00	(755.393.308,00)	39.757.542,00
9	Puskesmas Silangit	388.888,00	570.936.110,00	(542.758.749,00)	28.566.249,00
10	Puskesmas Butar	733.535,00	636.751.776,00	(604.917.187,00)	32.568.124,00
11	Puskesmas Sitadatada	160.996,00	431.633.166,00	(410.204.454,00)	21.589.708,00
12	Puskesmas Simangumban	209.660,00	390.423.859,00	(370.902.666,00)	19.730.853,00

No.	FKTP	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
13	Puskesmas Lumban Sinaga	1.391.681,00	552.365.482,00	(524.677.625,00)	29.079.538,00
14	Puskesmas Sipultak	6.027.804,00	386.044.346,00	(372.467.999,00)	19.604.151,00
15	Puskesmas Muara	1.124.137,00	743.449.837,00	(707.345.275,00)	37.228.699,00
16	Puskesmas Garoga	1.613.402,00	761.423.942,00	(724.888.233,00)	38.149.111,00
17	Puskesmas Parsingkaman	40.846,00	643.615.430,00	(609.305.100,00)	34.351.176,00
18	Puskesmas Situmeang Habinsaran	5.730.536,00	683.676.822,00	(654.936.993,00)	34.470.365,00
19	Puskesmas Onang Hasang	1.480.309,00	616.043.869,00	(573.890.908,00)	43.633.270,00
20	Puskesmas Sarulla	4.528.913,00	704.684.199,00	(673.752.460,00)	35.460.652,00
21	Puskesmas Paniaran	100.805,20	613.432.156,00	(582.578.660,00)	30.954.301,20
Jumlah		**50.024.510,20**	**15.575.275.752,00**	**(14.817.766.652,00)**	**807.533.610,20**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

5.3.1.1.7 Kas BOK Puskesmas

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp163.482.934,00	Rp662.052.189,00

Kas BOK Puskesmas merupakan Sisa Dana BOK Puskesmas Kesehatan DAK Non Fisik sebesar Rp163.482.934,00 pada Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan Realisasi Dana BOK Puskesmas Kesehatan DAK Non Fisik di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 63. Anggaran dan Realisasi Dana BOK Puskesmas Tahun 2025

No.	FKTP	Saldo Awal (Rp)	Dana Masuk Dikurangi Pemotongan Transfer (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Puskesmas Aek Raja	36.368.890,00	730.106.110,00	(761.088.460,00)	5.386.540,00
2	Puskesmas Butar	40.063.809,00	713.090.191,00	(747.562.963,00)	5.591.037,00
3	Puskesmas Garoga	27.552.603,00	953.942.397,00	(977.995.843,00)	3.499.157,00
4	Puskesmas Hutabaginda	52.680.419,00	1.057.202.581,00	(1.081.730.831,00)	28.152.169,00
5	Puskesmas Janji Angkola	19.858.610,00	795.174.390,00	(812.395.401,00)	2.637.599,00
6	Puskesmas Lumban Sinaga	10.319.316,00	889.225.684,00	(899.421.600,00)	123.400,00
7	Puskesmas Muara	14.862.170,00	926.387.830,00	(939.526.053,00)	1.723.947,00
8	Puskesmas Onan Hasang	12.427.567,00	889.831.433,00	(898.214.362,00)	4.044.638,00
9	Puskesmas Pangaribuan	13.678.396,00	883.683.604,00	(897.242.000,00)	120.000,00

No.	FKTP	Saldo Awal (Rp)	Dana Masuk Dikurangi Pemotongan Transfer (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
10	Puskesmas Paniaran	9.285.501,00	745.289.499,00	(749.582.785,00)	4.992.215,00
11	Puskesmas Parmonangan	160.442.001,00	719.954.999,00	(877.491.735,00)	2.905.265,00
12	Puskesmas Parsingkaman	31.621.381,00	908.526.619,00	(940.028.000,00)	120.000,00
13	Puskesmas Sarulla	3.086.901,00	890.236.099,00	(893.163.000,00)	160.000,00
14	Puskesmas Siatas Barita	32.826.085,00	831.081.915,00	(857.721.704,00)	6.186.296,00
15	Puskesmas Siborongborong	8.125.472,00	948.249.528,00	(929.574.561,00)	26.800.439,00
16	Puskesmas Silangit	24.466.900,00	729.610.100,00	(747.183.039,00)	6.893.961,00
17	Puskesmas Simangumban	3.739.965,00	803.866.035,00	(807.446.000,00)	160.000,00
18	Puskesmas Sipahutar	15.254.275,00	1.018.520.725,00	(1.030.993.234,00)	2.781.766,00
19	Puskesmas Sipultak	54.613.200,00	510.288.800,00	(519.324.997,00)	45.577.003,00
20	Puskesmas Sitada-Tada	57.925.429,00	716.172.571,00	(763.020.902,00)	11.077.098,00
21	Puskesmas Situmeang Habinsaran	32.853.299,00	801.985.701,00	(830.288.596,00)	4.550.404,00
Jumlah		**662.052.189,00**	**17.462.426.811,00**	**(17.960.996.066,00)**	**163.482.934,00**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp479.785.637,20	Rp229.682.200,12

Kas lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp229.682.200,12 yang terdiri dari utang PFK PPN Pusat atas belanja barang/jasa BOSP Tahun 2024 sebesar Rp9.943.018,92 yang telah disetorkan ke Kas Negara dan Kas Non Kapitasi pada Puskesmas sebesar Rp219.739.191,20.

Sedangkan Saldo Kas Lainnya pada 31 Desember 2025 sebesar Rp479.785.637,20 yakni Kas Dana Non Kapitasi pada FKTP Puskesmas sebesar Rp479.785.637,20 yang merupakan pembayaran klaim dari BPJS atas pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan oleh FKTP yang belum disetorkan per 31 Desember 2025. Perincian Kas dana non Kapitasi pada FKTP sebagai berikut.

Tabel 64. Anggaran dan Realisasi Dana Non Kapitasi Puskesmas Tahun 2025

No.	FKTP	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Puskesmas Parmonangan	15.785,00	4.788.400,00	(797.100,00)	4.007.085,00
2	Puskesmas Siatas Barita	143.868,00	192.469.257,00	(126.314.331,80)	66.298.793,20
3	Puskesmas Siborongborong	28.871.039,80	87.299.681,00	(78.526.156,80)	37.644.564,00

No.	FKTP	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
4	Puskesmas Aek Raja	12.033.541,00	48.079.101,00	(37.713.080,80)	22.399.561,20
5	Puskesmas Janji Angkola	5.633.038,20	27.918.615,00	(25.737.017,60)	7.814.635,60
6	Puskesmas Sipahutar	25.413.008,40	98.843.970,00	(90.946.274,00)	33.310.704,40
7	Puskesmas Hutabaginda	51.829.833,00	130.884.447,00	(128.049.552,00)	54.664.728,00
8	Puskesmas Pangaribuan	59.179,60	51.185.250,00	(24.783.303,00)	26.461.126,60
9	Puskesmas Silangit	5.709.521,60	119.181.289,00	(69.893.438,00)	54.997.372,60
10	Puskesmas Butar	8.857.400,00	38.879.600,00	(29.639.000,00)	18.098.000,00
11	Puskesmas Sitadatada	73.583,00	32.708.300,00	(21.318.400,00)	11.463.483,00
12	Puskesmas Simangumban	84.600,00	25.589.584,00	(3.841,00)	25.670.343,00
13	Puskesmas Lumban Sinaga	1.601.720,20	33.584.595,00	(21.579.677,20)	13.606.638,00
14	Puskesmas Sipultak	37.563,60	27.188.417,00	(15.985.850,40)	11.240.130,20
15	Puskesmas Muara	5.642.613,40	20.986.576,00	(16.777.063,00)	9.852.126,40
16	Puskesmas Garoga	21.663.780,00	25.610.353,00	(35.968.430,00)	11.305.703,00
17	Puskesmas Parsingkaman	10.652.686,80	38.389.907,00	(38.373.002,80)	10.669.591,00
18	Puskesmas Situmeang Habinsaran	13.169.472,60	46.977.036,00	(45.212.746,00)	14.933.762,60
19	Puskesmas Onang Hasang	6.746.289,60	29.823.294,00	(23.669.354,60)	12.900.229,00
20	Puskesmas Sarulla	7.208.214,40	26.388.301,00	(23.173.300,00)	10.423.215,40
21	Puskesmas Paniaran	14.292.443,00	58.260.728,00	(50.529.326,00)	22.023.845,00
Jumlah		**219.739.181,20**	**1.165.036.701,00**	**(904.990.245,00)**	**479.785.637,20**

5.3.1.1.9 Setara Kas Lainnya

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.548.446.004,94	Rp0,00

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membuka rekening donasi penanggulangan bencana hidrometeorologi Tapanuli Utara pada posko tanggap darurat bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada PT. Bank SUMUT dengan nomor rekening 320.0204.0212.531 an. Donasi Bencana Kab. Taput 2025 yang bersumber dari donasi masyarakat/ pihak ketiga ataupun pemerintah lainnya dengan sisa Saldo per 31 Januari 2026 sebesar Rp1.548.446.004,94. Rekening dana donasi tersebut bukan merupakan bagian dari kas dan setara kas pada neraca. Berikut adalah mutasi dana donasi penanggulangan bencana hidrometeorologi.

Tabel 65. Mutasi Rekening Donasi Bencana Kab. Taput 2025

NO	Nama Bank	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	320.0204.0212.531 an. Donasi Bencana Kab. Taput 2025	1.000.258.844,00	2.548.704.848,94	1.548.446.004,94

5.3.1.2 Piutang Daerah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp44.380.636.270,42	Rp86.022.100.727,72

Piutang Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44.380.636.270,42 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 66. Daftar Piutang Daerah TA 2025

No.	Nama Piutang	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Piutang Pajak Daerah	16.507.122.942,45	15.882.122.971,00	624.999.971,45
2	Piutang Retribusi Daerah	1.070.317.474,13	978.590.264,13	91.727.210,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	14.185.730.743,84	15.570.144.767,00	(1.384.414.023,16)
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	12.617.465.110,00	46.784.244.939,00	(34.166.779.829,00)
7	Piutang Lainnya	0,00	6.806.997.786,59	(6.806.997.786,59)
Total		**44.380.636.270,42**	**86.022.100.727,72**	**(41.641.464.457,30)**

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan perincian piutang daerah sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp16.507.122.942,45	Rp15.882.122.971,00

Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.507.122.942,45 mengalami kenaikan sebesar Rp624.999.971,45 dengan perincian dalam tabel berikut.

Tabel 67. Daftar Piutang Pajak Daerah TA 2025

No.	Nama Piutang	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Piutang Pajak Hotel	25.315.200,00	25.315.200,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	299.384.037,00	300.134.037,00	(750.000,00)
3	Piutang Pajak Hiburan	18.561.200,00	18.561.200,00	0,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.143.468.405,45	15.517.718.434,00	625.749.971,45
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.394.100,00	20.394.100,00	0,00
Jumlah		**16.507.122.942,45**	**15.882.122.971,00**	**624.999.971,45**

Keterangan perincian piutang pajak daerah terdapat pada **Lampiran 9.**

5.3.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.070.317.474,13	Rp978.590.264,13

Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.070.317.474,13 mengalami kenaikan sebesar Rp91.727.210,00. Perincian daftar piutang retribusi sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

Tabel 68. Daftar Piutang Retribusi Daerah TA 2025

No.	Nama Piutang	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	1.070.317.474,13	978.590.264,13	91.727.210,00
Jumlah		**1.070.317.474,13**	**978.590.264,13**	**91.727.210,00**

Keterangan lebih perincian piutang retribusi daerah terdapat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 adalah Nihil.

5.3.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp14.185.730.743,84	Rp15.570.144.767,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 adalah sebesar Rp14.185.730.743,84 yang merupakan piutang dana bergulir sebesar Rp3.522.788.739,00, piutang penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi keuangan daerah sebesar Rp3.814.475.650,84 dan piutang pendapatan BLUD RSU Daerah Tarutung sebesar Rp6.848.466.354,00. Penjelasan piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 sebagai berikut.

5.3.1.2.4.1 Piutang Dana Bergulir

Piutang Dana Bergulir merupakan piutang dana bergulir dan Dana Bona Pasogit yang telah disalurkan seluruhnya kepada masyarakat penerima.

Perincian piutang dana bergulir yang telah disalurkan ke masyarakat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 69. Dana Bergulir

No.	Tahun Anggaran	Dana Bergulir (Rp)	Bona Pasogit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2002	382.656.220,00	500.000.000,00	882.656.220,00
2	2003	540.000.000,00	500.000.000,00	1.040.000.000,00
3	2004	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
4	2005	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
5	2006	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
6	2007	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
7	2008	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
Bunga yang menjadi pokok dana bergulir		0,00	60.132.519,00	60.132.519,00
Jumlah		**2.462.656.220,00**	**1.060.132.519,00**	**3.522.788.739,00**

5.3.1.2.4.2 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sebesar Rp3.814.475.650,84 yang merupakan piutang TGR yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp3.799.044.191,63 dan piutang TGR temuan BPK atas kekurangan volume pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp15.431.459,21. Perincian piutang TGR Kerugian Daerah yang telah ditetapkan statusnya dapat dilihat pada **lampiran 11**.

5.3.1.2.4.3 Piutang Pendapatan BLUD

Saldo piutang pendapatan BLUD sebesar Rp6.848.466.354,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 70. Daftar Piutang BLUD RSU Daerah Tarutung Tahun 2025

No.	Nama Piutang	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Piutang usaha dari jasa layanan umum BPJS Pasien Covid 19	350.700,00	7.203.076.200,00	(7.202.725.500,00)
2	Piutang usaha dari jasa layanan umum BPJS Kesehatan	5.100.222.300,00	5.422.533.000,00	(322.310.700,00)
3	Piutang usaha dari jasa layanan umum BPJS Obat Kronis	1.462.471.206,00	2.684.316.923,00	(1.221.845.717,00)
4	Piutang Pelayanan lainnya	51.485.848,00	161.340.144,00	(109.854.296,00)
5	Piutang Usaha dari Jasa Layanan Umum BPJS Ambulance	233.936.300,00	98.878.500,00	135.057.800,00
Total		**6.848.466.354,00**	**15.570.144.767,00**	**(8.721.678.413,00)**

5.3.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
0,00	Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 adalah nihil.

5.3.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp12.617.465.110,00	Rp46.784.244.939,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 merupakan piutang transfer dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp12.617.465.110,00, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 71. Daftar Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025

No.	Nama Piutang	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	**Piutang DBH Tahun 2023**	**0,00**	**7.127.820.299,00**	**(7.127.820.299,00)**
	- Piutang Bagi Hasil PKB	0,00	2.194.162.696,00	(2.194.162.696,00)
	- Piutang Bagi Hasil BBNKB	0,00	931.286.838,00	(931.286.838,00)
	- Piutang Bagi Hasil PBBKB	0,00	3.969.628.429,00	(3.969.628.429,00)
	- Piutang Bagi Hasil PAP	0,00	32.742.336,00	(32.742.336,00)
2	**Piutang DBH Tahun 2024**	**0,00**	**37.660.283.640,00**	**(37.660.283.640,00)**
	- Piutang Bagi Hasil PKB	0,00	14.916.204.269,00	(14.916.204.269,00)
	- Piutang Bagi Hasil BBNKB	0,00	8.470.417.896,00	(8.470.417.896,00)
	- Piutang Bagi Hasil PBBKB	0,00	12.966.380.479,00	(12.966.380.479,00)
	- Piutang Bagi Hasil PAP	0,00	1.307.280.996,00	(1.307.280.996,00)
3	**Piutang DBH Tahun 2025**	**12.617.465.110,00**	**0,00**	**12.617.465.110,00**
	- Piutang Bagi Hasil PKB	70.663.451,00	0,00	70.663.451,00
	- Piutang Bagi Hasil BBNKB	114.788.536,00	0,00	114.788.536,00
	- Piutang Bagi Hasil PBBKB	9.388.478.453,00	0,00	9.388.478.453,00
	- Piutang Bagi Hasil PAP	3.043.534.670,00	0,00	3.043.534.670,00
4	**Piutang Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**	**0,00**	**1.996.141.000,00**	**(1.996.141.000,00)**
	- Piutang BKPSU Tahun 2024	0,00	1.996.141.000,00	(1.996.141.000,00)
Total Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025		**12.617.465.110,00**	**46.784.244.939,00**	**(34.166.779.829,00)**

5.3.1.2.7 Piutang Lainnya

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp6.806.997.786,59

Saldo Piutang Lainnya Tahun 2025 adalah nihil.

5.3.1.3 Penyisihan Piutang

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
(Rp16.665.496.959,86)	(Rp20.605.304.985,32)

Penyisihan piutang daerah Tahun 2025 sebesar (Rp16.665.496.959,86) mengalami penurunan sebesar Rp5.736.169.785,30 sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

Tabel 72. Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan TA 2025

No.	Penyisihan Piutang	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	(25.315.200,00)	(25.315.200,00)	0,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	(299.384.037,00)	(300.134.037,00)	750.000,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	(18.561.200,00)	(18.561.200,00)	0,00
4	Penyisihan Piutang PBBP2	(11.563.119.940,67)	(8.525.201.422,78)	(3.037.918.517,89)
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	(10.197.050,00)	0,00	(10.197.050,00)
6	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	(1.070.317.474,13)	(887.201.964,34)	(183.115.509,79)
7	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(3.522.788.739,00)	(3.522.788.739,00)	0,00
8	Penyisihan Piutang DBH Provsu	(155.813.319,06)	(7.316.121.717,20)	7.160.308.398,13
9	Penyisihan Piutang BKPSU	0,00	(9.980.705,00)	9.980.705,00
Jumlah		**(16.665.496.959,86)**	**(20.605.304.985,32)**	**3.939.808.025,45**

Perincian penyisihan piutang dan piutang daerah Tahun 2025 sebagaimana pada **Lampiran 12**.

5.3.1.4 Beban Dibayar di Muka

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp0,00

Jumlah saldo beban dibayar di muka pada Tahun 2025 adalah Nihil.

5.3.1.5 Persediaan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp50.023.244.074,47	Rp16.503.252.863,80

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai pada tiap SKPD per 31 Desember 2025 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun sebesar Rp50.023.244.074,47 mengalami kenaikan sebesar Rp33.159.511.761,51 dari Tahun 2024. Perincian persediaan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 73. Perincian Persediaan TA 2025

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	460.252.125,00	596.627.125,00	(136.375.000,00)
2	Bahan Bakar dan Pelumas	30.846.327,00	0	30.846.327,00

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6.810.000,00	16.860.000,00	(10.050.000,00)
4	Bahan Lainnya	2.707.954.115,78	2.338.725.276,80	369.228.838,98
5	Alat Tulis Kantor	110.212.415,00	156.956.485,00	(46.744.070,00)
6	Bahan Cetak	589.161.945,00	722.793.165,00	(133.631.220,00)
7	Benda Pos	494.000,00	2.150.000,00	(1.656.000,00)
8	Perabot Kantor	490.000,00	110.000,00	380.000,00
9	Alat Listrik	103.603.025,00	13.095.440,00	90.507.585,00
10	Perlengkapan Pendukung Olahraga	708.000,00	15.000,00	693.000,00
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	68.061.150,00	75.984.815,00	(7.923.665,00)
12	Obat	11.574.422.375,81	12.115.427.637,00	(541.005.261,19)
13	Obat-obatan Lainnya	52.100,00	452.700,00	(400.600,00)
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	34.149.945.970,99	375.162.112,00	33.774.783.858,99
15	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	112.099.999,89	0	112.099.999,89
16	Pakan	93.730.525,00	88.893.108,00	4.837.417,00
17	Natura dan Pakan Lainnya	14.400.000,00	0	14.400.000,00
Total		**50.023.244.074,47**	**16.503.252.863,80**	**33.519.991.210,67**

Berdasarkan perincian persediaan pada tabel di atas, terdapat kenaikan yang sangat signifikan pada persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan adanya koreksi pencatatan persediaan berupa Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya dicatat pada Aset Tetap sebesar Rp32.277.269.858,99, namun status aset tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melainkan pihak ketiga yakni Pemerintah Desa dan pihak lainnya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat merupakan persediaan.

Daftar persediaan per SKPD Tahun 2025 terdapat pada **lampiran 13**.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp75.517.540.181,00	Rp76.323.268.075,00

Jumlah investasi jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp75.517.540.181,00 yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Perincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 74. Daftar Investasi Jangka Panjang TA 2025

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	75.517.540.181,00	76.323.268.075,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**75.517.540.181,00**	**76.323.268.075,00**

5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 adalah Nihil.

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp75.517.540.181,00	Rp76.323.268.075,00

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebesar Rp75.517.540.181,00 mengalami penurunan sebesar Rp805.727.894,00 dari Tahun sebelumnya sebesar Rp76.323.268.075,00. Perincian investasi jangka panjang permanen Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 75. Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2025

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN PER 31 DES 2025	METODE	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	PDAM Mual Na Tio	100%	Ekuitas	33.050.589.243,00	33.853.980.071,00	(803.390.828,00)
2	Perseroda Pertanian	100%	Ekuitas	6.801.061.169,00	6.803.398.235,00	(2.337.066,00)
3	PT Bank Sumut	1,41%	Beban	35.665.889.769,00	35.665.889.769,00	-
Jumlah				**75.517.540.181,00**	**76.323.268.075,00**	**(805.727.894,00)**

5.3.2.2.1 Penyertaan Modal kepada PDAM Mual Na Tio

Jumlah penyertaan modal kepada PDAM Mual Na Tio sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp38.193.280.528,00.

Kemudian terdapat juga penyertaan modal dari Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp2.814.498.342,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 268/DCKP/2012 Nomor: 6905151/PDAM/2012.

Total akumulasi saldo rugi PDAM Mual Natio hingga 31 Desember 2024 sebesar (Rp7.815.333.547,00), kemudian adanya Laba Neto sebesar Rp999.427.440,00 yakni Laba Tahun 2024 sebesar Rp.661.534.748,00 dan koreksi Manfaat Beban Pajak Tangguhan tahun sebelumnya sebesar Rp337.892.693,00.

Pada Tahun 2025 tidak terdapat penyertaan modal kepada PDAM Mual Natio dan sesuai Laporan Keuangan terdapat rugi tahun 2025 sebesar (Rp1.141.283.520,00) sehingga total investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PDAM Mual Natio sebesar Rp33.050.589.243,00.

Untuk posisi penyertaan modal pada PDAM Mual Natio sampai dengan posisi 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 76. Penyertaan Modal pada PDAM Mual Natio

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Modal Disetor s.d. 31 Desember 2025	38.193.280.528,00
2	Modal Pemerintah Pusat	2.814.498.342,00
3	Laba (rugi) s.d Tahun 2024	(7.815.333.547,00)
4	Laba Neto	999.427.440,00
5	Penyertaan Modal Tahun 2025	0,00
6	Laba (rugi) Tahun 2025	(1.141.283.520,00)
Jumlah		**33.050.589.243,00**

Laporan Keuangan Perumda PDAM Mual Natio diaudit oleh KAP SB dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Perincian laporan keuangan PDAM Mual Natio terdapat dalam **lampiran** sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.2.2.2 Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara dan Perusahaan Daerah Pariwisata dan Perhotelan Kabupaten Tapanuli Utara serta Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian, Perusahaan Daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara

digabungkan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian. Atas dasar hal tersebut, maka Laporan Keuangan Perseroan Daerah Pertanian merupakan Laporan Keuangan konsolidasi antara Perusda Pertanian dan Perusda Pertambangan.

Jumlah penyertaan modal hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp20.500.000.000,00 akumulasi kerugian bidang pertanian hingga 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.332.209.220,00), koreksi modal atas penggabungan Perusda Pertambangan sebesar (Rp5.494.371.654,00), koreksi atas laba Tahun sebelumnya untuk Utang Pajak sebesar (Rp870.020.891,00) dan rugi Tahun 2025 sebesar Rp2.337.066,00 serta terdapat pengembalian penyertaan modal ke kas daerah sebesar (Rp3.000.000.000,00) sehingga nilai investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.801.061.169,00.

Perincian perhitungan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 77. Perincian Penyertaan Modal Perseroda Pertanian Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Modal Disetor s.d. 31 Desember 2025	20.500.000.000,00
2.	Penyertaan Modal Tahun 2025	0,00
3.	Laba (rugi) Perusda Pertanian s.d Tahun 2024	(4.332.209.220,00)
4.	Koreksi Perusda Pertambangan s.d Tahun 2024	(5.494.371.654,00)
5.	Koreksi atas laba Tahun sebelumnya untuk Utang Pajak	(870.020.891,00)
6.	Laba (rugi) Tahun 2025	(2.337.066,00)
7.	Pengembalian Penyertaan Modal ke Kasda	(3.000.000.000,00)
Jumlah		**6.801.061.169,00**

Laporan Keuangan Perseroda Pertanian diaudit oleh KAP SB dengan opini tidak menyatakan pendapat. Perincian laporan keuangan Perseroda Pertanian terdapat dalam **lampiran** sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.2.2.3 Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut

Jumlah penyertaan modal ke PT. Bank Sumut sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp35.665.889.769,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 3.566.589 lembar. Jumlah lembar saham Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diinvestasikan ke dalam saham PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 78. Jumlah Lembar Saham Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut

No.	Hasil RUPS	% Kepemi-likan	Tanggal	Jumlah Saham (lembar)
1	No.008/DIR/DPEMTS/SKS/2001	0,3	28-Jun-01	132.017
2	No.008/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	26.632
3	No.036/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	10.000
4	No.005/DIR/DTS-TS/SKS/2006	3,63	24-Mar-06	116.919
5	No.007/DIR/DTS-TS/SKS/2007	0,91	14-Feb-07	76.001
6	No.029/DIR/DTSPPJ/SKS/2007	3,18	12-Nov-07	299.240

No.	Hasil RUPS	% Kepemi-likan	Tanggal	Jumlah Saham (lembar)
7	No.005/DIR/DTSPPJ/SKS/2008	3,28	30-Des-08	75.503
8	No.006/DIR/DTSPPJ/SKS/2009	2,38	23-Okt-09	60.000
9	No.006/DIR/DTSPDJ/SKS/2011	1,84	28-Mar-11	396.688
10	No.008/Dir/DTs-PDJ/SKS/2013	1,62	08-Feb-13	349.471
11	No. 2767/RC1Z-PN/HRS/2013	1,72	24-Des-13	143.545
12	No. 007/SP-SPr/SKS/2017	1,60	21-Mar-17	217.062
13	No. 039/SP-SPr/SKS/2017	1,69	08-Mar-18	314.952
14	No. 006/Dir/SP-SPr/SKS/2019	1,76	18-Mar-19	348.820
15	No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2020	1,5	24-Peb-20	290.098
16	No. 001/Dir/SP-SPr/SKS/2021	1,45	04 Mar-21	155.943
17	No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2022	1,42	02-Mar-22	253.698
18	No. 025/Dir/SP-SPr/SKS/2022	1,45	30-Ags-22	300.000
Jumlah				**3.566.589**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut telah mencapai Rp35.665.889.769,61. Untuk lebih rinci daftar modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 79. Daftar Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut

No.	Tahun Anggaran	Penyertaan Modal (Rp)
1	2001	1.320.170.000,00
2	2005	366.320.000,00
3	2006	1.169.190.000,00
4	2007	3.752.410.000,00
5	2008	755.030.000,00
6	2009	600.000.000,00
7	2011	3.966.880.000,00
8	2012	3.494.710.000,00
9	2013	1.435.450.000,00
10	2016	2.170.620.000,00
11	2017	3.149.529.251,00
12	2018	3.488.198.234,00
13	2019	2.900.981.425,00
14	2020	1.559.428.709,00
15	2021	2.536.977.814,00
16	2022	2.999.994.336,00
	Jumlah	**35.665.889.769,00**

5.3.3. Aset Tetap

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp2.380.040.882.536,03	Rp2.407.335.274.480,14

Saldo aset tetap Tahun 2025 sebesar Rp2.380.040.882.536,03 mencakup saldo awal aset tetap ditambah dengan belanja modal pada Tahun berjalan, mutasi penambahan dan mutasi pengurangan atas aset tetap Tahun 2025. Rekapitulasi aset tetap sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 80. Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1.3	**ASET TETAP**	**2.380.040.882.536,03**	**2.407.335.274.480,14**	**(27.294.391.944,11)**
1.3.01	Tanah	814.647.758.614,00	851.271.193.314,00	(36.623.434.700,00)
1.3.02	Peralatan dan Mesin	493.120.971.414,52	454.304.118.366,00	38.816.853.048,52
1.3.03	Gedung dan Bangunan	838.614.196.439,19	816.892.322.252,55	21.721.874.186,64
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.878.411.126.057,99	1.866.176.536.837,11	12.234.589.220,88
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	129.491.120.199,01	31.075.123.196,00	98.415.997.003,01
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.409.927.486,00	0,00	1.409.927.486,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.775.654.217.674,68)	(1.612.384.019.485,52)	(163.270.198.189,16)

Rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap Tahun 2025 sebagaimana pada **Lampiran 14** dan saldo aset tetap per SKPD pada **Lampiran 15**.

Aset Tetap sebagaimana pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.3.1 Tanah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp814.647.758.614,00	Rp851.271.193.314,00

Saldo aset tetap tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp814.647.758.614,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 81. Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	(Pengurangan) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
851.271.193.314,00	326.059.320,00	(36.949.494.020,00)	814.647.758.614,00

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 82. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025

URAIAN	SALDO 2025 (Rp)	SALDO 2024 (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2025	**851.271.193.314,00**	**851.271.193.314,00**
Mutasi Bertambah	**326.059.320,00**	**-**
- Belanja Modal TA 2025	0,00	-
- Hibah dari Masyarakat	326.059.320,00	-
Mutasi Berkurang	**(36.949.494.020,00)**	**-**
- Hibah kepada Pemerintah Pusat	(2.813.692.120,00)	-
- Reklasifikasi ke Aset Property Investasi	(34.135.801.900,00)	
Saldo akhir Per 31 Desember 2025	**814.647.758.614,00**	

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp326.059.320,00 merupakan hibah dari pihak masyarakat dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 83. Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tanah Tahun 2025

NO	SKPD	PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	Hibah Tanah untuk jalan	313.575.320,00
2	Kantor Kecamatan Pahae Jae	Hibah Tanah untuk taman	3.628.000,00
3	Kantor Kecamatan Pahae Julu	Hibah Tanah untuk jalan	8.856.000,00
Total			**326.059.320,0**

2. Mutasi berkurang sebesar Rp36.949.494.020,00 terdiri dari:

   a. Adanya hibah tanah ke pihak Pemerintah Pusat sebesar Rp2.813.692.120,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 84. Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tanah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025

NO	URAIAN	NPHD	JUMLAH (Rp)
1	**PUTR**		**450.000.000,00**
	Hibah Tanah ke Imigrasi	032/822.a/BKAD/IX/2025 dan WIM.2.IMI.4-PB.05.03-4872	337.500.000,00
	Hibah Tanah ke TNI-AU	032/846.b/BKAD/IX/2025 dan BA/12/X2025	112.500.000,00
2	**BKAD**		**2.363.692.120,00**
	Hibah Tanah ke Kejaksaan	032/754/BKAD/IX/2025 dan B-2368/L.2.21/Cpl.2/09/2025	1.767.280.000,00
	Hibah Tanah ke TNI-AU	032/846.b/BKAD/IX/2025 dan BA/12/X2025	596.412.120,00
		Total	**2.813.692.120,00**

   b. Reklasifikasi aset tanah ke Aset Properti Investasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp34.135.801.900,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 85. Reklasifikasi Aset Tanah ke Aset Properti Investasi

NO	Uraian	JUMLAH
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	154.118.400,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	16.051.403.500,00
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	237.770.000,00
4	Tanah Kering	1.767.280.000,00
5	Tanah Lapangan Terbang	15.925.230.000,00
Total		**34.135.801.900,00**

Perincian aset tetap tanah per SKPD tercantum dalam **Lampiran 16.**

Aset Tanah Perkara

Terdapat aset tanah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam sengketa/perkara dan proses hukum yakni Tanah RSUD Tarutung dengan uraian sebagai berikut.

1) Nama Aset : Tanah Bangunan Rumah Sakit
2) Luas : 55.000 m2
3) Tahun Perolehan : 1956
4) Nilai : 7.050.624.000,00

Tahun 2020 pihak HKBP melakukan gugatan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan RSUD Tarutung ke Pengadilan Negeri Tarutung, dengan putusan N 0, yang artinya tetap dijalankan sesuai sebagaimana sebelumnya yang artinya tetap tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tidak Puas dengan hasil putusan tersebut, kemudian Tahun 2024 pihak HKBP kembali melakukan gugatan kedua kalinya atas kepemilikan tanah dan bangunan

RSUD Tarutung ke Pengadilan Negeri Tarutung dan hingga saat ini belum ada putusan karena proses hukumnya masih berlangsung.

Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan fasilitas penunjang yang disediakan oleh pengembang untuk menunjang fungsi lingkungan hunian agar layak huni dan berkelanjutan. Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan PSU bagi kesejahteraan Masyarakat. Pada Tahun 2025, berdasarkan hasil inventarisasi dan keterangan dari perangkat daerah teknis, diketahui terdapat enam potensi Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) dari pengembang yang perlu dilakukan pengawasan dan pengelolaan PSU secara optimal sehingga penyerahan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dapat dilaksanakan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 86. Potensi PSU dari Pengembang

No	Pengembang	Luas (m2)	Jenis
1	PT TZ	11.308,00	Tanah untuk jalan lingkungan
		3.084,00	Tahan untuk parit/drainase
		4.610,00	Tanah/lahan sekolah dasar
2	PT TAJ	6.246,00	Tanah untuk lahan terbuka hijau
		-	Tanah untuk jalan dan drainase
3	PT. ASM	-	Tanah untuk jalan dan drainase
		-	Tanah untuk lahan terbuka hijau
4	PT. TBK	-	Tanah untuk jalan dan drainase
		-	Tanah untuk lahan terbuka hijau
5	PT. BSH	2.667,00	Tanah untuk jalan dan drainase
		-	Tanah untuk lahan terbuka hijau
6	PT. RH	12.840,00	Tanah untuk fasos
		10.904,97	Tanah untuk jalan
		1.867,03	Tanah untuk drainase

Aset Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat

Jumlah Aset tanah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah memiliki sertifikat dan yang tidak memiliki sertifikat pada Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 87. Daftar Aset Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tanah Bersertifikat	537	523	14
2	Tanah Tidak Bersertifikat	2.995	2.996	(1)

Perincian aset tetap tanah yang bersertifikat sebagaimana pada **Lampiran 17** dan aset tetap tanah yang belum bersertifikat sebagaimana pada **Lampiran 18.**

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp493.120.971.414,52	Rp454.304.118.366,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2025 adalah sebesar Rp493.120.971.414,52 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 88. Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	(Pengurangan) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
454.304.118.366,00	48.683.613.354,88	(9.866.760.306,36)	493.120.971.414,52

Rekapitulasi mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 89. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Saldo Awal	**454.304.118.366,00**	**454.304.118.366,00**
Mutasi Bertambah	**48.683.613.354,88**	**-**
- Belanja Modal TA 2025	20.939.549.180,71	-
- Hibah Tahun 2025	1.145.951.573,00	-
- Sumber Belanja Tidak Terduga	2.467.537.548,00	-
- Reklasifikasi dari KIB E ke KIB B	44.136.000,00	
- Reklasifikasi beban barang dan jasa ekstrakomptabel KE KIB B	149.161.590,00	
- Reklasifikasi beban barang dan jasa (BHP) KE KIB B	980.714.091,24	
- Koreksi ekuitas	0,80	-
- Mutasi antar SKPD	1.007.930.185,00	
- Reklasifikasi Dari Beban Ke KIB B Setelah Nilai Kapitalisasi	33.150.000,00	
- Koreksi Aset Ekstrakomptabel Ke Intra	21.915.483.186,13	
Mutasi Berkurang	**(9.866.760.306,36)**	**-**
- Reklasifikasi KIB B ke KIB E	(32.786.000,00)	
- Reklasifikasi aset ke beban barang dan jasa ekstrakomptabel	(364.967.906,00)	-
- Reklasifikasi aset ke beban barang dan jasa (BHP)	(375.862.906,00)	-
- Reklasifikasi aset lainnya/ RB	(6.938.216.735,00)	-
- Hibah	(106.499.992,00)	-
- Penghapusan	(1.040.496.582,00)	-
- Inventarisasi	(0,00)	-
- Mutasi antar SKPD	(1.007.930.185,00)	-
- Koreksi ekuitas	(0,36)	-
Saldo akhir	**493.120.971.414,52**	**444.847.733.816,11**

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp26.734.980.168,75 terdiri dari:

a. Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp20.939.549.180,71.

b. Adanya Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pihak ke-3 sebesar Rp1.145.951.573,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 90. Daftar Hibah Peralatan dan Mesin 2025

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Bus Sekolah	1.141.951.573,00
2.	Dinas Ketenagakerjaan	Alat Pengolah Kopi	4.000.000,00
Total			**1.145.951.573,00**

c. Adanya reklasifikasi dari beban yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.467.537.548,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 91. Daftar Peralatan dan Mesin Bersumber dari Beban Tidak Terduga Tahun 2025

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perumahan dan Permukiman	- Pompa	215.869.248,00
		- *Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan	103.396.500,00
		- Peralatan Fasilitas Listrik	2.148.271.800,00
Total			**2.467.537.548,00**

d. Adanya reklasifikasi dari KIB E ke KIB B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp44.136.000,00.

e. Adanya reklasifikasi beban barang dan jasa ekstrakomptabel ke KIB B sebesar Rp149.161.590,00 dengan perincian setiap SKPD sebagai berikut.

Tabel 92. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa Ekstrakomptabel ke KIB B Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	16.400.000,00
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	49.140.090,00
3.	Kantor Kecamatan Siatas Barita	16.500.000,00
4.	Kantor Kecamatan Pahae Jae	15.762.000,00
5.	Kantor Kecamatan Sipahutar	18.259.500,00
6.	Kantor Kecamatan Parmonangan	33.100.000,00
Total		149.161.590,00

f. Adanya reklasifikasi beban barang habis pakai ke KIB B sebesar Rp980.714.091,24 dengan perincian setiap SKPD sebagai berikut.

Tabel 93. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban Barang Pakai Habis ke KIB B Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	38.715.600,00
2.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	43.200.000,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.000.000,00
4.	Dinas Perhubungan	3.824.992,00
5.	Dinas Pertanian	2.115.700,00
6.	Sekretariat Daerah	841.594.800,24
7.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	870.000,00
8.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.409.999,00
9.	Inspektorat	14.800.000,00

No	SKPD	Jumlah (Rp)
10.	Kantor Kecamatan Pahae Jae	6.100.000,00
11.	Kantor Kecamatan Sipahutar	6.483.000,00
12.	Kantor Kecamatan Pangaribuan	4.800.000,00
13.	Kantor Kecamatan Parmonangan	4.800.000,00
Total		**980.714.091,24**

g. Adanya Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.007.930.185,00.

h. Adanya koreksi ekuitas aset peralatan dan mesin sebesar Rp0,80.

i. Adanya reklasifikasi dari beban ke KIB B setelah nilai kapitalisasi sebesar Rp33.150.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 94. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban ke KIB B Setelah Nilai Kapitalisasi Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.200.000,00
2.	Inspektorat	16.000.000,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan	2.300.000,00
4.	Sekretariat Daerah	13.650.000,00
Total		**33.150.000,00**

j. Adanya koreksi aset ekstrakomptabel ke intra sesuai nilai kapitalisasi aset di bawah tahun 2025 sebesar Rp21.915.483.186,13 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 95. Rekapitulasi Koreksi Aset Ekstrakomptabel ke Intra Sesuai Nilai Kapitalisasi di bawah Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	17.076.892.161,00
2	Dinas Kesehatan	3.194.765.397,00
3	RSU Daerah Tarutung	501.924.585,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	23.122.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	12.850.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	30.186.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.380.000,00
8	Dinas Sosial	14.090.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	37.703.698,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	51.438.178,80
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.581.506,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.600.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	401.788.025,00
15	Dinas Perhubungan	22.790.225,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.717.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	19.350.000,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.171.070,00
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.709.200,00
20	Dinas Perpustakaan	48.801.320,00
21	Dinas Pariwisata	67.416.428,32
22	Dinas Pertanian	21.862.760,00
23	Sekretariat Daerah	108.777.063,00
24	Sekretariat DPRD	148.065.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.214.000,00
26	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.711.671,00
27	Badan Pendapatan Daerah	1.380.000,01
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.378.398,00
29	Inspektorat	0,00

No	SKPD	Jumlah (Rp)
30	Kantor Kecamatan Tarutung	5.154.500,00
31	Kantor Kecamatan Siatas Barita	3.050.000,00
32	Kantor Kecamatan Adiankoting	0,00
33	Kantor Kecamatan Sipoholon	0,00
34	Kantor Kecamatan Pahae Julu	8.112.000,00
35	Kantor Kecamatan Pahae Jae	3.546.000,00
36	Kantor Kecamatan Purbatua	2.133.330,00
37	Kantor Kecamatan Simangumban	0,00
38	Kantor Kecamatan Sipahutar	0,00
39	Kantor Kecamatan Pangaribuan	3.230.000,00
40	Kantor Kecamatan Garoga	0,00
41	Kantor Kecamatan Siborongborong	7.046.000,00
42	Kantor Kecamatan Pagaran	0,00
43	Kantor Kecamatan Parmonangan	10.586.400,00
44	Kantor Kecamatan Muara	1.254.885,00
45	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.704.385,00
Total		**21.915.483.186,13**

2. Mutasi berkurang sebesar Rp9.866.760.306,36 terdiri dari:

   a. Reklasifikasi dari KIB B ke KIB E sebesar Rp32.786.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 96. Daftar Reklasifikasi KIB B ke KIB E Tahun 2025

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Buku Umum	29.900.000,00
2.	BKAD	Lukisan	2.886.000,00
Total			**32.786.000,00**

   b. Reklasifikasi aset KIB B ke beban barang dan jasa ekstrakomptabel sebesar Rp364.967.906,00 dengan uraian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 97. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB B ke Beban barang dan jasa ekstrakomptabel Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	324.814.550,00
2.	Dinas Kesehatan	20.358.881,00
3.	RSU Daerah Tarutung	4.131.975,00
4.	Dinas Ketahanan Pangan	8.659.000,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	200.000,00
6.	Dinas Pertanian	3.463.600,00
7.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00
8.	Kantor Kecamatan Parmonangan	3.339.900,00
Total		**364.967.906,00**

   c. Reklasifikasi aset ke belanja barang habis pakai sebesar Rp375.862.906,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 98. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB B ke Beban Barang Pakai Habis Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.812.100,00
2.	Dinas Kesehatan	113.740.318,00
3.	RSU Daerah Tarutung	199.594.324,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	10.649.000,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan	29.550.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	8.314.400,00
7.	Dinas Perpustakaan	1.200.000,00
8.	Dinas Pertanian	4.470.000,00
9.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3.532.764,00
Total		**375.862.906,00**

d. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya/Rusak berat sebesar Rp6.938.216.735,00 dengan perincian SKPD sebagai berikut.

Tabel 99. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB B ke Rusak Berat

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	210.144.854,00
2.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	290.308.981,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	223.599.947,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.560.800,00
5.	Dinas Ketenagakerjaan	239.792.977,00
6.	Dinas Ketahanan Pangan	51.972.925,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	444.710.366,00
8.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	276.290.778,00
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	73.386.280,00
10.	Dinas Perhubungan	13.358.845,00
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	49.069.431,00
12.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.963.486,00
13.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	91.139.934,00
14.	Dinas Pertanian	2.547.900.946,00
15.	Sekretariat Daerah	787.095.724,00
16.	Sekretariat DPRD	259.557.500,00

No	SKPD	Jumlah (Rp)
17.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	78.848.182,00
18.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	848.726.086,00
19.	Inspektorat	70.119.080,00
20.	Kantor Kecamatan Sipoholon	46.171.955,00
21.	Kantor Kecamatan Pahae Jae	35.097.061,00
22.	Kantor Kecamatan Simangumban	28.000.000,00
23.	Kantor Kecamatan Garoga	13.000.000,00
24.	Kantor Kecamatan Siborongborong	43.352.910,00
25.	Kantor Kecamatan Muara	155.047.687,00
Total		**6.938.216.735,00**

e. Berdasarkan aset rusak berat sebagaimana di atas, terdapat aset peralatan dan mesin yang terdampak bencana pada Dinas Kesehatan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 100. Daftar Perincian Aset Peralatan dan Mesin terdampak bencana Tahun 2025

NO	Uraian	Lokasi	Nilai (Rp)
1	Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	Pustu Hutabarat	21.340.000,00
2	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pustu Hutabarat	700.000,00
3	Bangku Tunggu	Pustu Hutabarat	2.354.000,00
4	Timbangan badan (Alat kesehatan Umum lain)	Pustu Hutabarat	4.503.000,00
5	Tensimeter	Pustu Hutabarat	2.450.000,00
6	Meja Kerja Besi/Metal	Pustu Hutabarat	7.408.500,00
7	Diagnostik Set	Pustu Hutabarat	10.340.000,00
8	Timbangan badan (Alat Kedokteran Umum)	Pustu Hutabarat	1.985.000,00
9	Examination Table	Pustu Hutabarat	8.380.178,00
10	Lemari Besi/Metal	Pustu Hutabarat	7.700.000,00
11	Examination Table	Poskesdes Siantar Naipospos	7.872.000,00
12	Lemari Besi/Metal	Poskesdes Siantar Naipospos	7.700.000,00
13	Timbangan badan (Alat kesehatan Umum lain)	Poskesdes Siantar Naipospos	4.503.000,00
14	Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	Poskesdes Siantar Naipospos	25.056.458,00

NO	Uraian	Lokasi	Nilai (Rp)
15	Emergency Kit	Poskesdes Siantar Naipospos	1.791.790,00
16	Emergency Kit	Poskesdes Siantar Naipospos	6.494.620,00
17	Timbangan badan (Alat kesehatan Umum lain)	Poskesdes Siantar Naipospos	2.160.000,00
18	Bangku Tunggu	Poskesdes Siantar Naipospos	2.310.000,00
19	Tempat Tidur Besi	Poskesdes Siantar Naipospos	8.474.290,00
20	Examination Table	Poskesdes Simataniari	8.380.178,00
21	Timbangan badan (Alat Kedokteran Umum)	Poskesdes Simataniari	1.985.000,00
22	Emergency Kit	Poskesdes Simataniari	5.555.000,00
23	Timbangan badan (Alat kesehatan Umum lain)	Poskesdes Simataniari	4.503.000,00
24	Lemari Besi/Metal	Poskesdes Simataniari	12.850.000,00
25	Meja Kerja Besi/Metal	Poskesdes Huta Baru	7.239.870,00
26	Lemari Besi/Metal	Poskesdes Huta Baru	9.018.330,00
27	Timbangan badan (Alat kesehatan Umum lain)	Poskesdes Huta Baru	4.503.000,00
28	Timbangan badan (Alat Kedokteran Umum)	Poskesdes Huta Baru	1.985.000,00
29	Tempat Tidur Besi	Poskesdes Huta Baru	16.417.500,00
30	Tensimeter	Poskesdes Huta Baru	2.450.000,00
31	Alat Kedokteran umum lainnya	Poskesdes Huta Baru	1.735.140,00
Total			**210.144.854,00**

f. Adanya Hibah kepada masyarakat/ pihak ketiga sebesar Rp106.499.992,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 101. Daftar Hibah Peralatan dan Mesin kepada Masyarakat/ pihak ketiga 2025

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Alat Pemancar Satelit (Starlink)	96.999.992,00
2.	Sekretariat Daerah	Alat Musik	9.500.000,00
Total			**106.499.992,00**

g. Adanya penghapusan KIB B sebesar Rp1.040.496.582,00 pada Sekretariat DPRD yaitu Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan yang telah dilelang pada Tahun 2025.

h. Adanya Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.007.930.185,00;

i. Adanya koreksi ekuitas sebesar Rp0,36.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berupa *Smart* TV dan Laptop sebanyak 415 unit yang tersebar di 348 SD Negeri dan 67 SMP Negeri, namun belum dapat dicatat pada Neraca karena belum ada serah terima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 102. Daftar Hibah Smart TV Tahun 2025

NO	SKPD	URAIAN	UNIT SEKOLAH
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SD Negeri	348
		SMP Negeri	67
Total			**415**

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pemeriksaan, terdapat pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin yang perlu dibenahi yaitu terdapat peralatan dan mesin yang masih dikuasai pejabat yang telah mutasi serta belum dikembalikan ke perangkat daerah.

Perincian aset peralatan dan mesin per SKPD tercantum dalam **Lampiran 19**, perincian aset tetap peralatan dan mesin yang dikuasai pihak lain pada **Lampiran 20** dan perincian aset hibah *Smart* TV pada **Lampiran 21**.

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp 838.614.196.439,19	Rp816.892.322.252,55

Saldo aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp838.614.196.439,19 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 103. Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	(Pengurangan) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
816.892.322.252,55	22.611.663.454,14	(889.789.267,50)	838.614.196.439,19

Rekapitulasi mutasi gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 104. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Saldo Awal	**816.892.322.252,55**	**816.892.322.252,55**
Mutasi Bertambah	**22.611.663.454,14**	
- Belanja Modal TA 2025	6.342.671.277,29	
- Hibah	3.619.714.999,00	
- Reklasifikasi Aset dari KIB D ke KIB C	99.860.000,00	
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa (BHP)	228.476.196,89	
- Utang	145.000.000,00	

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
- Mutasi Antar OPD	114.750.000,00	
- Koreksi Ekuitas	1,02	
- Reklasifikasi Dari Beban Ke KIB B setelah nilai kapitalisasi Tahun 2025	106.080.000,00	
- Koreksi Aset Ekstrakomptabel Ke Intra	11.955.110.979,94	
Mutasi Berkurang	**(889.789.267,50)**	
- Reklasifikasi KIB C ke ekstrakomptabel	(258.180.693,07)	
- Reklasifikasi KIB C ke Rusak Berat	(507.976.500,00)	
- Mutasi Antar OPD	(114.750.000,00)	
- Koreksi ekuitas	(1.001,34)	
- Koreksi ke Piutang TGR akibat pekerjaan kurang volume	(8.881.073,09)	
Saldo akhir	**838.614.196.439,19**	**816.892.322.252,55**

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp22.611.663.454,14 terdiri dari:
   a. Pengadaan belanja modal sebesar Rp6.342.671.277,29.
   b. Adanya Hibah dari Pemerintah Pusat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.619.714.999,00 berupa Pasar di Kecamatan Sipahutar.
   c. Adanya reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp354.820.000,00 berupa Bangunan Fasilitas Umum.
   d. Reklasifikasi Aset dari KIB D sebesar Rp99.860.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan berupa Bangunan Peternakan/Perikanan.
   e. Adanya reklasifikasi Beban barang dan jasa sebesar Rp228.476.196,89 dengan uraian OPD sebagai berikut.

Tabel 105. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban Barang/Jasa ke Aset KIB C Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Ketahanan Pangan	25.594.057,00
2.	Dinas Ketenagakerjaan	202.882.139,89
Total		**228.476.196,89**

   f. Adanya Utang Belanja pada Dinas Pertanian sebesar Rp145.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
   g. Adanya mutasi antar OPD sebesar Rp114.750.000,00.
   h. Adanya Koreksi Ekuitas sebesar Rp1,02.

2. Mutasi berkurang sebesar Rp1.023.191.496,27 terdiri dari:

a. Reklasifikasi ke aset Ekstrakomptabel sebesar Rp400.463.994,93 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 106. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB C ke Beban Ekstrakomptabel Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	142.283.301,86
2.	Dinas Pariwisata	258.180.693,07
Total		**400.463.994,93**

b. Reklasifikasi KIB C ke aset Rusak Berat sebesar Rp507.976.500,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 107. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB C ke Rusak Berat Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	216.876.500,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	291.100.000,00
Total		**507.976.500,00**

Akibat adanya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat beberapa gedung/bangunan Pemerintah Daerah yang terdampak bencana dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 108. Aset Gedung/Bangunan yang Terdampak Bencana Tahun 2025

No	Uraian	Nilai Aset (Rp)	Kondisi
1.	Bangunan Poskesdes Siantar Naipospos Kec. Adiankoting	96.525.000,00	Rusak Berat
2.	Bangunan Puskesmas Janji Angkola	1.044.720.200,00	Rusak Ringan
3.	Bangunan Puskesmas Pembantu Hutabarat Kec. Tarutung	376.554.400,00	Rusak Ringan
4.	Bangunan Puskesmas Pembantu Adiankoting Kec. Adiankoting	198.000.000,00	Rusak Ringan
5.	Bangunan Poskesdes Hutabaru Kec. Sipoholon	-	Rusak Ringan
Total		**1.715.799.600,00**	

c. Adanya Mutasi antar OPD sebesar Rp114.750.000,00.

d. Koreksi ekuitas sebesar Rp1.001,34.

e. Koreksi Temuan BPK atas kurang volume pekerjaan sebesar Rp8.881.073,09 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 109. Koreksi Temuan BPK atas Kurang Volume Pekerjaan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai Temuan (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	2.273.378,09
2.	RSU Daerah Tarutung	6.607.695,00
Total		**8.881.073,09**

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan dana revitalisasi yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI langsung ke rekening sekolah untuk pembangunan/pemeliharaan gedung sekolah pada 79 SD Negeri dan 12 SMP Negeri, namun belum dapat dicatat pada Neraca karena belum ada serah terima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 110. Daftar Revitalisasi Gedung Bangunan Sekolah Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Sekolah	Pagu (Rp)
1.	SD Negeri	79	54.560.336.579,00
2.	SMP Negeri	12	9.724.266.701,95
Total		**91**	**64.284.603.280,95**

Perincian aset tetap gedung dan bangunan per SKPD tercantum dalam **lampiran 22** dan perincian penerima revitalisasi gedung bangunan sekolah tahun 2025 pada **lampiran 23**.

5.3.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.878.411.126.057,99	Rp1.866.176.536.837,11

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.878.411.126.057,99 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 111. Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	(Pengurangan) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.866.176.536.837,11	47.426.511.156,08	(35.191.921.935,20)	1.878.411.126.057,99

Rekapitulasi mutasi jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 112. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Saldo Awal	**1.866.176.536.837,11**	**1.866.176.536.837,11**
Mutasi Bertambah	**47.426.511.156,08**	**-**
- Belanja Modal TA 2025	18.687.651.374,08	-
- Sumber Dana Belanja Tidak Terduga	5.297.904.929,07	-
- Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa Ekstrakomptabel Ke Kib D	341.943.600,00	-
- Reklasifikasi dari beban barang dan Jasa (BHP) ke KIB D	274.828.999,10	-
- Koreksi Ekuitas	2,74	

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
- Koreksi Aset Ekstrakomptabel Ke Intra	22.824.182.251,09	
Mutasi Berkurang	**(35.191.921.935,20)**	**-**
- Reklasifikasi KIB D ke KIB C	(99.860.000,00)	-
- Rusak Berat 2025	(912.100.690,09)	-
- Pembayaran Utang 2024	(1.896.141.000,00)	-
- Reklasifikasi ke Persediaan	(32.277.269.858,99)	
- Koreksi ke Piutang TGR Akibat Pekerjaan Kurang Volume	(6.550.386,12)	
Saldo akhir	**1.878.411.126.057,99**	**1.866.176.536.837,11**

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp47.426.511.156,08 terdiri dari:
   a. Pengadaan belanja modal sebesar Rp18.687.651.374,08.
   b. Adanya reklasifikasi dari Beban sumber dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.297.904.929,07 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 113. Rekapitulasi Reklasifikasi Beban Tidak Terduga ke Aset KIB D Tahun 2025

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	262.000.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	5.035.904.929,07
Total		**5.297.904.929,07**

   c. Reklasifikasi dari beban barang dan jasa Ekstrakomptabel ke KIB D sebesar Rp341.943.600,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 114. Rekapitulasi Reklasifikasi dari Beban Ekstrakomptabel ke KIB D Tahun 2025

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1.	Dinas Lingkungan Hidup	40.000.000,00
2.	Kantor Kecamatan Tarutung	99.793.600,00
3.	Kantor Kecamatan Pahae Julu	126.900.000,00
4.	Kantor Kecamatan Siborongborong	75.250.000,00
Total		**341.943.600,00**

   d. Adanya reklasifikasi dari beban barang habis pakai ke KIB D sebesar Rp274.828.999,10 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
   e. Adanya koreksi ekuitas sebesar Rp2,74.
   f. Adanya koreksi aset ekstrakomptabel ke intra sebesar Rp22.824.182.251,09.

2. Mutasi berkurang sebesar Rp35.191.921.935,20 terdiri dari:

   a. Reklasifikasi KIB D ke KIB C sebesar Rp99.860.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan yakni Bangunan Air Irigasi Lainnya ke Bangunan Peternakan/Perikanan.

   b. Reklasifikasi aset KIB D ke aset lainnya (rusak berat) sebesar Rp912.100.690,09 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akibat bencana alam.

   c. Akibat adanya bencana Hidrometereologi Tahun 2025 terdapat aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang terdampak bencana dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 115. Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang terdampak Bencana Tahun 2025

NO	URAIAN	NILAI ASET (Rp)	KONDISI
1.	Jembatan Aek Napa	557.152.691,00	Rusak Berat
2.	Jembatan Aek Namora Bayo	246.840.000,00	Rusak Berat
3.	Jembatan Aek Haidupan	108.108.000,00	Rusak Berat
Total		**912.100.690,09**	

   d. Pembayaran utang belanja yang bersumber dari Dana BKPSU Tahun 2024 yang dibayarkan Tahun 2025 sebesar Rp1.896.141.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

   e. Koreksi ekuitas sebesar Rp32.277.269.858,99 yang merupakan koreksi aset KIB D pada BPBD yang direklasifikasi ke persediaan barang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat mengingat status kepemilikan aset dimaksud bukan kewenangan BPBD melainkan pihak ketiga dan pemerintah desa dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 116. Koreksi Ekuitas KIB D ke Persediaan Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Jalan Kabupaten	874.618.280,00
2.	Jalan Desa	2.900.577.580,30
3.	Jalan Khusus	242.387.052,00
4.	Jembatan pada Jalan Desa	276.726.600,00
5.	Bangunan Pembawa Irigasi	8.787.080.007,30
6.	Bangunan Pembuang Irigasi	201.171.000,00
7.	Bangunan Pengaman Irigasi	2.446.652.924,00
8.	Bangunan Pelengkap Irigasi	627.702.800,00
9.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	922.831.937,00
10.	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	225.800.000,00
11.	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	8.352.800.115,39

12.	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	838.592.050,00
13.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	5.234.238.713,00
14.	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	223.506.800,00
15.	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	122.584.000,00
Total		**32.277.269.858,99**

f. Adanya koreksi ke Piutang TGR akibat pekerjaan kurang volume sebesar Rp6.550.386,12.

Perincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD tercantum dalam **lampiran 24**.

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp129.491.120.199,01	Rp31.075.123.196,00

Saldo aset tetap lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp129.491.120.199,01 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 117.Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	(Pengurangan) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
31.075.123.196,00	99.685.341.974,01	(1.269.344.971,00)	129.491.120.199,01

Rekapitulasi mutasi aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 118. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Saldo Awal	**31.075.123.196,00**	**31.075.123.196,00**
Mutasi Bertambah	**99.685.341.974,01**	**-**
- Belanja Modal TA 2025	14.458.880.016,00	-
- Pengadaan dari KIB B ke KIB E	32.786.000,00	-
- Reklasifikasi Beban Barang/Jasa Ekstrakomptabel ke KIB E	136.973.988,00	
- Reklasifikasi Beban Barang/Jasa BHP ke KIB E	79.700.000,00	-
- Koreksi Aset Ekstrakomptabel Ke Intra	84.977.001.970,01	
Mutasi Berkurang	**(1.269.344.971,00)**	**-**
- Reklasifikasi dari KIB E ke KIB B	(44.136.000,00)	-
- Reklasifikasi KIB E ke Ekstrakomptabel	(9.051.000,00)	-
- Rusak Berat	(35.366.450,00)	
- Reklasifikasi Ke KDP	(1.180.791.521,00)	
Saldo akhir	**129.491.120.199,01**	**31.075.123.196,00**

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp99.685.341.974,01 terdiri dari:
   a. Pengadaan Belanja Modal sebesar Rp14.458.880.016,00.
   b. Reklasifikasi dari KIB B ke KIB E sebesar Rp32.786.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 119. Daftar Reklasifikasi KIB B ke KIB E Tahun 2025

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Umum	29.900.000,00
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Lukisan	2.886.000,00
Total			**32.786.000,00**

   c. Adanya reklasifikasi beban ekstrakomptabel ke KIB E sebesar Rp136.973.988,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Musik.
   d. Adanya reklasifikasi beban barang dan jasa (BHP) ke KIB E sebesar Rp79.700.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah.
   e. Adanya koreksi aset ekstrakomptabel ke intra sebesar Rp84.977.001.970,01.
2. Mutasi berkurang sebesar Rp1.269.344.971,00 terdiri dari:
   a. Reklasifikasi aset KIB E ke KIB B sebesar Rp44.136.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp9.825.000,00 dan Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp34.311.000,00.
   b. Reklasifikasi aset KIB E ke beban ekstrakomptabel sebesar Rp9.051.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   c. Reklasifikasi ke Rusak Berat sebesar Rp35.366.450,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 120. Rekapitulasi Reklasifikasi KIB E ke Aset Rusak Berat Tahun 2025

No	SKPD	Perincian	Jumlah (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	Alat Musik	25.000.000,00
		Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	10.366.450,00
Total			**35.366.450,00**

   d. Adanya Reklasifikasi Ke KDP sebesar Rp1.180.791.521,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan merupakan maket dan buku.

Perincian nilai aset tetap lainnya per SKPD tercantum dalam **lampiran 25.**

5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.409.927.486,00	Rp0,00

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.409.927.486,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 121. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2025

No	SKPD	Perincian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLAH)	42.042.512,00
		Perencanaan Teknis Usulan Kegiatan DAK Bidang Jalan TA. 2026	98.827.926,00
		Perencanaan Teknis Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam ke BNPB	88.265.527,00
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan	Maket dan Buku	1.180.791.521,00
Total			**1.409.927.486,00**

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
(Rp1.775.654.217.674,68)	(Rp1.612.384.019.485,52)

Saldo akumulasi penyusutan Tahun 2025 adalah sebesar (Rp1.775.654.217.674,68) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 122. Perincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan
1	Peralatan dan Mesin	(410.115.819.384,05)	(359.895.872.089,23)	(50.219.947.294,82)
2	Gedung dan Bangunan	(234.086.642.325,56)	(212.471.862.926,01)	(21.614.779.399,55)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.125.858.418.814,10)	(1.033.833.013.364,86)	(92.025.405.449,24)
4	Aset Tetap Lainnya	(5.593.337.150,97)	(6.183.271.105,42)	589.933.954,45
Jumlah		**(1.775.654.217.674,68)**	**(1.612.384.019.485,52)**	**(163.270.198.189,16)**

Akumulasi penyusutan Tahun 2025 merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya pada Tahun berjalan serta saldo awal akumulasi penyusutan aset Tahun 2025.

Aset Ekstrakomptabel

Selain aset tetap Tahun 2025 sebagaimana telah dijelaskan di atas, masih terdapat aset ekstrakomptabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya di bawah kapitalisasi yang tidak dicatat pada neraca laporan keuangan dengan perincian berikut.

Tabel 123. Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel

No	SKPD	Kondisi		Jumlah Total 2025 (Rp)
		Baik 2025 (Rp)	Rusak Berat 2025 (Rp)	
1	SEKRETARIAT DPRD	11.353.114,00	19.410.435,00	30.763.549,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	224.313.448,00	1.231.513.621,00	1.455.827.069,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.861.250,00	0,00	9.861.250,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	154.639.206,00	0,00	154.639.206,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	12.392.973,00	6.164.619,00	18.557.592,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	76.477.220,00	234.000,00	76.711.220,00
7	DINAS KESEHATAN	762.356.917,00	306.468.850,00	1.068.825.767,00
8	RUMAH SAKIT UMUM SWADANA DAERAH TARUTUNG	802.114.865,00	69.370.644,00	871.485.509,00
9	DINAS PENDIDIKAN	37.832.822.813,92	1.586.099.388,00	39.418.922.201,92
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00
11	DINAS SOSIAL	8.974.800,00	3.600.000,00	12.574.800,00
12	DINAS KETENAGAKERJAAN	29.799.770,00	0,00	29.799.770,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.000.000,00	10.631.325,00	17.631.325,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.945.000,00	3.660.972,00	6.605.972,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	610.592.239,00	102.000,00	610.694.239,00
16	DINAS PERTANIAN	27.878.364,00	90.712.372,00	118.590.736,00
17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	95.126.059,89	8.709.376,00	103.835.435,89
18	INSPEKTORAT	0,00	2.210.441,00	2.210.441,00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.909.790,00	0,00	1.909.790,00
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	376.178.543,00	25.618.896,00	401.797.439,00
21	DINAS PARIWISATA	56.485.134,00	15.593.341,00	72.078.475,00
22	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.511.250,00	0,00	4.511.250,00
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	102.823.987,00	23.102.125,00	125.926.112,00
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24.375.684,00	4.839.480,00	29.215.164,00
25	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	50.788.000,00	5.066.180,00	55.854.180,00
26	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	34.868.526,00	1.711.110,00	36.579.636,00
27	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	11.880.000,00	17.670.000,00	29.550.000,00
28	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	9.334.412,00	0,00	9.334.412,00
29	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	21.427.220,00	5.760.000,00	27.187.220,00
30	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	10.228.360,00	5.218.830,00	15.447.190,00
31	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
32	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	12.748.180,00	0,00	12.748.180,00
33	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	25.834.900,00	9.783.190,00	35.618.090,00
34	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	13.477.106,08	100.640,00	13.577.746,08
35	KANTOR KECAMATAN SIBORONG-BORONG	22.759.206,00	6.095.000,00	28.854.206,00
36	KANTOR KECAMATAN MUARA	35.602.026,00	650.000,00	36.252.026,00
37	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	18.667.206,00	7.968.384,00	26.635.590,00
38	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	17.929.232,00	2.100.000,00	20.029.232,00
39	KANTOR KECAMATAN GAROGA	40.966.326,00	15.127.975,00	56.094.301,00
40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.614.465,00	1.867.960,00	4.482.425,00
41	DINAS PERPUSTAKAAN	7.723.685,00	3.187.350,00	10.911.035,00
42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	94.618.949,00	11.865.616,00	106.484.565,00
43	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.833.000,00	0,00	2.833.000,00
44	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	30.976.774,00	3.097.980,00	34.074.754,00
45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	156.000,00	700.485,00	856.485,00
JUMLAH		**41.718.816.001**	**3.506.012.585**	**45.224.828.586**

5.3.4. Dana Cadangan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp0,00

Saldo dana cadangan Tahun 2025 adalah Nihil.

5.3.5. Aset Lainnya

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp47.322.754.266,02	Rp8.398.676.276,65

Jumlah saldo aset lainnya Tahun 2025 sebesar Rp47.338.185.725,23 merupakan Aset tidak berwujud (ATB), Aset lain-lain, Akumulasi amortisasi tidak berwujud, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 124. Daftar Aset Lainnya TA 2025

No.	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Aset Tidak Berwujud	2.289.011.614,86	2.289.011.614,86	0,00
2	Aset Lain-lain	86.439.671.543,68	73.677.358.567,17	12.762.312.976,51
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.153.614.583,16)	(1.736.290.832,36)	(417.323.750,80)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(83.081.414.309,36)	(69.150.157.073,02)	(13.931.257.236,34)
5	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	43.829.100.000,00	3.318.754.000,00	40.510.346.000,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	15.431.459,21
Jumlah		**47.322.754.266,02**	**8.398.676.276,65**	**38.939.509.448,58**

Perincian Aset Lainnya sebagaimana pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.5.1 Aset Tidak Berwujud

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp2.289.011.614,86	Rp2.289.011.614,86

Jumlah saldo aset tidak berwujud Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.289.011.614,86, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 125. Saldo Aset Tidak Berwujud

No	Perangkat daerah / uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan/ (pengurangan)
I	**BKAD**	**363.818.400,00**	**363.818.400,00**	**0,00**
1	Software Windows	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
2	Software Database	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
3	Software Aplikasi Sistem Online Payment	121.120.772,00	121.120.772,00	0,00
4	Software Aplikasi SIP PBB	198.197.628,00	198.197.628,00	0,00
II	**DINAS PERIZINAN**	**89.280.000,00**	**89.280.000,00**	**0,00**
1	PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00
2	WEBSITE	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

No	Perangkat daerah / uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan/ (pengurangan)
III	**RSUD TARUTUNG**	**1.221.648.795,00**	**1.221.648.795,00**	**0,00**
1	SOFTWARE APLIKASI SIMFARS	40.123.230,00	40.123.230,00	0,00
2	SOFTWARE APLIKASI SIRS	386.554.244,00	386.554.244,00	0,00
3	Aplikasi Medicine	33.784.615,00	33.784.615,00	0,00
4	Aplikasi Teleradiologi	13.363.636,00	13.363.636,00	0,00
5	SIMRS	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6	Windows Server 2019 Standard 16 Core OLP NL	27.603.070,00	27.603.070,00	0,00
7	Software dan API Modul Bridging Ke Sistem BPJS dan Antrian Farmasi Rawat Jalan dan Kiosk	220.220.000,00	220.220.000,00	0,00
IV	**PERHUBUNGAN**	**114.404.417,00**	**114.404.417,00**	**0,00**
1	Software Proxid Database Mail	8.357.340,00	8.357.340,00	0,00
2	Aplikasi SMS Gateway	25.582.077,00	25.582.077,00	0,00
3	Aplikasi SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	80.465.000,00	80.465.000,00	0,00
V	**SEKRETARIAT DAERAH**	**13.135.602,00**	**13.135.602,00**	**0,00**
1	Program Aplikasi Rumah Ibadah	13.135.602,00	13.135.602,00	0,00
VI	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**79.450.000,00**	**79.450.000,00**	**0,00**
1	Sistem Informasi Adm Kependudukan	79.450.000,00	79.450.000,00	0,00
VII	**DINAS PMD**	**39.950.000,00**	**39.950.000,00**	**0,00**
1	Website	39.950.000,00	39.950.000,00	0,00
VIII	**DINAS PERTANIAN**	**49.918.000,00**	**49.918.000,00**	**0,00**
1	Website Compane Profile	49.918.000,00	49.918.000,00	0,00
IX	**BKPSDM**	**74.833.000,00**	**74.833.000,00**	**0,00**
1	Pembangunan/ Pembuatan WEB SITE BKD	49.918.000,00	49.918.000,00	0,00
2	Aplikasi SIMPEG PNS	24.915.000,00	24.915.000,00	0,00
X	**DINAS PENDIDIKAN**	**86.760.000,00**	**86.760.000,00**	**0,00**
1	SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00
2	SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00
3	SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00
XI	**DINAS PERPUSTAKAAN**	**155.813.400,86**	**155.813.400,86**	**0,00**
1	SOFWARE APLIKASI E-BOOK PERPUSTAKAAN DIGITAL	49.937.490,00	49.937.490,00	0,00
2	Software E-Book Perpustakaan Digital / E-Pustaha	64.676.900,00	64.676.900,00	0,00
3	SOFTWARE E-BOOK PERPUSTAKAAN DIGITAL / E-PUSTAHA	41.199.010,86	41.199.010,86	0,00
	TOTAL ASET TIDAK BERWUJUD	**2.289.011.614,86**	**2.289.011.614,86**	**0,00**

5.3.5.2 Aset Lain-lain

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp86.439.671.543,68	Rp73.677.358.567,17

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp86.439.671.543,68 dan Tahun 2024 sebesar Rp73.677.358.567,17 mengalami kenaikan sebesar Rp12.762.312.976,51 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 126. Daftar Aset Lain-lain Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (penurunan)
1	Aset Rusak Berat	82.804.896.423,59	68.020.656.606,00	14.784.239.817,59
2	Aset Hilang	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00
3	Aset Tidak Temukan Fisik	827.859.726,00	827.859.726,00	0,00
4	Aset Lain-Lain Kurang Volume Pekerjaan	120.978.524,13	2.169.820.935,17	(2.048.842.411,04)
5	Aset Lainnya	2.650.571.300,00	2.650.571.300,00	0,00
6	Persediaan Obat Rusak	26.915.569,96	0,00	26.915.569,96
Total		**86.439.671.543,68**	**73.677.358.567,17**	**12.762.312.976,51**

Perincian aset lainnya sebagaimana pada **lampiran 26**.

5.3.5.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
(Rp2.153.614.583,16)	(Rp1.736.290.832,36)

Jumlah saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 adalah sebesar (Rp2.153.614.583,16). Perincian amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 tercantum dalam **Lampiran 27.**

5.3.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
(Rp83.081.414.309,36)	(Rp69.150.157.073,02)

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya Tahun 2025 adalah sebesar (Rp83.081.414.309,36) mengalami kenaikan sebesar Rp13.931.257.236,34 dibandingkan Tahun 2024 sebesar (Rp69.150.157.073,02). Pencatatan akumulasi penyusutan aset lainnya berpedoman pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dimana aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Perincian akumulasi penyusutan aset lainnya sebagaimana pada **Lampiran 28**.

5.3.5.5 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp43.829.100.000,00	Rp3.318.754.000,00

Jumlah saldo Dana Bagi Hasil TDF Tahun 2025 adalah sebesar Rp43.829.100.000,00. Dana Bagi Hasil TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

5.3.6. Aset Properti Investasi

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp34.135.801.900,00	Rp0,00

Aset properti investasi pada tahun 2025 sebesar Rp34.135.801.900,00 yang merupakan aset properti investasi Tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki aset properti yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Uraian penambahan dan pengurangan aset properti sebagai berikut.

Tabel 127. Penambahan/Pengurangan Aset Properti

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	(Pengurangan) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
0,00	34.135.801.900,00	(0,00)	34.135.801.900,00

Rekapitulasi mutasi aset properti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 128. Rekapitulasi Mutasi Aset Properti Tahun 2025

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
Saldo Awal	**0,00**	**0,00**
Mutasi Bertambah	**34.135.801.900,00**	**-**
- Reklasifikasi dari KIB A	34.135.801.900,00	**-**
Mutasi Berkurang	**(0,00)**	**-**
- Reklasifikasi ke KIB A	0,00	**-**
Saldo akhir	**34.135.801.900,00**	**0,00**

Adapun perincian aset properti sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 129. Perincian Aset Properti Tahun 2025

NO	Kode Barang	Register	Nama Barang	Harga (Rp)	Penggunaan
1	1.3.1.01.001.001.012	0001	Tanah Kaveling (dst)	119.500.000,00	BANGUNAN KOSONG / EKS LLD DISHUB
2	1.3.1.01.001.001.012	0002	Tanah Kaveling (dst)	31.250.000,00	DISEWAKAN
3	1.3.1.01.001.001.012	0003	Tanah Kaveling (dst)	45.562.500,00	DISEWAKAN
4	1.3.1.01.001.001.012	0004	Tanah Kaveling (dst)	32.062.500,00	DISEWAKAN
5	1.3.1.01.001.001.012	0005	Tanah Kaveling (dst)	143.500.000,00	DISEWAKAN
6	1.3.1.01.001.001.012	0006	Tanah Kaveling (dst)	262.080.000,00	DISEWAKAN
7	1.3.1.01.001.001.012	0007	Tanah Kaveling (dst)	111.325.000,00	DISEWAKAN
8	1.3.1.01.001.001.012	0008	Tanah Kaveling (dst)	246.080.000,00	DISEWAKAN
9	1.3.1.01.001.001.012	0010	Tanah Kaveling (dst)	54.880.000,00	DISEWAKAN
10	1.3.1.01.001.001.012	0011	Tanah Kaveling (dst)	134.400.000,00	DISEWAKAN
11	1.3.1.01.001.001.012	0012	Tanah Kaveling (dst)	43.584.000,00	DISEWAKAN

NO	Kode Barang	Register	Nama Barang	Harga (Rp)	Penggunaan
12	1.3.1.01.001.001.012	0013	Tanah Kaveling (dst)	57.600.000,00	DISEWAKAN
13	1.3.1.01.001.001.012	0014	Tanah Kaveling (dst)	57.600.000,00	DISEWAKAN
14	1.3.1.01.001.001.012	0015	Tanah Kaveling (dst)	53.760.000,00	DISEWAKAN
15	1.3.1.01.001.001.012	0016	Tanah Kaveling (dst)	144.547.200,00	DISEWAKAN
16	1.3.1.01.001.001.012	0017	Tanah Kaveling (dst)	146.611.200,00	DISEWAKAN
17	1.3.1.01.001.001.012	0018	Tanah Kaveling (dst)	110.720.000,00	DISEWAKAN
18	1.3.1.01.001.001.012	0019	Tanah Kaveling (dst)	126.336.000,00	DISEWAKAN
19	1.3.1.01.001.002.001	0001	Tanah Bangunan Pasar	57.330.000,00	DISEWAKAN
20	1.3.1.01.001.002.001	0002	Tanah Bangunan Pasar	217.875.000,00	PEKAN LAMA SIBORONGBORONG
21	1.3.1.01.001.002.002	0001	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	655.600.000,00	DISEWAKAN
22	1.3.1.01.001.002.002	0002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	781.950.000,00	DISEWAKAN
23	1.3.1.01.001.002.002	0003	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	97.750.000,00	DISEWAKAN
24	1.3.1.01.001.002.002	0004	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.470.500.000,00	DISEWAKAN
25	1.3.1.01.001.002.002	0005	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	88.550.000,00	DISEWAKAN
26	1.3.1.01.001.002.002	0006	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	84.150.000,00	DISEWAKAN
27	1.3.1.01.001.002.002	0007	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	290.950.000,00	DISEWAKAN
28	1.3.1.01.001.002.002	0008	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	931.500.000,00	DISEWAKAN
29	1.3.1.01.001.002.002	0009	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.438.200.000,00	DISEWAKAN
30	1.3.1.01.001.002.002	0010	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.395.700.000,00	DISEWAKAN
31	1.3.1.01.001.002.002	0011	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.738.500.000,00	DISEWAKAN

NO	Kode Barang	Register	Nama Barang	Harga (Rp)	Penggunaan
32	1.3.1.01.001.002.002	0012	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.215.500.000,00	DISEWAKAN
33	1.3.1.01.001.002.002	0013	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	234.300.000,00	DISEWAKAN
34	1.3.1.01.001.002.002	0014	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	587.400.000,00	DISEWAKAN
35	1.3.1.01.001.002.002	0015	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	67.650.000,00	DISEWAKAN
36	1.3.1.01.001.002.002	0016	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	124.100.000,00	DISEWAKAN
37	1.3.1.01.001.002.002	0017	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	276.250.000,00	DISEWAKAN
38	1.3.1.01.001.002.002	0018	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	344.850.000,00	DISEWAKAN
39	1.3.1.01.001.002.002	0019	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.104.950.000,00	DISEWAKAN
40	1.3.1.01.001.002.002	0020	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	197.600.000,00	DISEWAKAN
41	1.3.1.01.001.002.002	0021	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	545.300.000,00	DISEWAKAN
42	1.3.1.01.001.002.002	0022	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	212.800.000,00	DISEWAKAN
43	1.3.1.01.001.002.002	0023	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.700.500.000,00	DISEWAKAN
44	1.3.1.01.001.002.002	0024	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	14.492.500,00	DISEWAKAN
45	1.3.1.01.001.002.002	0025	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	177.156.000,00	DISEWAKAN
46	1.3.1.01.001.004.001	0005	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	237.770.000,00	KANTIN UNIT B
47	1.3.1.01.003.006.002	0001	Tanah Lapangan Terbang Komersial	15.925.230.000,00	BANDARA SILANGIT
	Total			**34.135.801.900,00**	

5.3.7. Kewajiban

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp251.618.183.178,52	Rp312.940.298.062,80

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebesar Rp251.618.183.178,52 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Perincian kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 130. Nilai Kewajiban Tahun 2025

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
Kewajiban Jangka Pendek	70.144.777.428,52	134.693.386.548,80	(64.548.609.120,28)
Kewajiban Jangka Panjang	181.473.405.750,00	178.246.911.514,00	3.226.494.236,00
Jumlah Kewajiban	**251.618.183.178,52**	**312.940.298.062,80**	**(61.322.114.884,28)**

5.3.7.1 Kewajiban Jangka Pendek

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp.70.144.777.428,52	Rp134.693.386.548,80

Saldo kewajiban jangka pendek Tahun 2025 adalah sebesar Rp70.144.777.428,52 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 131. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	9.943.018,92	(9.943.018,92)
2	Utang Bunga	411.387.506,00	1.305.522.106,00	(894.134.600,00)
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	14.556.395.511,63	69.154.763.638,00	(54.598.368.126,37)
4	Pendapatan Diterima Dimuka	379.923.102,26	261.738.734,25	118.184.368,01
5	Utang Belanja	42.246.873.308,63	63.961.419.051,63	(21.714.545.743,00)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.550.198.000,00	0,00	12.550.198.000,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**70.144.777.428,52**	**134.693.386.548,80**	**(64.548.609.120,28)**

Penjelasan kewajiban jangka pendek sebagai berikut.

5.3.7.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp9.943.018,92

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2025 adalah Nihil.

5.3.7.1.2 Utang Bunga

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp411.387.506,00	Rp1.305.522.106,00

Utang Bunga Tahun 2025 sebesar Rp411.387.506,00 merupakan pengakuan belanja Bunga pinjaman PEN Tahun 2021 yang akan dibayar pada Tahun 2026 ke PT. SMI (Persero). Berdasarkan akta perjanjian nomor 78 tanggal 17 September 2021, bahwa Pinjaman PEN 2021 dengan bunga sebesar 5,66% (*lima koma enam puluh enam persen*) yang metode pembayarannya dibayarkan setiap bulan. Adapun skema perhitungan utang bunga pinjaman PEN 2021 sebagai berikut.

Tabel 132. Skema Pembayaran Utang Bunga Pinjaman PEN 2021

No	Tahun	Bunga		
		Pinjaman (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	2021	337.226.338,00	337.226.338,00	0,00
2	2022	3.435.104.579,00	3.435.104.579,00	0,00
3	2023	3.096.653.900,00	3.096.653.900,00	0,00
4	2024	2.207.835.420,00	2.207.835.420,00	0,00
5	2025	1.305.522.106,00	1.305.522.106,00	0,00
6	2026	411.387.506,00	0,00	411.387.506,00
Jumlah		**10.793.729.849,00**	**10.382.342.343,00**	**411.387.506,00**

5.3.7.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp14.556.395.511,63	Rp69.154.763.638,00

Bagian Lancar Utang Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp14.556.395.511,63 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 133. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pembayaran pokok utang pinjaman dana PEN Tahun 2020	0,00	53.201.036.052,00	(53.201.036.052,00)
2	Pembayaran pinjaman PEN Tahun 2021	14.305.466.382,63	15.605.969.436,00	(1.300.503.053,37)
3	Biaya pengelolaan utang PEN Tahun 2020	243.711.378,00	311.669.356,00	(67.957.978,00)
4	Biaya pengelolaan utang PEN Tahun 2021	7.217.751,00	36.088.794,00	(28.871.043,00)
	Jumlah	**14.556.395.511,63**	**69.154.763.638,00**	**(54.598.368.126,37)**

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak mencatat bagian lancar utang jangka panjang untuk pembayaran pokok utang pinjaman dana PEN Tahun 2020 sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

55/MK/PK/2025 dimana pada Tahun 2026 Pemerintah Pusat tidak melakukan pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai pembayaran utang Pinjaman PEN Tahun 2020 sebesar Rp53.201.036.052,00.

5.3.7.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp379.923.102,26	Rp261.738.734,25

Saldo Pendapatan diterima di muka Tahun 2025 sebesar Rp379.923.102,26 merupakan pendapatan dari Pajak Reklame di mana jumlah realisasi Pajak Reklame selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp876.647.612,88 untuk jangka waktu perjanjian selama 1 Tahun. Setelah dilakukan perhitungan, pendapatan yang diterima murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp598.414.510,62 sehingga selisihnya sebesar Rp278.233.102,26 merupakan pendapatan diterima di muka dan adanya pendapatan diterima di muka atas sewa tanah Bandara Silangit sebesar Rp101.690.000,00. Perincian pendapatan diterima di muka sebagaimana terdapat pada **Lampiran 29**.

5.3.7.1.5 Utang Belanja

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp42.246.873.308,63	Rp63.961.419.051,63

Saldo utang belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp42.246.873.308,63 merupakan utang belanja yang dianggarkan pada jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja Alokasi Dana Desa dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 134. Utang Belanja Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)
1	Utang Belanja Modal	229.341.451,63	1.980.482.451,63	(1.751.141.000,00)
2	Utang Belanja Pegawai	23.808.822.377,00	33.616.909.277,00	(9.808.086.900,00)
3	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	278.685.790,00	(278.685.790,00)
4	Utang Belanja BLUD	18.208.709.480,00	14.497.289.749,00	3.711.419.731,00
5	Utang Belanja Alokasi Dana Desa	0,00	13.588.051.784,00	(13.588.051.784,00)
Total		**42.246.873.308,63**	**63.961.419.051,63**	**(21.714.545.743,00)**

Perincian utang belanja per SKPD sebagaimana pada **Lampiran 30**.

5.3.7.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp12.550.198.000,00	Rp0,00

Saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2025 sebesar Rp12.550.198.000,00 merupakan kelebihan pembayaran Dana bagi hasil Pusat sesuai dengan PMK 120 Tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada Tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 135. Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pajak DBHCT	38.180.000,00
2.	SDA Migas	237.882.000,00
3.	SDA Minerba	3.415.116.000,00
4.	SDA Panas Bumi	16.328.000,00
5.	SDA Kehutanan	69.108.000,00
6.	SDA Perikanan	1.157.562.000,00
7.	SDA Perkebunan Sawit	7.616.022.000,00
	Jumlah	**12.550.198.000,00**

5.3.7.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp181.473.405.750,00	Rp178.246.911.514,00

Saldo Kewajiban jangka panjang Tahun 2025 sebesar Rp181.473.405.750,00 Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 136. Saldo Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Pembangunan Pusat Pasar Tarutung	3.986.668.168,00	3.986.668.168,00	0,00
2	Kewajiban Pinjaman PEN 2020	177.336.761.350,00	159.603.082.645,00	17.733.678.705,00
3	Kewajiban Pinjaman PEN 2021	-	14.305.466.383,00	(14.305.466.383,00)
4	Kewajiban biaya pengelolaan Pinjaman PEN Tahun 2020	149.976.232,00	344.476.567,00	(194.500.335,00)
5	Kewajiban biaya pengelolaan Pinjaman PEN Tahun 2021	0,00	7.217.751,00	(7.217.751,00)
Total		**181.473.405.750,00**	**178.246.911.514,00**	**3.226.494.236,00**

Penjelasan kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

1. Utang Pembangunan Pusat Pasar Tarutung yang telah rusak total akibat gempa bumi Tahun 1987 sebesar Rp3.986.668.168,00 kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Utang pembangunan Pasar Harungguan Tarutung dari PT

Bank Dagang Negara Cabang Sibolga telah diusulkan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk dihapuskan sesuai dengan surat permohonan Nomor 900/3833/1999 tanggal 8 Juli 1999 kepada Menteri Keuangan, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini. Sejak Tahun 1988 utang pokok dan bunga tidak pernah diangsur. Lokasi Pasar Harungguan Tarutung telah menjadi bangunan perkantoran SKPD. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengajukan permohonan penghapusan kredit investasi sesuai dengan Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 900/1962/Dipenloka.III/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Permohonan Penghapusan Kredit Investasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bank Dagang Negara Cabang Sibolga, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini.

2. Sisa Kewajiban Pinjaman PEN 2020 sebesar Rp177.336.761.350,00 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp319.206.190.801,00 berdasarkan akta perjanjian nomor 29 tanggal 23 Oktober 2020. Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 96 Bulan dengan mekanisme pembayaran pokok utang dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum. Adapun skema pembayaran Pinjaman PEN 2020 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 137. Skema Pembayaran Pinjaman PEN 2020

No	Tahun	Pokok		
		Pinjaman (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	2020	0,00	0,00	0,00
2	2021	0,00	0,00	0,00
3	2022	4.433.419.671,00	4.433.419.671,00	0,00
4	2023	53.201.036.052,00	53.201.036.052,00	0,00
5	2024	53.201.036.052,00	53.201.036.052,00	0,00
6	2025	31.033.937.697,00	31.033.937.697,00	0,00
7	2026	0,00	0,00	0,00
8	2027	60.801.175.320,00	0,00	60.801.175.320,00
9	2028	60.801.175.320,00	0,00	60.801.175.320,00
10	2029	55.734.410.710,00	0,00	55.734.410.710,00
Jumlah		**319.206.190.801,00**	**141.869.429.472,00**	**177.336.761.350,00**

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan persetujuan restrukturisasi atas Pinjaman PEN 2020 sesuai dengan surat Direktur PT. SMI Persero Nomor S-335/SMI/DPPPP/0725 pada tanggal 7 Juli 2025. Restrukturisasi tersebut yakni dilakukannya penundaan pemotongan terhadap DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Tahun 2025 selama 4 bulan (Agustus s/d Desember 2025) dengan restrukturisasi sebesar Rp17.733.678.684,00.

Berdasarkan tabel di atas, Pinjaman PEN Tahun 2020 telah dilakukan pembayaran hingga Tahun 2025 sebesar Rp141.869.429.472,00 dan untuk Tahun 2026 tidak dilakukan pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang sehingga sisa pinjaman PEN Tahun 2020 sebesar Rp177.336.761.350,00.

3. Sisa kewajiban PEN 2021 sebesar Rp0,00 atas Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar Rp70.226.856.862,00 berdasarkan akta perjanjian nomor 78 tanggal 17 September 2021. Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 60 (enam puluh) bulan dengan mekanisme pembayaran dilakukan setiap bulan. Adapun skema pembayaran Pinjaman PEN 2021 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 138. Skema Pembayaran Pinjaman PEN 2021

No	Tahun	Pokok		
		Pinjaman (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	2021	0,00	0,00	0,00
2	2022	9.103.482.171,00	9.103.482.171,00	0,00
3	2023	15.605.969.436,00	15.605.969.436,00	0,00
4	2024	15.605.969.436,00	15.605.969.436,00	0,00
5	2025	15.605.969.436,00	15.605.969.436,00	0,00
6	2026	14.305.466.383,00	0,00	14.305.466.383,00
Jumlah		**70.226.856.862,00**	**55.921.390.479,00**	**14.305.466.383,00**

Berdasarkan tabel di atas, Pinjaman PEN 2021 telah dilakukan pembayaran hingga Tahun 2025 sebesar Rp55.921.390.479,00 kemudian pengakuan bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan Tahun 2026 sebesar Rp14.305.466.383,00 sehingga sisa pinjaman PEN 2021 sebesar Rp0,00.

4. Sisa kewajiban biaya pengelolaan Pinjaman PEN Tahun 2020 sebesar Rp149.976.232,00. Perincian Kewajiban Biaya Pengelolaan Pinjaman PEN 2020 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 139. Skema Pembayaran Biaya Pengelolaan PEN 2020

No	Tahun	Biaya Pengelolaan		
		Pinjaman (Rp)	Pembayaran dan Pengakuan Bagian Lancar (Rp)	Sisa (Rp)
1	2020	604.339.500,00	604.339.500,00	0,00
2	2021	590.531.453,00	590.531.453,00	0,00
3	2022	590.531.453,00	590.531.453,00	0,00
4	2023	508.513.189,00	508.513.189,00	0,00
5	2024	410.091.272,00	410.091.272,00	0,00
6	2025	328.073.008,00	328.073.008	0,00
7	2026	243.711.378,00	243.711.378,00	0,00
8	2027	131.229.203,00	0,00	131.229.203,00
9	2028	18.747.029,00	0,00	18.747.029,00
Jumlah		**3.425.767.485,00**	**3.275.791.253,00**	**149.976.232,00**

Berdasarkan tabel di atas, biaya pengelolaan Pinjaman PEN 2020 telah dilakukan pembayaran hingga Tahun 2025 sebesar Rp3.032.079.875,00 kemudian menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan Tahun 2026 sebesar Rp243.711.378,00 sehingga sisa biaya pengelolaan pinjaman PEN 2020 sebesar Rp149.976.232,00.

5. Sisa Kewajiban biaya pengelolaan PEN Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 140. Skema Pembayaran Biaya Pengelolaan PEN 2021

No	Tahun	Biaya Pengelolaan		
		Pinjaman (Rp)	Pembayaran dan Pengakuan Bagian Lancar (Rp)	Sisa (Rp)
1	2021	135.660.500,00	135.660.500,00	0,00
2	2022	122.701.924,00	122.701.924,00	0,00
3	2023	93.830.881,00	93.830.881,00	0,00
4	2024	64.959.837,00	64.959.837,00	0,00
5	2025	36.088.794,00	36.088.794,00	0,00
6	2026	7.217.751,00	7.217.751,00	0,00
Jumlah		**460.459.687,00**	**460.459.687,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel di atas, biaya pengelolaan Pinjaman PEN 2021 telah dilakukan pembayaran hingga Tahun 2025 sebesar Rp453.241.936,00 kemudian menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan Tahun 2026 sebesar Rp7.217.751,00 sehingga sisa biaya pengelolaan pinjaman PEN 2021 sebesar Rp0,00.

Total Pinjaman utang PEN Tahun 2020 dan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp389.433.047.663,00 dan telah dibayarkan hingga Tahun 2025 sebesar Rp197.790.819.951,00 serta adanya pengakuan bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan untuk Tahun 2026 sebesar Rp14.305.466.382,63 sehingga kewajiban jangka panjang dana PEN yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp177.336.761.350,00.

5.3.8. Ekuitas

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp2.422.776.467.234,31	Rp2.271.720.431.485,17

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/ dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut.

Saldo Awal Ekuitas	2.271.720.431.485,17
Surplus/ (defisit)-LO	53.584.421.644,50
Koreksi Ekuitas Lainnya	97.471.614.104,64
Ekuitas Akhir	**2.422.776.467.234,31**

Surplus/ (defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan

SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

Penyajian LO TA 2025 sebagai berikut:

5.4.1. Pendapatan - LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.277.365.947.465,04	Rp1.296.265.579.561,53

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.277.365.947.465,04 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.296.265.579.561,53 mengalami penurunan sebesar Rp18.899.632.096,49 atau turun 1,46%. Perincian realisasi pendapatan-LO sebagai berikut.

Tabel 141. Pendapatan – LO Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	147.077.889.169,04	136.070.840.715,53	11.007.048.453,51	8,09%
7.2	Pendapatan Transfer-LO	1.091.714.864.228,00	1.122.369.538.601,00	(30.654.674.373,00)	(2,73%)
7.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	38.573.194.068,00	37.825.200.245,00	747.993.823,00	1,98%
7	**Pendapatan**	**1.277.365.947.465,04**	**1.296.265.579.561,53**	(18.899.632.096,49)	(1,46%)

Penjelasan Pendapatan LO sebagaimana pada tabel di atas sebagai berikut.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp147.077.889.169,04	Rp136.070.840.715,53

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp147.077.889.169,04 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp136.070.840.715,53 mengalami kenaikan sebesar Rp11.007.048.453,51 atau naik 8,09% dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 142. Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.01	Pajak Daerah-LO	38.234.515.233,11	29.926.455.596,76	8.308.059.636,35	27,76%
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	88.089.655.673,00	93.867.166.523,78	(5.777.510.850,78)	(6,15%)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	9.057.524.807,00	8.451.510.307,00	606.014.500,00	7,17%
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	11.696.193.455,93	3.825.708.287,99	7.870.485.167,94	205,73%
7.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO**	**147.077.889.169,04**	**136.070.840.715,53**	**11.007.048.453,51**	**8,09%**

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp38.234.515.233,11	Rp29.926.455.596,76

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp38.234.515.233,11 dan Tahun 2024 sebesar Rp29.926.455.596,76 mengalami kenaikan sebesar Rp8.308.059.636,35. Perincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 143. Perincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No	Uraian	LRA 2025	Penambah	Pengurang	Pendapatan Pajak Daerah-LO
1	Pajak Reklame-LO	876.647.815,00	261.738.734,25	278.233.102,26	860.153.446,99
2	Pajak Air Tanah-LO	207.473.983,00			207.473.983,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.663.407.462,67			1.663.407.462,67
4	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	4.299.399.651,00	1.643.282.095,00	1.017.532.123,55	4.925.149.622,45
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	6.341.773.385,00			6.341.773.385,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	12.822.553.921,00		750.000,00	12.821.803.921,00
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.632.065.170,00			7.632.065.170,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.782.688.242,00			3.782.688.242,00
Jumlah		**37.626.009.629,67**	**1.905.020.829,25**	**1.296.515.225,81**	**38.234.515.233,11**

Jika dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp37.626.009.629,07 dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp38.234.515.233,11 terdapat selisih lebih sebesar Rp608.505.603,44. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp1.905.020.829,25 yaitu piutang pajak PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp1.643.282.095,00 ditambah pendapatan reklame diterima di muka tahun 2024 yang

diperhitungkan sebesar Rp261.738.734,25. Kemudian adanya pengurang pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp1.296.515.225,81 yaitu pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.017.532.123,55, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Pajak Hotel sebesar Rp750.000,00 ditambah penerimaan pendapatan reklame diterima di muka Tahun 2025 sebesar Rp278.233.102,26.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp88.089.655.673,00	Rp93.867.166.523,78

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp88.089.655.673,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp93.867.166.523,78 mengalami penurunan sebesar Rp5.777.510.850,78 atau turun 6,15%. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 144. Perincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No	JENIS RETRIBUSI	LRA 2025 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	LO (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	92.320.848.795,00	77.467.000,00	8.537.393.225,00	83.860.922.570,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	112.850.000,00	0,00	0,00	112.850.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	884.806.000,00	0,00	0,00	884.806.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	331.439.800,00	0,00	0,00	331.439.800,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	58.660.000,00	0,00	0,00	58.660.000,00
7	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	127.296.000,00	0,00	0,00	127.296.000,00
8	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	282.316.126,00	0,00	0,00	282.316.126,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	930.757.391,00	197.174.877,00	207.137.667,00	920.794.601,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.430.200.976,00	0,00	0,00	1.430.200.976,00
12	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	59.469.600,00	0,00	0,00	59.469.600,00
Jumlah		**96.559.544.688,00**	**274.641.877,00**	**8.744.530.892,00**	**88.089.655.673,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp96.559.544.688,00 dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp88.191.345.673,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp8.469.889.015,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp274.641.877,00 yaitu pencatatan piutang retribusi pelayanan kesehatan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp77.467.000,00 dan pencatatan piutang retribusi pemanfaatan aset sewa tanah Tahun 2025 sebesar Rp197.174.877,00. Kemudian adanya pengurang pendapatan retribusi Daerah-LO sebesar Rp 8.744.530.892,00 yaitu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.129.000,00, penerimaan piutang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD sebesar Rp8.488.264.225,00 dan penerimaan pembayaran piutang retribusi pemanfaatan aset sewa tanah pada Tahun 2025 sebesar Rp105.447.667,00 dan pendapatan diterima di muka untuk sewa tanah bandara sebesar Rp101.690.000,00.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp9.057.524.807,00	Rp8.451.510.307,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 realisasi sebesar Rp9.057.524.807,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp8.451.510.307,00 mengalami kenaikan sebesar Rp606.014.500,00 terdiri dari PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp8.857.524.807,00 dan deviden atas penyertaan modal pada Perumda Mual Natio sebesar Rp200.000.000,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp11.696.193.455,93	Rp3.825.708.287,99

Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah–LO Tahun 2025 sebesar Rp11.696.193.455,93 dan Tahun 2024 sebesar Rp3.825.708.287,99 mengalami kenaikan sebesar Rp7.870.485.167,94 atau naik 205,73%. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah–LO Tahun 2025 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut.

Tabel 145. Perincian Lain-lain PAD yang sah – LO

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO	55.327.000,00	0,00	55.327.000,00	0,00
3	Hasil Sewa BMD-LO	86.226.195,00	0,00	0,00	86.226.195,00
4	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO		0,00	0,00	0,00
5	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	47.369.400,00	0,00	0,00	47.369.400,00
6	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	469.853.845,00	0,00	0,00	469.853.845,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	534.454.294,04	19.619.150,00	514.835.144,04
8	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	11.173.304,00	0,00	0,00	11.173.304,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.391.183.523,82	0,00	2.048.842.411,04	342.341.112,78
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja -LO	2.239.813.259,61	0,00	0,00	2.239.813.259,61
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.913.774.894,50	0,00	0,00	6.913.774.894,50
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	136.930.929,00	0,00	0,00	136.930.929,00
13	Pendapatan dari BLUD-LO	933.875.372,00	0,00	0,00	933.875.372,00
	Jumlah	**13.434.527.722,93**	**534.454.294,04**	**2.272.788.561,04**	**11.696.193.455,93**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp13.434.527.722,93 dengan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp11.696.193.455,93 terdapat selisih kurang sebesar Rp1.738.334.267,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Daerah-LO sebesar Rp534.454.294,04 yaitu pencatatan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp534.454.294,00. Kemudian adanya pengurang pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp2.272.788.561,04 yaitu Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke surplus penjualan aset peralatan dan mesin sebesar Rp149.000.000,00, Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO yang direklasifikasi ke surplus penjualan aset lain-lain sebesar Rp55.327.000,00, pembayaran piutang tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.19.619.150,00 dan

penyetoran kurang volume pekerjaan pada Tahun 2024 yang dicatat pada aset lainnya sebesar Rp2.048.842.411,04.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.091.714.864.228,00	Rp1.122.369.538.601,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Pendapatan transfer-LO Tahun 2025 realisasi sebesar Rp1.091.714.864.228,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.122.369.538.601,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.654.674.373,00 atau turun 2,73%. Perincian pendapatan transfer-LO tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 146. Perincian Pendapatan Transfer – LO

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
7.2	**Pendapatan Transfer-LO**	**1.091.714.864.228,00**	**1.122.369.538.601,00**	**(30.654.674.373,00)**	**(2,73%)**
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.035.970.935.375,00	1.023.021.618.029,00	12.949.317.346,00	1,27%
7.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	14.881.571.000,00	6.867.270.000,00	8.014.301.000,00	116,70%
7.2.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah Bagi Hasli-LO	36.362.357.853,00	90.484.509.572,00	(54.122.151.719,00)	(59,81%)
7.2.04	Bantuan Keuangan - LO	4.500.000.000,00	1.996.141.000,00	2.503.859.000,00	125,43%

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.035.970.935.375,00	Rp1.023.021.618.029,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.035.970.935.375,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.023.021.618.029,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.949.317.346,00 atau naik 1,27%. Perincian Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 147. Perincian Transfer Pemerintah Pusat – LO

Kode Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
7.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**	**1.035.970.935.375,00**	**1.023.021.618.029,00**	**12.949.317.346,00**	**1,27%**
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	115.955.072.000,00	57.933.172.000,00	58.021.900.000,00	100,15%

Kode Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	696.974.246.628,00	681.275.700.613,00	15.698.546.015,00	2,30%
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	4.772.399.978,00	92.466.086.003,00	(87.693.686.025,00)	(94,84%)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	218.269.216.769,00	191.346.659.413,00	26.922.557.356,00	14,07%
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	115.955.072.000,00	57.933.172.000,00	58.021.900.000,00	100,15%

5.4.1.2.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp115.955.072.000,00	Rp57.933.172.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 sebesar Rp115.955.072.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp57.933.172.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.021.900.000,00 atau naik 100,15%. Perincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 148. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

NO	Uraian	LRA	Penambahan	Pengurangan	LO
1	DBH PBB-LO	42.790.071.000,00	18.206.608.000,00	356.029.000,00	60.640.650.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	9.961.758.000,00	7.030.178.000,00	0,00	16.991.936.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN-LO	655.071.000,00	0,00	0,00	655.071.000,00
4	DBH CHT-LO	2.258.640.000,00	689.303.000,00	0,00	2.947.943.000,00
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	11.281.000,00	0,00	1.000,00	11.280.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	135.595.000,00	109.925.000,00	6.715.000,00	238.805.000,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	312.630.000,00	14.602.144.000,00	7.587.000,00	14.907.187.000,00
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	15.117.496.000,00	0,00	397.962.000,00	14.719.534.000,00
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	649.844.000,00	737.457.000,00	96.975.000,00	1.290.326.000,00
11	DBH SDA Perikanan-LO	851.176.000,00	0,00	0,00	851.176.000,00
12	DBH Sawit-LO	2.700.114.000,00	0,00	0,00	2.700.114.000,00
Jumlah		**75.444.726.000,00**	**41.375.615.000,00**	**865.269.000,00**	**115.955.072.000,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA sebesar Rp75.444.726.000,00 dengan realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO sebesar Rp115.955.072.000,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp40.510.346.000,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambahan atas pengakuan piutang DBH Pusat TDF sebesar Rp41.375.615.000,00 kemudian pengurang Pendapatan Bagi Hasil (DBH)-LO yaitu penerimaan pembayaran piutang Dana Bagi Hasil Pusat TDF Tahun 2024 sebesar Rp865.269.000,00.

5.4.1.2.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp696.974.246.628,00	Rp681.275.700.613,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 sebesar Rp696.974.246.628,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp681.275.700.613,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.698.546.015,00. Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) secara akrual nilainya sama dengan pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) berbasis kas yang disajikan pada LRA.

5.4.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp4.772.399.978,00	Rp92.466.086.003,00

Realisasi pendapatan Dana Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.772.399.978,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp92.466.086.003,00 mengalami penurunan sebesar Rp87.693.686.025,00.

5.4.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp218.269.216.769,00	Rp191.346.659.413,00

Realisasi pendapatan Dana Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2025 sebesar Rp218.269.216.769,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp191.346.659.413,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.922.557.356,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp14.881.571.000,00	Rp6.867.270.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Tahun 2025 realisasi sebesar Rp14.881.571.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp6.867.270.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.014.301.000,00 yang merupakan pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)-LO.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil - LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp36.362.357.853,00	Rp90.484.509.572,00

Realisasi Pendapatan Transfer antar daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp36.362.357.853,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp90.484.509.572,00 mengalami penurunan sebesar Rp54.122.151.719,00 atau turun 59,81% yang merupakan Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi. Rincian pendapatan Transfer pemerintah daerah-LO sebagai berikut.

Tabel 149. Perincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO

NO	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	17.110.366.965,00	70.663.451,00	17.110.366.965,00	70.663.451,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	9.401.704.734,00	114.788.536,00	9.401.704.734,00	114.788.536,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	22.191.005.040,00	9.388.478.453,00	16.936.008.908,00	14.643.474.585,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	1.340.023.332,00	3.043.534.670,00	1.340.023.332,00	3.043.534.670,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	18.489.896.611,00	0,00	0,00	18.489.896.611,00
Jumlah		**68.532.996.682,00**	**12.617.465.110,00**	**44.788.103.939,00**	**36.362.357.853,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil - LRA sebesar Rp68.532.996.682,00 dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO sebesar Rp36.362.357.853,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp32.170.638.829,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Dana Bagi Hasil-LO yaitu piutang dana bagi hasil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp12.617.465.110,00. Kemudian terdapat pengurangan pendapatan Dana Bagi Hasil-LO sebesar Rp44.788.103.939,00 yaitu pembayaran piutang Provinsi Sumatera Utara yang disalurkan pada Tahun 2025.

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan - LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp4.500.000.000,00	Rp1.996.141.000,00

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.500.000.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.996.141.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.503.859.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan-LRA sebesar Rp6.496.141.000,00 dengan realisasi Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp4.500.000.000,00 maka terdapat selisih sebesar Rp1.996.141.000,00 yang disebabkan adanya penerimaan pembayaran piutang pendapatan yang bersumber dari Dana BKPSU Tahun 2024 yang disalurkan pada Tahun 2025.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp38.573.194.068,00	Rp37.825.200.245,00

Lain-lain Pendapatan yang sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp38.573.194.068,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp37.825.200.245,00 mengalami peningkatan sebesar Rp747.993.823,00. Perincian Lain-lain pendapatan Daerah yang sah-LO sebagai berikut.

Tabel 150. Perincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

NO	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	5.091.725.892,00	0,00	6.091.725.892,00
2	Dana Darurat	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan	28.481.468.176,00	0,00	0,00	28.481.468.176,00
Jumlah		**33.481.468.176,00**	**5.091.725.892,00**	**0,00**	**38.573.194.068,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA sebesar Rp33.481.468.176,00 dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO sebesar Rp38.573.194.068,00 maka terdapat selisih sebesar Rp5.091.725.892,00 yang disebabkan adanya pencatatan pendapatan hibah dari pihak ketiga yang dicatat sebagai aset tetap tanah sebesar Rp326.059.320,00, aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.145.951.573,00, aset gedung dan bangunan sebesar Rp3.619.714.999,00.

5.4.2. Beban

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.222.842.232.234,54	Rp1.282.134.240.898,07

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun 2025 sebesar Rp1.222.842.232.234,54 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.282.134.240.898,07 mengalami penurunan sebesar Rp59.292.008.663,53 atau turun 4,62%. Perincian beban Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 151. Perincian Beban – LO

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01	Beban Operasi	1.007.829.501.008,01	1.061.196.938.883,63	(53.367.437.875,62)	(5,03%)
8.1.02.01	Beban Transfer	74.671.554.100,00	73.107.902.160,00	1.563.651.940,00	2,14%
8.1.02.02	Beban Penyusutan dan Amortisasi	134.220.746.569,60	146.728.282.634,44	(12.507.536.064,84)	(8,52%)
8.1.02.03	Beban Tidak Terduga	6.120.430.556,93	1.101.117.220,00	5.019.313.336,93	455,84%
Total Beban		**1.222.842.232.234,54**	**1.282.134.240.898,07**	**(59.292.008.663,53)**	**(4,62%)**

Perincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban luar Biasa adalah sebagai berikut.

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.007.829.501.008,01	Rp1.061.196.938.883,63

Realisasi beban operasi Tahun 2025 sebesar Rp1.007.829.501.008,01 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.061.196.938.883,63 mengalami penurunan sebesar Rp53.367.437.875,62 atau turun 5,03%. Perincian beban operasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 152. Perincian Beban Operasi - LO Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01	Beban Pegawai	671.583.031.270,00	662.968.891.974,39	8.614.139.295,61	1,30%
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	314.807.994.943,27	315.285.022.969,27	(477.028.026,00)	(0,15%)
8.1.03	Beban Bunga	411.390.406,00	2.207.835.420,00	(1.796.445.014,00)	(81,37%)
8.1.05	Beban Hibah	17.950.224.250,00	71.974.027.092,00	(54.023.802.842,00)	(75,06%)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	1.346.012.700,00	773.494.700,00	572.518.000,00	74,02%
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	1.730.847.438,74	7.987.666.727,97	(6.256.819.289,23)	(78,33%)
Jumlah Beban Operasi		**1.007.829.501.008,01**	**1.061.196.938.883,63**	**(53.367.437.875,62)**	**(5,03%)**

5.2.4.1.1 Beban Pegawai -LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp671.583.031.270,00	Rp662.968.891.974,40

Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2025 sebesar Rp671.583.031.270,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp662.968.891.974,40 mengalami kenaikan sebesar Rp8.614.139.295,61 atau naik 1,30%. Beban pegawai-LO terdiri sebagai berikut.

Tabel 153. Perincian Beban Pegawai – LO

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	455.313.936.002,00	21.578.329.700,00	(12.609.148.100,00)	464.283.117.602,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	194.592.427.189,00	0,00	(18.046.744.200,00)	176.545.682.989,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.970.326.717,00	0,00	0,00	14.970.326.717,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	143.514.414,00	0,00	0,00	143.514.414,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.640.000,00	0,00	0,00	661.640.000,00
7	Beban Pegawai BOS	9.780.608.572,00	0,00	0,00	9.780.608.572,00
8	Beban Pegawai BLUD	5.198.140.976,00	0,00	0,00	5.198.140.976,00
Total Beban Pegawai		**680.660.593.870,00**	**21.578.329.700,00**	**(30.655.892.300,00)**	**671.583.031.270,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai-LRA sebesar Rp680.660.593.870,00 dengan realisasi beban pegawai-LO sebesar Rp671.583.031.270,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp9.077.562.600,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi penambahan antara lain pencatatan Utang beban Gaji THR Tahun 2025 sebesar Rp21.578.329.700,00. Kemudian adanya pengurang beban pegawai-LO sebesar Rp30.655.892.300,00 yaitu pembayaran utang belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2024 sebesar Rp18.046.744.200 dan pembayaran utang belanja Gaji THR 2024 sebesar Rp12.609.148.100,00.

5.2.4.1.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp314.807.994.943,27	Rp315.285.022.969,27

Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp314.807.994.943,27 dan Tahun 2024 sebesar Rp315.285.022.969,27 mengalami penurunan sebesar Rp477.028.026,00 atau turun 0,15%. Perincian realisasi beban barang dan jasa Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 154. Perincian Beban Barang dan Jasa- LO Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01	Beban Barang	57.475.304.794,07	91.245.505.894,06	(33.770.201.099,99)	(37,01%)
8.1.02	Beban Jasa	86.337.718.126,00	61.709.679.397,00	24.628.038.729,00	39,91%
8.1.03	Beban Pemeliharaan	3.924.177.372,03	4.014.095.710,00	(89.918.337,97)	(2,24%)
8.1.04	Beban Perjalanan Dinas	29.783.112.765,00	35.452.140.075,00	(5.669.027.310,00)	(15,99%)
8.1.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.332.257.790,00	17.433.790.138,01	(8.101.532.348,01)	(46,47%)
8.1.06	Beban Barang dan Jasa BOSP	30.280.280.559,00	30.760.541.683,00	(480.261.124,00)	(1,56%)
8.1.07	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.995.376.668,00	0,00	14.995.376.668,00	0,00%
8.1.08	Beban Barang dan Jasa BLUD	82.679.766.869,17	74.669.270.072,20	8.010.496.796,97	10,73%
Jumlah Beban Barang dan Jasa		**314.807.994.943,27**	**315.285.022.969,27**	**(477.028.026,00)**	**(0,15%)**

Penjelasan beban barang dan jasa sebagaimana pada tabel di atas sebagai berikut.

5.4.2.1.2.1 Beban Barang

Realisasi Beban barang pada Tahun 2025 sebesar Rp57.475.304.794,07 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 155. Perincian Beban Barang– LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	917.938.777,00	401.073.100,00	516.865.677,00	128,87%
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.502.562.068,00	5.033.001.713,60	469.560.354,40	9,33%

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
3	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	840.439.000,00	353.858.500,00	486.580.500,00	137,51%
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	22.305.400,00	8.033.000,00	14.272.400,00	177,67%
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	522.494.000,00	676.351.000,00	(153.857.000,00)	-22,75%
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.308.018.622,00	3.777.891.446,99	530.127.175,01	14,03%
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	984.774.216,00	526.362.380,00	458.411.836,00	87,09%
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	153.295.000,00	40.305.600,00	112.989.400,00	280,33%
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	95.655.600,00	247.650.900,00	(151.995.300,00)	-61,37%
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.103.726.900,00	2.762.630.112,90	(658.903.212,90)	-23,85%
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.899.101.375,00	4.426.016.652,63	473.084.722,37	10,69%
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	91.198.000,00	107.429.000,00	(16.231.000,00)	-15,11%
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.423.000,00	6.237.000,00	24.186.000,00	387,78%
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	413.555.000,00	498.074.179,00	(84.519.179,00)	-16,97%
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.256.818.649,00	643.018.684,00	613.799.965,00	95,46%
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	85.527.486,00	248.644.000,00	(163.116.514,00)	-65,60%
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	76.988.800,00	260.778.100,00	(183.789.300,00)	-70,48%
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	21.300.000,00	149.400.000,00	(128.100.000,00)	-85,74%
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.225.178.578,00	1.429.293.282,00	795.885.296,00	55,68%
20	Beban Obat-Obatan-Obat	5.496.307.783,08	10.991.240.953,73	(5.494.933.170,65)	-49,99%
21	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.300.100,00	41.763.418,00	(35.463.318,00)	-84,91%
22	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.623.606.273,99	34.061.376.916,57	(24.437.770.642,58)	-71,75%
23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	225.690.000,00	1.800.000,00	223.890.000,00	12438,33%
24	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00	0,00%

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
25	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.726.092.817,00	17.701.312.500,00	(12.975.219.683,00)	-73,30%
26	Beban Natura dan Pakan-Pakan	166.716.583,00	95.963.000,00	70.753.583,00	73,73%
27	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.231.183.300,00	37.677.000,00	6.193.506.300,00	16438,43%
28	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.217.455.600,00	0,00	1.217.455.600,00	0,00%
29	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	110.311.600,00	0,00	110.311.600,00	0,00%
30	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.474.774.300,00	135.850.000,00	2.338.924.300,00	1721,70%
31	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	543.317.250,00	0,00	543.317.250,00	0,00%
32	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%
33	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	97.493.000,00	43.091.000,00	54.402.000,00	126,25%
34	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.850.000,00	70.046.000,00	(34.196.000,00)	-48,82%
35	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	42.915.000,00	13.220.000,00	29.695.000,00	224,62%
36	Beban Pakaian Teknik	15.415.000,00	3.322.600,00	12.092.400,00	363,94%
37	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	81.153.000,00	(81.153.000,00)	-100,00%
38	Beban Pakaian KORPRI	19.785.000,00	5.140.000,00	14.645.000,00	284,92%
39	Beban Pakaian Adat Daerah	107.100.000,00	51.000.000,00	56.100.000,00	110,00%
40	Beban Pakaian Olahraga	29.000.000,00	39.000.000,00	(10.000.000,00)	-25,64%
41	Beban Pakaian Jas/Safari	70.000.000,00	23.000.000,00	47.000.000,00	204,35%
42	Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	300.000,00	(300.000,00)	-100,00%
43	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	89.450.000,00	0,00	89.450.000,00	0,00%
44	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	0,00%
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	14.606.500,00	0,00	14.606.500,00	0,00%
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	351.690.931,00	5.717.108.316,00	(5.365.417.385,00)	-93,85%
47	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	99.942.000,00	0,00	99.942.000,00	0,00%
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	28.149.955,00	0,00	28.149.955,00	0,00%

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.131.975,00	31.704.942,00	(27.572.967,00)	-86,97%
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	200.000,00	105.351.236,00	(105.151.236,00)	-99,81%
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(5.867.277.400,00)	0,00	(5.867.277.400,00)	0,00%
52	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	45.400.000,00	0,00	45.400.000,00	0,00%
53	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	(110.390.001,36)	110.390.001,36	-100,00%
54	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	428.554.608,00	(428.554.608,00)	-100,00%
55	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.001.422.355,00	0,00	1.001.422.355,00	0,00%
56	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	5.876.614.400,00	68.871.754,00	5.807.742.646,00	8432,69%
	Total	**57.475.304.794,07**	**91.245.505.894,06**	**(33.770.201.099,99)**	**-37,01%**

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Realisasi beban jasa pada Tahun 2025 sebesar Rp86.337.718.126,00 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 156. Perincian Beban Jasa – LO

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	49.289.293.954,00	0,00	(281.105.790,00)	49.008.188.164,00
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33.110.785.570,00	0,00	0,00	33.110.785.570,00
3.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.852.575.939,00	0,00	0,00	1.852.575.939,00
4.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	410.799.975,00	0,00	0,00	410.799.975,00
5.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	858.213.300,00	0,00	0,00	858.213.300,00
6.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	393.053.700,00	0,00	0,00	393.053.700,00

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
7.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	-
8.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	704.101.478,00	0,00	0,00	704.101.478,00
Jumlah Beban Jasa		**86.618.823.916,00**	**0,00**	**(281.105.790,00)**	**86.337.718.126,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja jasa-LRA sebesar Rp86.618.823.916,00 dengan realisasi beban jasa-LO sebesar Rp86.337.718.126,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp281.105.790,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi pengurang yaitu reklasifikasi beban jasa (biaya umum) honorarium pengadaan ke aset tetap sebesar Rp2.420.000,00 dan pembayaran utang belanja jasa kantor pada Sekretariat Daerah sebesar Rp278.685.790,00.

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan pada Tahun 2025 sebesar Rp3.924.177.372,03 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 157. Perincian Beban Pemeliharaan – LO

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.649.039.976,00	0,00	107.395.600,82	2.541.644.375,18
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.329.001.242,85	268.200.393,00	216.582.139,00	1.380.619.496,85
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.913.500,00	0,00	0,00	1.913.500,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		**3.979.954.718,85**	**268.200.393,00**	**323.977.739,82**	**3.924.177.372,03**

Jika dibandingkan realisasi belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp3.979.954.718,85 dengan realisasi beban pemeliharaan-LO sebesar Rp3.924.177.372,03 terdapat selisih kurang sebesar Rp55.777.346,82. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi penambahan yaitu reklasifikasi dari aset tetap ke beban jasa pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp268.200.393,00. Kemudian mutasi pengurangan sebesar Rp323.977.739,82 yakni reklasifikasi beban pemeliharaan peralatan dan mesin ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp107.395.600,82 dan reklasifikasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan ke aset tetap sebesar Rp216.582.139,00.

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 sebesar Rp29.783.112.765,00 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 158. Perincian Beban Perjalanan Dinas – LO

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	29.790.102.764,00	0,00	(6.989.999,00)	29.783.112.765,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		**29.790.102.764,00**	**0,00**	**(6.989.999,00)**	**29.783.112.765,00**

Jika dibandingkan realisasi belanja perjalanan dinas-LRA sebesar Rp29.790.102.764,00 dengan realisasi beban perjalanan dinas -LO sebesar Rp29.783.112.765,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp6.989.999,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi pengurangan yaitu reklasifikasi beban perjalanan dinas yakni biaya umum pengadaan ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp6.989.999,00.

5.4.2.1.2.5 Beban Uang/Jasa Diberikan kepada Pihak ketiga

Realisasi Beban Uang/Jasa Diberikan kepada Pihak ketiga pada Tahun 2025 sebesar Rp9.332.257.790,00 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 159. Perincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.199.250.000,00	0,00	0,00	2.199.250.000,00
2.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.133.007.790,00	0,00	0,00	7.133.007.790,00
Jumlah Beban Uang/Jasa diberikan kepada Pihak ketiga		**9.332.257.790,00**	**0,00**	**0,00**	**9.332.257.790,00**

Tidak ada perbedaan antara realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga-LRA sebesar Rp9.332.257.790,00 dengan realisasi beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga-LO.

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOS

Realisasi Beban barang dan jasa BOS pada Tahun 2025 sebesar Rp30.280.280.559,00 dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 160. Perincian Beban Barang dan Jasa BOS

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BOSP	30.249.779.814,00	30.500.745,00	0	30.280.280.559,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BOSP		**30.249.779.814,00**	**30.500.745,00**	**0,00**	**30.280.280.559,00**

Jika dibandingkan realisasi barang dan jasa BOS-LRA sebesar Rp30.113.725.892,00 dengan realisasi beban barang dan jasa BOS-LO sebesar Rp30.280.280.559,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp30.500.745,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi bertambah yaitu pencatatan pertambahan persediaan pada Tahun 2025 yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp28.500.745,00 dan adanya reklasifikasi aset tetap lainnya sebesar Rp2.000.000,00.

5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Realisasi Beban barang dan jasa BOS pada Tahun 2025 sebesar Rp14.995.376.668,00. Tidak ada perbedaan antara Belanja barang dan jasa BOS-LRA dengan Beban barang dan jasa BOS-LO.

5.4.2.1.2.8 Beban Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Beban barang dan jasa BLUD pada Tahun 2025 sebesar Rp82.679.766.869,17 dan Tahun 2024 sebesar Rp74.669.270.072,20 mengalami kenaikan sebesar Rp8.010.496.796,97.

Tabel 161. Perincian Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1.	Beban Barang dan Jasa BLUD	78.188.691.501,00	4.491.075.368,17	0,00	82.679.766.869,17
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD		**78.188.691.501,00**	**4.491.075.368,17**	**0,00**	**82.679.766.869,17**

Jika dibandingkan realisasi barang dan jasa BLUD-LRA sebesar Rp78.188.691.501,00 dengan realisasi beban barang dan jasa BLUD-LO sebesar Rp82.679.766.869,17 terdapat selisih lebih sebesar Rp4.491.075.368,17. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi bertambah yaitu penambahan utang belanja Tahun 2025 sebesar Rp3.711.419.731,00, Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp199.594.324,00 dan pertambahan persediaan Tahun 2025 sebesar Rp580.061.313,17.

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp411.390.406,00	Rp2.207.835.420,00

Realisasi beban bunga Tahun 2025 adalah sebesar Rp411.390.406,00 merupakan pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero) untuk Tahun 2026 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 162. Perincian Beban Bunga

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Bunga	1.305.525.006,00	411.387.506,00	(1.305.522.106,00)	411.390.406,00
Jumlah Beban Bunga		**1.305.525.006,00**	**411.387.506,00**	**(1.305.522.106,00)**	**411.390.406,00**

Jika dibandingkan realisasi belanja bunga-LRA sebesar Rp1.305.525.006,00 dengan realisasi beban bunga-LO sebesar Rp411.390.406,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp894.134.600,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi bertambah yaitu penambahan pengakuan utang belanja bunga Tahun 2026 sebesar Rp411.387.506,00. Kemudian adanya mutasi berkurang sebesar Rp1.305.522.106,00 yaitu pembayaran utang belanja bunga yang diakui sebagai kewajiban pada Tahun 2025.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp17.950.224.250,00	Rp71.974.027.092,00

Realisasi Beban Hibah Tahun 2025 adalah sebesar Rp17.950.224.250,00. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Perincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 163. Perincian Beban Hibah

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.813.692.120,00	0,00	2.813.692.120,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00
3.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.104.000.000,00	9.500.000,00	0,00	4.113.500.000,00
4.	Beban Hibah Dana BOS	4.928.250.000,00	0,00	0,00	4.928.250.000,00

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
5.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	958.969.080,00	0,00	0,00	958.969.080,00
6.	Beban Hibah Dana BOSP	5.005.813.050,00	0,00	0,00	5.005.813.050,00
Jumlah Beban Hibah		**15.127.032.130,00**	**2.823.192.120,00**	**0,00**	**17.950.224.250,00**

Jika dibandingkan realisasi belanja hibah-LRA sebesar Rp15.127.032.130,00 dengan realisasi beban hibah-LO sebesar Rp 17.950.224.250,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp 2.823.192.120,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi tambah yaitu beban hibah kepada Pemerintah Pusat (Kantor Imigrasi dan TNI AU) serta Kantor Kejaksaan berupa aset tanah sebesar Rp2.813.692.120,00 dan hibah peralatan dan mesin ke Dewan Kesenian dari Bagian Umum Setdakab sebesar Rp9.500.000,00.

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.346.012.700,00	Rp773.494.700,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp1.346.012.700,00. Beban bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Perincian beban bantuan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 164. Perincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	512.650.000,00	0,00	0,00	512.650.000,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	372.862.700,00	0,00	0,00	372.862.700,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	460.500.000,00	0,00	0,00	460.500.000,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial		**1.346.012.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.346.012.700,00**

Tidak ada perbedaan antara realisasi belanja bantuan sosial-LRA sebesar Rp1.346.012.700,00 dengan realisasi beban bantuan sosial-LO.

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp1.730.847.438,74	Rp7.987.666.727,97

Beban penyisihan piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.730.847.438,74 dan Tahun 2024 sebesar Rp7.987.666.727,97 mengalami penurunan sebesar Rp6.256.819.289,23 atau turun 78%. Perincian beban penyisihan piutang Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 165. Perincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.197.050,00	0,00	10.197.050,00	0%
2.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	(4.180.000,00)	4.180.000,00	-100%
3.	Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	(7.838.000,00)	7.838.000,00	-100%
4.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.381.721.559,89	569.860.359,04	811.861.200,85	142%
5.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Penyewaan Tanah dan Bangunan	183.115.509,79	103.721.946,73	79.393.563,06	77%
6.	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	155.813.319,06	7.316.121.717,20	(7.160.308.398,14)	-98%
7.	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	0,00	9.980.705,00	(9.980.705,00)	-100%
Jumlah Beban Penyisihan Piutang		**1.730.847.438,74**	**7.987.666.727,97**	**(6.256.819.289,23)**	**-78%**

5.4.2.1.7 Beban Lain-lain

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp0,00

Beban lain-lain Tahun 2025 adalah Nihil.

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp134.220.746.569,60	Rp146.728.282.634,44

Realisasi Beban Penyusutan dan amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp134.220.746.569,60 dan Tahun 2024 sebesar Rp146.728.282.634,44 mengalami penurunan sebesar (Rp12.507.536.064,84). Perincian beban penyusutan dan amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 166. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.243.176.264,24	44.020.115.432,14	(5.776.939.167,90)	(13,12%)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.664.650.118,88	15.915.420.184,99	749.229.933,89	4,71%
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	78.939.354.729,80	86.118.494.321,51	(7.179.139.591,71)	(8,34%)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	202.560.289,88	510.677.886,95	(308.117.597,07)	(60,34%)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	171.005.166,80	163.574.808,85	7.430.357,95	4,54%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		**134.220.746.569,60**	**146.728.282.634,44**	**(12.507.536.064,84)**	**(8,52%)**

5.4.2.3 Beban Transfer

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp74.671.554.100,00	Rp73.107.902.160,00

Realisasi Beban transfer Tahun 2025 sebesar Rp74.671.554.100,00 dan Tahun sebesar Rp73.107.902.160,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.563.651.940,00. Perincian beban Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 167. Perincian Beban Transfer – LO

Kode Rek	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	252.208.325.918,00	0,00	(177.536.771.818,00)	74.671.554.100,00
	Beban Transfer	**252.208.325.918,00**	**0,00**	**(177.536.771.818,00)**	**74.671.554.100,00**

Jika dibandingkan realisasi Belanja Transfer- LRA sebesar Rp252.208.325.918,00 dengan realisasi beban Transfer-LO sebesar Rp74.671.554.100,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp177.536.771.818,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi berkurang yakni pembayaran utang belanja alokasi dana desa Tahun 2024 yang disalurkan pada Tahun 2025 sebesar Rp13.588.051.784,00. Realisasi dan entitas pelaporan penggunaan Dana Desa

yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat secara langsung dikelola oleh Desa sehingga tidak dilakukan pencatatan pada Beban transfer sebesar Rp163.948.720.034,00.

5.4.2.4 Beban Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp6.120.430.556,93	Rp1.101.117.220,00

Beban tidak terduga Tahun 2025 sebesar Rp6.120.430.556,93 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.101.117.220,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.019.313.336,93 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 168. Perincian Beban Tidak Terduga – LO

Kode Rek	Uraian	LRA (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	LO (Rp)
8.2.01	Beban Tidak Terduga-LO	15.383.387.034,00	0,00	(9.262.956.477,07)	6.120.430.556,93
	Beban Tidak Terduga-LO	**15.383.387.034,00**	**0,00**	**(9.262.956.477,07)**	**6.120.430.556,93**

Jika dibandingkan realisasi Belanja Tidak Terduga- LRA sebesar Rp15.383.387.034,00 dengan realisasi beban Tidak Terduga-LO sebesar Rp6.120.430.556,93 terdapat selisih kurang sebesar Rp9.262.956.477,07 yang diakibatkan adanya mutasi kurang pencatatan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.467.537.548,00, aset gedung bangunan sebesar Rp354.820.000,00, dan aset jaringan irigasi dan jalan sebesar Rp5.297.904.929,07 dan persediaan barang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp1.142.694.000,00 yang bersumber dari Dana Tidak Terduga.

5.4.3. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasi

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp54.523.715.230,50	Rp14.131.338.663,46

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasi Tahun 2025 sebesar Rp54.523.715.230,50 yang merupakan selisih dari Pendapatan-LO sebesar Rp1.277.365.947.465,04 dengan Beban sebesar Rp1.222.842.232.234,54 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 169. Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasi – LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan-LO	1.277.365.947.465,04	1.296.265.579.561,53	(18.899.632.096,49)	-1,46%
2	Beban- LO	1.222.842.232.234,54	1.282.134.240.898,07	(59.292.008.663,53)	-4,62%
Surplus/ Defisit dari Operasi		**54.523.715.230,50**	**14.131.338.663,46**	**40.392.376.567,04**	**285,84%**

5.4.4. Kegiatan Non Operasional

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
(Rp939.293.586,00)	(Rp31.957.177,00)

Realisasi kegiatan non operasional Tahun 2025 sebesar (Rp939.293.586,00) dan Tahun 2024 sebesar (Rp31.957.177,00) mengalami penurunan sebesar (Rp907.336.409,00) yang terdiri dari surplus non operasional sebesar Rp204.327.000,00 dan defisit non operasional sebesar (Rp1.143.620.586,00) dengan uraian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 170. Kegiatan Non Operasional Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	**SURPLUS NON OPERASIONAL**	**204.327.000,00**	**1.002.247.748,00**	**(797.920.748,00)**
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar	204.327.000,00	340.713.000,00	(136.386.000,00)
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00		0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	661.534.748,00	(661.534.748,00)
2	**DEFISIT NON OPERASIONAL**	**1.143.620.586,00**	**1.034.204.925,00**	**109.415.661,00**
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar	0,00		0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00		0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.143.620.586,00	1.034.204.925,00	109.415.661,00
	Jumlah	**(939.293.586,00)**	**(31.957.177,00)**	**(907.336.409,00)**

5.4.5. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(defisit) dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp54.523.715.230,50 surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional adalah (Rp939.293.586,00) sehingga surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa adalah sebesar Rp53.584.421.644,50.

5.4.6. Pos Luar Biasa

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp0,00	Rp0,00

Pos luar biasa Tahun 2025 sebesar Rp0,00

5.4.7. Surplus/ Defisit-LO.

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp53.584.421.644,50	Rp14.099.381.486,46

Surplus/defisit-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp53.584.421.644,50 dan Tahun 2024 sebesar Rp14.099.381.486,46 mengalami kenaikan sebesar (Rp39.485.040.158,04) atau naik sebesar 280,05%.

5.5. Perincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan kas sebesar Rp48.971.547.126,77 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 171. Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2025

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	160.643.403.599,77	160.117.432.424,93
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(60.224.424.848,08)	(98.695.581.555,94)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(51.437.488.606,00)	(69.282.056.597,00)
4	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(9.943.018,92)	9.943.018,92
	Jumlah kenaikan/ (Penurunan) Kas	**48.971.547.126,77**	**(7.850.262.709,09)**

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp160.643.403.599,77	Rp160.117.432.424,93

Saldo Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2025 sebesar Rp160.643.403.599,77 dan Tahun 2024 sebesar Rp160.117.432.424,93 mengalami peningkatan sebesar Rp525.971.174,84. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 172. Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
I	**Arus Kas Masuk**		
1	Penerimaan Pajak Daerah	37.626.009.629,67	27.663.738.746,01
2	Penerimaan Retribusi Daerah	96.559.544.688,00	93.784.976.878,78
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.057.524.807,00	8.451.510.307,00
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	13.230.200.722,93	3.371.083.899,61
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	0,00	64.628.799.000,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	681.275.700.613,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	92.466.086.003,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	191.346.659.413,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil	75.444.726.000,00	0,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	696.974.246.628,00	0,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	4.772.399.978,00	0,00

No.	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	218.269.216.769,00	0,00
13	Penerimaan Hibah kepada Daerah	0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Insentif	0,00	0,00
15	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
16	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
17	Penerimaan Dana Desa	163.948.720.034,00	199.129.952.200,00
18	Penerimaan Insentif Fiskal	14.881.571.000,00	6.867.270.000,00
19	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	68.532.996.682,00	45.696.405.633,00
20	Penerimaan Bantuan Keuangan	6.496.141.000,00	0,00
21	Penerimaan Hibah	1.000.000.000,00	8.818.078.129,00
22	Penerimaan Dana Darurat	4.000.000.000,00	0,00
23	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	28.481.468.176,00	13.396.036.802,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.439.274.766.114,60**	**1.436.896.297.624,40**
II	**Arus Kas keluar**		
1	Pembayaran Pegawai	680.660.593.870,00	621.410.779.418,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	312.600.485.856,83	318.291.641.973,47
3	Pembayaran Bunga	1.305.525.006,00	2.207.835.420,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Belanja Hibah	15.127.032.130,00	71.990.363.892,00
6	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.346.012.700,00	773.494.700,00
7	Pembayaran Tak Terduga	15.383.387.034,00	3.454.947.220,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
10	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
12	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	252.208.325.918,00	258.649.802.576,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**1.278.631.362.514,83**	**1.276.778.865.199,47**
	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	**160.643.403.599,77**	**160.117.432.424,93**

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
(Rp60.224.424.848,08)	(Rp98.695.581.555,94)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun 2025 sebesar (Rp60.224.424.848,08) dan Tahun 2024 sebesar (Rp98.695.581.555,94) mengalami kenaikan sebesar Rp38.471.156.707,86. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah dari penjualan aset daerah, setelah dikurangi belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk belanja modal berupa pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik. Perincian atas aktivitas investasi Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 173. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
I	**Arus Kas Masuk**		
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	149.000.000,00	340.713.000,00
2	Penjualan Aset Lainnya	-	-
3	Penjualan Aset Lain-Lain	55.327.000,00	43.030.100,00
	Jumlah Arus Kas masuk	**204.327.000,00**	**383.743.100,00**
II	**Arus Kas Keluar:**		
1	Perolehan Tanah	-	164.000.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	20.939.549.180,71	26.958.423.144,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	6.342.671.277,29	14.949.241.861,74
4	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.687.651.374,08	56.854.991.209,34
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	14.458.880.016,00	111.469.430,00
6	Perolehan Aset Lainnya	-	41.199.010,86
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	**60.428.751.848,08**	**99.079.324.655,94**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(60.224.424.848,08)**	**(98.695.581.555,94)**

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
(Rp51.437.488.606,00)	(Rp69.282.056.597,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebesar (Rp51.437.488.606,00) dan Tahun 2024 sebesar (Rp69.282.056.597,00) mengalami kenaikan sebesar Rp17.844.567.991,00. Arus kas bersih aktivitas pendanaan merupakan jumlah arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 174. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	**Arus Kas Masuk**		
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah arus kas masuk	**0,00**	**0,00**
2	**Arus Kas Keluar**		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	51.437.488.606,00	69.282.056.597,00
	Jumlah arus kas keluar	**51.437.488.606,00**	**69.282.056.597,00**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(51.437.488.606,00)**	**(69.282.056.597,00)**

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
(Rp9.943.018,92)	Rp9.943.018,92

Saldo Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar (Rp9.943.018,92) dan Tahun 2024 sebesar Rp9.943.018,92 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 175. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	**Arus Kas Masuk**		
	a) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	74.725.881.068,02	72.837.615.432,45
2	**Arus Kas Keluar**		
	a) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	74.735.824.086,94	72.827.672.413,53
	Jumlah Arus Kas Bersih	**(9.943.018,92)**	**9.943.018,92**

Saldo Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2025 sebesar (Rp9.943.018,92). Pengelolaan PFK oleh BUD yaitu berasal dari pemungutan dan penyetoran pajak seluruh SKPD Kabupaten Tapanuli Utara dengan perincian PFK yang dikelola oleh BUD selama Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 176. Perincian PFK yang dikelola oleh BUD selama Tahun 2025

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	55.150.766.766,51	55.150.766.766,51	0,00
2	Pajak Penghasilan Ps 21	9.974.731.804,00	9.974.731.804,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 22	577.772.354,16	577.772.354,16	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 23	151.761.804,97	151.761.804,97	0,00
5	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	641.476.784,00	641.476.784,00	0,00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8.229.371.554,38	8.239.314.573,30	(9.943.018,92)
Jumlah		**74.725.881.068,02**	**74.735.824.086,94**	**(9.943.018,92)**

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp59.874.748.417,95	Rp10.683.462.109,98

Saldo akhir kas Tahun 2025 sebesar Rp59.874.748.417,95 dan Tahun 2024 sebesar Rp10.683.462.109,98 mengalami kenaikan sebesar Rp49.191.286.307,97 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 177. Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Kenaikan/ (Penurunan) Kas	**48.971.547.126,77**	**(7.850.262.709,09)**
2	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	**10.683.462.109,98**	**18.272.950.856,00**
3	Koreksi Silpa	219.739.181,20	(8.094.218,13)
4	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	10.903.201.291,18	18.264.856.637,87

No.	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
5	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS	59.874.748.417,95	10.414.593.928,78
	Kas di Kas Daerah	49.786.382.574,55	8.338.721.467,86
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	49.129.000,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	108.939.603,00
	Kas di BLUD	8.081.257.623,00	805.407.416,00
	Kas Dana BOS	0,00	439.505.723,80
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	807.533.610,20	50.024.510,20
	Kas Lainnya	479.785.637,20	229.682.200,12
	Kas Dana BOSP	320.845.765,80	0,00
	Kas Dana BOK Puskesmas	163.482.934,00	662.052.189,00
	Setara Kas	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	**59.639.288.144,75**	**10.683.462.109,98**

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan sebesar Rp235.460.273,20 antara Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas (LAK) sebesar Rp59.874.748.417,95 dan Saldo Akhir Kas pada Neraca sebesar Rp59.639.288.144,75. Hal ini disebabkan adanya koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya yakni Kas Lainnya pada rekening Puskesmas Non Kapitasi Tahun 2024 sebesar Rp219.739.181,20 dan koreksi Kas Bendahara Penerimaan pada Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp49.129.000,00 yang disetorkan pada Tahun 2025 serta adanya koreksi pencatatan Tahun 2025 atas Kas Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp33.407.908,00.

5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun berjalan dibandingkan dengan Tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh SKPD di Kabupaten Tapanuli Utara. Perincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 178. Perincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	2.271.720.431.485,17	2.331.755.925.727,85
2.	Surplus/ Defisit-LO	53.584.421.644,50	14.099.381.486,46
3.	RK PPKD	743.258.343.198,42	949.422.190.552,01
4.	RK SKPD	(743.258.343.198,42)	(949.422.190.552,01)
5.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	97.471.614.104,64	(74.134.875.729,14)
	Koreksi Nilai Persediaan	32.277.269.858,99	(4.519.787,40)
	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya	65.194.344.245,65	(74.130.355.941,74)
Ekuitas Akhir		**2.422.776.467.234,31**	**2.271.720.431.485,17**

5.6.1. Ekuitas Awal

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp2.271.720.431.485,17	Rp2.331.755.925.727,85

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.271.720.431.485,17 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2024. Saldo Ekuitas awal Tahun 2025 lebih kecil sebesar Rp60.035.494.242,68 dibandingkan saldo ekuitas awal Tahun 2024.

5.6.2. Surplus/Defisit –LO

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp53.584.421.644,50	Rp14.099.381.486,46

Operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami surplus Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp53.584.421.644,50 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 maka terdapat kenaikan sebesar Rp39.485.040.158,04 atau naik 280,05%.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp97.471.614.104,64	(Rp74.134.875.729,14)

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebesar Rp97.471.614.104,64 dan Tahun 2024 sebesar (Rp74.134.875.729,14). Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar diantaranya yaitu adanya koreksi kesalahan perhitungan pencatatan Tahun sebelumnya serta koreksi persediaan atas aset Jaringan/Jalan dan Irigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya dicatat pada Aset tetap namun memperhatikan status aset dimaksud bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah maka dilakukan koreksi.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rp2.422.776.467.234,31	Rp2.271.720.431.485,17

Saldo ekuitas akhir Tahun 2025 sebesar Rp2.422.776.467.234,31 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.271.720.431.485,17 mengalami kenaikan sebesar Rp151.056.035.749,14 atau naik 6,65%.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara dan pemekarannya dibentuk berdasarkan Undang-undang:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

6.2. Letak Geografis



Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, 1°20'00" - 2°41'00" Lintang Utara dan 98°05'-99°16' Bujur Timur dengan luas wilayah 3.800,31 km² (sudah termasuk perairan Danau Toba yang berada di Kecamatan Muara seluas 6,60 km2). Kabupaten Tapanuli Utara dikelilingi oleh lima kabupaten, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, sebelah timur berbatasan dengan Labuhan Batu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Secara administratif, Kabupaten Tapanuli Utara terbagi dalam 15 kecamatan 241 Desa dan 11 Kelurahan. Dari 15 kecamatan yang ada, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Garoga dengan luas sekitar 567,58 Km^2 atau 14,96 persen dari luas Kabupaten Tapanuli Utara, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Muara dengan luas sekitar 79,75 Km^2 atau 2,10 persen.

Tabel 179. Luas Wilayah per Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km2)	Rasio Terhadap Total (%)
Parmonangan	257,35	6,78
Adiankoting	502,90	13,26
Sipoholon	189,20	4,99
Tarutung	107,68	2,84
Siatas Barita	92,92	2,45
Pahae Julu	165,90	4,37
Pahae Jae	203,20	5,36
Purbatua	191,80	5,06
Simangumban	150,00	3,95
Pangaribuan	459,25	12,10
Garoga	567,58	14,96

Sipahutar	408,22	10,76
Siborongborong	279,91	7,38
Pagaran	138,05	3,64
Muara	79,75	2,10
Tapanuli Utara	**3.793,71**	**100,00**

Topografi dan kontur tanah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam yaitu yang tergolong datar (3,16 persen), landai (26,86 persen), miring (25,63 persen) dan terjal (44,35 persen).

6.3. Organisasi dan Personalia

Organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan 12 Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 2 Bidang Urusan Pilihan dan 8 Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang meliputi 45 Unit SKPD, sebagai berikut.

6.3.1. Urusan dan Bidang

Tabel 180. Urusan dan Bidang

Kode	Urusan dan Bidang
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**
1 . 01	Pendidikan
1 . 02	Kesehatan
1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 . 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 . 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1 . 06	Sosial
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**
2 . 01	Tenaga Kerja
2 . 03	Pangan
2 . 05	Lingkungan Hidup
2 . 06	Administrasi Kependudukan dan Capil
2 . 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 . 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 . 09	Perhubungan
2 . 10	Komunikasi dan Informatika
2 . 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 . 12	Penanaman Modal
2 . 13	Kepemudaan dan Olah Raga
2 . 17	Perpustakaan
3	**Urusan Pilihan**
3 . 02	Pariwisata
3 . 03	Pertanian
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**
4 . 01	Administrasi Pemerintahan
4 . 02	Pengawasan
4 . 03	Perencanaan
4 . 04	Keuangan
4 . 05	Kepegawaian
4 . 06	Sekretariat DPRD
4 . 07	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan
4 . 08	Kesatuan Bangsa dan Politik

6.3.2. Unit Organisasi (SKPD)

Tabel 181. Unit Organisasi (SKPD)

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Ketenagakerjaan

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
10	Dinas Ketahanan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga
20	Dinas Perpustakaan
21	Dinas Pariwisata
22	Dinas Pertanian
23	Sekretariat Daerah
24	Inspektorat
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Badan Pendapatan Daerah
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	Sekretariat DPRD
30	Kantor Kecamatan Tarutung
31	Kantor Kecamatan Siatas Barita
32	Kantor Kecamatan Adiankoting
33	Kantor Kecamatan Sipoholon
34	Kantor Kecamatan Pahae Julu
35	Kantor Kecamatan Pahae Jae
36	Kantor Kecamatan Purbatua
37	Kantor Kecamatan Simangumban
38	Kantor Kecamatan Sipahutar
39	Kantor Kecamatan Pangaribuan
40	Kantor Kecamatan Garoga
41	Kantor Kecamatan Siborongborong
42	Kantor Kecamatan Pagaran
43	Kantor Kecamatan Parmonangan
44	Kantor Kecamatan Muara
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Aparatur Sipil Negeri (ASN) per akhir Tahun Anggaran 2025 yaitu PNS sebanyak 3.841 orang dan PPPK sebanyak 2.932 orang dengan perincian sebagai berikut:

- Golongan IV = 839 Orang
- Golongan III = 2.497 Orang
- Golongan II = 494 Orang
- Golongan I = 11 Orang
- PPPK = 2.932 Orang
- Jumlah 6.773 Orang

BAB VII
PENUTUP

Dari uraian di atas, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.439.479.093.114,60 atau 99,29% dari target sebesar Rp1.449.723.647.639,00;
2. Realisasi belanja-LRA sebesar Rp 1.339.060.114.362,91 atau 96,03% dari Anggaran sebesar Rp1.394.378.083.538,86;
3. Realisasi Pembiayaan Neto-LRA sebesar (40.813.098.514,94) atau 73,74% dari anggaran sebesar (Rp55.345.564.100,14);
4. Jumlah Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2025 sebesar Rp59.605.880.236,75;
5. Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.674.394.650.412,83 dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.584.660.729.547,97 mengalami kenaikan sebesar Rp89.733.920.864,86;
6. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.380.040.882.536,03 dibandingkan dengan jumlah aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.407.335.274.480,14 mengalami penurunan sebesar (27.294.391.944,11);
7. Surplus/defisit LO Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp53.584.421.644,50 yang terdiri dari surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp53.584.421.644,50 + surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar Rp0,00;
8. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.422.776.467.234,31 yang merupakan (Ekuitas Awal sebesar Rp2.271.720.431.485,17 + surplus LO sebesar Rp53.584.421.644,50 + Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp32.277.269.858,99 + Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp65.194.344.245,65);
9. Saldo Akhir Kas adalah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara Dana BOSP, Kas di Bendahara BOK Puskesmas dan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp59.639.288.144,75;
10. Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan kas sebesar Rp48.971.547.126,77 sedangkan pada Tahun 2024 penurunan kas sebesar (Rp7.850.262.709,09);

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan juga mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.

Tarutung, 26 Mei 2026

BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. Jonius TP. Hutabarat, S.Si, M.Si

Lampiran 1

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR REALISASI RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGARAN 2025

NO		JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH	%
1	**Retribusi Jasa Umum**		**89.075.768.000,00**	**93.649.944.595,00**	**4.574.176.595,00**	**105,14**
	1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	87.380.000.000,00	92.320.848.795,00	4.940.848.795,00	105,65
	1.2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	112.850.000,00	(37.150.000,00)	75,23
	1.3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	884.806.000,00	(115.194.000,00)	88,48
	1.4	Retribusi Pelayanan Kebersihan	545.768.000,00	331.439.800,00	(214.328.200,00)	60,73
2	**Retribusi Jasa Usaha**		**2.283.600.000,00**	**1.419.929.517,00**	**(863.670.483,00)**	**62,18**
	2.1	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Vila	50.000.000,00	7.400.000,00	(42.600.000,00)	14,80
	2.2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	80.800.000,00	58.660.000,00	(22.140.000,00)	72,60
	2.3	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	170.000.000,00	127.296.000,00	(42.704.000,00)	74,88
	2.4	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	67,50
	2.5	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	400.800.000,00	282.316.126,00	(118.483.874,00)	70,44
	2.6	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.562.000.000,00	930.757.391,00	(631.242.609,00)	59,59
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**		**3.518.000.000,00**	**1.489.670.576,00**	**(2.028.329.424,00)**	**42,34**
	3.1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	1.430.200.976,00	(2.069.799.024,00)	40,86
	3.2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00	59.469.600,00	41.469.600,00	330,39
		TOTAL	**94.877.368.000,00**	**96.559.544.688,00**	**1.682.176.688,00**	**101,77**

Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD)
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Desa	Kecamatan	PAGU	Non Earmark Tahap I	Non Earmark Tahap II	Earmark Tahap I	Earmark Tahap II	Total Penyaluran	%
1	Adian Koting	Adian Koting	828.756.000,00	3.105.000,00	0,00	492.596.100,00	328.397.400,00	824.098.500,00	99,44%
2	Banuaji I	Adian Koting	703.286.000,00	49.152.688,00	0,00	348.242.568,00	232.161.712,00	629.556.968,00	89,52%
3	Banuaji II	Adian Koting	702.452.000,00	37.193.592,00	0,00	365.680.812,00	243.787.208,00	646.661.612,00	92,06%
4	Banuaji IV	Adian Koting	765.122.000,00	13.354.440,00	0,00	439.041.540,00	292.694.360,00	745.090.340,00	97,38%
5	Dolok Nauli	Adian Koting	750.080.000,00	8.503.476,00	0,00	437.292.786,00	291.528.524,00	737.324.786,00	98,30%
6	Pagaran Lambung III	Adian Koting	771.782.000,00	5.729.052,00	0,00	454.475.622,00	302.983.748,00	763.188.422,00	98,89%
7	Pagaran Lambung IV	Adian Koting	803.492.000,00	16.800.240,00	0,00	456.894.840,00	304.596.560,00	778.291.640,00	96,86%
8	Pangaran Lambung I	Adian Koting	695.711.000,00	11.343.800,00	0,00	400.410.900,00	266.940.600,00	678.695.300,00	97,55%
9	Pangaran Lambung II	Adian Koting	804.326.000,00	12.812.400,00	0,00	463.377.000,00	308.918.000,00	785.107.400,00	97,61%
10	Pangaran Pisang	Adian Koting	943.790.000,00	93.678.800,00	0,00	425.755.800,00	283.837.200,00	803.271.800,00	85,11%
11	Pansurbatu	Adian Koting	715.886.000,00	140.770.760,00	0,00	218.375.460,00	145.583.640,00	504.729.860,00	70,50%
12	Pansurbatu I	Adian Koting	580.236.000,00	33.234.280,00	0,00	298.290.180,00	198.860.120,00	530.384.580,00	91,41%
13	Pansurbatu II	Adian Koting	608.193.000,00	34.402.176,00	0,00	313.312.536,00	208.875.024,00	556.589.736,00	91,52%
14	Pardomuan Nauli	Adian Koting	856.584.000,00	12.848.080,00	0,00	494.678.280,00	329.785.520,00	837.311.880,00	97,75%
15	Siantar Naipospos	Adian Koting	977.385.000,00	15.177.400,00	0,00	563.664.900,00	375.776.600,00	954.618.900,00	97,67%
16	Sibalanga	Adian Koting	813.737.000,00	149.652.952,00	0,00	263.762.772,00	175.841.848,00	589.257.572,00	72,41%
17	Aek Tangga	Garoga	925.384.000,00	181.846.000,00	0,00	282.461.400,00	188.307.600,00	652.615.000,00	70,52%
18	Garoga Sibargot	Garoga	959.432.000,00	141.493.840,00	0,00	363.418.440,00	242.278.960,00	747.191.240,00	77,88%
19	Gonting Garoga	Garoga	822.666.000,00	179.271.620,00	268.907.430,00	224.692.170,00	149.794.780,00	822.666.000,00	100,00%
20	Gonting Salak	Garoga	942.103.000,00	220.744.400,00	331.116.600,00	234.145.200,00	156.096.800,00	942.103.000,00	100,00%
21	Lontung Jae I	Garoga	1.100.908.000,00	255.157.400,00	0,00	277.808.700,00	185.205.800,00	718.171.900,00	65,23%
22	Lontung Jae II	Garoga	975.486.000,00	160.444.880,00	0,00	344.624.280,00	229.749.520,00	734.818.680,00	75,33%
23	Padang Siandomang		819.243.000,00	149.515.760,00	0,00	267.272.160,00	178.181.440,00	594.969.360,00	72,62%
24	Parinsoran	Garoga	832.734.000,00	21.245.552,00	0,00	467.772.072,00	311.848.048,00	800.865.672,00	96,17%
25	Parmanuhan	Garoga	843.144.000,00	188.367.900,00	0,00	223.334.550,00	148.889.700,00	560.592.150,00	66,49%
26	Parsosoran	Garoga	857.463.000,00	144.982.800,00	0,00	297.003.600,00	198.002.400,00	639.988.800,00	74,64%
27	Sibaganding	Garoga	805.827.000,00	100.747.140,00	0,00	332.375.490,00	221.583.660,00	654.706.290,00	81,25%
28	Sibalanga	Garoga	899.964.000,00	27.541.600,00	0,00	498.666.000,00	332.444.000,00	858.651.600,00	95,41%
29	Sirmpang Bolon	Garoga	911.562.000,00	63.808.840,00	0,00	451.223.940,00	300.815.960,00	815.848.740,00	89,50%
30	Aritonang	Muara	690.329.000,00	188.609.280,00	0,00	131.283.480,00	87.522.320,00	407.415.080,00	59,02%
31	Batubinumbun	Muara	765.608.000,00	194.643.540,00	0,00	167.399.490,00	111.599.660,00	473.642.690,00	61,86%
32	Dolok Matumbur	Muara	729.602.000,00	198.154.000,00	0,00	140.530.200,00	93.686.800,00	432.371.000,00	59,26%

No.	Nama Desa	Kecamatan	PAGU	Non Earmark Tahap I	Non Earmark Tahap II	Earmark Tahap I	Earmark Tahap II	Total Penyaluran	%
33	Hutaginjang	Muara	816.114.000,00	170.996.000,00	0,00	233.174.400,00	155.449.600,00	559.620.000,00	68,57%
34	Hutalontung	Muara	728.831.000,00	154.452.400,00	0,00	205.620.000,00	137.080.000,00	497.152.400,00	68,21%
35	Hutanagodang	Muara	949.521.000,00	57.605.600,00	0,00	483.304.200,00	322.202.800,00	863.112.600,00	90,90%
36	Mariba Ni Aek	Muara	713.693.000,00	194.957.200,00	0,00	135.780.000,00	90.520.000,00	421.257.200,00	59,02%
37	Papande	Muara	773.510.000,00	172.026.800,00	0,00	206.065.800,00	137.377.200,00	515.469.800,00	66,64%
38	Sampuran	Muara	780.566.000,00	185.669.600,00	0,00	189.835.200,00	126.556.800,00	502.061.600,00	64,32%
39	Sibandang	Muara	755.147.000,00	195.898.800,00	0,00	159.240.000,00	106.160.000,00	461.298.800,00	61,09%
40	Silali Toruan	Muara	737.318.000,00	182.533.576,00	0,00	168.590.436,00	112.393.624,00	463.517.636,00	62,87%
41	Silando	Muara	820.938.000,00	188.423.200,00	0,00	209.928.000,00	139.952.000,00	538.303.200,00	65,57%
42	Simatupang	Muara	727.229.000,00	204.611.600,00	0,00	129.420.000,00	86.280.000,00	420.311.600,00	57,80%
43	Sitanggor	Muara	842.540.000,00	209.862.000,00	0,00	190.731.000,00	127.154.000,00	527.747.000,00	62,64%
44	Unte Mungkur	Muara	749.174.000,00	219.520.400,00	0,00	120.223.800,00	80.149.200,00	419.893.400,00	56,05%
45	Banualuhu	Pagaran	754.605.000,00	27.914.400,00	41.871.600,00	410.891.400,00	273.927.600,00	754.605.000,00	100,00%
46	Doloksaribu	Pagaran	909.056.000,00	228.902.400,00	0,00	202.080.000,00	134.720.000,00	565.702.400,00	62,23%
47	Hasibuan	Pagaran	708.944.000,00	170.057.600,00	0,00	170.280.000,00	113.520.000,00	453.857.600,00	64,02%
48	Lubis	Pagaran	676.004.000,00	15.079.200,00	0,00	382.983.600,00	255.322.400,00	653.385.200,00	96,65%
49	Lumban Ina Ina	Pagaran	777.470.000,00	32.633.600,00	0,00	417.531.600,00	278.354.400,00	728.519.600,00	93,70%
50	Lumban Julu	Pagaran	701.453.000,00	70.826.400,00	0,00	314.632.200,00	209.754.800,00	595.213.400,00	84,85%
51	Lumban Motung	Pagaran	677.204.000,00	162.362.440,00	0,00	162.778.740,00	108.519.160,00	433.660.340,00	64,04%
52	Lumban Silintong	Pagaran	1.064.404.000,00	29.238.800,00	0,00	594.784.200,00	396.522.800,00	1.020.545.800,00	95,88%
53	Pagaran	Pagaran	674.240.000,00	173.936.000,00	0,00	143.640.000,00	95.760.000,00	413.336.000,00	61,30%
54	Parhorboan	Pagaran	813.252.000,00	22.345.600,00	0,00	454.432.800,00	302.955.200,00	779.733.600,00	95,88%
55	Sibaragas	Pagaran	794.469.000,00	214.358.000,00	0,00	155.144.400,00	103.429.600,00	472.932.000,00	59,53%
56	Simamora Hasibuan	Pagaran	816.813.000,00	4.001.800,00	0,00	484.085.100,00	322.723.400,00	810.810.300,00	99,27%
57	Sipultak	Pagaran	789.144.000,00	206.377.600,00	0,00	163.920.000,00	109.280.000,00	479.577.600,00	60,77%
58	Sipultak Dolok	Pagaran	705.839.000,00	175.455.600,00	0,00	160.320.000,00	106.880.000,00	442.655.600,00	62,71%
59	Nahornop Marsada	Pahae Jae	778.746.000,00	9.334.000,00	0,00	453.246.600,00	0,00	462.580.600,00	59,40%
60	Pardamean Nainggolan	Pahae Jae	694.757.000,00	3.735.200,00	0,00	411.251.400,00	274.167.600,00	689.154.200,00	99,19%
61	Pardomuan Nainggolan	Pahae Jae	693.629.000,00	12.460.236,00	0,00	397.487.046,00	264.991.364,00	674.938.646,00	97,31%
62	Parsaoran Nainggolan	Pahae Jae	695.567.000,00	97.150.840,00	0,00	271.613.940,00	181.075.960,00	549.840.740,00	79,05%
63	Parsaoran Samosir	Pahae Jae	653.201.000,00	13.934.000,00	20.901.000,00	371.019.600,00	247.346.400,00	653.201.000,00	100,00%
64	Setia	Pahae Jae	716.060.000,00	18.706.200,00	0,00	401.576.700,00	267.717.800,00	688.000.700,00	96,08%
65	Sigurung-gurung	Pahae Jae	697.550.000,00	12.420.400,00	0,00	399.899.400,00	266.599.600,00	678.919.400,00	97,33%
66	Silangkitang	Pahae Jae	705.788.000,00	13.023.200,00	0,00	403.938.000,00	269.292.000,00	686.253.200,00	97,23%
67	Siopat Bahal	Pahae Jae	697.076.000,00	15.154.120,00	0,00	395.514.420,00	263.676.280,00	674.344.820,00	96,74%
68	Sitoluompu	Pahae Jae	756.161.000,00	124.402.400,00	0,00	267.093.000,00	178.062.000,00	569.557.400,00	75,32%
69	Suka Maju	Pahae Jae	700.604.000,00	21.078.400,00	0,00	388.744.800,00	259.163.200,00	668.986.400,00	95,49%
70	Tordolok Nauli	Pahae Jae	746.912.000,00	24.271.000,00	0,00	411.740.700,00	274.493.800,00	710.505.500,00	95,13%
71	Huta Barat	Pahae Julu	648.311.000,00	14.269.600,00	0,00	367.582.200,00	245.054.800,00	626.906.600,00	96,70%

No.	Nama Desa	Kecamatan	PAGU	Non Earmark Tahap I	Non Earmark Tahap II	Earmark Tahap I	Earmark Tahap II	Total Penyaluran	%
72	Janji Natogu	Pahae Julu	686.990.000,00	5.409.120,00	0,00	404.080.320,00	269.386.880,00	678.876.320,00	98,82%
73	Lobu Pining	Pahae Julu	669.308.000,00	11.771.800,00	0,00	383.927.100,00	255.951.400,00	651.650.300,00	97,36%
74	Lontung Dolok	Pahae Julu	694.271.000,00	6.474.200,00	0,00	406.851.300,00	271.234.200,00	684.559.700,00	98,60%
75	Lumban Dolok	Pahae Julu	711.236.000,00	37.649.560,00	0,00	370.267.260,00	246.844.840,00	654.761.660,00	92,06%
76	Lumban Gaol	Pahae Julu	706.079.000,00	33.487.600,00	0,00	373.416.000,00	248.944.000,00	655.847.600,00	92,89%
77	Lumban Garaga	Pahae Julu	685.427.000,00	5.676.080,00	0,00	402.742.080,00	268.494.720,00	676.912.880,00	98,76%
78	Lumban Jaean	Pahae Julu	690.125.000,00	13.215.840,00	0,00	394.251.240,00	262.834.160,00	670.301.240,00	97,13%
79	Lumban Tonga	Pahae Julu	721.637.000,00	105.359.600,00	0,00	274.942.800,00	183.295.200,00	563.597.600,00	78,10%
80	Pagur Dotan	Pahae Julu	707.825.000,00	32.131.520,00	0,00	376.497.720,00	250.998.480,00	659.627.720,00	93,19%
81	Pantis	Pahae Julu	669.203.000,00	180.225.600,00	270.338.400,00	131.183.400,00	87.455.600,00	669.203.000,00	100,00%
82	Sibaganding	Pahae Julu	667.961.000,00	14.624.884,00	21.937.326,00	378.839.274,00	252.559.516,00	667.961.000,00	100,00%
83	Simanampang	Pahae Julu	715.820.000,00	5.854.840,00	0,00	420.709.740,00	280.473.160,00	707.037.740,00	98,77%
84	Simardangiang	Pahae Julu	767.303.000,00	16.222.800,00	0,00	436.047.600,00	290.698.400,00	742.968.800,00	96,83%
85	Simasom	Pahae Julu	721.754.000,00	10.893.600,00	0,00	416.712.000,00	277.808.000,00	705.413.600,00	97,74%
86	Simasom Toruan	Pahae Julu	698.864.000,00	26.206.000,00	0,00	380.009.400,00	253.339.600,00	659.555.000,00	94,38%
87	Simataniari	Pahae Julu	725.231.000,00	5.704.000,00	0,00	426.582.600,00	284.388.400,00	716.675.000,00	98,82%
88	Sitolu Ama	Pahae Julu	719.951.000,00	36.372.400,00	0,00	377.412.000,00	251.608.000,00	665.392.400,00	92,42%
89	Batu Nadua	Pangaribuan	682.055.000,00	23.673.080,00	0,00	373.723.380,00	249.148.920,00	646.545.380,00	94,79%
90	Batumanumpak	Pangaribuan	867.597.000,00	39.939.896,00	0,00	460.648.356,00	307.098.904,00	807.687.156,00	93,09%
91	Godung Borotan	Pangaribuan	885.977.000,00	28.350.720,00	0,00	489.060.120,00	326.040.080,00	843.450.920,00	95,20%
92	Harianja	Pangaribuan	710.003.000,00	179.906.000,00	0,00	156.142.800,00	104.095.200,00	440.144.000,00	61,99%
93	Hutaraja	Pangaribuan	781.120.000,00	23.804.768,00	0,00	432.964.848,00	288.643.232,00	745.412.848,00	95,43%
94	Lumban Sinaga Simatupang	Pangaribuan	939.518.000,00	62.484.628,00	0,00	469.983.858,00	313.322.572,00	845.791.058,00	90,02%
95	Lumban Siregar	Pangaribuan	723.680.000,00	54.477.800,00	0,00	352.491.300,00	234.994.200,00	641.963.300,00	88,71%
96	Najumambe	Pangaribuan	728.132.000,00	27.482.796,00	0,00	395.655.006,00	263.770.004,00	686.907.806,00	94,34%
97	Padang Parsadaan	Pangaribuan	758.447.000,00	39.019.200,00	0,00	396.539.400,00	264.359.600,00	699.918.200,00	92,28%
98	Pakpahan	Pangaribuan	859.688.000,00	45.984.800,00	0,00	446.835.600,00	297.890.400,00	790.710.800,00	91,98%
99	Pansurnatolu	Pangaribuan	910.215.000,00	39.782.800,00	0,00	486.454.800,00	324.303.200,00	850.540.800,00	93,44%
100	Parlombuan	Pangaribuan	864.678.000,00	34.007.152,00	0,00	467.796.072,00	311.864.048,00	813.667.272,00	94,10%
101	Parratusan	Pangaribuan	948.119.000,00	31.959.200,00	0,00	520.932.600,00	347.288.400,00	900.180.200,00	94,94%
102	Parsibarungan	Pangaribuan	917.924.000,00	30.117.120,00	0,00	505.578.720,00	337.052.480,00	872.748.320,00	95,08%
103	Parsorminan I	Pangaribuan	872.153.000,00	26.851.512,00	0,00	483.014.532,00	322.009.688,00	831.875.732,00	95,38%
104	Purbatua	Pangaribuan	770.456.000,00	33.096.600,00	0,00	412.628.700,00	275.085.800,00	720.811.100,00	93,56%
105	Rahut Bosi	Pangaribuan	981.924.000,00	40.243.836,00	0,00	528.788.646,00	352.525.764,00	921.558.246,00	93,85%
106	Rahut Bosi Onan	Pangaribuan	714.851.000,00	29.524.600,00	0,00	384.623.700,00	256.415.800,00	670.564.100,00	93,80%
107	Sampagul	Pangaribuan	857.481.000,00	26.546.240,00	0,00	474.669.240,00	316.446.160,00	817.661.640,00	95,36%
108	Sibingke	Pangaribuan	710.045.000,00	17.154.000,00	0,00	400.296.000,00	266.864.000,00	684.314.000,00	96,38%
109	Sigotom Dolok Nauli	Pangaribuan	765.598.000,00	27.602.000,00	0,00	417.955.800,00	278.637.200,00	724.195.000,00	94,59%
110	Sigotom Julu	Pangaribuan	1.172.109.000,00	42.625.720,00	0,00	639.326.820,00	426.217.880,00	1.108.170.420,00	94,54%

No.	Nama Desa	Kecamatan	PAGU	Non Earmark Tahap I	Non Earmark Tahap II	Earmark Tahap I	Earmark Tahap II	Total Penyaluran	%
111	Sigotom Timur	Pangaribuan	950.975.000,00	42.959.620,00	0,00	506.145.570,00	337.430.380,00	886.535.570,00	93,22%
112	Silantom Jae	Pangaribuan	799.006.000,00	30.446.400,00	0,00	433.734.000,00	289.156.000,00	753.336.400,00	94,28%
113	Silantom Julu	Pangaribuan	834.002.000,00	8.203.516,00	0,00	488.095.926,00	325.397.284,00	821.696.726,00	98,52%
114	Silantom Tonga	Pangaribuan	689.144.000,00	18.071.180,00	0,00	386.379.630,00	257.586.420,00	662.037.230,00	96,07%
115	Aek Raja	Parmonangan	829.617.000,00	210.726.800,00	0,00	181.680.000,00	121.120.000,00	513.526.800,00	61,90%
116	Batuarimo	Parmonangan	853.018.000,00	231.047.200,00	0,00	165.240.000,00	110.160.000,00	506.447.200,00	59,37%
117	Horisan Ranggitgit	Parmonangan	1.012.897.000,00	141.012.836,00	0,00	396.218.946,00	264.145.964,00	801.377.746,00	79,12%
118	Hutajulu	Parmonangan	737.126.000,00	166.530.400,00	0,00	192.480.000,00	128.320.000,00	487.330.400,00	66,11%
119	Hutajulu Parbalik	Parmonangan	883.421.000,00	242.990.400,00	0,00	165.567.000,00	110.378.000,00	518.935.400,00	58,74%
120	Hutatinggi	Parmonangan	862.605.000,00	215.553.600,00	0,00	194.232.600,00	129.488.400,00	539.274.600,00	62,52%
121	Hutatua	Parmonangan	827.977.000,00	221.590.800,00	0,00	164.400.000,00	109.600.000,00	495.590.800,00	59,86%
122	Lobusunut	Parmonangan	816.020.000,00	220.488.000,00	0,00	158.880.000,00	105.920.000,00	485.288.000,00	59,47%
123	Manalu	Parmonangan	664.514.000,00	172.805.600,00	0,00	139.500.000,00	93.000.000,00	405.305.600,00	60,99%
124	Manalu Dolok	Parmonangan	793.988.000,00	180.315.200,00	0,00	205.920.000,00	137.280.000,00	523.515.200,00	65,93%
125	Manalu Purba	Parmonangan	1.027.594.000,00	292.325.600,00	0,00	178.068.000,00	118.712.000,00	589.105.600,00	57,33%
126	Pertengahan	Parmonangan	956.973.000,00	285.757.200,00	0,00	145.548.000,00	97.032.000,00	528.337.200,00	55,21%
127	Purba Dolok	Parmonangan	901.408.000,00	228.611.200,00	0,00	197.928.000,00	131.952.000,00	558.491.200,00	61,96%
128	Sisordak	Parmonangan	738.080.000,00	20.818.960,00	0,00	411.619.560,00	274.413.040,00	706.851.560,00	95,77%
129	Bonani Dolok	Purba Tua	962.102.000,00	51.851.080,00	0,00	499.484.580,00	332.989.720,00	884.325.380,00	91,92%
130	Hutanagodang	Purba Tua	923.294.000,00	35.448.800,00	0,00	500.803.200,00	333.868.800,00	870.120.800,00	94,24%
131	Janji Nauli	Purba Tua	997.409.000,00	68.248.188,00	0,00	496.073.118,00	330.715.412,00	895.036.718,00	89,74%
132	Pardomuan J. Angkola	Purba Tua	871.091.000,00	26.277.800,00	0,00	483.237.900,00	322.158.600,00	831.674.300,00	95,48%
133	Parsaoran J. Angkola	Purba Tua	723.434.000,00	105.586.800,00	0,00	275.680.200,00	183.786.800,00	565.053.800,00	78,11%
134	Purba Tua	Purba Tua	932.306.000,00	108.933.852,00	0,00	395.982.822,00	263.988.548,00	768.905.222,00	82,47%
135	Robean	Purba Tua	928.643.000,00	27.112.400,00	0,00	516.517.200,00	344.344.800,00	887.974.400,00	95,62%
136	Selamat	Purba Tua	974.057.000,00	22.986.000,00	0,00	549.955.200,00	366.636.800,00	939.578.000,00	96,46%
137	Sibulan Bulan	Purba Tua	930.320.000,00	5.625.040,00	0,00	549.754.440,00	366.502.960,00	921.882.440,00	99,09%
138	Sidua Bahal	Purba Tua	655.854.000,00	138.249.120,00	0,00	186.138.720,00	124.092.480,00	448.480.320,00	68,38%
139	Sitolu Bahal	Purba Tua	933.464.000,00	11.315.876,00	0,00	543.104.586,00	362.069.724,00	916.490.186,00	98,18%
140	Enda Portibi	Siatas Barita	665.066.000,00	25.346.756,00	38.020.134,00	361.019.466,00	240.679.644,00	665.066.000,00	100,00%
141	Lobu Hole	Siatas Barita	797.241.000,00	9.186.520,00	13.779.780,00	464.564.820,00	309.709.880,00	797.241.000,00	100,00%
142	Lumban Siagian Jae	Siatas Barita	673.415.000,00	27.938.400,00	41.907.600,00	362.141.400,00	241.427.600,00	673.415.000,00	100,00%
143	Lumban Siagian Julu	Siatas Barita	651.752.000,00	14.894.000,00	22.341.000,00	368.710.200,00	245.806.800,00	651.752.000,00	100,00%
144	Pansur Napitu	Siatas Barita	804.045.000,00	26.880.400,00	40.320.600,00	442.106.400,00	294.737.600,00	804.045.000,00	100,00%
145	Sangkaran	Siatas Barita	661.958.000,00	64.850.000,00	97.275.000,00	299.899.800,00	199.933.200,00	661.958.000,00	100,00%
146	Sidagal	Siatas Barita	760.427.000,00	2.665.400,00	3.998.100,00	452.258.100,00	301.505.400,00	760.427.000,00	100,00%
147	Simanampang	Siatas Barita	1.003.752.000,00	27.471.104,00	0,00	561.044.544,00	374.029.696,00	962.545.344,00	95,89%
148	Simarakir Julu	Siatas Barita	636.170.000,00	133.364.880,00	200.047.320,00	181.654.680,00	121.103.120,00	636.170.000,00	100,00%
149	Simorangkir Habinsaran	Siatas Barita	690.269.000,00	18.447.440,00	27.671.160,00	386.490.240,00	257.660.160,00	690.269.000,00	100,00%

No.	Nama Desa	Kecamatan	PAGU	Non Earmark Tahap I	Non Earmark Tahap II	Earmark Tahap I	Earmark Tahap II	Total Penyaluran	%
150	Siraja Hutagalung	Siatas Barita	772.473.000,00	15.672.800,00	23.509.200,00	439.974.600,00	293.316.400,00	772.473.000,00	100,00%
151	Sitompul	Siatas Barita	674.771.000,00	139.592.896,00	209.389.344,00	195.473.256,00	130.315.504,00	674.771.000,00	100,00%
152	Bahal Batu I	Siborong-Borong	795.384.000,00	36.011.000,00	0,00	423.213.900,00	282.142.600,00	741.367.500,00	93,21%
153	Bahal Batu II	Siborong-Borong	911.392.000,00	25.299.800,00	0,00	508.885.500,00	339.257.000,00	873.442.300,00	95,84%
154	Bahal Batu III	Siborong-Borong	1.027.621.000,00	46.151.680,00	0,00	547.345.080,00	364.896.720,00	958.393.480,00	93,26%
155	Hutabulu	Siborong-Borong	746.234.000,00	26.496.520,00	0,00	407.995.620,00	271.997.080,00	706.489.220,00	94,67%
156	Lobu Siregar I	Siborong-Borong	867.354.000,00	73.412.400,00	0,00	410.293.800,00	273.529.200,00	757.235.400,00	87,30%
157	Lobu Siregar II	Siborong-Borong	891.612.000,00	31.457.400,00	0,00	487.781.100,00	325.187.400,00	844.425.900,00	94,71%
158	Lumban Tonga Tonga	Siborong-Borong	821.754.000,00	39.210.600,00	0,00	434.236.500,00	289.491.000,00	762.938.100,00	92,84%
159	Paniaran	Siborong-Borong	892.958.000,00	25.102.600,00	0,00	498.120.900,00	332.080.600,00	855.304.100,00	95,78%
160	Parik Sabungan	Siborong-Borong	797.364.000,00	69.411.320,00	0,00	374.301.420,00	249.534.280,00	693.247.020,00	86,94%
161	Pohan Jae	Siborong-Borong	954.831.000,00	52.160.600,00	0,00	494.657.700,00	329.771.800,00	876.590.100,00	91,81%
162	Pohan Julu	Siborong-Borong	866.586.000,00	25.266.640,00	0,00	482.051.640,00	321.367.760,00	828.686.040,00	95,63%
163	Pohan Tonga	Siborong-Borong	924.125.000,00	30.383.120,00	0,00	508.900.320,00	339.266.880,00	878.550.320,00	95,07%
164	Siaro	Siborong-Borong	807.282.000,00	59.442.000,00	0,00	395.206.200,00	263.470.800,00	718.119.000,00	88,96%
165	Siborong Borong I	Siborong-Borong	897.341.000,00	85.532.000,00	0,00	410.106.600,00	273.404.400,00	769.043.000,00	85,70%
166	Siborong Borong II	Siborong-Borong	821.697.000,00	98.038.800,00	0,00	345.960.000,00	230.640.000,00	674.638.800,00	82,10%
167	Sigumbang	Siborong-Borong	818.091.000,00	52.832.320,00	0,00	411.606.120,00	274.404.080,00	738.842.520,00	90,31%
168	Silait-Lait	Siborong-Borong	730.058.000,00	32.302.880,00	0,00	389.580.480,00	259.720.320,00	681.603.680,00	93,36%
169	Sitabotabo	Siborong-Borong	907.646.000,00	31.040.520,00	0,00	498.026.820,00	332.017.880,00	861.085.220,00	94,87%
170	Sitabotabo Toruan	Siborong-Borong	751.880.000,00	15.502.600,00	0,00	427.874.100,00	285.249.400,00	728.626.100,00	96,91%
171	Sitampurung	Siborong-Borong	823.887.000,00	40.234.800,00	0,00	433.980.000,00	289.320.000,00	763.534.800,00	92,67%
172	Aek Nabara	Simangumban	721.082.000,00	28.162.104,00	0,00	390.406.044,00	260.270.696,00	678.838.844,00	94,14%
173	Dolok Sanggul	Simangumban	993.150.000,00	32.247.360,00	0,00	547.518.960,00	365.012.640,00	944.778.960,00	95,13%
174	Dolok Saut	Simangumban	882.753.000,00	43.925.600,00	0,00	463.763.400,00	309.175.600,00	816.864.600,00	92,54%
175	Lobu Sihim	Simangumban	829.174.000,00	67.529.800,00	0,00	396.209.700,00	264.139.800,00	727.879.300,00	87,78%
176	Pardomuan	Simangumban	835.444.000,00	57.276.360,00	0,00	415.351.860,00	276.901.240,00	749.529.460,00	89,72%
177	Silosung	Simangumban	638.556.000,00	28.156.880,00	0,00	340.898.280,00	227.265.520,00	596.320.680,00	93,39%
178	Simangumban Jae	Simangumban	871.176.000,00	21.792.000,00	0,00	490.017.600,00	326.678.400,00	838.488.000,00	96,25%
179	Simangumban Julu	Simangumban	841.074.000,00	26.955.832,00	0,00	464.210.652,00	309.473.768,00	800.640.252,00	95,19%
180	Aek Nauli I	Sipahutar	798.314.000,00	193.010.160,00	0,00	189.473.160,00	126.315.440,00	508.798.760,00	63,73%
181	Aek Nauli II	Sipahutar	713.030.000,00	130.058.400,00	0,00	232.730.400,00	155.153.600,00	517.942.400,00	72,64%
182	Aek Nauli III	Sipahutar	696.575.000,00	168.696.000,00	0,00	164.901.000,00	109.934.000,00	443.531.000,00	63,67%
183	Aek Nauli IV	Sipahutar	893.382.000,00	228.147.420,00	0,00	193.808.070,00	129.205.380,00	551.160.870,00	61,69%
184	Onan Runggu I	Sipahutar	783.564.000,00	185.800.000,00	0,00	191.438.400,00	127.625.600,00	504.864.000,00	64,43%
185	Onan Runggu II	Sipahutar	809.613.000,00	180.035.400,00	0,00	215.714.700,00	143.809.800,00	539.559.900,00	66,64%
186	Onan Runggu III	Sipahutar	835.755.000,00	51.843.048,00	0,00	423.688.428,00	282.458.952,00	757.990.428,00	90,70%
187	Onan Runggu IV	Sipahutar	718.004.000,00	156.809.200,00	0,00	195.588.600,00	130.392.400,00	482.790.200,00	67,24%
188	Sabungannihuta I	Sipahutar	692.822.000,00	184.024.000,00	0,00	139.657.200,00	93.104.800,00	416.786.000,00	60,16%

No.	Nama Desa	Kecamatan	PAGU	Non Earmark Tahap I	Non Earmark Tahap II	Earmark Tahap I	Earmark Tahap II	Total Penyaluran	%
189	Sabungannihuta II	Sipahutar	844.920.000,00	205.754.400,00	0,00	198.320.400,00	132.213.600,00	536.288.400,00	63,47%
190	Sabungannihuta III	Sipahutar	693.062.000,00	45.471.968,00	0,00	347.629.248,00	231.752.832,00	624.854.048,00	90,16%
191	Sabungannihuta IV	Sipahutar	857.237.000,00	225.845.200,00	0,00	175.574.400,00	117.049.600,00	518.469.200,00	60,48%
192	Sabungannihuta V	Sipahutar	844.733.000,00	226.074.280,00	0,00	167.728.380,00	111.818.920,00	505.621.580,00	59,86%
193	Siabal-abal I	Sipahutar	874.239.000,00	230.575.600,00	0,00	178.680.000,00	119.120.000,00	528.375.600,00	60,44%
194	Siabal-abal II	Sipahutar	810.978.000,00	190.739.600,00	0,00	200.477.400,00	133.651.600,00	524.868.600,00	64,72%
195	Siabal-abal III	Sipahutar	855.708.000,00	202.239.160,00	0,00	210.066.060,00	140.044.040,00	552.349.260,00	64,55%
196	Siabal-abal IV	Sipahutar	777.890.000,00	104.077.472,00	0,00	310.617.792,00	207.078.528,00	621.773.792,00	79,93%
197	Siabal-abal V	Sipahutar	707.279.000,00	39.725.152,00	0,00	364.779.672,00	243.186.448,00	647.691.272,00	91,58%
198	Siabal-abal VI	Sipahutar	749.975.000,00	22.685.200,00	0,00	415.957.200,00	277.304.800,00	715.947.200,00	95,46%
199	Sipahutar I	Sipahutar	685.103.000,00	163.164.400,00	0,00	166.315.200,00	110.876.800,00	440.356.400,00	64,28%
200	Sipahutar II	Sipahutar	705.323.000,00	18.008.852,00	0,00	396.180.522,00	264.120.348,00	678.309.722,00	96,17%
201	Sipahutar III	Sipahutar	736.607.000,00	185.393.600,00	0,00	163.873.800,00	109.249.200,00	458.516.600,00	62,25%
202	Tapian Nauli I	Sipahutar	794.036.000,00	207.406.800,00	311.110.200,00	165.311.400,00	110.207.600,00	794.036.000,00	100,00%
203	Tapian Nauli II	Sipahutar	829.934.000,00	180.476.800,00	0,00	227.245.200,00	151.496.800,00	559.218.800,00	67,38%
204	Tapian Nauli III	Sipahutar	818.462.000,00	173.964.796,00	0,00	230.130.006,00	153.420.004,00	557.514.806,00	68,12%
205	Huta Raja	Sipoholon	976.548.000,00	37.731.200,00	0,00	529.332.000,00	352.888.000,00	919.951.200,00	94,20%
206	Hutaraja Hasundutan	Sipoholon	771.350.000,00	9.774.680,00	0,00	448.147.980,00	298.765.320,00	756.687.980,00	98,10%
207	Hutaraja Simanungkalit	Sipoholon	667.604.000,00	168.993.200,00	0,00	147.072.600,00	98.048.400,00	414.114.200,00	62,03%
208	Hutauruk	Sipoholon	856.652.000,00	62.483.600,00	0,00	420.265.800,00	280.177.200,00	762.926.600,00	89,06%
209	Hutauruk Hasundutan	Sipoholon	957.258.000,00	184.493.360,00	0,00	297.614.760,00	198.409.840,00	680.517.960,00	71,09%
210	Lobu Singkam	Sipoholon	1.090.923.000,00	12.406.300,00	0,00	635.944.350,00	423.962.900,00	1.072.313.550,00	98,29%
211	Pagarbatu	Sipoholon	1.042.715.000,00	32.590.800,00	0,00	576.742.800,00	384.495.200,00	993.828.800,00	95,31%
212	Rura Julu Dolok	Sipoholon	682.668.000,00	34.801.960,00	0,00	357.397.860,00	238.265.240,00	630.465.060,00	92,35%
213	Rura Julu Toruan	Sipoholon	706.701.000,00	191.584.000,00	0,00	136.644.600,00	91.096.400,00	419.325.000,00	59,34%
214	Simanungkalit	Sipoholon	975.096.000,00	119.941.520,00	179.912.280,00	405.145.320,00	270.096.880,00	975.096.000,00	100,00%
215	Sipahutar	Sipoholon	676.736.000,00	83.031.520,00	0,00	281.494.320,00	187.662.880,00	552.188.720,00	81,60%
216	Situmeang Hasundutan	Sipoholon	810.345.000,00	35.758.540,00	0,00	432.569.190,00	288.379.460,00	756.707.190,00	93,38%
217	Tapian Nauli	Sipoholon	921.932.000,00	142.926.800,00	0,00	338.769.000,00	225.846.000,00	707.541.800,00	76,75%
218	Aek Siansimun	Tarutung	677.855.000,00	146.743.200,00	220.114.800,00	186.598.200,00	124.398.800,00	677.855.000,00	100,00%
219	Hapoltahan	Tarutung	881.939.000,00	100.560.320,00	0,00	378.322.920,00	252.215.280,00	731.098.520,00	82,90%
220	Htgalung Siwaluompo	Tarutung	788.967.000,00	144.981.200,00	0,00	255.908.400,00	170.605.600,00	571.495.200,00	72,44%
221	Hutapea Banuarea	Tarutung	906.329.000,00	199.200.800,00	298.801.200,00	244.996.200,00	163.330.800,00	906.329.000,00	100,00%
222	Hutatoruan I	Tarutung	963.246.000,00	198.301.200,00	0,00	280.495.800,00	186.997.200,00	665.794.200,00	69,12%
223	Hutatoruan III	Tarutung	597.930.000,00	135.253.400,00	0,00	155.877.900,00	103.918.600,00	395.049.900,00	66,07%
224	Hutatoruan IV	Tarutung	871.979.000,00	123.406.040,00	185.109.060,00	338.078.340,00	225.385.560,00	871.979.000,00	100,00%
225	Hutatoruan VIII	Tarutung	906.233.000,00	40.114.800,00	60.172.200,00	483.567.600,00	322.378.400,00	906.233.000,00	100,00%
226	Hutauruk	Tarutung	665.318.000,00	151.022.400,00	226.533.600,00	172.657.200,00	115.104.800,00	665.318.000,00	100,00%
227	Jambur Nauli	Tarutung	728.354.000,00	160.939.600,00	241.409.400,00	195.603.000,00	130.402.000,00	728.354.000,00	100,00%

No.	Nama Desa	Kecamatan	PAGU	Non Earmark Tahap I	Non Earmark Tahap II	Earmark Tahap I	Earmark Tahap II	Total Penyaluran	%
228	Parbaju Julu	Tarutung	675.902.000,00	132.813.400,00	0,00	206.321.100,00	137.547.400,00	476.681.900,00	70,53%
229	Parbaju Tonga	Tarutung	657.632.000,00	62.668.400,00	0,00	300.576.600,00	200.384.400,00	563.629.400,00	85,71%
230	Parbaju Toruan	Tarutung	698.939.000,00	163.334.680,00	0,00	174.361.380,00	116.240.920,00	453.936.980,00	64,95%
231	Parbubu Dolok	Tarutung	905.870.000,00	84.228.628,00	126.342.942,00	417.179.058,00	278.119.372,00	905.870.000,00	100,00%
232	Parbubu I	Tarutung	889.130.000,00	161.583.200,00	0,00	291.103.200,00	194.068.800,00	646.755.200,00	72,74%
233	Parbubu II	Tarutung	627.455.000,00	116.833.612,00	175.250.418,00	201.222.582,00	134.148.388,00	627.455.000,00	100,00%
234	Parbubu Pea	Tarutung	862.520.000,00	221.032.240,00	331.548.360,00	185.963.640,00	123.975.760,00	862.520.000,00	100,00%
235	Partali Julu	Tarutung	692.384.000,00	89.720.000,00	0,00	280.850.400,00	187.233.600,00	557.804.000,00	80,56%
236	Siandor-andor	Tarutung	669.377.000,00	161.390.000,00	0,00	159.541.200,00	106.360.800,00	427.292.000,00	63,83%
237	Sihujur	Tarutung	931.697.000,00	23.560.800,00	0,00	523.677.000,00	349.118.000,00	896.355.800,00	96,21%
238	Simamora	Tarutung	963.729.000,00	151.633.360,00	0,00	350.787.360,00	233.858.240,00	736.278.960,00	76,40%
239	Siraja Oloan	Tarutung	702.335.000,00	113.289.600,00	0,00	251.466.600,00	167.644.400,00	532.400.600,00	75,80%
240	Sitampurung	Tarutung	910.565.000,00	173.198.400,00	0,00	286.541.400,00	191.027.600,00	650.767.400,00	71,47%
241	Sosunggulon	Tarutung	690.623.000,00	156.581.932,00	234.872.898,00	179.500.902,00	119.667.268,00	690.623.000,00	100,00%
TOTAL			**193.023.433.000,00**	**22.024.705.012,00**	**4.264.508.952,00**	**82.777.002.282,00**	**54.882.503.788,00**	**163.948.720.034,00**	**84,94%**

Lampiran 3

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DAFTAR REALISASI ANGGARAN DANA HIBAH
TAHUN ANGARAN 2025

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	REALISASI
1	07/02/2025	12.02/04.0/000007/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/P1/2/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah siap Membangun kepada Panitia Natal dan Syukuran Tahun Baru Tornado's Club Tahun 2024.	20.000.000,00
2	13/02/2025	12.02/04.0/000010/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/P1/2/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan GKPI Sampinur Desa Horisan Ranggitgit Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.	100.000.000,00
3	18/02/2025	12.02/04.0/000014/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/P1/2/2025	Pembayaran Bantuan Dana HIbah kepada Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu-Gedung Serbaguna HKBP Peanajagar Resort Peanajagar Kabupaten Tapanuli Utara.	120.000.000,00
4	18/02/2025	12.02/04.0/000015/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/P1/2/2025	Pembayaran Bantuan Dana HIbah Kepada Panitia Pembangunan Gedung GKPI Tarutung Kota Kabupaten Tapanuli Utara.	150.000.000,00
5	19/05/2025	12.02/04.0/000019/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/P4/5/2025	Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (PDI PERJUANGAN) Kab.Tap.Utara untuk Triwulan I (Pertama) Tahun Anggaran 2025	68.375.431,00
6	12/06/2025	12.02/04.0/000044/LS/2.16.2.20.2.21.01.00 00/P5/6/2025	Pembayaran belanja Hibah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2025 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 21 Mei 2025	50.000.000,00
7	13/06/2025	12.02/04.0/000035/LS/2.14.2.08.0.00.01.00 00/P5/6/2025	Pembayaran Belanja Hibah Kepada Badan Lembaga Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kepada Bhayangkari Tapanuli Utara Tahun 2025	50.000.000,00
8	15/07/2025	12.02/04.0/000028/LS/2.19.0.00.0.00.01.00 00/P5/7/2025	Pembayaran Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Utara tahap I tahun 2025	100.000.000,00
9	15/07/2025	12.02/04.0/000027/LS/2.19.0.00.0.00.01.00 00/P5/7/2025	Pembayaran Dana Hibah National Paralympic (NPC) Kabupaten Tapanuli Utara Tahap I tahun 2025	25.000.000,00
10	15/07/2025	12.02/04.0/000033/LS/2.13.0.00.0.00.01.00 00/P5/7/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) Kabupaten Tapanuli Utara	25.000.000,00
11	18/07/2025	12.02/04.0/000054/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/P5/7/2025	PEMBAYARAN DANA HIBAH DEWAN KESENIAN DAERAH TAPANULI UTARA TAHUN 2025	40.000.000,00
12	25/07/2025	12.02/04.0/000029/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/P5/7/2025	Pembayaran Dana Hibah Bantuan Keuangan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Triwulan II (Kedua) April s/d Juni Tahun 2025	68.375.431,00
13	30/07/2025	12.02/04.0/000032/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/P5/7/2025	Pembayar Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Partai NASDEM Kab.Tapanuli Utara	57.098.603,00
14	30/07/2025	12.02/04.0/000030/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/P5/7/2025	Pembayar Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik Partai Demokrat Kabupaten Tapanuli utara Tahap I (Pertama) Januari s/d Juni T.A.2025	32.770.626,00
15	30/07/2025	12.02/04.0/000031/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/P5/7/2025	Pembayar biaya Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai GERINDRA Kap. Tapanuli Utara untuk 1 (satu) Tahun (Januari s/d Desember 2025)	51.368.966,00
16	26/08/2025	12.02/04.0/000043/LS/2.17.3.30.3.31.03.00 00/P5/8/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	300.000.000,00
17	26/08/2025	12.02/04.0/000115/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/P5/8/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Rumah Dinas Guru Jemaat dan Menara Gereja HKBP Banuarea Ressort Banuarea Kabupaten Tapanuli Utara.	75.000.000,00
18	04/09/2025	12.02/04.0/000071/LS/3.27.0.00.0.00.01.00 00/P5/9/2025	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga KTNA TA 2025	15.000.000,00
19	09/09/2025	12.02/04.0/000122/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/P5/9/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik ST. Mateus Siborongborong II Kabuapten Tapanuli Utara.	40.000.000,00
20	12/09/2025	12.02/04.0/000042/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/P5/9/2025	Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai GOLKAR Kab.Tap.Utara untuk Tahap I (Pertama) Januari s/d Juni Tahun 2025	73.524.305,00
21	12/09/2025	12.02/04.0/000043/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/P5/9/2025	Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (PDI PERJUANGAN) Kab.Tap.Utara untuk Triiwulan III (Ketiga) Juli-September Tahun 2025	68.375.431,00
22	23/09/2025	12.02/04.0/000044/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/PR/9/2025	Pembayaran belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (Partai PERINDO) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahap I (Pertama) Januari s/d Juni Tahun 2025	73.613.439,00
23	09/10/2025		Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	10.000.000,00
24	09/10/2025	12.02/04.0/000054/LS/1.06.0.00.0.00.01.00 00/PR/10/2025	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Untuk Pemberdayaan PKH	15.000.000,00
25	10/10/2025	12.02/04.0/000086/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/10/2025	PEMBAYARAN DANA HIBAH DEWAN KESENIAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025	400.000.000,00
26	21/10/2025	12.02/04.0/000043/LS/2.19.0.00.0.00.01.00 00/PR/10/2025	Pembayaran Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Kabupaten Tapanuli Uatara Tahap II Tahun 2025	50.000.000,00
27	21/10/2025	12.02/04.0/000044/LS/2.19.0.00.0.00.01.00 00/PR/10/2025	Pembayaran Dana Hibah Operasional National Paealympic Committee(NPC) Kabupaten tapanuli utara Tahap II Tahun 2025	25.000.000,00
28	30/10/2025	12.02/04.0/000165/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/10/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan HKBP Pardomuan Silangkitang Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
29	11/11/2025	12.02/04.0/000093/LS/2.16.2.20.2.21.01.00 00/PPR1/11/2025	Pembayaran belanja Hibah kepada Direktorat Bimmas Polda Sumut Tahun 2025 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 20 Oktober 2025	30.000.000,00
30	19/11/2025	12.02/04.0/000054/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/PPR1/11/2025	Pembayar Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (PDI PERJUANGAN) Kab.Tap.Utara untuk Triwulan IV (Keempat) Oktober s/d Desember 2025	68.375.432,00

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	REALISASI
31	28/11/2025	12.02/04.0/000128/LS/3.27.0.00.0.00.01.00 00/PPR1/11/2025	Pembayaran LS Penerima Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara TA 2025	15.000.000,00
32	05/12/2025	12.02/04.0/000056/LS/2.19.0.00.0.00.01.00 00/PPR3/12/2025	Pembayaran Hibah KONI Tahap III Tahun 2025	500.000.000,00
33	10/12/2025	12.02/04.0/000061/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Golkar Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahap II (kedua) Juli s/d Desember 2025	73.524.306,00
34	16/12/2025	12.02/04.0/000094/LS/2.14.2.08.0.00.01.00 00/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kepada Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLIII Kodim 0210 Koorcab Rem 023 PD I/ Bukit Barisan	50.000.000,00
35	19/12/2025	12.02/04.0/000064/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Hibah untuk mendukung sarana dan prasarana Penegakan Hukum terhadap Peredaran Gelap Narkotika dan Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkotika di Kabupaten Tapanuli Utara	100.000.000,00
36	22/12/2025	12.02/04.0/000067/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/PPR4/12/2025	Pembayar Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (Partai DEMOKRAT) Kab.Tapanuli Utara untuk Tahap II (Kedua) Juli s/d Desember 2025 Tahun Anggaran 2025	32.770.627,00
37	22/12/2025	12.02/04.0/000066/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai NASDEM Kab. Tapanuli Utara untuk Tahap II (Kedua) Juli s/d Desember 2025	57.098.604,00
38	22/12/2025	12.02/04.0/000065/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/PPR4/12/2025	Pembayar biaya Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai PERINDO) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahap II (Kedua) Juli s/d Desember 2025	73.613.439,00
39	22/12/2025	12.02/04.0/000068/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/PPR4/12/2025	Pembayar Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (Partai Hanura) Kabupaten Tapanuli Utara untuk 1 (satu) Tahun 2025	66.042.631,00
40	23/12/2025	12.02/04.0/000262/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembenahan HKBP Palmarum Ressort Palmarum Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.	35.000.000,00
41	23/12/2025	12.02/04.0/000069/LS/8.01.0.00.0.00.02.00 00/PPR4/12/2025	Pembayar Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tapanuli Utara satu Tahap (Januari s/d Desember) Tahun 2025	94.041.809,00
42	29/12/2025	12.02/04.0/000153/LS/3.27.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Biaya Pembayaran Penerima Serikat Tani Tapanuli Utara (ST-Taput) TA 2025	10.000.000,00
43	30/12/2025	12.02/04.0/000115/LS/2.14.2.08.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Sosiaslisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tapanuli Utara	25.000.000,00
44	30/12/2025	12.02/04.0/000275/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
45	30/12/2025	12.02/04.0/000276/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan HKBP Bahalimbalo Ressort Pohan Kabupaten Tapanuli Utara	20.000.000,00
46	30/12/2025	12.02/04.0/000278/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Untuk Kesejahteraan Guru Sekolah Minggu, Guru Mengaji dan Guru Sekolah Budha Kabupaten Tapanuli Utara.	769.000.000,00
47	31/12/2025	12.02/04.0/000282/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana HIbah Kepada Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Gereja HKBP Lobu Sunut Ressort Hutatinggi Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
48	31/12/2025	12.02/04.0/000284/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik ST. Maria Ratu Rosario Parinsoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
49	31/12/2025	12.02/04.0/000280/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan GKPI Jemaat Gonting Bahan Batu II Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
50	31/12/2025	12.02/04.0/000283/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana HIbah Kepada Panitia Pembangunan GKPI Jemaat Simasom Ressort Simorangkir Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
51	31/12/2025	12.02/04.0/000281/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja GEPKIN Purbatua Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
52	31/12/2025	12.02/04.0/000305/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan HKBP Parbaju Ressort Hutabarat Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
53	31/12/2025	12.02/04.0/000298/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja HKI Rihitbidang Ressort Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara.	30.000.000,00
54	31/12/2025	12.02/04.0/000293/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	70.000.000,00
55	31/12/2025	12.02/04.0/000296/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah kepada Pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara.	15.000.000,00
56	31/12/2025	12.02/04.0/000300/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan HKBP Lobugala Ressort Lontung Desa Pansurnatolu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
57	31/12/2025	12.02/04.0/000303/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Pengurus Gereja HKI Lumbanlobu Ressort Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara	20.000.000,00
58	31/12/2025	12.02/04.0/000291/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat El Shaddai Natumingka Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.	30.000.000,00
59	31/12/2025	12.02/04.0/000292/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah kepada Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Tapanuli Utara.	10.000.000,00
60	31/12/2025	12.02/04.0/000294/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
61	31/12/2025	12.02/04.0/000299/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan HKBP Batu Nadua Ressort Gultom Kecamatan Pangaribuan.	20.000.000,00
62	31/12/2025	12.02/04.0/000302/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan HKBP Simanungkalit Resort Sipoholon I - Distrik II Silindung.	30.000.000,00
63	31/12/2025	12.02/04.0/000306/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja HKBP Dame Janjiangkola Ressort Janjiangkola Kabupaten tapanuli Utara.	20.000.000,00
64	31/12/2025	12.02/04.0/000295/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana HIbah kepada Badan Kerjasama Umat Kristiani Badan Kerjasama Anatar Gereja Tapanuli Utara.	15.000.000,00
65	31/12/2025	12.02/04.0/000304/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Raya Peanornor Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	REALISASI
66	31/12/2025	12.02/04.0/000325/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran bantuan dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia Sidang Hutagurgur Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
67	31/12/2025	12.02/04.0/000312/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja HKBP Sitompul Ressort Simorangkir Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
68	31/12/2025	12.02/04.0/000326/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Sipultak Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
69	31/12/2025	12.02/04.0/000309/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Badan Kemakmuran Masjid At Taubah Sibulan Bulan Kecamatan Purbatua.	30.000.000,00
70	31/12/2025	12.02/04.0/000308/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja GPI Agape Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara	20.000.000,00
71	31/12/2025	12.02/04.0/000324/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan HKBP Simaninggir Ressort Lontung Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
72	31/12/2025	12.02/04.0/000311/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu dan Konsistori GKPI Jemaat Khusus Sitompul Sangkaran Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
73	31/12/2025	12.02/04.0/000310/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Pengurus Harian Jemaat (PHJ) Jemaat GKPI Gideon Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
74	31/12/2025	12.02/04.0/000332/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Pengurus Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ekklesia Desa Lumban Ina Ina Kec. Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
75	31/12/2025	12.02/04.0/000334/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan HKBP Dolok Nauli Ressort Hutabarat Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
76	31/12/2025	12.02/04.0/000321/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pesta Jubileum 125 Tahun HKBP Parsorminan Ressort Pangaribuan Tonga Kecamatan Pangaribuan.	20.000.000,00
77	31/12/2025	12.02/04.0/000323/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan GKPI Jemaat Parbaju-Ressort Hutabarat Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
78	31/12/2025	12.02/04.0/000318/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah kepada Panitia Pembangunan Gereja Bethel Indonesia R.O.C.K Siborongborong Kecamatan Siborongborong	20.000.000,00
79	31/12/2025	12.02/04.0/000339/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana HIbah kepada Panitia Pembangunan Gereja Tuhan di Indonesia "GTDI" Jemaat Parhorboan Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
80	31/12/2025	12.02/04.0/000333/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah kepada Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
81	31/12/2025	12.02/04.0/000328/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara.	40.000.000,00
82	31/12/2025	12.02/04.0/000320/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kabuapten Tapanuli Utara	20.000.000,00
83	31/12/2025	12.02/04.0/000319/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.	100.000.000,00
84	31/12/2025	12.02/04.0/000307/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pemabayaran Bantuan Dana Hibah Kepada Pembangunan Gereja HKBP Sisordak Ressort Simamora Kecamatan Permonangan Kabupaten Tapanuli Utara.	20.000.000,00
85	31/12/2025	12.02/04.0/000322/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan GKPI Hutaraja Ressort Sipoholon II Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.	100.000.000,00
86	31/12/2025	-	REALISASI BELANJA BOS TINGKAT SD SWASTA	2.533.700.000,00
87	31/12/2025	-	REALISASI BELANJA BOS SWASTA TINGKAT SMP TAHUN 2025	2.394.550.000,00
88	31/12/2025	-	REALISASI BELANJA BOP PAUD TAHUN 2025	4.196.567.550,00
89	31/12/2025	-	REALISASI BELANJA BOP KESETARAAN TAHUN 2025	809.245.500,00
			TOTAL	**15.127.032.130,00**

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DAFTAR REALISASI ANGGARAN DANA BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGARAN 2025

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	REALISASI
1	27/02/2025	12.02/04.0/000016/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Musyawarah dan Syukuran Bona Taon Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Tapanuli Utara.	30.000.000
2	08/05/2025	12.02/06.0/000101/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Gempa di Desa Hutabarat Kec.Pahae Julu pada tanggal 19 Maret 2025	4.000.000
3	08/05/2025	12.02/06.0/000105/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Hutagalung Siwaluompu Kec.Tarutung pada tanggal 17 Januari 2025	800.000
4	08/05/2025	12.02/06.0/000109/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran Biaya belanja Bantuan Sosial Barang bagi korban Bencana Tanah Longsor di Dusun Julu Huta Guntam desa Selamat Kecamatan Purba Tua pada tanggal 30 April 2025	200.000
5	08/05/2025	12.02/06.0/000110/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran Biaya belanja Bantuan Sosial Barang bagi korban Bencana Kebakaran di Desa Bahal batu III Kec.Siborongborong pada tanggal 17 Januari 2025	200.000
6	08/05/2025	12.02/06.0/000102/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Bahal Batu II Kec.Siborongborong pada Tanggal 6 Maret 2025	200.000
7	08/05/2025	12.02/06.0/000107/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran biaya belanja Bantuan sosial bagi korban Bencana Alam Pohon Tumbang di Dusun III Tanobato Desa Siopat bahal Kecamatan Pahae Jae pada tanggl 11 April 2025	400.000
8	08/05/2025	12.02/06.0/000106/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi korban Bencana yang disebabkan oleh Hujan Deras dan Angin Kencang di Desa Pansur Napitu, serta tumbangnya Pohon besar akibat hujan deras yang menimpa salah satu rumah di desa lumban siagian julu Kecamatan siatas barita pada tanggal 30 April 2025	400.000
9	08/05/2025	12.02/06.0/000108/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial barang bagi korban musibah Kebakaran di desa Parsaoran Janji Angkola Kec.Purba Tua pada tanggal 8 April 2025	200.000
10	08/05/2025	12.02/06.0/000103/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Lumban Ina-ina Kec.Pagaran pada tanggal 31 Januari 2025	400.000
11	08/05/2025	12.02/06.0/000104/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Lumban Silintong Kec.Pagaran pada tanggal 11 Februari 2025	200.000
12	04/06/2025	12.02/04.0/000057/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke arah siap Membangun kepada Panitia Qurban Persatuan Kaum Musilimin (PKM) Tarutung Sekitarnya Tahun 2025/1446 H.	30.000.000
13	10/06/2025	12.02/04.0/000056/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Dewan Pimpinan Cabang Gerekan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tapanuli Utara.	10.000.000
14	25/06/2025	12.02/06.0/000209/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Biaya Bantuan Sosial Pembelian Alat Bantu Kursi Roda Tahun 2025 an.Senteria Tampubolon yang merupakan lansia warga Desa Lumban siagian Jae Kec.Siatas Barita	2.000.000
15	25/06/2025	12.02/06.0/000208/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Biaya Bantuan Sosial Pembelian Alat Bantu Kursi Roda Tahun 2025 an.Muti Panggabean yang merupakan lansia warga Desa Lumban siagian Jae Kec.Siatas Barita	2.000.000
16	25/06/2025	12.02/06.0/000213/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang rencanakan kepada individu dalam kegiatan bimbingan Fisik,Mental, Sosial dan Spiritual tanggal 28 Mei 2025 kepada Pengusaha Toko SP.Tobing an.Pelita Tobing	900.000
17	25/06/2025	12.02/06.0/000210/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Biaya Bantuan Sosial Pembelian Alat Bantu Kursi Roda Tahun 2025 an.Hotman Panggabean yang merupakan lansia warga Desa Lumban siagian Jae Kec.Siatas Barita	2.000.000
18	25/06/2025	12.02/06.0/000217/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang rencanakan kepada individu dalam kegiatan bimbingan Fisik,Mental, Sosial dan Spiritual tanggal 10 Juni 2025 kepada Pengusaha Toko SP.Tobing an.Pelita Tobing	900.000
19	25/06/2025	12.02/06.0/000215/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang rencanakan kepada individu dalam kegiatan bimbingan Fisik,Mental, Sosial dan Spiritual tanggal 16 Mei 2025 kepada Pengusaha Toko SP.Tobing an.Pelita Tobing	300.000
20	25/06/2025	12.02/06.0/000218/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang rencanakan kepada individu dalam kegiatan bimbingan Fisik,Mental, Sosial dan Spiritual tanggal 12 Juni 2025 kepada Pengusaha Toko SP.Tobing an.Pelita Tobing	900.000
21	25/06/2025	12.02/06.0/000214/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang rencanakan kepada individu dalam kegiatan bimbingan Fisik,Mental, Sosial dan Spiritual tanggal 5 Juni 2025 kepada Pengusaha Toko SP.Tobing an.Pelita Tobing	900.000
22	25/06/2025	12.02/06.0/000212/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang rencanakan kepada individu dalam kegiatan bimbingan Fisik,Mental, Sosial dan Spiritual tanggal 26 Mei 2025 kepada Pengusaha Toko SP.Tobing an.Pelita Tobing	900.000
23	25/06/2025	12.02/06.0/000216/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang rencanakan kepada individu dalam kegiatan bimbingan Fisik,Mental, Sosial dan Spiritual tanggal 11 Juni 2025 kepada Pengusaha Toko SP.Tobing an.Pelita Tobing	1.200.000

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	REALISASI
24	25/06/2025	12.02/06.0/000211/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Biaya Bantuan Sosial Pembelian Alat Bantu Kursi Roda Tahun 2025 an.Albertus Tambunan yang merupakan lansia warga Desa Lumban siagian Jae Kec.Siatas Barita	2.000.000
25	30/06/2025	12.02/04.0/000071/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun Kepada Penitia Jambore PPr HKI Daerah II Silindung-Pangaribuan Tahun 2025.	10.000.000
26	08/07/2025	12.02/06.0/000261/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Soisal Barang yang direncanakan kepada Individu dalam kegiatan Penyediaan Permakanan tanggal 20 Juni 2025 kepada Peng.UD.SP.Tobing an.Pelita Manalu	800.000
27	09/07/2025	12.02/06.0/000262/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Soisal Barang yang direncanakan kepada Individu dalam kegiatan Penyediaan Permakanan tanggal 25 Juni 2025 kepada Peng.UD.SP.Tobing an.Pelita Manalu	700.000
28	11/07/2025	12.02/04.0/000037/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang bagi Korban Kebakaran di Tapanuli Utara Tahun 2024 yang kegiatannya di tampung di Tahun Anggaran 2025	172.862.700
29	17/07/2025	12.02/06.0/000269/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Pasar Muara Kecamatan Muara Pada tanggal 27 Maret 2025	1.000.000
30	17/07/2025	12.02/06.0/000268/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Putting beliung di Desa Hutapea Banuarea,Siraja Oloan,Simamora,Hutauruk ,Hutagalung Siualuompu,Hutatoruan IV dan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung pada tanggal 23 April 2025	7.200.000
31	24/07/2025	12.02/04.0/000086/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun Kepada Panitia Jetun Games VI HKBP Tahun 2025.	50.000.000
32	25/07/2025	12.02/04.0/000087/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun Kepada Pengurus Nasyid Masjid Ar Rahmah Dusun Pangorian Desa Parinsoran Kecamatan Garoga.	15.000.000
33	28/07/2025	12.02/06.0/000507/UP/1.04.2.10.1.03.01.0000/P5/7/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan Kepada Individu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Taput	34.800.000
34	01/08/2025	12.02/06.0/000371/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025	Pembayaran biaya belanja Bantuan Sosial barang yang direncakanan kepada individu (penyediaan Sandang) bagi masyarakat Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar kepada tanggal 28 Juli 2025	900.000
35	01/08/2025	12.02/06.0/000370/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025	Pembayaran biaya belanja Bantuan Sosial barang yang direncakanan kepada individu (penyediaan Sandang) bagi masyarakat Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar kepada tanggal 22 Juli 2025	900.000
36	01/08/2025	12.02/06.0/000372/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025	Pembayaran biaya belanja Bantuan Sosial barang yang direncakanan kepada individu (penyediaan Sandang) bagi masyarakat Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar kepada tanggal 14 Juli 2025	1.200.000
37	01/08/2025	12.02/06.0/000373/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu (Pemberian Sembako) bagi masyarakat Kecamatan Purbatua tanggal 11 Juni 2025	1.800.000
38	01/08/2025	12.02/06.0/000374/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu (Pemberian Sembako) bagi masyarakat Kecamatan Purbatua tanggal 14 Juni 2026	1.800.000
40	01/08/2025	12.02/06.0/000376/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu (Pemberian Sembako) bagi masyarakat Kecamatan Purbatua tanggal 20 Juni 2028	1.500.000
42	01/08/2025	12.02/06.0/000375/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu (Pemberian Sembako) bagi masyarakat Kecamatan Purbatua tanggal 17 Juni 2027	900.000
44	12/09/2025	12.02/04.0/000129/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Pesta Olob-olob GKPS Resort Tarutung ke - 122 Tahun 2025.	10.000.000
46	03/10/2025	12.02/04.0/000137/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Pesta Peresmian GKPI Muara Resort Muara Wilayah VII Kecamatan Muara.	10.000.000
47	21/10/2025	12.02/04.0/000149/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Pelaksana Gerwasib Batak Song Trio Fest, Lomba Lari Sptint, Tarik Tambang dan Lari Karung Dalam Rangka Memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara ke- 80 Tahun.	50.000.000
48	21/10/2025	12.02/04.0/000150/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah siap Membangun kepada Panitia Pelaksana Tapanuli Utara Championship Series 2025 Dalam Rangka Memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara ke- 80 Tahun.	50.000.000
49	17/11/2025	12.02/04.0/000181/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat Ke Arah Siap Membangun Kepada Panitia Pesta Parheheon Parompuan HKBP Resort Pansurnapitu Distrik II Silindung Tahun 2025.	7.000.000
50	21/11/2025	12.02/06.0/000606/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu dalam Kegiatan Penyediaan Sandang kepada Pengusaha UD.Mitra An.Deborah Lumbantobing	9.900.000
51	27/11/2025	12.02/04.0/000200/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah siap Membangun Kepada Panitia Pesta Perheheon Naposobulung Distrik II Silindung Tahun 2025.	5.000.000
52	28/11/2025	12.02/06.0/000663/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu dalam Kegiatan Penyediaan Sandang kepada Pengusaha UD.Mitra An.Deborah Lumbantobing	8.100.000
53	02/12/2025	12.02/04.0/000207/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah siap Membangun kepada Tim Paduan Suara Mahasiswa (PSM) IAKN Tarutung.	5.000.000
54	02/12/2025	12.02/04.0/000216/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun Kepada RAKERNAS Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN)	50.000.000
55	03/12/2025	12.02/06.0/000009/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu dalam Kegiatan Penyediaan Permakanan kepada Pengusaha UD.SP.Tobing an. Pelita Manalu tanggal 12 Nopember 2025	15.000.000
56	03/12/2025	12.02/06.0/000011/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu dalam Kegiatan Penyediaan Permakanan kepada Pengusaha UD.SP.Tobing an. Pelita Manalu tanggal 18 Nopember 2027	5.000.000,00
57	03/12/2025	12.02/06.0/000008/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu dalam Kegiatan Penyediaan Permakanan kepada Pengusaha UD.SP.Tobing an. Pelita Manalu tanggal 27 Oktober 2025	10.000.000,00

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	REALISASI
58	03/12/2025	12.02/06.0/000007/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu dalam Kegiatan Penyediaan Permakanan kepada Pengusaha UD.SP.Tobing an. Pelita Manalu tanggal 19 Nopember 2025	10.000.000,00
59	03/12/2025	12.02/06.0/000010/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu dalam Kegiatan Penyediaan Permakanan kepada Pengusaha UD.SP.Tobing an. Pelita Manalu tanggal 5 Nopember 2026	5.000.000,00
60	05/12/2025	12.02/04.0/000221/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun Kepada Panitia Pesta Parheheon Sekolah Minggu HKI Resort Khusus Tarutung Kota Daerah II Silindung Pangaribuan	10.000.000,00
61	10/12/2025	12.02/04.0/000228/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat Ke Arah Siap Membangun Kepada Pengurus Ama I (sada) HKBP Hutaginjang Resort Paranginan Distrik XVI Humbang Habinsaran.	10.000.000,00
62	10/12/2025	12.02/04.0/000227/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat Ke Arah Siap Membangun Kepada Panitia Pesta Parheheon Ama Se-Resort Hutagalung Distrik II Silindung.	5.000.000,00
63	10/12/2025	12.02/04.0/000224/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat Ke Arah Siap Membangun Kepada Panitia Pesta Perheheon Ina HKBP Sabungan Siborongborong Tahun 2025.	5.000.000,00
64	16/12/2025	12.02/06.0/000025/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Kursi Roda tahun 2025 an. Tumiur Sitompul yang merupakan lansia warga desa Hutagalung Siwaluompu Kecamatan Tarutung	2.000.000,00
65	16/12/2025	12.02/06.0/000012/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu tongkat tahun 2025 an. Pijor Pasaribu yang merupakan lansia warga desa Simpang bolon kecamatan Garoga	500.000,00
66	16/12/2025	12.02/06.0/000023/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Kursi Roda tahun 2025 an. Merialam Simamora yang merupakan lansia warga desa Aek Nauli IV Kecamatan Sipahutar	2.000.000,00
67	16/12/2025	12.02/06.0/000017/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu tongkat tahun 2025 an. Urban Pasaribu yang merupakan lansia warga desa Simpang bolon kecamatan Garoga	500.000,00
68	16/12/2025	12.02/06.0/000034/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Sondang Manalu yang merupakan lansia warga desa Hutagalung Siwaluompu Kecamatan Tarutung	500.000,00
69	16/12/2025	12.02/06.0/000020/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Kursi Roda tahun 2025 an. Esdima Darmawati Silalahi yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting	2.000.000,00
70	16/12/2025	12.02/06.0/000014/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Kursi Roda tahun 2025 an. Marta Siregar yang merupakan lansia warga desa Simpang bolon kecamatan Garoga	2.000.000,00
71	16/12/2025	12.02/06.0/000039/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Tianur Situmorang yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting'	500.000,00
72	16/12/2025	12.02/06.0/000033/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Marolop Tanjung yang merupakan lansia warga desa Sitolu Bahal Kecamatan Purba Tua	500.000,00
73	16/12/2025	12.02/06.0/000037/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Dorlan Hutapea yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting'	500.000,00
74	16/12/2025	12.02/06.0/000027/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Dengar tahun 2025 an. Nurlinda Purba yang merupakan lansia warga desa Rahut Bosi Kecamatan Pangaribuan	750.000,00
75	16/12/2025	12.02/06.0/000038/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Delpi Pakpahan yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting'	500.000,00
76	16/12/2025	12.02/06.0/000019/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Kursi Roda tahun 2025 an. Dormaida Hutapea yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting	2.000.000,00
77	16/12/2025	12.02/06.0/000031/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Roslina Hutapea yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting'	500.000,00
78	16/12/2025	12.02/06.0/000030/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Wilter Sinaga yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting'	500.000,00
79	16/12/2025	12.02/06.0/000024/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Kursi Roda tahun 2025 an. Renni Simorangkir yang merupakan lansia warga desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita	2.000.000,00
80	16/12/2025	12.02/06.0/000016/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu tongkat tahun 2025 an. Rustam Pasaribu yang merupakan lansia warga desa Simpang bolon kecamatan Garoga	500.000,0
81	16/12/2025	12.02/06.0/000032/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Restini Sinaga yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting'	500.000,0
82	16/12/2025	12.02/06.0/000035/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Tinurjana Pakpahan yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting'	500.000,0
83	16/12/2025	12.02/06.0/000015/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu tongkat tahun 2025 an. Lengsi Pane yang merupakan lansia warga desa Simpang bolon kecamatan Garoga	500.000,0
84	16/12/2025	12.02/06.0/000018/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Kursi Roda tahun 2025 an. Basaria Tambunan yang merupakan lansia warga desa Sibingke Kecamata Pangaribuan	2.000.000,00
85	16/12/2025	12.02/06.0/000013/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu tongkat tahun 2025 an. Ruddin Sormin yang merupakan lansia warga desa Simpang bolon kecamatan Garoga	500.000,00
86	16/12/2025	12.02/06.0/000022/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Kursi Roda tahun 2025 an. Loide Simanjuntak yang merupakan lansia warga desa Rahutbosi Onan Sibingke Kecamatan Pangaribuan	2.000.000,00

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	REALISASI
87	16/12/2025	12.02/06.0/000026/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Dengar tahun 2025 an. Gerhat marulitua Sibarani yang merupakan lansia warga desa Hutabarat Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung	750.000,00
88	16/12/2025	12.02/06.0/000029/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Dengar tahun 2025 an. Manahan Hutapea yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting'	750.000,00
89	16/12/2025	12.02/06.0/000021/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Kursi Roda tahun 2025 an. Samina Simorangkir yang merupakan lansia warga desa Siarangarang Kecamatan Tarutung	2.000.000,00
90	16/12/2025	12.02/06.0/000028/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat bantu Dengar tahun 2025 an. Asban Pakpahan yang merupakan lansia warga desa Parsorminan Kecamatan Pangaribuan	750.000,00
91	16/12/2025	12.02/06.0/000036/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya bantuan sosial pembelian alat Tongkat tahun 2025 an. Elberia Simorangkir yang merupakan lansia warga desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting'	500.000,00
92	19/12/2025	12.02/06.0/000041/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Garoga Sibargot pada tanggal 2 Mei 2025 dan Desa Lontung Jae I pada tanggal 10 Mei 2025 ke Kecamatan Garoga kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	800.000,00
93	19/12/2025	12.02/06.0/000055/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Sitampurung , Desa Siborongborong I dan Desa Siaro Kecamatan Siborongborong pada tanggal 23 September 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	2.400.000,00
94	19/12/2025	12.02/06.0/000056/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Lontung Dolok pada tanggal 8 September 2025 dan Desa Lobu Pining 15 September 2025 Kecamatan Pahae Julu kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	600.000,00
95	19/12/2025	12.02/06.0/000054/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Situmeang Hasundutan Kecamatan Sipoholon pada tanggal 26 Agustus 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	800.000,00
96	19/12/2025	12.02/06.0/000057/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar pada tanggal 21 September 2025 dan 5 Desember 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	800.000,00
97	19/12/2025	12.02/06.0/000068/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Tanah Longsor di Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung pada tanggal 4 Desember 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	3.600.000,00
98	19/12/2025	12.02/06.0/000050/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Puting Beliung di Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong pada tanggal 9 Agustus 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	1.400.000,00
99	19/12/2025	12.02/06.0/000059/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Sitampurung dan Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung pada tanggal 23 September 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	3.600.000,00
100	19/12/2025	12.02/06.0/000048/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Lobu Sunut Kecamatan Parmonangan pada tanggal 16 Juli 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	800.000,00
101	19/12/2025	12.02/06.0/000060/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Hutatoruan V Kecamatan Tarutung pada tanggal 29 September 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	200.000,00
102	19/12/2025	12.02/06.0/000067/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Hutanagodang pada tanggal 14 Juni 2025 dan Desa Silali Toruan pada tanggal 24 Nopember 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	800.000,00
103	19/12/2025	12.02/06.0/000062/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Batunadua Kecamatan Pangaribuan pada tanggal 4 Nopember 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	800.000,00
104	19/12/2025	12.02/06.0/000053/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Silangkitang Kecamatan Pahae Jae pada tanggal 26 Agustus 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	200.000,00
105	19/12/2025	12.02/06.0/000051/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon pada tanggal 10 Agustus 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	200.000,00
106	19/12/2025	12.02/06.0/000044/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon pada tanggal 10 Juni 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	600.000,00
107	19/12/2025	12.02/06.0/000047/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Desa Simasom Toruan dan Desa Lontung Dolok pada tanggal 10 Juni dan Puting Beliung di Desa Lumban Gaol Kecamatan Pahae Julu pada tanggal 15 Juni 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	600.000,00
108	19/12/2025	12.02/06.0/000065/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Banjir Desa Sitolu Bahal Kecamatan Purba Tua pada tanggal 21 Nopember 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	7.600.000,00
109	19/12/2025	12.02/06.0/000043/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Aek Tangga dan Desa Parinsoran pada tanggal 10 Juni 2025 Kecamatan Garoga kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	400.000,00
110	19/12/2025	12.02/06.0/000049/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Batumanumpak Kecamatan Pangaribuan pada tanggal 26 Juli 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	1.000.000,00
111	19/12/2025	12.02/06.0/000063/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita pada tanggal 21 Nopember 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	800.000,00
112	19/12/2025	12.02/06.0/000046/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Parbaju Julu pada tanggal 23 Mei dan Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung pada tanggal 10 Juni 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	600.000,00
113	19/12/2025	12.02/06.0/000052/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Hutabulu pada tanggal 11 Agustus dan Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong pada tanggal 18 Agustus 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	800.000,00
114	19/12/2025	12.02/06.0/000061/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Hutatinggi Kecamatan Parmonangan pada tanggal 8 Oktober 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	200.000,00

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	REALISASI
115	19/12/2025	12.02/06.0/000042/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon pada tanggal 15 Mei 2025	400.000,00
116	19/12/2025	12.02/06.0/000066/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipoholon pada tanggal 15 Nopember 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	600.000,00
117	19/12/2025	12.02/06.0/000040/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana rumah tertimpa pohon di Desa Hutanagodang pada tanggal 6 Mei 2025 dan Desa Batu Binumbun pada tanggal 22 Mei 2025 di Kecamatan Muara kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	800.000,00
118	19/12/2025	12.02/06.0/000069/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Kebakaran di Desa Lumban tonga-tonga Kecamatan Siborongborong pada tanggal 26 Juli 2025	600.000,00
119	19/12/2025	12.02/06.0/000058/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon pada tanggal 23 September 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	1.400.000,00
120	19/12/2025	12.02/06.0/000045/TU/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Barang bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Lobu Hole,Desa Endaportibi dan Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita pada tanggal 10 Juni 2025 kepada Pengusaha Toko SP Tobing an.Pelita Manalu	2.600.000,00
121	19/12/2025	12.02/06.0/000001/TU/5.03.5.04.0.00.01.0000/M/12/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial berupa sembako kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	48.150.000,00
122	29/12/2025	12.02/04.0/000115/LS/1.04.2.10.1.03.01.0000/PPR4/12/2025	Bantuan Sosial Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	262.500.000,00
123	31/12/2025	12.02/04.0/000122/LS/1.04.2.10.1.03.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	200.000.000,00
124	31/12/2025	12.02/04.0/000287/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Pesta Gotilon HKBP Immanuel Sipultak Parhorboan Resort Rurajulu Sihombing.	10.000.000,00
125	31/12/2025	12.02/04.0/000288/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Pesta Gotilon Hutanamora Ressort Butar Distrik XVI Humbang Habinsaran.	10.000.000,00
126	31/12/2025	12.02/04.0/000290/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Pesta Perak (25 Tahun) HKBP Resort Tarutung Kota Distrik II Silindung Tahun 2025.	5.000.000,00
127	31/12/2025	12.02/04.0/000316/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Kegiatan Salib Kasih.	20.000.000,00
128	31/12/2025	12.02/04.0/000289/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Turnamen Sepakbola Dandim Cup Horas Taput 2025.	20.000.000,00
129	31/12/2025	12.02/04.0/000297/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Pesta Parheheon Ama Se-Ressort HKBP Pulo Sibandang.	6.000.000,00
130	31/12/2025	12.02/04.0/000335/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Hari Pentakosta Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.	10.000.000,00
131	31/12/2025	12.02/04.0/000336/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun kepada Panitia Perayaan Pesta Ulang Tahun ke 71 Tahun 2025 HKBP Pardomuan Silangkitang.	10.000.000,00
132	31/12/2025	12.02/04.0/000329/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/12/2025	Pembayaran Bantuan Pembinaan Masyarakat ke Arah Siap Membangun Kepada Panitia Pesta Parheheon Ama se-Resort HKBP Sipoholon V Situmeang Distrik II Silindung.	7.500.000,00
			TOTAL	**1.346.012.700,00**

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL
TAHUN ANGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	ASET LAINNYA
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	4.732.340.291,00	617.100.000,00	0,00	14.458.880.016,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	980.730.902,00	358.340.300,00	0,00	0,00	0,00
3	RSU DAERAH TARUTUNG	0,00	6.198.302.166,00	498.647.317,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0,00	31.920.000,00	0,00	13.743.278.294,00	0,00	0,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	11.799.999,00	291.614.730,12	4.263.225.599,08	0,00	0,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	155.109.000,00	460.908.090,00	99.860.000,00	0,00	0,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	164.759.400,00	399.851.140,00	0,00	0,00	0,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	31.357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	31.899.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	134.100.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	117.382.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	145.999.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	0,00	23.407.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DINAS PARIWISATA	0,00	12.887.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DINAS PERTANIAN	0,00	1.177.604.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	4.341.019.432,76	3.267.831.393,17	0,00	0,00	0,00
24	SEKRETARIAT DPRD	0,00	1.240.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	111.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	522.413.678,00	353.878.307,00	0,00	0,00	0,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	28.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	192.399.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	INSPEKTORAT	0,00	454.016.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	0,00	0,00	0,00	474.137.481,00	0,00	0,00
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	0,00	7.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	0,00	14.909.910,00	0,00	107.150.000,00	0,00	0,00
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	0,00	6.300.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	0,00
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	0,00	5.841.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	0,00	19.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	0,00	3.339.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**-**	**20.939.549.180,71**	**6.342.671.277,29**	**18.687.651.374,08**	**14.458.880.016,00**	**-**

Lampiran 6

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

REKAPITULASI REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA

TAHUN ANGARAN 2025

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	REALISASI
1	18/03/2025	12.02/04.0/000019/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN DI DESA SIANDORANDOR KECAMATAN TARUTUNG	150.160.000,00
2	18/03/2025	12.02/04.0/000017/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR TANGGUL SUNGAI AEK RISTOP KELURAHAN HUTATORUAN VII KECAMATAN TARUTUNG	257.700.000,00
3	26/05/2025	12.02/04.0/000045/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P4/5/2025	PEMBAYARAN DAPUR UMUM LAPANGAN MASA PEMULIHAN PASCA BENCANA KEBAKARAN PASAR MUARA DI KECAMATAN MUARA	11.838.000,00
4	11/06/2025	12.02/04.0/000052/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/6/2025	PEMBAYARAN PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI UTARA	95.841.250,00
5	11/06/2025	12.02/04.0/000051/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/6/2025	PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN MATERIAL BANGUNAN	27.200.000,00
6	12/08/2025	12.02/04.0/000086/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/8/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN TUMPUAN JEMBATAN AEK SIMOKMOK RUAS JALAN PACUAN KUDA KELURAHAN PASAR	159.500.000,00
7	26/08/2025	12.02/04.0/000090/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/8/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN DI DESA BANUAJI I KECAMATAN ADIANKOTING	100.000.000,00
8	27/08/2025	12.02/04.0/000092/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/8/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM KERUSAKAN GORONG GORONG DAN BADAN JALAN DESA SIPULTAK KECAMATAN PAGARAN	136.500.000,00
9	28/08/2025	12.02/04.0/000094/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/8/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM KERUSAKAN KAMAR MANDI UMUM (MCK) AKIBAT BANJIR BANDANG DI KELURAHAN PASAR SARULLA KECAMATAN PAHAE	338.320.000,00
10	02/09/2025	12.02/04.0/000100/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR TEMBOK PENAHAN TANAH DI DESA BANUAJI I KECAMATAN ADIANKOTING	160.000.000,00
11	02/09/2025	12.02/04.0/000101/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN DI DESA GAROGA SIBARGOT KECAMATAN GAROGA	187.000.000,00
12	17/09/2025	12.02/04.0/000107/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/9/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR TEMBOK PENAHAN BADAN JALAN DI AEK SITASI DESA HUTAPEA BANUAREA KECAMATAN TARUTUNG	199.500.000,00
13	17/09/2025	12.02/04.0/000106/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/9/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR TANAH PADA LOKASI SD NEGERI 173156 LOBU PINING KECAMATAN ADIAN KOTING	250.000.000,00
14	17/09/2025	12.02/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR JEMBATAN DI DESA LUMBAN SILINTONG KECAMATAN PAGARAN	332.800.000,00
15	26/09/2025	12.02/04.0/000111/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/9/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR TEMBOK PENAHAN TANAH DI DESA HUTAPEA BANUAREA KECAMATAN TARUTUNG	199.700.000,00
16	26/09/2025	12.02/04.0/000114/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/9/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN RANGKEA SIPAGAGAN KELURAHAN HUTATORUAN V KECAMATAN TARUTUNG	100.000.000,00
17	26/09/2025	12.02/04.0/000113/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/9/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN DAN GORONG GORONG DI JALAN RANGKEA SIPAGAGAN KELURAHAN HUTATORUAN X	129.300.000,00
18	30/09/2025	12.02/04.0/000115/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/9/2025	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM KERUSAKAN GORONG GORONG DAN TANGGUL DI JALAN DIPONEGORO KELURAHAN HUTATORUAN X KECAMATAN	238.100.000,00
19	10/11/2025	12.02/04.0/000142/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/11/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TULASON DESA SIPULTAK KECAMATAN PAGARAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	100.000.000,00
20	17/11/2025	12.02/04.0/000150/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/11/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR DYK IRIGASI SIPURIK PURIK DESA JANJI NAULI KECAMATAN PURBATUA	130.600.000,00
21	18/11/2025	12.02/04.0/000152/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/11/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH PADA JEMBATAN SOEKARNO-HATTA DESA AEK SIANSIMUN KECAMATAN	143.000.000,00
22	19/11/2025	12.02/04.0/000154/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/11/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN DAN TUMPUAN JEMBATAN DI DESA SIRAJA OLOAN KECAMATAN TARUTUNG	250.000.000,00
23	24/11/2025	12.02/04.0/000160/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/11/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM REHABILITASI JEMBATAN AMBAR HODA DESA ONAN RUNGGU I KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA	125.800.000,00
24	26/11/2025	12.02/04.0/000161/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/11/202	PENANGGULANGAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA	400.000.000,00
25	02/12/2025	12.02/04.0/000169/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR2/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH PADA JALAN SIPAHUTAR-PARLOMBUAN DESA SIPAHUTAR II KECAMATAN	185.800.000,00
26	04/12/2025	12.02/04.0/000175/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR3/12/202	PENGAMANAN KANTOR BUPATI DAN KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	110.000.000,00
27	09/12/2025	12.02/04.0/000178/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR3/12/202	PENAMBAHAN BIAYA PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA	563.000.000,00
28	15/12/2025	12.02/04.0/000184/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR3/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM REHABILITASI JEMBATAN AEK HOLANG DESA SITOLU AMA KECAMATAN PAHAE JULU	380.000.000,00
29	22/12/2025	12.02/04.0/000196/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PEMBAYARAN BIAYA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA	586.355.300,00
30	24/12/2025	12.02/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PEMBAYARAN LAYANAN KONSELING, PSIKO SOSIAL, PEMULIHAN TRAUMA KEPADA ANAK YANG TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI	112.000.000,00
31	29/12/2025	12.02/04.0/000206/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL OPTIMALISASI PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI KECAMATAN PAHAE JAE KEPADA DINAS	68.000.000,00
32	30/12/2025	12.02/04.0/000213/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENAMBAHAN BIAYA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA	905.871.094,00
33	30/12/2025	12.02/04.0/000211/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	BIAYA PERBAIKAN DAN OPERASIONAL ALAT BERAT EXCAVATOR UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN	84.400.000,00
34	30/12/2025	12.02/04.0/000217/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENGADAAN STARLINK, PAKET INTERNET STARLINK,PENDAMPINGAN PEMASANGAN STARLINK DAN DOKUMENTASI KEGIATAN PIMPINAN PADA SAAT	133.725.000,00
35	30/12/2025	12.02/04.0/000219/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PEMBAYARAN BIAYA UMUM BELANJA TIDAK TERDUGA TA. 2025	234.486.210,00
36	30/12/2025	12.02/04.0/000209/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	BANTUAN KEPADA KELUARGA TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA UNTUK PERALATAN KELUARGA DAN SANDANG	809.136.250,00
37	30/12/2025	12.02/04.0/000212/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	TAMBAHAN BIAYA PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA KEPADA BADAN	436.000.000,00

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	REALISASI
38	30/12/2025	12.02/04.0/000220/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PEMBAYARAN BIAYA UMUM BELANJA TIDAK TERDUGA TA. 2025	45.423.930,00
39	30/12/2025	12.02/04.0/000221/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	DANA PENGAMANAN KUNJUNGAN KERJA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 20 S/D 22 DESEMBER 2025 DI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI UTARA	564.614.600,00
40	31/12/2025	12.02/04.0/000232/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR TEMBOK PENAHAN TANAH PADA LOKASI HKBP HUTABARAT PARBAJU DESA PARBAJU TONGA KECAMATAN	213.300.000,00
41	31/12/2025	12.02/04.0/000229/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR DYK IRIGASI AEK KANDIS DESA LUMBAN GARAGA KECAMATAN PAHAE JULU	271.834.000,00
42	31/12/2025	12.02/04.0/000230/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR TANGGUL SUNGAI AEK HAIDUPAN DESA HUTAGALUNG SIWALUOMPU KECAMATAN TARUTUNG	178.200.000,00
43	31/12/2025	12.02/04.0/000225/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN DAN PENGAMAN JEMBATAN DI DESA JAMBUR NAULI KECAMATAN TARUTUNG	244.200.000,00
44	31/12/2025	12.02/04.0/000231/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	BANTUAN KEPADA YANG TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA BERUPA KASUR DAN SELIMUT	1.089.900.000,00
45	31/12/2025	12.02/04.0/000227/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR DYK IRIGASI AEK GOTI DESA PARBAJU JULU KECAMATAN TARUTUNG	211.899.000,00
46	31/12/2025	12.02/04.0/000228/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN DI DUSUN I PARRATUSAN DESA MANALU DOLOK KECAMATAN PARMONANGAN	386.252.000,00
47	31/12/2025	12.02/04.0/000241/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA KEPADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.590.100.400,00
48	31/12/2025	12.02/04.0/000236/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR TANAH LOKASI DESA SIANDOR ANDOR KECAMATAN TARUTUNG	201.700.000,00
49	31/12/2025	12.02/04.0/000237/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LONGSOR BADAN JALAN MENUJU DESA LOBU SINGKAM DAN DESA RURA JULU DOLOK LOKASI DESA LOBU SINGKAM	259.330.000,00
50	31/12/2025	12.02/04.0/000242/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/202	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM KERUSAKAN JALAN SIMENARIUM-RURA JULU DI LOBU SIKKAM KECAMATAN SIPOHOLON	295.000.000,00
		TOTAL		**15.383.387.034,00**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI PENDAPATAN DAN PENGELUARAN DANA BOSP REGULER DAN BOS TINGKAT SD NEGERI
TAHUN ANGARAN 2025

Lampiran 7

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Kas BOS	Penerimaan BOS REGULER	Realisasi Belanja dana BOS Reguler TAHUN 2025				Total Belanja	Penerimaan boskin	Realisasi Belanja dana BOS Kinerja TAHUN 2025			Total Belanja	Autodebit ke Kasda	Belanja Lainnya (Biaya Admin)	Saldo Akhir
						BELANJA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA			BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
1	SD NEGERI 173147 ADIAN KOTING	Adian Koting	139.563,00	0,00	9.500.000,00	0,00	7.100.000,00	2.400.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.563,00
2	SD NEGERI 173148 ADIANKOTING	Adian Koting	96.135,00	0,00	72.200.000,00	18.900.000,00	27.894.000,00	0,00	25.247.000,00	72.041.000,00	22.500.000,00	18.833.000,00	0,00	3.667.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	255.135,00
3	SD NEGERI 173149 PARSINGKAMAN	Adian Koting	316.754,00	0,00	121.600.000,00	28.200.000,00	54.804.000,00	1.800.000,00	36.796.000,00	121.600.000,00	22.500.000,00	18.361.000,00	0,00	4.139.000,00	22.500.000,00	260.000,00	0,00	56.754,00
4	SD NEGERI 173150 PAGARAN LAMBUNG	Adian Koting	37.196,00	0,00	65.550.000,00	20.880.000,00	24.213.000,00	0,00	20.457.000,00	65.550.000,00	22.500.000,00	19.605.000,00	0,00	2.895.000,00	22.500.000,00	20.000,00	0,00	17.196,00
5	SD NEGERI 173152 SITORNGOM	Adian Koting	217.866,00	0,00	57.000.000,00	11.700.000,00	28.218.000,00	0,00	17.082.000,00	57.000.000,00	22.500.000,00	19.219.000,00	0,00	3.281.000,00	22.500.000,00	150.000,00	0,00	67.866,00
6	SD NEGERI 173153 SIBALANGA	Adian Koting	291.027,00	0,00	84.550.000,00	27.000.000,00	27.518.000,00	9.000.000,00	20.932.000,00	84.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	241.027,00
7	SD NEGERI 173154 BANUJAJI	Adian Koting	58.758,00	0,00	102.600.000,00	25.200.000,00	29.296.000,00	0,00	48.104.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.758,00
8	SD NEGERI 173155 PANSURBATU	Adian Koting	3.765.714,00	0,00	61.750.000,00	10.500.000,00	30.789.000,00	0,00	20.461.000,00	61.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	2.865.714,00
9	SD NEGERI 173156 LOBUPINING	Adian Koting	530.610,00	0,00	33.250.000,00	11.124.000,00	16.154.800,00	0,00	5.971.200,00	33.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.610,00
10	SD NEGERI 173157 AEKGODANG	Adian Koting	3.709.175,00	0,00	53.200.000,00	7.350.000,00	40.252.000,00	0,00	5.598.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.609.175,00
11	SD NEGERI 173158 LOBUNAHOT	Adian Koting	965.974,00	0,00	34.200.000,00	11.760.000,00	17.869.000,00	0,00	4.518.000,00	34.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.500,00	0,00	140.474,00
12	SD NEGERI 173159 TORHONAS	Adian Koting	295.962,00	6.120.000,00	64.980.000,00	20.298.000,00	28.701.000,00	1.500.000,00	14.481.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	295.962,00
13	SD NEGERI 173160 LOBU HAMINJON	Adian Koting	51.367,00	0,00	64.980.000,00	14.580.000,00	22.704.000,00	15.600.000,00	12.096.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.367,00
14	SD NEGERI 173161 SIANTAR NAIPOSPOS	Adian Koting	3.903.285,00	0,00	93.138.000,00	23.688.000,00	43.984.000,00	240.000,00	25.226.000,00	93.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.285,00
15	SD NEGERI 173162 PARLOBULOBUAN	Adian Koting	106.491,00	0,00	29.450.000,00	10.080.000,00	16.380.600,00	0,00	2.989.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.556.491,00
16	SD NEGERI 173163 ADIAN KOTING	Adian Koting	115.865,00	0,00	58.900.000,00	14.160.000,00	28.474.000,00	0,00	16.266.000,00	58.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,00
17	SD NEGERI 174569 PANSURBATU	Adian Koting	152.902,00	0,00	60.800.000,00	19.275.000,00	20.276.300,00	5.350.000,00	15.898.700,00	60.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.902,00
18	SD NEGERI 174570 PAGARAN PISANG	Adian Koting	91.560,00	0,00	62.700.000,00	15.870.000,00	17.564.000,00	4.000.000,00	25.266.000,00	62.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.560,00
19	SD NEGERI 174571 SITAREALAMAN	Adian Koting	77.799,00	0,00	124.450.000,00	26.820.000,00	48.115.000,00	7.944.000,00	41.571.000,00	124.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.799,00
20	SD NEGERI 175746 ADIANKOTING	Adian Koting	241.262,00	0,00	68.400.000,00	22.440.000,00	34.260.000,00	0,00	11.700.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	3.262,00
21	SD NEGERI 175747 BANUJAJI	Adian Koting	582.520,00	0,00	57.950.000,00	4.200.000,00	35.210.000,00	0,00	18.540.000,00	57.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	432.520,00
22	SD NEGERI 175748 LOBUPINING	Adian Koting	646.352,00	0,00	28.500.000,00	6.450.000,00	16.900.500,00	0,00	5.149.500,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.352,00
23	SD NEGERI 176332 RINABIDANG	Adian Koting	50.766,00	900.000,00	78.850.000,00	15.800.000,00	32.654.000,00	0,00	30.396.000,00	78.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	50.766,00
24	SD NEGERI 177033 HUTANABOLON	Adian Koting	135.499,00	0,00	95.950.000,00	23.940.000,00	37.420.000,00	0,00	34.590.000,00	95.950.000,00	22.500.000,00	18.833.000,00	0,00	3.667.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	135.499,00
25	SD NEGERI 177654 NAIPOSPOS TONGA	Adian Koting	63.566,00	0,00	64.980.000,00	8.400.000,00	34.254.000,00	0,00	22.326.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.566,00
26	SD NEGERI 173215 GAROGA JAE	Garoga	1.039.000,00	0,00	135.850.000,00	30.108.000,00	60.825.000,00	16.100.000,00	28.817.000,00	135.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00
27	SD NEGERI 173216 GAROGA JULU	Garoga	1.743.847,00	0,00	91.200.000,00	15.064.400,00	44.083.600,00	0,00	32.052.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.847,00
28	SD NEGERI 173217 RAMBASIALA	Garoga	1.606.800,00	0,00	73.150.000,00	18.000.000,00	30.280.000,00	10.450.000,00	14.420.000,00	73.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.800,00
29	SD NEGERI 173218 PEARAJA	Garoga	730.800,00	0,00	178.600.000,00	36.700.000,00	95.028.000,00	5.600.000,00	41.188.000,00	178.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	765.800,00
30	SD NEGERI 173219 BATUMAMAK	Garoga	155.627,00	0,00	43.700.000,00	7.968.000,00	28.686.000,00	0,00	7.046.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.627,00
31	SD NEGERI 173220 SIRUMAMBE	Garoga	157.667,00	0,00	37.050.000,00	13.890.000,00	16.385.000,00	0,00	6.775.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.667,00
32	SD NEGERI 173221 HADATARAN	Garoga	1.555.823,00	0,00	38.950.000,00	6.000.000,00	28.109.000,00	300.000,00	4.541.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.823,00
33	SD NEGERI 173222 PARSOSORAN	Garoga	2.145.847,00	0,00	101.650.000,00	21.300.000,00	57.383.200,00	1.200.000,00	21.766.800,00	101.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.847,00
34	SD NEGERI 173223 GONTING SALAK	Garoga	1.228.770,00	0,00	75.810.000,00	12.179.300,00	58.269.852,00	0,00	5.331.000,00	75.780.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.618,00
35	SD NEGERI 173224 SIBALANGA	Garoga	2.077.988,00	0,00	133.000.000,00	12.000.000,00	92.499.000,00	1.600.000,00	26.901.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.988,00
36	SD NEGERI 173225 GONTINGHOPO	Garoga	1.050.684,00	0,00	96.900.000,00	21.000.000,00	48.700.000,00	12.400.000,00	14.800.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	1.008.684,00
37	SD NEGERI 173226 SIRPANG	Garoga	4.782.495,00	0,00	113.050.000,00	25.600.000,00	50.446.000,00	13.150.000,00	23.854.000,00	113.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.495,00
38	SD NEGERI 173227 AEKTANGGA	Garoga	1.712.915,00	124,00	88.350.000,00	14.100.000,00	45.183.500,00	9.500.000,00	19.566.500,00	88.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.931,00	0,00	1.615.108,00
39	SD NEGERI 173228 LOBUTONGA	Garoga	1.641.143,00	0,00	99.750.000,00	13.800.000,00	47.658.500,00	13.500.000,00	24.791.500,00	99.750.000,00	22.500.000,00	12.410.000,00	8.130.000,00	1.960.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	1.641.143,00
40	SD NEGERI 173229 PARINSORAN	Garoga	6.130.519,00	0,00	100.700.000,00	2.934.000,00	82.413.500,00	4.209.500,00	11.083.000,00	100.640.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.190.519,00
41	SD NEGERI 173231 PADANG SIANDOMA	Garoga	356.832,00	0,00	50.350.000,00	14.034.000,00	30.318.000,00	0,00	5.998.000,00	50.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.832,00
42	SD NEGERI 173232 TAPUS GODANG	Garoga	1.845.437,00	0,00	45.600.000,00	9.000.000,00	27.207.000,00	300.000,00	9.093.000,00	45.600.000,00	22.500.000,00	12.410.000,00	8.188.000,00	1.902.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	1.845.437,00
43	SD NEGERI 173233 GAROGA	Garoga	2.621.834,00	0,00	99.750.000,00	12.000.000,00	75.645.000,00	0,00	12.105.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.834,00
44	SD NEGERI 174578 SIBANGANDING	Garoga	3.023.511,00	0,00	94.050.000,00	18.996.000,00	53.111.000,00	3.500.000,00	18.443.000,00	94.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	123.511,00
45	SD NEGERI 174579 AEKTANGGA JAE	Garoga	2.175.936,00	0,00	79.800.000,00	18.780.000,00	47.986.300,00	0,00	12.834.000,00	79.600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.636,00
46	SD NEGERI 175763 PARINSORAN	Garoga	315.057,00	0,00	75.050.000,00	18.000.000,00	45.699.000,00	400.000,00	10.951.000,00	75.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.057,00
47	SD NEGERI 175764 LUMBAN SIANTURI	Garoga	1.939.407,00	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.407,00
48	SD NEGERI 175765 PADANG SIANDOMA	Garoga	209.508,00	0,00	46.550.000,00	9.000.000,00	22.283.000,00	4.000.000,00	11.267.000,00	46.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.508,00
49	SD NEGERI 176342 PARHUDONAN	Garoga	439.749,00	0,00	31.350.000,00	0,00	24.344.000,00	1.200.000,00	5.806.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	389.749,00
50	SD NEGERI 177044 PARMANUHAN	Garoga	1.261.775,00	0,00	87.723.000,00	13.800.000,00	50.523.000,00	0,00	23.400.000,00	87.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.775,00
51	SD NEGERI 177660 NATUMINGKA	Garoga	2.215.379,00	0,00	79.800.000,00	21.435.000,00	52.625.000,00	300.000,00	5.440.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.379,00

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Kas BOS	Penerimaan BOS REGULER	Realisasi Belanja dana BOS Reguler TAHUN 2025				Total Belanja	Penerimaan boskin	Realisasi Belanja dana BOS Kinerja TAHUN 2025			Total Belanja	Autodebit ke Kasda	Belanja Lainnya (Biaya Admin)	Saldo Akhir
						BELANJA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA			BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
52	SD NEGERI 177927 HUTAGURGUR	Garoga	417.228,00	0,00	41.798.899,00	6.576.000,00	35.224.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.899,00	0,00	367.228,00
53	SD NEGERI 178212 SIBIOBIO	Garoga	919.174,00	0,00	57.725.000,00	12.084.000,00	31.816.000,00	8.000.000,00	6.050.000,00	57.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.174,00
54	SD NEGERI 178497 SIBARGOT	Garoga	1.247.098,00	0,00	29.450.000,00	0,00	25.811.500,00	0,00	2.975.000,00	28.786.500,00	22.500.000,00	10.948.186,00	10.809.814,00	742.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	1.910.598,00
55	SD NEGERI 173339 MUARA	Muara	1.931.552,00	0,00	79.800.000,00	25.020.000,00	29.970.000,00	10.290.000,00	14.520.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	81.552,00
56	SD NEGERI 173340 MUARA	Muara	3.271.927,00	0,00	81.700.000,00	18.960.000,00	38.133.000,00	10.135.000,00	14.472.000,00	81.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.521.927,00
57	SD NEGERI 173341 UNTE MUNGKUR	Muara	455.776,00	0,00	115.900.000,00	31.920.000,00	37.641.440,00	15.200.000,00	30.738.000,00	115.499.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.560,00	0,00	455.776,00
58	SD NEGERI 173342 SIMATUPANG	Muara	3.576.881,00	0,00	178.600.000,00	55.440.000,00	47.932.000,00	24.000.000,00	51.228.000,00	178.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	76.881,00
59	SD NEGERI 173344 BATUBINUMBUN	Muara	1.848.106,00	0,00	81.700.000,00	16.320.000,00	23.134.000,00	13.600.000,00	28.646.000,00	81.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	98.106,00
60	SD NEGERI 173345 ARITONANG	Muara	1.810.580,00	0,00	70.300.000,00	13.800.000,00	28.131.000,00	5.000.000,00	23.369.000,00	70.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	60.580,00
61	SD NEGERI 173346 DOLOK MARTUMBUI	Muara	1.847.238,00	0,00	70.300.000,00	15.372.000,00	36.870.300,00	0,00	18.031.000,00	70.273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	123.938,00
62	SD NEGERI 173347 BUNTU RAJA	Muara	3.781.295,00	0,00	62.700.000,00	21.270.000,00	32.790.000,00	2.360.000,00	6.280.000,00	62.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.871.295,00
63	SD NEGERI 173348 TAPIAN NAULI	Muara	1.153.928,00	0,00	83.600.000,00	25.440.000,00	32.563.000,00	0,00	21.437.000,00	79.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313.928,00
64	SD NEGERI 173349 HUTAGINJANG	Muara	5.003.982,00	0,00	104.500.000,00	31.440.000,00	32.453.000,00	19.700.000,00	20.907.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	4.763.982,00
65	SD NEGERI 173351 PAPANDE	Muara	3.149.245,00	0,00	88.350.000,00	22.824.000,00	45.829.000,00	4.200.000,00	15.497.000,00	88.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.399.245,00
66	SD NEGERI 173352 SOSOR LONTUNG	Muara	52.853,00	0,00	38.950.000,00	10.440.000,00	19.009.000,00	0,00	9.501.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	48.853,00
67	SD NEGERI 173361 SIBANDANG	Muara	1.808.065,00	0,00	95.950.000,00	19.182.000,00	49.297.000,00	11.335.000,00	16.136.000,00	95.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	58.065,00
68	SD NEGERI 173362 SIBANDANG	Muara	1.829.290,00	0,00	75.810.000,00	18.364.800,00	29.067.200,00	13.500.000,00	14.878.000,00	75.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	79.290,00
69	SD NEGERI 173365 MUARA	Muara	4.236.929,00	0,00	89.300.000,00	16.800.000,00	44.719.000,00	6.000.000,00	21.781.000,00	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728.000,00	0,00	508.929,00
70	SD NEGERI 174539 SILINTA	Muara	1.971.203,00	0,00	44.650.000,00	7.776.000,00	26.466.000,00	7.200.000,00	3.208.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.671.203,00
71	SD NEGERI 175795 LOBUTANGGA	Muara	1.805.465,00	0,00	60.800.000,00	6.000.000,00	39.884.000,00	1.200.000,00	13.716.000,00	60.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	55.465,00
72	SD NEGERI 175798 ARITONANG	Muara	53.420,00	0,00	44.650.000,00	8.232.000,00	27.902.000,00	0,00	8.516.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420,00
73	SD NEGERI 176357 SIBANDANG	Muara	1.778.147,00	0,00	69.350.000,00	17.640.000,00	47.107.000,00	0,00	4.603.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	28.147,00
74	SD NEGERI 177064 SILANDO	Muara	3.647.675,00	0,00	160.550.000,00	22.644.000,00	61.141.000,00	11.900.000,00	64.865.000,00	160.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	97.675,00
75	SD NEGERI 177664 SITANGGOR	Muara	2.743.626,00	0,00	56.050.000,00	15.732.000,00	23.731.000,00	4.700.000,00	11.887.000,00	56.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	753.626,00
76	SD NEGERI 173290 BUTAR	Pagaran	33.270,00	0,00	75.050.000,00	12.000.000,00	40.164.000,00	9.050.000,00	13.836.000,00	75.050.000,00	22.500.000,00	12.786.000,00	7.300.000,00	2.414.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	33.270,00
77	SD NEGERI 173291 BUTAR	Pagaran	76.941,00	0,00	74.100.000,00	8.400.000,00	52.890.000,00	2.500.000,00	10.310.000,00	74.100.000,00	22.500.000,00	16.434.000,00	2.500.000,00	3.566.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	76.941,00
78	SD NEGERI 173292 BUTAR	Pagaran	68.605,00	0,00	72.200.000,00	15.300.000,00	44.105.000,00	1.730.000,00	11.050.000,00	72.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.605,00
79	SD NEGERI 173295 PAMANSURAN	Pagaran	2.338.285,00	0,00	122.550.000,00	3.000.000,00	68.262.590,00	10.660.000,00	40.618.000,00	122.540.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.695,00
80	SD NEGERI 173296 PAMANSURAN	Pagaran	45.315,00	0,00	79.800.000,00	20.580.000,00	29.412.000,00	12.850.000,00	16.958.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.315,00
81	SD NEGERI 173305 SIPULTAK	Pagaran	38.979,00	0,00	138.700.000,00	21.300.000,00	86.859.000,00	9.000.000,00	21.541.000,00	138.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.979,00
82	SD NEGERI 173306 SIPULTAK	Pagaran	47.853,00	0,00	98.800.000,00	18.900.000,00	53.321.000,00	550.000,00	26.029.000,00	98.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.853,00
83	SD NEGERI 173307 SIPULTAK	Pagaran	313.881,00	0,00	117.800.000,00	23.700.000,00	55.767.000,00	6.850.000,00	31.483.000,00	117.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.881,00
84	SD NEGERI 173308 SIBARAGAS	Pagaran	63.858,00	0,00	96.900.000,00	25.200.000,00	43.453.000,00	4.210.000,00	24.037.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.858,00
85	SD NEGERI 173309 PARHORBOAN	Pagaran	722.029,00	0,00	101.650.000,00	13.500.000,00	49.405.000,00	15.500.000,00	23.245.000,00	101.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.029,00
86	SD NEGERI 173386 ONAN RUNGGU	Pagaran	58.475,00	0,00	76.950.000,00	17.595.000,00	32.806.000,00	13.330.000,00	13.219.000,00	76.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.475,00
87	SD NEGERI 173387 SIMAMORA	Pagaran	207.806,00	0,00	66.500.000,00	9.600.000,00	51.290.000,00	1.700.000,00	3.910.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.806,00
88	SD NEGERI 173388 DOLOKSARIBU	Pagaran	252.439,00	0,00	115.900.000,00	15.600.000,00	46.463.000,00	8.300.000,00	45.537.000,00	115.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	52.439,00
89	SD NEGERI 173389 DODLOK SARIBU	Pagaran	77.197,00	0,00	97.850.000,00	15.600.000,00	66.305.000,00	6.900.000,00	9.045.000,00	97.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.197,00
90	SD NEGERI 174527 LUMBAN MOTUNG	Pagaran	55.826,00	0,00	104.500.000,00	20.640.000,00	60.550.500,00	0,00	23.309.500,00	104.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.826,00
91	SD NEGERI 174528 SIPULTAK	Pagaran	196.654,00	0,00	105.450.000,00	21.945.000,00	34.272.000,00	18.750.000,00	30.483.000,00	105.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.654,00
92	SD NEGERI 174540 HORISAN	Pagaran	83.594,00	0,00	109.250.000,00	7.200.000,00	72.411.400,00	4.000.000,00	25.513.000,00	109.124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.194,00
93	SD NEGERI 175769 HASIBUAN	Pagaran	2.168.751,00	0,00	92.150.000,00	13.200.000,00	39.085.000,00	9.100.000,00	30.690.000,00	92.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.751,00
94	SD NEGERI 175772 LUBIS	Pagaran	240.090,00	0,00	75.050.000,00	12.000.000,00	37.293.500,00	10.850.000,00	14.906.500,00	75.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.090,00
95	SD NEGERI 175774 SIBARAGAS	Pagaran	52.263,00	0,00	107.350.000,00	16.200.000,00	54.360.760,00	8.500.000,00	28.202.000,00	107.262.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.503,00
96	SD NEGERI 176347 DOLOK SARIBU	Pagaran	154.516,00	0,00	145.350.000,00	29.400.000,00	40.348.000,00	25.640.000,00	49.962.000,00	145.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.516,00
97	SD NEGERI 177046 SILABAN ARITONANG	Pagaran	242.179,00	0,00	58.900.000,00	13.680.000,00	25.553.000,00	7.500.000,00	12.167.000,00	58.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.179,00
98	SD NEGERI 177662 LUMBAN INAINA	Pagaran	55.165,00	0,00	47.500.000,00	11.340.000,00	28.040.500,00	0,00	8.119.500,00	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,00
99	SD NEGERI 177666 SIMAMORA	Pagaran	353.433,00	0,00	83.600.000,00	17.640.000,00	46.610.000,00	9.700.000,00	9.650.000,00	83.600.000,00	22.500.000,00	15.590.000,00	3.050.000,00	3.860.000,00	22.500.000,00	0,00	20.000,00	333.433,00
100	SD NEGERI 173234 SARULLA	Pahae Jae	251.298,00	0,00	240.350.000,00	40.800.000,00	74.779.000,00	12.000.000,00	112.771.000,00	240.350.000,00	22.500.000,00	14.887.000,00	0,00	7.613.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	251.298,00
101	SD NEGERI 173235 SARULLA	Pahae Jae	396.249,00	0,00	140.600.000,00	33.000.000,00	58.159.500,00	7.900.000,00	41.540.500,00	140.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.249,00
102	SD NEGERI 173237 PANGALOAN	Pahae Jae	156.281,00	0,00	63.650.000,00	13.200.000,00	22.632.000,00	0,00	27.818.000,00	63.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.281,00
103	SD NEGERI 173238 PANGALOAN	Pahae Jae	67.983,00	0,00	66.500.000,00	1.000.000,00	44.084.000,00	0,00	21.416.000,00	66.500.000,00	22.500.000,00	18.800.000,00	3.700.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	67.983,00
104	SD NEGERI 173239 PANGALOAN	Pahae Jae	143.766,00	0,00	55.100.000,00	16.200.000,00	22.036.000,00	0,00	16.864.000,00	55.100.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	143.766,00
105	SD NEGERI 173243 AEKBOTIK	Pahae Jae	478.973,00	0,00	115.900.000,00	20.400.000,00	62.152.000,00	20.000.000,00	13.348.000,00	115.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.973,00
106	SD NEGERI 173246 PAGARAN	Pahae Jae	292.276,00	0,00	38.950.000,00	11.694.000,00	27.256.000,00	0,00	0,00	38.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.276,00
107	SD NEGERI 173254 PAHAE JAE	Pahae Jae	53.735,00	0,00	77.900.000,00	15.600.000,00	50.665.000,00	0,00	11.635.000,00	77.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.735,00
108	SD NEGERI 174575 SARULLA	Pahae Jae	301.564,00	0,00	96.900.000,00	0,00	65.657.000,00	0,00	31.243.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.564,00
109	SD NEGERI 175750 PARDAMEAN	Pahae Jae	589.367,00	0,00	98.800.000,00	21.600.000,00	30.026.000,00	7.100.000,00	40.074.000,00	98.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	489.367,00
110	SD NEGERI 176335 SILANGKITANG	Pahae Jae	100.545,00	0,00	82.650.000,00	17.400.000,00	34.390.500,00	10.480.000,00	20.377.000,00	82.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	55.445,00
111	SD NEGERI 177037 AEKBULU	Pahae Jae	228.639,00	0,00	69.350.000,00	0,00	45.825.000,00	4.000.000,00	19.525.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.639,00

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Kas BOS	Penerimaan BOS REGULER	Realisasi Belanja dana BOS Reguler TAHUN 2025				Total Belanja	Penerimaan boskin	Realisasi Belanja dana BOS Kinerja TAHUN 2025			Total Belanja	Autodebit ke Kasda	Belanja Lainnya (Biaya Admin)	Saldo Akhir
						BELANJA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA			BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
112	SD NEGERI 177656 SIMARPINGGAN	Pahae Jae	644.447,00	0,00	26.600.000,00	7.800.000,00	18.300.000,00	0,00	500.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.447,00
113	SD NEGERI 173255 SIMARDANGIANG	Pahae Julu	253.938,00	0,00	78.850.000,00	15.900.000,00	47.379.000,00	0,00	15.571.000,00	78.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.938,00
114	SD NEGERI 173256 LOBUPINING	Pahae Julu	622.611,00	0,00	38.950.000,00	7.800.000,00	19.819.000,00	1.696.000,00	9.635.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.611,00
115	SD NEGERI 173257 SIMATANIARI	Pahae Julu	323.652,00	0,00	90.972.000,00	24.822.000,00	41.870.000,00	0,00	24.280.000,00	90.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.652,00
116	SD NEGERI 173259 PEARAJA	Pahae Julu	186.156,00	0,00	114.000.000,00	33.120.000,00	58.715.000,00	0,00	21.990.000,00	113.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.156,00
117	SD NEGERI 173260 SIGOMPULON	Pahae Julu	168.699,00	0,00	79.800.000,00	19.800.000,00	33.568.500,00	0,00	26.431.500,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.699,00
118	SD NEGERI 173262 LUMBANGARAGA	Pahae Julu	356.796,00	0,00	86.450.000,00	22.440.000,00	30.770.500,00	10.000.000,00	23.239.500,00	86.450.000,00	22.500.000,00	17.064.000,00	1.000.000,00	4.436.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	356.796,00
119	SD NEGERI 173263 SIMANAMPANG	Pahae Julu	184.871,00	0,00	51.300.000,00	14.100.000,00	29.312.000,00	100.000,00	7.788.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	174.871,00
120	SD NEGERI 173264 SIBAGANDING	Pahae Julu	55.329,00	0,00	65.550.000,00	16.940.000,00	44.035.000,00	375.000,00	4.080.000,00	65.430.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	175.329,00
121	SD NEGERI 173265 ONAN HASANG	Pahae Julu	514.985,00	0,00	103.550.000,00	25.800.000,00	39.710.500,00	20.800.000,00	17.239.500,00	103.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.985,00
122	SD NEGERI 173266 PANTIS	Pahae Julu	182.622,00	0,00	71.250.000,00	15.480.000,00	36.179.000,00	1.500.000,00	18.091.000,00	71.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.622,00
123	SD NEGERI 173267 SITOLUAMA	Pahae Julu	494.626,00	0,00	41.800.000,00	7.140.000,00	25.712.000,00	1.952.000,00	6.996.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.626,00
124	SD NEGERI 173268 SIMASOM	Pahae Julu	339.678,00	0,00	39.900.000,00	10.080.000,00	18.995.000,00	0,00	10.825.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.678,00
125	SD NEGERI 173269 PAHAE JULU	Pahae Julu	117.151,00	0,00	82.650.000,00	22.020.000,00	35.330.000,00	9.700.000,00	15.600.000,00	82.650.000,00	22.500.000,00	18.600.000,00	0,00	3.900.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	117.151,00
126	SD NEGERI 174577 SIBAGANDING	Pahae Julu	145.694,00	0,00	56.050.000,00	16.380.000,00	35.250.000,00	0,00	4.420.000,00	56.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.267,00	0,00	97.427,00
127	SD NEGERI 175752 LUMBAN GAOL	Pahae Julu	235.354,00	0,00	64.600.000,00	12.000.000,00	33.135.000,00	10.400.000,00	9.065.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.354,00
128	SD NEGERI 175753 ONAN HASANG	Pahae Julu	536.150,00	0,00	52.250.000,00	16.020.000,00	17.665.000,00	8.000.000,00	10.565.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.150,00
129	SD NEGERI 175754 SIPARPAR	Pahae Julu	64.629,00	0,00	68.400.000,00	15.840.000,00	29.834.000,00	8.161.000,00	14.565.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.629,00
130	SD NEGERI 176336 PANGURDOTAN	Pahae Julu	574.292,00	0,00	56.050.000,00	4.200.000,00	38.970.000,00	10.500.000,00	2.380.000,00	56.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.292,00
131	SD NEGERI 177035 LONTUNG DOLOK	Pahae Julu	276.927,00	0,00	102.600.000,00	22.740.000,00	52.931.000,00	10.287.000,00	16.642.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.927,00
132	SD NEGERI 177036 LUMBAN GAOL	Pahae Julu	189.906,00	0,00	48.450.000,00	12.000.000,00	25.950.000,00	10.500.000,00	0,00	48.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.906,00
133	SD NEGERI 176555 SIMASOM	Pahae Julu	66.187,00	0,00	45.600.000,00	10.760.000,00	16.575.000,00	7.800.000,00	10.465.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.187,00
134	SD NEGERI 177923 PARIKMATIA	Pahae Julu	614.272,00	0,00	25.650.000,00	3.600.000,00	14.426.000,00	600.000,00	7.024.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.272,00
135	SD NEGERI 173191 LUMBAN SORMIN	Pangaribuan	2.120.400,00	0,00	90.250.000,00	16.400.000,00	61.750.000,00	1.200.000,00	10.900.000,00	90.250.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	2.050.000,00	0,00	70.400,00
136	SD NEGERI 173192 HARIANJA	Pangaribuan	69.098,00	499.098,00	65.550.000,00	12.000.000,00	44.008.500,00	1.100.000,00	8.441.500,00	65.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.098,00	0,00	69.098,00
137	SD NEGERI 173193 PARSIBARUNGAN	Pangaribuan	290.821,00	0,00	122.550.000,00	18.000.000,00	58.972.000,00	16.000.000,00	29.578.000,00	122.550.000,00	22.500.000,00	17.043.000,00	1.000.000,00	4.457.000,00	22.500.000,00	209.980,00	0,00	80.841,00
138	SD NEGERI 173194 BATUMANUMPAK	Pangaribuan	1.618.702,00	0,00	137.750.000,00	18.000.000,00	92.453.000,00	0,00	26.870.000,00	137.323.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	426.987,00	0,00	1.618.715,00
139	SD NEGERI 173195 BATUNADUA	Pangaribuan	50.657,00	58.186,00	95.950.000,00	10.800.000,00	67.598.000,00	510.000,00	17.042.000,00	95.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,00	0,00	50.657,00
140	SD NEGERI 173196 LUMBAN SINAGA	Pangaribuan	1.478.633,00	0,00	80.750.000,00	24.000.000,00	42.591.000,00	1.300.000,00	12.859.000,00	80.750.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.400.000,00	0,00	78.633,00
141	SD NEGERI 173197 RAHUTBOSI	Pangaribuan	2.843.792,00	2.324.500,00	171.000.000,00	35.100.000,00	86.899.500,00	9.000.000,00	37.676.000,00	168.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.500,00	0,00	5.168.292,00
142	SD NEGERI 173198 PANSURNATOLU	Pangaribuan	192.713,00	0,00	156.750.000,00	20.400.000,00	88.892.000,00	4.200.000,00	43.198.000,00	156.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	192.713,00
143	SD NEGERI 173199 SILANTOM JULU	Pangaribuan	418.500,00	0,00	121.600.000,00	36.450.000,00	47.941.000,00	14.800.000,00	22.409.000,00	121.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.640,00	0,00	58.860,00
144	SD NEGERI 173200 SILANTOM TONGA	Pangaribuan	447.526,00	0,00	99.750.000,00	28.340.000,00	58.160.000,00	1.440.000,00	11.810.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	412.526,00
145	SD NEGERI 173201 PADANG PARSADAA	Pangaribuan	513.016,00	0,00	105.450.000,00	0,00	63.430.000,00	16.200.000,00	25.820.000,00	105.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.016,00
146	SD NEGERI 173202 PASAR BARU	Pangaribuan	203.240,00	0,00	84.550.000,00	22.800.000,00	49.531.000,00	0,00	12.219.000,00	84.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.240,00
147	SD NEGERI 173203 PURBATUA	Pangaribuan	5.396.882,00	4.900.000,00	96.900.000,00	17.400.000,00	51.729.000,00	1.650.000,00	26.121.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	5.396.882,00
148	SD NEGERI 173204 NAJUMAMBE	Pangaribuan	1.881.380,00	0,00	92.150.000,00	22.920.000,00	49.641.000,00	0,00	19.589.000,00	92.150.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	566.400,00	0,00	1.314.980,00
149	SD NEGERI 173206 SIBINGKE	Pangaribuan	126.698,00	2.570.000,00	137.750.000,00	10.800.000,00	81.116.000,00	1.100.000,00	44.734.000,00	137.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,00	126.698,00
150	SD NEGERI 173207 PARLOMBUAN	Pangaribuan	166.717,00	0,00	106.400.000,00	33.000.000,00	50.285.000,00	0,00	23.115.000,00	106.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	166.717,00
151	SD NEGERI 173208 SIGOTOM	Pangaribuan	3.823.059,00	0,00	203.300.000,00	53.700.000,00	102.830.000,00	16.360.000,00	30.410.000,00	203.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	43.059,00
152	SD NEGERI 173209 SIGOTOM	Pangaribuan	701.190,00	0,00	117.800.000,00	16.800.000,00	63.170.000,00	6.300.000,00	31.530.000,00	117.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	301.190,00
153	SD NEGERI 173210 SIGOTOM	Pangaribuan	1.234.010,00	0,00	99.750.000,00	21.900.000,00	67.495.000,00	1.280.000,00	9.075.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.010,00
154	SD NEGERI 173212 LOBUGOTI	Pangaribuan	204.597,00	0,00	84.550.000,00	25.230.000,00	32.598.000,00	10.000.000,00	16.722.000,00	84.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.597,00
155	SD NEGERI 173213 SIBUDIL	Pangaribuan	352.982,00	0,00	65.550.000,00	14.100.000,00	26.845.000,00	12.665.000,00	11.940.000,00	65.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	212.982,00
156	SD NEGERI 173214 PANGARIBUAN	Pangaribuan	87.342,00	0,00	52.250.000,00	11.700.000,00	27.799.000,00	6.650.000,00	6.101.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.342,00
157	SD NEGERI 174583 SIGOTOM JULU	Pangaribuan	57.697,00	0,00	127.300.000,00	14.400.000,00	93.720.000,00	8.000.000,00	11.180.000,00	127.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.697,00
158	SD NEGERI 174584 PARSORMINAN	Pangaribuan	1.558.640,00	0,00	133.950.000,00	25.800.000,00	48.537.000,00	3.150.000,00	56.463.000,00	133.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	58.640,00
159	SD NEGERI 174585 LUMBAN SINAGA	Pangaribuan	100.173,00	0,00	91.200.000,00	10.800.000,00	61.951.000,00	10.000.000,00	8.449.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.173,00
160	SD NEGERI 175759 SIREGAR	Pangaribuan	89.997,00	1.100.000,00	62.700.000,00	15.000.000,00	36.281.000,00	1.100.000,00	10.319.000,00	62.700.000,00	22.500.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00	0,00	22.500.000,00	1.100.000,00	0,00	89.997,00
161	SD NEGERI 175760 BATUMANUMPAK	Pangaribuan	201.979,00	0,00	98.800.000,00	23.100.000,00	53.348.000,00	10.000.000,00	12.352.000,00	98.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.979,00
162	SD NEGERI 175761 PULO PAKPAHAN	Pangaribuan	102.338,00	3.696.000,00	154.850.000,00	29.900.000,00	85.159.000,00	18.454.000,00	21.337.000,00	154.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696.000,00	0,00	102.338,00
163	SD NEGERI 175762 PANSURBATU	Pangaribuan	1.720.000,00	0,00	133.000.000,00	0,00	75.690.000,00	1.300.000,00	55.810.000,00	132.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	240.000,00
164	SD NEGERI 175857 PARSORMINAN	Pangaribuan	93.689,00	900.000,00	67.450.000,00	11.400.000,00	35.220.000,00	1.250.000,00	18.680.000,00	66.550.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	900.000,00	0,00	993.689,00
165	SD NEGERI 176340 BATUNADUA	Pangaribuan	59.023,00	0,00	50.350.000,00	12.960.000,00	27.338.000,00	4.200.000,00	5.852.000,00	50.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.023,00
166	SD NEGERI 176341 LOBUGALA	Pangaribuan	678.014,00	0,00	23.750.000,00	0,00	23.648.500,00	0,00	0,00	23.648.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.514,00
167	SD NEGERI 176498 SIOMAOMA	Pangaribuan	129.968,00	0,00	37.050.000,00	0,00	33.336.000,00	1.800.000,00	1.914.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.968,00
168	SD NEGERI 177659 HUTARAJA	Pangaribuan	803.956,00	0,00	41.800.000,00	3.600.000,00	33.820.000,00	450.000,00	3.930.000,00	41.800.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	803.956,00
169	SD NEGERI 178414 SILANTOM JAE	Pangaribuan	490.254,00	0,00	33.250.000,00	6.600.000,00	23.610.000,00	0,00	3.040.000,00	33.250.000,00	22.500.000,00	18.000.000,00	0,00	4.500.000,00	22.500.000,00	69.955,00	0,00	420.299,00
170	SD NEGERI 173366 PARMONANGAN	Parmonangan	1.061.311,00	0,00	47.500.000,00	13.134.000,00	20.021.000,00	300.000,00	14.045.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.311,00
171	SD NEGERI 173367 SISODING	Parmonangan	269.430,00	0,00	40.850.000,00	11.280.000,00	17.551.000,00	1.200.000,00	10.819.000,00	40.850.000,00	22.500.000,00	19.500.000,00	3.000.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	269.430,00

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Kas BOS	Penerimaan BOS REGULER	Realisasi Belanja dana BOS Reguler TAHUN 2025				Total Belanja	Penerimaan boskin	Realisasi Belanja dana BOS Kinerja TAHUN 2025			Total Belanja	Autodebit ke Kasda	Belanja Lainnya (Biaya Admin)	Saldo Akhir
						BELANJA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA			BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
172	SD NEGERI 173368 TORNAULI	Parmonangan	109.952,00	0,00	36.100.000,00	8.400.000,00	20.716.000,00	0,00	6.984.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.952,00
173	SD NEGERI 173369 RANGGITGIT	Parmonangan	85.597,00	0,00	77.900.000,00	24.576.000,00	36.762.000,00	1.900.000,00	14.662.000,00	77.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.597,00
174	SD NEGERI 173370 DOLOK NAULI	Parmonangan	3.608.768,00	0,00	77.900.000,00	28.770.000,00	28.382.500,00	12.600.000,00	8.147.500,00	77.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	258.768,00
175	SD NEGERI 173372 SIURNGAK	Parmonangan	321.547,00	0,00	64.980.000,00	13.800.000,00	34.504.000,00	14.450.000,00	2 226.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.547,00
176	SD NEGERI 173373 SIDONDAMON	Parmonangan	490.347,00	0,00	64.980.000,00	20.880.000,00	22.722.000,00	14.700.000,00	6.383.000,00	64.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.347,00
177	SD NEGERI 173374 SIMARSALAON	Parmonangan	614.601,00	0,00	64.980.000,00	14.100.000,00	33.644.500,00	12.200.000,00	5.035.500,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.601,00
178	SD NEGERI 173376 HUTABATU	Parmonangan	289.351,00	0,00	94.221.000,00	24.300.000,00	44.043.000,00	0,00	25.878.000,00	94.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.351,00
179	SD NEGERI 173377 BATUARIMO	Parmonangan	340.655,00	0,00	64.980.000,00	14.880.000,00	21.152.000,00	16.500.000,00	12.658.000,00	65.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.655,00
180	SD NEGERI 173378 SIHAPORAS	Parmonangan	1.991.028,00	0,00	64.980.000,00	21.098.000,00	22.899.000,00	10.000.000,00	10.983.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.028,00
181	SD NEGERI 173379 DANO JULU	Parmonangan	912.680,00	0,00	64.980.000,00	19.458.000,00	26.487.500,00	6.000.000,00	13.034.500,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.680,00
182	SD NEGERI 173380 HUTATUA	Parmonangan	47.028,00	0,00	64.980.000,00	9.600.000,00	38.480.000,00	15.200.000,00	1.700.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.028,00
183	SD NEGERI 173381 AEKRAJA	Parmonangan	206.442,00	0,00	124.450.000,00	16.644.000,00	78.797.600,00	9.650.000,00	19.358.400,00	124.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.442,00
184	SD NEGERI 173382 HUTA TINGGI	Parmonangan	94.098,00	0,00	84.550.000,00	18.000.000,00	44.397.000,00	6.895.000,00	15.258.000,00	84.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	54.098,00
185	SD NEGERI 173383 HUTA TINGGI	Parmonangan	89.380,00	0,00	60.800.000,00	0,00	43.117.000,00	10.000.000,00	7.683.000,00	60.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.380,00
186	SD NEGERI 173384 LOBUSUNUT	Parmonangan	200.150,00	0,00	68.400.000,00	16.800.000,00	40.751.000,00	0,00	10.849.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.150,00
187	SD NEGERI 173385 GONTING	Parmonangan	517.985,00	0,00	87.400.000,00	26.700.000,00	39.607.000,00	7.500.000,00	13.593.000,00	87.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.985,00
188	SD NEGERI 173390 BONANDOLOK	Parmonangan	133.680,00	0,00	50.350.000,00	15.600.000,00	23.319.000,00	0,00	11.431.000,00	50.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.680,00
189	SD NEGERI 173391 SIHOPONG	Parmonangan	99.804,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.075.000,00	0,00	425.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.804,00
190	SD NEGERI 173392 PARMONANGAN	Parmonangan	2.918.410,00	0,00	47.500.000,00	13.080.000,00	20.825.500,00	310.000,00	13.284.500,00	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	878.410,00
191	SD NEGERI 174541 AEKRAJA	Parmonangan	1.601.724,00	0,00	111.150.000,00	26.520.000,00	81.396.000,00	0,00	3.234.000,00	111.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.724,00
192	SD NEGERI 175766 BONANIONAN	Parmonangan	3.135.947,00	0,00	78.850.000,00	13.800.000,00	27.667.000,00	21.300.000,00	16.083.000,00	78.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	935.947,00
193	SD NEGERI 175767 HUTA JULU	Parmonangan	15.050.328,00	0,00	72.200.000,00	18.900.000,00	42.945.000,00	10.000.000,00	0,00	71.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405.328,00
194	SD NEGERI 175768 PURBATORUAN	Parmonangan	588.623,00	0,00	87.723.000,00	20.640.000,00	43.241.000,00	8.900.000,00	14.942.000,00	87.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.623,00
195	SD NEGERI 176348 HUTAJULU	Parmonangan	1.041.344,00	0,00	64.980.000,00	13.338.000,00	42.172.000,00	3.000.000,00	5.580.000,00	64.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.344,00
196	SD NEGERI 176500 PARRATUSAN	Parmonangan	875.738,00	0,00	56.050.000,00	14.400.000,00	28.069.000,00	6.555.000,00	7.026.000,00	56.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.738,00
197	SD NEGERI 177048 SITONGGITONGGI	Parmonangan	86.590,00	0,00	24.700.000,00	8.766.000,00	15.594.000,00	0,00	340.000,00	24.700.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	86.590,00
198	SD NEGERI 177049 PARIK	Parmonangan	54.555,00	0,00	64.980.000,00	18.000.000,00	42.565.000,00	2.000.000,00	2.415.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.555,00
199	SD NEGERI 177931 TUMUS	Parmonangan	184.319,00	0,00	64.980.000,00	12.498.000,00	45.692.500,00	2.200.000,00	4.589.500,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.319,00
200	SD NEGERI 178215 SIMARGALUNG	Parmonangan	144.072,00	0,00	31.350.000,00	9.132.000,00	19.753.000,00	0,00	2.465.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	94.072,00
201	SD NEGERI 178416 SIMOTUNG	Parmonangan	136.084,00	0,00	64.980.000,00	11.880.000,00	39.070.000,00	7.468.000,00	6.562.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.084,00
202	SD NEGERI 173240 JANJI ANGKOLA	Purbatua	608.436,00	0,00	150.100.000,00	30.120.000,00	43.399.505,00	13.400.000,00	62.980.500,00	149.900.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.996,00	0,00	608.435,00
203	SD NEGERI 173241 JANJI ANGKOLA	Purbatua	107.435,00	1.000.000,00	80.142.000,00	15.900.000,00	30.202.000,00	1.490.000,00	32.550.000,00	80.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	107.435,00
204	SD NEGERI 173244 SIUNGGAS JAE	Purbatua	4.934.873,00	0,00	76.000.000,00	15.000.000,00	26.458.000,00	15.800.000,00	18.742.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.873,00
205	SD NEGERI 173245 SIUNGGAS JULU	Purbatua	1.553.561,00	0,00	125.400.000,00	25.680.000,00	55.227.000,00	1.500.000,00	42.993.000,00	125.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.561,00
206	SD NEGERI 173248 LOBU HARAMBIR	Purbatua	282.711,00	0,00	35.150.000,00	9.540.000,00	21.006.000,00	0,00	4.604.000,00	35.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.711,00
207	SD NEGERI 173249 SIBULANBULAN	Purbatua	244.835,00	0,00	67.450.000,00	15.600.000,00	29.050.000,00	1.200.000,00	21.600.000,00	67.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.835,00
208	SD NEGERI 175751 PURBA TUA	Purbatua	52.586,00	0,00	48.450.000,00	12.945.000,00	24.968.000,00	2.676.000,00	7.861.000,00	48.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.586,00
209	SD NEGERI 176333 JANJI NAULI	Purbatua	250.000,00	0,00	85.557.000,00	17.553.000,00	30.624.000,00	16.100.000,00	21.280.000,00	85.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
210	SD NEGERI 177038 ROBEAN	Purbatua	50.104,00	0,00	42.750.000,00	0,00	26.685.000,00	3.600.000,00	12.465.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.104,00
211	SD NEGERI 178210 PARDOMUAN	Purbatua	84.191,00	0,00	158.650.000,00	38.064.000,00	100.056.000,00	10.500.000,00	10.030.000,00	158.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.191,00
212	SD NEGERI 173112 HUTAGALUNG	Siatas Barita	1.748.953,00	0,00	133.950.000,00	19.800.000,00	60.601.000,00	7.975.000,00	45.574.000,00	133.950.000,00	22.500.000,00	12.670.000,00	4.700.000,00	5.130.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	1.748.953,00
213	SD NEGERI 173113 SIMORANGKIR	Siatas Barita	73.124,00	0,00	84.550.000,00	16.200.000,00	38.034.000,00	11.600.000,00	18.716.000,00	84.550.000,00	22.500.000,00	12.790.000,00	6.800.000,00	2.910.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	73.124,00
214	SD NEGERI 173115 SITOMPUL	Siatas Barita	87.688,00	0,00	165.300.000,00	32.400.000,00	80.501.500,00	0,00	52.398.500,00	165.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.688,00
215	SD NEGERI 173116 PANSUR NAPITU	Siatas Barita	52.010,00	0,00	34.200.000,00	9.087.000,00	17.741.000,00	0,00	7.372.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.010,00
216	SD NEGERI 173117 PANSUR NAPITU	Siatas Barita	55.295,00	0,00	65.550.000,00	10.776.000,00	47.264.000,00	30.000,00	7.480.000,00	65.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.295,00
217	SD NEGERI 173125 ONAN GADUGADU	Siatas Barita	170.324,00	0,00	84.550.000,00	12.600.000,00	39.175.000,00	10.700.000,00	22.075.000,00	84.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	120.324,00
218	SD NEGERI 173127 SIMANAMPANG	Siatas Barita	101.261,00	0,00	75.050.000,00	25.200.000,00	26.433.500,00	2.200.000,00	21.216.500,00	75.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100.261,00
219	SD NEGERI 173128 SIDAGAL	Siatas Barita	1.032.486,00	0,00	86.450.000,00	20.640.000,00	39.284.000,00	16.923.000,00	9.603.000,00	86.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.486,00
220	SD NEGERI 174567 PANSURNAPITU	Siatas Barita	98.457,00	0,00	156.750.000,00	34.200.000,00	46.650.000,00	15.600.000,00	60.300.000,00	156.750.000,00	22.500.000,00	11.593.186,00	5.744.814,00	5.162.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	98.457,00
221	SD NEGERI 174568 SIMORANGKIR	Siatas Barita	89.927,00	0,00	165.300.000,00	30.000.000,00	65.820.500,00	5.180.000,00	64.299.500,00	165.300.000,00	22.500.000,00	13.220.000,00	4.440.000,00	4.840.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	89.927,00
222	SD NEGERI 176328 GONTINGPEGE	Siatas Barita	103.585,00	0,00	88.350.000,00	29.835.000,00	27.398.000,00	15.500.000,00	15.552.000,00	88.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.585,00
223	SD NEGERI 177029 HUTA NAMORA	Siatas Barita	138.249,00	0,00	109.250.000,00	27.720.000,00	81.530.000,00	0,00	0,00	109.250.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	138.249,00
224	SD NEGERI 177650 LUMBAHOLBUNG	Siatas Barita	60.859,00	0,00	61.750.000,00	13.800.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	61.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.859,00
225	SD NEGERI 173270 SIBORONGBORONG	Siborongborong	517.597,00	0,00	349.600.000,00	49.200.000,00	136.411.000,00	49.850.000,00	114.139.000,00	349.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.597,00
226	SD NEGERI 173271 SIBORONGBORONG	Siborongborong	2.793.604,00	0,00	365.750.000,00	76.750.000,00	110.353.000,00	2.150.000,00	176.497.000,00	365.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793.604,00
227	SD NEGERI 173272 SIBORONGBORONG	Siborongborong	96.680,00	0,00	150.100.000,00	14.250.000,00	82.927.000,00	25.500.000,00	27.423.000,00	150.100.000,00	22.500.000,00	16.428.000,00	0,00	6.072.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	96.680,00
228	SD NEGERI 173273 SIBORONGBORONG	Siborongborong	179.498,00	0,00	176.700.000,00	7.200.000,00	85.229.000,00	18.100.000,00	66.171.000,00	176.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.498,00
229	SD NEGERI 173274 SIBORONGBORONG	Siborongborong	1.989.042,00	0,00	317.300.000,00	23.500.000,00	201.550.300,00	39.980.000,00	52.269.700,00	317.300.000,00	22.500.000,00	14.666.000,00	0,00	7.834.000,00	22.500.000,00	1.905.000,00	0,00	84.042,00
230	SD NEGERI 173275 HARIARA	Siborongborong	80.201,00	0,00	129.200.000,00	6.000.000,00	70.955.000,00	0,00	52.245.000,00	129.200.000,00	22.500.000,00	13.697.000,00	0,00	8.803.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	80.201,00
231	SD NEGERI 173276 HUTASOIT PARDOMU	Siborongborong	4.230.007,00	0,00	278.350.000,00	50.400.000,00	111.779.300,00	19.400.000,00	96.770.700,00	278.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.028,00	0,00	50.979,00

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Kas BOS	Penerimaan BOS REGULER	Realisasi Belanja dana BOS Reguler TAHUN 2025				Total Belanja	Penerimaan boskin	Realisasi Belanja dana BOS Kinerja TAHUN 2025			Total Belanja	Autodebit ke Kasda	Belanja Lainnya (Biaya Admin)	Saldo Akhir
						BELANJA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA			BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
232	SD NEGERI 173277 POHAN TONGA	Siborongborong	766.706,00	0,00	169.100.000,00	28.800.000,00	89.371.000,00	800.000,00	50.129.000,00	169.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.300,00	0,00	67.406,00
233	SD NEGERI 173280 LOBU SIREGAR	Siborongborong	7.870.852,00	0,00	186.200.000,00	38.400.000,00	73.751.000,00	18.800.000,00	55.249.000,00	186.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.852,00
234	SD NEGERI 173281 LUMBAN JULU	Siborongborong	52.047,00	0,00	122.550.000,00	28.800.000,00	78.514.000,00	400.000,00	14.836.000,00	122.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.047,00
235	SD NEGERI 173282 SIMAROMPUOMPU	Siborongborong	3.817.919,00	0,00	89.300.000,00	14.400.000,00	51.560.000,00	400.000,00	22.940.000,00	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.919,00
236	SD NEGERI 173283 SIANJUR	Siborongborong	8.590.836,00	0,00	144.400.000,00	33.400.000,00	42.164.000,00	8.400.000,00	60.436.000,00	144.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590.836,00
237	SD NEGERI 173284 SIHATANDOHAN	Siborongborong	241.726,00	0,00	89.300.000,00	11.640.000,00	43.529.500,00	13.300.000,00	20.830.500,00	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	21.726,00
238	SD NEGERI 173285 PARIKSABUNGAN	Siborongborong	1.679.615,00	0,00	98.800.000,00	27.270.000,00	60.099.000,00	1.550.000,00	9.881.000,00	98.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	39.615,00
239	SD NEGERI 173286 POKKI	Siborongborong	96.466,00	0,00	37.050.000,00	12.300.000,00	23.017.000,00	0,00	1.733.000,00	37.050.000,00	22.500.000,00	17.042.000,00	0,00	5.458.000,00	22.500.000,00	50.000,00	0,00	46.466,00
240	SD NEGERI 173287 HUTABULU	Siborongborong	5.027.462,00	0,00	89.300.000,00	14.880.000,00	62.548.000,00	0,00	11.872.000,00	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.462,00
241	SD NEGERI 173289 NAGASARIBU	Siborongborong	2.743.457,00	0,00	53.200.000,00	0,00	44.644.000,00	0,00	8.556.000,00	53.200.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	2.743.457,00
242	SD NEGERI 173294 PAMANSURAN	Siborongborong	84.514,00	0,00	73.150.000,00	21.000.000,00	37.582.000,00	850.000,00	13.705.000,00	73.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.514,00
243	SD NEGERI 173297 SIGUMBANG	Siborongborong	94.477,00	0,00	131.100.000,00	31.110.000,00	68.590.000,00	0,00	31.400.000,00	131.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.477,00
244	SD NEGERI 173298 SITABOTABO	Siborongborong	368.301,00	0,00	168.150.000,00	33.630.000,00	71.503.700,00	4.500.000,00	58.516.300,00	168.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	124.301,00
245	SD NEGERI 173299 PANIARAN	Siborongborong	953.683,00	0,00	151.050.000,00	19.800.000,00	51.590.500,00	5.000.000,00	74.659.500,00	151.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.683,00
246	SD NEGERI 173300 LUMBAN TONGATON	Siborongborong	724.752,00	0,00	95.950.000,00	24.900.000,00	37.754.900,00	0,00	33.295.100,00	95.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	59.752,00
247	SD NEGERI 173301 LUMBANTONGATON	Siborongborong	270.943,00	0,00	142.500.000,00	37.950.000,00	66.664.160,00	0,00	37.878.000,00	142.492.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.764,00	0,00	230.019,00
248	SD NEGERI 173302 BAHAL BATU	Siborongborong	248.291,00	0,00	209.000.000,00	32.400.000,00	94.932.000,00	5.449.000,00	76.219.000,00	209.000.000,00	22.500.000,00	12.978.000,00	0,00	9.522.000,00	22.500.000,00	200.000,00	0,00	48.291,00
249	SD NEGERI 173303 GONTING	Siborongborong	54.040,00	0,00	78.850.000,00	15.000.000,00	34.295.000,00	3.900.000,00	25.655.000,00	78.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.040,00
250	SD NEGERI 173304 LUMBAN HOLBUNG	Siborongborong	1.922.824,00	0,00	128.250.000,00	18.216.000,00	47.146.000,00	30.475.000,00	32.413.000,00	128.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	22.824,00
251	SD NEGERI 173310 HUTAGINJANG	Siborongborong	83.940,00	0,00	33.250.000,00	8.640.000,00	19.492.000,00	0,00	5.118.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.940,00
252	SD NEGERI 173311 SIBORONGBORONG	Siborongborong	1.887.977,00	0,00	109.250.000,00	26.400.000,00	82.350.000,00	500.000,00	0,00	109.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.977,00
253	SD NEGERI 174529 SIGUMBANG	Siborongborong	3.275.790,00	0,00	131.100.000,00	25.200.000,00	68.809.500,00	4.500.000,00	32.590.500,00	131.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.265.790,00
254	SD NEGERI 174530 SIAMBOLAS	Siborongborong	96.189,00	0,00	96.900.000,00	6.780.000,00	70.356.850,00	250.000,00	19.513.150,00	96.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.189,00
255	SD NEGERI 175770 SITAMPURUNG	Siborongborong	88.005,00	0,00	95.000.000,00	14.400.000,00	55.945.500,00	1.266.000,00	23.388.500,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.005,00
256	SD NEGERI 175771 SIARO	Siborongborong	50.610,00	0,00	72.200.000,00	17.350.000,00	50.510.000,00	400.000,00	3.940.000,00	72.200.000,00	22.500.000,00	13.630.000,00	0,00	8.870.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	50.610,00
257	SD NEGERI 175773 LUMBAN HOLBUNG	Siborongborong	830.939,00	0,00	130.150.000,00	34.200.000,00	70.483.000,00	1.925.000,00	23.542.000,00	130.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.400,00	0,00	69.539,00
258	SD NEGERI 176343 HARIARA SILABAN	Siborongborong	241.056,00	0,00	82.627.500,00	16.800.000,00	42.704.000,00	3.350.000,00	19.796.000,00	82.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	18.556,00
259	SD NEGERI 176344 AEKMAS	Siborongborong	57.796,00	0,00	53.200.000,00	13.716.000,00	39.484.000,00	0,00	0,00	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.796,00
260	SD NEGERI 176499 BUKIT NANGGE	Siborongborong	59.800,00	0,00	45.600.000,00	8.700.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	10.000,00	49.800,00
261	SD NEGERI 177045 PEALANGGE	Siborongborong	243.183,00	0,00	153.900.000,00	13.620.000,00	78.795.900,00	1.440.000,00	60.044.100,00	153.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	68.183,00
262	SD NEGERI 177047 SILANGIT	Siborongborong	189.287,00	0,00	175.750.000,00	27.800.000,00	71.129.600,00	22.560.000,00	54.154.000,00	175.643.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.687,00
263	SD NEGERI 177661 SITABOTABO TORUA	Siborongborong	32.630,00	0,00	56.050.000,00	5.160.000,00	42.686.800,00	250.000,00	7.953.200,00	56.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.630,00
264	SD NEGERI 177928 PURBASINOMBA	Siborongborong	55.401,00	0,00	115.900.000,00	17.400.000,00	72.238.000,00	0,00	26.262.000,00	115.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.401,00
265	SD NEGERI 178213 PEARAJA	Siborongborong	590.790,00	0,00	72.200.000,00	12.800.000,00	41.055.000,00	0,00	18.345.000,00	72.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.790,00
266	SD NEGERI 178314 SIBORONGBORONG	Siborongborong	3.856.970,00	0,00	155.800.000,00	21.450.000,00	62.982.000,00	24.100.000,00	47.268.000,00	155.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.970,00
267	SD NEGERI 173242 SIMANGUMBAN	Simangumban	2.634.471,00	0,00	107.350.000,00	18.900.000,00	70.630.000,00	0,00	17.820.000,00	107.350.000,00	22.500.000,00	18.640.000,00	0,00	3.860.000,00	22.500.000,00	10.000,00	0,00	2.624.471,00
268	SD NEGERI 173247 AEKSAH	Simangumban	1.165.467,00	0,00	114.950.000,00	19.200.000,00	40.844.000,00	12.000.000,00	42.906.000,00	114.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.676,00	0,00	1.120.791,00
269	SD NEGERI 173250 MUARA TOLANG	Simangumban	1.391.151,00	0,00	109.250.000,00	21.600.000,00	63.012.000,00	0,00	24.238.000,00	108.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.391.151,00
270	SD NEGERI 173251 HOPONG	Simangumban	1.144.117,00	0,00	44.650.000,00	12.240.000,00	18.140.000,00	9.500.000,00	4.770.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	344.117,00
271	SD NEGERI 173252 PARDOMUAN	Simangumban	380.660,00	0,00	24.700.000,00	8.400.000,00	14.268.000,00	0,00	2.032.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.660,00
272	SD NEGERI 173253 LUMBAN GARAGA	Simangumban	495.149,00	0,00	35.150.000,00	12.192.000,00	15.064.000,00	2.100.000,00	5.794.000,00	35.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.149,00
273	SD NEGERI 174574 SIMANGUMBAN	Simangumban	50.000,00	0,00	104.500.000,00	27.600.000,00	48.774.000,00	1.200.000,00	26.926.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
274	SD NEGERI 174625 LOBUSIHIM	Simangumban	921.835,00	0,00	38.000.000,00	7.200.000,00	18.596.000,00	960.000,00	11.244.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.835,00
275	SD NEGERI 175749 AEKRAU	Simangumban	2.733.040,00	0,00	51.300.000,00	7.200.000,00	34.670.000,00	0,00	9.150.000,00	51.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	2.733.040,00
276	SD NEGERI 176334 LOSUNG AEK	Simangumban	987.330,00	0,00	86.450.000,00	11.400.000,00	40.986.000,00	19.050.000,00	15.014.000,00	86.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.330,00
277	SD NEGERI 177924 SILOSUNG	Simangumban	699.094,00	0,00	52.250.000,00	11.820.000,00	34.325.000,00	0,00	6.105.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	699.076,00
278	SD NEGERI 173165 SIPAHUTAR	Sipahutar	385.193,00	0,00	89.300.000,00	17.400.000,00	19.276.000,00	16.996.000,00	35.628.000,00	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.193,00
279	SD NEGERI 173166 SIPAHUTAR	Sipahutar	350.799,00	0,00	133.000.000,00	15.000.000,00	108.040.000,00	1.400.000,00	8.560.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	90.799,00
280	SD NEGERI 173167 ONANRUNGGU	Sipahutar	85.298,00	0,00	77.900.000,00	20.976.000,00	25.490.000,00	0,00	31.434.000,00	77.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.298,00
281	SD NEGERI 173168 ONANRUNGGU	Sipahutar	56.895,00	0,00	137.750.000,00	27.780.000,00	46.981.000,00	20.120.000,00	42.869.000,00	137.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.895,00
282	SD NEGERI 173169 TAPIAN NAULI	Sipahutar	340.586,00	0,00	103.550.000,00	0,00	69.936.000,00	6.000.000,00	27.614.000,00	103.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.730,00	0,00	70.856,00
283	SD NEGERI 173170 LUMBAN JULU	Sipahutar	509.693,00	0,00	91.200.000,00	20.400.000,00	37.125.000,00	40.000,00	33.635.000,00	91.200.000,00	22.500.000,00	18.655.000,00	0,00	3.845.000,00	22.500.000,00	450.000,00	0,00	59.693,00
284	SD NEGERI 173171 SIMARHOMPA	Sipahutar	240.108,00	260.000,00	77.900.000,00	7.500.000,00	59.653.000,00	0,00	10.747.000,00	77.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	240.108,00
285	SD NEGERI 173172 HUTAGURGUR	Sipahutar	56.321,00	0,00	65.550.000,00	17.040.000,00	36.093.000,00	0,00	12.417.000,00	65.550.000,00	22.500.000,00	16.990.000,00	0,00	5.510.000,00	22.500.000,00	24.000,00	0,00	32.321,00
286	SD NEGERI 173173 AEKNAULI	Sipahutar	132.796,00	0,00	77.900.000,00	15.710.000,00	45.150.000,00	0,00	17.040.000,00	77.900.000,00	22.500.000,00	19.798.000,00	0,00	2.702.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	132.796,00
287	SD NEGERI 173174 AEKNAULI	Sipahutar	1.143.444,00	0,00	136.800.000,00	20.400.000,00	94.371.500,00	1.500.000,00	20.528.500,00	136.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.444,00
288	SD NEGERI 173175 SIMARPINGGAN	Sipahutar	426.070,00	0,00	129.200.000,00	25.600.000,00	97.620.000,00	0,00	5.980.000,00	129.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.070,00
289	SD NEGERI 173176 LUMBAN LOBU	Sipahutar	1.070.024,00	0,00	128.250.000,00	12.720.000,00	51.059.000,00	10.000.000,00	54.471.000,00	128.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.024,00
290	SD NEGERI 173177 PARLOMBUAN	Sipahutar	202.291,00	0,00	77.900.000,00	26.276.000,00	28.434.447,00	0,00	23.155.000,00	77.865.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.553,00	0,00	202.291,00
291	SD NEGERI 173178 BONAN DOLOK	Sipahutar	361.159,00	0,00	114.798.000,00	26.400.000,00	72.627.500,00	4.100.000,00	11.670.500,00	114.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.159,00

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Kas BOS	Penerimaan BOS REGULER	Realisasi Belanja dana BOS Reguler TAHUN 2025				Total Belanja	Penerimaan boskin	Realisasi Belanja dana BOS Kinerja TAHUN 2025			Total Belanja	Autodebit ke Kasda	Belanja Lainnya (Biaya Admin)	Saldo Akhir
						BELANJA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA			BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
292	SD NEGERI 173179 DOLOK NAGODANG	Sipahutar	59.100,00	0,00	92.150.000,00	21.214.992,00	39.553.008,00	1.200.000,00	30.142.000,00	92.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
293	SD NEGERI 173180 LUMBAN RANG	Sipahutar	286.062,00	0,00	34.200.000,00	0,00	31.311.000,00	2.000.000,00	889.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.062,00
294	SD NEGERI 173181 LOBUTOLONG	Sipahutar	97.658,00	0,00	41.800.000,00	10.176.000,00	25.790.000,00	0,00	5.834.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.658,00
295	SD NEGERI 173182 LOBUTOLONG	Sipahutar	87.667,00	0,00	55.100.000,00	13.308.000,00	27.363.500,00	0,00	14.428.500,00	55.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.667,00
296	SD NEGERI 173183 ADIAN PADANG	Sipahutar	108.621,00	0,00	41.800.000,00	11.976.000,00	25.168.000,00	0,00	4.656.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.621,00
297	SD NEGERI 173184 ADIAN PADANG	Sipahutar	74.790,00	0,00	73.150.000,00	5.400.000,00	40.876.000,00	9.000.000,00	17.874.000,00	73.150.000,00	22.500.000,00	17.328.000,00	0,00	5.172.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	74.790,00
298	SD NEGERI 173185 HUTAMAMUNGKA	Sipahutar	2.440.401,00	0,00	76.893.000,00	6.840.000,00	67.254.500,00	500.000,00	2.298.500,00	76.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.401,00
299	SD NEGERI 173186 PANJAITAN	Sipahutar	922.499,00	0,00	62.700.000,00	16.198.000,00	34.566.000,00	500.000,00	11.436.000,00	62.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.499,00
300	SD NEGERI 173187 HADOMUAN	Sipahutar	177.473,00	0,00	38.950.000,00	8.040.000,00	22.055.000,00	300.000,00	8.555.000,00	38.950.000,00	22.500.000,00	19.085.000,00	0,00	3.415.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	177.473,00
301	SD NEGERI 173188 SOSOR SIAMPORIK	Sipahutar	523.449,00	0,00	64.980.000,00	20.880.000,00	41.173.000,00	0,00	2.927.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	498.449,00
302	SD NEGERI 173189 PARULIAN	Sipahutar	445.969,00	0,00	81.700.000,00	21.600.000,00	28.254.000,00	3.070.000,00	28.776.000,00	81.700.000,00	22.500.000,00	15.534.000,00	0,00	6.966.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	445.969,00
303	SD NEGERI 173190 SIPAHUTAR	Sipahutar	104.551,00	0,00	83.600.000,00	8.940.000,00	46.370.000,00	13.855.000,00	14.435.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.551,00
304	SD NEGERI 174581 SIPAHUTAR	Sipahutar	59.992,00	0,00	281.200.000,00	11.640.000,00	120.341.000,00	62.700.000,00	86.519.000,00	281.200.000,00	22.500.000,00	16.324.000,00	0,00	6.176.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	59.992,00
305	SD NEGERI 174582 SITAPONGAN	Sipahutar	383.733,00	0,00	107.350.000,00	15.600.000,00	66.945.000,00	12.350.000,00	12.455.000,00	107.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.733,00
306	SD NEGERI 175755 LUMBAN BIRU	Sipahutar	488.371,00	0,00	60.800.000,00	11.370.000,00	37.396.000,00	0,00	12.034.000,00	60.800.000,00	22.500.000,00	19.798.000,00	0,00	2.702.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	488.371,00
307	SD NEGERI 175756 SIMARHOMPA	Sipahutar	130.594,00	0,00	39.900.000,00	6.390.000,00	18.072.000,00	0,00	15.438.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.594,00
308	SD NEGERI 175757 SILIMABAHAL	Sipahutar	96.447,00	0,00	81.700.000,00	22.050.000,00	34.810.000,00	0,00	24.840.000,00	81.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.447,00
309	SD NEGERI 175758 HUTAGURGUR	Sipahutar	284.032,00	0,00	106.400.000,00	9.600.000,00	66.488.400,00	1.300.000,00	29.011.600,00	106.400.000,00	22.500.000,00	13.638.000,00	3.458.000,00	5.404.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	284.032,00
310	SD NEGERI 176338 SOSOR GANJANG	Sipahutar	1.806.002,00	0,00	50.350.000,00	9.498.000,00	30.576.000,00	0,00	10.276.000,00	50.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.002,00
311	SD NEGERI 176496 LUMBAN GUKGUK	Sipahutar	98.352,00	0,00	43.700.000,00	8.100.000,00	17.295.000,00	6.000.000,00	12.305.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.352,00
312	SD NEGERI 177040 LOBUTOLONG	Sipahutar	99.959,00	0,00	140.600.000,00	32.130.000,00	52.536.000,00	22.850.000,00	33.084.000,00	140.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.959,00
313	SD NEGERI 177041 SIMARHOMPA	Sipahutar	73.456,00	0,00	67.450.000,00	14.100.000,00	38.545.000,00	1.500.000,00	13.305.000,00	67.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.456,00
314	SD NEGERI 177657 SIABAL ABAL	Sipahutar	177.340,00	0,00	73.150.000,00	19.800.000,00	42.821.000,00	1.700.000,00	8.829.000,00	73.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.340,00
315	SD NEGERI 177658 LUMBANRIHIT	Sipahutar	93.528,00	0,00	60.800.000,00	8.400.000,00	34.420.000,00	0,00	17.980.000,00	60.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.528,00
316	SD NEGERI 177925 LUMBAN HARIARA	Sipahutar	776.828,00	0,00	57.000.000,00	8.400.000,00	31.895.000,00	420.000,00	16.285.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.828,00
317	SD NEGERI 173132 LUMBAN BARINGIN	Sipoholon	3.639.952,00	0,00	208.050.000,00	47.100.000,00	87.367.000,00	0,00	73.583.000,00	208.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.952,00
318	SD NEGERI 173133 LUMBAN BARINGIN	Sipoholon	252.806,00	0,00	69.350.000,00	24.300.000,00	33.769.000,00	800.000,00	10.481.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	222.806,00
319	SD NEGERI 173134 LUMBAN BARINGIN	Sipoholon	128.830,00	0,00	76.950.000,00	7.695.000,00	34.715.000,00	4.736.000,00	29.804.000,00	76.950.000,00	22.500.000,00	10.433.186,00	1.800.000,00	10.266.814,00	22.500.000,00	0,00	0,00	128.830,00
320	SD NEGERI 173135 LUMBAN BARINGIN	Sipoholon	96.195,00	0,00	99.750.000,00	15.600.000,00	44.581.000,00	1.400.000,00	38.169.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.195,00
321	SD NEGERI 173136 LUMBAN BARINGIN	Sipoholon	94.620,00	0,00	105.450.000,00	24.000.000,00	55.465.000,00	0,00	25.985.000,00	105.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.620,00
322	SD NEGERI 173137 LOBUSINGKAM	Sipoholon	139.282,00	0,00	133.000.000,00	46.740.000,00	36.475.000,00	0,00	49.785.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.282,00
323	SD NEGERI 173139 SANDARAN	Sipoholon	56.052,00	0,00	111.150.000,00	16.800.000,00	53.721.000,00	10.675.000,00	29.954.000,00	111.150.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	56.052,00
324	SD NEGERI 173140 PAGAR BATU	Sipoholon	1.385.820,00	0,00	123.500.000,00	29.248.000,00	39.163.000,00	13.765.000,00	41.324.000,00	123.500.000,00	22.500.000,00	18.150.000,00	0,00	4.350.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	1.385.820,00
325	SD NEGERI 173141 HUTARAJA	Sipoholon	319.194,00	0,00	111.150.000,00	23.100.000,00	49.109.000,00	7.000.000,00	31.941.000,00	111.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.194,00
326	SD NEGERI 173142 TAPIAN NAULI	Sipoholon	5.416.653,00	0,00	69.350.000,00	13.200.000,00	29.677.000,00	0,00	26.473.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.653,00
327	SD NEGERI 173143 SIMARPINGGAN	Sipoholon	58.548,00	0,00	80.750.000,00	12.840.000,00	40.182.000,00	13.500.000,00	14.228.000,00	80.750.000,00	22.500.000,00	18.557.000,00	0,00	3.943.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	58.548,00
328	SD NEGERI 173144 SILANGKITANG	Sipoholon	417.611,00	0,00	119.700.000,00	20.400.000,00	53.565.000,00	0,00	45.735.000,00	119.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	57.611,00
329	SD NEGERI 173145 NAIPOSPOS TONGA	Sipoholon	145.321,00	0,00	61.750.000,00	0,00	45.460.000,00	0,00	16.290.000,00	61.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.321,00
330	SD NEGERI 173146 SIPOHOLON	Sipoholon	77.152,00	0,00	97.850.000,00	19.626.000,00	46.250.000,00	0,00	31.974.000,00	97.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.152,00
331	SD NEGERI 174573 HUTARAJA	Sipoholon	540.052,00	0,00	125.400.000,00	31.650.000,00	34.478.500,00	500.000,00	58.771.500,00	125.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	60.052,00
332	SD NEGERI 174606 LOBUSINGKAM	Sipoholon	166.892,00	0,00	87.400.000,00	15.240.000,00	54.859.000,00	10.878.000,00	6.423.000,00	87.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.892,00
333	SD NEGERI 175742 LUMBANRIHIT	Sipoholon	427.328,00	0,00	93.138.000,00	18.780.000,00	39.668.000,00	500.000,00	34.190.000,00	93.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.328,00
334	SD NEGERI 175743 PANGALOAN	Sipoholon	175.167,00	0,00	62.700.000,00	7.470.000,00	43.667.000,00	3.500.000,00	8.063.000,00	62.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.167,00
335	SD NEGERI 175744 HUTARAJA	Sipoholon	82.615,00	0,00	95.000.000,00	17.880.000,00	55.310.000,00	400.000,00	21.410.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.615,00
336	SD NEGERI 176331 LUMBANSOIT	Sipoholon	65.769,00	0,00	63.650.000,00	0,00	55.817.000,00	0,00	7.833.000,00	63.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,00	0,00	55.778,00
337	SD NEGERI 177032 HUTAURUK PARJULU	Sipoholon	169.061,00	0,00	81.700.000,00	12.000.000,00	41.370.000,00	0,00	28.330.000,00	81.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.817,00	0,00	128.244,00
338	SD NEGERI 177652 HAUSISADASADA	Sipoholon	134.841,00	0,00	95.950.000,00	28.476.000,00	42.330.000,00	0,00	25.144.000,00	95.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.841,00
339	SD NEGERI 177653 SIBADAK	Sipoholon	988.672,00	0,00	24.700.000,00	8.460.000,00	10.181.000,00	0,00	6.059.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.672,00
340	SD NEGERI 177920 PANSINARAN	Sipoholon	57.720,00	0,00	45.600.000,00	9.600.000,00	24.297.000,00	0,00	11.703.000,00	45.600.000,00	22.500.000,00	14.950.000,00	7.550.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	57.720,00
341	SD NEGERI 177921 PAGAR BATU	Sipoholon	381.755,00	0,00	76.000.000,00	24.360.000,00	34.285.300,00	150.000,00	17.204.700,00	76.000.000,00	22.500.000,00	19.412.000,00	0,00	3.088.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	381.755,00
342	SD NEGERI 178492 PAGARBATU	Sipoholon	56.456,00	0,00	180.500.000,00	42.600.000,00	69.742.000,00	10.500.000,00	57.658.000,00	180.500.000,00	22.500.000,00	14.780.000,00	0,00	7.720.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	56.456,00
343	SD NEGERI 173100 TARUTUNG	Tarutung	134.657,00	0,00	256.500.000,00	26.400.000,00	148.523.800,00	13.000.000,00	68.576.200,00	256.500.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	134.657,00
344	SD NEGERI 173101 TARUTUNG	Tarutung	822.805,00	0,00	46.550.000,00	9.180.000,00	29.829.000,00	1.425.000,00	6.116.000,00	46.550.000,00	22.500.000,00	18.613.972,00	1.956.028,00	1.930.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	822.805,00
345	SD NEGERI 173102 TARUTUNG	Tarutung	3.881.277,00	0,00	326.800.000,00	52.200.000,00	195.858.000,00	0,00	78.742.000,00	326.800.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	3.819.800,00	0,00	61.477,00
346	SD NEGERI 173103 TARUTUNG	Tarutung	123.858,00	0,00	24.700.000,00	6.600.000,00	17.510.000,00	0,00	590.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.858,00
347	SD NEGERI 173104 TARUTUNG	Tarutung	60.517,00	0,00	163.400.000,00	32.400.000,00	89.173.000,00	7.650.000,00	34.177.000,00	163.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.517,00
348	SD NEGERI 173105 TARUTUNG	Tarutung	50.097,00	0,00	260.300.000,00	18.000.000,00	167.631.000,00	33.129.000,00	41.540.000,00	260.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.097,00
349	SD NEGERI 173106 PARBUBU	Tarutung	1.203.768,00	0,00	71.250.000,00	14.400.000,00	38.754.000,00	0,00	18.096.000,00	71.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.768,00
350	SD NEGERI 173107 BANUAREA	Tarutung	51.989,00	0,00	44.650.000,00	900.000,00	38.430.000,00	1.480.000,00	3.740.000,00	44.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.989,00	22.500,00	77.500,00
351	SD NEGERI 173108 BANUAREA	Tarutung	72.513,00	0,00	71.250.000,00	11.316.000,00	58.584.000,00	1.350.000,00	0,00	71.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.513,00

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Kas BOS	Penerimaan BOS REGULER	Realisasi Belanja dana BOS Reguler TAHUN 2025				Total Belanja	Penerimaan boskin	Realisasi Belanja dana BOS Kinerja TAHUN 2025			Total Belanja	Autodebit ke Kasda	Belanja Lainnya (Biaya Admin)	Saldo Akhir
						BELANJA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA			BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
352	SD NEGERI 173109 SIANDORANDOR	Tarutung	512.911,00	0,00	51.300.000,00	6.600.000,00	36.811.000,00	0,00	7.889.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.911,00
353	SD NEGERI 173110 HUTARAJA	Tarutung	2.299.431,00	0,00	102.600.000,00	12.000.000,00	48.123.000,00	0,00	42.477.000,00	102.600.000,00	22.500.000,00	19.552.000,00	0,00	2.948.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	2.299.431,00
354	SD NEGERI 173111 AEK NASIA	Tarutung	1.940.078,00	0,00	55.100.000,00	600.000,00	41.254.000,00	0,00	13.246.000,00	55.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.078,00
355	SD NEGERI 173114 DOLOK NAGODANG	Tarutung	120.294,00	0,00	77.900.000,00	17.982.000,00	48.549.000,00	0,00	11.369.000,00	77.900.000,00	22.500.000,00	15.300.000,00	0,00	7.200.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	120.294,00
356	SD NEGERI 173118 PEANAJAGAR	Tarutung	80.093,00	0,00	102.600.000,00	14.400.000,00	52.719.000,00	10.400.000,00	25.081.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.093,00
357	SD NEGERI 173119 PEANAJAGAR	Tarutung	95.249,00	0,00	76.950.000,00	18.240.000,00	20.032.900,00	471.100,00	38.206.000,00	76.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.249,00
358	SD NEGERI 173120 HUTABARAT	Tarutung	1.142.294,00	0,00	90.250.000,00	22.850.000,00	28.020.500,00	5.600.000,00	33.779.500,00	90.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.294,00
359	SD NEGERI 173121 HUTABARAT	Tarutung	194.953,00	0,00	152.950.000,00	33.300.000,00	68.345.500,00	0,00	51.098.500,00	152.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.953,00
360	SD NEGERI 173122 HUTABARAT	Tarutung	100.000,00	0,00	38.000.000,00	9.000.000,00	24.240.000,00	0,00	4.760.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00
361	SD NEGERI 173123 HUTA BARAT	Tarutung	96.181,00	0,00	173.850.000,00	42.300.000,00	55.099.000,00	1.200.000,00	75.251.000,00	173.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.181,00
362	SD NEGERI 173124 GONTING SIARANGA	Tarutung	2.446.383,00	0,00	50.350.000,00	4.914.000,00	32.036.000,00	13.400.000,00	0,00	50.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.446.383,00
363	SD NEGERI 173129 PAGARSINONDI	Tarutung	72.154,00	0,00	117.800.000,00	29.700.000,00	28.210.000,00	21.500.000,00	38.390.000,00	117.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	62.154,00
364	SD NEGERI 173130 SIHUJUR	Tarutung	100.792,00	0,00	82.308.000,00	15.960.000,00	29.652.500,00	22.650.000,00	14.045.500,00	82.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792,00
365	SD NEGERI 173131 TARUTUNG	Tarutung	55.116,00	0,00	300.200.000,00	30.000.000,00	120.950.000,00	6.300.000,00	142.950.000,00	300.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.116,00
366	SD NEGERI 174565 JAMBURNAULI	Tarutung	70.184,00	0,00	95.950.000,00	24.270.000,00	43.344.000,00	0,00	28.336.000,00	95.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.184,00
367	SD NEGERI 174566 HUTABARAT	Tarutung	52.106,00	0,00	106.400.000,00	8.700.000,00	97.700.000,00	0,00	0,00	106.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.106,00
368	SD NEGERI 175740 AEKSIANSIMUN	Tarutung	441.472,00	0,00	63.650.000,00	14.700.000,00	33.689.000,00	0,00	15.261.000,00	63.650.000,00	22.500.000,00	14.150.000,00	4.400.000,00	3.950.000,00	22.500.000,00	110.000,00	0,00	331.472,00
369	SD NEGERI 176326 PARBUBU JULU	Tarutung	1.147.929,00	0,00	42.750.000,00	10.200.000,00	26.707.000,00	0,00	5.843.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.929,00
370	SD NEGERI 176329 HUTABARAT	Tarutung	31.166,00	0,00	68.400.000,00	10.800.000,00	31.429.000,00	5.500.000,00	20.671.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166,00
371	SD NEGERI 176493 PARBUBU PEA	Tarutung	76.368,00	0,00	21.850.000,00	6.084.000,00	13.378.000,00	0,00	2.388.000,00	21.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.368,00
372	SD NEGERI 177028 PEANAHUSHUS	Tarutung	736.070,00	0,00	35.150.000,00	2.400.000,00	20.084.000,00	8.000.000,00	4.666.000,00	35.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.070,00
373	SD NEGERI 177030 PARRONGITAN	Tarutung	93.321,00	0,00	55.100.000,00	13.800.000,00	20.405.000,00	0,00	20.895.000,00	55.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	65.321,00
374	SD NEGERI 177031 HUTATORUAN VII	Tarutung	76.555,00	0,00	31.350.000,00	6.300.000,00	18.598.600,00	0,00	6.451.400,00	31.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.555,00
375	SD NEGERI 177651 SITAKKA	Tarutung	305.904,00	0,00	29.450.000,00	7.740.000,00	17.741.000,00	0,00	3.969.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	265.904,00
376	SD NEGERI 178209 PEATOLONG	Tarutung	1.068.553,00	0,00	30.400.000,00	6.780.000,00	19.440.000,00	0,00	4.180.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	918.553,00
		JUMLAH	**329.123.424,00**	**24.327.908,00**	**33.798.984.399,00**	**6.472.208.492,00**	**17.198.484.412,00**	**2.004.060.600,00**	**8.111.137.650,00**	**33.756.441.154,00**	**1.462.500.000,00**	**1.155.725.530,00**	**94.026.656,00**	**212.747.814,00**	**1.462.500.000,00**	**109.605.565,00**	**62.500,00**	**286.326.512,00**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI PENDAPATAN DAN PENGELUARAN DANA BOS REGULER DAN BOSP KINERJA TINGKAT SMP NEGERI
TAHUN ANGARAN 2025

Lampiran 8

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Kas BOS	Penerimaan Bos Reguler 2025	Realisasi Belanja dana BOS Reguler TAHUN 2025				Total Belanja	Penerimaan boskin	Realisasi Belanja dana BOS Kinerja TAHUN 2025			Total Belanja	Autodebit ke Kasda	Belanja Lainnya (Biaya Admin)	Saldo Akhir
						BELANJA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA			BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
1	SMP NEGERI 1 ADIANKOTING	Adian Koting	63.588,00	0,00	78.880.000	18.366.000	6.165.000	0,00	54.349.000	78.880.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.588,00
2	SMP NEGERI 2 ADIANKOTING	Adian Koting	1.007.387,00	0,00	345.680.000	59.880.000	155.615.000	35.550.000,00	94.635.000	345.680.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	737.387,00
3	SMP NEGERI 3 ADIANKOTING	Adian Koting	58.687,00	0,00	249.400.000	30.600.000	98.534.000	54.120.000,00	66.146.000	249.400.000	35.000.000	18.602.228	-	16.397.772	35.000.000,00	0,00	0,00	58.687,00
4	SMP NEGERI 4 ADIANKOTING	Adian Koting	2.344.297,00	0,00	84.672.000	24.600.000	38.004.500	0,00	22.067.500	84.672.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.297,00
5	SMP NEGERI 5 ADIANKOTING	Adian Koting	780.650,00	0,00	262.160.000	77.304.180	152.858.350	0,00	31.997.470	262.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	40.650,00
6	SMP NEGERI 6 ADIANKOTING	Adian Koting	313.593,00	0,00	83.349.000	27.954.900	38.759.100	3.375.000,00	13.260.000	83.349.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.593,00
7	SMP NEGERI 1 GAROGA	Garoga	3.427.014,00	0,00	472.120.000	89.790.000	382.330.000	0,00	0,00	472.120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.014,00
8	SMP NEGERI 2 GAROGA	Garoga	1.172.926,00	0,00	215.760.000	30.000.000	86.687.000	11.500.000,00	87.573.000	215.760.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	72.926,00
9	SMP NEGERI 3 GAROGA	Garoga	1.494.782,00	0,00	80.040.000	21.924.000	40.306.500	1.100.000,00	16.709.500	80.040.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.782,00
10	SMP NEGERI 4 GAROGA	Garoga	41.650,00	0,00	158.920.000	44.040.000	83.965.300	6.089.700,00	24.825.000	158.920.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00
11	SMP NEGERI 5 GAROGA	Garoga	1.592.825,00	0,00	215.760.000	44.910.000	167.350.000	3.500.000,00	-	215.760.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.825,00
12	SMP NEGERI 6 GAROGA	Garoga	4.540.904,00	0,00	235.480.000	55.200.000	77.097.500	0,00	103.182.500	235.480.000	35.000.000	12.522.800	7.283.200	15.194.000	35.000.000,00	0,00	0,00	4.540.904,00
13	SMP NEGERI 1 MUARA	Muara	1.045.230,00	0,00	366.560.000	67.740.000	121.077.040	49.400.000,00	128.342.960	366.560.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	53.230,00
14	SMP NEGERI 2 MUARA	Muara	62.964,00	0,00	351.480.000	96.780.000	82.004.600	48.650.000,00	124.045.400	351.480.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	38.964,00
15	SMP NEGERI 3 MUARA	Muara	35.157,00	0,00	265.640.000	62.010.000	123.083.000	32.600.000,00	47.947.000	265.640.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.157,00
16	SMP NEGERI 4 MUARA	Muara	1.802.221,00	0,00	213.440.000	47.920.000	93.437.100	26.324.000,00	45.758.900	213.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	1.586.221,00
17	SMP NEGERI 1 PAGARAN	Pagaran	103.249,00	0,00	548.680.000	69.600.000	331.045.000	1.300.000,00	146.735.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.783.249,00
18	SMP NEGERI 2 PAGARAN	Pagaran	66.529,00	0,00	378.160.000	71.440.000	177.374.750	4.000.000,00	125.345.250	378.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.529,00
19	SMP NEGERI 3 PAGARAN	Pagaran	275.223,00	0,00	551.000.000	49.620.000	358.634.000	82.770.000,00	59.976.000	551.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	193.223,00
20	SMP NEGERI 4 PAGARAN	Pagaran	597.057,00	0,00	223.880.000	18.900.000	174.249.400	11.540.000,00	19.190.600	223.880.000	35.000.000	22.760.000	-	12.240.000	35.000.000,00	0,00	0,00	597.057,00
21	SMP NEGERI 1 PAHAE JAE	Pahae Jae	2.524.029,00	0,00	537.080.000	78.920.000	235.797.000	28.650.000,00	193.713.000	537.080.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.744,00	0,00	2.351.285,00
22	SMP NEGERI 2 PAHAE JAE	Pahae Jae	117.112,00	0,00	371.200.000	71.040.000	108.139.000	19.800.000,00	172.221.000	371.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.112,00
23	SMP NEGERI 1 PAHAE JULU	Pahae Julu	2.769.607,80	0,00	328.280.000	57.360.000	202.805.000	0,00	68.115.000	328.280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.607,80
24	SMP NEGERI 2 PAHAE JULU	Pahae Julu	95.072,00	0,00	230.840.000	28.716.000	186.341.000	0,00	15.783.000	230.840.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.072,00
25	SMP NEGERI 3 PAHAE JULU	Pahae Julu	674.771,00	0,00	99.760.000	18.000.000	48.285.000	0,00	33.475.000	99.760.000	35.000.000	15.765.000	-	19.235.000	35.000.000,00	0,00	0,00	674.771,00
26	SMP NEGERI 4 PAHAE JULU	Pahae Julu	947.695,00	0,00	235.480.000	62.880.000	90.605.000	0,00	81.995.000	235.480.000	35.000.000	17.035.500	-	17.964.500	35.000.000,00	0,00	0,00	947.695,00
27	SMP NEGERI 1 PANGARIBUAN	Pangaribuan	5.361.118,00	0,00	765.600.000	77.910.000	442.633.800	62.456.200,00	182.600.000	765.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	61.118,00
28	SMP NEGERI 2 PANGARIBUAN	Pangaribuan	9.043.998,00	2.660.000,00	501.120.000	69.485.000	299.049.300	0,00	129.925.700	498.460.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703.998,00	0,00	2.660.000,00
29	SMP NEGERI 3 PANGARIBUAN	Pangaribuan	4.800.000,00	6.420.000,00	357.280.000	29.100.000	210.912.000	46.500.000,00	64.348.000	350.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120.000,00	0,00	6.520.000,00
30	SMP NEGERI 4 PANGARIBUAN	Pangaribuan	54.258,00	0,00	271.440.000	33.600.000	170.630.000	38.300.000,00	28.910.000	271.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.258,00
31	SMP NEGERI 5 PANGARIBUAN	Pangaribuan	1.382.500,00	0,00	191.400.000	53.976.000	135.924.000	1.500.000,00	-	191.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	182.500,00
32	SMP NEGERI 6 PANGARIBUAN	Pangaribuan	631.412,00	0,00	280.720.000	69.378.000	151.431.000	15.000.000,00	44.911.000	280.720.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	585.412,00
33	SMP NEGERI 7 PANGARIBUAN	Pangaribuan	2.323.097,00	0,00	198.360.000	45.000.000	86.064.000	35.400.000,00	31.896.000	198.360.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	43.097,00
34	SMP NEGERI 1 PARMONANGAN	Parmonangan	52.909,00	0,00	215.760.000	-	155.887.000	5.000.000,00	54.873.000	215.760.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.909,00
35	SMP NEGERI 2 PARMONANGAN	Parmonangan	327.602,00	0,00	194.880.000	34.140.000	111.694.100	0,00	49.045.900	194.880.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,00	154.402,00
36	SMP NEGERI 3 PARMONANGAN	Parmonangan	3.287.900,00	0,00	85.840.000	10.080.000	50.052.000	8.999.000,00	16.709.000	85.840.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.900,00
37	SMP NEGERI 4 PARMONANGAN	Parmonangan	673.352,00	0,00	89.964.000	25.680.000	49.672.000	8.000.000,00	6.612.000	89.964.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.352,00
38	SMP NEGERI 5 PARMONANGAN	Parmonangan	322.250,00	0,00	121.716.000	24.360.000	61.105.000	5.250.000,00	31.001.000	121.716.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.250,00
39	SMP NEGERI SATU ATAP 6 PARMON	Parmonangan	95.157,00	0,00	81.200.000	16.260.000	46.691.200	1.210.600,00	17.038.200	81.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.157,00
40	SMP NEGERI 1 PURBATUA	Purbatua	1.743.957,00	0,00	477.603.000	86.100.000	185.534.000	21.800.000,00	184.169.000	477.603.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.643.957,00
41	SMP NEGERI 2 PURBATUA	Purbatua	157.890,00	0,00	104.400.000	18.000.000	47.570.000	5.140.000,00	33.690.000	104.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	37.890,00
42	SMP NEGERI 3 PURBATUA	Purbatua	249.855,00	0,00	40.600.000	6.600.000	24.912.000	0,00	9.088.000	40.600.000	35.000.000	18.596.000	9.500.000	6.904.000	35.000.000,00	0,00	0,00	249.855,00
43	SMP NEGERI 1 SIATAS BARITA	Siatas Barita	5.070.286,00	0,00	472.120.000	30.900.000	289.925.000	14.555.000,00	136.740.000	472.120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	0,00	50.286,00
44	SMP NEGERI 2 SIATAS BARITA	Siatas Barita	49.623,00	0,00	161.240.000	40.980.000	92.377.500	14.390.000,00	13492500	161.240.000	35.000.000	16.988.000	-	18.012.000	35.000.000,00	0,00	0,00	49.623,00
45	SMP NEGERI 3 MUARA SIATAS BARITA	Siatas Barita	150.000,00	0,00	169.360.000	41.952.000	61.900.000	19.330.000,00	46.178.000	169.360.000	35.000.000	17.046.000	-	17.954.000	35.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00
46	SMP NEGERI 1 SIBORONGBORONG	Siborongborong	1.157.778,00	0,00	894.360.000	80.100.000	456.971.000	38.350.000,00	318.939.000	894.360.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	67.778,00
47	SMP NEGERI 2 SIBORONGBORONG	Siborongborong	106.486,00	0,00	850.280.000	72.000.000	485.961.000	62.975.000,00	229.344.000	850.280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	96.486,00
48	SMP NEGERI 3 SIBORONGBORONG	Siborongborong	78.907,00	0,00	392.080.000	9.750.000	211.357.500	2.750.000,00	168.222.500	392.080.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.907,00
49	SMP NEGERI 4 SIBORONGBORONG	Siborongborong	77.999,00	0,00	795.760.000	49.800.000	425.487.500	45.000.000,00	275.472.500	795.760.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.999,00
50	SMP NEGERI 5 SIBORONGBORONG	Siborongborong	197.262,00	0,00	92.800.000	20.400.000	72.260.000	0,00	0,00	92.660.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000	187.262,00
51	SMP NEGERI 6 SIBORONGBORONG	Siborongborong	79.970,00	0,00	131.080.000	9.750.000	78.827.500	1.520.000,00	40.982.500	131.080.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	69.970,00
52	SMP NEGERI 7 SIBORONGBORONG	Siborongborong	476.229,00	0,00	170.520.000	24.000.000	85.096.100	20.440.000,00	40.983.900	170.520.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.229,00
53	SMP NEGERI 1 SIMANGUMBAN	Simangumban	2.311.700,00	0,00	387.440.000	101.562.000	171.735.500	0,00	114.142.500	387.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.700,00
54	SMP NEGERI 2 SIMANGUMBAN	Simangumban	1.420.071,00	0,00	91.640.000	19.350.000	27.864.000	10.500.000,00	32.796.000	90.510.000	35.000.000	18.690.000	6.000.000	10.310.000	35.000.000,00	1.130.000,00	0,00	1.420.071,00
55	SMP NEGERI 1 SIPAHUTAR	Sipahutar	10.238.223,00	0,00	922.200.000	33.600.000	567.668.254	124.115.000,00	200.904.000	926.287.254	35.000.000	19.916.000	-	15.084.000	35.000.000,00	3.022.600,00	0,00	3.128.369,00
56	SMP NEGERI 2 SIPAHUTAR	Sipahutar	3.695.942,00	0,00	401.360.000	52.800.000	246.013.300	36.840.000,00	65.706.700	401.360.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695.942,00
57	SMP NEGERI 3 SIPAHUTAR	Sipahutar	6.322.631,00	0,00	160.080.000	15.108.000	144.972.000	0,00	0,00	160.080.000	35.000.000	35.000.000			35.000.000,00	4.892.000,00	0,00	1.430.631,00
58	SMP NEGERI 4 SIPAHUTAR	Sipahutar	3.369.674,00	0,00	363.080.000	56.400.000	227.386.500	42.480.000,00	36.813.500,00	363.080.000	35.000.000	18.475.000	-	16.525.000	35.000.000,00	0,00	0,00	3.369.674,00
59	SMP NEGERI 5 SIPAHUTAR	Sipahutar	7.948.188,00	0,00	329.440.000	48.000.000	170.844.900	37.404.000,00	73.189.500,00	329.438.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948.000,00	0,00	1.788,00
60	SMP NEGERI 6 SIPAHUTAR	Sipahutar	100.000,00	0,00	118.320.000	24.804.000	72.645.600	11.686.400,00	9.184.000,00	118.320.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
61	SMP NEGERI 1 SIPOHOLON	Sipoholon	2.714.603,00	0,00	590.440.000	70.638.000	254.569.000	63.240.000,00	201.993.000,00	590.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.000,00	0,00	59.603,00

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Kas BOS	Penerimaan Bos Reguler 2025	Realisasi Belanja dana BOS Reguler TAHUN 2025				Total Belanja	Penerimaan boskin	Realisasi Belanja dana BOS Kinerja TAHUN 2025			Total Belanja	Autodebit ke Kasda	Belanja Lainnya (Biaya Admin)	Saldo Akhir
						BELANJA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA			BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
62	SMP NEGERI 2 SIPOHOLON	Sipoholon	251.002,00	0,00	380.480.000	69.600.000	187.013.200	21.500.000,00	102.366.800,00	380.480.000	35.000.000	17.176.000	-	17.824.000	35.000.000,00	0,00	0,00	251.002,00
63	SMP NEGERI 3 SIPOHOLON	Sipoholon	129.909,00	0,00	263.320.000	60.000.000	143.092.200	21.150.000,00	39.077.800,00	263.320.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.909,00
64	SMP NEGERI 4 SIPOHOLON	Sipoholon	972.095,00	0,00	178.640.000	45.072.000	72.809.900	18.510.000,00	42.248.100,00	178.640.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.095,00
65	SMP NEGERI 5 SIPOHOLON	Sipoholon	3.158.655,00	0,00	102.080.000	24.000.000	53.138.400	4.670.000,00	20.271.600,00	102.080.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.655,00
66	SMP NEGERI 1 TARUTUNG	Tarutung	390.984,00	0,00	533.600.000	118.800.000	182.770.000	48.600.000,00	183.430.000,00	533.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.984,00
67	SMP NEGERI 2 TARUTUNG	Tarutung	249.501,00	0,00	658.880.000	85.850.000	186.886.850	65.230.000,00	320.913.000,00	658.879.850	100.000.000	48.320.000	-	51.680.000	100.000.000,00	190.000,00	0,00	59.651,00
68	SMP NEGERI 3 TARUTUNG	Tarutung	65.685,00	0,00	754.000.000	93.600.000	305.013.600	52.314.400,00	303.072.000,00	754.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00
69	SMP NEGERI 4 TARUTUNG	Tarutung	120.688,00	0,00	418.760.000	28800000	246.796.000	98.180.000,00	44.984.000,00	418.760.000	35.000.000	14.260.000	-	20.740.000	35.000.000,00	0,00	0,00	120.688,00
70	SMP NEGERI 5 TARUTUNG	Tarutung	701.262,00	0,00	97.440.000	16.800.000	80.640.000	0,00	0,00	97.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.262,00
71	SMP NEGERI 6 TARUTUNG	Tarutung	168.844,00	0,00	104.400.000	22.740.000	44.761.500	0,00	36.898.500	104.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.844,00
72	SMP NEGERI 7 TARUTUNG	Tarutung	146.628,00	0,00	128.760.000	16.080.000	47.230.500	0,00	65.449.500	128.760.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.628,00
	Total		**110.382.299,80**	**9.080.000,00**	**22.275.544.000,00**	**3.308.400.080,00**	**11.584.324.844,00**	**1.550.554.300,00**	**5.826.000.280,00**	**21.720.599.504,00**	**590.000.000,00**	**311.152.528,00**	**22.783.200,00**	**256.064.272,00**	**590.000.000,00**	**61.727.542,00**	**30.000,00**	**612.649.253,80**

Lampiran 9

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG		PENYISIHAN PIUTANG					NILAI PIUTANG NETTO
		TAHUN	JUMLAH	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)	(10) = (4) - (9)
I	**PBB PERDESAAN**	2025	1.509.413.689,00	7.547.068,45	0,00	0,00	0,00	7.547.068,45	1.501.866.620,56
	DAN PERKOTAAN	2024	2.478.120.300,00	0,00	247.812.030,00	0,00	0,00	247.812.030,00	2.230.308.270,00
		2023	1.696.347.148,45	0,00	0,00	848.173.574,23	0,00	848.173.574,23	848.173.574,23
		2022	1.700.398.127,00	0,00	0,00	0,00	1.700.398.127,00	1.700.398.127,00	0,00
		2021	1.611.995.789,00	0,00	0,00	0,00	1.611.995.789,00	1.611.995.789,00	0,00
		2020	1.454.408.807,00	0,00	0,00	0,00	1.454.408.807,00	1.454.408.807,00	0,00
		2019	1.566.774.611,00	0,00	0,00	0,00	1.566.774.611,00	1.566.774.611,00	0,00
		2018	1.804.516.059,00	0,00	0,00	0,00	1.804.516.059,00	1.804.516.059,00	0,00
		2017	653.501.568,00	0,00	0,00	0,00	653.501.568,00	653.501.568,00	0,00
		2016	698.122.325,00	0,00	0,00	0,00	698.122.325,00	698.122.325,00	0,00
		2015	461.972.727,00	0,00	0,00	0,00	461.972.727,00	461.972.727,00	0,00
		2014	380.388.940,00	0,00	0,00	0,00	380.388.940,00	380.388.940,00	0,00
		2013	47.822.879,00	0,00	0,00	0,00	47.822.879,00	47.822.879,00	0,00
		2012	35.577.497,00	0,00	0,00	0,00	35.577.497,00	35.577.497,00	0,00
		2011	16.749.233,00	0,00	0,00	0,00	16.749.233,00	16.749.233,00	0,00
		2010	23.245.604,00	0,00	0,00	0,00	23.245.604,00	23.245.604,00	
		2009	4.113.102,00	0,00	0,00	0,00	4.113.102,00	4.113.102,00	0,00
SUB TOTAL PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN			**16.143.468.405,45**	**7.547.068,45**	**247.812.030,00**	**848.173.574,23**	**10.459.587.268,00**	**11.563.119.940,67**	**4.580.348.464,78**
II	**PAJAK RESTORAN**	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	55.858.000,00	0,00	0,00	0,00	55.858.000,00	55.858.000,00	0,00

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG		PENYISIHAN PIUTANG					NILAI PIUTANG
		TAHUN	JUMLAH	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH	NETTO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)	(10) = (4) - (9)
		2016	24.638.000,00	0,00	0,00	0,00	24.638.000,00	24.638.000,00	0,00
		2015	31.196.800,00	0,00	0,00	0,00	31.196.800,00	31.196.800,00	0,00
		2014	23.333.800,00	0,00	0,00	0,00	23.333.800,00	23.333.800,00	0,00
		2013	33.757.737,00	0,00	0,00	0,00	33.757.737,00	33.757.737,00	0,00
		2012	7.118.200,00	0,00	0,00	0,00	7.118.200,00	7.118.200,00	0,00
		2011	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00
		2010	20.117.800,00	0,00	0,00	0,00	20.117.800,00	20.117.800,00	0,00
		2009	21.285.000,00	0,00	0,00	0,00	21.285.000,00	21.285.000,00	0,00
		2008	42.088.000,00	0,00	0,00	0,00	42.088.000,00	42.088.000,00	
		2007	38.821.700,00	0,00	0,00	0,00	38.821.700,00	38.821.700,00	0,00
SUB TOTAL PAJAK RESTORAN			*299.384.037,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*299.384.037,00*	*299.384.037,00*	*0,00*
III	**PAJAK HIBURAN**	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
		2016	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
		2015	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00
		2014	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
		2013	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
		2012	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00
		2010	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
		2009	2.232.000,00	0,00	0,00	0,00	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00
		2008	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	
		2007	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
SUB TOTAL PAJAK HIBURAN			*18.561.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.561.200,00*	*18.561.200,00*	*0,00*

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG		PENYISIHAN PIUTANG					NILAI PIUTANG
		TAHUN	JUMLAH	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH	NETTO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)	(10) = (4) - (9)
IV	PAJAK HOTEL	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
		2016	3.725.200,00	0,00	0,00	0,00	3.725.200,00	3.725.200,00	0,00
		2015	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00
		2013	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
		2012	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
		2011	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		2010	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
		2009	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
		2008	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	
		2007	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
SUB TOTAL PAJAK HOTEL			*25.315.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.315.200,00*	*25.315.200,00*	*0,00*
V	**PIUTANG MIBULOGBA**	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	20.394.100,00	0,00	0,00	10.197.050,00	0,00	10.197.050,00	10.197.050,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL PAJAK MIBULOGBA			*20.394.100,00*	*0,00*	*0,00*	*10.197.050,00*	*0,00*	*10.197.050,00*	*10.197.050,00*
TOTAL PIUTANG PAJAK DAERAH			**16.507.122.942,45**	**7.547.068,45**	**247.812.030,00**	**858.370.624,23**	**10.802.847.705,00**	**11.916.577.427,67**	**4.590.545.514,78**

Lampiran 10

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS RETRIBUSI	PIUTANG		PENYISIHAN PIUTANG					NILAI PIUTANG NETTO
		TAHUN	JUMLAH	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)	(10) = (4) - (9)
I. SEWA TANAH LUAR PEKAN									
1	KEC. MUARA	2025	11.676.600,00	0,00	0,00	0,00	11.676.600,00	11.676.600,00	0,00
		2024	4.986.000,00	0,00	0,00	0,00	4.986.000,00	4.986.000,00	
		2023	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00
		2022	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
		2021	756.000,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00
		2020	756.000,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00
		2018	756.000,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00
		2017	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
		2016	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
		2015	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
		2014	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
		2013	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
		2011	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
		2010	277.200,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00	0,00
		2009	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
		2008	361.200,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00	361.200,00	0,00
		2007	161.200,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00
	KEC. MUARA		*25.064.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.064.200,00*	*25.064.200,00*	*0,00*
2	KEC. SIBORONGBORONG	2025	6.142.500,00	0,00	0,00	0,00	6.142.500,00	6.142.500,00	0,00
		2024	5.908.500,00	0,00	0,00	0,00	5.908.500,00	5.908.500,00	0,00
		2023	*55.437.187,00*	0,00	0,00	0,00	55.437.187,00	55.437.187,00	0,00
		2022	50.569.973,00	0,00	0,00	0,00	50.569.973,00	50.569.973,00	0,00
		2021	42.495.337,50	0,00	0,00	0,00	42.495.337,50	42.495.337,50	0,00
		2020	27.821.350,00	0,00	0,00	0,00	27.821.350,00	27.821.350,00	0,00
		2019	22.732.200,00	0,00	0,00	0,00	22.732.200,00	22.732.200,00	0,00
		2018	25.281.905,00	0,00	0,00	0,00	25.281.905,00	25.281.905,00	0,00
		2017	17.709.888,75	0,00	0,00	0,00	17.709.888,75	17.709.888,75	0,00
		2016	20.017.030,75	0,00	0,00	0,00	20.017.030,75	20.017.030,75	0,00
		2015	13.814.405,00	0,00	0,00	0,00	13.814.405,00	13.814.405,00	0,00
		2014	12.125.718,00	0,00	0,00	0,00	12.125.718,00	12.125.718,00	0,00
		2013	10.859.250,00	0,00	0,00	0,00	10.859.250,00	10.859.250,00	0,00
		2012	8.560.063,00	0,00	0,00	0,00	8.560.063,00	8.560.063,00	0,00
		2011	8.560.063,00	0,00	0,00	0,00	8.560.063,00	8.560.063,00	0,00
		2010	8.560.063,00	0,00	0,00	0,00	8.560.063,00	8.560.063,00	0,00
		2009	6.363.750,00	0,00	0,00	0,00	6.363.750,00	6.363.750,00	0,00
		2008	6.363.750,00	0,00	0,00	0,00	6.363.750,00	6.363.750,00	
		2007	5.253.250,00	0,00	0,00	0,00	5.253.250,00	5.253.250,00	0,00
	KEC. SIBORONGBORONG		*354.576.184,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*354.576.184,00*	*354.576.184,00*	*0,00*

NO	JENIS RETRIBUSI	PIUTANG		PENYISIHAN PIUTANG					NILAI PIUTANG NETTO
		TAHUN	JUMLAH	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)	(10) = (4) - (9)
3	KEC. SIPAHUTAR	2025	863.200,00	0,00	0,00	0,00	863.200,00	863.200,00	0,00
		2024	863.200,00	0,00	0,00	0,00	863.200,00	863.200,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	306.320,00	0,00	0,00	0,00	306.320,00	306.320,00	0,00
	KEC. SIPAHUTAR		*2.032.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.032.720,00*	*2.032.720,00*	*0,00*
4	KEC. PANGARIBUAN	2025	314.978,00	0,00	0,00	0,00	314.978,00	314.978,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KEC. PANGARIBUAN		*314.978,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*314.978,00*	*314.978,00*	*0,00*
5	KEC. PAHAE JAE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KEC. PAHAE JAE		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	KEC. TARUTUNG	2025	130.678.870,00	0,00	0,00	0,00	130.678.870,00	130.678.870,00	0,00
		2024	129.863.966,00	0,00	0,00	0,00	129.863.966,00	129.863.966,00	0,00
		2023	71.092.105,00	0,00	0,00	0,00	71.092.105,00	71.092.105,00	0,00
		2022	50.879.467,50	0,00	0,00	0,00	50.879.467,50	50.879.467,50	0,00
		2021	30.879.467,50	0,00	0,00	0,00	30.879.467,50	30.879.467,50	0,00
		2020	30.879.467,50	0,00	0,00	0,00	30.879.467,50	30.879.467,50	0,00
		2019	30.879.467,50	0,00	0,00	0,00	30.879.467,50	30.879.467,50	0,00
		2018	27.408.618,00	0,00	0,00	0,00	27.408.618,00	27.408.618,00	0,00
		2017	9.425.487,50	0,00	0,00	0,00	9.425.487,50	9.425.487,50	0,00
		2016	5.143.457,50	0,00	0,00	0,00	5.143.457,50	5.143.457,50	0,00
		2015	5.542.945,00	0,00	0,00	0,00	5.542.945,00	5.542.945,00	0,00
		2014	8.785.120,00	0,00	0,00	0,00	8.785.120,00	8.785.120,00	0,00
		2013	4.867.945,00	0,00	0,00	0,00	4.867.945,00	4.867.945,00	0,00
		2012	3.193.685,00	0,00	0,00	0,00	3.193.685,00	3.193.685,00	0,00
		2011	2.263.195,00	0,00	0,00	0,00	2.263.195,00	2.263.195,00	0,00
		2010	3.098.975,00	0,00	0,00	0,00	3.098.975,00	3.098.975,00	0,00
		2009	3.903.975,13	0,00	0,00	0,00	3.903.975,13	3.903.975,13	0,00
		2008	4.188.200,00	0,00	0,00	0,00	4.188.200,00	4.188.200,00	
		2007	3.628.256,00	0,00	0,00	0,00	3.628.256,00	3.628.256,00	0,00
	KEC. TARUTUNG		*556.602.670,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*556.602.670,13*	*556.602.670,13*	*0,00*
	SUB TOTAL SEWA TANAH LUAR PEKAN		*938.590.752,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*938.590.752,13*	*938.590.752,13*	*0,00*
II. SEWA TANAH DALAM PEKAN									
####	KEC. MUARA	2025	11.676.600,00	0,00	0,00	0,00	11.676.600,00	11.676.600,00	0,00
	(UPT. PASAR SIBORONGBORONG)	2024	11.887.200,00	0,00	0,00	0,00	11.887.200,00	11.887.200,00	0,00
		2023	4.048.200,00	0,00	0,00	0,00	4.048.200,00	4.048.200,00	0,00
		2022	4.048.200,00	0,00	0,00	0,00	4.048.200,00	4.048.200,00	0,00
		2021	3.042.000,00	0,00	0,00	0,00	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00
		2020	2.746.800,00	0,00	0,00	0,00	2.746.800,00	2.746.800,00	0,00
		2019	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
		2018	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00
		2017	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
		2016	1.472.400,00	0,00	0,00	0,00	1.472.400,00	1.472.400,00	0,00
		2015	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
		2014	475.200,00	0,00	0,00	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
		2013	475.200,00	0,00	0,00	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
		2012	399.600,00	0,00	0,00	0,00	399.600,00	399.600,00	0,00
		2011	453.600,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00	453.600,00	0,00
		2010	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00
		2009	221.406,00	0,00	0,00	0,00	221.406,00	221.406,00	0,00
		2008	226.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00	226.800,00	0,00
		2007	496.800,00	0,00	0,00	0,00	496.800,00	496.800,00	0,00
	KEC. MUARA		*47.522.006,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47.522.006,00*	*47.522.006,00*	*0,00*

NO	JENIS RETRIBUSI	PIUTANG		PENYISIHAN PIUTANG					NILAI PIUTANG
		TAHUN	JUMLAH	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH	NETTO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)	(10) = (4) - (9)
2	KEC. SIBORONGBORONG	2025	6.142.500,00	0,00	0,00	0,00	6.142.500,00	6.142.500,00	0,00
	(UPT. PASAR SIBORONGBORONG)	2024	5.908.500,00	0,00	0,00	0,00	5.908.500,00	5.908.500,00	0,00
		2023	409.500,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00	0,00
		2022	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00
		2021	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00
		2020	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
		2017	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
		2016	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
		2015	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
		2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
		2009	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	KEC. SIBORONGBORONG		*15.943.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.943.500,00*	*15.943.500,00*	*0,00*
3	KEC. PAHAE JAE	2025	6.988.071,00	0,00	0,00	0,00	6.988.071,00	6.988.071,00	0,00
	(UPT. PASAR SARULLA)	2024	4.891.631,00	0,00	0,00	0,00	4.891.631,00	4.891.631,00	0,00
		2023	135.588,00	0,00	0,00	0,00	135.588,00	135.588,00	0,00
	KEC. PAHAE JAE		*12.015.290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.015.290,00*	*12.015.290,00*	*0,00*

NO	JENIS RETRIBUSI	PIUTANG		PENYISIHAN PIUTANG					NILAI PIUTANG
		TAHUN	JUMLAH	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH	NETTO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)	(10) = (4) - (9)
4	KEC. SIPAHUTAR	2025	19.920.168,00	0,00	0,00	0,00	19.920.168,00	19.920.168,00	0,00
	(UPT. PASAR SIPAHUTAR)	2024	14.655.168,00	0,00	0,00	0,00	14.655.168,00	14.655.168,00	0,00
		2023	3.071.250,00	0,00	0,00	0,00	3.071.250,00	3.071.250,00	0,00
		2022	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
		2021	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
		2020	877.500,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00	877.500,00	0,00
		2019	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
		2018	2.512.500,00	0,00	0,00	0,00	2.512.500,00	2.512.500,00	0,00
		2017	2.512.500,00	0,00	0,00	0,00	2.512.500,00	2.512.500,00	0,00
		2016	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
		2015	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
		2008	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
		2007	300.300,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00	0,00
	KEC. SIPAHUTAR		*49.734.386,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49.734.386,00*	*49.734.386,00*	*0,00*
5	KEC. TARUTUNG	2025	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
	(UPT. TARUTUNG)	2024	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
		2023	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KEC. TARUTUNG		*728.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*728.000,00*	*728.000,00*	*0,00*
6	KEC. GAROGA	2025	368.550,00	0,00	0,00	0,00	368.550,00	368.550,00	0,00
	(UPT. PASAR PANGARIBUAN)	2024	368.550,00	0,00	0,00	0,00	368.550,00	368.550,00	0,00
		2023	*157.950,00*	0,00	0,00	0,00	157.950,00	157.950,00	0,00
		2022	*315.900,00*	0,00	0,00	0,00	315.900,00	315.900,00	0,00
		2021	*525.500,00*	0,00	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00	0,00
		2020	391.850,00	0,00	0,00	0,00	391.850,00	391.850,00	0,00
		2019	364.500,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00	364.500,00	0,00
	KEC. GAROGA		*2.492.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.492.800,00*	*2.492.800,00*	*0,00*
6	KEC. SIPOHOLON	2025	2.038.840,00	0,00	0,00	0,00	2.038.840,00	2.038.840,00	0,00
	(UPT. PASAR PARMONANGAN)	2024	*1.251.900,00*	0,00	0,00	0,00	1.251.900,00	1.251.900,00	0,00
	KEC. SIPOHOLON		*3.290.740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.290.740,00*	*3.290.740,00*	*0,00*
	SUB TOTAL SEWA TANAH DALAM PEKAN		*131.726.722,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*131.726.722,00*	*131.726.722,00*	*0,00*
	TOTAL		**1.070.317.474,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.317.474,13**	**1.070.317.474,13**	**0,00**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI PIUTANG LAINNYA (TGR KERUGIAN DAERAH)
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 11

Nama : Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun : Tahun 2005 s.d. 2025
Status : Sudah Penetapan

No.	Sumber Informasi/ Data (LHP, Pengaduan, Putusan Pengadilan, dll)	Jml Kasus	Uraian	Perangkat Daerah	Tahun Kejadian	Data/Dokumen yang Ada	Nilai Kerugian (Rp)	Pemantauan Periode Sebelumnya		Pemantauan Semester II Tahun 2025			Keterangan
								Total Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	Angsuran selama Periode Pemantauan (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Angsuran (Rp)	
1	2		3		5	6	7	8	9 = 7 - 8	10	11 = 8 + 10	12 = 7 - 11	13
1	LHP BPK atas LKPD TA 2008	1	Sisa kas pada bendahara pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp109.500.000,00 belum dapat dipertanggungjawabkan		2008	PKD 11 Oktober 2019: Keputusan Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi tanggal 13 April 2017	109.500.000,00	0,00	109.500.000,00		0,00	109.500.000,00	PKD tanggal 13 November 2020 1) 'PTL status tidak dapat ditindaklanjuti 2) Pindah dari status informasi
4	LHP BPK atas LKPD TA 2013	1	Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebesar Rp9.783.994.039,00 pada RSU Swadana Daerah Tarutung Digunakan Langsung dan Terdapat Indikasi Penyalahgunaan Keuangan Sebesar Rp3.010.443.595,51		2013	PKD 11 Oktober 2019: SK Bupati Nomor 408 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2017 tentang Pembebanan Ganti Rugi (Bendahara)	159.649.039,00	20.000.000,00	139.649.039,00		20.000.000,00	139.649.039,00	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
		1			2013	PKD 11 Oktober 2019: SK Bupati Nomor 407 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2017 tentang Pembebanan Ganti Rugi (Bendahara)	147.414.952,00	0,00	147.414.952,00		0,00	147.414.952,00	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
		1			2013	PKD 11 Oktober 2019: SK Bupati Nomor 410 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2017 tentang Pembebanan Ganti Rugi (Bendahara)	368.677.369,00	0,00	368.677.369,00		0,00	368.677.369,00	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
Jumlah A		**6**										**765.241.360,00**	
						koreksi						**765.241.360,00**	
4	LHP BPK atas Pilkada TA 2008 dan 2009	1	Surat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas KPU Kabupaten Tapanuli Utara ke Jakarta sebesar Rp16.800.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya (kelebihan pembayaran perjalanan dinas)		2008	Surat Pembebanan Kerugian Negara Sementara No. 100,102, 103, 112. 116, 120, 124, 146, 147, tanggal 19 Mei 2016 **PKD 26 Februari 2018** Sesuai PTL 7 Desember 2017, terdapat setoran berikut: 1. Tahun 2010 sebanyak tiga STS sebesar Rp2.207.600 2. Tahun 2012 sebanyak tiga STS sebesar Rp900.000,00 3. Tahun 2013 sebanyak dua STS sebesar Rp500.000,00 4. Tahun 2014 sebanyak dua STS sebesar Rp7.347.800,00	16.800.000,00	10.955.400,00	5.844.600,00		10.955.400,00	5.844.600,00	
6	LHP BPK atas LKPD TA 2009	1	Pembayaran biaya perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara memboroskan keuangan daerah sebesar Rp119.830.000,00		2009	1. Surat Pembebanan Kerugian Negara Sementara (SPKNS) No. 100 tanggal 16 Mei 2016 2. SPKNS No. 103 tanggal 19 Mei 2016 a.n. Agus Simanjuntak senilai Rp2.550.000,00 3. SPKNS No. 105 tanggal 19 Mei 2016 a.n. Arpin Pasaribu senilai Rp2.550.000,00 4. SPKNS No. 106 tanggal 19 Mei 2016 a.n. Asnan Sihombing senilai Rp2.550.000,00 5. SPKNS No. 107 tanggal 19 Mei 2016 a.n. Baginda Hutabarat senilai Rp2.550.000,00 6. SPKNS No. 148 tanggal 19 Mei 2016 a.n. Drs. B.P Nababan senilai Rp2.550.000,00 7. SPKNS No. 111 tanggal 19 Mei 2016 a.n. Drs. Poltak P Hutasoit senilai Rp2.550.000,00 8. SPKNS No. 114 tahun 2016 tanggal 19 Mei 2016 a.n. Herbert Panggabean senilai Rp2.550.000,00 9. Surat Pembebanan No. 115, 117, 118, 119, 141, 128, 144, 142, 136, 138, 130, dan 145,	119.830.000,00	76.480.000,00	43.350.000,00		76.480.000,00	43.350.000,00	

No.	Sumber Informasi/ Data (LHP, Pengaduan, Putusan Pengadilan, dll)	Jml Kasus	Uraian	Perangkat Daerah	Tahun Kejadian	Data/Dokumen yang Ada	Nilai Kerugian (Rp)	Pemantauan Periode Sebelumnya		Pemantauan Semester II Tahun 2025			Keterangan
								Total Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	Angsuran selama Periode Pemantauan (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Angsuran (Rp)	
1	2		3		5	6	7	8	9 = 7 - 8	10	11 = 8 + 10	12 = 7 - 11	13
10	LHP BPK atas LKPD TA 2011	1	Terdapat belanja perjalanan dinas Tahun 2011 sebesar Rp738.950.000,00 tidak didukung dengan dokumen yang meyakinkan		2011	**PKD 7 Oktober 2016** 1. Surat Pembebanan Kerugian Negara Sementara (SPKNS) No. 100 tanggal 16 Mei 2016 2. SPKNS No. 113, 126, 135 dan 140. **PKD 26 Februari 2018** 1. Sesuai PTL terdapat 3 setoran, yaitu sebesar Rp368.200.000,00 (sesuai LHP), Rp52.700.000,00 dan Rp44.900.000,00 serta bukti tiket maskapai penerbangan lain a.n. JanS dan BLum sebesar Rp17.600.000,00 2. Sesuai PTL 21 Agustus 2016, terdapat setoran Tahun 2013 sebesar Rp62.600.000,00 dan Tahun 2014 dan 2015 sejumlah Rp77.750.000,00 3. Sesuai PTL 14 Desember 2015, terdapat dua setoran Tahun 2015 sejumlah Rp2.400.000,00 4. Sesuai PTL tanggal 20 Juni 2016, 19 September 2016, dan 1 Desember 2016, terdapat 12 setoran Tahun 2016 sejumlah Rp39.745.000,00 5. Sesuai PTL 4 Desember 2017, terdapat 2 setoran tanggal 31 Oktober 2017, yaitu sebesar Rp5.500.000,00 dan Rp1.800.000,00	738.950.000,00	679.765.000,00	59.185.000,00		679.765.000,00	59.185.000,00	
11	LHP BPK atas LKPD TA 2012	1	Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada empat SKPD sebesar Rp334.243.950,00		2012	1. Dony R Simamora 9 November 2016 2. Surat Pembebanan Kerugian Negara Sementara (SPKNS) No. 100 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 3. SPKNS No. 109, 143, dan 132 **PKD 26 Februari 2018** 1. Sesuai PTL 4 Desember 2017, terdapat STS tgl 31 Okt 2017 sebesar Rp200.000,00	334.243.950,00	311.760.700,00	22.483.250,00		311.760.700,00	22.483.250,00	
		1			2013	PKD 11 Oktober 2019: SK Bupati Nomor 389 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018	38.153.814,19	7.000.000,00	31.153.814,19		7.000.000,00	31.153.814,19	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
		1			2013	PKD 11 Oktober 2019: SK Bupati Nomor 398 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018	34.100.147,45	5.000.000,00	29.100.147,45		5.000.000,00	29.100.147,45	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
		1			2013	PKD 11 Oktober 2019: SK Bupati Nomor 405, Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018	2.009.445,16	751.517,00	1.257.928,16		751.517,00	1.257.928,16	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
14	LHP BPK atas LKPD TA 2013	1	Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebesar Rp9.783.994.039,00 pada RSU Swadana Daerah Tarutung Digunakan Langsung dan Terdapat Indikasi Penyalahgunaan Keuangan Sebesar Rp3.010.443.595,51		2013	PKD 11 Oktober 2019: SK Bupati Nomor 411 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018	1.976.679.553,00	0,00	1.976.679.553,00		0,00	1.976.679.553,00	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
15	LHP BPK atas PDTT Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2014	1	Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak sesuai ketentuan sebesar Rp145.756.795,00		2014	**PKD 7 Oktober 2016** 1. Surat Pembebanan Kerugian Negara Sementara (SPKNS) No. 100 tanggal 16 Mei 2016 2. SPKNS No. 104, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 134, dan 139 tanggal 19 Mei 2016 **PKD 26 Februari 2018** 1. Sesuai PTL s.d. 8 Januari 2015, terdapat setoran sebesar Rp73.716.320,00 2. Sesuai PTL 21 Agustus 2015 dan 14 Desember 2015 terdapat 6 setoran Tahun 2015 sejumlah Rp50.533.900,00 3. Sesuai PTL 20 Juni 2016 terdapat 7 setoran Tahun 2016 sejumlah Rp8.653.200,00 **PKD Februari 2019** Sesuai PTL per 30 November 2018 terdapat setoran atas nama Joni Tombang Marbun sebesar Rp 2.533.200,00 tanggal 8 November 2018	145.756.795,00	137.308.595,00	8.448.200,00		137.308.595,00	8.448.200,00	

No.	Sumber Informasi/ Data (LHP, Pengaduan, Putusan Pengadilan, dll)	Jml Kasus	Uraian	Perangkat Daerah	Tahun Kejadian	Data/Dokumen yang Ada	Nilai Kerugian (Rp)	Pemantauan Periode Sebelumnya		Pemantauan Semester II Tahun 2025			Keterangan
								Total Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	Angsuran selama Periode Pemantauan (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Angsuran (Rp)	
1	2		3		5	6	7	8	9 = 7 - 8	10	11 = 8 + 10	12 = 7 - 11	13
25	LHP BPK atas Belanja TA 2016	1	Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah pada tiga Satker sebesar Rp204.232.150,00 tidak sesuai ketentuan		2016	Surat Penetapan Pembebanan Ganti Rugi Bupati No. 003 tanggal 16 Februari 2017 **PKD 26 Februari 2018** 1. Sesuai PTL, terdapat pengembalian sebelum LHP diterbitkan sebesar Rp8.090.000,00 2. Sesuai PTL tanggal 13 Maret 2017, terdapat 10 STS dari Sekretariat DPRD sebesar Rp39.380.000,00 dan satu setoran dari Dishub sebesar Rp8.415.000,00 3. Sesuai PTL tanggal 13 Juni 2017, terdapat 29 STS dari Sekretariat DPRD sebesar Rp82.222.000,00 4. Sesuai PTL tanggal 4 Desember 2017, terdapat satu STS sebesar Rp1.113.000,00 5. Setoran dari Masa Sihombing sebesar Rp1.630.000,00 tanggal 8 Januari 2018	204.232.150,00	201.680.400,00	2.551.750,00		201.680.400,00	2.551.750,00	
		1		195908161982012003	2019	**PKD 30 Juni 2024:** Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Keuangan Daerah atas Realisasi Tambahan Penghasilan Guru TA 2019	24.988.810,00	4.000.000,00	20.988.810,00		4.000.000,00	20.988.810,00	4. Setoran tanggal 8 Juli 2020 sebesar Rp2.850.000,00 a.n. Jones Dongoran
		1		196106101983031013	2019	**PKD 30 Juni 2024:** Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Keuangan Daerah atas Realisasi Tambahan Penghasilan Guru TA 2019	4.120.205,00	2.520.205,00	1.600.000,00		2.520.205,00	1.600.000,00	PKD 16 Desember 2022 1. Setoran tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp1.400.000,00 a.n. Irene Sitompul
		1		196106261983042005	2019	**PKD 30 Juni 2024:** Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Keuangan Daerah atas Realisasi Tambahan Penghasilan Guru TA 2019	12.360.615,00	0,00	12.360.615,00		0,00	12.360.615,00	2. Setoran tanggal 18 September 2020 sebesar Rp1.000.000,00 dan tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp1.000.000,00, a.n. Rotua Helena Delima Simanjuntak
40	LHP BPK atas LKPD TA 2019	1	Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan sebesar Rp23.800.000,00	Wakil Bupati Taput Periode 2014-2019	2019	**PKD 30 Juni 2024:** Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 263 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan TA 2019 tgl 22 April 2024	23.800.000,00	1.900.000,00	21.900.000,00		1.900.000,00	21.900.000,00	ID Runeg Informasi 1226199 PKD 30 Juni 2022: Setoran a.n. Mauliate Simorangkir (MS) sebesar Rp1.900.000,00 sesuai bukti transfer: 1. tgl 19 Januari 2021 sebesar Rp500.000,00; 2. tgl 11 Maret 2021 sebesar Rp500.000,00: 3. tgl 2 Juli 2021 sebesar Rp400.000,00: 4. tgl 29 November 2021 sebesar Rp500.000,00.
				Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 503 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kelebihan pembayaran belanja pegawai pada lima SKPD TA 2020 tanggal 30 Oktober 2025	Rp 4.670.300,00		4.670.300,00		Rp -	4.670.300,00	
				Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 503 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kelebihan pembayaran belanja pegawai pada lima SKPD TA 2020 tanggal 30 Oktober 2025	Rp 8.160.000,00		8.160.000,00		Rp -	8.160.000,00	

No.	Sumber Informasi/ Data (LHP, Pengaduan, Putusan Pengadilan, dll)	Jml Kasus	Uraian	Perangkat Daerah	Tahun Kejadian	Data/Dokumen yang Ada	Nilai Kerugian (Rp)	Pemantauan Periode Sebelumnya		Pemantauan Semester II Tahun 2025			Keterangan
								Total Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	Angsuran selama Periode Pemantauan (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Angsuran (Rp)	
1	2		3		5	6	7	8	9 = 7 - 8	10	11 = 8 + 10	12 = 7 - 11	13
				Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 503 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kelebihan pembayaran belanja pegawai pada lima SKPD TA 2020 tanggal 30 Oktober 2025	Rp 305.500,00		305.500,00		Rp -	305.500,00	
47	LHP atas LKPD 2021	1	Pembayaran Belanja Pegawai Kepada yang Tidak Berhak Sebesar Rp35.620.600,00	Dinas Kesehatan	2021	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 558 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Pembayaran Belanja Pegawai Kepada yang tidak berhak TA 2021 tanggal 25 Nopember 2354	Rp 12.240.000,00		12.240.000,00		0,00	12.240.000,00	
				Dinas Kesehatan	2021	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 558 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Pembayaran Belanja Pegawai Kepada yang tidak berhak TA 2021 tanggal 25 Nopember 2355	Rp 7.837.500,00		7.837.500,00		0,00	7.837.500,00	
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2021	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 558 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Pembayaran Belanja Pegawai Kepada yang tidak berhak TA 2021 tanggal 25 Nopember 2357	Rp 5.453.800,00		5.453.800,00		0,00	5.453.800,00	
				Dinas Pertanian	2021	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 558 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Pembayaran Belanja Pegawai Kepada yang tidak berhak TA 2021 tanggal 25 Nopember 2358	Rp 6.224.400,00	Rp 3.112.200	3.112.200,00		3.112.200,00	3.112.200,00	
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2021	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 558 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Pembayaran Belanja Pegawai Kepada yang tidak berhak TA 2021 tanggal 25 Nopember 2359	Rp 1.809.800,00		1.809.800,00		0,00	1.809.800,00	
	Jumlah B	**593**										**2.280.492.767,80**	
	koreksi	**593**										**2.280.492.767,80**	
1	LHP BPK atas Belanja TA 2005 dan 2006	1	Pengadaan kursi plastik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara diterima tidak sesuai dengan jumlah dalam kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp28.875.000,00		2005	**PKD 11 Oktober 2019:** Keputusan Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi tanggal 13 April 2017	28.875.000,00	17.091.116,66	11.783.883,34		17.091.116,66	11.783.883,34	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
4	LHP BPK atas LKPD TA 2005	1	Pelaksanaan Pengadaan senjata api sebesar Rp130.000.000,00 pada Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Belum Sesuai Ketentuan		2005	PKD 11 Oktober 2019: Keputusan Nomor 136 Tahun 2017 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi tanggal 13 April 2017	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00		0,00	130.000.000,00	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
10	LHP BPK atas LKPD TA 2010	1	Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp42.414.288,18		2010	**PKD per 7 Oktober 2016** CV Pardata setoran tgl 24 Mei 2016 Rp2.391.539,63.	42.414.288,18	39.220.441,12	3.193.847,06		39.220.441,12	3.193.847,06	
16	LHP BPK atas LKPD TA 2011	1	Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp43.025.000,00 dan Mekanisme Penggunaan Block Seats Yang Tidak Jelas dalam Perjanjian Kerjasama dengan Susi Air		2011	**PKD 11 Oktober 2019:** Keputusan Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi tanggal 13 April 2017	43.025.000,00	0,00	43.025.000,00		0,00	43.025.000,00	PKD tanggal 13 November 2020 Pindah dari status informasi
18	LHP BPK atas LKPD TA 2012	1	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan pada Empat SKPD Sebesar Rp147.073.316,38		2012	PKD 11 Oktober 2019: SK Bupati Nomor 380 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2017 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi	147.073.316,38	133.987.999,35	13.085.317,03		133.987.999,35	13.085.317,03	PKD tanggal 13 November 2020 1) Sisa belum disetor adalah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan an. CV Martina 2) Pindah dari status informasi
		1			2014	**PKD 11 Oktober 2019:** SK Bupati Nomor 385 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi.	14.699.018,64	14.669.018,64	30.000,00		14.669.018,64	30.000,00	**PKD 13 November 2020** 1) Setoran tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp7.000.000,00 a.n. CV Sahatma; 2) Pindah dari status informasi
32	LHP BPK atas LKPD TA 2017	1	Pelaksanaan sembilan paket pekerjaan pada dinas pertanian tidak sesuai kontrak sebesar Rp86.372.308,68		2017	**PKD 5 November 2017** SK Bupati No. 296 s.d. 302 Tahun 2018 tanggal 5 juli 2018 tentang Pembebanan ganti rugi **PKD Februari 2019** 1. STS tgl 17 Desember 2018 sebesar Rp10.023.315,94 a.n CV. Ex 2. STS tgl 28 Desember 2018 sebesar Rp6.267.686,99 a.n CV. EL 3. STS tgl 11 Januari 2019 sebesar Rp4.294.000,00 a.n CV. TJ 4. STS tgl 11 Januari 2019 sebesar Rp630.000,00 a.n CV. TJ **PTL tgl 24 September 2019** STS tgl 10 Juli 2019 sebesar Rp1.000.000,00 a.n. CV Pr	78.389.166,46	69.214.126,04	9.175.040,42		69.214.126,04	9.175.040,42	Dinas Pertanian : CV PR kurang setor sebesar Rp9.175.040,42

No.	Sumber Informasi/ Data (LHP, Pengaduan, Putusan Pengadilan, dll)	Jml Kasus	Uraian	Perangkat Daerah	Tahun Kejadian	Data/Dokumen yang Ada	Nilai Kerugian (Rp)	Pemantauan Periode Sebelumnya		Pemantauan Semester II Tahun 2025			Keterangan
								Total Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	Angsuran selama Periode Pemantauan (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Angsuran (Rp)	
1	2		3		5	6	7	8	9 = 7 - 8	10	11 = 8 + 10	12 = 7 - 11	13
		1		Dinas Pertanian	2019	**PKD 30 Juni 2024**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 262 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan TA 2019 tanggal 22 April 2024	30.246.635,90	23.000.000,00	7.246.635,90	0,00	23.000.000,00	7.246.635,90	
		1		Dinas Pertanian	2019	**PKD 30 Juni 2024**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 262 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan TA 2019 tanggal 22 April 2024	36.054.752,44	12.000.000,00	24.054.752,44	0,00	12.000.000,00	24.054.752,44	
		1		Dinas Pertanian	2019	**PKD 30 Juni 2024**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 262 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan TA 2019 tanggal 22 April 2024	22.170.805,02	13.000.000,00	9.170.805,02	0,00	13.000.000,00	9.170.805,02	
		1		Dinas Pertanian	2019	**PKD 30 Juni 2024**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 262 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan TA 2019 tanggal 22 April 2024	35.708.341,80	11.000.000,00	24.708.341,80	0,00	11.000.000,00	24.708.341,80	
		1		Dinas Pertanian	2019	**PKD 30 Juni 2024**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 262 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan TA 2019 tanggal 22 April 2024	19.790.397,43	13.200.000,00	6.590.397,43	0,00	13.200.000,00	6.590.397,43	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2042	Rp 50.123.762,57	Rp 15.000.000,00	35.123.762,57		Rp 15.000.000,00	35.123.762,57	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2043	Rp 40.636.711,09	Rp 40.636.710,93	0,16		Rp 40.636.710,93	0,16	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2047	Rp 6.982.802,26	Rp 6.982.802,00	0,26		Rp 6.982.802,00	0,26	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2051	Rp 16.800.372,56	Rp 8.000.000,00	8.800.372,56		Rp 8.000.000,00	8.800.372,56	

No.	Sumber Informasi/ Data (LHP, Pengaduan, Putusan Pengadilan, dll)	Jml Kasus	Uraian	Perangkat Daerah	Tahun Kejadian	Data/Dokumen yang Ada	Nilai Kerugian (Rp)	Pemantauan Periode Sebelumnya		Pemantauan Semester II Tahun 2025			Keterangan
								Total Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	Angsuran selama Periode Pemantauan (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Angsuran (Rp)	
1	2		3		5	6	7	8	9 = 7 - 8	10	11 = 8 + 10	12 = 7 - 11	13
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2052	Rp 62.808.252,48	Rp 8.000.000,00	54.808.252,48		Rp 8.000.000,00	54.808.252,48	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2053	Rp 59.609.370,46	Rp 24.000.000,00	35.609.370,46		Rp 24.000.000,00	35.609.370,46	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2055	Rp 59.348.155,48	Rp 28.500.000,00	30.848.155,48		Rp 28.500.000,00	30.848.155,48	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2056	Rp 60.701.000,39	Rp 53.000.000,00	7.701.000,39		Rp 53.000.000,00	7.701.000,39	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2057	Rp 59.064.377,08	Rp 21.564.377,08	37.500.000,00		Rp 21.564.377,08	37.500.000,00	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2059	Rp 51.846.984,49	Rp 7.000.000,00	44.846.984,49		Rp 7.000.000,00	44.846.984,49	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2062	Rp 72.828.561,36	Rp 45.305.000,00	27.523.561,36		Rp 45.305.000,00	27.523.561,36	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2064	Rp 68.763.629,90	Rp 27.000.000,00	41.763.629,90		Rp 27.000.000,00	41.763.629,90	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2065	Rp 70.863.730,04	Rp 9.000.000,00	61.863.730,04		Rp 9.000.000,00	61.863.730,04	

No.	Sumber Informasi/ Data (LHP, Pengaduan, Putusan Pengadilan, dll)	Jml Kasus	Uraian	Perangkat Daerah	Tahun Kejadian	Data/Dokumen yang Ada	Nilai Kerugian (Rp)	Pemantauan Periode Sebelumnya		Pemantauan Semester II Tahun 2025			Keterangan
								Total Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	Angsuran selama Periode Pemantauan (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Angsuran (Rp)	
1	2		3		5	6	7	8	9 = 7 - 8	10	11 = 8 + 10	12 = 7 - 11	13
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2070	Rp 48.816.888,39	Rp 15.689.000,00	33.127.888,39		Rp 15.689.000,00	33.127.888,39	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2071	Rp 43.280.299,39	Rp 25.000.000,00	18.280.299,39		Rp 25.000.000,00	18.280.299,39	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	2020	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 506 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan Volume Pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan 38 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 tanggal 10 Oktober 2072	Rp 112.206.719,34	Rp 102.000.000,00	10.206.719,34		Rp 102.000.000,00	10.206.719,34	
				Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2021	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 560 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan volume dan Mutu atas 20 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang TA 2021 tanggal 25 Nopember 2025	Rp 20.954.045,05	Rp 15.000.000,00	5.954.045,05		Rp 15.000.000,00	5.954.045,05	
42	LHP atas LKPD 2021	1	Kekurangan Volume atas 29 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pariwisata Sebesar Rp244.609.657,36	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2021	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 559 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan volume atas 29 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata TA 2021 tanggal 25 Nopember 2025	Rp 20.105.959,71	Rp 10.000.000,00	10.105.959,71		Rp 10.000.000,00	10.105.959,71	
				Dinas Pariwisata	2021	**PKD 30 Desember 2025**: Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 559 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Kekurangan volume atas 29 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata TA 2021 tanggal 25 Nopember 2055	Rp 12.182.311,36	Rp 5.000.000,00	7.182.311,36		Rp 5.000.000,00	7.182.311,36	
Jumlah C		**101**										**753.310.063,83**	
1	Temuan BPK Tahun 2025	1	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada RSUD dan Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	2025	Temuan BPK	2.273.378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.378,09	
				RSUD	2025	Temuan BPK	6.607.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607.695,00	
		2	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Belanja Modal JIJ pada Dinas PUTR	Dinas PUTR	2025	Temuan BPK	6.550.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.386,12	
Jumlah D												**15.431.459,21**	
Jumlah A + B + C + D		**700**										**3.814.475.650,84**	

Lampiran 12

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2025

PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	PENYISIHAN		
		2025	2024	SELISIH
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	(25.315.200,00)	(25.315.200,00)	-
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	(299.384.037,00)	(300.134.037,00)	(750.000,00)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(18.561.200,00)	(18.561.200,00)	-
4	Penyisihan Piutang PBBP2	(11.563.119.940,67)	(8.525.201.422,78)	3.037.918.517,89
5	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(1.070.317.474,13)	(887.201.964,34)	183.115.509,79
6	Penyisihan Piutang Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batua	(10.197.050,00)	-	10.197.050,00
7	Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(3.522.788.739,00)	(3.522.788.739,00)	-
8	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	(155.813.319,06)	(7.316.121.717,20)	(7.160.308.398,14)
9	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Pr	-	(9.980.705,00)	(9.980.705,00)
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	**(16.665.496.959,86)**	**(20.605.304.985,32)**	**(3.939.808.025,46)**

Lampiran 13

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI LAPORAN PERSEDIAAN BARANG
PER 31 DESEMBER 2025

No.	SKPD	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Bahan Lainnya	Alat Tulis Kantor	Bahan Cetak	Benda Pos	Perabot Kantor	Alat Listrik	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	Pakan	Natura dan Pakan Lainnya	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	52.989.080,00	0,00	394.000,00	0,00	140.000,00	708.000,00	12.577.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.838.880,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.339.194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.339.194,32
3	RSU DAERAH TARUTUNG	0,00	0,00	0,00	2.707.954.115,78	41.452.950,00	0,00	0,00	0,00	11.743.800,00	0,00	55.483.350,00	5.899.203.842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715.838.058,27
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	460.252.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.252.125,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	30.846.327,00	0,00	0,00	376.311,00	88.000,00	0,00	0,00	91.719.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.029.863,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	513.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774.783.858,99	0,00	0,00	0,00	33.775.297.233,99
8	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	330.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.244,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	6.810.000,00	0,00	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.849.339,00	52.100,00	375.162.112,00	0,00	93.730.525,00	14.400.000,00	539.664.076,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	142.948,00	7.159.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791.948,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	681.620,00	400.804.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.485.865,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	396.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.001,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	139.638,00	1.285.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.788,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	179.525.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.971.050,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.652,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.652,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
21	DINAS PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
22	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.099.999,89	0,00	0,00	114.729.589,89
23	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	865.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.650,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	135.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.497,00
29	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.081,00
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	71.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.928,00
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	992.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.950,00
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		**460.252.125,00**	**30.846.327,00**	**6.810.000,00**	**2.707.954.115,78**	**110.212.415,00**	**589.161.945,00**	**494.000,00**	**490.000,00**	**103.603.025,00**	**708.000,00**	**68.061.150,00**	**11.574.422.375,81**	**52.100,00**	**34.149.945.970,99**	**112.099.999,89**	**93.730.525,00**	**14.400.000,00**	**50.023.244.074,47**

Lampiran 14

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	U R A I A N	SALDO AWAL 2025 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR 2025 (Rp)
1	TANAH	851.271.193.314,00	326.059.320,00	36.949.494.020,00	814.647.758.614,00
2	PERALATAN DAN MESIN	454.304.118.366,00	48.683.613.354,88	9.866.760.306,36	493.120.971.414,52
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	816.892.322.252,55	22.611.663.454,14	889.789.267,50	838.614.196.439,19
4	JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN	1.866.176.536.837,11	47.426.511.156,08	35.191.921.935,20	1.878.411.126.057,99
5	ASET TETAP LAINNYA	31.075.123.196,00	99.685.341.974,01	1.269.344.971,00	129.491.120.199,01
6	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	0,00	1.409.927.486,00	0,00	1.409.927.486,00
6	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.612.384.019.485,52)	(188.497.573.408,44)	(25.227.375.219,28)	(1.775.654.217.674,68)
	TOTAL	**2.407.335.274.480,14**	**31.645.543.336,67**	**58.939.935.280,78**	**2.380.040.882.536,03**

Lampiran 15

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DAFTAR SALDO ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	S K P D	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KDP	AKUMULASI PENYUSUTAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28.002.732.657,00	133.911.282.526,08	441.694.624.833,08	4.314.838.349,00	126.185.271.898,01	0,00	(251.740.236.107,09)	482.368.514.156,08
2	DINAS KESEHATAN	7.814.315.098,00	79.233.520.745,90	114.085.096.378,91	1.072.260.594,00	0,00	0,00	(93.479.755.789,24)	108.725.437.027,57
3	RSU DAERAH TARUTUNG	7.050.624.000,00	95.105.974.029,00	43.402.327.029,00	3.670.299.711,00	34.836.000,00	0,00	(83.768.207.279,29)	65.495.853.489,71
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	479.187.665.924,00	18.990.358.230,00	3.165.114.690,00	1.600.567.600.546,58	0,00	229.135.965,00	(986.321.117.778,70)	1.115.818.757.576,88
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	39.880.455.773,00	4.811.848.163,00	26.914.799.810,50	215.170.873.873,50	148.445.000,00	0,00	(141.300.895.093,46)	145.625.527.526,54
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.375.000,00	11.322.358.642,00	2.445.448.294,50	0,00	0,00	0,00	(10.557.645.647,59)	3.240.536.288,91
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	208.600.000,00	4.372.089.072,00	744.576.050,00	0,00	0,00	0,00	(4.017.398.775,40)	1.307.866.346,60
8	DINAS SOSIAL	333.200.000,00	1.502.767.391,00	878.210.548,00	0,00	0,00	0,00	(1.577.895.675,95)	1.136.282.263,05
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	4.004.800.000,00	1.460.344.140,00	2.903.058.548,00	0,00	0,00	0,00	(3.159.164.730,69)	5.209.037.957,31
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.595.243.750,00	5.607.578.194,09	9.060.922.725,00	57.295.169,00	211.051.641,00	0,00	(8.025.564.794,91)	11.506.526.684,18
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	747.150.000,00	11.987.330.251,00	1.564.506.056,20	5.326.042.960,00	0,00	0,00	(9.364.512.315,60)	10.260.516.951,60
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.505.287.597,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	(3.983.363.646,25)	523.053.950,75
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	175.000.000,00	1.310.425.743,00	646.387.500,00	0,00	10.800.000,00	0,00	(1.540.041.879,62)	602.571.363,38
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	354.200.000,00	6.587.497.721,00	4.136.100.290,00	0,00	0,00	0,00	(7.106.093.000,28)	3.971.705.010,72
15	DINAS PERHUBUNGAN	15.069.930.000,00	6.458.429.794,11	4.171.369.856,50	5.817.258.848,00	0,00	0,00	(9.786.869.920,95)	21.730.118.577,66
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	398.000.000,00	4.530.792.689,64	1.806.012.000,00	38.787.616,00	10.000.000,00	0,00	(4.602.042.530,72)	2.181.549.774,92
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.861.878.000,00	2.358.829.736,00	37.095.590.018,00	3.982.067.462,00	0,00	1.180.791.521,00	(16.398.988.996,09)	41.080.167.740,91
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	1.698.261.322,00	4.408.158.360,00	0,00	0,00	0,00	(3.324.540.834,65)	2.781.878.847,35
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.580.009.383,00	735.762.755,00	7.649.005.962,00	0,00	0,00	0,00	(3.193.093.556,78)	16.771.684.543,22
20	DINAS PERPUSTAKAAN	0,00	2.508.699.782,70	1.835.791.379,30	0,00	1.872.451.381,00	0,00	(2.647.522.239,29)	3.569.420.303,71
21	DINAS PARIWISATA	9.104.430.000,00	4.012.090.036,00	34.612.473.877,50	11.790.522.384,31	194.248.763,00	0,00	(12.241.133.754,24)	47.472.631.306,57
22	DINAS PERTANIAN	6.002.338.160,00	19.033.473.115,00	11.006.370.273,00	573.256.905,00	0,00	0,00	(18.538.481.824,48)	18.076.956.628,52
23	SEKRETARIAT DAERAH	27.636.950.000,00	40.164.448.976,00	43.186.588.300,00	944.489.830,00	674.600.515,00	0,00	(45.456.044.391,29)	67.151.033.229,71
24	SEKRETARIAT DPRD	639.400.000,00	7.150.509.370,00	8.424.254.500,00	103.000.000,00	17.470.001,00	0,00	(11.253.033.760,23)	5.081.600.110,77
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.038.750.000,00	1.761.207.631,00	2.941.886.540,00	32.960.500,00	102.339.000,00	0,00	(2.459.659.198,46)	3.417.484.472,54
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	142.978.797.880,00	5.283.286.811,80	10.652.759.527,70	173.539.880,00	28.476.000,00	0,00	(7.529.147.126,29)	151.587.712.973,21
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.001.086.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.732.984.446,80)	268.101.729,40
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	288.000.000,00	2.502.351.058,00	1.770.720.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.310.068.976,17)	2.251.002.081,83
29	INSPEKTORAT	0,00	4.591.511.883,00	0,00	36.280.300,00	0,00	0,00	(2.955.426.182,26)	1.672.366.000,74
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	6.186.727.836,00	1.073.014.417,00	2.315.159.606,00	16.103.587.402,70	0,00	0,00	(8.227.478.742,53)	17.451.010.519,17
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	229.331.250,00	435.954.185,00	1.201.866.827,00	9.000.000,00	0,00	0,00	(1.120.261.291,14)	755.890.970,86
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	805.000.000,00	439.665.002,00	905.200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	(1.277.987.958,25)	873.877.043,75
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	282.401.250,00	526.508.445,00	527.766.000,00	2.034.175.930,00	0,00	0,00	(1.661.187.639,53)	1.709.663.985,47
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	1.814.628.140,00	443.468.560,00	1.036.750.000,00	2.859.024.399,90	0,00	0,00	(1.950.319.147,29)	4.203.551.952,61

NO	S K P D	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KDP	AKUMULASI PENYUSUTAN	JUMLAH
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	295.517.450,00	281.736.324,00	1.400.651.832,00	1.637.381.997,00	0,00	0,00	(1.400.157.850,10)	2.215.129.752,90
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	129.294.563,00	421.384.683,00	628.217.350,00	2.000.000,00	0,00	0,00	(767.231.875,30)	413.664.720,70
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	105.600.000,00	298.051.407,00	686.560.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	(580.272.603,69)	511.938.803,31
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	907.850.000,00	412.012.926,00	869.634.358,00	0,00	0,00	0,00	(1.063.228.950,86)	1.126.268.333,14
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	365.000.000,00	418.752.890,00	1.106.015.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.253.623.321,66)	636.144.568,34
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	564.000.000,00	391.985.731,00	1.000.379.134,00	2.000.000,00	0,00	0,00	(783.145.803,95)	1.175.219.061,05
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	1.559.077.500,00	583.699.823,00	2.944.967.711,00	2.082.581.400,00	0,00	0,00	(1.865.803.947,32)	5.304.522.486,68
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	531.740.000,00	403.142.826,00	932.042.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	(870.778.056,08)	998.147.369,92
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	632.385.000,00	498.208.194,00	769.002.200,00	2.000.000,00	0,00	0,00	(767.429.744,81)	1.134.165.649,19
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	256.360.000,00	440.130.240,00	1.087.830.474,00	2.000.000,00	0,00	0,00	(1.177.091.021,30)	609.229.692,70
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	553.852.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(517.289.468,10)	36.562.711,90
JUMLAH		**814.647.758.614,00**	**493.120.971.414,52**	**838.614.196.439,19**	**1.878.411.126.057,99**	**129.491.120.199,01**	**1.409.927.486,00**	**(1.775.654.217.674,68)**	**2.380.040.882.536,03**

Lampiran 16

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR MUTASI ASET TETAP TANAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28.002.732.657,00	0,00	0,00	28.002.732.657,00
2	DINAS KESEHATAN	7.814.315.098,00	0,00	0,00	7.814.315.098,00
3	RSU DAERAH TARUTUNG	7.050.624.000,00	0,00	0,00	7.050.624.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	479.637.665.924,00	0,00	450.000.000,00	479.187.665.924,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	39.566.880.453,00	313.575.320,00	0,00	39.880.455.773,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.375.000,00	0,00	0,00	30.375.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	208.600.000,00	0,00	0,00	208.600.000,00
8	DINAS SOSIAL	333.200.000,00	0,00	0,00	333.200.000,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	4.004.800.000,00		0,00	4.004.800.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.595.243.750,00	0,00	0,00	4.595.243.750,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	747.150.000,00	0,00	0,00	747.150.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE	354.200.000,00	0,00	0,00	354.200.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	15.069.930.000,00	0,00	0,00	15.069.930.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	398.000.000,00	0,00	0,00	398.000.000,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.861.878.000,00	0,00	0,00	12.861.878.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.580.009.383,00	0,00	0,00	11.580.009.383,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DINAS PARIWISATA	9.104.430.000,00	0,00	0,00	9.104.430.000,00
22	DINAS PERTANIAN	6.002.338.160,00	0,00	0,00	6.002.338.160,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	27.636.950.000,00	0,00	0,00	27.636.950.000,00
24	SEKRETARIAT DPRD	639.400.000,00	0,00	0,00	639.400.000,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.038.750.000,00	0,00	0,00	1.038.750.000,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	179.478.291.900,00	0,00	36.499.494.020,00	142.978.797.880,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	6.186.727.836,00	0,00	0,00	6.186.727.836,00
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	229.331.250,00	0,00	0,00	229.331.250,00
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	805.000.000,00	0,00	0,00	805.000.000,00
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	282.401.250,00	0,00	0,00	282.401.250,00
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	1.805.772.140,00	8.856.000,00	0,00	1.814.628.140,00
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	291.889.450,00	3.628.000,00	0,00	295.517.450,00
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	129.294.563,00	0,00	0,00	129.294.563,00
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	105.600.000,00	0,00	0,00	105.600.000,00
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	907.850.000,00	0,00	0,00	907.850.000,00
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	564.000.000,00	0,00	0,00	564.000.000,00
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	1.559.077.500,00	0,00	0,00	1.559.077.500,00
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	531.740.000,00	0,00	0,00	531.740.000,00
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	632.385.000,00		0,00	632.385.000,00
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	256.360.000,00		0,00	256.360.000,00
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	288.000.000,00		0,00	288.000.000,00
JUMLAH		**851.271.193.314,00**	**326.059.320,00**	**36.949.494.020,00**	**814.647.758.614,00**

Lampiran 17

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR ASET TETAP TANAH BERSERTIFIKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

I. ASET TANAH YANG SUDAH SERTIFIKAT

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	NOMOR SERTIFIKAT	OPD PENGGUNA BARANG
1	TANAH GEDUNG KANTOR BUPATI UNIT A/KANTOR BUPATI	JL. SUPRAPTO	5.237	02.15.01.06.4.00040	SEKRETARIAT DAERAH
2	TANAH GEDUNG KANTOR BUPATI UNIT B/BPKPAD	JL. A. YANI	1.733	02.15.01.06.4.00035	SEKRETARIAT DAERAH
3	TANAH GEDUNG KANTOR BUPATI UNIT C/ DPRD, INSPEKTORAT,BKD,SATPOL PP, P	JL. DIPONEGORO	11.773	02.15.01.06.4.00037	SEKRETARIAT DAERAH
4	TANAH GEDUNG SERBGUNA/STADION MINI TARUTUNG	JL. RAJA SAUL LBN TOBING	16.063	02.15.01.04.4.00004	SEKRETARIAT DAERAH
5	TANAH GEDUNG KANTOR PERUSDA PERTANIAN	JL. SISINGAMANGARAJA	338	02.15.01.06.4.00038	SEKRETARIAT DAERAH
6	TANAH TAMAN KOTA	JL. SUDIRMAN	985	02.15.01.06.4.00033	SEKRETARIAT DAERAH
7	TANAH BANGUNAN RUMAH DINAS BUPATI	JL. A.YANI	3.063	02.15.01.06.4.00034	SEKRETARIAT DAERAH
8	TANAH BANGUNAN RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	JL. RAJA JOHANES HUTABARAT	1.350	02.15.01.22.4.00005	SEKRETARIAT DAERAH
9	TANAH BANGUNAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH	JL. A. YANI	362	02.15.01.06.4.00036	SEKRETARIAT DAERAH
10	TANAH BANGUNAN MESS MEDAN	JL. TANJUNG BUNGA III, MEDAN	1.438	02.01.15.10.4.00018	SEKRETARIAT DAERAH
11	PERUMAHAN KEJAKSAAN	JL. DARI SIPOHOLON - TARUTUNG	2.059	02.15.01.26.3.00003	BPKPAD
12	TANAH GEDUNG GUDANG FARMASI	HUTATORUAN VII	1.481	02.15.06.39.4.00002	BPKPAD
13	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	KEL. HUTATORUAN X, KEC TARUTUNG	1.203	02.15.06.48.5.00001	BPKPAD
14	TANAH PASAR TARUTUNG	DESA SIMAMORA	61.181	02.15.06.48.5.00001	BPKPAD
15	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. SM. RAJA, TARUTUNG HUTATORUAN X	115	02.15.06.48.5.00002	BPKPAD
16	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. SM. RAJA/DIPONEGORO, HUTATORUAN X	1.730	02.15.06.48.5.00003	BPKPAD
17	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. DIPONEGORO, TARUTUNG HUTATORUAN X	161	02.15.06.48.5.00004	BPKPAD
18	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. DIPONEGORO, TARUTUNG HUTATORUAN	153	02.15.06.48.5.00005	BPKPAD
19	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. PATTIMURA, TARUTUNG HUTATORUAN X	529	02.15.06.48.5.00006	BPKPAD
20	TANAH BANGUNAN RUMAH	JL. AHMAD YANI,TARUTUNG	1.034	02.15.06.48.5.00007	BPKPAD
21	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. SM.RAJA, TARUTUNG	1.692	02.15.06.48.5.00008	BPKPAD
22	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. SM.RAJA, TARUTUNG HUTATORUAN X	1.642	02.15.06.48.5.00009	BPKPAD
23	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. GAJAH MADA/DIPONEGORO TARUTUNG HUTATORUAN X	1.642	02.15.06.48.5.00010	BPKPAD
24	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. SM.RAJA, TARUTUNG HUTATORUAN X	1.430	02.15.06.48.5.00011	BPKPAD
25	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. GOTONG ROYONG, TARUTUNG HUTATORUAN X	426	02.15.06.48.5.00012	BPKPAD
26	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. SUTOMO, JL.DIPONEGORO TARUTUNG HUTATORUAN X	1.068	02.15.06.48.5.00013	BPKPAD
27	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. SUTOMO, TARUTUNG HUTATORUAN X	123	02.15.06.48.5.00014	BPKPAD
28	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. SM. RAJA, TARUTUNG HUTATORUAN X	146	02.15.06.48.5.00015	BPKPAD
29	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. SM. RAJA, TARUTUNG HUTATORUAN X	325	02.15.06.48.5.00016	BPKPAD
30	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. KORNEL SIMANJUNTAK, JL. SUPRATMAN TARUTUNG HUTATORUAN X	627	02.15.06.48.5.00017	BPKPAD
31	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	PONEGORO/KORNEL SIMANJUNTAK/JL. GERHARD LBN TOBING TARUTUNG HUTATORU	2.009	02.15.06.48.5.00018	BPKPAD
32	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. FL. TOBING/JL. HKI HUTATORUAN X	1.192	02.15.06.48.5.00019	BPKPAD
33	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. D.I.PANJAITAN,TARUTUNG HUTATORUAN X	208	02.15.06.48.5.00020	BPKPAD
34	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. DIPONEGORO/D.I PANJAITAN HUTATORUAN X	574	02.15.06.48.5.00021	BPKPAD
35	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. D.I PANJAITAN/HKI HUTATORUAN X	224	02.15.06.48.5.00022	BPKPAD
36	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN	JL. D.I.PANJAITAN,TARUTUNG HUTATORUAN X	1.790	02.15.06.48.5.00023	BPKPAD
37	TANAH JASA/ EKS UKM	DESA PARIKSABUNGAN	674	02.15.09.15.4.00007	BPKPAD
38	TANAH JASA/ EKS LLD	DESA PARIKSABUNGAN	249	02.15.09.15.4.00006	BPKPAD
39	TANAH JASA / BANDARA SILANGIT	DESA PARIKSABUNGAN	1.036.454	02.15.09.15.5.00001	BPKPAD
40	TANAH KANTOR BAPPEDA	KEL. HUTATORUAN X, KEC TARUTUNG	1.564	02.15.01.06.4.00024	BAPPEDA
41	TANAH GEDUNG KANTOR DINAS CATATAN SIPIL	JL. SM. RAJA	352	02.15.01.06.4.00041	BPKPAD
42	TANAH RUMAH TINGGAL DEKRANASDA	JL.. TARUTUNG- SIPOHOLON	470	02.15.01.21.4.00002	BPKPAD
43	TANAH KANTOR EKS PENERANGAN SIMORANGKIR	DESA SIMORANGKIR JULU/JL. TARUTUNG -PAHAE	1.205	---	BPKPAD
44	TANAH KANTOR EKS PENERANGAN SIMORANGKIR	DESA SIMORANGKIR JULU/JL. TARUTUNG -PAHAE	195	---	BPKPAD
45	TANAH GEDUNG KANTOR BPBD	JL. RAJA JOHANES HUTABARAT	607	02.15.01.22.4.00005	BPBD
46	TANAH GEDUNG KANTOR KOMINFO	JL. SISINGAMANGARAJA	252	02.15.01.06.1.00039	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
47	TANAHGEDUNG KANTOR DINAS KOPERASI	JL.. RAJA JOHANNES HUTABARAT	796	02.15.01.22.4.00010	DINAS KOPERASI
48	TANAH GEDUNG KANTOR EKS LINGKUNGAN HIDUP	JL. RAJA JOHANES HUTABARAT	459	02.15.01.22.4.00008	SEKRETARIAT DPRD
49	TANAH GEDUNG KANTOR LINGKUNGAN HIDUP EKS DINAS PASAR	HUTATORUAN VII	411	02.15.01.04.4.00005	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
50	TANAH GEDUNG BBI SILANGKITANG	JL. TARUTUNG-SIPOHOLON	6.417	02.15.04.05.1.00002	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	NOMOR SERTIFIKAT	OPD PENGGUNA BARANG
51	TANAH KANTOR DINAS PU	JL. TARUTUNG- SIBORNGBORONG	2.984	02.15.01.12.4.00001	DINAS PUPR
52	DINAS PARIWISATA				
53	DINAS PARIWISATA	JL.HUTA SIRAYA SIMANJUNTAK	19.070	02.15.09.15.4.00003	DINAS PUPR
54	TANAH DAN BANGUNAN ALSINTAN	JL. PERUMNAS SILANGKITANG	2.464	02.15.04.13.4.00004	DINAS PERTANIAN
55	TERMINAL MADYA & KTR DISHUB TARUTUNG	DESA HUBARAT PARTALI TORUAN	27.789	---	DINAS PERHUBUNGAN
56	TANAK KANTOR BAPPEMAS	JL.SUTAN SUMURUNG DESA SIRAJA HUTAGALUNG	1.000	02.15.06.18.4.00002	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
57	TANAH GEDUNG KANTOR CAMAT SIPOHOLON	JL.. PANCASILA	1.013	02.15.04.02.4.00002	KANTOR CAMAT SIPOHOLON
58	TANAH RUMAH DINAS CAMAT SIPOHOLON	JL.. PANCASILA	488	02.15.04.02.4.00003	KANTOR CAMAT SIPOHOLON
59	TANAH GEDUNG KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG	JL.. SILIWANGI, KEL. PASAR SIBORONGBORONG	3.437	02.15.09.01.4.00014	KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG
60	TANAH KANTOR KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG	JL. TUGU	261	02.15.09.01.4.00013	KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG
61	TANAH GEDUNG KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	JL.. SILIWANGI	2.932	02.15.13.01.4.00007	KANTOR CAMAT PANGARIBUAN
62	TANAH GEDUNG SERBA GUNA PANGARIBUAN	JL.. SILIWANGI	368	02.15.13.01.4.00005	KANTOR CAMAT PANGARIBUAN
63	TANAH KANTOR CAMAT SIATAS BARITA	SIMORANGKIR JULU	976	02.15.02.05.4.00006	KANTOR CAMAT SIATAS BARITA
64	TANAH DERMAGA MUARA	HUTA NAGODANG	4.045	02.15.15.01.4.00002	KANTOR CAMAT MUARA
65	TANAH KANTOR DINAS PENDIDIKAN	JL.. RAJA JOHANNES HUTABARAT	2.300	02.15.01.22.4.00009	DINAS PENDIDIKAN
66	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173147	ADIANKOTING	2.142	---	DINAS PENDIDIKAN
67	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173150	DESA PAGARAN LAMBUNG	1.779	02.15.04.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
68	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173215	DESA SIBARGOT GAROGA	5.235	---	DINAS PENDIDIKAN
69	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173227	DESA AEKTANGGA	13.452	02.15.10.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
70	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173231	PADANG SIANDOMANG	6.870	02.15.10.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
71	SMP 1 GAROGA	DESA GAROGA SIBARGOT	21.114	02.15.10.06.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
72	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173365	DESA HUTANAGODANG	2.900	---	DINAS PENDIDIKAN
73	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173234	DESA NAHORNOP MARSADA	981	---	DINAS PENDIDIKAN
74	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 177035	DESA LONTUNG DOLOK	814	02.15.07.16.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
75	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173265	ONAN HASANG	1.293	---	DINAS PENDIDIKAN
76	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173267	DESA SITOLUAMA	2.083	02.15.07.06.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
77	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 175761 PULO PAKPAHAN	DESA PAKPAHAN I	2.525	---	DINAS PENDIDIKAN
78	TANAH GEDUNG SEKOLAH SLTPN 1 PANGARIBUAN	DESA PAKPAHAN	41.780	02.15.09.19.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
79	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 2 PANGARIBUAN	PANSORNATOLU	20.025	02.15.09.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
80	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 3 PANGARIBUAN	SIGOTOM JULU	80.546		DINAS PENDIDIKAN
81	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 1 PAGARAN	DESA DOLOK SARIBU	11.524	02.15.04.17.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
82	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 2 PAGARAN	DESA PARHORBOAN	6.722		DINAS PENDIDIKAN
83	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173366	DESA PARMONANGAN	880	---	DINAS PENDIDIKAN
84	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173116	DESA HUMANJAR BADIA	1.500	---	DINAS PENDIDIKAN
85	TANAH KANTOR UPTD PENDIDIKAN SBB	JL. PINTU AIR, KEL PASAR SBB	906	02.15.09.01.4.00016	DINAS PENDIDIKAN
86	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173270	DESA PASAR SIBORONGBORONG	2.122	---	DINAS PENDIDIKAN
87	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173271	DESA PASAR SIBORONGBORONG	3.644	---	DINAS PENDIDIKAN
88	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173274	DESA PASAR SIBORONGBORONG	1.148	02.15.12.22.4.00008	DINAS PENDIDIKAN
89	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173275	HARIARA SILABAN	3.410	02.15.12.27.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
90	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173276	HUTASOIT PARDOMUAN	3.149	02.15.12.19.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
91	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 175771	DESA SIARO	2.943	02.15.09.19.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
92	TANAH RUMAH DINAS GURU SDN 173277	DESA POHAN TANGA	837	02.15.09.12.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
93	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN. 173277	JL. DESA POHAN TONGA	1.987	02.15.09.12.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
94	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 173299	JL. PANGALOAN	2.477	02.15.09.14.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
95	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 176344 AEKMAS	JL. DESA BAHAL BATU II	4.390	02.15.09.07.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
96	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 173297	JL. DESA SIGUMBANG	2.369	02.15.09.18.1.00001	DINAS PENDIDIKAN
97	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 173285	DESA PARIKSABUNGAN	2.557	02.15.09.15.4.00005	DINAS PENDIDIKAN
98	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 173311	DESA POHAN TONGA	5.083	02.15.09.12.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
99	TANAH GEDUNG TK NEGERI PEMBINA SIBOROBORONG	KEL. PASAR SIBORONBORONG	1.773	02.15.09.01.4.00017	DINAS PENDIDIKAN
100	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 173045	PANIARAN	1.709	02.15.09.14.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
101	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMP 1 SIBORONGBORONG	PASAR SIBORONGBORONG	8.188		DINAS PENDIDIKAN
102	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMPN 5	DESA BAHAL BATU II	4.824	02.15.09.07.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
103	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173166	DESA SABUNGAN NIHUTA	7.498	---	DINAS PENDIDIKAN
104	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173170	LUMBANJULU	3.194	02.15.11.08.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
105	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173172 HUTAGURGUR	ONANRUNGGU I	2.505	02.15.11.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
106	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173174 AEKNAULI	AEKNAULI	7.837	02.15.11.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
107	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173189	SIPAHUTAR III	3.313	02.15.11.16.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
108	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 2 SIPAHUTAR	ONANRUNGGU III	9.450	02.15.11.02.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
109	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173144	JALAN SIPOHOLON-TARUTUNG	3.198	02.15.04.05.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
110	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173132	DESA HUTAURUK PARJULU	1.557	---	DINAS PENDIDIKAN
111	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173135	HUTAGURGUR PARTANGGA	1.385	---	DINAS PENDIDIKAN
112	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173140	DESA HUTAGALUNG	1.878	02.15.05.18.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
113	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173141	HUTARAJA HABINSARAN	2.183	02.15.05.15.4.00001	DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	NOMOR SERTIFIKAT	OPD PENGGUNA BARANG
114	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173146	SITUMEANG HABINSARAN	3.064	02.15.05.10.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
115	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 174572	HUTAGALUNG, SIPOHOLON	1.425	02.15.05.18.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
116	TANAH PERTAPAK SEKOLAH SMP NEGERI 2 SIPOHOLON	DESA HUTARAJA	4.521	02.15.05.15.4.00005	DINAS PENDIDIKAN
117	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMPN 3 SIPOHOLON	DESA PAGAR BATU	14.432	02.15.05.15.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
118	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 5	HUTAPEA BANUAREA	9.101	02.15.01.10.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
119	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173107	SILALAHI SABUNGAN	1.417		DINAS PENDIDIKAN
120	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173101	HUTATORUAN V	1.122	---	DINAS PENDIDIKAN
121	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173102	DESA HUTATORUAN IV	1.248	---	DINAS PENDIDIKAN
122	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173105	HUTATORUAN VII	1.265	---	DINAS PENDIDIKAN
123	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173119	DESA SIRAJA OLOAN HUTABAGOT TARUTUNG	856	---	DINAS PENDIDIKAN
124	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173120	HUTABARAT PARBAJU TONGA	20.007	02.15.06.36.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
125	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173121	DESA HUTABARAT PARTALI TORUAN	1.200	---	DINAS PENDIDIKAN
126	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173122	HUTABARAT PARTALI JULU	1.470	02.15.06.50.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
127	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 174566	HT. BARAT PARTALI JULU, TARUTUNG	864	---	DINAS PENDIDIKAN
128	TANAH GEDUNG SEKOLAH SMPN 4	HUTATORUAN VI, KEC. TARUTUNG	3.787	02.15.06.43.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
129	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 173179 DOLOK NAGODANG	DESA SABUNGAN NIHUTA III	7.398	02.15.12.31.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
130	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 173182 LOBUTOLONG	DESA SIABAL ABAL VI	4.437	02.15.12.25.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
131	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 175755 LUMBANBIRU	DESA AEK NAULI I	3.050	02.15.12.21.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
132	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN 173178 BONANDOLOK	DESA SABUNGAN NIHUTA V	3.465	02.15.12.21.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
133	TANAH KANTOR DINAS KESEHATAN	DESA SOSUNGGULON	590	02.15.06.34.1.00002	DINAS KESEHATAN
134	TANAH PUSKESMAS PANGARIBUAN	DESA PAKPAHAN	8.980	02.15.13.01.4.00006	DINAS KESEHATAN
135	TANAH PUSKESMAS SIBORONGBORONG	JL. SILIWANGI	6.048	02.15.09.01.4.00015	DINAS KESEHATAN
136	TANAH PUSKESMAS SILANGIT	JL. SIBORONGBORONG- BALIGE, DESA PARIK SABUNGAN	1.043	02.15.09.15.4.00004	DINAS KESEHATAN
137	TANAH PUSKESMAS PANIARAN	DESA PANIARAN	1.982	02.15.09.14.1.00009	DINAS KESEHATAN
138	TANAH PUSTU PANIARAN	PANIARAN	336	02.15.09.14.4.00006	DINAS KESEHATAN
139	TANAH PUSTU POHAN JULU	DESA POHAN JULU	3.734	02.15.09.11.4.00001	DINAS KESEHATAN
140	TANAH PUSKESMAS SIPULTAK DOLOK	JL. DESA SIPULTAK DOLOK	1.800	02.15.10.13.4.00001	DINAS KESEHATAN
141	TANAH JASA PERTAPAKAN PEKAN PASAR PAGARAN	DESA PARHORBOAN	8.243	02.15.10.08.4.00002	DINAS KESEHATAN
142	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173185 HUTAMAMUNGKA	DESA SABUNGAN NIHUTA V	2.500	02.15.12.16.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
143	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 174583 SIGOTOM JULU	DESA SIGOTOM TIMUR	7.380	02.15.13.24.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
144	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173195 BATUNADUA	DESA BATU NADUA	5.453	02.15.13.08.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
145	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 175762 PANCUR BATU	DESA RAHUT BOSI	7.220	02.15.13.01.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
146	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 173197 RAHUT BOSI	DESA RAHUT BOSI ONAN	9.173	02.15.13.26.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
147	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 175760 BATU MANUMPAK	DESA MANUMPAK	6.779	02.15.13.15.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
148	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 176340 BATU NADUA	DESA BATU NADUA	7.044	02.15.13.08.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
149	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO 178414 SILANTOM JAE	DESA SILANTOM JAE	4.877	02.15.13.20.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
150		DESA SILANTOM JAE	2.326	02.15.13.20.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
151	TANAH GEDUNG SEKOLAH SDN NO. 173212 LOBUGOTI	DESA SIGOTOM JULU	4.546	02.15.13.06.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
152		DESA SIGOTOM JULU	8.912	02.15.13.06.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
153	TANAH RUMAH DINAS DOKTER ONAN HASANG	JL. PAHAE - SIPIROK	255	02.15.05.01.4.00002	DINAS KESEHATAN
154	TANAH PUSKESMAS ONAN HASANG	JL. PAHAE - SIPIROK	555	02.15.05.01.4.00003	DINAS KESEHATAN
155	TANAH PUSKESMAS SITADATADA	DESA PAGARBATU	1.309	02.15.04.13.4.00003	DINAS KESEHATAN
156	TANAH PUSTU PASAR SIPOHOLON	JL. PANCASILA	1.013	02.15.04.02.4.00001	DINAS KESEHATAN
157	TANAH PUSKESMAS JANJI ANGKOLA	DESA PARDOMUAN	598	02.15.08.04.4.00001	DINAS KESEHATAN
158	TANAH PUSTU	DESA PARDOMUAN NAINGGOLAN	489	02.15.06.07.4.00001	DINAS KESEHATAN
159	TANAH PUSTU ARITONANG	DESA ARITONANG	179	02.15.15.15.4.00001	DINAS KESEHATAN
160	TANAH POLINDES HUTAGINJANG	DESA HUTAGINJANG	287	02.15.15.04.4.00002	DINAS KESEHATAN
161	TANAH PUSTU DOLOK MARTUMBUR	DESA DOLOK MARTUMBUR	154	02.15.15.05.4.00001	DINAS KESEHATAN
162	TANAH POSKESDES SIMANGUMBAN JULU	DESA SIMANGUMBAN JULU	142	02.15.07.06.4.00001	DINAS KESEHATAN
163	TANAH PUSKESMAS PEMBANTU SILANTOM TONGA	DESA SILANTOM TONGA	705	02.15.13.09.4.00001	DINAS KESEHATAN
164	TANAH PUSKESMAS PEMBANTU PARSORMINAN	DESA PANSORMINAN/ SIDAGAL	430	02.15.13.22.4.00001	DINAS KESEHATAN
165	TANAH PUSKESMAS LUMBAN SORMIN	DESA LUMBAN SORMIN	299	02.15.13.05.4.00003	DINAS KESEHATAN
166	TANAH POLINDES BATU MANUMPAK	DESA BATU MANUMPAK	224	02.15.13.15.1.00001	DINAS KESEHATAN
167	PUSTU DESA SIBINGKE	DESA SIBINGKE	273	02.15.13.16.4.00001	DINAS KESEHATAN
168	SD NEGERI NO. 173389 DOLOK SARIBU	DESA DOLOK SARIBU	2.838	02.15.10.11.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
169	SEKOLAH SDN 175744 HUTARAJA	DESA HUTARAJA	2.761	02.15.04.08.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
170	SD NEGERI NO. 173193 PARSIBARUNGAN	DESA PARSIBARUNGAN	6.397	02.15.13.18.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
171	SD NEGERI NO. 173212 LOBUGOTI	DESA SIGOTOM JULU	2.861		DINAS PENDIDIKAN
172	SD NEGERI NO. 176343 HARIARA SILABAN	DESA SIBORONGBORONG II	5.705	02.15.09.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
173	SD NEGERI NO. 173390 Bonan Dolok	DESA HUTATINGGI	2.252	02.15.11.06.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
174	SD NEGERI NO. 173200 SILANTOM TONGA	DESA SILANTOM TONGA	8.005	02.15.13.09.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
175	SD NEGERI NO. 176347 DOLOK SARIBU	DESA DOLOK SARIBU	4.126	02.15.10.11.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
176	SD NEGERI NO. 177666 LUMBAN SILINTONG	DESA LUMBAN SILINTONG	3.599	02.15.10.12.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
177	SMP NEGERI 2 PANGARIBUAN	BATU NADUA	16.550	02.15.13.08.4.00005	DINAS PENDIDIKAN
178	POLINDES DESA SIDAGAL, KEC. SIATAS BARITA	DESA SIDAGAL	99	02.15.02.04.4.00001	DINAS KESEHATAN

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	NOMOR SERTIFIKAT	OPD PENGGUNA BARANG
179	SD NEGERI NO. 175759 SIREGAR	DESA LUMBAN SORMIN	3.093	02.15.13.05.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
180	SD NEGERI NO. 174528 SIPULTAK DOLOK	DESA SIPULTAK DOLOK	1.825	02.15.10.13.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
181	SDN 173248 LOBU HARAMBIR	DESA BONANI DOLOK	1.205	02.15.08.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
182	SDN 175755 Lumbanbiru (Persil II) Kec. Sipahutar	DESA AEK NAULI I	569	02.15.12.21.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
183	POSKESDES DESA TAPIAN NAULI I, KEC. SIPAHUTAR	DESA TAPIAN NAULI I	221	02.15.12.07.4.00001	DINAS KESEHATAN
184	SD NEGERI 177925 LUMBANHARIARA, KEC. SIPAHUTAR	DESA AEK NAULI II	6.718	02.15.12.11.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
185	POSKESDES AEK NAULI III, KEC. SIPAHUTAR	DESA TAPIAN NAULI II	299	02.15.12.19.7.00001	DINAS KESEHATAN
186	TK NEGERI PEMBINA PAGARAN	DESA SIPULTAK	1.658	02.15.10.05.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
187	SMP N 5 PANGARIBUAN	DESA SILANTOM TONGA	7.822	02.15.13.09.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
188	SD NEGERI NO. 173192 HARIANJA	DESA HARIANJA	2.543	02.15.13.19.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
189	SD NEGERI NO. 177925 LUMBAN HARIARA KECAMATAN SIPAHUTAR	DESA AEK NAULI II	1.169	02.15.12.11.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
190	SD NEGERI NO. 173339 MUARA	DESA HUTANAGODANG	1.028	02.15.15.01.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
191	SDN 173273 SIBORONGBORONG	DESA SITABOTABO	4.286	02.15.09.05.4.00006	DINAS PENDIDIKAN
192	SD NEGERI NO. 173342 SIMATUPANG	DESA SIMATUPANG	1.923	02.15.15.10.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
193	SMP N 1 MUARA	DESA SILALI TOTUAN	4.586	02.15.15.11.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
194	SD NEGERI NO. 173214 PANGARIBUAN	DESA PAKPAHAN	2.377	02.15.13.01.4.00011	DINAS PENDIDIKAN
195	SD NEGERI NO. 175758 HUTAGURGUR	DESA ONAN RUNGGU I	3.000	02.15.12.06.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
196	SD NEGERI NO. 175798 ARITONANG	DESA ARITONANG	1.265	02.15.15.15.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
197	Tanah Rumah Dinas SDN 175798 ARITONANG	DESA ARITONANG	229	02.15.15.15.4.00005	DINAS PENDIDIKAN
198	Tanah Rumah Dinas SDN 175798 ARITONANG	DESA ARITONANG	247	02.15.15.15.4.00006	DINAS PENDIDIKAN
199	SD NEGERI NO. 173345 ARITONANG	DESA ARITONANG	1.105	02.15.15.15.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
200	SD NEGERI NO. 173345 ARITONANG	DESA ARITONANG	874	02.15.15.15.4.00007	DINAS PENDIDIKAN
201	SDN 175770 SITAMPURUNG	DESA SITAMPURUNG	2.867	02.15.09.04.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
202	SDN 175770 SITAMPURUNG	DESA SITAMPURUNG	754	02.15.09.04.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
203	SD NEGERI 177045 PEALANGGE	DESA PANIARAN	2.728	02.15.09.14.4.00008	DINAS PENDIDIKAN
204	SDN 173382 HUTATINGGI	DESA SISORDAK	4.220	02.15.11.08.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
205	SD NEGERI NO. 177653 SIBADAK	DESA SITUMEANG HABINSARAN	3.359	02.15.04.01.4.00009	DINAS PENDIDIKAN
206	SD NEGERI NO. 177064 SILANDO	DESA SILANDO	5.251	02.15.15.08.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
207	SDN 173284 SIHATANDOHAN	DESA POHAN JULU	14.970	02.15.09.11.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
208	SD NEGERI NO. 173283 SIANJUR	DESA POHAN JULU	3.116	02.15.09.11.1.00002	DINAS PENDIDIKAN
209	SMP NEGERI 2 MUARA	DESA ARITONANG	6.462	02.15.15.15.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
210	PUSKESMAS MUARA	DESA HUTANAGODANG	1.163	02.15.15.01.4.00003	DINAS KESEHATAN
211	SD NEGERI NO. 173388 DOLOK SARIBU	DESA DOLOK SARIBU	2.518	02.15.10.11.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
212	SDN 173247 AEKSAH	DESA SIMANGUMBAN JAE	1.280	02.15.07.03.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
213	SD NEGERI NO. 173209 SIGOTOM	DESA PARRATUSAN	3.966	02.15.13.04.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
214	SD NEGERI NO. 173188 SOSOR SIAMPORIK	DESA SIABAL ABAL VI	5.391	02.15.12.23.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
215	POLINDES LOBUHOLE, KEC. SIATAS BARITA	DESA LOBUHOLE	327	02.15.02.12.4.00001	DINAS KESEHATAN
216	SDN NO. 173240 ANGKOLA, KEC. PURBATUA	DESA SELAMAT	2.055	02.15.08.08.1.00001	DINAS PENDIDIKAN
217	SD NEGERI NO.173191 LUMBAN SORMIN	DESA LUMBAN SORMIN	4.770	02.15.13.05.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
218	SDN 173136 LUMBAN BARINGIN	DESA SITUMEANG HASUNDUTAN	1.295	02.15.04.04.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
219	SDN 175748 LOBUPINING	DESA DOLOK NAULI	4.132	02.15.03.01.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
220	SDN 177659 HUTARAJA	HUTARAJA	12.370	02.15.13.23.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
221	TANAH KANTOR CAMAT PAHAE JAE	PARSAORAN SAMOSIR	1.126	02.15.06.09.4.00002	KANTOR CAMAT PAHAE JAE
222	SDN 173154 BANUAJI	BANUAJI I	1.915	02.15.03.10.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
223	SDN 175746 ADIANKOTING	ADIANKOTING	2.047	02.15.03.08.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
224	SDN 176332 RINABIDANG	BANUAJI IV	2.567	02.15.03.11.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
225	SDN 177048 SITONGGITONGGI	HORISAN RANGGITGIT	5.628	02.15.11.12.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
226	SDN 173370 DOLOK NAULI	HORISAN RANGGITGIT	2.413	02.15.11.12.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
227	SDN 173369 RANGGITGIT	HORISAN RANGGITGIT	3.737	02.15.11.12.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
228	SDN 173384 LOBU SUNUT	LOBU SUNUT	1.071	02.15.11.07.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
229	SDN 175766 BONANIONAN	HUTATINGGI	1.488	02.15.11.06.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
230	SDN 175747 BANUAJI	BANUAJI II	2.720	02.15.03.12.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
231	RUMAH DINAS CAMAT SIPAHUTAR	SIPAHUTAR II	1.392	02.15.12.04.4.00001	KANTOR CAMAT SIPAHUTAR
232	SDN 173156 LOBUPINING	DOLOK NAULI	1.864	02.15.03.01.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
233	TANAH RUMAH DINAS SDN 175766 BONANIONAN	HUTATINGGI	202	02.15.11.06.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
234	SDN 173163 ANDIANKOTING	PAGARAN PISANG	3.000	02.15.03.09.4.00006	DINAS PENDIDIKAN
235	SDN 173368 TORNAULI	MANALU DOLOK	8.878	02.15.11.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
236	SDN 173155 PANSURBATU	PANSURBATU	1.602	02.15.03.02.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
237	RUMAH DINAS SDN 173381 AEKRAJA	AEKRAJA	238	02.15.11.05.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
238	SDN 173381 AEKRAJA	AEKRAJA	2.241	02.15.11.05.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
239	SDN 173148 ADIANKOTING	ADIANKOTING	1.861	02.15.03.08.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
240	SDN 173153 SIBALANGA	SIBALANGA	1.556	02.15.03.05.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
241	SDN 173157 AEK GODANG	DOLOK NAULI	4.845	02.15.03.01.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
242	SDN 176332 RINABIDANG	BANUAJI IV	827	02.15.03.11.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
243	TANAH LAPANGAN KANTOR CAMAT PAHAE JAE	NAHORNOP MARSADA	9.174	02.15.06.08.4.00003	KANTOR CAMAT PAHAE JAE

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	NOMOR SERTIFIKAT	OPD PENGGUNA BARANG
244	RUMAH DINAS CAMAT PAHAE JAE	PASAR SARULLA	407	02.15.06.01.4.00001	KANTOR CAMAT PAHAE JAE
245	TANAH KANTOR CAMAT SIPAHUTAR	SABUNGAN NIHUTA I	4.744	02.15.12.02.4.00004	KANTOR CAMAT SIPAHUTAR
246	TANAH POLINDES LUBIS	LUBIS	197	02.15.10.06.4.00001	DINAS KESEHATAN
247	SDN 173111 AEKNASIA	HUTATORUAN VIII	1.278	02.15.01.20.1.00002	DINAS PENDIDIKAN
248	RDS SDN 173111 AEKNASIA	HUTATROUAN VIII	211	02.15.01.20.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
249	TANAH POLIKLINIK PAGARAN I	PAGARAN	99	02.15.10.03.4.00001	DINAS KESEHATAN
250	TANAH POSKESDES PAGARAN II	PAGARAN	315	02.15.10.03.4.00002	DINAS KESEHATAN
251	TANAH PUSTU SIPULTAK	PARHORBOAN	963	02.15.10.08.4.00004	DINAS KESEHATAN
252	TANAH POSKESDES PARHORBOAN	PARHORBOAN	170	02.15.10.08.4.00003	DINAS KESEHATAN
253	TANAH PUSTU HUTATINGGI	HUTATINGGI	520	02.15.11.06.4.00004	DINAS KESEHATAN
254	POSKESDES RANGGITGIT	HORISAN RANGGITGIT	120	02.15.11.12.4.00004	DINAS KESEHATAN
255	TANAH POSKESDES SIPULTAK	SIPULTAK	323	02.15.10.05.4.00003	DINAS KESEHATAN
256	TANAH POSKESDES HASIBUAN	HASIBUAN	224	02.15.10.14.4.00001	DINAS KESEHATAN
257	TANAH POSKESDES SIMARANTAJAU DOLOK SARIBU	DOLOK SARIBU	269	02.15.10.11.4.00005	DINAS KESEHATAN
258	TANAH POSKESDES LUMBAN INA - INA	LUMBAN INA-INA	220	02.15.10.10.4.00001	DINAS KESEHATAN
259	SDN 173129 PAGARSINONDI	SITAMPURUNG	2.822	02.15.01.25.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
260	SDN NO. 174570 PAGARAN PISANG	PAGARAN PISANG	2.605	02.15.03.09.4.00007	DINAS PENDIDIKAN
261	TANAH POSKESDES SAMPINUR	HORISAN RANGGITGIT	163	02.15.11.12.4.00005	DINAS KESEHATAN
262	SDN 173123 HUTABARAT	HAPOLTAHAN	694	02.15.01.13.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
263	SDN 174565 JAMBUR NAULI	JAMBUR NAULI	3.126	02.15.01.27.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
264	PUSTU SIBARAGAS	SIBARAGAS	399	02.15.10.04.4.00039	DINAS KESEHATAN
265	SDN 174573 HUTARAJA	HUTARAJA SIMANUNGKALIT	3.032	02.15.04.06.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
266	RDS SDN 175740 AEKSIANSIMUN	AEK SIANSIMUN	736	02.15.01.15.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
267	KANTOR CAMAT PAHAE JULU	JANJI NATOGU	2.352	02.15.05.03.4.00003	KANTOR CAMAT PAHAE JULU
268	TANAH LAPANGAN PACUAN KUDA	SILAIT-LAIT	82.800	02.15.09.20.4.00003	DISPORA
269	TANAH KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	HUTATORUAN X	397	02.15.01.06.4.00043	DISPORA
270	SDN NO. 173383 HUTATINGGI	HUTATINGGI	1.282	02.15.11.06.4.00024	DINAS PENDIDIKAN
271	TANAH LAPANGAN MINI SIBORONG-BORONG / TANAH LAPANGAN SEPAK BOLA	PASAR SIBORONGBORONG	10.400	02.15.09.01.4.00005	KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG
272	SDN NO. 177652 HAUSISADASADA	HUTARAJA HASUNDUTAN	9.379	02.15.04.12.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
273	SDN NO. 175769 HASIBUAN	HASIBUAN	4.382	02.15.10.14.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
274	SDN NO. 173387 SIMAMORA	LUMBAN SILINTONG	2.428	02.15.10.12.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
275	SDN NO. 173386 ONAN RUNGGU	SIMAMORA HASIBUAN	2.295	02.15.10.01.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
276	SDN NO. 173238 PANGALOAN	SILANGKITANG	2.019	02.15.06.04.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
277	SDN NO. 175750 PARDAMEAN	PARDAMEAN NAINGGOLAN	1.323	02.15.06.13.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
278	KANTOR DINAS EKS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (KS. TUB	HUTATORUAN X	694	02.15.01.06.4.00044	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWAS
279	SDN NO. 173295 PAMANSURAN	LUBIS	2.636	02.15.10.06.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
280	SDN NO. 173309 PARHORBOAN	PARHORBOAN	3.382	02.15.10.08.4.00006	DINAS PENDIDIKAN
281	BANGUNAN KANTOR CAMAT PAGARAN	PARHORBOAN	5.231	02.15.10.08.4.00005	KANTOR CAMAT PAGARAN
282	SDNNO. 173304 LUMBAN HOLBUNG (I)	BAHAL BATU III	1.142	02.15.09.08.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
283	SDN NO. 178213 PEARAJA	LOBU SIREGAR II	5.630	02.15.09.10.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
284	SDN NO. 173302 BAHAL BATU	BAHAL BATU I	4.861	02.15.09.06.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
285	SDN NO. 173292 BUTAR	LUMBAN JULU	2.683	02.15.10.02.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
286	SDN NO. 173308 SIBARAGAS	SIBARAGAS	4.151	02.15.10.04.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
287	SDN NO. 173251 HOPONG	DOLOK SANGGUL	2.005	02.15.07.02.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
288	SDN NO. 173303 GONTING	BAHAL BATU II	5.599	02.15.09.07.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
289	SDN NO. 173281 LUMBAN JULU	LOBU SIREGAR I	3.191	02.15.09.09.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
290	BANGUNAN KANTOR DINAS KETENAGAKERJAAN	SIMAMORA	507	02.15.01.21.4.00003	DINAS KETENAGAKERJAAN
291	SDN NO. 174584 PARSORMINAN	SAMPAGUL	2.630	02.15.13.02.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
292	BANGUNAN RUMAH DINAS SDN NO. 174584 PARSORMINAN	SAMPAGUL	405	02.15.13.02.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
293	SDN NO. 173142 TAPIAN NAULI	TAPIAN NAULI	6.703	02.15.04.07.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
294	BANGUNAN RUMAH DINAS KOPERASI	HAPOLTAHAN	201	02.15.01.13.4.00005	DINAS KOPERASI
295	SDN NO. 173237 PANGALOAN	SIGURUNG-GURUNG	1.778	02.15.06.03.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
296	SDN NO. 173245 AEK BOTIK	SETIA	958	02.15.06.11.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
297	SDN NO. 173194 BATU MANUMPAK	BATU MANUMPAK	2.308	02.15.13.15.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
298	POSKESDES DESA SAMPAGUL	SAMPAGUL	344	02.15.13.02.4.00002	DINAS KESEHATAN
299	SDN NO. 173296 PAMANSURAN	LUMBAN INA-INA	6.305	02.15.10.10.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
300	SDN NO. 173204 NAJUMAMBE	NAJUMAMBE	2.016	02.15.13.17.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
301	SDN NO. 173253 LUMBAN GARAGA	DOLOK SANGGUL	1.176	02.15.07.02.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
302	SDN NO. 173206 SIBINGKE	SIBINGKE	7.705	02.15.13.16.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
303	RUMAH DINAS CAMAT ADIANKOTING	ADIANKOTING	1.191	02.15.03.08.4.00005	KANTOR CAMAT ADIANKOTING
304	SDN NO. 176341 LOBU GALA	PANSUR NATOLU	4.680	02.15.13.11.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
305	BANGUNAN UPT KORWIL PANGARIBUAN	PAKPAHAN	252	02.15.13.01.4.00012	DINAS PENDIDIKAN
306	POSKESDES HUTARAJA HASUNDUTAN	HUTARAJA HASUNDUTAN	349	02.15.04.12.4.00004	DINAS KESEHATAN
307	BALAI BENIH IKAN / BBI SARULLA	NAHORNOP MARSADA	2.679	02.15.06.08.4.00005	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
308	SMP NEGERI 1 PAHAE JAE	NAHORNOP MARSADA	5.468	02.15.06.08.4.00004	DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	NOMOR SERTIFIKAT	OPD PENGGUNA BARANG
309	SDN NO. 177046 SILABAN ARITONANG	BANUALUHU	3.855	02.15.10.07.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
310	SDN NO. 175749 AEK RAU	SIMANGUMBAN JULU	1.894	02.15.07.06.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
311	SDN NO. 173131 TARUTUNG	HUITATORUAN VII	889	02.15.01.04.4.00008	DINAS PENDIDIKAN
312	SDN NO. 177657 SIABAL-ABAL	SIABAL-ABAL II	5.200	02.15.12.15.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
313	SDN NO. 175752 LUMBAN GAOL	LUMBAN GAOL	1.338	02.15.05.17.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
314	SDN NO. 175754 SIPARPAR	SIMASOM TORUAN	2.680	02.15.05.19.4.00010	DINAS PENDIDIKAN
315	SDN NO. 173175 SIMARPINGGAN	ONAN RUNGGU II	5.907	02.15.12.18.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
316	SMP NEGERI 2 PAHAE JULU	PANGURDOTAN	3.860	02.15.05.04.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
317	SDN NO. 174577 SIBAGANDING	LUMBAN JAEAN	1.125	02.15.05.11.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
318	RUMAH DINAS SDN NO. 177655 SIMASOM	SIMASOM	336	02.15.05.02.4.00005	DINAS PENDIDIKAN
319	SDN NO. 177655 SIMASOM	SIMASOM	2.339	02.15.05.02.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
320	SMP NEGERI 4 PAHAE JULU	SIMASOM TORUAN	5.701	02.15.05.19.4.00011	DINAS PENDIDIKAN
321	SDN NO. 173256 LOBUPINING	LOBUPINING	1.952	02.15.05.15.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
322	SDN NO. 173266 PANTIS	PANTIS	2.272	02.15.05.16.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
323	SDN NO. 177036 LUMBAN GAOL	PANGURDOTAN	2.297	02.15.05.04.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
324	USB SMP NEGERI 6 SIPAHUTAR	TAPIAN NAULI	4.086	02.15.12.19.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
325	SDN NO. 173180 LUMBANRANG	ONAN RUNGGU IV	2.402	02.15.12.14.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
326	SDN NO. 174582 SITAPONGAN, SMP NEGERI 5 SIPAHUTAR	SIABAL-ABAL V	5.876	02.15.12.24.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
327	SDN NO. 174581 SIPAHUTAR	SIPAHUTAR II	3.140	02.15.12.04.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
328	SDN NO. 173168 ONAN RUNGGU	ONAN RUNGGU II	6.253	02.15.12.18.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
329	SDN NO. 176496 LUMBAN GUK-GUK	SIABAL-ABAL VI	4.072	02.15.12.25.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
330	SDN NO. 177035 LONTUNG DOLOK	LONTUNG DOLOK	784	02.15.05.12.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
331	SDN NO. 173260 SIGOMPULON	LUMBAN GAOL	1.698	02.15.05.17.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
332	SDN NO. 178492 PAGARBATU	PAGARBATU	2.640	02.15.04.13.4.00009	DINAS PENDIDIKAN
333	SDN NO. 173145 NAIPOSPOS TONGA	HUTARAJA HASUNDUTAN	7.072	02.15.04.12.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
334	SDN NO. 173143 SIMARPINGGAN	HUTARAJA HASUNDUTAN	6.844	02.15.04.12.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
335	BALAI BENIH IKAN / BBI PARTALI JULU	PARTALI JULU	349	02.15.01.29.4.00004	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
336	SMP NEGERI 3 TARUTUNG	HAPOLTAHAN	4.879	02.15.01.13.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
337	SDN NO. 174574 SIMANGUMBAN	SIMANGUMBAN JAE	1.777	02.15.07.03.4.00005	DINAS PENDIDIKAN
338	SDN NO. 173198 PANSUR NATOLU	PANSUR NATOLU	4.018	02.15.13.11.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
339	SDN NO. 177041 SIMARHOMPA	SIABAL-ABAL III	6.618	02.15.12.09.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
340	SDN NO. 173171 SIMARHOMPA	SIABAL-ABAL III	3.835	02.15.12.09.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
341	SDN NO. 175756 SIMARHOMPA	SIABAL-ABAL III	3.145	02.15.12.09.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
342	SDN NO. 173202 PASAR BARU	PURBA TUA	8.620	02.15.13.13.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
343	SDN NO. 176331 LUMBAN SOIT	HUTAURUK HASUNDUTAN	2.859	02.15.04.14.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
344	SDN NO. 173296 PAHAE JULU	HUTABARAT	3.171	02.15.05.12.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
345	SDN NO. 173341 UNTEMUNGKUR	UNTEMUNGKUR	734	02.15.15.03.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
346	SDN NO. 173304 LUMBAN HOLBUNG (2)	BAHAL BATU III	580	02.15.09.08.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
347	PUSKESMAS HUTABAGINDA	HUTATORUAN VII	1.608	02.15.01.04.4.00010	DINAS KESEHATAN
348	SMP NEGERI 2 PARMONANGAN	MANALU	17.320	02.15.11.01.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
349	SDN NO. 173392 PARMONANGAN	MANALU	2.388	02.15.11.01.4.00006	DINAS PENDIDIKAN
350	RUMAH DINAS SDN NO. 173392 PARMONANGAN	MANALU	423	02.15.11.01.4.00008	DINAS PENDIDIKAN
351	SDN NO. 175767 HUTAJULU	HUTAJULU	1.707	02.15.11.04.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
352	SDN NO. 176348 HUTAJULU	HUTAJULU	1.998	02.15.11.04.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
353	SDN NO. 173349 HUTAGINJANG	HUTAGINJANG	2.965	02.15.15.04.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
354	SDN NO. 173347 BUNTURAJA	SITANGGOR	970	02.15.15.13.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
355	SDN NO. 173259 PEARAJA	SIMASOM TORUAN	1.567	02.15.05.19.4.00012	DINAS PENDIDIKAN
356	SDN NO. 173257 SIMATANIARI (KANTOR GURU)	SIMATANIARI	100	02.15.05.10.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
357	SDN NO. 173257 SIMATANIARI	SIMATANIARI	541	02.15.05.10.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
358	SDN NO. 173268 SIMASOM	SIMASOM	653	02.15.05.02.4.00006	DINAS PENDIDIKAN
359	SMP NEGERI 4 SIPOHOLON	LOBU SINGKAM	7.609	02.15.04.09.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
360	POSKESDES SABUNGAN NIHUTA V	SABUNGAN NIHUTA V	100	02.15.12.16.4.00003	DINAS PENDIDIKAN
361	POSKESDES AEK NAULI IV	AEK NAULI IV	251	02.15.12.22.4.00001	DINAS KESEHATAN
362	SDN NO. 173187 HADOMUAN	AEK NAULI III	2.595	02.15.12.17.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
363	PUSTU AEK NAULI III	AEK NAULI III	233	02.15.12.17.4.00002	DINAS KESEHATAN
364	POSKESDES SIABAL-ABAL IV	SIABAL-ABAL IV	238	02.15.12.23.4.00002	DINAS KESEHATAN
365	POSKESDES SABUNGAN NIHUTA IV	SABUNGAN NIHUTA IV	224	02.15.12.01.4.00003	DINAS KESEHATAN
366	SDN NO. 177040 LOBUTOLONG	SIABAL-ABAL I	4.386	02.15.12.10.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
367	SDN NO. 173181 LOBUTOLONG	SIABAL-ABAL I	3.869	02.15.12.10.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
368	LAPANGAN SEPAK BOLA PAHAE JULU	JANJI NATOGU	5.505	02.15.05.03.4.00005	KANTOR CAMAT PAHAE JULU
369	POSKESDES SIGUMBANG	SIGUMBANG	262	02.15.09.18.4.00003	DINAS KESEHATAN
370	PUSTU SITAMPURUNG	SITAMPURUNG	359	02.15.09.04.4.00004	DINAS KESEHATAN
371	POSKESDES LUMBAN JULU POHAN	LOBU SIREGAR I	546	02.15.09.09.4.00003	DINAS KESEHATAN
372	SDN NO. 173207 PARLOMBUAN	PARLOMBUAN	2.387	02.15.13.13.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
373	TANAH GEDUNG NASIONAL	HUTATORUAN X	2.652	02.15.01.06.4.00051	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	NOMOR SERTIFIKAT	OPD PENGGUNA BARANG
374	SMP NEGERI 1 PURBATUA	JANJI NAULI	8.223	02.15.08.07.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
375	POSKESDES AEK NAULI II	AEK NAULI II	299	02.15.12.11.4.00004	DINAS KESEHATAN
376	RUMAH DINAS SDN NO. 174575 SARULLA	TORDOLOK NAULI	211	12.15.06.02.4.00001	DINAS PENDIDIKAN
377	SDN NO. 174575 SARULLA	TORDOLOK NAULI	1.218	12.15.06.02.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
378	POSKESDES AEKRAJA	AEK RAJA	247	12.15.11.05.4.00003	DINAS KESEHATAN
379	PUSKESMAS PARMONANGAN	MANALU	2.119	12.15.11.01.4.00009	DINAS KESEHATAN
380	PUSTU HUTAGURGUR	ONAN RUNGGU I	225	12.15.12.06.4.00003	DINAS KESEHATAN
381	PUSTU ADIANKOTING	PAGARAN PISANG	851	12.15.03.09.4.00008	DINAS KESEHATAN
382	SDN NO. 173306 SIPULTAK	SIPULTAK	2.079	12.15.10.05.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
383	POSKESDES BANUAJI IV	BANUAJI IV	224	12.15.03.11.4.00003	DINAS KESEHATAN
384	PUSTU BANUAJI I	BANUAJI I	175	12.15.03.10.4.00002	DINAS KESEHATAN
385	SMP NEGERI 1 SIMANGUMBAN	SIMANGUMBAN JULU	5.641	12.15.03.10.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
386	POSKESDES SIMARDANGIANG	SIMARDANGIANG	339	12.15.05.18.4.00001	DINAS KESEHATAN
387	PUSKESMAS AEK RAJA	AEK RAJA	1.464	12.15.11.05.4.00005	DINAS KESEHATAN
388	RUMAH DINAS PUSKESMAS AEK RAJA	AEK RAJA	789	12.15.11.05.4.00004	DINAS KESEHATAN
389	POSKESDES PANSURNATOLU	PANSUR NATOLU	173	02.15.13.11.4.00005	DINAS KESEHATAN
390	POSKESDES SILANTOM JULU	SILANTOM JULU	256	02.15.13.10.4.00001	DINAS KESEHATAN
391	BPP SIBORONGBORONG	SIARO	9.993	02.15.09.19.4.00004	DINAS PERTANIAN
392	SDN NO. 174529 SIGUMBANG	SIGUMBANG	3.529	02.15.09.18.4.00004	DINAS PENDIDIKAN
393	POSKESDES PARLOMBUAN	PARLOMBUAN	187	02.15.13.12.4.00002	DINAS KESEHATAN
394	POSKESDES SIMATANIARI	PARSOSORAN	223	02.15.14.07.4.00002	DINAS KESEHATAN
395	POSKESDES AEKTANGGA	AEK TANGGA	253	02.15.14.11.4.00004	DINAS KESEHATAN
396	POSKESDES HUTARAJA	HUTARAJA	343	02.15.13.23.4.00002	DINAS KESEHATAN
397	POSKESDES PADANG PARSADAAN	PADANG PARSADAAN	273	02.15.13.21.4.00001	DINAS KESEHATAN
398	POSKESDES SILANTOM JAE	SILANTOM JAE	199	02.15.13.20.4.00003	DINAS KESEHATAN
399	PUSKESMAS LUMBAN SINAGA	LUMBAN SINAGA SIMATUPANG	6.739	02.15.13.14.4.00001	DINAS KESEHATAN
400	PUSTU BATU NADUA	BATU NADUA	1.090	02.15.13.08.4.00006	DINAS KESEHATAN
401	PUSTU PARSOSORAN	PARSOSORAN	401	02.15.14.07.4.00001	DINAS KESEHATAN
402	POLINDES PURBATUA	PURBATUA	106	02.15.13.13.4.00002	DINAS KESEHATAN
403	PUSTU PURBATUA	PURBATUA	430	02.15.13.13.4.00003	DINAS KESEHATAN
404	SDN NO. 173367 SISODING	MANALU DOLOK	2.240	02.15.11.03.4.00002	DINAS PENDIDIKAN
405	BPP SIPOHOLON	PAGAR BATU	18.580	02.15.04.13.4.00010	DINAS PERTANIAN
406	BPP SIPAHUTAR I	SIABAL-ABAL II	3.977	02.15.12.15.4.00005	DINAS PERTANIAN
407	BPP SIPAHUTAR II	SIABAL-ABAL II	527	02.15.12.15.4.00007	DINAS PERTANIAN
408	BPP SIPAHUTAR III	SIABAL-ABAL II	1.184	02.15.12.15.4.00006	DINAS PERTANIAN
409	POSKESDES PARMANUHAN	PARMANUHAN	186	02.15.14.13.4.00001	DINAS KESEHATAN
410	POSKESDES PARSIBARUNGAN	PARSIBARUNGAN	372	02.15.13.18.4.00003	DINAS KESEHATAN
411	PUSTU RAHUT BOSI	RAHUT BOSI	503	02.15.13.07.4.00003	DINAS KESEHATAN
412	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	SITUMEANG HABINSARAN	5.268	02.15.04.01.4.00011	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
413	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	HUTATORUAN VI	5.762	02.15.01.03.1.00007	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
414	TANAH JDIBAWAH JALAN	AEK SIANSIMUN	335	02150115400004	DINAS PUTR
415	TANAH JDIBAWAH JALAN	AEK SIANSIMUN	832	02150115400005	DINAS PUTR
416	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAPEA BANUAREA	1.860	02150115400006	DINAS PUTR
417	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAPEA BANUAREA	355	02150110400002	DINAS PUTR
418	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAPEA BANUAREA	279	02150110400003	DINAS PUTR
419	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAPEA BANUAREA	218	02150110400004	DINAS PUTR
420	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAPEA BANUAREA	244	02150110400005	DINAS PUTR
421	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAPEA BANUAREA	678	02150110400006	DINAS PUTR
422	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN I	222	02150110400007	DINAS PUTR
423	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN I	252	02150130400002	DINAS PUTR
424	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN I	1.379	02150130400003	DINAS PUTR
425	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN IV	115	02150130400004	DINAS PUTR
426	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN V	3.986	02150118400001	DINAS PUTR
427	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN VI	3.342	02150102400005	DINAS PUTR
428	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN VI	2.126	02150103400008	DINAS PUTR
429	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN VI	375	02150103400009	DINAS PUTR
430	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN VII	619	02150103400010	DINAS PUTR
431	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN VII	2.370	02150104400011	DINAS PUTR
432	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN VII	601	02150104400012	DINAS PUTR
433	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN X	752	02150104400013	DINAS PUTR
434	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN X	1.668	02150106400059	DINAS PUTR
435	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN X	5.207	02150106400060	DINAS PUTR
436	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN X	957	02150106400061	DINAS PUTR
437	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTATORUAN X	791	02150106400062	DINAS PUTR
438	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK	928	02150106400063	DINAS PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	NOMOR SERTIFIKAT	OPD PENGGUNA BARANG
439	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK	654	02150402400011	DINAS PUTR
440	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK	1.508	02150402400012	DINAS PUTR
441	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK	314	02150402400013	DINAS PUTR
442	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK	368	02150402400014	DINAS PUTR
443	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK	287	02150402400015	DINAS PUTR
444	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK	592	02150402400016	DINAS PUTR
445	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK HASUNDUTAN	284	02150402400017	DINAS PUTR
446	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK HASUNDUTAN	1.390	02150414400002	DINAS PUTR
447	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK HASUNDUTAN	394	02150414400003	DINAS PUTR
448	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK HASUNDUTAN	698	02150414400004	DINAS PUTR
449	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK HASUNDUTAN	482	02150414400005	DINAS PUTR
450	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK HASUNDUTAN	1.052	02150414400006	DINAS PUTR
451	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK HASUNDUTAN	2.009	02150414400007	DINAS PUTR
452	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTAURUK HASUNDUTAN	544	02150414400008	DINAS PUTR
453	TANAH JDIBAWAH JALAN	PARBUBU II	574	02150414400009	DINAS PUTR
454	TANAH JDIBAWAH JALAN	PARBUBU II	1.843	02150109400001	DINAS PUTR
455	TANAH JDIBAWAH JALAN	PARBUBU II	2.512	02150109400002	DINAS PUTR
456	TANAH JDIBAWAH JALAN	PARBUBU II	1.177	02150109400003	DINAS PUTR
457	TANAH JDIBAWAH JALAN	PARBUBU II	1.003	02150109400004	DINAS PUTR
458	TANAH JDIBAWAH JALAN	PARBUBU II	574	02150109400005	DINAS PUTR
459	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIARO	3.255	02150109400006	DINAS PUTR
460	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIARO	2.672	02150919400005	DINAS PUTR
461	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIARO	3.732	02150919400006	DINAS PUTR
462	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIARO	828	02150919400007	DINAS PUTR
463	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	1.305	02150919400008	DINAS PUTR
464	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	406	02150903400002	DINAS PUTR
465	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	732	02150903400003	DINAS PUTR
466	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	409	02150903400004	DINAS PUTR
467	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	2.883	02150903400005	DINAS PUTR
468	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	144	02150903400006	DINAS PUTR
469	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	3.225	02150903400007	DINAS PUTR
470	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	3.149	02150903400008	DINAS PUTR
471	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	2.229	02150903400009	DINAS PUTR
472	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	2.530	02150903400010	DINAS PUTR
473	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIBORONGBORONG II	157	02150903400011	DINAS PUTR
474	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	4.903	02150903400012	DINAS PUTR
475	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	1.731	02150403400001	DINAS PUTR
476	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	1.082	02150403400002	DINAS PUTR
477	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	1.062	02150403400003	DINAS PUTR
478	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	180	02150403400004	DINAS PUTR
479	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	2.262	02150403400005	DINAS PUTR
480	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	1.453	02150403400006	DINAS PUTR
481	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	3.037	02150403400007	DINAS PUTR
482	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	9.984	02150403400008	DINAS PUTR
483	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	402	02150403400009	DINAS PUTR
484	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	799	02150403400010	DINAS PUTR
485	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	72	02150403400011	DINAS PUTR
486	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	5.250	02150401400013	DINAS PUTR
487	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	7.163	02150401400014	DINAS PUTR
488	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	789	02150401400015	DINAS PUTR
489	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	338	02150401400016	DINAS PUTR
490	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	199	02150401400017	DINAS PUTR
491	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	2.725	02150401400018	DINAS PUTR
492	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	732	02150401400019	DINAS PUTR
493	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	530	02150401400020	DINAS PUTR
494	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	4.974	02150401400021	DINAS PUTR
495	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	664	02150401400022	DINAS PUTR
496	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	1.446	02150401400023	DINAS PUTR
497	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	537	02150401400024	DINAS PUTR
498	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	343	02150401400025	DINAS PUTR
499	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	1.524	02150401400026	DINAS PUTR
500	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	2.364	02150401400027	DINAS PUTR
501	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	6.951	02150401400028	DINAS PUTR
502	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	390	02150401400029	DINAS PUTR
503	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	468	02150401400030	DINAS PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	NOMOR SERTIFIKAT	OPD PENGGUNA BARANG
504	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	908	02150401400031	DINAS PUTR
505	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	653	02150401400032	DINAS PUTR
506	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HABINSARAN	3.974	02150401400033	DINAS PUTR
507	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HASUNDUTAN	7.412	02150401400034	DINAS PUTR
508	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HASUNDUTAN	4.302	02150404400002	DINAS PUTR
509	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HASUNDUTAN	109	02150404400003	DINAS PUTR
510	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HASUNDUTAN	906	02150404400004	DINAS PUTR
511	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HASUNDUTAN	2.566	02150404400005	DINAS PUTR
512	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HASUNDUTAN	1.642	02150404400006	DINAS PUTR
513	TANAH JDIBAWAH JALAN	SITUMEANG HASUNDUTAN	205	02150404400007	DINAS PUTR
514	TANAH JDIBAWAH JALAN	SIMANUNGKALIT	925 M^2		DINAS PUTR
515	TANAH JDIBAWAH JALAN	LOBU SINGKAM	2579 M^2		DINAS PUTR
516	TANAH JDIBAWAH JALAN	LOBU SINGKAM	4203 M^2		DINAS PUTR
517	TANAH JDIBAWAH JALAN	LOBU SINGKAM	3341 M^2		DINAS PUTR
518	TANAH JDIBAWAH JALAN	LOBU SINGKAM	2570 M^2		DINAS PUTR
519	TANAH JDIBAWAH JALAN	TAPIAN NAULI	2823 M^2		DINAS PUTR
520	TANAH JDIBAWAH JALAN	TAPIAN NAULI	3292 M^2		DINAS PUTR
521	TANAH JDIBAWAH JALAN	TAPIAN NAULI	6526 M^2		DINAS PUTR
522	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTARAJA HASUNDUTAN	1999 M^2		DINAS PUTR
523	TANAH JDIBAWAH JALAN	HUTARAJA HASUNDUTAN	12610 M^2		DINAS PUTR
524	TANAH JDIBAWAH JALAN	Hapoltahan	3.634	02150113400015	DINAS PUTR
525	TANAH JDIBAWAH JALAN	Hutaraja Hasundutan	2.369	02150412400013	DINAS PUTR
526	TANAH JDIBAWAH JALAN	Hapoltahan	1.313	02150113400013	DINAS PUTR
527	TANAH JDIBAWAH JALAN	Parbubu I	4.124	02150108400014	DINAS PUTR
528	TANAH JDIBAWAH JALAN	Hapoltahan	1.099	02150113400011	DINAS PUTR
529	TANAH JDIBAWAH JALAN	Parbubu I	3.152	02150108400016	DINAS PUTR
530	TANAH JDIBAWAH JALAN	Hutaraja Hasundutan	10.970	02150412400011	DINAS PUTR
531	TANAH JDIBAWAH JALAN	Hutaraja Hasundutan	2.650	02150412400009	DINAS PUTR
532	TANAH JDIBAWAH JALAN	Parbubu I	393	02150108400010	DINAS PUTR
533	TANAH JDIBAWAH JALAN	Parbubu I	1.208	02150108400012	DINAS PUTR
534	TANAH JDIBAWAH JALAN	Parbubu I	772	02150108400018	DINAS PUTR
535	TANAH JDIBAWAH JALAN	Hutaraja Hasundutan	3.278	02150412100363	DINAS PUTR
536	TANAH JDIBAWAH JALAN	Hutaraja Hasundutan	12.610	02150412400020	DINAS PUTR
537	TANAH JDIBAWAH JALAN	Hutaraja Hasundutan	1.367	02150412400019	DINAS PUTR

Lampiran 18

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR ASET TETAP TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

II. ASET TANAH YANG BELUM SERTIFIKAT

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Guru Mangaloksa	3.300	SEKRETARIAT DPRD
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor BP4K Siarangarang Kec. Tarutung	2.100	DINAS PERTANIAN
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	BPP Kecamatan Tarutung	7.500	DINAS PERTANIAN
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	BPP Kecamatan Pahae Jae	5.200	DINAS PERTANIAN
5	Kolam Air Tawar	BPP Kecamatan Parmonangan	15.000	DINAS PERTANIAN
6	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	BPP Kec. Purbatua desa Robean Kec. Purbatua	10.000	DINAS PERTANIAN
7	Tanah Bangunan Gudang	sebagai tempat kantor	448	DINAS PERTANIAN
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. JCT Simorangkir No.4 Tarutung	1.012	DINAS PPKBP3A
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl.siliwangi No.10, Siborongborong	3.437	KANTOR CAMAT SIBORONG-BORONG
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl.Tugu. Siborongborong	201	KANTOR CAMAT SIBORONG-BORONG
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Jl.Pintu air siborngborong	1.200	KANTOR CAMAT SIBORONG-BORONG
12	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jl. Justin Sirait Ajibata Kab Toba	404	SEKRETARIAT DAERAH
13	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Kompleks Terminal Madya Tarutung	21.012	SEKRETARIAT DAERAH
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. RM Aritonang No 1A, Desa Hutanagodang, Muara	1.972	KANTOR CAMAT MUARA
15	Pemerintahan	Adiankoting Jae	2.500	KANTOR CAMAT ADIANKOTING
16	Tanah Bangunan Gedung	Adiankoting Jae	600	KANTOR CAMAT ADIANKOTING
17	Tanah Lapangan Sepak bola	Adiankoting Julu	4.800	KANTOR CAMAT ADIANKOTING
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln.Raja Johannes	952	DINAS SOSIAL
19	Tanah Bangunan Gudang	JL. DI. PANJAITAN	17.379	DINAS PERHUBUNGAN
20	Tanah Bangunan Gudang	JL. SISINGAMANGARAJA SIBORONGBORONG	5.000	DINAS PERHUBUNGAN
21	Tanah Bangunan Terminal Udara	DESA PARIKSABUNGAN KEC. SIBORONG BORONG	6.018	DINAS PERHUBUNGAN
22	Tanah Lapangan Lainnya	Jl. Tarutung Desa Garoga Sibargot	7.200	KANTOR CAMAT GAROGA
23	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Tarutung Desa Garoga Sibargot	7.200	KANTOR CAMAT GAROGA
24	Tanah Untuk Makam Umum	Pagar Batu Kecamatan Sipoholon (Mutasi Dari Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara. Tanah Pemakaman Umum.)	10.000	Dinas Perkim
25	Tanah Untuk Makam Umum	Siarangarang Kecamatan Tarutung. (Mutasi Dari Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara. Tanah Pemakaman Umum.)	17.092	Dinas Perkim
26	Tanah Kaveling (dst)	Desa PARBAJU JULU (tanah untuk bangunan Perumahan PT.SOL)	75.826	Dinas Perkim
27	Tanah Kaveling (dst)	desa partali julu (perumahan PT SOL)	15.000	Dinas Perkim
28	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Sisingamangaraja - Tarutung (Eks Ktr. Catpil & Rd Peternakan (Mutasi Dari Dinas PUPR Sem I T.A. 2020))	600	Dinas Perkim
29	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih / Air Baku	Dusun Tapian Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon (Pembebasan Lahan Pembangunan Air Baku (Untuk Bangunan SPAM) 5.268 M2)	5.268	Dinas Perkim
30	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih / Air Baku	Lingkungan Tangsi Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung (Pembebasan Lahan Pembangunan Air Baku (Untuk Bangunan SPAM) 5.762 M2)	5.762	Dinas Perkim
31	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Menuju Relokasi Kantor Camat Muara (Dari Beberapa Masyarakat))	2.962	Dinas Perkim
32	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih / Air Baku	Kecamatan Tarutung (Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Reservoar di Jalan Sibolga Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung)	1.729	Dinas Perkim
33	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	Kecamatan Adiankoting (Penilaian Ganti Kerugian Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting)	48.900	Dinas Perkim
34	Tanah Bangunan Kandang Hewan	Kecamatan Siborongborong (Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan Luas < 10.000 M2 jumlah bidang tanah s/d 10 bidang untuk Pembangunan Kandang Kuda di Pacuan Kuda Kecamatan Siborongborong)	5.203	Dinas Perkim
35	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	JLN. PINTU AIR SIBORONG-BORONG	800	DINAS KETAHANAN PANGAN
36	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	DESA SIARO	1.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
37	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	JLN. PINTU AIR SIBORONG-BORONG	400	DINAS KETAHANAN PANGAN
38	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA LAINNYA(DST)	SITABOTABO TORUAN	146	DINAS KETAHANAN PANGAN
39	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA LAINNYA(DST)	HUTABARAT PARBAJU TONGA	3.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
40	TANAH BALAI PERTEMUAN	Jl. Patuan Anggi	209	KANTOR CAMAT PAHAE JAE

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
41	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	JL. SILIWANGI NO. 01 PANGARIBUAN	3.800	KANTOR CAMAT PANGARIBUAN
42	Tanah Lapangan Sepak bola	JL. SILIWANGI NO. 01 PANGARIBUAN	600	KANTOR CAMAT PANGARIBUAN
43	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III		5.231	KANTOR CAMAT PAGARAN
44	Tanah Lapangan Sepak bola	PURBATUA	10.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
45	Tanah Tambak Ikan	Silali Toruan Muara	1.000	DINAS PARIWISATA
46	Tanah Lapangan Taman Lainnya	Situmeang Sipoholon	14.148	DINAS PARIWISATA
47	Tanah Lapangan Taman Lainnya	Desa Simorangkir Julu	160.800	DINAS PARIWISATA
48	Tanah Lapangan Lainnya	Desa Simorangkir Julu	4.750	DINAS PARIWISATA
49	Tanah Pekan/Pasar	Pasar Muara	3.360	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
50	Tanah Pekan/Pasar	Pasar Siborongborong	22.784	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
51	Tanah Pekan/Pasar	Pasar Sipahutar	15.496	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
52	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMORANGKIR - SIMANAMPANG)	Siatas Barita	80.500	Dinas PUTR
53	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARHORBOAN - SIBARAGAS)	Pagaran	22.750	Dinas PUTR
54	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. LOBU HOLE - LOBUHOLE)	Siatas Barita	29.900	Dinas PUTR
55	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMORANGKIR - TALPE)	Siatas Barita	9.750	Dinas PUTR
56	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIGOTOM - SIMANAMPANG)	Pangaribuan	52.000	Dinas PUTR
57	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (ONAN TUKKA - SIMANAMPANG)	Siatas Barita	48.100	Dinas PUTR
58	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMANAMPANG - GONTING PEGE)	Siatas Barita	26.000	Dinas PUTR
59	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HAREAN - PANSUR NAPITU)	Siatas Barita	45.500	Dinas PUTR
60	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. PUSTU - HUTANAMORA)	Siatas Barita	24.050	Dinas PUTR
61	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SALIB KASIH - PEATOLONG)	Siatas Barita	18.200	Dinas PUTR
62	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP.BUTAR - SIAMBOLAS)	Pagaran	28.000	Dinas PUTR
63	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (BUTAR - SITAMPURUNG)	Pagaran	43.400	Dinas PUTR
64	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SITAMPURUNG - SIBORONG-BORONG)	Pagaran	21.000	Dinas PUTR
65	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (BUTAR - SILABAN BTS HUMBAHAS)	Pagaran	87.100	Dinas PUTR
66	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIBORONGBORONG - BUTAR)	Pagaran	36.750	Dinas PUTR
67	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARSORMINAN - BATUNADUA)	Pangaribuan	88.200	Dinas PUTR
68	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (RANGGITGIT - SIMARIGUNG - BTS HUMBAHAS)	Pagaran	130.000	Dinas PUTR
69	'Tanah dibawah Jalan Kabupaten SIBINGKE SOPORARU	Pangaribuan	98.000	Dinas PUTR
70	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIBINGKE - PARLOMBUAN)	Pangaribuan	37.800	Dinas PUTR
71	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. SIOMAOMA - SIOMAOMA)	Pangaribuan	21.000	Dinas PUTR
72	TANAH DIBAWAH JALAN KABUPATEN SIPULTAK - SIMAMORA - HASIBUAN	Pagaran	42.700	Dinas PUTR
73	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIPULTAK - SIPULTAK DOLOK)	Pagaran	42.000	Dinas PUTR
74	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMAMORA - HASIBUAN - SIBARAGAS)	Pagaran	25.900	Dinas PUTR
75	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. LUMBAN SORMIN - LUMBAN SORMIN)	Pangaribuan	21.000	Dinas PUTR
76	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SAMPAGUL - HUTARAJA)	Pangaribuan	28.000	Dinas PUTR
77	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIGOTOM - SMPN 3 - DESA SIMANJUNTAK)	Pangaribuan	29.400	Dinas PUTR
78	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARLOMBUAN - SIDAGAL)	Pangaribuan	35.000	Dinas PUTR
79	Tanah dibawah Jalan Kabupaten LBN. SINAGA PAROMBURAN	Pangaribuan	24.500	Dinas PUTR
80	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (ONAN SABTU - SIBUDIL)	Pangaribuan	42.000	Dinas PUTR
81	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PEALINTA-SIMARANTAJAU)	Pagaran	9.100	Dinas PUTR
82	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SILANTOM TONGA - SILANTOM JAE)	Pangaribuan	21.000	Dinas PUTR
83	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. KARMEL - KARMAEL)	Pangaribuan	3.500	Dinas PUTR
84	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (TAPIAN NAULI -LBN TONGATONGA)	Pagaran	4.875	Dinas PUTR
85	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (RAHUT BOSI - LOBU GALA)	Pangaribuan	44.100	Dinas PUTR
86	Tanah dibawah Jalan Kabupaten SIBARAGAS PEA TIKKO	SIBARAGAS PEA TIKKO	14.000	Dinas PUTR
87	Tanah dibawah Jalan Kabupaten SILALI TORUAN SIDEMPULA	SILALI TORUAN SIDEMPULA	7.322	Dinas PUTR
88	Tanah dibawah Jalan Kabupaten LBN.INAINA SIMARGALUNG	LBN.INAINA SIMARGALUNG	18.529	Dinas PUTR
89	Tanah dibawah Jalan Kabupaten HUTA NAMAMORA SIARANGARANG	HUTA NAMAMORA SIARANGARANG	44.807	Dinas PUTR
90	Tanah dibawah Jalan Kabupaten HUTA BULU HUTA PASAR	HUTA BULU HUTA PASAR	17.871	Dinas PUTR
91	'Tanah dibawah Jalan Kabupaten BOLAK PASARAN SIPULTAK DOLOK	BOLAK PASARAN SIPULTAK DOLOK	11.263	Dinas PUTR
92	Tanah dibawah Jalan Kabupaten SP. SIHITE LUMBAN MOTUNG	SP. SIHITE LUMBAN MOTUNG	17.906	Dinas PUTR
93	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Keliling Pasar Pangaribuan	Jln. Keliling Pasar Pangaribuan	3.312	Dinas PUTR
94	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Pemotongan	Jln. Pemotongan	652	Dinas PUTR
95	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Menuju Gereja HKBP	Jln. Menuju Gereja HKBP	420	Dinas PUTR
96	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARSINGKAMAN - PARLOBULOBUAN)	Adiankoting	84.500	Dinas PUTR
97	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIDARI - SITORNGOM)	Adiankoting	13.000	Dinas PUTR
98	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PAGARAN PISANG - SOPOSABA)	Adiankoting	16.900	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
99	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. MUNSON LYMAN - MUNSON LYMAN)	Adiankoting	2.438	Dinas PUTR
100	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (LAPO GAMBIRI - PANSUR BATU)	Adiankoting	56.000	Dinas PUTR
101	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. PAGARAN LAMBUNG II - PAGARAN LAMBUNG II)	Adiankoting	22.750	Dinas PUTR
102	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PANSUR BATU - LOBU HAMINJON)	Adiankoting	133.700	Dinas PUTR
103	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (ADIANKOTING - JLN. AEK MATIO JULU)	Adiankoting	18.550	Dinas PUTR
104	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. SIMANINGGIR - SIMANINGGIR)	Adiankoting	10.500	Dinas PUTR
105	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIANTAR NAIPOSPOS - LOBU HAMINJON)	Adiankoting	42.000	Dinas PUTR
106	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Menuju SMA Adiankoting	Menuju SMA Adiankoting	800	Dinas PUTR
107	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. PARINSORAN - PANGORIAN)	Garoga	53.800	Dinas PUTR
108	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARGAWAHAN - LOBU TONGA)	Garoga	88.550	Dinas PUTR
109	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (LBN PINASA - GONTING HOPO - PADANG SIANDOMANG	Garoga	93.100	Dinas PUTR
110	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (GAROGA - PEARAJA/BTS TAPSEL)	Garoga	102.200	Dinas PUTR
111	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (LUMBAN PINASA - PARSOSORAN - GONTING SALAK)	Garoga	65.450	Dinas PUTR
112	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. PARANGINAN - HADATARAN - PARSOSORAN)	Garoga	126.000	Dinas PUTR
113	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. BULU PAYUNG - SIBARGOT)	Garoga	46.900	Dinas PUTR
114	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARINSORAN - LBN. BAGASAN)	Garoga	11.900	Dinas PUTR
115	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. PARMANUKAN - PARMANUKAN)	Garoga	21.000	Dinas PUTR
116	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (AEK TANGGA - HUTAGURGUR - PARINSORAN)	Garoga	38.500	Dinas PUTR
117	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (RAMBA SIALA - TAPUS)	Garoga	32.900	Dinas PUTR
118	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. III PEARAJA - BATU MAMAK)	Garoga	33.600	Dinas PUTR
119	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. BOLON - PEA OMBUN)	Garoga	100.100	Dinas PUTR
120	Tanah dibawah Jalan Kabupaten PARSAORAN NAINGGOLAN HARIARA	Garoga	4.200	Dinas PUTR
121	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PANGALOAN-LIANG SINGA)	Garoga	38.500	Dinas PUTR
122	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (GAROGA-RIANIATE)	Garoga	39.750	Dinas PUTR
123	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMATE-MATE - AEK GODANG)	Garoga	34.300	Dinas PUTR
124	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. TRANSMIGRASI - TRANSMIGRASI)	Garoga	28.200	Dinas PUTR
125	Tanah dibawah Jalan Kabupaten SP. SIMATANIARI SIMATANIARI	SP. SIMATANIARI SIMATANIARI	10.941	Dinas PUTR
126	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Lumban Pinasa	Jln. Lumban Pinasa	944	Dinas PUTR
127	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Natumingka	Jln. Natumingka	2.756	Dinas PUTR
128	Jalan di Desa Parinsoran Kec. Garoga (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Parinsoran Kec. Garoga (SK Baru 2022)	24.500	Dinas PUTR
129	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SILANGIT - SIANJUR)	Muara	92.250	Dinas PUTR
130	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. HUTAGINJANG - GANTOLE HUTAGINJANG)	Muara	11.250	Dinas PUTR
131	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIBANDANG - SAMPURAN -SIBANDANG)	Muara	89.250	Dinas PUTR
132	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (MUARA - HUTANAGODANG)	Muara	17.500	Dinas PUTR
133	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. SIMATUPANG - ARITONANG)	Muara	14.000	Dinas PUTR
134	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HUTAGINJANG - SITANGGOR)	Muara	39.900	Dinas PUTR
135	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. ARITONANG - GONTALE ARITONANG)	Muara	10.500	Dinas PUTR
136	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. III MUARA-HUTAGINJANG)	Muara	101.500	Dinas PUTR
137	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (UNTE MUNGKUR-BATU BINUMBUM)	Muara	6.300	Dinas PUTR
138	Tanah dibawah Jalan Kabupaten BARIBA NI AEK SITINDAK TAPIAN NAULI	BARIBA NI AEK SITINDAK TAPIAN NAULI	21.973	Dinas PUTR
139	Tanah dibawah Jalan Kabupaten UNTE MUNGKUR PANDAN	UNTE MUNGKUR PANDAN	16.548	Dinas PUTR
140	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Keliling Pasar Muara	Dalam Kota Muara	42.000	Dinas PUTR
141	Jalan di Desa Hutaginjang, Kec. Muara (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Hutaginjang, Kec. Muara (SK Baru 2022)	14.700	Dinas PUTR
142	Jalan di Desa Silando kec. Muara (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Silando kec. Muara (SK Baru 2022)	11.900	Dinas PUTR
143	Jalan di Desa Hutaginjang Kec. Muara (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Hutaginjang Kec. Muara (SK Baru 2022)	19.600	Dinas PUTR
144	Jalan di Desa Silando kec. Muara (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Silando kec. Muara (SK Baru 2022)	9.310	Dinas PUTR
145	Jalan di Desa Silando Kec. Muara (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Silando Kec. Muara (SK Baru 2022)	7.000	Dinas PUTR
146	Jalan di Desa Silando Kec. Muara (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Silando Kec. Muara (SK Baru 2022)	8.190	Dinas PUTR
147	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SARULLA - TORDOLOK NAULI - ONAN JORO)	Pahae Jae	65.000	Dinas PUTR
148	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SARULLA - SIPETANG)	Pahae Jae	114.100	Dinas PUTR
149	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (JANJI MARIA - BONAN DOLOK)	Pahae Jae	35.700	Dinas PUTR
150	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. SISORDAK - SISORDAK)	Pahae Jae	4.900	Dinas PUTR
151	Tanah dibawah Jalan Kabupaten PARSAORAN NAINGGOLAN PARSAORAN NAINGGOLAN	PARSAORAN NAINGGOLAN PARSAORAN NAINGGOLAN	8.778	Dinas PUTR
152	Tanah dibawah Jalan Kabupaten JANJI ANGKOLA JANJI NAULI	JANJI ANGKOLA JANJI NAULI	9.940	Dinas PUTR
153	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Keliling Pasar Sarulla	Jln. Keliling Pasar Sarulla	3.792	Dinas PUTR
154	Jalan di Desa Nahornop Marsada Kec. Pahae Jae (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Nahornop Marsada Kec. Pahae Jae (SK Baru 2022)	7.000	Dinas PUTR
155	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP.SIBAGANDING - SIMATANIARI - HUTAJULU)	Pahae Julu	98.700	Dinas PUTR
156	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SITAPEAN PANTIS)	Pahae Julu	21.000	Dinas PUTR
157	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIGOMPULON - BONAN DOLOK)	Pahae Julu	75.600	Dinas PUTR
158	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SMP. JLN. NEGARA - PARIK MATIA)	Pahae Julu	14.000	Dinas PUTR
159	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (ONAN RUNGGU - LBN. RANG - LBN. LOBU)	Pahae Julu	56.000	Dinas PUTR
160	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (ONAN RUNGGU - SILIMABAHAL - HUTAGURGUR)	Pahae Julu	84.000	Dinas PUTR
161	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIGOMPULON - SIMARDANGIANG)	Pahae Julu	44.100	Dinas PUTR
162	Tanah dibawah Jalan Kabupaten JONGGI PANGONDOTAN	JONGGI PANGONDOTAN	7.588	Dinas PUTR
163	Jalan di Desa Simasom Toruan Kec. Pahae Julu (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Simasom Toruan Kec. Pahae Julu (SK Baru 2022)	44.450	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
164	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (AEK RAJA - HAUGANJANG - LOBU SUNUT)	Parmonangan	48.300	Dinas PUTR
165	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (LUMBAN INAINA - LUBIS)	Parmonangan	172.200	Dinas PUTR
166	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARRATUSAN - PARMONANGAN)	Parmonangan	14.950	Dinas PUTR
167	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HUTATINGGI - SIMAMORA)	Parmonangan	52.650	Dinas PUTR
168	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HUTATINGGI - BUTAR)	Parmonangan	64.400	Dinas PUTR
169	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. HARIARA - SIMARSALAON) BERUBAH SP. HARIARA -	Parmonangan	84.000	Dinas PUTR
170	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. HORISAN - SAMPINUR)	Parmonangan	39.200	Dinas PUTR
171	Tanah dibawah Jalan Kabupaten RAPPA TUMUSHAJORAN	Parmonangan	87.500	Dinas PUTR
172	Tanah dibawah Jalan Kabupaten RAPPA BATU ARIMOBTS.TAPTENG	Parmonangan	77.000	Dinas PUTR
173	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (AEK RAJA - HORISAN)	Parmonangan	17.500	Dinas PUTR
174	Tanah dibawah Jalan Kabupaten HOPONG BUTAR	Parmonangan	58.500	Dinas PUTR
175	Tanah dibawah Jalan Kabupaten PADANG PARSADAAN PARUREAN	Parmonangan	4.550	Dinas PUTR
176	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. TUGU-PARRATUSAN)	Parmonangan	10.500	Dinas PUTR
177	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARMONANGAN - HUTA JULU)	Parmonangan	48.750	Dinas PUTR
178	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARSIBARUNGAN - SITONONG)	Parmonangan	12.000	Dinas PUTR
179	Tanah dibawah Jalan Kabupaten HUTA TINGGI PARMONANGAN	HUTA TINGGI PARMONANGAN	166.166	Dinas PUTR
180	Jalan di Desa Aek Raja Kec. Parmonangan (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Aek Raja Kec. Parmonangan (SK Baru 2022)	12.600	Dinas PUTR
181	Jalan di Desa Hutatua Kec. Parmonangan (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Hutatua Kec. Parmonangan (SK Baru 2022)	21.000	Dinas PUTR
182	Jalan di Desa Parratusan Kec. Parmonangan(SK Baru 2022)	Jalan di Desa Parratusan Kec. Parmonangan(SK Baru 2022)	49.000	Dinas PUTR
183	Jalan di Desa Hutajulu Parbalik, Kec. Parmonangan (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Hutajulu Parbalik, Kec. Parmonangan (SK Baru 2022)	63.000	Dinas PUTR
184	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (BATU HAPUR - PURBATUA)	Purba Tua	17.250	Dinas PUTR
185	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. GUKGUK - GUKGUK) Berubah Sipahutar - Lumban G	Siborongborong	35.000	Dinas PUTR
186	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (LOBU SIREGAR - SANGKAR TORUAN)	Siborongborong	28.000	Dinas PUTR
187	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PEA LANGGE - BATU GONTING)	Siborongborong	62.300	Dinas PUTR
188	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIBORONGBORONG - SIMAROMPU OMPU)	Siborongborong	42.000	Dinas PUTR
189	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SINUR PETERNAKAN - KTR CAMAT)	Siborongborong	16.900	Dinas PUTR
190	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SINUR PETERNAKAN - HARIARA)	Siborongborong	44.800	Dinas PUTR
191	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. JL NEGARA - SILALAHI)	Siborongborong	28.000	Dinas PUTR
192	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. BAHAL BATU I - AEK MAS) BERUBAH SIMP. AEK M	Siborongborong	44.800	Dinas PUTR
193	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (BAHAL BATU I - ONAN RUNGGU I)	Siborongborong	75.600	Dinas PUTR
194	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PARPANGIRAN - LBN HOLBUNG)	Siborongborong	70.000	Dinas PUTR
195	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIGALINGGING - SIGUMBANG)	Siborongborong	6.500	Dinas PUTR
196	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. PACUAN KUDA - SILAITLAIT)	Siborongborong	32.250	Dinas PUTR
197	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. SIHATANDOHAN - SIHATANDOHAN - POKKI)	Siborongborong	53.200	Dinas PUTR
198	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. PURBA SINOMBA - PURBA SINOMBA)	Siborongborong	49.000	Dinas PUTR
199	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. JALAN SILANDO - SILANDO)	Siborongborong	21.000	Dinas PUTR
200	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. SIHITE-LUMBAN INAINA)	Siborongborong	21.000	Dinas PUTR
201	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HUTA BULU - SIMARANTAJAU)	Siborongborong	20.150	Dinas PUTR
202	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (BAHAL BATU I - BAHAL BATU III)	Siborongborong	37.100	Dinas PUTR
203	Tanah dibawah Jalan Kabupaten LUMBAN SILITONGA PANJAITAN	LUMBAN SILITONGA PANJAITAN	15.043	Dinas PUTR
204	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Siliwangi	Jln. Siliwangi	3.228	Dinas PUTR
205	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Pasar Baru	Jln. Pasar Baru	1.024	Dinas PUTR
206	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Dame	Jln. Dame	3.228	Dinas PUTR
207	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Horas	Jln. Horas	720	Dinas PUTR
208	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Huta Pasaribu	Jln. Huta Pasaribu	1.776	Dinas PUTR
209	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Merdeka	Jln. Merdeka	484	Dinas PUTR
210	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Pasar Baru	Jln. Pasar Baru	1.024	Dinas PUTR
211	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Sanif	Jln. Sanif	3.228	Dinas PUTR
212	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Siswa	Jln. Siswa	1.708	Dinas PUTR
213	Jalan di Desa Siborong-borong I Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Siborong-borong I Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	11.200	Dinas PUTR
214	Jalan d Desa Sitampurung Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	Jalan d Desa Sitampurung Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	5.600	Dinas PUTR
215	Jalan di Desa Sitabo-tabo toruan Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Sitabo-tabo toruan Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	11.200	Dinas PUTR
216	Jalan di Desa Pohan Tonga Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Pohan Tonga Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	10.500	Dinas PUTR
217	Jalan di Desa Paniaran Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Paniaran Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	21.000	Dinas PUTR
218	Jalan di Desa Lumban Tongatonga Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Lumban Tongatonga Kec. Siborongborong (SK Baru 2022)	7.000	Dinas PUTR
219	Jalan di Desa Sitabotabo Toruan Kec. Siborongborong(SK Baru 2022)	Jalan di Desa Sitabotabo Toruan Kec. Siborongborong(SK Baru 2022)	7.000	Dinas PUTR
220	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (JANJI ANGKOLA - AEK NALAS)	Simangumban	8.400	Dinas PUTR
221	Tanah dibawah Jalan Kabupaten HUTAGURGUR BATAS TAPSEL	Simangumban	42.000	Dinas PUTR
222	Tanah dibawah Jalan Kabupaten SIMANGUMBAN HOPONG	Simangumban	77.000	Dinas PUTR
223	Tanah dibawah Jalan Kabupaten PANONGKALAN SP. MUARA TOLANG	PANONGKALAN SP. MUARA TOLANG	91.000	Dinas PUTR
224	Jalan di Desa Pardomuan Kec. Simangumban (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Pardomuan Kec. Simangumban (SK Baru 2022)	28.000	Dinas PUTR
225	Jalan di Desa SImangumban Kec. Kec. Simangumban (SK Baru 2022)	Jalan di Desa SImangumban Kec. Kec. Simangumban (SK Baru 2022)	14.700	Dinas PUTR
226	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten SIPAHUTAR - PARLOMBUAN - NAGASARIBU	Sipahutar	85.800	Dinas PUTR
227	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (ONAN TUKKA - PANJAITAN)	Sipahutar	44.100	Dinas PUTR
228	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIPAHUTAR - LUMBAN RIHIT)	Sipahutar	46.200	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
229	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HUTAGURGUR - SOSOR TAMBISSU)	Sipahutar	28.000	Dinas PUTR
230	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (AEK NAULI III - LBN. HARIARA)	Sipahutar	17.500	Dinas PUTR
231	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (LBN. JULU - SANGKAR NIHUTA)	Sipahutar	17.500	Dinas PUTR
232	Tanah dibawah Jalan Kabupaten LUMBAN JULU SITAPONGAN	Sipahutar	21.000	Dinas PUTR
233	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. LUMBAN BIRU - LUMBAN BIRU)	Sipahutar	28.000	Dinas PUTR
234	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIPAHUTAR - SIMARHOMPA)	Sipahutar	51.100	Dinas PUTR
235	Tanah dibawah Jalan Kabupaten HUTA GURGUR SITAPONGAN	Sipahutar	64.400	Dinas PUTR
236	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. SIALOGO - BONANDOLOK)	Sipahutar	32.500	Dinas PUTR
237	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SMP. SIGALAGALA - JANJI MARIA (BTS TOBASA))	Sipahutar	149.500	Dinas PUTR
238	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIPARENDEAN - HUTAMAMUNGKA - ADIAN NALAMBO	Sipahutar	70.000	Dinas PUTR
239	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. LBN. SIANTAR - SIANTAR)	Sipahutar	2.100	Dinas PUTR
240	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HUTA LAMA - PANCURNATOLU)	Sipahutar	12.600	Dinas PUTR
241	Tanah dibawah Jalan Kabupaten LBN. BIRU PANJAITAN	LBN. BIRU PANJAITAN	15.421	Dinas PUTR
242	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Keliling Pasar Sipahutar	Jln. Keliling Pasar Sipahutar	6.288	Dinas PUTR
243	Jalan di Desa Siabal-abal Kec. Sipahutar (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Siabal-abal Kec. Sipahutar (SK Baru 2022)	10.500	Dinas PUTR
244	Jalan di Desa Siabal-abal I Kec. Sipahutar (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Siabal-abal I Kec. Sipahutar (SK Baru 2022)	9.380	Dinas PUTR
245	Jalan di Desa Sabungan Ni Huta IV Kec, Sipahutar (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Sabungan Ni Huta IV Kec, Sipahutar (SK Baru 2022)	11.200	Dinas PUTR
246	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HUTA BARU - LBN. HARIARA PANGALOAN)	Sipholon	10.500	Dinas PUTR
247	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (TARUTUNG - SIMPANG SIMINARIUM)	Sipoholon	39.750	Dinas PUTR
248	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIPOHOLON (SEMINARIUM) - RURA JULU)	Sipoholon	112.450	Dinas PUTR
249	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. PASAR SIRONGIT - SEMINARIUM)	Sipoholon	12.350	Dinas PUTR
250	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SMP. SILANGKITANG PERUMNAS - PAGARBATU)	Sipoholon	3.900	Dinas PUTR
251	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SILANGKITANG - CEKDAM/PANSINARAN)	Sipoholon	16.250	Dinas PUTR
252	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SILANGKITANG - SIBADAK I /II)	Sipoholon	3.900	Dinas PUTR
253	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SILANGKITANG - HUTATINGGI)	Sipoholon	105.000	Dinas PUTR
254	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (AEK RANGAT - SANDARAN - HUTATINGGI)	Sipoholon	86.100	Dinas PUTR
255	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SMP. PAGAR BATU - DOLOK IMUN)	Sipoholon	40.600	Dinas PUTR
256	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (LOBU SIHIM - PANSINARAN) berubah LOBU SIHIM - LOE	Sipoholon	56.000	Dinas PUTR
257	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. INGUL - INGUL)	Sipoholon	17.500	Dinas PUTR
258	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PANGALOAN - PAGARAN)	Sipoholon	35.000	Dinas PUTR
259	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (PANGGABEAN - LUMBAN TONGATONGA)	Sipoholon	3.900	Dinas PUTR
260	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMARGALUNG - LOBU SUNUT)	Sipoholon	8.400	Dinas PUTR
261	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Kantor Camat Sipoholon	Jln. Kantor Camat Sipoholon	600	Dinas PUTR
262	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Lbn. Lobu	Jln. Lbn. Lobu	988	Dinas PUTR
263	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Lumban Julu	Jln. Lumban Julu	880	Dinas PUTR
264	Jalan Di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon (SK Baru 2022)	Jalan Di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon (SK Baru 2022)	9.100	Dinas PUTR
265	Jalan di Desa Hutaraja, Kec. Sipoholon (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Hutaraja, Kec. Sipoholon (SK Baru 2022)	9.800	Dinas PUTR
266	Jalan di Desa Pagar Bau Kec. Sipoholon (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Pagar Bau Kec. Sipoholon (SK Baru 2022)	7.000	Dinas PUTR
267	Jalan di Kelurahan Situmeang Habinsaran , Kec. Sipoholon(SK Baru 2022)	Jalan di Kelurahan Situmeang Habinsaran , Kec. Sipoholon(SK Baru 2022)	10.500	Dinas PUTR
268	Jalan di Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon (SK Baru 2022)	21.000	Dinas PUTR
269	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SITAREALAMAN - BANUAJI)	Tarutung	32.500	Dinas PUTR
270	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (TARUTUNG - HAREAN)	Tarutung	29.000	Dinas PUTR
271	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Aek Siansimun Siandorandor Simaninggir	Tarutung	83.200	Dinas PUTR
272	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (TUSAM - SINGUAK)	Tarutung	63.700	Dinas PUTR
273	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HUTA SUMUR - HAPOLTAHAN)	Tarutung	73.450	Dinas PUTR
274	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SAITNIHUTA - PARBUBU PEA)	Tarutung	19.500	Dinas PUTR
275	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMPANG JL. NEGARA - PANGANAN LOMBU)	Tarutung	9.750	Dinas PUTR
276	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (KELILING PASAR - KELILING PASAR)	Tarutung	15.872	Dinas PUTR
277	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIARANGARANG - PARTALI JULU)	Tarutung	26.000	Dinas PUTR
278	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (JLN. NEGARA - LBN. SITUMURANG)	Tarutung	9.750	Dinas PUTR
279	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SAITNIHUTA - HUTABARAT)	Tarutung	11.050	Dinas PUTR
280	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP. SOSUNGGULON - SOSUGNGULON)	Tarutung	13.000	Dinas PUTR
281	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (HUTA BAGINDA - SAITNIHUTA)	Tarutung	10.400	Dinas PUTR
282	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (BANUAREA - PANSURNAPUTU)	Tarutung	15.600	Dinas PUTR
283	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SIMP.SIGOMPULON - SIGOMPULON)	Tarutung	44.100	Dinas PUTR
284	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten (SP. JL NEGARA-PANAHARAN)	Tarutung	4.875	Dinas PUTR
285	Tanah dibawah Jalan Kabupaten SIARANGARANG AEK NASIA	SIARANGARANG AEK NASIA	15.925	Dinas PUTR
286	Tanah dibawah Jalan Kabupaten PERUM BARAT INDAH PAGAR SINONDI	PERUM BARAT INDAH PAGAR SINONDI	53.487	Dinas PUTR
287	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten AHMAD YANI - SUDIRMAN	AHMAD YANI - SUDIRMAN	5.706	Dinas PUTR
288	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten DIPENOGORO	DIPENOGORO	5.882	Dinas PUTR
289	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten GAJAH MADA	GAJAH MADA	637	Dinas PUTR
290	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten JALAN MENUJU SMP 3 TARUTUNG	JALAN MENUJU SMP 3 TARUTUNG	2.200	Dinas PUTR
291	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten JALAN SAIT NIHUTA	JALAN SAIT NIHUTA	7.400	Dinas PUTR
292	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Pemuda Ujung	Jln. Pemuda Ujung	3.421	Dinas PUTR
293	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jln. Suprapto	Jln. Suprapto	1.400	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
294	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten KOMPLEKS RSU	KOMPLEKS RSU	2.416	Dinas PUTR
295	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten MARINGAN HUTAGALUNG	MARINGAN HUTAGALUNG	1.272	Dinas PUTR
296	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten NAHUM SITUMORANG	NAHUM SITUMORANG	2.736	Dinas PUTR
297	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten RAJA SAUL	RAJA SAUL	1.716	Dinas PUTR
298	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten RAKEA	RAKEA	4.952	Dinas PUTR
299	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Rambing Hutabarat	Rambing Hutabarat	2.200	Dinas PUTR
300	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten SUTOMO	SUTOMO	1.231	Dinas PUTR
301	Tanah Dibawah Jalan Kabupaten Jalan Keliling Pasar	Jalan Keliling Pasar	1.856	Dinas PUTR
302	Jalan di Desa Parbubu II/Parbubu Dolok Kec. Tarutung (SK BARU 2022)	Jalan di Desa Parbubu II/Parbubu Dolok Kec. Tarutung (SK BARU 2022)	25.550	Dinas PUTR
303	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DI. Aek Sitapean Kec. P	DI. Aek Sitapean Kec. Pahae Julu DAK Tambahan	3.250	Dinas PUTR
304	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sialang Kec. Pahae Julu (DAK Tambahan))	DI. Sialang Kec. Pahae Julu DAK Tambahan	2.800	Dinas PUTR
305	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sialang Kec Pahae Julu (DAK Tambahan))	DI Sialang Kec Pahae Julu DAK Tambahan	330	Dinas PUTR
306	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Aek Sitapean Kec Pahae Julu (DAK Tambahan))	DI Aek Sitapean Kec Pahae Julu DAK Tambahan	225	Dinas PUTR
307	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Lumban Tora Kec. Siborongborong (DAK))	DI. Lumban Tora Kec. Siborongborong DAK	5.400	Dinas PUTR
308	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sidolgi Kec. Pagaran (DAK Tambahan))	DI. Sidolgi Kec. Pagaran DAK Tambahan	2.832	Dinas PUTR
309	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sidolgi Kec Pagaran (DAK Tambahan))	DI Sidolgi Kec Pagaran DAK Tambahan	420	Dinas PUTR
310	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Parhorboan Kec. Pagaran (DAK))	DI. Parhorboan Kec. Pagaran DAK	5.670	Dinas PUTR
311	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sigansip Kec. Muara (DAK))	DI. Sigansip Kec. Muara DAK	19.500	Dinas PUTR
312	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SISORDAK, KEC. PARMONANGAN)	SISORDAK, KEC. PARMONANGAN	4.290	Dinas PUTR
313	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI.Dolok Martumbur Kec. Muara (DAK Tambahan))	DI.Dolok Martumbur Kec. Muara DAK Tambahan	1.920	Dinas PUTR
314	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Dolok Martumbur Kec Muara (DAK Tambahan))	DI Dolok Martumbur Kec Muara DAK Tambahan	150	Dinas PUTR
315	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Simanuk Kec. Sipahutar (DAK))	DI. Simanuk Kec. Sipahutar DAK	4.860	Dinas PUTR
316	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sibuntuon Kec. Sipoholon (DAK))	DI. Sibuntuon Kec. Sipoholon DAK	6.300	Dinas PUTR
317	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sisordak Kec. Parmonangan (DAK))	DI. Sisordak Kec. Parmonangan DAK	4.200	Dinas PUTR
318	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Siborgung Hilir Kec. Tarutung (DAK))	DI. Siborgung Hilir Kec. Tarutung DAK	5.400	Dinas PUTR
319	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Butar Kec. Pagaran (DAK))	DI. Aek Butar Kec. Pagaran DAK	7.350	Dinas PUTR
320	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sigurunggurung Kec. Pahae Jae (DAK))	DI. Sigurunggurung Kec. Pahae Jae DAK	2.400	Dinas PUTR
321	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sipurikpurik Kec. Purbatua (DAK))	DI. Sipurikpurik Kec. Purbatua DAK	5.640	Dinas PUTR
322	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sipultak Kec. Pagaran (DAK))	DI. Sipultak Kec. Pagaran DAK	6.600	Dinas PUTR
323	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Parsibarungan Kec. Pangaribuan (DAK))	DI. Parsibarungan Kec. Pangaribuan DAK	4.620	Dinas PUTR
324	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Siomaoma Kec. Pangaribuan (DAK Tambahan))	DI. Siomaoma Kec. Pangaribuan DAK Tambahan	3.600	Dinas PUTR
325	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Parsibarungan Kec. Pangaribuan (DAK))	D.I. Parsibarungan Kec. Pangaribuan DAK	5.670	Dinas PUTR
326	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Simarompuompu Kec. Siborongborong (DAK Tam	DI. Simarompuompu Kec. Siborongborong DAK Tambahan	5.550	Dinas PUTR
327	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Parhorboan Kec. Pagaran (DAK))	D.I. Parhorboan Kec. Pagaran DAK	6.000	Dinas PUTR
328	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Lobu Siregar Kec. Siborongborong (DAK))	D.I. Lobu Siregar Kec. Siborongborong DAK	6.000	Dinas PUTR
329	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Sambariba Horbo Kec. Siborongborong (DAK))	D.I. Sambariba Horbo Kec. Siborongborong DAK	6.000	Dinas PUTR
330	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Silangkitang Kec. Pahae Jae (DAK Tambahan))	DI. Silangkitang Kec. Pahae Jae DAK Tambahan	5.400	Dinas PUTR
331	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Lobu Siregar Kec. Siborongborong (DAK Tambahan	DI. Lobu Siregar Kec. Siborongborong DAK Tambahan	4.050	Dinas PUTR
332	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sambariba Horbo Kec. Siborongborong (DAK Tamb	DI. Sambariba Horbo Kec. Siborongborong DAK Tambahan	2.720	Dinas PUTR
333	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sitakkapan Lontung Dolok Kec. Pahae Julu (DAK T	DI. Sitakkapan Lontung Dolok Kec. Pahae Julu DAK Tambahan	5.490	Dinas PUTR
334	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sibaragas Kec. Pagaran (DAK Tambahan))	DI. Sibaragas Kec. Pagaran DAK Tambahan	2.550	Dinas PUTR
335	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Hutasoit Kec. Siborongborong (DAK Tambahan))	DI. Hutasoit Kec. Siborongborong DAK Tambahan	6.000	Dinas PUTR
336	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sidoras Kiri/Kanan Kec. Siborongborong (DAK Tam	DI. Sidoras Kiri/Kanan Kec. Siborongborong DAK Tambahan	12.600	Dinas PUTR
337	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Pearung Desa Sibaragas Kec. Pagaran (DAK Tambah	DI. Pearung Desa Sibaragas Kec. Pagaran DAK Tambahan	7.290	Dinas PUTR
338	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Siborongborong Kec. Siborongborong (DAK))	D.I. Siborongborong Kec. Siborongborong DAK	405	Dinas PUTR
339	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Sipultak Kec. Pagaran (DAK))	D.I. Sipultak Kec. Pagaran DAK	6.690	Dinas PUTR
340	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Onan Joro Kec. Pahae Jae (DAK))	D.I. Onan Joro Kec. Pahae Jae DAK	6.900	Dinas PUTR
341	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Simarlai-lai Kec. Siatas Barita (DAK Tambahan))	DI. Simarlai-lai Kec. Siatas Barita DAK Tambahan	8.100	Dinas PUTR
342	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Lumban Tora Kec. Siborongborong (DAK Tambaha	DI. Lumban Tora Kec. Siborongborong DAK Tambahan	4.980	Dinas PUTR
343	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Simajambu Kec. Simangumban (DAK Tambahan))	DI. Simajambu Kec. Simangumban DAK Tambahan	5.700	Dinas PUTR
344	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI.Ugan Kec. Muara (DAK Tambahan))	DI.Ugan Kec. Muara DAK Tambahan	9.600	Dinas PUTR
345	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Siborgung Kiri dan Kanan Kec. Tarutung (DAK Tamb	DI. Siborgung Kiri dan Kanan Kec. Tarutung DAK Tambahan	7.200	Dinas PUTR
346	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Aek Marubun Kec.Siatas Barita (DAK))	D.I. Aek Marubun Kec.Siatas Barita DAK	7.500	Dinas PUTR
347	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Sisordak Kec. Parmonangan (DAK))	D.I. Sisordak Kec. Parmonangan DAK	7.500	Dinas PUTR
348	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Ugan Kec. Muara (DAK))	D.I. Ugan Kec. Muara DAK	6.240	Dinas PUTR
349	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Sijaba Kec. Siborongborong (DAK))	D.I. Sijaba Kec. Siborongborong DAK	6.450	Dinas PUTR
350	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (D.I. Sigohi Butuha Kec. Pagaran (DAK))	D.I. Sigohi Butuha Kec. Pagaran DAK	19.500	Dinas PUTR
351	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Partali Julu Kec. Tarutung (DAK Tambahan))	DI. Partali Julu Kec. Tarutung DAK Tambahan	5.250	Dinas PUTR
352	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sipolhas Kec. Tarutung (DAK Tambahan))	DI. Sipolhas Kec. Tarutung DAK Tambahan	3.750	Dinas PUTR
353	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sipolhas Kec. Tarutung (DAK Tambahan))	DI. Sipolhas Kec. Tarutung DAK Tambahan	1.920	Dinas PUTR
354	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Lumban Siagian Kec. Siatas Barita (DAK Tambahar	DI. Lumban Siagian Kec. Siatas Barita DAK Tambahan	4.980	Dinas PUTR
355	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Toras Kec. Sipoholon (DAK Tambahan))	DI. Aek Toras Kec. Sipoholon DAK Tambahan	3.720	Dinas PUTR
356	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Halian Harangan Kec. Sipoholon (DAK Tambah	DI. Aek Halian Harangan Kec. Sipoholon DAK Tambahan	7.260	Dinas PUTR
357	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sampuran Kec. Sipoholon (DAK Tambahan))	DI. Sampuran Kec. Sipoholon DAK Tambahan	5.550	Dinas PUTR
358	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sibontar Kec. Sipoholon (DAK Tambahan))	DI. Sibontar Kec. Sipoholon DAK Tambahan	4.800	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
359	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sisoding Kec. Sipoholon (DAK Tambahan))	DI. Sisoding Kec. Sipoholon DAK Tambahan	7.500	Dinas PUTR
360	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Dahasan Kec. Pahae Julu (DAK Tambahan))	DI. Aek Dahasan Kec. Pahae Julu DAK Tambahan	23.760	Dinas PUTR
361	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sonak Sigompulon Kec. Pahae Julu (DAK Tambaha	DI. Sonak Sigompulon Kec. Pahae Julu DAK Tambahan	5.940	Dinas PUTR
362	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sawa Longat Kec. Pahae Julu (DAK Tambahan))	DI. Sawa Longat Kec. Pahae Julu DAK Tambahan	9.600	Dinas PUTR
363	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Lobu Pining Kec. Pahae Julu (DAK Tambahan))	DI. Lobu Pining Kec. Pahae Julu DAK Tambahan	6.000	Dinas PUTR
364	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Siparpar Kec. Pahae Julu (DAK Tambahan))	DI. Aek Siparpar Kec. Pahae Julu DAK Tambahan	9.900	Dinas PUTR
365	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Botik Kec. Pahae Jae (DAK Tambahan))	DI. Aek Botik Kec. Pahae Jae DAK Tambahan	7.350	Dinas PUTR
366	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Bontar Kec. Purbatua (DAK Tambahan))	DI. Aek Bontar Kec. Purbatua DAK Tambahan	2.610	Dinas PUTR
367	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Sulum Kec. Purbatua (DAK Tambahan))	DI. Aek Sulum Kec. Purbatua DAK Tambahan	4.830	Dinas PUTR
368	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sipurikpurik Kec. Purba Tua (DAK Tambahan))	DI. Sipurikpurik Kec. Purba Tua DAK Tambahan	6.600	Dinas PUTR
369	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Nararongan Kec. Adiankoting (DAK Tambahan	DI. Aek Nararongan Kec. Adiankoting DAK Tambahan	4.800	Dinas PUTR
370	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Munson Liman Kec. Adiankoting (DAK Tambahan))	DI. Munson Liman Kec. Adiankoting DAK Tambahan	5.700	Dinas PUTR
371	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Parsibarungan Kec. Pangaribuan (DAK Tambahan)	DI. Parsibarungan Kec. Pangaribuan DAK Tambahan	5.670	Dinas PUTR
372	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Saba Bolak Kec. Pangaribuan (DAK Tambahan))	DI. Saba Bolak Kec. Pangaribuan DAK Tambahan	7.350	Dinas PUTR
373	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Saba Aron Kec. Garoga (DAK Tambahan))	DI. Saba Aron Kec. Garoga DAK Tambahan	7.350	Dinas PUTR
374	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Sibiobio Kec. Garoga (DAK Tambahan))	DI. Aek Sibiobio Kec. Garoga DAK Tambahan	2.340	Dinas PUTR
375	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Sitakkubak Kec. Pagaran (DAK Tambahan))	DI. Aek Sitakkubak Kec. Pagaran DAK Tambahan	4.800	Dinas PUTR
376	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sipultak Dolok Kec. Pagaran (DAK Tambahan))	DI. Sipultak Dolok Kec. Pagaran DAK Tambahan	6.690	Dinas PUTR
377	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sigohi Butuha Kec. Pagaran (DAK Tambahan))	DI. Sigohi Butuha Kec. Pagaran DAK Tambahan	9.600	Dinas PUTR
378	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Lumban Ina-ina Kec. Pagaran (DAK Tambahan))	DI. Lumban Ina-ina Kec. Pagaran DAK Tambahan	4.500	Dinas PUTR
379	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Tambok Bolon Kec. Pagaran (DAK Tambahan))	DI. Tambok Bolon Kec. Pagaran DAK Tambahan	7.680	Dinas PUTR
380	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Pagaran Ginjang Kec. Pagaran (DAK Tambahan))	DI. Pagaran Ginjang Kec. Pagaran DAK Tambahan	6.480	Dinas PUTR
381	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Lumban Pea Dolok Kec. Siborongborong (DAK Tan	DI. Lumban Pea Dolok Kec. Siborongborong DAK Tambahan	3.900	Dinas PUTR
382	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Lobu Dusun Pangkirapan Kec. Siborongborong (DA	DI. Lobu Dusun Pangkirapan Kec. Siborongborong DAK Tambahan	4.680	Dinas PUTR
383	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sigumbang Kec. Siborongborong (DAK Tambahan))	DI. Sigumbang Kec. Siborongborong DAK Tambahan	4.920	Dinas PUTR
384	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sijaba Kec. Siborongborong (DAK Tambahan))	DI. Sijaba Kec. Siborongborong DAK Tambahan	5.550	Dinas PUTR
385	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Pananggele Kec. Siborongborong (DAK Tambahan)	DI. Pananggele Kec. Siborongborong DAK Tambahan	5.820	Dinas PUTR
386	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sigalingging / Pealangge Kec. Siborongborong (DA	DI. Sigalingging / Pealangge Kec. Siborongborong DAK Tambahan	5.430	Dinas PUTR
387	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Silait-lait Kec. Siborongborong (DAK Tambahan))	DI. Silait-lait Kec. Siborongborong DAK Tambahan	6.000	Dinas PUTR
388	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Pangambatan Kec. Siborongborong (DAK Tambah	DI. Pangambatan Kec. Siborongborong DAK Tambahan	4.830	Dinas PUTR
389	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI.Saba Lobu Kec. Parmonangan (DAK Tambahan))	DI.Saba Lobu Kec. Parmonangan DAK Tambahan	5.790	Dinas PUTR
390	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI.Silando Kec. Muara (DAK Tambahan))	DI.Silando Kec. Muara DAK Tambahan	4.860	Dinas PUTR
391	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI.Sosor Sihilap Kec. Muara (DAK Tambahan))	DI.Sosor Sihilap Kec. Muara DAK Tambahan	4.920	Dinas PUTR
392	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Silaput/Sitanggor Kec. Muara (DAK Tambahan))	DI. Silaput/Sitanggor Kec. Muara DAK Tambahan	2.880	Dinas PUTR
393	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI.Suppol Kec. Muara (DAK Tambahan))	DI.Suppol Kec. Muara DAK Tambahan	6.240	Dinas PUTR
394	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI.Hutaginjang Kec. Muara (DAK Tambahan))	DI.Hutaginjang Kec. Muara DAK Tambahan	1.560	Dinas PUTR
395	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Tambok Nabegu Kec. Sipoholon (DAK Tambahan))	DI. Tambok Nabegu Kec. Sipoholon DAK Tambahan	3.424	Dinas PUTR
396	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Tambok Nabegu Kec Sipoholon (DAK Tambahan))	DI Tambok Nabegu Kec Sipoholon DAK Tambahan	156	Dinas PUTR
397	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Gonting Desa Janji Matogu Kec. Pahae Julu (DAK T	DI. Gonting Desa Janji Matogu Kec. Pahae Julu DAK Tambahan	3.440	Dinas PUTR
398	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Gonting Desa Janji Matogu Kec Pahae Julu (DAK Tan	DI Gonting Desa Janji Matogu Kec Pahae Julu DAK Tambahan	450	Dinas PUTR
399	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Burburan Kec. Adiankoting (DAK Tambahan))	DI. Aek Burburan Kec. Adiankoting DAK Tambahan	150	Dinas PUTR
400	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Aek Burburan Kec Adiankoting (DAK Tambahan))	DI Aek Burburan Kec Adiankoting DAK Tambahan	150	Dinas PUTR
401	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Pansur Batu Kec. Adiankoting (DAK Tambahan))	DI. Pansur Batu Kec. Adiankoting DAK Tambahan	735	Dinas PUTR
402	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Pansur Batu Kec Adiankoting (DAK Tambahan))	DI Pansur Batu Kec Adiankoting DAK Tambahan	225	Dinas PUTR
403	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Pokkahan Kec. Pagaran (DAK Tambahan))	DI. Pokkahan Kec. Pagaran DAK Tambahan	3.088	Dinas PUTR
404	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Pokkahan Kec Pagaran (DAK Tambahan))	DI Pokkahan Kec Pagaran DAK Tambahan	150	Dinas PUTR
405	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aritonang Kec. Muara (DAK Tambahan))	DI. Aritonang Kec. Muara DAK Tambahan	1.520	Dinas PUTR
406	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Aritonang Kec Muara (DAK Tambahan))	DI Aritonang Kec Muara DAK Tambahan	360	Dinas PUTR
407	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Rehab Irigasi Sigotu-gotu Desa Sisordak Kec Parmonan	Rehab Irigasi Sigotu-gotu Desa Sisordak Kec Parmonangan	90	Dinas PUTR
408	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sisordak Kec. Parmonangan	DI. Sisordak Kec. Parmonangan	9.000	Dinas PUTR
409	Tanah SMP NEGERI 3 PAHAE JULU	Sibaganding	2.640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
410	Tanah SD NEGERI 178314 SIBORONGBORONG	JL. SENTOSA SIBORONGBORONG	3.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
411	Tanah SD NEGERI 173280 LOBU SIREGAR	jln sipahutar , Kecamatan Siborongborong	3.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
412	Tanah SD NEGERI 173262 LUMBAN GARAGA	DESA LUMBAN GARAGA KECAMATAN PAHAE JULU	2.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
413	Tanah SD NEGERI 173263 SIMANAMPANG	DESA SIMANAMPANG Kec. Pahae julu	2.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
414	Tanah SD NEGERI 173255 SIMARDANGIANG	simardangiang	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
415	Tanah SD NEGERI 173239 PANGALOAN	DESA SIOPAT BAHAL	2.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
416	Tanah SD NEGERI 173250 MUARA TOLANG	MUARATOLANG	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
417	Tanah SD NEGERI 173252 PARDOMUAN	Pardomuan	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
418	Tanah SD NEGERI 173216 GAROGA JULU	SD NEGERI 173216 Garoga Julu	5.670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
419	Tanah SD NEGERI 173225 GONTING HOPO	SD NEGERI 173225	1.240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
420	Tanah SD NEGERI 173233 GAROGA	SD NEGERI 173233 GAroga	1.240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
421	Tanah SD NEGERI 173228 LOBUTONGA	Lobu Tonga	1.450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
422	Tanah SD NEGERI 173229 PARINSORAN	Parinsoran	5.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
423	Tanah SD NEGERI 173218 PEARAJA	Pearaja	2.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
424	Tanah SD NEGERI 173232 TAPUS GODANG	tAPUS gODANG	1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
425	Tanah SD NEGERI 176333 JANJI NAULI	Janji Nauli	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
426	Tanah SD NEGERI 178210 PARDOMUAN	Parsaoran	1.950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
427	Tanah SD NEGERI 173245 SIUNGGAS JULU	Siunggas Julu, Desa Sitolubahal, Kecamatan Purbatua	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kategori Aset Belum Bersertifikat K2 (Not Clean but Clear, data yuridis atau kelengkapan fisik tidak lengkap namun tidak ada sengketa/berperkara)				
1	Tanah Kaveling	rumah dinas	544	DINAS PERTANIAN
2	Tanah Kaveling	rumah dinas	704	DINAS PERTANIAN
3	Tanah Kaveling	rumah dinas	340	DINAS PERTANIAN
4	Tanah Kaveling	rumah tinggal	827	DINAS PERTANIAN
5	Tanah Kaveling		760	DINAS PERTANIAN
6	Tanah di Bawah Jalan	Kelurahan Situmeang Habinsaran	404	KANTOR CAMAT SIPOHOLON
7	Tanah Bangunan Rumah Negara	Jl. Merdeka No. 1	3.000	KANTOR CAMAT PARMONANGAN
8	Tanah Bangunan Gudang	Jl. Merdeka No. 1	425	KANTOR CAMAT PARMONANGAN
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Merdeka No. 1	840	KANTOR CAMAT PARMONANGAN
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Dolok Martimbang Kel. Hutatoruan X	924	KANTOR CAMAT TARUTUNG
11	Tanah Bangunan Rumah Negara tanpa Golongan	Jln. Salib Kasih Simorangkir Siatas Barita	380	KANTOR CAMAT SIATAS BARITA
12	Tanah Kaveling/Perumahan Dinas Camat	Jln. Salib Kasih Simorangkir Siatas Barita	483	KANTOR CAMAT SIATAS BARITA
13	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pekan Onan Raja Kecamatan Parmonangan (Pembuatan Parit di Pekan Onan Raja Kecamatan Parmonangan)	63	Dinas Perkim
14	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	PEKAN TARUTUNG KEC. TARUTUNG (Drainase PEKAN TARUTUNG KEC. TARUTUNG)	496	Dinas Perkim
15	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pekan Dolok (Drainase Pekan Dolok)	484	Dinas Perkim
16	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Silangit Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Parit di Lapangan Terbang Silangit Kecamatan Siborongborong)	458	Dinas Perkim
17	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	JL Raja Saul Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase di JL Raja Saul Kecamatan Tarutung)	102	Dinas Perkim
18	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pasar Simangumban Kecamatan Simangumban (Pembangunan Drainase (Parit) di Pasar Simangumban Kecamatan Simangumban)	120	Dinas Perkim
19	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Pusuk I Parlilitan Kecamatan Parmonangan (Pembangunan Saluran Drainase di Desa Pusuk I Parlilitan Kecamatan Parmonangan)	86	Dinas Perkim
20	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pasar Sirongit Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Drainase di Pasar Sirongit Kecamatan Sipoholon)	73	Dinas Perkim
21	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Garoga (Pembangunan Drainase di Garoga Kecamatan Garoga)	118	Dinas Perkim
22	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pendopo Tanah Lapang Bawah Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase di Pendopo Tanah Lapang Bawah Kecamatan Tarutung)	63	Dinas Perkim
23	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	JL. Sisingamangaraja Kecamatan Tarutung (Pembuatan Drainase di JL. Sisingamangaraja Kecamatan Tarutung)	63	Dinas Perkim
24	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	JL. Pahae Kecamatan Siatas Barita (Pembangunan Drainase di JL. Pahae Kecamatan Siatas Barita)	131	Dinas Perkim
25	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Simpang Empat-Simpang CPM Jl.Suprapto Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di Simpang Empat-Simpang CPM Jl.Suprapto Kecamatan Tarutung)	60	Dinas Perkim
26	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	S.DIS Sitompul Kecamatan Tarutung (Pembuatan Drainase di Lingkungan S.DIS Sitompul Kecamatan Tarutung)	120	Dinas Perkim
27	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Simpang Empat JL.S. Raja - JL.Pattimura Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di Simpang Empat JL.S. Raja - JL.Pattimura Kecamatan Tarutung)	234	Dinas Perkim
28	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Simpang Empat JL.S. Raja - JL.DI. Panjaitan Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di Simpang Empat JL.S. Raja - JL.DI. Panjaitan Kecamatan Tarutung)	270	Dinas Perkim
29	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	JL.Sisingamangaraja Kecamatan Tarutung (Pembuatan Drainase di JL.Sisingamangaraja Kecamatan Tarutung)	45	Dinas Perkim
30	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kelurahan Hutatoruan VI Desa Simamora Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di Kelurahan Hutatoruan VI Desa Simamora Kecamatan Tarutung)	374	Dinas Perkim
31	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	DR. TB Simatupang Kecamatan Tarutung (Pembuatan Drainase di DR. TB Simatupang Kecamatan Tarutung)	84	Dinas Perkim
32	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Simpang Empat JL.S. Raja - JL.Pattimura ke HKBP Tarutung Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di Simpang Empat JL.S. Raja - JL.Pattimura ke HKBP Tarutung Kecamatan Tarutung)	173	Dinas Perkim
33	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Simpang SMP I Tarutung Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di Simpang SMP I Tarutung Kecamatan Tarutung)	162	Dinas Perkim
34	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	JL. Raja Johannes Hutabarat Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di JL. Raja Johannes Hutabarat Kecamatan Tarutung)	126	Dinas Perkim
35	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kompleks Stadion Tarutung (Pembuatan Drainase di Kompleks Stadion Tarutung)	127	Dinas Perkim
36	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kota Tarutung Kecamatan Tarutung (Pembuatan Drainase di Kota Tarutung Kecamatan Tarutung)	237	Dinas Perkim
37	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pekan Muara Kecamatan Muara (Pembuatan Drainase di Pekan Muara Kecamatan Muara)	158	Dinas Perkim
38	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	JL.Putri Lopian Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di JL.Putri Lopian Kecamatan Tarutung)	101	Dinas Perkim
39	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Butar Kecamatan Pagaran (Pembuatan Drainase di Desa Butar Kecamatan Pagaran)	127	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
40	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Lumban Siantar Sipoholon Kecamatan Sipoholon (Pembuatan Saluran Drainase di Lumban Siantar Sipoholon Kecamatan Sipoholon)	58	Dinas Perkim
41	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pasar Hewan Kecamatan Siborongborong (Pembuatan Saluran Drainase (Parit) di Pasar Hewan Kecamatan Siborongborong)	126	Dinas Perkim
42	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon (Pembuatan Saluran Drainase di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon)	65	Dinas Perkim
43	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung (Pembuatan Drainase di Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung)	117	Dinas Perkim
44	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung (Pembuatan Drainase di Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung)	84	Dinas Perkim
45	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	JL.Siborongborong - Butar Kecamatan Siborongborong (Pembuatan Saluran Drainase di JL.Siborongborong - Butar Kecamatan Siborongborong)	221	Dinas Perkim
46	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Ranggitgit Kecamatan Parmonangan (Pembuatan Saluran Drainase di Desa Ranggitgit Kecamatan Parmonangan)	92	Dinas Perkim
47	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung (Pembuatan Drainase di Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung)	84	Dinas Perkim
48	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di Desa Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung)	158	Dinas Perkim
49	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Setia Kecamatan Pahae Jae (Pembuatan Drainase di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae)	82	Dinas Perkim
50	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Hutauruk Kecamatan Tarutung (Pembuatan Drainase di Desa Hutauruk Kecamatan Tarutung)	120	Dinas Perkim
51	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parsosoran (Dusun Parsosoran Parmanuhan)Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Desa Parsosoran (Dusun Parsosoran Parmanuhan)Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara)	625	Dinas Perkim
52	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Komplek SM. Raja Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Komplek SM. Raja Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara)	417	Dinas Perkim
53	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kompleks SDN 173100 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Kompleks SDN 173100 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)	479	Dinas Perkim
54	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)	499	Dinas Perkim
55	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutagurgur Partangga Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Hutagurgur Partangga Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara)	724	Dinas Perkim
56	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Simpang Jalan Negara HKBP Lumban Baringin Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di Simpang Jalan Negara HKBP Lumban Baringin Kecamatan Sipoholon)	381	Dinas Perkim
57	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kompleks Pasar Tarutung di Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase Kompleks Pasar Tarutung di Kecamatan Tarutung)	129	Dinas Perkim
58	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Siborongborong (Pembuatan Saluran Drainase di Kecamatan Siborongborong)	249	Dinas Perkim
59	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kota Sipahutar Kecamatan Sipahutar (Pembuatan Saluran Drainase di Kota Sipahutar Kecamatan Sipahutar)	241	Dinas Perkim
60	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di Kecamatan Tarutung)	104	Dinas Perkim
61	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Siborongborong (Pembuatan Saluran Drainase di Kecamatan Siborongborong)	99	Dinas Perkim
62	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Pangaribuan (Pembuatan Saluran Drainase di Kecamatan Pangaribuan)	99	Dinas Perkim
63	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Parmonangan (Pembuatan Saluran Drainase di Kecamatan Parmonangan)	106	Dinas Perkim
64	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Pagaran (Pembuatan Saluran Drainase di Kecamatan Pagaran)	96	Dinas Perkim
65	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Purbatua (Pembuatan Saluran Drainase di Kecamatan Purbatua)	94	Dinas Perkim
66	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Perumahan Kejaksaan Tarutung KecamatanTarutung (Pembuatan Saluran Drainase di Perumahan Kejaksaan Tarutung KecamatanTarutung)	42	Dinas Perkim
67	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	SMA I Garoga Kecamatan Garoga (Pembuatan Saluran Drainase di SMA I Garoga Kecamatan Garoga)	108	Dinas Perkim
68	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Garoga Kecamatan Garoga (Pembuatan Saluran Drainase di Garoga Kecamatan Garoga)	113	Dinas Perkim
69	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	SMPN 3 Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan SMPN 3 Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara)	496	Dinas Perkim
70	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simatupang Kecamatan Muara (Jalan Lingkungan di Desa Simatupang Kecamatan Muara)	708	Dinas Perkim
71	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aritonang Kecamatan Muara (Jalan Lingkungan di Desa Aritonang Kecamatan Muara)	708	Dinas Perkim
72	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)	527	Dinas Perkim
73	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita)	561	Dinas Perkim
74	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lumban Tongatonga Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan di Lumban Tongatonga Kecamatan Siborongborong)	504	Dinas Perkim
75	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	JL.Balige Lorong 3 Desa Hutauruk Sipoholon Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di JL.Balige Lorong 3 Desa Hutauruk Sipoholon Kecamatan Sipoholon)	460	Dinas Perkim
76	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)	940	Dinas Perkim
77	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung)	470	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
78	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju Kantor Camat Adiankoting Kecamatan Adiankoting (Jalan Lingkungan Menuju Kantor Camat Adiankoting Kecamatan Adiankoting)	316	Dinas Perkim
79	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagaran Lambung Kecamatan Adiankoting (Jalan Lingkungan di Desa Pagaran Lambung Kecamatan Adiankoting)	600	Dinas Perkim
80	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pancurnapitu Kecamatan Adiankoting (Jalan Lingkungan di Desa Pancurnapitu Kecamatan Adiankoting)	600	Dinas Perkim
81	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting (Jalan Lingkungan di Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting)	600	Dinas Perkim
82	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sibargot Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Sibargot Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara)	522	Dinas Perkim
83	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju Mesjid AL IKLAS Kecamatan Garoga (Jalan Lingkungan Menuju Mesjid AL IKLAS Kecamatan Garoga)	522	Dinas Perkim
84	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga (Jalan Lingkungan di Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga)	275	Dinas Perkim
85	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju Desa Ramba Siala Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga (Jalan Lingkungan Menuju Desa Ramba Siala Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga)	549	Dinas Perkim
86	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Untemungkur Kecamatan Muara (Jalan Lingkungan di Desa Untemungkur Kecamatan Muara)	655	Dinas Perkim
87	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Silali Toruan Kecamatan Muara (Jalan Lingkungan di Desa Silali Toruan Kecamatan Muara)	690	Dinas Perkim
88	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Batu Binumbun Kecamatan Muara (Jalan Lingkungan di Desa Batu Binumbun Kecamatan Muara)	655	Dinas Perkim
89	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Silali Toruan Menuju Kecamatan Muara (Jalan Lingkungan di Desa Silali Toruan Menuju Kecamatan Muara)	655	Dinas Perkim
90	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran (Jalan Lingkungan di Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran)	677	Dinas Perkim
91	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Silintong Kecamatan Pagaran (Jalan Lingkungan di Desa Lumban Silintong Kecamatan Pagaran)	677	Dinas Perkim
92	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hasibuan Kecamatan Pagaran (Jalan Lingkungan di Desa Hasibuan Kecamatan Pagaran)	677	Dinas Perkim
93	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parsaoran Samosir (Dusun Siburian) Kecamatan Pahae Jae (Jalan Lingkungan di Desa Parsaoran Samosir (Dusun Siburian) Kecamatan Pahae Jae)	633	Dinas Perkim
94	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae (Jalan Lingkungan di Desa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae)	633	Dinas Perkim
95	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju SD Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Menuju SD Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara)	364	Dinas Perkim
96	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu (Jalan Lingkungan di Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu)	494	Dinas Perkim
97	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu (Jalan Lingkungan di Desa Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu)	494	Dinas Perkim
98	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)	1.157	Dinas Perkim
99	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju SMA Negeri I Pangaribuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Menuju SMA Negeri I Pangaribuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)	347	Dinas Perkim
100	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan)	550	Dinas Perkim
101	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan)	550	Dinas Perkim
102	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sampagul (Dusun Bungus Hutaraja)Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Desa Sampagul (Dusun Bungus Hutaraja)Kecamatan Pangaribuan)	550	Dinas Perkim
103	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Batu Manumpak Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Desa Batu Manumpak Kecamatan Pangaribuan)	550	Dinas Perkim
104	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagaran Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Desa Pagaran Kecamatan Pangaribuan)	550	Dinas Perkim
105	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Lumban Simamora dan Dusun Hutanagodang Parratusan Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Dusun Lumban Simamora dan Dusun Hutanagodang Parratusan Kecamatan Pangaribuan)	1.100	Dinas Perkim
106	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Pearaja Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Dusun Pearaja Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan)	1.100	Dinas Perkim
107	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sidagal Menuju SMP 6 Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Desa Sidagal Menuju SMP 6 Kecamatan Pangaribuan)	347	Dinas Perkim
108	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutajulu Parmonangan Kecamatan Parmonangan (Jalan Lingkungan di Desa Hutajulu Parmonangan Kecamatan Parmonangan)	699	Dinas Perkim
109	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan (Jalan Lingkungan di Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan)	699	Dinas Perkim
110	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli utara (Jalan Lingkungan di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli utara)	602	Dinas Perkim
111	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Bona Ni Dolok Kecamatan Purbatua (Jalan Lingkungan di Desa Bona Ni Dolok Kecamatan Purbatua)	572	Dinas Perkim
112	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Purbatua Kecamatan Purbatua (Jalan Lingkungan di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua)	572	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
113	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitolu Bahal Kecamatan Purbatua (Jalan Lingkungan di Desa Sitolu Bahal Kecamatan Purbatua)	572	Dinas Perkim
114	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Selamat Kecamatan Purbatua (Jalan Lingkungan di Desa Selamat Kecamatan Purbatua)	572	Dinas Perkim
115	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumbanratus Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Desa Lumbanratus Kecamatan Siatas Barita)	699	Dinas Perkim
116	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju SD 174567 dan SD 173113 Pancurnapitu Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan Menuju SD 174567 dan SD 173113 Pancurnapitu Kecamatan Siatas Barita)	551	Dinas Perkim
117	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita)	551	Dinas Perkim
118	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	menuju SD Gereja HKBP dan SD 173283 Sianjur Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong kabupaten Tapanuli utara (Jalan Lingkungan menuju SD Gereja HKBP dan SD 173283 Sianjur Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong kabupaten Tapanuli utara)	1.062	Dinas Perkim
119	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	DesaParik Sabungan Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan di DesaParik Sabungan Kecamatan Siborongborong)	673	Dinas Perkim
120	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Makmur Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan di Jalan Makmur Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong)	673	Dinas Perkim
121	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Silosung Kecamatan Simangumban (Jalan Lingkungan di Desa Silosung Kecamatan Simangumban)	592	Dinas Perkim
122	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobu Sihim Kecamatan Simangumban (Jalan Lingkungan di Desa Lobu Sihim Kecamatan Simangumban)	592	Dinas Perkim
123	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Desa Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar kabupaten Tapanuli Utara)	711	Dinas Perkim
124	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
125	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Nauli I Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Aek Nauli I Kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
126	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
127	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Tapian Nauli III (Dusun Banjar Dolok) Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Tapian Nauli III (Dusun Banjar Dolok) Kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
128	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siabal-abal I Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Siabal-abal I Kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
129	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
130	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lumban Purbatua - Lumban Gereja Desa Aek Nauli III Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Lumban Purbatua - Lumban Gereja Desa Aek Nauli III Kecamatan Sipahutar)	1.351	Dinas Perkim
131	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Hutatinggi-SD Lumban Hariara Desa Aek Nauli III Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Hutatinggi-SD Lumban Hariara Desa Aek Nauli III Kecamatan Sipahutar)	1.351	Dinas Perkim
132	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon)	699	Dinas Perkim
133	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutaraja Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di Desa Hutaraja Kecamatan Sipoholon)	699	Dinas Perkim
134	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipoholon)	699	Dinas Perkim
135	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon)	699	Dinas Perkim
136	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung)	585	Dinas Perkim
137	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung)	585	Dinas Perkim
138	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung)	585	Dinas Perkim
139	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung)	585	Dinas Perkim
140	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutabagot (Desa Simamora) Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Desa Hutabagot (Desa Simamora) Kecamatan Tarutung)	585	Dinas Perkim
141	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Menuju Sosor Padang di Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung)	585	Dinas Perkim
142	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju Sait Nihuta (Huta Pancur) Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Menuju Sait Nihuta (Huta Pancur) Kecamatan Tarutung)	585	Dinas Perkim
143	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung)	585	Dinas Perkim
144	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Raja Johannes Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Jalan Raja Johannes Kecamatan Tarutung)	246	Dinas Perkim
145	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung)	923	Dinas Perkim
146	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan DR T.B. Simatupang Gang Sahabat Baik Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Jalan DR T.B. Simatupang Gang Sahabat Baik Kecamatan Tarutung)	923	Dinas Perkim
147	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	samping Kantor Bappeda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (Pembuatan trotoar di samping Kantor Bappeda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)	144	Dinas Perkim
148	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	sekitar Pohon Durian di Jalan S.Parman Tarutung di Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase di sekitar Pohon Durian di Jalan S.Parman Tarutung di Kecamatan Tarutung)	238	Dinas Perkim
149	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase Tarutung di Kecamatan Tarutung)	471	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
150	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase Tarutung di Kecamatan Tarutung)	270	Dinas Perkim
151	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Tarutung (Pembuatan Saluran Drainase Tarutung di Kecamatan Tarutung)	270	Dinas Perkim
152	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Komplek Tanah Lapang Garoga Kecamatan Garoga (Pembuatan Saluran Drainase di Komplek Tanah Lapang Garoga Kecamatan Garoga)	257	Dinas Perkim
153	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Menuju Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung)	597	Dinas Perkim
154	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jln. Amir Hamzah Tobing Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Jln. Amir Hamzah Tobing Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung Kecamatan Tarutung)	896	Dinas Perkim
155	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	dari Simpang Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Tapanuli Utara ke Gereja HKBP Kota Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan dari Simpang Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Tapanuli Utara ke Gereja HKBP Kota Kecamatan Tarutung)	358	Dinas Perkim
156	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Batu Lamak Desa Parbubu I Kec. Tarutung (Jalan Lingkungan Batu Lamak Desa Parbubu I Kec. Tarutung)	716	Dinas Perkim
157	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak dan Jembatan Penyeberangan Kelurahan XI (sebelah gedung serbaguna) Kec. Tarutung (Jalan Setapak dan Jembatan Penyeberangan di Kelurahan XI (sebelah gedung serbaguna) Kec. Tarutung)	239	Dinas Perkim
158	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Siarangarang Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Siarangarang Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)	567	Dinas Perkim
159	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Gang Saroha II Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung (Jalan Setapak di Gang Saroha II Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung)	299	Dinas Perkim
160	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	dan Pembuatan Plat Gorong-gorong Kompleks Masjid Lorong IV Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan dan Pembuatan Plat Gorong-gorong di Kompleks Masjid Lorong IV Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung)	299	Dinas Perkim
161	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Tornauli menuju Lumban Tonga Tonga Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di Dusun Tornauli menuju Lumban Tonga Tonga Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon)	714	Dinas Perkim
162	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	desa Pagar Batu Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di desa Pagar Batu Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara)	679	Dinas Perkim
163	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sabungan Nihuta IV (Lobu Nauli) Kec. Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Sabungan Nihuta IV (Lobu Nauli) Kec. Sipahutar)	730	Dinas Perkim
164	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	menuju SMA N 1 Simangumban Kecamatan Simangumban (Jalan Lingkungan menuju SMA N 1 Simangumban di Kecamatan Simangumban)	630	Dinas Perkim
165	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju HKBP Simangumban Kec. Simangumban (Jalan Lingkungan Menuju HKBP Simangumban Kec. Simangumban)	630	Dinas Perkim
166	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	dari Dusun Hutanagodang menuju gereja GKPI Hutagalung Kec. Siatas Barita (Jalan Lingkungan dari Dusun Hutanagodang menuju gereja GKPI Hutagalung Kec. Siatas Barita)	1.014	Dinas Perkim
167	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Endah Portibi Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Desa Endah Portibi Kecamatan Siatas Barita)	725	Dinas Perkim
168	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Talpe I Menuju Dusun Lobu Harambir Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Talpe I Menuju Dusun Lobu Harambir Kecamatan Siatas Barita)	870	Dinas Perkim
169	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Siagian Julu Kecamatan Siatas Barita (Jalan Setapak Siagian Julu Kecamatan Siatas Barita)	507	Dinas Perkim
170	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitompul Kec. Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Desa Sitompul Kec. Siatas Barita)	725	Dinas Perkim
171	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Sitolu Bahal Kecamatan Purba Tua (Jalan Setapak di Desa Sitolu Bahal Kecamatan Purba Tua)	417	Dinas Perkim
172	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Sigompulon Kec. Pahae Julu (Jalan Setapak di Desa Sigompulon Kec. Pahae Julu)	547	Dinas Perkim
173	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lumban Tonga Desa Lumban Tonga Kec. Pahae Julu (Jalan Lingkungan Lumban Tonga Desa Lumban Tonga Kec. Pahae Julu)	730	Dinas Perkim
174	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Nahornop Marsada menuju Gereja HKI Kec. Pahae Jae (Jalan Lingkungan di Desa Nahornop Marsada menuju Gereja HKI Kec. Pahae Jae)	581	Dinas Perkim
175	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pealitta Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Desa Pealitta Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara)	1.124	Dinas Perkim
176	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara)	953	Dinas Perkim
177	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara)	887	Dinas Perkim
178	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Dolok Martumbur Kec. Muara (Jalan Lingkungan di Desa Dolok Martumbur Kec. Muara)	887	Dinas Perkim
179	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Huta Lontung Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Huta Lontung Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara)	887	Dinas Perkim
180	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara)	745	Dinas Perkim
181	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Poros Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Poros Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara)	745	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
182	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sidagal Kec. Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Sidagal Kec. Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara)	532	Dinas Perkim
183	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara)	532	Dinas Perkim
184	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Silaitlait Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Silaitlait Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara)	745	Dinas Perkim
185	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (Jalan Lingkungan di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara)	745	Dinas Perkim
186	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	menuju Gereja HKBP Jetro Desa Paniaran Kec. Siborongborong (Jalan Lingkungan menuju Gereja HKBP Jetro di Desa Paniaran Kec. Siborongborong)	308	Dinas Perkim
187	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	SMP N 4 Tarutung (Penataan Drainase Lingkungan di SMP N 4 Tarutung)	253	Dinas Perkim
188	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Sepanjang Lingkungan SMA Swasta HKBP I Tarutung Kecamatan Tarutung (Pembenahan Saluran Drainase di Sepanjang Lingkungan SMA Swasta HKBP I Tarutung Kecamatan Tarutung)	410	Dinas Perkim
189	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Dusun Gunung Tua Desa Pardamean Nainggolan Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Drainase di Dusun Gunung Tua Desa Pardamean Nainggolan Kecamatan Pahae Jae)	138	Dinas Perkim
190	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Pagaran Lambung Kecamatan Adian Koting (Jalan Setapak di Desa Pagaran Lambung Kecamatan Adian Koting)	659	Dinas Perkim
191	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Parsosoran - Hadataran Garoga (Jalan Lingkungan di Parsosoran - Hadataran Garoga)	658	Dinas Perkim
192	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Sibaganding Kecamatan Garoga (Jalan Lingkungan di Sibaganding Kecamatan Garoga)	658	Dinas Perkim
193	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	menuju Puskesmas Muara Kecamatan Muara (Jalan Lingkungan menuju Puskesmas Muara Kecamatan Muara)	800	Dinas Perkim
194	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aritonang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU) (Jalan Lingkungan Desa Aritonang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU))	950	Dinas Perkim
195	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Pea Simbara Dusun Silaban Aritonang Desa Banua Luhu Kec. Pagaran (Jalan Lingkungan Pea Simbara Dusun Silaban Aritonang Desa Banua Luhu Kec. Pagaran)	1.154	Dinas Perkim
196	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Tapian Nauli dan Dusun Lumbanbagasan Desa Sipultak Kec. Pagaran (Jalan Lingkungan di Dusun Tapian Nauli dan Dusun Lumbanbagasan Desa Sipultak Kec. Pagaran)	1.923	Dinas Perkim
197	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Simamora Hasibuan Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU) (Jalan Lingkungan Dusun Simamora Hasibuan Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU))	1.381	Dinas Perkim
198	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Bonani Onan Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU) (Jalan Lingkungan di Desa Bonani Onan Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU))	1.279	Dinas Perkim
199	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU) (Jalan Lingkungan di Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU))	1.297	Dinas Perkim
200	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Lobu Talpe Kecamatan Pahae Jae (Jalan Setapak di Desa Lobu Talpe Kecamatan Pahae Jae)	1.013	Dinas Perkim
201	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Aek Natio Parlombuan Kec. Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Dusun Aek Natio Parlombuan Kec. Pangaribuan)	1.000	Dinas Perkim
202	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	dan Drainase Dusun Lumban Tanjung Desa Pakpahan Kec. Pangaribuan (Jalan Lingkungan dan Drainase di Dusun Lumban Tanjung Desa Pakpahan Kec. Pangaribuan)	667	Dinas Perkim
203	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Hutaraja Kecamatan Pangaribuan (Jalan Setapak di Desa Hutaraja Kecamatan Pangaribuan)	667	Dinas Perkim
204	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Najumambe Kecamatan Pangaribuan (Jalan Setapak di Desa Najumambe Kecamatan Pangaribuan)	667	Dinas Perkim
205	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Pansurnatolu Kecamatan Pangaribuan (Jalan Setapak Pansurnatolu Kecamatan Pangaribuan)	667	Dinas Perkim
206	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Silantom Jae Kecamatan Pangaribuan (Jalan Setapak di Desa Silantom Jae Kecamatan Pangaribuan)	667	Dinas Perkim
207	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Lobu Sitangging desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan Dusun Lobu Sitangging desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan)	360	Dinas Perkim
208	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Huta Nagodang Kecamatan Purba Tua (Jalan Lingkungan di Desa Huta Nagodang Kecamatan Purba Tua)	625	Dinas Perkim
209	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Mahansan Kecamatan Purbatua (Jalan Lingkungan di Dusun Mahansan Kecamatan Purbatua)	625	Dinas Perkim
210	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Aek Tonga Kecamatan Purbatua (Jalan Lingkungan Aek Tonga Kecamatan Purbatua)	625	Dinas Perkim
211	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Janjimaria Desa Bonan Dolok Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU) (Jalan Lingkungan Dusun Janjimaria Desa Bonan Dolok Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU))	1.188	Dinas Perkim
212	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan setapak Desa Lumban Siagian kecamatan Siatas Barita (Jalan setapak di Desa Lumban Siagian kecamatan Siatas Barita)	725	Dinas Perkim
213	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita (Jalan Setapak di Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita)	725	Dinas Perkim
214	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Tuan Napitu Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Dusun Tuan Napitu Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita)	580	Dinas Perkim
215	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita)	906	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
216	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutagalung Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Desa Hutagalung Kecamatan Siatas Barita)	870	Dinas Perkim
217	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Tagahambing Kec. Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Dusun Tagahambing Kec. Siatas Barita)	1.449	Dinas Perkim
218	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborong-borong (Jalan Lingkungan di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborong-borong)	1.050	Dinas Perkim
219	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Bahal Batu I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanulu Utara (BKPSU) (Jalan Lingkungan di Desa Bahal Batu I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanulu Utara (BKPSU))	1.007	Dinas Perkim
220	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU) (Jalan Lingkungan di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU))	1.078	Dinas Perkim
221	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU) (Jalan Lingkungan di Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU))	1.078	Dinas Perkim
222	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak menuju SMP Negeri Simangumban Kecamatan Simangumban (Jalan Setapak menuju SMP Negeri Simangumban Kecamatan Simangumban)	600	Dinas Perkim
223	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar)	711	Dinas Perkim
224	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon)	725	Dinas Perkim
225	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagar Batu (Silangkitang) Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di Desa Pagar Batu (Silangkitang) Kecamatan Sipoholon)	543	Dinas Perkim
226	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon (Jalan Setapak di Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon)	435	Dinas Perkim
227	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Jrs. Seminarium-Simatupang Kec. Sipoholon (Jalan Setapak Jrs. Seminarium-Simatupang Kec. Sipoholon)	543	Dinas Perkim
228	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Sirajaoloan Kecamatan Tarutung (Jalan Setapak di Desa Sirajaoloan Kecamatan Tarutung)	323	Dinas Perkim
229	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan setapak Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung (Jalan setapak di Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung)	645	Dinas Perkim
230	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Aek Nasia Kecamatan Tarutung (Jalan Setapak di Desa Aek Nasia Kecamatan Tarutung)	548	Dinas Perkim
231	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sihujur Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Desa Sihujur Kecamatan Tarutung)	774	Dinas Perkim
232	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kompleks Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Kompleks Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung)	903	Dinas Perkim
233	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Lingkungtan Desa Hutauruk Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungtan di Desa Hutauruk Kecamatan Tarutung)	548	Dinas Perkim
234	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Pea Tolong Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Dusun Pea Tolong Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung)	710	Dinas Perkim
235	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sisunggulon Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Desa Sisunggulon Kecamatan Tarutung)	774	Dinas Perkim
236	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lorong 2B Kompleks Stadion Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Lorong 2B Kompleks Stadion Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung)	452	Dinas Perkim
237	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU) (Jalan Lingkungan di Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (BKPSU))	620	Dinas Perkim
238	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sisunggulon Kecamatan Tarutung (BKPSU) (Jalan Lingkungan di Desa Sisunggulon Kecamatan Tarutung (BKPSU))	645	Dinas Perkim
239	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	JL. TD Pardede Kecamatan Tarutung (Gorong-gorong dan Drainase di JL. TD Pardede Kecamatan Tarutung)	82	Dinas Perkim
240	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Sabungan Nihuta IV Kecamatan Sipahutar (Sanitasi di desa Sabungan Nihuta IV Kecamatan Sipahutar)	158	Dinas Perkim
241	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hapoltahan Kecamatan Hutabarat (Drainase di Desa Hapoltahan Kecamatan Hutabarat)	129	Dinas Perkim
242	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kota Tarutung Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase di Kota Tarutung Kecamatan Tarutung)	279	Dinas Perkim
243	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak menuju Holbung Desa Pansurbatu I Kecamatan Adiankoting (Jalan Setapak menuju Holbung Desa Pansurbatu I Kecamatan Adiankoting)	824	Dinas Perkim
244	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Dolok Nauli Kec, Adiankoting (Jalan Setapak di Desa Dolok Nauli Kec, Adiankoting)	824	Dinas Perkim
245	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Adiankoting (DAK) (Jalan Lingkungan di Kecamatan Adiankoting (DAK))	1.235	Dinas Perkim
246	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Padang Siandomang I Desa Padang Siandomang Kecamatan Garoga (Jalan Lingkungan di Dusun Padang Siandomang I Desa Padang Siandomang Kecamatan Garoga)	1.299	Dinas Perkim
247	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Rabat Beton Lumbanhariara Dusun I Tapian nauli Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (Jalan Rabat Beton di Lumbanhariara Dusun I Tapian nauli Desa Hutaginjang Kecamatan Muara)	667	Dinas Perkim
248	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Untemungkur Kecamatan Muara (Jalan Lingkungan di Desa Untemungkur Kecamatan Muara)	667	Dinas Perkim
249	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Lumban Pinasu Desa Baribani Aek Kec, Muara (Jalan Lingkungan di Dusun Lumban Pinasu Desa Baribani Aek Kec, Muara)	667	Dinas Perkim
250	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (DAK) (Jalan Lingkungan Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (DAK))	1.000	Dinas Perkim
251	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran (Jalan Lingkungan Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran)	698	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
252	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Pae Tikko Desa Lubis Kec, Pagaran (Jalan Lingkungan Pae Tikko Desa Lubis Kec, Pagaran)	1.047	Dinas Perkim
253	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Ina-ina Kec, Pagaran (Jalan Lingkungan Desa Lumban Ina-ina Kec, Pagaran)	1.047	Dinas Perkim
254	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simamora Hasibuan Kecamatan Pagaran (DAK) (Jalan Lingkungan Desa Simamora Hasibuan Kecamatan Pagaran (DAK))	1.116	Dinas Perkim
255	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Silintong Kecamatan Pagaran (DAK) (Jalan Lingkungan Desa Lumban Silintong Kecamatan Pagaran (DAK))	1.047	Dinas Perkim
256	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak menuju Banjar Pea Jae Kec, Pahae Jae (Jalan Setapak menuju Banjar Pea Jae Kec, Pahae Jae)	607	Dinas Perkim
257	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Sibaganding menuju SMP Negeri 3 Kec, Pahae Julu (Jalan Setapak di Desa Sibaganding menuju SMP Negeri 3 Kec, Pahae Julu)	607	Dinas Perkim
258	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sampagul Kec, Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Desa Sampagul Kec, Pangaribuan)	668	Dinas Perkim
259	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Hutaraja Kecamatan Pangaribuan (Jalan Setapak di Desa Hutaraja Kecamatan Pangaribuan)	668	Dinas Perkim
260	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	menuju Huta Sitali-tali Desa Raut Bosi Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan menuju Huta Sitali-tali Desa Raut Bosi Kecamatan Pangaribuan)	668	Dinas Perkim
261	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	menuju Huta Talpe Desa Batunadua Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan menuju Huta Talpe Desa Batunadua Kecamatan Pangaribuan)	668	Dinas Perkim
262	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sioma-oma Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Desa Sioma-oma Kecamatan Pangaribuan)	668	Dinas Perkim
263	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun IV Parsibarungan Tonga Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Dusun IV Parsibarungan Tonga Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan)	1.002	Dinas Perkim
264	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Rie Naigolgolan Desa Sibikke Kecamatan Pangaribuan (DAK) (Jalan Lingkungan Dusun Rie Naigolgolan Desa Sibikke di Kecamatan Pangaribuan (DAK))	1.002	Dinas Perkim
265	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutatinggi Kecamatan Parmonangan (Jalan Lingkungan di Desa Hutatinggi Kecamatan Parmonangan)	706	Dinas Perkim
266	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Sosor Bagot Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan (DAK) (Jalan Lingkungan di Sosor Bagot Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan (DAK))	776	Dinas Perkim
267	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Huta Tonga dan Dusun Lumban Gaol Jae Desa Pardomuan Kecamatan Purbatua (Jalan Lingkungan di Dusun Huta Tonga dan Dusun Lumban Gaol Jae Desa Pardomuan Kecamatan Purbatua)	910	Dinas Perkim
268	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Rabat Beton Dusun Lumban Habinsaran Desa Lumban Sigian Julu Kec, Siatas Barita (Jalan Rabat Beton Dusun Lumban Habinsaran Desa Lumban Sigian Julu Kec, Siatas Barita)	744	Dinas Perkim
269	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Rabat Beton Dusun III Huta Parmulaan Desa Lobu Hole Kec, Siatas Barita (Jalan Rabat Beton Dusun III Huta Parmulaan Desa Lobu Hole Kec, Siatas Barita)	744	Dinas Perkim
270	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Rabat Beton dari Simpang Gereja HKBP menuju Dusun Laguboti Desa Sitompul Kec, Siatas Barita (Jalan Rabat Beton dari Simpang Gereja HKBP menuju Dusun Laguboti Desa Sitompul Kec, Siatas Barita)	744	Dinas Perkim
271	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Rabat Beton Dusun Lumban Balian Desa Lobu Hole Kec, Siatas Barita (Jalan Rabat Beton di Dusun Lumban Balian Desa Lobu Hole Kec, Siatas Barita)	744	Dinas Perkim
272	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Dusun Lumban Tonga menuju Lumban Siantar Desa Pancurnapitu Kecamatan Siatas Barita (Jalan Setapak di Dusun Lumban Tonga menuju Lumban Siantar Desa Pancurnapitu Kecamatan Siatas Barita)	744	Dinas Perkim
273	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Lumban Gorat Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Dusun Lumban Gorat Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita)	744	Dinas Perkim
274	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lumban Siagian Julu Kec, Siatas Barita (BKPSU) (Jalan Lingkungan Lumban Siagian Julu Kec, Siatas Barita (BKPSU))	744	Dinas Perkim
275	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	menuju Dusun Siatamanuk Desa Simorangkir Julu Kec, Siatas Barita (Jalan Lingkungan menuju Dusun Siatamanuk Desa Simorangkir Julu Kec, Siatas Barita)	818	Dinas Perkim
276	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Panomburan Lumban Siagian Jae Desa Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita (DAK) (Jalan Lingkungan Panomburan Lumban Siagian Jae Desa Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita (DAK))	1.488	Dinas Perkim
277	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Rabat Beton Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong (Jalan Rabat Beton Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong)	461	Dinas Perkim
278	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong)	659	Dinas Perkim
279	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siborongborong II Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan Desa Siborongborong II Kecamatan Siborongborong)	659	Dinas Perkim
280	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborongborong)	659	Dinas Perkim
281	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Tonga-tonga Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan Desa Lumban Tonga-tonga Kecamatan Siborongborong)	659	Dinas Perkim
282	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Sanif Gang Bersama Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan Jalan Sanif Gang Bersama Kecamatan Siborongborong)	659	Dinas Perkim
283	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pintu Bosi Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan Desa Pintu Bosi Kecamatan Siborongborong)	659	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
284	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Rabat Beton Jl. Makmur Gg. Gereja HKI Moria Kecamatan Siborongborong (Jalan Rabat Beton Jl. Makmur Gg. Gereja HKI Moria Kecamatan Siborongborong)	494	Dinas Perkim
285	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak menuju Gereja Pohan Tonga Kec, Siborongborong (Jalan Setapak menuju Gereja Pohan Tonga Kec, Siborongborong)	1.153	Dinas Perkim
286	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Sianjur Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong (DAK) (Jalan Lingkungan Dusun Sianjur Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong (DAK))	988	Dinas Perkim
287	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitabo-tabo Toruan Kecamatan Siborongborong (DAK) (Jalan Lingkungan Desa Sitabo-tabo Toruan Kecamatan Siborongborong (DAK))	988	Dinas Perkim
288	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simangumban Julu Kec, Simangumban (Jalan Lingkungan di Desa Simangumban Julu Kec, Simangumban)	671	Dinas Perkim
289	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simangumban Jae Kec, Simangumban (Jalan Lingkungan Desa Simangumban Jae Kec, Simangumban)	1.007	Dinas Perkim
290	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak menuju SD Muara Tolang Kecamatan Simangumban (Jalan Setapak menuju SD Muara Tolang Kecamatan Simangumban)	671	Dinas Perkim
291	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Huta Sosor Huta Gurgur Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar (Jalan Setapak Huta Sosor Huta Gurgur Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar)	644	Dinas Perkim
292	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Lumban Gorat Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar (Jalan Setapak Lumban Gorat Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar)	644	Dinas Perkim
293	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Huta Bagasan Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan Huta Bagasan Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar)	644	Dinas Perkim
294	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lumban Atas Desa Siabal-abal III Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan Lumban Atas Desa Siabal-abal III Kecamatan Sipahutar)	644	Dinas Perkim
295	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Lingungan Dusun Lumban Gukguk Desa Siabal-abal VI Kec, Sipahutar (Jalan Lingungan di Dusun Lumban Gukguk Desa Siabal-abal VI Kec, Sipahutar)	644	Dinas Perkim
296	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon (Jalan Lingkungan di Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon)	702	Dinas Perkim
297	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon (Jalan Lingkungan di Desa Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon)	702	Dinas Perkim
298	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagar Batu Kec, Sipoholon (Jalan Lingkungan di Desa Pagar Batu Kec, Sipoholon)	702	Dinas Perkim
299	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jl. Naipospos Lorong I Kecamatan Sipoholon (DAK) (Jalan Lingkungan Jl. Naipospos Lorong I Kecamatan Sipoholon (DAK))	1.053	Dinas Perkim
300	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Desa Hutatoruan I Kec, Tarutung (Jalan Setapak di Desa Hutatoruan I Kec, Tarutung)	587	Dinas Perkim
301	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Lumban Gaol Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Dusun Lumban Gaol Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung)	587	Dinas Perkim
302	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Rabat Beton Kawasan Pohon Durian Kecamatan Tatutung (Jalan Rabat Beton Kawasan Pohon Durian Kecamatan Tatutung)	411	Dinas Perkim
303	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Komplek Stadion Lorong III dan V Kec, Tarutung (Jalan Lingkungan Komplek Stadion Lorong III dan V Kec, Tarutung)	1.173	Dinas Perkim
304	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sihujur Kec,Tarutung (BKPSU) (Jalan Lingkungan di Desa Sihujur Kec,Tarutung (BKPSU))	587	Dinas Perkim
305	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Komplek Maju Bersama (KMB) Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Komplek Maju Bersama (KMB) Kecamatan Tarutung)	880	Dinas Perkim
306	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Setapak Samping Kantor Bupati Unit B Kec, Tarutung (Jalan Setapak di Samping Kantor Bupati Unit B Kec, Tarutung)	293	Dinas Perkim
307	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutagalung Siwaluompu Kec, Tarutung (DAK) (Jalan Lingkungan Desa Hutagalung Siwaluompu Kec, Tarutung (DAK))	880	Dinas Perkim
308	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Sangkae Desa Parbaju Toruan Kecamatan Tarutung (DAK) (Jalan Lingkungan Dusun Sangkae Desa Parbaju Toruan Kecamatan Tarutung (DAK))	1.114	Dinas Perkim
309	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Perumahan Barat Indah Permai Kecamatan Tarutung (DAK) (Jalan Lingkungan di Perumahan Barat Indah Permai Kecamatan Tarutung (DAK))	880	Dinas Perkim
310	Tanah untuk Jalan lainnya	Kecamatan Tarutung (Trotoar dengan Paving Block di Kecamatan Tarutung)	600	Dinas Perkim
311	Tanah untuk Jalan lainnya	Kecamatan Siborongborong (Trotoar dengan Paving Block di Kecamatan Siborongborong)	480	Dinas Perkim
312	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kec, Sipoholon (Tembok Penahan Tanah dan Parit Semen Kec, Sipoholon)	214	Dinas Perkim
313	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita (Drainase Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita)	800	Dinas Perkim
314	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kota Siborongborong (Penataan Drainase Kota Siborongborong)	432	Dinas Perkim
315	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Jalan Makmur Kecamatan Siborongborong (Pembenahan Drainase Jalan Makmur Kecamatan Siborongborong)	62	Dinas Perkim
316	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Perumahan Pagar Baringin Permai (DAK) (Pembenahan Prasarana dan Sarana Drainase di Perumahan Pagar Baringin Permai (DAK))	284	Dinas Perkim
317	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar (DAK) (Pembenahan Prasarana dan Sarana Drainase Dusun Paraliman Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar (DAK))	200	Dinas Perkim
318	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborngborong (DAK) (Pembangunan Prasarana dan Sarana Drainase Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborngborong (DAK))	200	Dinas Perkim
319	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Keluharan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung (DAK) (Pembenahan Prasarana dan Sarana Drainase Jl. S. Dis. Sitompul Keluharan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung (DAK))	200	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
320	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung (Perbaikan Drainase di Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung)	68	Dinas Perkim
321	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon)	120	Dinas Perkim
322	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Jalan DR. Ferdinand Lumbantobing menuju Bondar Sosopan Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase di Jalan DR. Ferdinand Lumbantobing menuju Bondar Sosopan Kecamatan Tarutung)	268	Dinas Perkim
323	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Lumban Tonga-tonga Desa Lumban Siagian Kec, Siatas Barita (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Lumban Tonga-tonga Desa Lumban Siagian Kec, Siatas Barita (BKPSU))	284	Dinas Perkim
324	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Dusun Sibongis Sabungan Ni Huta Kec, Sipahutar (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Dusun Sibongis Sabungan Ni Huta Kec, Sipahutar (BKPSU))	284	Dinas Perkim
325	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sitakka Kec, Tarutung (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Sitakka Kec, Tarutung (BKPSU))	264	Dinas Perkim
326	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Onan Runggu III Kec, Sipahutar (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Onan Runggu III Kec, Sipahutar (BKPSU))	284	Dinas Perkim
327	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Parsaoran Janji Angkola Kec, Purbatua (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Parsaoran Janji Angkola Kec, Purbatua (BKPSU))	264	Dinas Perkim
328	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Selamat Kec, Purbatua (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Selamat Kec, Purbatua (BKPSU))	284	Dinas Perkim
329	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sitampurung Kec, Tarutung (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Sitampurung Kec, Tarutung (BKPSU))	284	Dinas Perkim
330	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Tor Dolok Nauli Kec, Pahae Jae (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Tor Dolok Nauli Kec, Pahae Jae (BKPSU))	284	Dinas Perkim
331	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kel. Partali Toruan Kec, Tarutung (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Kel. Partali Toruan Kec, Tarutung (BKPSU))	284	Dinas Perkim
332	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Banuaji I Kec, Adiankoting (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Banuaji I Kec, Adiankoting (BKPSU))	264	Dinas Perkim
333	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Banuaji II Kec, Adiankoting (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Banuaji II Kec, Adiankoting (BKPSU))	284	Dinas Perkim
334	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sigurung-gurung Kec, Pahae Jae (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Sigurung-gurung Kec, Pahae Jae (BKPSU))	284	Dinas Perkim
335	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Silakitang II Kec, Pahae Jae (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Silakitang II Kec, Pahae Jae (BKPSU))	284	Dinas Perkim
336	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan di Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung)	750	Dinas Perkim
337	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan DR. TD. Pardede Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Jalan DR. TD. Pardede Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung)	625	Dinas Perkim
338	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita)	625	Dinas Perkim
339	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita (jalan lingkungan di Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita)	540	Dinas Perkim
340	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting (jalan lingkungan Aek Tobasan di Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting)	540	Dinas Perkim
341	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa AdianKoting Kecamatan Adiankoting (Jalan Lingkungan Dolok Ginjang di Desa AdianKoting Kecamatan Adiankoting)	900	Dinas Perkim
342	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagaran Lambung IV Kecamatan Adiankoting (Jalan Lingkungan di Desa Pagaran Lambung IV Kecamatan Adiankoting)	800	Dinas Perkim
343	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simataniari Kecamatan Pahae julu (jalan lingkungan di Desa Simataniari Kecamatan Pahae julu)	563	Dinas Perkim
344	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutabarat Kecamatan Pahae julu (jalan lingkungan di Desa Hutabarat Kecamatan Pahae julu)	550	Dinas Perkim
345	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siabalabal III kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan antar dusun di Desa Siabalabal III kecamatan Sipahutar)	800	Dinas Perkim
346	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siabalabal VI kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Siabalabal VI kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
347	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Onan Runggu III Sipahutar Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Onan Runggu III Sipahutar Kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
348	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Onan Runggu IV kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan Lumban Rang di Desa Onan Runggu IV kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
349	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sabungan Nihuta III kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Sabungan Nihuta III kecamatan Sipahutar)	675	Dinas Perkim
350	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipahutar I Kecamatan Sipahutar (jalan Lingkungan di Desa Sipahutar I Kecamatan Sipahutar)	588	Dinas Perkim
351	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipahutar II Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Sipahutar II Kecamatan Sipahutar)	600	Dinas Perkim
352	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong (Jalan Lingkungan Jalan Makmur Gang Sepakat Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong)	788	Dinas Perkim
353	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Nauli IV Kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan di Desa Aek Nauli IV Kecamatan Sipahutar)	538	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
354	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Nauli IV kecamatan Sipahutar (Jalan Lingkungan Ambar Rang di Desa Aek Nauli IV kecamatan Sipahutar)	950	Dinas Perkim
355	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan (Jalan lingkungan dan Drainase Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan)	450	Dinas Perkim
356	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Pasar Pangaribuan Blok C Kecamatan Pangaribuan (jalan lingkungan Warga di Ruko Pasar Pangaribuan Blok C Kecamatan Pangaribuan)	625	Dinas Perkim
357	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Silantom Julu Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan di Desa Silantom Julu Kecamatan Pangaribuan)	600	Dinas Perkim
358	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sibingke Kecamatan Pangaribuan (jalan Lingkungan di Desa Sibingke Kecamatan Pangaribuan)	588	Dinas Perkim
359	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Batunadua Kecamatan Pangaribuan (Jalan Lingkungan Aek Humbang di Desa Batunadua Kecamatan Pangaribuan)	600	Dinas Perkim
360	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon (jalan lingkungan di Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon)	625	Dinas Perkim
361	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon (jalan Lingkungan di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon)	568	Dinas Perkim
362	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan Dusun III Nagasaribu di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong)	675	Dinas Perkim
363	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Bahal Batu II Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan di Desa Bahal Batu II Kecamatan Siborongborong)	650	Dinas Perkim
364	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong)	625	Dinas Perkim
365	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan di Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong)	625	Dinas Perkim
366	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sigumbang Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan di Desa Sigumbang Kecamatan Siborongborong)	650	Dinas Perkim
367	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong)	713	Dinas Perkim
368	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan Dusun Dabdab di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong)	600	Dinas Perkim
369	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Manalu Kecamatan Parmonangan (Jalan Lingkungan di Desa Manalu Kecamatan Parmonangan)	700	Dinas Perkim
370	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Manalu Purba Kecamatan Parmonangan (Jalan Lingkungan di Desa Manalu Purba Kecamatan Parmonangan)	650	Dinas Perkim
371	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan (Jalan Lingkungan di Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan)	600	Dinas Perkim
372	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Jalan Lingkungan menuju SD No 173274 Siborongborong)	550	Dinas Perkim
373	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban (Jalan Lingkungan di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban)	480	Dinas Perkim
374	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Jalan Lingkungan Gang Sentosa Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung)	700	Dinas Perkim
375	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pancur Napitu Kecamatan Siatas Barita (Jalan Lingkungan di Desa Pancur Napitu Kecamatan Siatas Barita)	575	Dinas Perkim
376	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simamora Hasibuan Kecamatan Pagaran (Jalan Lingkungan Sosorniapoan di Desa Simamora Hasibuan Kecamatan Pagaran)	550	Dinas Perkim
377	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kel. Hutatoruan VII Kec.Tarutung (Jalan Lingkungan Kel. Hutatoruan VII Kec.Tarutung)	625	Dinas Perkim
378	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lorong IV B Kel. Hutatoruan VII Kec. Tarutung (Jalan Lingkungan di Lorong IV B Kel. Hutatoruan VII Kec. Tarutung)	600	Dinas Perkim
379	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Baribaniaek Kec. Muara (Jalan Setapak Desa Baribaniaek Kec. Muara)	600	Dinas Perkim
380	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Huta Dame Kec. Tarutung (Jalan Setapak di GKPI Huta Dame Kec. Tarutung)	400	Dinas Perkim
381	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Huta Nagodang Kecamatan Muara (BKPSU) (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Huta Nagodang Kecamatan Muara (BKPSU))	270	Dinas Perkim
382	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase di Desa Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung)	226	Dinas Perkim
383	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase di Desa Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung)	226	Dinas Perkim
384	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hutatoruan V Kecamatan Tarutung (Rehabilitasi Drainase di Desa Hutatoruan V Kecamatan Tarutung)	226	Dinas Perkim
385	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Siranggiting ke Lumban Gukguk Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Siranggiting ke Lumban Gukguk Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar)	186	Dinas Perkim
386	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar)	146	Dinas Perkim
387	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sabungan Nihuta V Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Sabungan Nihuta V Kecamatan Sipahutar)	186	Dinas Perkim
388	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hutaraja Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Drainase di Desa Hutaraja Kecamatan Pangaribuan)	146	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
389	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Drainase di Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon)	186	Dinas Perkim
390	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Manalu Kecamatan Parmonangan (Pembangunan Drainase di Desa Manalu Kecamatan Parmonangan)	136	Dinas Perkim
391	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Banualuhu Kecamatan Pagaran (Pembangunan Drainase dan Dyk Penahan Tanah jalan di Desa Banualuhu Kecamatan Pagaran)	84	Dinas Perkim
392	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Pagaran Lambung III Kecamatan Adiankoting (Pembangunan Drainase di Desa Pagaran Lambung III Kecamatan Adiankoting)	226	Dinas Perkim
393	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Rehabilitasi Gorong-gorong Lingkungan IV di Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong (Rehabilitasi Gorong-gorong Lingkungan IV di Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong)	226	Dinas Perkim
394	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kota Muara Kecamatan Muara (Pembangunan Drainase Kota Muara Kecamatan Muara)	226	Dinas Perkim
395	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kota Siborongborong (Lanjutan Perbaikan Drainase Kota Siborongborong)	252	Dinas Perkim
396	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kompleks Terminal Madya Tarutung Kecamatan Tarutung (Normalisasi Saluran Drainase di Kompleks Terminal Madya Tarutung Kecamatan Tarutung)	226	Dinas Perkim
397	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Dusun Parsulaman Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga (Pembangunan Drainase Lingkungan di Dusun Parsulaman Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga)	260	Dinas Perkim
398	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Gonting Salak Kecamatan Garoga (Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Gonting Salak Kecamatan Garoga)	260	Dinas Perkim
399	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kompleks Maju Bersama (KMB) Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase Lingkungan Kompleks Maju Bersama (KMB) Kecamatan Tarutung)	256	Dinas Perkim
400	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Jalan Merdeka Kel. Siborongborong Kec. Siborongborong (Penataan Drainase di Jalan Merdeka Kel. Siborongborong Kec. Siborongborong)	138	Dinas Perkim
401	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Silosung Kecamatan Simangumban (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Silosung Kecamatan Simangumban)	122	Dinas Perkim
402	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung)	430	Dinas Perkim
403	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Gang Bersama Desa Sirajaoloan Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan gang Bersama Desa Sirajaoloan Kecamatan Tarutung)	345	Dinas Perkim
404	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Banuaji IV Kecamatan Adiankoting (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Banuaji IV Kecamatan Adiankoting)	680	Dinas Perkim
405	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon)	569	Dinas Perkim
406	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Tapian Nauli di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan Tapian Nauli di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon)	731	Dinas Perkim
407	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon)	1.018	Dinas Perkim
408	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon)	676	Dinas Perkim
409	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Banualuhu Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Banualuhu Kecamatan Pagaran)	556	Dinas Perkim
410	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran)	943	Dinas Perkim
411	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hasibuan Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hasibuan Kecamatan Pagaran)	1.083	Dinas Perkim
412	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Motung Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lumban Motung Kecamatan Pagaran)	584	Dinas Perkim
413	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipultak Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran)	688	Dinas Perkim
414	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobusiregar I Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lobusiregar I Kecamatan Siborongborong)	513	Dinas Perkim
415	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong)	555	Dinas Perkim
416	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutaginjang Kecamatan Muara)	630	Dinas Perkim
417	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara)	335	Dinas Perkim
418	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Rahut Bosi Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Rahut Bosi Kecamatan Pangaribuan)	662	Dinas Perkim
419	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sigotom Timur Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sigotom Timur Kecamatan Pangaribuan)	698	Dinas Perkim
420	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju SMP Negeri 2 Pangaribuan di Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan menuju SMP Negeri 2 Pangaribuan di Kecamatan Pangaribuan)	221	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
421	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan)	544	Dinas Perkim
422	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simpang Bolon Kecamatan Garoga (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simpang Bolon Kecamatan Garoga)	630	Dinas Perkim
423	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parsosoran Kecamatan Garoga (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Parsosoran Kecamatan Garoga)	540	Dinas Perkim
424	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siopat Bahal Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Siopat Bahal Kecamatan Pahae Jae)	768	Dinas Perkim
425	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung)	333	Dinas Perkim
426	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Pearaja di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu (Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pearaja di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu)	312	Dinas Perkim
427	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan)	593	Dinas Perkim
428	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lumban Tora di Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Tora di Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong)	708	Dinas Perkim
429	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung)	570	Dinas Perkim
430	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung)	336	Dinas Perkim
431	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju SD Peanahuscus Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju SD Peanahuscus Kecamatan Tarutung)	684	Dinas Perkim
432	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju Gereja HKBP Tarutung II di Desa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Gereja HKBP Tarutung II di Desa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae)	252	Dinas Perkim
433	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Adiankoting Julu Desa Adiankoting Kec. Adiankoting (Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Adiankoting Julu Desa Adiankoting Kec. Adiankoting)	635	Dinas Perkim
434	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sihujur Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase di Desa Sihujur Kecamatan Tarutung)	168	Dinas Perkim
435	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Drainase di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon)	362	Dinas Perkim
436	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Drainase di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon)	262	Dinas Perkim
437	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hasibuan Kecamatan Pagaran (Pembangunan Drainase di Desa Hasibuan Kecamatan Pagaran)	359	Dinas Perkim
438	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Lubis Kecamatan Pagaran (Pembangunan Drainase di Desa Lubis Kecamatan Pagaran)	297	Dinas Perkim
439	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Drainase lingkungan di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong)	399	Dinas Perkim
440	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar)	222	Dinas Perkim
441	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Siabalabal I Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Siabalabal I Kecamatan Sipahutar)	247	Dinas Perkim
442	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Siabalabal II Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Siabalabal II Kecamatan Sipahutar)	252	Dinas Perkim
443	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Drainase di Desa Sampagul Kecamatan Pangaribuan)	226	Dinas Perkim
444	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Drainase di Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan)	239	Dinas Perkim
445	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Parinsoran Kecamatan Garoga (Pembangunan Drainase di Desa Parinsoran Kecamatan Garoga)	207	Dinas Perkim
446	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga (Pembangunan Drainase di Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga)	252	Dinas Perkim
447	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga (Pembangunan Drainase di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga)	277	Dinas Perkim
448	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Drainase di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae)	239	Dinas Perkim
449	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Drainase di Desa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae)	250	Dinas Perkim
450	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kota Sarulla Kecamatan Pahae Jae (Penataan Drainase Kota Sarulla Kecamatan Pahae Jae)	431	Dinas Perkim
451	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Huta Nagodang Kecamatan Purbatua (Pembangunan Drainase di Desa Huta Nagodang Kecamatan Purbatua)	141	Dinas Perkim
452	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Sitiur-tiur di Desa Hutanagodang Kecamatan Purbatua (Pembangunan Drainase Lingkungan Sitiur-tiur di Desa Hutanagodang Kecamatan Purbatua)	189	Dinas Perkim
453	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kota Sipoholon Kecamatan Sipoholon (Penataan Drainase di Kota Sipoholon Kecamatan Sipoholon)	124	Dinas Perkim
454	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kompleks Maju Bersama (KMB) Kecamatan Tarutung (Lanjutan Pembangunan Drainase di Kompleks Maju Bersama (KMB) Kecamatan Tarutung)	101	Dinas Perkim
455	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kompleks Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Tapanuli Utara (Rehabilitasi Drainase di Kompleks Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Tapanuli Utara)	23	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
456	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sidagal Kecamatan Siatas Barita 207 M X 2 M = 414 M2)	414	Dinas Perkim
457	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simanampang Kecamatan Siatas Barita 212 M X 2 M = 424 M2)	424	Dinas Perkim
458	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Adiankoting (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting 109 M X 3 M = 327 M2)	327	Dinas Perkim
459	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon 150,5 M X 2,5 M = 376,3 M2)	376	Dinas Perkim
460	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Kompleks Amor Jaya Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon 110 M X 3 M = 330 M2)	330	Dinas Perkim
461	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Rabat Beton di Dusun Pansinaran Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon 134 M X 2,5 M = 335 M2)	335	Dinas Perkim
462	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon 157 M X 2,5 M = 392,5 M2)	393	Dinas Perkim
463	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pertengahan Kecamatan Parmonangan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Pertengahan Kecamatan Parmonangan 84,7 M X 2,5 M = 211,8 M2)	212	Dinas Perkim
464	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Silintong Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lumban Silintong Kecamatan Pagaran 165 M X 2,5 M = 412,5 M2)	413	Dinas Perkim
465	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagaran Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Pagaran Kecamatan Pagaran 120 M X 2,5 M = 300 M2)	300	Dinas Perkim
466	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Julu Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lumban Julu Kecamatan Pagaran 154 M X 2,5 M = 385 M2)	385	Dinas Perkim
467	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Tongatonga (Pembangunan Jalan lingkungan di Desa Lumban Tongatonga Kecamatan Siborongborong 174 M X 2,5 M = 435 M2)	435	Dinas Perkim
468	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong 158,5 M X 3 M = 475,5 M2)	476	Dinas Perkim
469	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong 151,5 M X 3 M = 454,5 M2)	455	Dinas Perkim
470	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong 154 M X 3 M = 462 M2)	462	Dinas Perkim
471	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong 121 M X 3 M = 362 M2)	362	Dinas Perkim
472	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Papande Kecamatan Muara (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Papande Kecamatan Muara 108 M X 3 M = 324 M2)	324	Dinas Perkim
473	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sibandang Kecamatan Muara (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sibandang Kecamatan Muara 108 M X 3 M = 324 M2)	324	Dinas Perkim
474	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siabal abal II Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Siabal abal II Kecamatan Sipahutar 138 M X 3 M = 414 M2)	414	Dinas Perkim
475	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar 119 M X 2,5 M = 297,5 M2)	298	Dinas Perkim
476	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Ruhut Bosi Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan lingkungan di Desa Ruhut Bosi Kecamatan Pangaribuan 225 M X 2,5 M = 562,5 M2)	563	Dinas Perkim
477	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan 152 M X 3 M = 456 M2)	456	Dinas Perkim
478	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Batu Manumpak Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Manumpak Kecamatan Pangaribuan 139 M X 3 M = 417 M2)	417	Dinas Perkim
479	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sibikke Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sibikke Kecamatan Pangaribuan 145 M X 3 M = 435 M2)	435	Dinas Perkim
480	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Huta Raja Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Huta Raja Kecamatan Pangaribuan 134 M X 3 M = 402 M2)	402	Dinas Perkim
481	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga 132 M X 3,5 M = 462 M2)	462	Dinas Perkim
482	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Padang Siandomang Kecamatan Garoga (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Padang Siandomang Kecamatan Garoga 118,5 M X 3 M = 355,5 M2)	356	Dinas Perkim
483	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae 156,8 M X 2,5 M = 392 M2)	392	Dinas Perkim
484	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siopat Bahal Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Siopat Bahal Kecamatan Pahae Jae 93,2 M X 2,5 M = 233 M2)	233	Dinas Perkim
485	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sigurunggurung Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sigurunggurung Kecamatan Pahae Jae 83 M X 3 M = 249 M2)	249	Dinas Perkim
486	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Tonga Sigompulon Kecamatan Pahae Julu (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lumban Tonga Sigompulon Kecamatan Pahae Julu 97 M X 3 M = 291 M2)	291	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
487	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu 77 M X 2,5 M = 192,5 M2)	193	Dinas Perkim
488	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu 117 M X 3 M = 351 M2)	351	Dinas Perkim
489	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Dolok Kecamatan Pahae Julu (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Pahae Julu 115 M X 3 M = 345 M2)	345	Dinas Perkim
490	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Nabara Kecamatan Simangumban (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Aek Nabara Kecamatan Simangumban 53 M X 3,5 M = 185,5 M2)	186	Dinas Perkim
491	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siduabahal Kecamatan Purbatua (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Siduabahal Kecamatan Purbatua 58 M X 3 M = 174 M2)	174	Dinas Perkim
492	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Selamat Kecamatan Purbatua (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Selamat Kecamatan Purbatua 144 M X 2,5 M = 360 M2)	360	Dinas Perkim
493	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban 105,3 M X 2 M = 210,6 M2)	211	Dinas Perkim
494	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita 67 M X 2,5 M = 167,5 M2)	168	Dinas Perkim
495	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon 191,3 M X 2,5 M = 478,3 M2)	478	Dinas Perkim
496	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung 97 M X 3 M = 291 M2)	291	Dinas Perkim
497	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung (Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung 103 M X 2,5 M = 257,5 M2)	258	Dinas Perkim
498	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Pandumaan Parmonangan Desa Bariba ni Aek Kec. Muara (Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pandumaan Parmonangan Desa Bariba ni Aek Kec. Muara 155 M X 3 M = 465 M2)	465	Dinas Perkim
499	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Dolok Saribu Kec. Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dolok Saribu Kec. Pagaran 143 M X 2,5 M = 357,5 M2)	358	Dinas Perkim
500	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun II Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun II Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon 148 M X 3 M = 444 M2)	444	Dinas Perkim
501	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Simpang SD menuju Desa Pananggele Sitampurung Kec. Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan dari Simpang SD menuju Desa Pananggele Sitampurung Kec. Siborongborong 159 M X 3 M = 477 M2)	477	Dinas Perkim
502	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Batu Manumpak Kec. Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan Onan Sabtu menuju Lumban Sidari Desa Batu Manumpak Kec. Pangaribuan 249 M X 2,5 M = 622,5 M2)	623	Dinas Perkim
503	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Nauli I Kec. Sipahutar (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Aek Nauli I Kec. Sipahutar 153 M X 3 M = 459 M2)	459	Dinas Perkim
504	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Simangonding Desa Lumban Dolok Kec. Pahae Julu (Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Simangonding Desa Lumban Dolok Kec. Pahae Julu 150 M X 2 M = 300 M2)	300	Dinas Perkim
505	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Janji Nauli Kec. Purbatua (Pembangunan Jalan Lingkungan SYEH Ibrahim Sitompul menuju SMP N 1 Purbatua Desa Janji Nauli Kec. Purbatua 117,5 M X 3 M = 352,5 M2)	353	Dinas Perkim
506	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran 109 M X 2,5 M = 272,5 M2)	273	Dinas Perkim
507	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Banua Luhu Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Banua Luhu Kecamatan Pagaran 161,5 M X 2,5 M = 403,8 M2)	404	Dinas Perkim
508	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Partali Toruan Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan menuju HKBP Partali Toruan Kecamatan Tarutung 62,5 M X 3 M = 187,5 M2)	188	Dinas Perkim
509	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Ina-ina Kecamatan Pagaran (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lumban Ina-ina Kecamatan Pagaran 280 M X 1,5 M = 420 M2)	420	Dinas Perkim
510	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Ranggit-git Horisan Kecamatan Parmonangan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Ranggit-git Horisan Kecamatan Parmonangan 145 M X 3 M = 435 M2)	435	Dinas Perkim
511	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun I Lumban Same Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun I Lumban Same Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon 166 M X 3 M = 498 M2)	498	Dinas Perkim
512	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Pembangunan Jalan Lingkungan SMP 5 Kecamatan Garoga 149 M X 3 M = 447 M2)	447	Dinas Perkim
513	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting 55 M X 2 M = 110 M2)	110	Dinas Perkim
514	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Bahal Batu III Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Bahal Batu III Kecamatan Siborongborong 178 M X 3 M = 534 M2)	534	Dinas Perkim
515	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Asrama Polisi Kecamatan Pangaribuan 102 M X 3,5 M = 357 M2)	357	Dinas Perkim
516	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Jalan Lingkungan Polsek Sipahutar Kecamatan Sipahutar 149,5 M X 3 M = 448,5 M2)	449	Dinas Perkim
517	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Sangkar Nihuta Desa Siabalabal VI Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Sangkar Nihuta Desa Siabalabal VI Kecamatan Sipahutar 128 M X 3,5 M = 448 M2)	448	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
518	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siabalabal I Kecamatan Sipahutar (Pembagunan Jalan Lingkungan di Desa Siabalabal I Kecamatan Sipahutar 166 M X 2,5 M = 415 M2)	415	Dinas Perkim
519	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Gang Cendana Kompleks Mesjid Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan di Gang Cendana Kompleks Mesjid Kecamatan Tarutung 154,5 M X 2,5 M = 386,3 M2)	386	Dinas Perkim
520	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting (Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Gereja HKBP Pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting 40 M X 3 M = 120 M2)	120	Dinas Perkim
521	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita 147,5 M X 4 M = 590 M2)	590	Dinas Perkim
522	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutagalung Harean Kecamatan Siatas Barita (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutagalung Harean Kecamatan Siatas Barita 89 M X 3 M = 267 M2)	267	Dinas Perkim
523	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simataniari Kecamatan Pahae Julu (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simataniari Kecamatan Pahae Julu 97 M X 3 M = 291 M2)	291	Dinas Perkim
524	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban 140 M X 2 M = 280 M2)	280	Dinas Perkim
525	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lontung Dolok Kecamatan Pahae Julu (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lontung Dolok Kecamatan Pahae Julu 132 M X 3,5 M = 462 M2)	462	Dinas Perkim
526	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Gang Bersama di Desa Sirajaoloan Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Bersama di Desa Sirajaoloan Kecamatan Tarutung 75 M X 3 M = 225 M2)	225	Dinas Perkim
527	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Sitakka Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan lingkungan di Dusun Sitakka Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung 73,5 M X 2 M = 147 M2)	147	Dinas Perkim
528	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung 166,5 M X 3 M = 349,8 M2)	350	Dinas Perkim
529	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong (BKPSU) 396 M X 3 M = 1.188 M2)	1.188	Dinas Perkim
530	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong (BKPSU) 397 M X 3 M = 1.161 M2)	1.161	Dinas Perkim
531	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Huta Gurgur Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga (Pembangunan Jalan Lingkungan di Huta Gurgur Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga (BKPSU) 216 M X 3 M = 648 M2)	648	Dinas Perkim
532	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju SMA Negeri 2 Siborongborong Kecamatan Siborongborong (BKPSU) 396 M X 3 M = 1.188 M2)	1.188	Dinas Perkim
533	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sigumbang Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sigumbang Kecamatan Siborongborong (BKPSU) 370 M X 3 M = 1.110 M2)	1.110	Dinas Perkim
534	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara (BKPSU) 440 M X 2,5 M = 1.100 M2)	1.100	Dinas Perkim
535	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Pokki Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pokki Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong (BKPSU) 380 M X 2,5 M = 950 M2)	950	Dinas Perkim
536	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Silait-lait Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Silait-lait Kecamatan Siborongborong (BKPSU) 372 M X 3 M = 1.116 M2)	1.116	Dinas Perkim
537	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Silando Kecamatan Muara (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Silando Kecamatan Muara (BKPSU) 377 M X 3 M = 1.131 M2)	1.131	Dinas Perkim
538	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Hutabulu di Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon (Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Hutabulu di Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon 105 M X 2,5 M = 262,5 M2)	263	Dinas Perkim
539	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Ranggitgit Horison Kec. Parmonangan (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Ranggitgit Horison Kec. Parmonangan 97 M X 4 M = 388 M2)	388	Dinas Perkim
540	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pancur Batu II Kec. Adiankoting (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Pancur Batu II Kec. Adiankoting 205 M X 2 M = 410 M2)	410	Dinas Perkim
541	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Adian Padang Desa Sabungan ni Huta IV Kec. Sipahutar (Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Adian Padang Desa Sabungan ni Huta IV Kec. Sipahutar 308 M X 3 M = 924 M2)	924	Dinas Perkim
542	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Tonga-tonga Kec. Pahae Julu (Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lumban Tonga-tonga Kec. Pahae Julu 73,5 M X 3 M = 220,5 M2)	221	Dinas Perkim
543	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobu Siregar II Kec. Siborongborong (Pembangunan Sanitasi Lingkungan di Desa Lobu Siregar II Kec. Siborongborong 150 M X 1 M = 150 M2)	150	Dinas Perkim
544	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Enda Portibi Kecamatan Siatas Barita (Pembangunan Drainase di Desa Enda Portibi Kecamatan Siatas Barita 149 M X 0,9 M = 134,1 M2)	134	Dinas Perkim
545	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Banuaji IV Kecamatan Adiankoting (Pembangunan Drainase di Desa Banuaji IV Kecamatan Adiankoting 104 M X 0,9 M = 93,6 M2)	94	Dinas Perkim
546	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan (Pembangunan Drainase di Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan 118 M X 0,9 M = 106,2 M2)	106	Dinas Perkim
547	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan (Pembangunan Drainase di Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan 86 M X 0,9 M = 77,4 M2)	77	Dinas Perkim
548	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Siborongborong Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Drainase di Kelurahan Siborongborong Kecamatan Siborongborong 154 M X 0,9 M = 138,6 M2)	139	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
549	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pulau Sibandang Kecamatan Muara (Pembangunan Drainase di Desa Pulau Sibandang Kecamatan Muara 154 M X 1 M = 154 M2)	154	Dinas Perkim
550	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sampuran Kecamatan Muara (Pembangunan Drainase di Desa Sampuran Kecamatan Muara 166 M X 1 M = 166 M2)	166	Dinas Perkim
551	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar 172,5 M X 1 M = 172,5 M2)	173	Dinas Perkim
552	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siabalabal V Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Siabalabal V Kecamatan Sipahutar 189 M X 0,9 M = 170,1 M2)	170	Dinas Perkim
553	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar 170,5 M X 1 M = 170,5 M2)	171	Dinas Perkim
554	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sigotom Timur Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Drainase di Desa Sigotom Timur Kecamatan Pangaribuan 131,5 M X 1 M = 131,5 M2)	132	Dinas Perkim
555	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parmanuhan Kecamatan Garoga (Pembangunan Drainase di Desa Parmanuhan Kecamatan Garoga 174 M X 0,9 M = 156,6 M2)	157	Dinas Perkim
556	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Drainase di Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae 164 M X 0,9 M = 147,6 M2)	148	Dinas Perkim
557	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Setia Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Drainase di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae 167 M X 0,9 M = 150,3 M2)	150	Dinas Perkim
558	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae (Pembangunan Drainase di Desa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae 73,5 M X 1,8 M = 132,3 M2 (T.A. 2018) di Tambah Tanah di bawah Lanjutan Pembangunan Drainase di Desa Suka Maju kec. Pahae Jae 30 M X 1,4 M = 42 M2 (T.A. 2019) Menjadi 174,3 M2)	174	Dinas Perkim
559	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu (Pembangunan Drainase di Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu 76,8 M X 0,8 M = 61,4 M2)	61	Dinas Perkim
560	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban (Pembangunan Drainase di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban 133 M X 0,8 M = 106,4 M2)	0	Dinas Perkim
561	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban (Pembangunan Drainase di Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban 43 M X 2 M = 86 M2)	86	Dinas Perkim
562	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Silosung Kecamatan Simangumban (Pembangunan Drainase di Desa Silosung Kecamatan Simangumban 150 M X 0,9 M = 135 M2)	135	Dinas Perkim
563	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sibulan-bulan Kecamatan Purbatua (Pembangunan Drainase di Desa Sibulan-bulan Kecamatan Purbatua 88,3 M X 1 M = 88,3 M2)	88	Dinas Perkim
564	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parsaoran Kecamatan Purbatua (Pembangunan Drainase di Desa Parsaoran Kecamatan Purbatua 120 M X 1 M = 120 M2)	120	Dinas Perkim
565	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Huta Bagasan Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase di Huta Bagasan Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung 133 M X 1 M = 133 M2)	133	Dinas Perkim
566	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Drainase di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong 149 M X 1 M = 149 M2)	149	Dinas Perkim
567	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kec. Sipahutar (Pembangunan Drainase Jln. Hutagurgur-Silindur Kec. Sipahutar 143 M X 1 M = 143 M2)	143	Dinas Perkim
568	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Tugu Kelurahan Siborongborong (Penataan Drainase dan Gorong-gorong di Jalan Tugu Kelurahan Siborongborong 56,7 M X 1 M = 56,7 M2)	57	Dinas Perkim
569	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran (Pembangunan Drainase di Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran 119,5 M X 1 M = 119,5 M2)	120	Dinas Perkim
570	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lontung Jae II Kecamatan Garoga (Pembangunan Drainase di Desa Lontung Jae II Kecamatan Garoga 207 M X 1 M = 207 M2)	207	Dinas Perkim
571	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Toru Sialogo Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan (Pembangunan Drainase di Toru Sialogo Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan 107 M X 1 M = 107 M2)	107	Dinas Perkim
572	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sabungan Ni Huta III Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Sabungan Ni Huta III Kecamatan Sipahutar 67 M X 1 M = 67 M2)	67	Dinas Perkim
573	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Huta Sumur Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase Lingkungan di Huta Sumur Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung 124 M X 1 M = 124 M2)	124	Dinas Perkim
574	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga (Pembangunan Drainase di Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga 150 M X 1 M = 150 M2)	150	Dinas Perkim
575	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung (Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong di Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung 114 M X 1,4 M = 159,6 M2)	160	Dinas Perkim
576	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sabungan Nihuta IV Kecamatan Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Sabungan Nihuta IV Kecamatan Sipahutar 126,4 M X 1 M = 126,4 M2)	126	Dinas Perkim
577	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong (Pembangunan Drainase di Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong 165 M X 1 M = 165 M2)	165	Dinas Perkim
578	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan (Pembangunan Drainase di Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan (BKPSU) 274 M X 0,9 M = 246,6 M2)	247	Dinas Perkim
579	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siabal-abal I Kec. Sipahutar (Pembangunan Drainase di Desa Siabal-abal I Kec. Sipahutar 48 M X 1 M = 48 M2)	48	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
580	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Partali Toruan Kec. Tarutung (Pembangunan Drainase di Kelurahan Partali Toruan Kec. Tarutung 220 M X 0,9 M = 198 M2)	198	Dinas Perkim
581	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa manalu Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan desa manalu Kecamatan Parmonangan 179 M X 2,5 M = 447,5 M2)	448	Dinas Perkim
582	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pansurbatu Kecamatan Adiankoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pansurbatu Mula-mula Desa Pansurbatu Kecamatan Adiankoting 176 M X 3 M = 528 M2)	528	Dinas Perkim
583	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutaraja Kec. Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Hutaraja Kec. Pangaribuan 307 M X 2,5 M = 767,5 M2)	768	Dinas Perkim
584	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Purbatua Kec. Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Purbatua Kec. Pangaribuan 230 M X 3,5 M = 805 M2)	805	Dinas Perkim
585	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan DR. TD Pardede Gang Dame Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan DR. TD Pardede Gang Dame Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung 183 M X 2,5 M = 457,5 M2)	458	Dinas Perkim
586	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Partali Toruan Kec. Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Partali Toruan Kec. Tarutung 161,1 M X 4 M = 644,4 M2)	644	Dinas Perkim
587	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Samping Gereja Palmarum lingkungan Simaungmaung Pea Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Samping Gereja Palmarum lingkungan Simaungmaung Pea Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung 185,5 M X 3 M = 556,5 M2)	557	Dinas Perkim
588	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lumban Rao Kelurahan Partali Toruan Kec. Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Rao Kelurahan Partali Toruan Kec. Tarutung 123 M X 2,5 M = 307,5 M2)	308	Dinas Perkim
589	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Huta Tonga-tonga Desa Pagaran Lambung II Kecamatan Adiankoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Huta Tonga-tonga Desa Pagaran Lambung II Kecamatan Adiankoting 212 M X 2,5 M = 530 M2)	530	Dinas Perkim
590	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Simargalung Desa Hutatinggi Kec. Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Simargalung Desa Hutatinggi Kec. Parmonangan 200 M X 3 M = 600 M2)	600	Dinas Perkim
591	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun III, surungan pasir Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan dusun III, surungan pasir Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara 215 M X 3 M = 645 M2)	645	Dinas Perkim
592	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jalan Lingkungan Dusun Simataniari Desa Parsosoran Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Simataniari Desa Parsosoran Kecamatan Garoga 189 M X 3 M = 567 M2)	567	Dinas Perkim
593	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jl TD Pardede Gang Tulus Jaya Dusun Panganan Lombu Desa Simamora Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Jl TD Pardede Gang Tulus Jaya Dusun Panganan Lombu Desa Simamora Kecamatan Tarutung 203 M X 3 M = 609 M2)	609	Dinas Perkim
594	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pansur Napitu Menuju Dusun Siantar Kec. Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pansur Napitu Menuju Dusun Siantar Kec. Siatas Barita 131,5 M X 2 M = 263 M2)	263	Dinas Perkim
595	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Bahal Singkam Desa Siaro Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Bahal Singkam Desa Siaro Kecamatan Siborongborong 213,5 M X 3 M = 640,5 M2)	641	Dinas Perkim
596	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun I Lumban tongatonga Desa Batu Binumbun Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan dusun I Lumban tongatonga Desa Batu Binumbun Kecamatan Muara 168 M X 3 M = 504 M2)	504	Dinas Perkim
597	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Penataan lingkungan Untuk Kawasan Kumuh di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon 30 M X 2 M = 60 M2)	60	Dinas Perkim
598	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun harang menuju SD Negeri 173116 Desa Pancurnapitu Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan dusun harang menuju SD Negeri 173116 Desa Pancurnapitu Kecamatan Siatas Barita 224 M X 2,5 M = 560 M2)	560	Dinas Perkim
599	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun IV Lumban Tobing Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun IV Lumban Tobing Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan 100 M X 3 M = 300 M2)	300	Dinas Perkim
600	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kompleks Japaris Aekristop Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan kompleks Japaris Aekristop Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung 189 M X 3 M = 567 M2)	567	Dinas Perkim
601	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Aek Ristop Kelurahan Partalitoruan dan Kelurahan Hutatoruan VII (Pinggir Aek Ristop) Kec. Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Aek Ristop Kelurahan Partalitoruan dan Kelurahan Hutatoruan VII (Pinggir Aek Ristop) Kec. Tarutung 200 M X 3 M = 600 M2)	600	Dinas Perkim
602	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun VI Lumban Nainggolan Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun VI Lumban Nainggolan Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong 433 M X 3 M = 1.299 M2)	1.299	Dinas Perkim
603	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	desa rahutbosi onan Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan desa rahutbosi onan Kecamatan Pangaribuan 163 M X 3 M = 489 M2)	489	Dinas Perkim
604	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun 3 pasaribu dolok Desa Sipoltak Dolok Kecamatan Pagaran (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan dusun 3 pasaribu dolok Desa Sipoltak Dolok Kecamatan Pagaran 233 M X 2,5 M = 582,5 M2)	583	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
605	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Banjar Samosir Dusun Pearaja Desa Lontung jae I Kec. Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Banjar Samosir Dusun Pearaja Desa Lontung jae I Kec. Garoga 104 M X 2 M = 208 M2)	208	Dinas Perkim
606	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Aek Tangga Kec. Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Aek Tangga Kec. Garoga 178 M X 2,5 M = 445 M2)	445	Dinas Perkim
607	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Penataan lingkungan Untuk Kawasan Kumuh di Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong 232 M X 2,5 M = 580 M2)	580	Dinas Perkim
608	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Huta Patar Menuju Hutabagot Desa Sigurung-gurung II Kec. Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Huta Patar Menuju Hutabagot Desa Sigurung-gurung II Kec. Pahae Jae 163 M X 2,5 M = 407,5 M2)	408	Dinas Perkim
609	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kantor Camat Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Kantor Camat Garoga 133 M X 3,5 M = 465,5 M2)	466	Dinas Perkim
610	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Penataan lingkungan Untuk Kawasan Kumuh di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong 120 M X 2,5 M = 300 M2)	300	Dinas Perkim
611	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Pangorian Desa Parinsoran Pangorian Kec. Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Pangorian Desa Parinsoran Pangorian Kec. Garoga 269 M X 3 M = 807 M2)	807	Dinas Perkim
612	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobu Singkam Kec. Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lobu Singkam Kec. Sipoholon 217,5 M X 2,5 M = 543,8 M2)	544	Dinas Perkim
613	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Silampu-lampu desa Siborong-borong I Kec. Siborong-borong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan lingkungan dusun Silampu-lampu desa Siborong-borong I Kec. Siborong-borong 192,5 M X 2,5 M = 481,3 M2 T.A. 2019 dan Tanah di bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Silampu-lampu Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong (DID Tambahan Tahap II) (169,5 M x 2,5 M) T.A. 2020)	481	Dinas Perkim
614	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun 2 Nasator Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun 2 Nasator Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar 209 M X 2,5 M = 522,5 M2)	523	Dinas Perkim
615	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun silosung Desa Silosung Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun silosung Desa Silosung Kecamatan Simangumban 154 M X 2,5 M = 385 M2)	385	Dinas Perkim
616	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Sibiobio-simardangiang-lumban gotting Desa Simardagiang Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan sibiobio-simardangiang-lumban gotting Desa Simardagiang Kecamatan Pahae Julu 137 M X 2,5 M = 342,5 M2)	343	Dinas Perkim
617	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Huta Godang menuju Aritonang dusun Sisoding Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Huta Godang menuju Aritonang dusun Sisoding Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan 109 M X 2 M = 218 M2)	218	Dinas Perkim
618	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun IV Siarung-arung Desa Banualuhu Kec. Pagaran (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun IV Siarung-arung Desa Banualuhu Kec. Pagaran 218 M X 2,5 M = 545 M2)	545	Dinas Perkim
619	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Sibio-bio Desa Padang Siandomang Kec. Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sibio-bio Desa Padang Siandomang Kec. Garoga 82,5 M X 2,5 M = 206,3 M2)	206	Dinas Perkim
620	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Pasar Onan Buntul Desa Parsaoran Janji Angkola Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pasar Onan Buntul Desa Parsaoran Janji Angkola Kecamatan Purbatua 121 M X 3 M = 363 M2)	363	Dinas Perkim
621	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Huta Hariara Nagodang Kelurahan Hutaroruan IX Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Lingkungan Huta Hariara Nagodang Kelurahan Hutaroruan IX Kecamatan Tarutung 223,8 M X 3 M = 671,4 M2)	671	Dinas Perkim
622	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Habinsaran Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Habinsaran Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita 340 M X 2,5 M = 850 M2)	850	Dinas Perkim
623	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun V Hotnauli Desa Ranggitgit Horison Kec. Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun V Hotnauli Desa Ranggitgit Horison Kec. Parmonangan 84 M X 2,5 M = 210 M2)	210	Dinas Perkim
624	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Aek Raja Kec. Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Desa Aek Raja Kec. Parmonangan 53 M X 1,05 M = 55,7 M2)	56	Dinas Perkim
625	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Belakang Air Soda Desa Parbubu I Kec. Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Drainase di Belakang Air Soda Desa Parbubu I Kec. Tarutung 129 M X 0,95 M = 122,6 M2)	123	Dinas Perkim
626	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Dusun I Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Dusun I Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae 195 M X 1 M = 195 M2)	195	Dinas Perkim
627	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Dusun Loguboti Desa Sigotom Kec. Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Dusun Loguboti Desa Sigotom Kec. Pangaribuan 240 M X 1 M = 240 M2)	240	Dinas Perkim
628	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kantor camat simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Drainase kantor camat simangumban 172,5 M X 0,9 M = 155,3 M2)	155	Dinas Perkim
629	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Enda Portibi Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Penataan lingkungan Untuk Kawasan Kumuh di Desa Enda Portibi Kecamatan Siatas Barita 201,7 M X 1 M = 201,7 M2)	202	Dinas Perkim
630	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Jl. KS. Tubun Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Jl. KS. Tubun Kecamatan Tarutung 148,7 M X 0,7 M = 104,1 M2)	104	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
631	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Jln. TD Pardede-Siparendean Desa Sabungan Ni Huta II Kec. Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Jln. TD Pardede-Siparendean Desa Sabungan Ni Huta II Kec. Sipahutar 138 M X 1 M = 138 M2)	138	Dinas Perkim
632	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Dusun Hutabaru Desa Situmeang Hasundutan Kec. Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Dusun Hutabaru Desa Situmeang Hasundutan Kec. Sipoholon 133,5 M X 1 M = 133,5 M2)	134	Dinas Perkim
633	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	JL. Liberty Malau Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Dan Plat Penutup Beton di JL. Liberty Malau Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung 213 M X 0,8 M = 170,4 M2)	170	Dinas Perkim
634	Tanah Bangunan Air lainnya	Dusun sialang Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan MCK dusun sialang Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban 9 M X 4 M = 36 M2)	36	Dinas Perkim
635	Tanah Bangunan Air lainnya	Aek julu dusun I Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan MCK Aek julu dusun I Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung 6 M X 3 M = 18 M2)	18	Dinas Perkim
636	Tanah Bangunan Air lainnya	Parbubu Julu Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan MCK Parbubu Julu Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung 6 M X 3 M = 18 M2)	18	Dinas Perkim
637	Tanah Bangunan Air lainnya	Lumban Silintong Desa Lobu Siregar II Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan MCK Lumban Silintong Desa Lobu Siregar II Kecamatan Siborongborong 6 M X 4 M = 24 M2)	24	Dinas Perkim
638	Tanah Bangunan Air lainnya	Dusun Hutapancur Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan MCK Dusun Hutapancur Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita 6 M X 2,5 M = 15 M2)	15	Dinas Perkim
639	Tanah Bangunan Air lainnya	Silalitoruan Desa Silalitoruan Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan MCK Silalitoruan Desa Silalitoruan Kecamatan Muara 6 M X 4M = 24 M2)	24	Dinas Perkim
640	Tanah Bangunan Air lainnya	Dusun Adiankoting Tonga tonga Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting (Tanah di bawah Pembangunan MCK Dusun Adiankoting Tonga tonga Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting 5 M X 4 M = 20 M2)	20	Dinas Perkim
641	Tanah Bangunan Air lainnya	Siranggiting Danoganjang Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan MCK Siranggiting Danoganjang Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar 6 M X 4M = 24 M2)	24	Dinas Perkim
642	Tanah Bangunan Air lainnya	Dusun Janji Maria Desa Bonani Dolok Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan MCK Dusun Janji Maria Desa Bonani Dolok Kecamatan Purbatua 5 M X 3M = 15 M2)	15	Dinas Perkim
643	Tanah Bangunan Air lainnya	Dusun II Lumban Gereja Desa Aek Nauli III Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan MCK Dusun II Lumban Gereja Desa Aek Nauli III Kecamatan Sipahutar 6 M X 4M = 24 M2)	24	Dinas Perkim
644	Tanah Bangunan Air lainnya	Dusun mahansan Desa Sitolu Balal Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan MCK dusun mahansan Desa Sitolu Balal Kecamatan Purbatua 6 M X 3 M = 18 M2)	18	Dinas Perkim
645	Tanah Bangunan Air lainnya	Dusun banjar bangkudu Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan MCK dusun banjar bangkudu Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu 5 M X 3M = 15 M2)	15	Dinas Perkim
646	Tanah Bangunan Air lainnya	Dusun Namorabayo Desa Pardomuan Kec. Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan MCK Dusun Namorabayo Desa Pardomuan Kec. Simangumban 7 M X 4,5 M = 31,5 M2)	32	Dinas Perkim
647	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Hariara Nagodang Dusun/Lingkungan Hariara Nagodang Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung (PEN) (99 M x 2,5 M))	248	Dinas Perkim
648	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumban Holbung - Simataniari Desa Lumban Tonga-tonga Kec. Siborongborong (PEN) (439 M x 2,5 M))	1.098	Dinas Perkim
649	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. GKPS Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborong-borong (PEN) (446 M x 2,5 M))	1.115	Dinas Perkim
650	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pagaran (Tanah di bawah Pemb. Jln Lingkungan Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran (PEN) (420 M x 2,5 M) T.A.2020 10.500.000 ditambah (kapitalisasi) Tanah Di Bawah Lanjutan Pemb. Jln Lingkungan Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran (190 m x 2,5 m) T.A. 2021 4.750.000)	1.525	Dinas Perkim
651	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Sibatu-batu Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu (DID Tambahan Tahap II) (107,5 M x 3 M))	323	Dinas Perkim
652	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Hadataran Desa Lontung Jae 2 Kecamatan Garoga (PEN) (135 M x 2,5 M))	338	Dinas Perkim
653	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sosor Topi Aek Desa Parbaju Toruan Kec. Tarutung (PEN) (325 M x 2,5 M))	813	Dinas Perkim
654	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Banema Desa Sirajaoloan Kecamatan Tarutung (PEN) (174,5 M x 3 M))	524	Dinas Perkim
655	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Toruan tambang II Desa Parbubu Pea Kec. Tarutung (PEN) (151 M x 3 M))	453	Dinas Perkim
656	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Pearaja Desa Lontung jae 1 Kecamatan Garoga (PEN) (118,7 M x 2,5 M))	297	Dinas Perkim
657	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Lorong 2 Komplek Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung (PEN) (118 M x 3,5 M))	413	Dinas Perkim
658	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Desa Huta Bulu Kec. Siborongborong (PEN) (160 M x 2,5 M))	400	Dinas Perkim
659	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Jalan Damai - Jalan Sentosa Dan SMA 2 Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong (PEN) (212 M x 2,5 M))	530	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
660	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sihatandohan Desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong Dusun/Lingkungan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong (PEN) (205 M x 2,5 M) T.A. 2020 5.125.000 ditambah (Kapitalisasi) Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sihatandohan Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong (116 m x 2,5 m) T.A. 2021 2.900.000)	803	Dinas Perkim
661	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Desa Hutaraja Kec. Sipoholon (PEN) (97 M x 3 M))	291	Dinas Perkim
662	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon (PEN) (139 M x 2,5 M))	348	Dinas Perkim
663	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumban Holbung Lingkungan 2 Kelurahan situmeang habinsaran Kec. Sipoholon (PEN) (155 M x 3 M))	465	Dinas Perkim
664	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Suka Ramai Lumban Batu Desa Sidagal Kec. Siatasbarita (PEN) (245 M x 2,5 M))	613	Dinas Perkim
665	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 Sidabutar Desa Sisordak Kec. Parmonangan (PEN) (105 M x 3 M))	315	Dinas Perkim
666	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Huta Ompusunggu Desa Aritonang Kec. Muara (PEN) (145 M x 3 M))	435	Dinas Perkim
667	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Batu Binumbun Kec. Muara (PEN) (168 M x 3 M) T.A. 2020 10.080.000 ditambah (kapitalisasi) Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Batu Binumbun Kec. Muara (189,5 m x 3 m) T.A. 2021 11.370.000)	1.073	Dinas Perkim
668	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Simpang Opat - Simaremare Desa Huta Nagodang Kec. Muara (PEN) (199,5 M x 3 M))	599	Dinas Perkim
669	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Pea dan dusun Parhorboan Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (PEN) (187 M x 2,5 M))	468	Dinas Perkim
670	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Makmur Gang Sepakat Kelurahan Pasar Siborong-borong Kecamatan Siborong-borong (PEN) (236 M x 2,5 M))	590	Dinas Perkim
671	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Dusun Longat Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Dusun Longat Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu (94 M x 2 M))	188	Dinas Perkim
672	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Rura Pasar Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung (PEN) (138 M x 2,5 M))	345	Dinas Perkim
673	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Aek Siborgung Lumban Siantar I Desa Parbubu I Kec. Tarutung (PEN) (130 M x 3 M))	390	Dinas Perkim
674	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Desa Enda Portibi Kec. Siatasbarita (PEN) (137 M x 2,5 M))	343	Dinas Perkim
675	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 aek sibontar Desa Rura julu dolok Kec. Sipoholon (PEN) (126 M x 2 M))	252	Dinas Perkim
676	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Sitakka Desa Aek siansimun Kec. Tarutung (PEN) (103 M x 3 M))	309	Dinas Perkim
677	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Ragi idup Huta Parserahan Desa Hutatoruan I Kec. Tarutung (PEN) (172 M x 2,8 M))	482	Dinas Perkim
678	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Abadi (Hutabagasan 1-2,) Desa Sidagal Kec. Siatasbarita (PEN) (240 M x 2,5 M))	600	Dinas Perkim
679	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan (PEN) (105 M x 3 M))	315	Dinas Perkim
680	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutaraja Kecamatan Pangaribuan (PEN) (150,7 M x 3 M))	452	Dinas Perkim
681	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Simpang Hariara - Pertengahan Desa Pertengahan Kec. Parmonangan (PEN) (160 M x 2,5 M))	400	Dinas Perkim
682	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Desa Ranggitgit Kec. Parmonangan (PEN) (150 M x 2,5 M))	375	Dinas Perkim
683	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sigotom Dolok Nauli Kec. Pangaribuan (PEN) (204 M x 2,5 M))	510	Dinas Perkim
684	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Lumban Sidari Desa Batu Manumpak Kecamatan Pangaribuan (PEN) (181 M x 2,5 M))	453	Dinas Perkim
685	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Lingkungan Dusun/Lingkungan Perumahan Gg. Siantar Desa Hutatoruan IV Kec. Tarutung (PEN) (167 M x 2,5 M))	418	Dinas Perkim
686	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Onan Joro Desa Pardamean Nainggolan Kec. Pahae Jae (PEN) (172 M x 3 M))	516	Dinas Perkim
687	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 Aek Puli Desa Suka Maju Kec. Pahae Jae (PEN) (118 M x 3,5 M))	413	Dinas Perkim
688	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Gang Perdamaian Rangkea Sipagagan Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung (PEN) (164 M x 2,5 M))	410	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
689	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumbantobing Desa Lumban Tonga-tonga Kec. Siborongborong (PEN) (373 M x 2,5 M))	933	Dinas Perkim
690	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Tanjung Tonga-tonga menuju Pardangguran Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung (PEN) (184 M x 3,5 M))	644	Dinas Perkim
691	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sayurmatio Desa Parinsoran Kecamatan Garoga (PEN) (117,5 M x 3 M))	353	Dinas Perkim
692	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Ragi idup Huta Ganjang Desa Hutatoruan I Kec. Tarutung (PEN) (165 M x 3 M))	495	Dinas Perkim
693	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan dari Dusun Sigala-gala menuju Dusun napa Desa Sabungan Nihuta IV Kecamatan Sipahutar (PEN) (208 M x 3 M))	624	Dinas Perkim
694	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 tapianauli Desa Simorangkir julu Kec. Siatasbarita (PEN) (150 M x 2,5 M))	375	Dinas Perkim
695	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Nahornop Desa Banuaji II Kec. AdianKoting (PEN) (82 M x 2,5 M))	205	Dinas Perkim
696	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Jalan Kornelius Lumbantobing Lorong IX Dusun/Lingkungan Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung (PEN) (128,5 M x 3 M))	386	Dinas Perkim
697	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Lumban Raja Dusun/Lingkungan 1 Desa Bariba ni Aek Kec. Muara (PEN) (193,5 M x 2,5 M))	484	Dinas Perkim
698	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Huta Nagodang Kecamatan Muara (PEN) (145,1 M x 3 M))	435	Dinas Perkim
699	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumbansoit Desa Hutauruk Hasundutan Kec. Sipoholon (PEN) (90 M x 3,5 M))	315	Dinas Perkim
700	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Kompleks Perumahan KMB Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (PEN) (233 M x 2,5 M))	583	Dinas Perkim
701	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Firdaus Ujung Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung (PEN) (194 M x 3 M))	582	Dinas Perkim
702	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Desa Hutagalung Siwaluompu Kec. Tarutung (PEN) (175 M x 2,5 M))	438	Dinas Perkim
703	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Simangintal Desa Onan runggu 2 Kecamatan Sipahutar (PEN) (204 M x 3 M))	612	Dinas Perkim
704	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Silima Bahal Desa Onan Runggu 3 Kecamatan Sipahutar (PEN) (240 M x 2,5 M))	600	Dinas Perkim
705	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Dolok Nagodang Desa Pansur Batu I Kec. Adiankoting (PEN) (198 M x 2,5 M))	495	Dinas Perkim
706	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Kompleks Japaris Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung (PEN) (101 M x 2,5 M))	253	Dinas Perkim
707	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Sibuntuon Desa Sampagul Kec.Pangaribuan (PEN) (159,3 M x 3 M))	478	Dinas Perkim
708	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Handang Hoda Desa Sampagul Kec.Pangaribuan (PEN) (180,2 M x 2,5 M))	451	Dinas Perkim
709	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Menuju SD Rahut Bosi dan Pustu Rahut Bosi Desa Rahut Bosi Kec. Pangaribuan (PEN) (230,6 M x 2 M))	461	Dinas Perkim
710	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 Lbn Holbung-Naga Timbul Desa Nahornop Marsada Kec. Pahae Jae (PEN) (89 M x 3 M))	267	Dinas Perkim
711	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Sampuran Desa Parsaoran Samosir Kec. Pahae Jae (PEN) (170 M x 3 M))	510	Dinas Perkim
712	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae (PEN) (111 M x 2,5 M))	278	Dinas Perkim
713	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Sirihit-rihit Desa Setia Kec. Pahae Jae (PEN) (50 M x 2 M))	100	Dinas Perkim
714	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Lumban Nainggolan Desa Paniaran Kec. Siborongborong (PEN) (445 M x 2,5 M) T.A. 2020 22.250.000 ditambah (kapitalisasi) Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Lumban Nainggolan Desa Paniaran Kec. Siborongborong (206 m x 2,5 m) T.A. 2021 10.300.000)	1.628	Dinas Perkim
715	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pokki Desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong (PEN) (229 M x 2,9 M))	664	Dinas Perkim
716	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Hutagurgur Dusun III Desa Siborongborong II Kec. Siborongborong (PEN) (211 M x 2,5 M))	528	Dinas Perkim
717	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Simamora Desa Pantis Kec. Pahae Julu (PEN) (210 M x 2,5 M))	525	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
718	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Bulu Duri Desa Pagaranlambung II Kec. Adiankoting (PEN) (156 M x 2 M))	312	Dinas Perkim
719	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Huta Bulu Kec. Siborongborong (PEN) (132 M x 2,5 M))	330	Dinas Perkim
720	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Sosor Dangka Desa Paniaran Kec. Siborongborong (PEN) (246 M x 2,5 M))	615	Dinas Perkim
721	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Simatemate Desa Siborongborong II Kec. Siborongborong (PEN) (166 M x 3 M))	498	Dinas Perkim
722	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Sibagariang Dolok Desa Hutaraja Kec. Sipoholon (PEN) (88 M x 2,5 M))	220	Dinas Perkim
723	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Sumur Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung (PEN) (233 M x 2,5 M))	583	Dinas Perkim
724	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Sitio-tio Desa Aek Siansimun Kec. Tarutung (PEN) (204 M x 3 M))	612	Dinas Perkim
725	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Dolok Marurat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung (PEN) (98 M x 3 M))	294	Dinas Perkim
726	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Huta Parserahan Desa Sirajahutagalung Kec. Siatasbarita (PEN) (261 M x 2,2 M)T.A. 2020 20.671.200 ditambah (Kapitalisasi) Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Dusun II Huta Parserahan Desa/Kel Sirajahutagalung Kec. Siatasbarita (257,5 m x 3 m) T.A. 2021 27.810.000)	1.347	Dinas Perkim
727	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Dusun Hutaimbaru Desa Sitompul Kec. Siatasbarita (PEN) (148,9 M x 2,5 M))	372	Dinas Perkim
728	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Gonting Salak Kecamatan Garoga (PEN) (148 M x 2,5 M))	370	Dinas Perkim
729	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Dusun Mangiring Huta Harambir Desa Hutatoruan I Kec. Tarutung (PEN) (139,5 M x 2,5 M))	349	Dinas Perkim
730	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Pasar Siborong-borong Kecamatan Siborong-borong (PEN) (101 M x 3 M))	303	Dinas Perkim
731	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumban Patik Desa Lumban Tonga-tonga Kec. Siborongborong (PEN) (390 M x 2,5 M))	975	Dinas Perkim
732	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sigumbang Kec. Siborongborong (PEN) (246 M x 2,5 M))	615	Dinas Perkim
733	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Desa Sitabo-tabo Kec. Siborongborong (PEN) (211 M x 3 M))	633	Dinas Perkim
734	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pagaran (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Lingkungan Puskesmas Butar Desa Banualuhu Kecamatan Pagaran (PEN) (92 M x 2,5 M))	230	Dinas Perkim
735	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Paragat Desa Robean Kecamatan Purbatua (PEN) (256 M x 3 M))	768	Dinas Perkim
736	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Melon Dusun/Lingkungan Aek Ristop Kelurahan Partali Toruan Kec. Tarutung (PEN) (138,5 M x 3 M))	416	Dinas Perkim
737	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Hutaraja Hasundutan Kec. Sipoholon (PEN) (204 M x 3 M))	612	Dinas Perkim
738	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Desa pagarbatu Kec. Sipoholon (PEN) (136 M x 3 M))	408	Dinas Perkim
739	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Desa Sipahutar Kec. Sipoholon (PEN) (140 M x 3 M))	420	Dinas Perkim
740	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Toruan Desa Parbubu Pea Kec. Tarutung (PEN) (210 M x 2,5 M))	525	Dinas Perkim
741	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Dusun I Desa Simamora kecamatan Tarutung (PEN) (188 M x 3 M))	564	Dinas Perkim
742	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Janji Maria Desa Hapoltahan Kec. Tarutung (PEN) (164 M x 2,5 M))	410	Dinas Perkim
743	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Hutajulu Kec. Parmonangan (PEN) (163 M x 2,5 M) T.A.2020 2.913.625 ditambah (Kapitalisasi)Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Hutajulu Kec. Parmonangan (179 m x 2,5 m) T.A. 2021 3.199.625)	855	Dinas Perkim
744	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Sitapongan Desa Silali Toruan Kec. Muara (PEN) (155 M x 3 M))	465	Dinas Perkim
745	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Parsosoran Kecamatan Garoga (PEN) (110 M x 3 M))	330	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
746	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Jl. Tugu - Panti Asuhan dan Jl. Makmur Gg. Sepakat Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong (PEN) (210 M x 2,5 M))	525	Dinas Perkim
747	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Namora Desa Pansur napitu Kec. Siatasbarita (PEN) (166 M x 1,4 M))	232	Dinas Perkim
748	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Tugu Siregar Desa Bariba ni Aek Kecamatan Muara (PEN) (190 M x 3 M) T.A. 2020 11.400.000 Ditambah (Kapitalisasi) Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Tugu Siregar Desa Bariba ni Aek Kecamatan Muara (147 m x 3 m) T.A. 2021 8.820.000)	1.011	Dinas Perkim
749	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hutabagasan ke Hutagalung Desa Parbaju Toruan Kec. Tarutung (PEN) (216 M x 3 M))	648	Dinas Perkim
750	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I dan II Desa hutauruk Kec. Sipoholon (PEN) (152 M x 2,5 M))	380	Dinas Perkim
751	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Di Desa Parmanuhan Kecamatan Garoga (PEN) (169 M x 2,5 M))	423	Dinas Perkim
752	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Komplek Stadion Lorong IIAB Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung (PEN) (134 M x 2,5 M))	335	Dinas Perkim
753	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Desa Silali Toruan Kecamatan Muara (PEN) (189 M x 2,5 M))	473	Dinas Perkim
754	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Tapian Nauli Kec. Sipoholon (PEN) (192 M x 2,5 M))	480	Dinas Perkim
755	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 BLK Desa Sipahutar Kec. Sipoholon (PEN) (155 M x 3 M))	465	Dinas Perkim
756	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Pasir Dusun/Lingkungan 2 Desa Sibandang Kecamatan Muara (PEN) (175,4 M x 2 M))	351	Dinas Perkim
757	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan julu sosor topi aek Desa Parbubu pea Kec. Tarutung (PEN) (267 M x 3 M))	801	Dinas Perkim
758	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Sihujur Kecamatan Tarutung (PEN) (106 M x 2,5 M))	265	Dinas Perkim
759	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Ambar Hoda Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar (PEN) (233 M x 3 M))	699	Dinas Perkim
760	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun 2 Pagaran Dame Desa Hutatoruan 8 Kecamatan Tarutung (PEN) (138 M x 3 M))	414	Dinas Perkim
761	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 Lbn Maradang Desa Sosunggulon Kec. Tarutung (PEN) (124 M x 3 M))	372	Dinas Perkim
762	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan dari Pargadongan Hutabagasan I ke Huta Dolok Desa Tapian nauli I Kecamatan Sipahutar (PEN) (280 M x 2,5 M))	700	Dinas Perkim
763	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 marsaidbosi Desa Simorangkir julu Kec. Siatasbarita (PEN) (181 M x 3 M))	543	Dinas Perkim
764	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 1 golat Desa Simorangkir julu Kec. Siatasbarita (PEN) (58,2 M x 2 M))	116	Dinas Perkim
765	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Huta parmulaan Desa Sirajahutagalung Kec. Siatasbarita (PEN) (186,5 M x 3 M))	560	Dinas Perkim
766	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Ompuraja suhu Desa Sangkaran Kec. Siatasbarita (PEN) (149 M x 2,5 M))	373	Dinas Perkim
767	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Sejahtera Desa Pansur batu Kec. AdianKoting (PEN) (115 M x 2,5 M))	288	Dinas Perkim
768	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Dusun Parik Desa Manalu Purba Kec. Parmonangan (PEN) (160 M x 2,5 M))	400	Dinas Perkim
769	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I dan II Desa Ranggitgit Kec. Parmonangan (PEN) (100 M x 2,9 M))	290	Dinas Perkim
770	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Lokasi Bira-bira sampai Bulu Hela Dusun/Lingkungan 1 Desa Sibandang Kec. Muara (PEN) (184 M x 2,5 M))	460	Dinas Perkim
771	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I (Parsibarungan Jae) Desa Parsibarungan Kec. Pangaribuan (PEN) (204,2 M x 2,5 M))	511	Dinas Perkim
772	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Parurean Desa Parsadaan Kecamatan Pangaribuan (PEN) (170,8 M x 2,5 M))	427	Dinas Perkim
773	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Pagaran Dolok Lumban Dongoran Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan (PEN) (158,5 M x 2,5 M))	396	Dinas Perkim
774	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Tambunan Desa Pantis Kec. Pahae Julu (PEN) (181 M x 3 M))	543	Dinas Perkim
775	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Dolok Desa Simasom Kec. Pahae Julu (PEN) (91 M x 3 M))	273	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
776	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan jalan pendidikan Kelurahan Pasar sarulla Kec. Pahae Jae (PEN) (71 M x 2 M))	142	Dinas Perkim
777	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Pangaloan Desa Paniaran Kec. Siborongborong (PEN) (248 M x 2,5 M))	620	Dinas Perkim
778	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Desa Bahal Batu III Kec. Siborongborong (PEN) (223 M x 2,5 M))	558	Dinas Perkim
779	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong (PEN) (185 M x 3 M))	555	Dinas Perkim
780	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pagaran (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Simamora Hasibuan Kec. Pagaran (PEN) (230 M x 2,5 M) T.A. 2020 27.600.000 ditambah (Kapitalisasi) Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Simamora Hasibuan Kecamatan Pagaran (241 m x 2,5 m) T.A.2021 28.920.000)	1.178	Dinas Perkim
781	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di desa huta nagodang Kecamatan Purbatua (PEN) (186 M x 3 M))	558	Dinas Perkim
782	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 1 dolok Desa Lumban siagian jae Kec. Siatasbarita (PEN) (184 M x 2,5 M))	460	Dinas Perkim
783	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Parhudonan Desa Sibalanga Kecamatan Garoga (PEN) (194 M x 2,5 M))	485	Dinas Perkim
784	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simpang Bolon Kecamatan Garoga (PEN) (196 M x 2,5 M))	490	Dinas Perkim
785	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III siarang arang Desa parbaju tonga Kec. Tarutung (PEN) (213 M x 2,5 M))	533	Dinas Perkim
786	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Desa Parbaju Tonga Kec. Tarutung (PEN) (85 M x 2 M))	170	Dinas Perkim
787	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Siregar Dolok Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (PEN) (122 M x 2,5 M))	305	Dinas Perkim
788	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Lumban Dolok Huta Bagasan, Huta Silom dan Lumban Huta Gurgur Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (PEN) (186 M x 2,5 M))	465	Dinas Perkim
789	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Lobu Harambir Desa Enda Portibi Kec. Siatasbarita (PEN) (242 M x 2,5 M))	605	Dinas Perkim
790	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan lumbanrihit Desa Hutauruk Hasundutan Kec. Sipoholon (PEN) (169 M x 2,5 M))	423	Dinas Perkim
791	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 1 adian jagung Desa Rura julu dolok Kec. Sipoholon (PEN) (155 M x 2,5 M))	388	Dinas Perkim
792	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon (PEN) (208 M x 2,5 M))	520	Dinas Perkim
793	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Desa Situmeang hasundutan Kec. Sipoholon (PEN) (244 M x 2,5 M))	610	Dinas Perkim
794	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 1 Desa Sibandang Kecamatan Muara (PEN) (204 M x 1 M))	204	Dinas Perkim
795	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa simanungkalit Kec. Sipoholon (PEN) (189 M x 2,5 M))	473	Dinas Perkim
796	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Parbubu II Kec. Tarutung (PEN) (245 M x 3 M))	735	Dinas Perkim
797	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 1 Hutabolon Desa Sitampurung Kec. Tarutung (PEN) (283 M x 2,5 M))	708	Dinas Perkim
798	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan dari Dusun Tapian Nauli Ke Lumban Onan Desa Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar (PEN) (191 M x 2,5 M))	478	Dinas Perkim
799	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Hutajulu Balik Desa Hutajulu Kec. Parmonangan (PEN) (152 M x 2,5 M))	380	Dinas Perkim
800	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun 1 menuju Dusun 2 Desa Hutajulu Parbalik Kec. Parmonangan (PEN) (147 M x 2,5 M))	368	Dinas Perkim
801	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Mangga Dusun/Lingkungan Aek Ristop Kelurahan Partali Toruan Kec. Tarutung (PEN) (135,5 M x 3 M))	407	Dinas Perkim
802	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun 1 menuju Dusun 3 Desa Hutajulu Parbalik Kec. Parmonangan (PEN) (132 M x 2,5 M))	330	Dinas Perkim
803	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Parbubu I Desa Pansur batu II Kec. AdianKoting (PEN) (115 M x 2,5 M))	288	Dinas Perkim
804	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lobusijambang Desa Siantar Naipospos Kec. AdianKoting (PEN) (132 M x 2,5 M))	330	Dinas Perkim
805	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Harambir Dan Lumban Samosir Desa Untemungkur Kecamatan Muara (PEN) (89 M x 3 M))	267	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
806	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Purba Dolok Kec. Parmonangan (PEN) (170 M x 3 M))	510	Dinas Perkim
807	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Panguhalan Dusun/Lingkungan 3 Desa Papande Kec. Muara (PEN) (182 M x 2,5 M))	455	Dinas Perkim
808	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Parrian menuju Siregar Toruan Dusun/Lingkungan 1 Desa Papande Kec. Muara (PEN) (181,8 M x 3 M))	545	Dinas Perkim
809	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rahut Bosi Onan Kec. Pangaribuan (PEN) (202 M x 2,5 M))	505	Dinas Perkim
810	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Tapian Nauli Kelurahan situmeang habinsaran Kec. Sipoholon (PEN) (192 M x 3 M))	576	Dinas Perkim
811	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Huta Bagasan Desa Simataniari Kec. Pahae Julu (PEN) (133 M x 2 M))	266	Dinas Perkim
812	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 1 Aek Bulu Desa Nahornop Marsada Kec. Pahae Jae (PEN) (168 M x 3 M))	504	Dinas Perkim
813	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun III Simarpinggan Desa Sitolu Ompu Kec. Pahae Jae (PEN) (176 M x 2,5 M))	440	Dinas Perkim
814	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-borong (PEN) (244 M x 2,5 M))	610	Dinas Perkim
815	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Sitabo-tabo Kec. Siborongborong (PEN) (248 M x 2,5 M))	620	Dinas Perkim
816	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Huta Godung Desa Selamat Kec. Purbatua (PEN) (147,3 M x 3 M))	442	Dinas Perkim
817	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Penghubung Dusun I Ke Dusun II Desa Robean Kecamatan Purbatua (PEN) (55 M x 2,9 M))	160	Dinas Perkim
818	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Saroha Desa Sangkaran Kec. Siatasbarita (PEN) (130 M x 3 M))	390	Dinas Perkim
819	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumban Simatupang Desa Lobuhole Kec. Siatasbarita (PEN) (150 M x 3 M))	450	Dinas Perkim
820	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lobu Sihim Desa Dolok Sanggul Kec. Simangumban (PEN) (106,5 M x 3 M))	320	Dinas Perkim
821	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong (PEN) (399 M x 2,5 M))	998	Dinas Perkim
822	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Parbaju Toruan Kecamatan Tarutung (PEN) (321 M x 2,5 M))	803	Dinas Perkim
823	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Sitampurung Toruan Desa Sitampurung Kec. Siborongborong (PEN) (231 M x 2,5 M))	578	Dinas Perkim
824	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Parmonangan - Sitedak Dusun/Lingkungan 3 Desa Bariba ni Aek Kec. Muara (PEN) (189 M x 3 M))	567	Dinas Perkim
825	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Hutasihilap - Lumban Silintong Desa Huta nagodang Kec. Muara (PEN) (187 M x 2,5 M))	468	Dinas Perkim
826	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Lumban Dolok Najagar dan Lumban Huta Ginjang Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (PEN) (283 M x 2,5 M))	708	Dinas Perkim
827	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Desa hutauruk hasundutan Kec. Sipoholon (PEN) (156 M x 2,5 M))	390	Dinas Perkim
828	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Aekboktar Desa Rura julu toruan Kec. Sipoholon (PEN) (179 M x 2,5 M))	448	Dinas Perkim
829	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 1 Desa Rura julu toruan Kec. Sipoholon (PEN) (180 M x 2,5 M))	450	Dinas Perkim
830	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Aek Rara Lumban Batu Desa Parbubu I Kec. Tarutung (PEN) (167,5 M x 3,5 M))	586	Dinas Perkim
831	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Parratusan Desa Lontung Jae 2 Kecamatan Garoga (PEN) (140,5 M x 2,5 M))	351	Dinas Perkim
832	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Huta Horisan Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung (PEN) (104,7 M x 3 M))	314	Dinas Perkim
833	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 Desa Aek Raja Kec. Parmonangan (PEN) (238 M x 2,5 M))	595	Dinas Perkim
834	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Aek Ristop Kelurahan Partali Toruan Kec. Tarutung (PEN) (126,2 M x 3 M))	379	Dinas Perkim
835	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Sitorngom Desa Pagaranlambung III Kec. Adiankoting (PEN) (184 M x 2,5 M))	460	Dinas Perkim
836	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Sinora Desa Pardomuan Nauli Kec. AdianKoting (PEN) (96 M x 3 M))	288	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
837	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Simpang Pandan-Parladangan Sitedak Desa Untemungkur Kecamatan Muara (PEN) (157 M x 3 M))	471	Dinas Perkim
838	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Silantom Tonga Kec. Pangaribuan (PEN) (130 M x 3 M))	390	Dinas Perkim
839	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Sibudil Desa Batu Manumpak Kecamatan Pangaribuan (PEN) (148,2 M x 2,5 M))	371	Dinas Perkim
840	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Hapesong Desa Lontung Jae 2 Kecamatan Garoga (PEN) (132 M x 2,5 M))	330	Dinas Perkim
841	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Purbatua Kecamatan Pangaribuan (PEN) (189,5 M x 2,5 M))	474	Dinas Perkim
842	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II (Huta Sidagal) Desa Parsorminan I Kec. Pangaribuan (PEN) (146,7 M x 2,5 M))	367	Dinas Perkim
843	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I (Huta Tonga) Desa Parsorminan I Kec. Pangaribuan (PEN) (198 M x 2,5 M))	495	Dinas Perkim
844	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Parsibarungan Desa Parsibarungan Kec. Pangaribuan (PEN) (154,4 M x 3 M))	463	Dinas Perkim
845	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung (PEN) (175 M x 2,5 M))	438	Dinas Perkim
846	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumban Garaga Ujung Desa Parsaoran Nainggolan Kec. Pahae Jae (PEN) (197 M x 2,5 M))	493	Dinas Perkim
847	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 1 Tarutung Dua Desa Suka Maju Kec. Pahae Jae (PEN) (359 M x 1,5 M))	539	Dinas Perkim
848	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Ambar Dusun III Desa Robean Kecamatan Purbatua (PEN) (200 M x 2,5 M))	500	Dinas Perkim
849	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Huta Lintong Desa Purbatua Kec. Purbatua (PEN) (190 M x 2,5 M))	475	Dinas Perkim
850	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun III Aek Las Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban (PEN) (104 M x 3 M))	312	Dinas Perkim
851	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan III Jalan Sipuruk Purik Desa Purbatua Kec. Purbatua (PEN) (198 M x 2,5 M))	495	Dinas Perkim
852	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 Desa Situmeang hasundutan Kec. Sipoholon (PEN) 244 M x 2,5 M)	610	Dinas Perkim
853	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Kornelius Lumbantobing Ujung Dusun/Lingkungan Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung (PEN) 110,5 M x 3 M)	332	Dinas Perkim
854	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Desa Hutaraja Hasundutan Kec. Sipoholon (PEN) 243 M x 2,5 M)	608	Dinas Perkim
855	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumban lobu dan Hutabagasan Desa Hutauruk Kec. Sipoholon (PEN) 159,5 M x 2,5 M)	399	Dinas Perkim
856	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Sijambur dan Pangurasan Desa Hutauruk Kec. Sipoholon (PEN) 198 M x 2,9 M)	574	Dinas Perkim
857	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan II Desa Pagarbatu Kec. Sipoholon (PEN) 167 M x 3 M)	501	Dinas Perkim
858	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumban Sitio-tio Lingkungan 2 Kelurahan situmeang habinsaran Kec. Sipoholon (PEN) 129 M x 2,5 M)	323	Dinas Perkim
859	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Pea Na Huncus Dusun/Lingkungan II Desa Hutagalung Siwaluompu Kec. Tarutung (PEN) 181 M x 3 M)	543	Dinas Perkim
860	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Sibalanga Julu Desa Sibalanga Kec. AdianKoting (PEN) 205 M x 3 M)	615	Dinas Perkim
861	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lobu Pining 1 Desa Lobu Pining Kec. Pahae Julu (PEN) 333 M x 2 M)	666	Dinas Perkim
862	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Simasom Dusun/Lingkungan Toruan Desa Simasom Kec. Pahae Julu (PEN) 165 M x 3 M)	495	Dinas Perkim
863	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Huta namora, Dusun II Desa Lobuhole Kec. Siatasbarita (PEN) 151,2 M x 3 M)	454	Dinas Perkim
864	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 lumban pea Desa Lumban siagian jae Kec. Siatasbarita (PEN) 194 M x 2,5 M)	485	Dinas Perkim
865	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Lumban Hariara Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatasbarita (PEN) 160 M x 3 M)	480	Dinas Perkim
866	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Lumban Sinaga Desa Suka Maju Kec. Pahae Jae (PEN) 242 M x 2,5 M)	605	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
867	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Aritonang Kec. Muara (PEN) 238 M x 2,5 M T.A. 2020 21.420.000 ditambah (kapitalisasi) Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Aritonang Kecamatan Muara (243 m x 2,5 m) T.A. 2021 21.870.000)	1.203	Dinas Perkim
868	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Lumban Garaga Kec. Pahae Julu (PEN) 147 M x 3 M)	441	Dinas Perkim
869	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Huta Tonga Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban (PEN) 135 M x 3 M)	405	Dinas Perkim
870	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Huta Padang Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban (PEN) 188 M x 2,5 M)	470	Dinas Perkim
871	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Siria-ria Desa Nahornop Marsada Kec. Pahae Jae (PEN) 120 M x 2,5 M)	300	Dinas Perkim
872	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Siburian Dusun 1 Siburian Desa Parsaoran Samosir Kec. Pahae Jae (PEN) 219 M x 2,5 M)	548	Dinas Perkim
873	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I dan II Desa Sitolu Ompu Kec. Pahae Jae (PEN) 219 M x 2,5 M)	548	Dinas Perkim
874	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan PARBUBU II Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung (PEN) 285,5 M x 2 M)	571	Dinas Perkim
875	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Desa Aek Raja Kec. Parmonangan (PEN) 106 M x 3 M)	318	Dinas Perkim
876	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan AdianKoting (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Hutaharambir Desa Adiankoting Kec. AdianKoting (PEN) 250,3 M x 2 M)	501	Dinas Perkim
877	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Dusun Sihaporas Desa Manalu Purba Kec. Parmonangan (PEN) 183 M x 3 M)	549	Dinas Perkim
878	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sampuran Kecamatan Muara (PEN) 183 M x 2 M)	366	Dinas Perkim
879	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Lumban Garaga Desa Dolok Sanggul Kec. Simangumban (PEN) 177 M x 2,5 M)	443	Dinas Perkim
880	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lobu Siregar II Kecamatan Siborong-borong (PEN) 250 M x 2,5 M)	625	Dinas Perkim
881	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Hutabaginda Dusun/Lingkungan Hutabaginda Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung (PEN) 190,5 M x 2,5 M)	476	Dinas Perkim
882	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Huta Holbung Desa Selamat Kec. Purbatua (PEN) 158,5 M x 3 M)	476	Dinas Perkim
883	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Parmonangan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan 3 Desa Hutatua Kec. Parmonangan (PEN) 222 M x 1,5 M)	333	Dinas Perkim
884	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Hutagurgur menuju Dusun Namorabayo Desa Pardomuan Kec. Simangumban (PEN) 62,5 M x 2,5 M)	156	Dinas Perkim
885	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Desa Hutabarat Kec. Pahae Julu (PEN) 190 M x 3 M)	570	Dinas Perkim
886	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lumban Sinaga Kec. Pangaribuan (PEN) 131 M x 3 M)	393	Dinas Perkim
887	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan dari Desa Parsosoran menuju Simataniari Kecamatan Garoga (PEN) 335 M x 2,5 M)	838	Dinas Perkim
888	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Parbaraan Desa Sitolu Bahal Kec. Purbatua (PEN) 152 M x 2 M)	304	Dinas Perkim
889	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Pollak Ri Desa Sidua Bahal Kec. Purbatua (PEN) 217 M x 1,4 M)	304	Dinas Perkim
890	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban (PEN) 96,5 M x 2,5 M)	241	Dinas Perkim
891	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bonani Dolok Kecamatan Purbatua (PEN) 210 M x 2,5 M)	525	Dinas Perkim
892	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan Hapundung Desa Dolok Sanggul Kec. Simangumban (PEN) 134,5 M x 3 M)	404	Dinas Perkim
893	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun/Lingkungan I Hutabagasan Desa Sirajahutagalung Kec. Siatasbarita (PEN) 193,7 M x 3 M)	581	Dinas Perkim
894	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Komplek Asih Permata Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung 96,2 M x 5 M T.A. 2020 137.085.000 Ditambah (kapitalisasi) Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Komplek Asih Permata Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (169 m x 3 m) T.A. 2021 144.495.000)	988	Dinas Perkim
895	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Penataan Lingkungan Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong (93 M x 1,1 M))	102	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
896	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Rehabilitasi Drainase Lingkungan Tangsi Dusun/Lingkungan Tangsi Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung (PEN) (36 M x 0,8 M))	29	Dinas Perkim
897	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Pea Rihit Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung (PEN) (83 M x 0,8 M))	66	Dinas Perkim
898	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 Silangkitang rura Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae (PEN) (61 M x 0,8 M))	49	Dinas Perkim
899	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Pahae Jae (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun/Lingkungan 2 huta bagot Desa Sigurung gurung Kec. Pahae Jae (PEN) (118 M x 0,8 M))	94	Dinas Perkim
900	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun/Lingkungan 1 gonting pege Desa simanampang Kec. Siatasbarita (PEN) (218 M x 0,8 M))	174	Dinas Perkim
901	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Belakang BLK Kec. Sipoholon (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Belakang BLK Kec. Sipoholon (167 m x 3 m))	501	Dinas Perkim
902	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Banuaji IV Kecamatan Adiankoting (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Banuaji IV Kecamatan Adiankoting (215 m x 3 m))	645	Dinas Perkim
903	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Gonting Kec. Garoga (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Gonting Kec. Garoga (136,9 m x 2,5 m))	342	Dinas Perkim
904	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung (123,4 m x 3 m))	370	Dinas Perkim
905	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Dolok (III) Sigarigar Desa Simasom Kecamatan Pahae Julu (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Dolok (III) Sigarigar Desa Simasom Kecamatan Pahae Julu (158 m x 3 m))	474	Dinas Perkim
906	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun I Purbatua Desa Sisordak Kec. Parmonangan (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun I Purbatua Desa Sisordak Kec. Parmonangan (150 m x 3 m))	450	Dinas Perkim
907	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Sigambo-gambo Desa Lobu Siregar II Kecamatan Siborongborong (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Sigambo-gambo Desa Lobu Siregar II Kecamatan Siborongborong (131 m x 3 m))	393	Dinas Perkim
908	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Jl.Gereja GKPI Kecamatan Sipahutar (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Jl.Gereja GKPI Kecamatan Sipahutar (116,5 m x 2,5 m))	291	Dinas Perkim
909	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lumban Pareme Dusun Kopi Desa Sipultak Kec. Pagaran (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Di Lumban Pareme Dusun Kopi Desa Sipultak Kec. Pagaran (124,8 m x 2,5 m))	312	Dinas Perkim
910	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	SMPN 2 Purbatua Kecamatan Purbatua (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di SMPN 2 Purbatua Kecamatan Purbatua (203 m x 0,5 m))	102	Dinas Perkim
911	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Dapdap Desa Pohan Tonga Kec. Siborongborong (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Dapdap Desa Pohan Tonga Kec. Siborongborong (152,5 m x 3 m))	458	Dinas Perkim
912	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Gang Horas Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Horas Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (107 m x 3 m))	321	Dinas Perkim
913	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Gang Saroha Jl. Balige Desa Siraja Oloan Kec. Tarutung (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Saroha Jl. Balige Desa Siraja Oloan Kec. Tarutung (89 m x 3 m))	267	Dinas Perkim
914	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Huta Sosor Lobu Sikkam Desa Lobu Sikkam Kec. Sipoholon (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Sosor Lobu Sikkam Desa Lobu Sikkam Kec. Sipoholon (310 m x 2,54 m))	787	Dinas Perkim
915	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Lumban Jabi-Jabi Dusun III Pokki Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Jabi-Jabi Dusun III Pokki Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong (383 m x 2,5 m))	958	Dinas Perkim
916	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju Lumban Haroroan Dusun Tapian Nauli Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Lumban Haroroan Dusun Tapian Nauli Desa Hutaginjang Kecamatan Muara (190,8 m x 2,5 m))	477	Dinas Perkim
917	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju TPU Desa Padang Parsadaan Kecamatan Pangaribuan (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan menuju TPU Desa Padang Parsadaan Kecamatan Pangaribuan (122 m x 3 m))	366	Dinas Perkim
918	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Dolok Sanggul Kec. Simangumban (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dolok Sanggul Kec. Simangumban (172 m x 3 m))	516	Dinas Perkim
919	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Dolok Saut Kec. Simangumban (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Dolok Saut Kec. Simangumban (149 m x 2,5 m))	373	Dinas Perkim
920	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitompul Kecamatan Siatabarita (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sitompul Kecamatan Siatabarita (247 m x 3 m))	741	Dinas Perkim
921	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Kawasan BUMDES Dame Sumurung Desa Hutatoruan I Kec. Tarutung. (Tanah Di Bawah Pembangunan jalan Lingkungan Kawasan BUMDES Dame Sumurung Desa Hutatoruan I Kec. Tarutung. (98 m x 3 m))	294	Dinas Perkim
922	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Menuju Lapangan Serbaguna di Desa Janji Nauli Kecamatan Purbatua (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Lapangan Serbaguna di Desa Janji Nauli Kecamatan Purbatua (82 m x 3 m))	246	Dinas Perkim
923	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Silombu Hutakobun Dusun III Desa Bariba ni Aek Kec. Muara (Tanah Di Bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Silombu Hutakobun Dusun III Desa Bariba ni Aek Kec. Muara (200,5 m x 3 m))	602	Dinas Perkim
924	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Setia Kecamatan Pahae Jae. (Tanah Di Bawah Penataan Lingkungan di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae. Paving Block (67 m x 4 m))	268	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
925	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Dusun Oppu Sunggu Desa Aritonang Kecamatan Muara (Tanah Di Bawah Penataan Lingkungan di Dusun Oppu Sunggu Desa Aritonang Kecamatan Muara. Paving Block (153 m x 2 m))	306	Dinas Perkim
926	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon (Tanah Di Bawah Penataan Lingkungan di Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon. Paving Block (16 m x 12,5 m))	200	Dinas Perkim
927	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobu Sunut Kec. Parmonangan (Tanah Di Bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lobu Sunut Kec. Parmonangan (107 m x 2,5 m) Bangunan Baru, bukan lanjutan)	268	Dinas Perkim
928	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Dusun Sirpang Bolon Desa Simpang Bolon Kecamatan Garoga (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Dusun Sirpang Bolon Desa Simpang Bolon Kecamatan Garoga (214,2 m x 1 m))	214	Dinas Perkim
929	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Dusun Pagar Tua - Sayurmatio Desa Parinsoran Kecamatan Garoga (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Pagar Tua - Sayurmatio Desa Parinsoran Kecamatan Garoga (192,8 m x 1 m))	193	Dinas Perkim
930	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Siopat Bahal Kecamatan Pahae Jae (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Siopat Bahal Kecamatan Pahae Jae (315,5 m x 0,8 m))	252	Dinas Perkim
931	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Jurusan Aek Siansimun - Sait nihuta Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Jurusan Aek Siansimun - Sait nihuta Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung (138 m x 1 m))	138	Dinas Perkim
932	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Hutatoruan III. Kec. Tarutung (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Hutatoruan III. Kec. Tarutung (89,8 m x 0,8 m))	72	Dinas Perkim
933	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Jalan DR. TD. Pardede Gang Merpati Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Jalan DR. TD. Pardede Gang Merpati Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (219 m x 0,8 m))	175	Dinas Perkim
934	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Huta Julu Parbalik Kecamatan Parmonangan (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan desa Huta Julu Parbalik Kecamatan Parmonangan (111,7 m x 0,9 m))	101	Dinas Perkim
935	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pintu Bosi Desa Situmeang Hasundutan Kecamatan Sipoholon (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Pintu Bosi Desa Situmeang Hasundutan Kecamatan Sipoholon (205 m x 0,8 m))	164	Dinas Perkim
936	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sabungan ni huta III Kec. Sipahutar (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Sabungan ni huta III Kec. Sipahutar (130 m x 0,9 m))	117	Dinas Perkim
937	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Nahornop Marsada Kec. Pahae Jae (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Nahornop Marsada Kec. Pahae Jae (118 m x 1 m))	118	Dinas Perkim
938	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Hariara Nagodang STM Asido Kel. Hutatoruan IX Kec. Tarutung (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Hariara Nagodang STM Asido Kel. Hutatoruan IX Kec. Tarutung (144 m x 0,8 m))	115	Dinas Perkim
939	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Dari gereja HKBP Doloksaribu ke Dusun I (Simarbingkulan)/SMP N1 Kec. Pagaran (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase lingkungan dari gereja HKBP Doloksaribu ke Dusun I (Simarbingkulan)/SMP N1 Kec. Pagaran (151 m x 1,3 m))	196	Dinas Perkim
940	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Aek Nauli 4 Kecamatan Sipahutar (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Aek Nauli 4 Kecamatan Sipahutar (130 m x 0,9 m))	117	Dinas Perkim
941	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Jl. Ketua Peter Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborongborong (Tanah Di Bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Jl. Ketua Peter Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborongborong (93,5 m x 0,8 m))	75	Dinas Perkim
942	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong (Tanah Di Bawah Penyehatan Lingkungan Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong. Drainase (134 m x 0,8 m))	107	Dinas Perkim
943	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Silait-lait, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan HKBP Silait-lait Desa Silait-lait Kecamatan Siborongborong (177,3 m x 0,9 m))	160	Dinas Perkim
944	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Kompleks Fatimah Regency Kecamatan Sipoholon (146 m x 3,7 m))	540	Dinas Perkim
945	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Dusun 1 Lumban Ratus Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatasbarita (74 m x 1,5 m))	111	Dinas Perkim
946	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sangkaran, Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun III Sosor Pea Desa Sangkaran Kecamatan Siatasbarita (136 m x 1,1 m))	150	Dinas Perkim
947	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita (113 m x 1 m))	113	Dinas Perkim
948	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sidagal, Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Jl. Gereja HKI Hutabagasan Desa Sidagal Kecamatan Siatasbarita (125 m x 2,5 m))	313	Dinas Perkim
949	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun 3 Purbatua Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatasbarita (106 m x 3 m))	318	Dinas Perkim
950	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun 1 Simondohondok Desa Sitompul Kecamatan Siatasbarita (130 m x 3 m))	390	Dinas Perkim
951	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sangkaran, Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Lumban Pinasa Desa Sangkaran Kecamatan Siatasbarita (97 x 2,5 m))	243	Dinas Perkim
952	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Huta Sosor Desa Sirajahutagalung Kecamatan Siatasbarita (153 x 2,5 m))	383	Dinas Perkim
953	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun II Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatasbarita (150 m x 3 m))	450	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
954	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutagalung Siwaluompu Kecamatan Tarutung (74 m x 2,7 m))	200	Dinas Perkim
955	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutatoruan III, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutatoruan III Kecamatan Tarutung (139 x 2,5 m))	348	Dinas Perkim
956	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parbubu Pea, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Toruan Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung (130 m x 3 m))	390	Dinas Perkim
957	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simamora, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jl. Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung (181 m x 3 m))	543	Dinas Perkim
958	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Siraja Oloan Kecamatan Tarutung (104,8 m x 2,5 m))	262	Dinas Perkim
959	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun 3 Nahornop Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung (92,5 m x 3 m))	278	Dinas Perkim
960	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutatoruan I, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Kampung Ikan Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung (3 m x 64 m))	192	Dinas Perkim
961	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan di Jl. TD Pardede Gang Saroha Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung (80 m x 3,6 m))	288	Dinas Perkim
962	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parbaju Toruan, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DESA PARBAJU TORUAN KECAMATAN TARUTUNG (3m x 35m dan 4m x 67m))	373	Dinas Perkim
963	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di STM Asido Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung (68 m x 3 m))	204	Dinas Perkim
964	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Perumahan Asih Permata Kecamatan Tarutung (128 x 3,7 m))	474	Dinas Perkim
965	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Parbaju Tonga, Kecamatan Tarutung (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Di Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung (117 m x 3 m))	351	Dinas Perkim
966	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Parhorboan, Kecamatan Pagaran (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Pea Sigara Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran (98,5 m x 1 m))	99	Dinas Perkim
967	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Gereja GPDI di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran (95,5 m x 3 m))	287	Dinas Perkim
968	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Parbotihan Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon (70,5 m x 3,5 m))	247	Dinas Perkim
969	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju BLK Silangkitang Kecamatan Sipoholon (94 m x 2,5 m))	235	Dinas Perkim
970	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Tornauli Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon (130 m x 3 m))	390	Dinas Perkim
971	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Jalan Martabe 3 Silangkitang Kec. Sipoholon (128,5 m x 3,5 m))	450	Dinas Perkim
972	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Lontung Jae I, Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Ramba Siala Desa Lontung Jae 1 Kecamatan Garoga (189 m x 0,8 m))	151	Dinas Perkim
973	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lontung Jae I, Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan menuju SMP 6 Garoga Kecamatan Garoga (114 m x 2,5 m))	285	Dinas Perkim
974	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Garoga Sibargot, Kecamatan Garoga (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga (129 m x 3,0 m))	387	Dinas Perkim
975	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan (119 m x 0,8 m))	95	Dinas Perkim
976	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Parsorminan I, Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Parsorminan 1 Kecamatan Pangaribuan (134 m x 0,9 m))	121	Dinas Perkim
977	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Silantom Tonga Kecamatan Pangaribuan (123 m x 0,8 m))	98	Dinas Perkim
978	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Rahut Bosi Onan, Kecamatan Pangaribuan (Tanah di bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Rahut Bosi Onan Kecamatan Pangaribuan (110 m x 2,5 m))	275	Dinas Perkim
979	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Onan Runggu III, Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Pasar Desa Onan Runggu 3 Kecamatan Sipahutar (147 m x 0,8 m))	118	Dinas Perkim
980	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sabungan Nihuta II, Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Siparendean Kecamatan Sipahutar (118 m x 1,1 m))	130	Dinas Perkim
981	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Onan Runggu II, Kecamatan Sipahutar (Tanah di bawah Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Onan Runggu 2 Kecamatan Sipahutar)	440	Dinas Perkim
982	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitanggor, Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Paving Block di Dusun Tingka-tingka Desa Sitanggor Kecamatan Muara)	374	Dinas Perkim
983	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Unte Mungkur, Kecamatan Muara (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Untemungkur Kecamatan Muara (160,3 m x 3 m))	481	Dinas Perkim
984	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Dusun 3 Ambar Dapdap Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong (152,5 m x 0,65 m))	99	Dinas Perkim

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
985	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong (176 m x 0,9 m))	158	Dinas Perkim
986	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Op. Oloan Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong (92,5 m x 3 m))	278	Dinas Perkim
987	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lobu Siregar 2 Kecamatan Siborongborong (170,5 m x 2,5 m))	426	Dinas Perkim
988	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Gereja HKBP Sabungan Kecamatan Siborongborong (92,2 m x 3 m))	277	Dinas Perkim
989	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangiunan Jalan Lingkungan menuju perumahan Koramil kecamatan Siborongborong (111 m x 2,5 m))	278	Dinas Perkim
990	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun 3 Lumban Sibabiat Desa Lobu Siregar 2 Kecamatan Siborongborong (250 m x 2,5 m))	625	Dinas Perkim
991	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sigumbang, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Parhasioran Desa Sigumbang Kecamatan Siborongborong (130 m x 2,5 m))	325	Dinas Perkim
992	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Huta Barat, Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Longat Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu (67 m x 2 m))	134	Dinas Perkim
993	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Dolok, Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Pahae Julu (89 m x 2,5 m))	223	Dinas Perkim
994	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simardangiang Kecamatan Pahae Julu (28 x 3 m dan 57 x 1,5 m))	170	Dinas Perkim
995	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Lumban Garaga, Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Di Desa Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu (107,5 m x 2 m))	215	Dinas Perkim
996	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Desa Lumban Gaol, Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Penataan Lingkungan di Desa Lumban Gaol Kecamatan Pahae Julu (TPT sepanjang 17 m, Drainase sepanjang 114 m dan plat beton bertulang sebanyak 100 unit))	108	Dinas Perkim
997	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simasom, Kecamatan Pahae Julu (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Hutagalung Desa Simasom Kecamatan Pahae Julu (141,5 m x 3 m))	425	Dinas Perkim
998	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Sitolu Bahal, Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sitolu Bahal Kecamatan Purbatua (94 m x 2,5 m))	235	Dinas Perkim
999	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Purbatua, Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Lanjuntan Pembangunan Jalan Menuju SMP 2 Purba Tua Kecamatan Purbatua (89 m x 3 m))	267	Dinas Perkim
1.000	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Robean, Kecamatan Purbatua (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Robean Kecamatan Purbatua (sepanjang 142 x 2 m dan 57 x 3m))	455	Dinas Perkim
1.001	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan dan TPT di Dusun Aek Puli Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban (Jalan Sepanjang 19,8 x 5 m dan TPT sepanjang 11,5 x 1,8))	120	Dinas Perkim
1.002	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Simangumban Jae, Kecamatan Simangumban (Tanah di bawah Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban (Jalan sepanjang 72,2 x 1,5 m, TPT sepanjang 5,8 x 0,3 m dan pembuatan plat beton sepanjang 9 m))	110	Dinas Perkim
1.003	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong (Tanah di bawah PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (LAPEN) DI DUSUN PARGOMPULAN DESA POHAN TONGA KEC. SIBORONGBORONG (254 m x 3 m))	762	Dinas Perkim
1.004	TANAH BANGUNAN KANDANG HEWAN	JL. PACUAN KUDA SIBORONGBORONG	1.986	DINAS KETAHANAN PANGAN
1.005	TANAH BANGUNAN KANDANG HEWAN	DESA SIARO	13.100	DINAS KETAHANAN PANGAN
1.006	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. Sipirok-Tarutung No. 1	141	KANTOR CAMAT SIMANGUMBAN
1.007	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	Jln. Sipirok-Tarutung No. 1	165	KANTOR CAMAT SIMANGUMBAN
1.008	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	JL. PINTU AIR SIBORONG-BORONG	135	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.009	Tanah Bangunan Rumah Negara	Kec. Tarutung	800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.010	Tanah Bangunan Rumah Negara	Kec. Tarutung	200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.011	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Kec. Tarutung	405	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.012	Tanah Gedung Kantor/Pasar	Kec. Tarutung	100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.013	Tanah Gedung Kantor/Pasar	Kec. Tarutung	150	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.014	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Adiankoting	931	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.015	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Adiankoting	482	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.016	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Sipoholon	426	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.017	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Adiankoting	1.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.018	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Parmonangan	1.820	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.019	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Parmonangan	1.342	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.020	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Parmonangan	5.600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.021	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Parmonangan	11.040	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.022	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Pahae Julu	793	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.023	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Pahae Jae	2.055	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.024	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Simangumban	1.430	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.025	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Pahae Jae	3.672	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.026	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Purbatua	7.200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.027	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Pangaribuan	15.210	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.028	Tanah Pekan/Pasar	Kec. Garoga	2.852	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.029	Jalan di Desa Sitompul Kec. Siatas Barita (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Sitompul Kec. Siatas Barita (SK Baru 2022)	14.000	Dinas PUTR
1.030	Jalan di Desa Banuaji IV Kec. Adian Koting (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Banuaji IV Kec. Adian Koting (SK Baru 2022)	10.500	Dinas PUTR
1.031	Jalan di Desa Hutaraja Kecamatan Sipoholon (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Hutaraja Kecamatan Sipoholon (SK Baru 2022)	21.000	Dinas PUTR
1.032	Jalan di Desa Lumban Silintong Kec. Pagaran (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Lumban Silintong Kec. Pagaran (SK Baru 2022)	20.300	Dinas PUTR
1.033	Jalan di Desa Sipultak, Kec. Pagaran (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Sipultak, Kec. Pagaran (SK Baru 2022)	15.400	Dinas PUTR
1.034	Jalan di Desa Lubis Kec. Pagaran (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Lubis Kec. Pagaran (SK Baru 2022)	13.300	Dinas PUTR
1.035	Jalan di Desa Lumban Ina-ina Kec. Pagaran (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Lumban Ina-ina Kec. Pagaran (SK Baru 2022)	14.000	Dinas PUTR
1.036	Jalan di Desa Lumban Sormin Kec, Pangaribuan (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Lumban Sormin Kec, Pangaribuan (SK Baru 2022)	14.000	Dinas PUTR
1.037	Jalan di Desa Sibingke, Kec. Pangaribuan (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Sibingke, Kec. Pangaribuan (SK Baru 2022)	16.800	Dinas PUTR
1.038	Jalan di Desa Lumban Sinaga Simatupang Kec, Pangaribuan (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Lumban Sinaga Simatupang Kec, Pangaribuan (SK Baru 2022)	48.720	Dinas PUTR
1.039	Jalan di Desa Najumambe Kec. Pangaribuan (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Najumambe Kec. Pangaribuan (SK Baru 2022)	15.400	Dinas PUTR
1.040	Jalan di Desa Simardangiang Kec. Pahae Julu (SK Baru 2022)	Jalan di Desa Simardangiang Kec. Pahae Julu (SK Baru 2022)	53.410	Dinas PUTR
1.041	Rehabilitasi Jembatan (Penggantian Lantai) Jembatan Aek Sidua Mas	Rehabilitasi Jembatan (Penggantian Lantai) Jembatan Aek Sidua Mas	65	Dinas PUTR
1.042	mutasi dari Perkim	Kecamatan Siborongborong (Tanah dibawah jalan Lingkar SBB Ir Soekarno)	6.561	Dinas PUTR
1.043	mutai dari perkim	Jalan TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung	188	Dinas PUTR
1.044	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Aek Ristop - Partali Julu Kec. Tarutung)	Jln Jrs Aek Ristop - Partali Julu Kec. Tarutung	3.600	Dinas PUTR
1.045	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN HUTABARAT-RAMBING)	JALAN HUTABARAT-RAMBING	4.550	Dinas PUTR
1.046	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTABARAT, ASRAMA POLISI-AIR PANAS)	HUTABARAT, ASRAMA POLISI-AIR PANAS	300	Dinas PUTR
1.047	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA PARBAJU TORUAN)	DESA PARBAJU TORUAN	7.800	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.048	Tanah Dibawah Jalan Desa (GKPI NOMENSEN DAN JLN. LBN. HARIARA DESA HUTATORUAN I KEC. TARUTUNG)	GKPI NOMENSEN DAN JLN. LBN. HARIARA DESA HUTATORUAN I KEC. TARUTUNG	15.400	Dinas PUTR
1.049	Tanah Dibawah Jalan Desa (BAHAL IMBALO DESA LOBU SIREGAR I)	BAHAL IMBALO DESA LOBU SIREGAR I	16.100	Dinas PUTR
1.050	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN AIR PANAS HUTABARAT)	JALAN AIR PANAS HUTABARAT	19.500	Dinas PUTR
1.051	Tanah Dibawah Jalan Desa (AEK HUNCIM -PARHITEAN)	AEK HUNCIM -PARHITEAN	3.000	Dinas PUTR
1.052	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Parbaju Tonga Kec. Tarutung)	Jalan Parbaju Tonga Kec. Tarutung	16.250	Dinas PUTR
1.053	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Kompleks Perumahan Polri Kec. Tarutung)	Jalan Kompleks Perumahan Polri Kec. Tarutung	5.600	Dinas PUTR
1.054	Tanah Dibawah Jalan Desa (Bangunan Pengamanan Rambing Lumban Rihit Kec. Tarutung)	Bangunan Pengamanan Rambing Lumban Rihit Kec. Tarutung	27.300	Dinas PUTR
1.055	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Jrs. Simpang Jalan Negara - SD Latihan - Simp. Hutabaginda Kec. Tarutung)	Jalan Jrs. Simpang Jalan Negara - SD Latihan - Simp. Hutabaginda Kec. Tarutung	11.050	Dinas PUTR
1.056	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN MARSAITBOSI DESA SIMORANGKIR JULU)	DUSUN MARSAITBOSI DESA SIMORANGKIR JULU	4.550	Dinas PUTR
1.057	Tanah Dibawah Jalan Desa (SANGAKARAN-SITHUAN)	SANGAKARAN-SITHUAN	3.900	Dinas PUTR
1.058	Tanah Dibawah Jalan Desa (PANGGUAN-BANUAREA)	PANGGUAN-BANUAREA	5.200	Dinas PUTR
1.059	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTABARU -LUMBAN SIAGIAN JAE)	HUTABARU -LUMBAN SIAGIAN JAE	3.900	Dinas PUTR
1.060	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTANAMORA -SIDAGAL)	HUTANAMORA -SIDAGAL	3.900	Dinas PUTR
1.061	Tanah Dibawah Jalan Desa (MENUJU DSN. SOSOR SILINDUNG)	MENUJU DSN. SOSOR SILINDUNG	7.800	Dinas PUTR
1.062	Tanah Dibawah Jalan Desa (LINGKAR SMK 2 SIATAS BARITA)	LINGKAR SMK 2 SIATAS BARITA	1.800	Dinas PUTR
1.063	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN RIHIT DESA SANGKARAN)	LUMBAN RIHIT DESA SANGKARAN	9.750	Dinas PUTR
1.064	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTAGALUNG-LUMBAN SIAGIAN)	HUTAGALUNG-LUMBAN SIAGIAN	3.250	Dinas PUTR
1.065	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTAGALUNG-LUMBAN SIAGIAN)	HUTAGALUNG-LUMBAN SIAGIAN	5.200	Dinas PUTR
1.066	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN HUTAGALUNG-LUMBAN SIAGIAN)	JALAN HUTAGALUNG-LUMBAN SIAGIAN	3.600	Dinas PUTR
1.067	Tanah Dibawah Jalan Desa (SIMP. SMP MUARA-SMP MUARA)	SIMP. SMP MUARA-SMP MUARA	490	Dinas PUTR
1.068	Tanah Dibawah Jalan Desa (HAREAN-DSN SOSOR SILINDUNG)	HAREAN-DSN SOSOR SILINDUNG	324	Dinas PUTR
1.069	Tanah Dibawah Jalan Desa (HAREAN-DS HUTA BAGASAN)	HAREAN-DS HUTA BAGASAN	1.720	Dinas PUTR
1.070	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN HUTAJULU SOSOR TAMBISU-HUTAGURGUR)	DSN HUTAJULU SOSOR TAMBISU-HUTAGURGUR	2.963	Dinas PUTR
1.071	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA HUTAGALUNG)	DESA HUTAGALUNG	16.800	Dinas PUTR
1.072	Tanah Dibawah Jalan Desa (SP. HUTANAMORA-SMP MUARA)	SP. HUTANAMORA-SMP MUARA	14.950	Dinas PUTR
1.073	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DUSUN PEA DESA PANSUR NA PITU)	JALAN DUSUN PEA DESA PANSUR NA PITU	5.200	Dinas PUTR
1.074	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN NEGARA-DUSUN LUMBAN ARUNG)	JALAN NEGARA-DUSUN LUMBAN ARUNG	4.875	Dinas PUTR
1.075	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN HARIARA-DESA SITOMPUL)	LUMBAN HARIARA-DESA SITOMPUL	42.000	Dinas PUTR
1.076	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN NEGARA DSN LBN TORUAN DESA LUMBAN SIAGIAN JAE)	JALAN NEGARA DSN LBN TORUAN DESA LUMBAN SIAGIAN JAE	11.200	Dinas PUTR
1.077	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN NEGARA -DSN PARSERAHAN)	JLN NEGARA -DSN PARSERAHAN	11.700	Dinas PUTR
1.078	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN NEGARA -SANGKARAN NAGODANG)	JLN NEGARA -SANGKARAN NAGODANG	14.950	Dinas PUTR
1.079	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN NEGARA -PEA RAJA PEA DESA SANGKARAN)	JLN NEGARA -PEA RAJA PEA DESA SANGKARAN	7.800	Dinas PUTR
1.080	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN LUMBAN PEA -JLN MARHUSA)	JLN LUMBAN PEA -JLN MARHUSA	9.100	Dinas PUTR
1.081	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA LUMBAN SIAGIAN)	DESA LUMBAN SIAGIAN	21.700	Dinas PUTR
1.082	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN TANJUNG MARULAK DESA SIRAJA HUTAGALUNG)	DSN TANJUNG MARULAK DESA SIRAJA HUTAGALUNG	14.000	Dinas PUTR
1.083	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Tanjung Marulak Desa Siraja Hutagalung Kec. Siatas Barita)	Jalan Dusun Tanjung Marulak Desa Siraja Hutagalung Kec. Siatas Barita	7.000	Dinas PUTR
1.084	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN MENUJU HUTABAGOT)	JALAN MENUJU HUTABAGOT	4.900	Dinas PUTR
1.085	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN SOSOR TAMBISSU)	JALAN SOSOR TAMBISSU	8.400	Dinas PUTR
1.086	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Lumban Ratus Kec. Siatas Barita)	Jalan Dusun Lumban Ratus Kec. Siatas Barita	3.250	Dinas PUTR
1.087	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Lumban Binong Desa Pansurnapitu Kec. Siatas Barita)	Jalan Dusun Lumban Binong Desa Pansurnapitu Kec. Siatas Barita	4.200	Dinas PUTR
1.088	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sitompul Kec. Siatas Barita)	Jalan Sitompul Kec. Siatas Barita	5.200	Dinas PUTR
1.089	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Onan Tukka - Simanampang Kec. Siatas Barita (DAK))	Jln. Jrs. Onan Tukka - Simanampang Kec. Siatas Barita DAK	10.400	Dinas PUTR
1.090	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA SIMANAMPANG)	DESA SIMANAMPANG	3.900	Dinas PUTR
1.091	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTABARU -AEK TANGGA)	HUTABARU -AEK TANGGA	5.200	Dinas PUTR
1.092	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN BALIK ARUNG DESA HUTAURUK)	DUSUN BALIK ARUNG DESA HUTAURUK	16.250	Dinas PUTR
1.093	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTA DANGIR -SILANGKITANG DOLOK)	HUTA DANGIR -SILANGKITANG DOLOK	37.700	Dinas PUTR
1.094	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTABARU-LBN HEIARA GAROGA)	HUTABARU-LBN HEIARA GAROGA	17.550	Dinas PUTR
1.095	Tanah Dibawah Jalan Desa (LOBU SINGKAM -HUTA PARIK GODANG)	LOBU SINGKAM -HUTA PARIK GODANG	5.200	Dinas PUTR
1.096	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN HUTAGURGUR KEC. SIPOHOLON)	JALAN HUTAGURGUR KEC. SIPOHOLON	11.900	Dinas PUTR
1.097	Tanah Dibawah Jalan Desa (SILALAEN, DUSUN RIANIATE-PANGALOAN DESA SIMANUNGKALIT)	SILALAEN, DUSUN RIANIATE-PANGALOAN DESA SIMANUNGKALIT	2.600	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.098	Tanah Dibawah Jalan Desa (LOBU SINGKAM-DSN HABINSARAN)	LOBU SINGKAM-DSN HABINSARAN	3.900	Dinas PUTR
1.099	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTAGURGUR)	HUTAGURGUR	7.800	Dinas PUTR
1.100	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTASOSOR I HUTAGURUGUR DESA HUTAURUK)	HUTASOSOR I HUTAGURUGUR DESA HUTAURUK	29.400	Dinas PUTR
1.101	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN SIPAHUTAR DESA LOBU SINGKAM)	LUMBAN SIPAHUTAR DESA LOBU SINGKAM	3.850	Dinas PUTR
1.102	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN HARIARA-HUTABAGASAN)	LUMBAN HARIARA-HUTABAGASAN	14.950	Dinas PUTR
1.103	Tanah Dibawah Jalan Desa (GEREJA HKBP PAGARBATU)	GEREJA HKBP PAGARBATU	900	Dinas PUTR
1.104	Tanah Dibawah Jalan Desa (LOBUSINGKAM -DSN HABINSARAN)	LOBUSINGKAM -DSN HABINSARAN	11.700	Dinas PUTR
1.105	Tanah Dibawah Jalan Desa (DYK JALAN NAIPOSPOS-JALAN SAMOSIR)	DYK JALAN NAIPOSPOS-JALAN SAMOSIR	3.900	Dinas PUTR
1.106	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN RIA RIA SITUMEANG HABINSARAN)	JALAN RIA RIA SITUMEANG HABINSARAN	5.200	Dinas PUTR
1.107	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN IHIRLINDUNG DESA HUTARAJA)	JLN IHIRLINDUNG DESA HUTARAJA	3.900	Dinas PUTR
1.108	Tanah Dibawah Jalan Desa (SIBUAL-MUALTABU DUSUN VIII DESA LBN TONGATONGA)	SIBUAL-MUALTABU DUSUN VIII DESA LBN TONGATONGA	36	Dinas PUTR
1.109	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN PARRATUSAN DESA PAGARBATU)	DSN PARRATUSAN DESA PAGARBATU	2.250	Dinas PUTR
1.110	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN PANSINARAN)	JALAN PANSINARAN	11	Dinas PUTR
1.111	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN SITUMEANG HASUNDUTAN)	JALAN SITUMEANG HASUNDUTAN	1.800	Dinas PUTR
1.112	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN LOBU -BARUMBUN DESA HUTAURUK)	LUMBAN LOBU -BARUMBUN DESA HUTAURUK	4.225	Dinas PUTR
1.113	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Nahornop - Hutanagodang Desa Situmeang Hasundutan Kec. Sipoholon)	Jln. Jrs. Nahornop - Hutanagodang Desa Situmeang Hasundutan Kec. Sipoholon	5.600	Dinas PUTR
1.114	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Lumban Sipahutar - Lumban Sitogu Desa Sipahutar Kec. Sipoholon)	Jln. Jrs. Lumban Sipahutar - Lumban Sitogu Desa Sipahutar Kec. Sipoholon	5.600	Dinas PUTR
1.115	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Huta Sinaga - Bagan Desa Hutaraja Hasundutan Kec. Sipoholon)	Jln. Jrs. Huta Sinaga - Bagan Desa Hutaraja Hasundutan Kec. Sipoholon	3.250	Dinas PUTR
1.116	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Simp Jln Negara Dusun Parlombuan Desa Hutaraja Simanungkalit Kec. Sipoholon)	Jln Jrs Simp Jln Negara Dusun Parlombuan Desa Hutaraja Simanungkalit Kec. Sipoholon	3.600	Dinas PUTR
1.117	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Simp Jln Negara - Dusun Lumbangaol Desa Hutaraja Kec. Sipoholon)	Jln Jrs Simp Jln Negara - Dusun Lumbangaol Desa Hutaraja Kec. Sipoholon	3.900	Dinas PUTR
1.118	Tanah Dibawah Jalan Desa (HORISON-LBN SILINTONG)	HORISON-LBN SILINTONG	3.900	Dinas PUTR
1.119	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN SITONGGITONGGI DESA PANSURBATU)	DUSUN SITONGGITONGGI DESA PANSURBATU	15.400	Dinas PUTR
1.120	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN PANANGGELE, DAN AMBAR DAPDAP-SITAMPURUNG)	DUSUN PANANGGELE, DAN AMBAR DAPDAP-SITAMPURUNG	16.900	Dinas PUTR
1.121	Tanah Dibawah Jalan Desa (SITAMPURUNG-SIBADAK)	SITAMPURUNG-SIBADAK	2.100	Dinas PUTR
1.122	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Pea Nauli Desa Sitampurung Kec. Siborongborong)	Jalan Dusun Pea Nauli Desa Sitampurung Kec. Siborongborong	11.200	Dinas PUTR
1.123	Tanah Dibawah Jalan Desa (BUTAR-DSN. SIBUNTUON)	BUTAR-DSN. SIBUNTUON	5.200	Dinas PUTR
1.124	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN. SITIO-TIO DESA LOBU SIREGAR I)	DSN. SITIO-TIO DESA LOBU SIREGAR I	14.000	Dinas PUTR
1.125	Tanah Dibawah Jalan Desa (PEARAJA MENUJU SD INPRES PEARAJA DESA LOBU SIREGAR II)	PEARAJA MENUJU SD INPRES PEARAJA DESA LOBU SIREGAR II	3.900	Dinas PUTR
1.126	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DUSUN I LUMBAN MARUBUN DESA LOBU SIREGAR I)	JALAN DUSUN I LUMBAN MARUBUN DESA LOBU SIREGAR I	3.900	Dinas PUTR
1.127	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jln. Siturituri Desa Lobu Siregar Kec. Siborongborong)	Perkerasan Jln. Siturituri Desa Lobu Siregar Kec. Siborongborong	5.200	Dinas PUTR
1.128	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong)	Jalan Dusun Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong	6.300	Dinas PUTR
1.129	Tanah Dibawah Jalan Desa (SORNIAJI-BAHAL BATU III)	SORNIAJI-BAHAL BATU III	7.800	Dinas PUTR
1.130	Tanah Dibawah Jalan Desa (SOSOR RANG II -DESA BAHAL BATU III)	SOSOR RANG II -DESA BAHAL BATU III	3.600	Dinas PUTR
1.131	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Bahal Batu III - Gadong Lobu Kec. Siborongborong)	Jln. Jrs. Bahal Batu III - Gadong Lobu Kec. Siborongborong	10.400	Dinas PUTR
1.132	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Huta Situmeang - Bahal Batu III Kec. Siborongborong)	Jalan Huta Situmeang - Bahal Batu III Kec. Siborongborong	6.300	Dinas PUTR
1.133	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN VII LOPIAN-SIMP. LBN SIANTURI DESA SITABOTABO)	DUSUN VII LOPIAN-SIMP. LBN SIANTURI DESA SITABOTABO	28.000	Dinas PUTR
1.134	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA POHAN JAE DUSUN III)	DESA POHAN JAE DUSUN III	19.500	Dinas PUTR
1.135	Tanah Dibawah Jalan Desa (PARSIMATAAN -PARULOHAN)	PARSIMATAAN -PARULOHAN	19.500	Dinas PUTR
1.136	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN. NEGARA -HKBP POHAN TONGA)	JLN. NEGARA -HKBP POHAN TONGA	7.500	Dinas PUTR
1.137	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN AMBAR BOLAK DESA SIBORONGBORONG)	DUSUN AMBAR BOLAK DESA SIBORONGBORONG	8.400	Dinas PUTR
1.138	Tanah Dibawah Jalan Desa (SIGUMBANG -PANGAMBATAN)	SIGUMBANG -PANGAMBATAN	2.600	Dinas PUTR
1.139	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN NEGARA-HOPONG)	JALAN NEGARA-HOPONG	4.550	Dinas PUTR
1.140	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DESA SIBORONGBORONG I)	JALAN DESA SIBORONGBORONG I	2.245	Dinas PUTR
1.141	Tanah Dibawah Jalan Desa (BANJARNAHOR-SIBUNTUON)	BANJARNAHOR-SIBUNTUON	5.810	Dinas PUTR
1.142	Tanah Dibawah Jalan Desa (GONTING-SIBADAK)	GONTING-SIBADAK	640	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.143	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN LUMBAN TABO)	JALAN LUMBAN TABO	395	Dinas PUTR
1.144	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN LB LOBU DUSUN I DESA HUTABULU)	JALAN LB LOBU DUSUN I DESA HUTABULU	3.250	Dinas PUTR
1.145	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN III PINTU BOSI)	DUSUN III PINTU BOSI	23.100	Dinas PUTR
1.146	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN NEGARA HOPONG)	JALAN NEGARA HOPONG	21.000	Dinas PUTR
1.147	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTAPISANG -PARHIJJANGAN)	HUTAPISANG -PARHIJJANGAN	11.900	Dinas PUTR
1.148	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA PARBAJU TONGA)	DESA PARBAJU TONGA	636	Dinas PUTR
1.149	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN. DSN SIARO DESA SIBORONGBORONG I)	JLN. DSN SIARO DESA SIBORONGBORONG I	455	Dinas PUTR
1.150	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN MAKMUR GANG GPDI)	DUSUN MAKMUR GANG GPDI	3.900	Dinas PUTR
1.151	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN BARINGIN DESA PARHORBOAN)	LUMBAN BARINGIN DESA PARHORBOAN	850	Dinas PUTR
1.152	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN VII LOPIAN DESA SITABOTABO)	DSN VII LOPIAN DESA SITABOTABO	3.900	Dinas PUTR
1.153	Tanah Dibawah Jalan Desa (PAGARAN -LUMBAN SIRINGORINGO)	PAGARAN -LUMBAN SIRINGORINGO	2.600	Dinas PUTR
1.154	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN I SITABOTABO TORUAN)	DSN I SITABOTABO TORUAN	4.550	Dinas PUTR
1.155	Tanah Dibawah Jalan Desa (DYK JALAN SITABOTABO TORUAN)	DYK JALAN SITABOTABO TORUAN	960	Dinas PUTR
1.156	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DUSUN II SITABOTABO)	JALAN DUSUN II SITABOTABO	3.900	Dinas PUTR
1.157	Tanah Dibawah Jalan Desa (BANJAR SIBUNTUON -LUMBAN TONGA)	BANJAR SIBUNTUON -LUMBAN TONGA	2.550	Dinas PUTR
1.158	Tanah Dibawah Jalan Desa (BAHAL SANGGUL -LUMBAN SITIOTIO)	BAHAL SANGGUL -LUMBAN SITIOTIO	3.500	Dinas PUTR
1.159	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DESA SIGUMBANG)	JALAN DESA SIGUMBANG	3.250	Dinas PUTR
1.160	Tanah Dibawah Jalan Desa (SD INPRES-SIBUHA MATA DUSUN VII)	SD INPRES-SIBUHA MATA DUSUN VII	663	Dinas PUTR
1.161	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN NEGARA -POHAN TONGA)	JALAN NEGARA -POHAN TONGA	5.200	Dinas PUTR
1.162	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DUSUN PEANAJAGAR DESA SIARO)	JALAN DUSUN PEANAJAGAR DESA SIARO	2.600	Dinas PUTR
1.163	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN SIMANJUNTAK)	LUMBAN SIMANJUNTAK	2.003	Dinas PUTR
1.164	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Hadippu Dusun I Pohan Tonga Kec. Siborongborong)	Jalan Hadippu Dusun I Pohan Tonga Kec. Siborongborong	3.250	Dinas PUTR
1.165	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Lumban Silintong Desa Siborongborong II Kec. Siborongborong)	Jalan Lumban Silintong Desa Siborongborong II Kec. Siborongborong	3.250	Dinas PUTR
1.166	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Bahal Dulang Desa Siborongborong II Kec. Siborongborong)	Jalan Dusun Bahal Dulang Desa Siborongborong II Kec. Siborongborong	1.200	Dinas PUTR
1.167	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Simp. Jalan Negara - SLB - Lumban Nainggolan Kec. Siborongborong)	Jln. Jrs. Simp. Jalan Negara - SLB - Lumban Nainggolan Kec. Siborongborong	3.900	Dinas PUTR
1.168	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Desa Sitabotabo Toruan Kec. Siborongborong)	Jln. Desa Sitabotabo Toruan Kec. Siborongborong	3.900	Dinas PUTR
1.169	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Pohan Tonga Tampubolon Kec. Siborongborong)	Jalan Pohan Tonga Tampubolon Kec. Siborongborong	1.085	Dinas PUTR
1.170	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Siranggiting Desa Siborongborong I Kec. Siborongborong)	Jalan Dusun Siranggiting Desa Siborongborong I Kec. Siborongborong	3.250	Dinas PUTR
1.171	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Simp. Gereja Katolik - Bulu Duri Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong)	Jalan Simp. Gereja Katolik - Bulu Duri Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong	3.900	Dinas PUTR
1.172	Tanah Dibawah Jalan Desa (SITAPONGAN-PARRATUSAN)	SITAPONGAN-PARRATUSAN	402	Dinas PUTR
1.173	Tanah Dibawah Jalan Desa (SIJUGUK-RINDANG)	SIJUGUK-RINDANG	9.000	Dinas PUTR
1.174	Tanah Dibawah Jalan Desa (SOSOR LIANG-BONAN DOLOK)	SOSOR LIANG-BONAN DOLOK	1.013	Dinas PUTR
1.175	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN MENUJU KANTOR CAMAT SIMANGUMBAN)	JLN MENUJU KANTOR CAMAT SIMANGUMBAN	3.900	Dinas PUTR
1.176	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN. RING ROAD LBN. SANGKALAN)	JLN. RING ROAD LBN. SANGKALAN	1.225	Dinas PUTR
1.177	Tanah Dibawah Jalan Desa (SMP IV PAGARAN)	SMP IV PAGARAN	3.900	Dinas PUTR
1.178	Tanah Dibawah Jalan Desa (LBN SILABAN-DS SITIO-TIO DESA UNTE MUNGKUR)	LBN SILABAN-DS SITIO-TIO DESA UNTE MUNGKUR	3.900	Dinas PUTR
1.179	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN HOLBUNG)	LUMBAN HOLBUNG	1.855	Dinas PUTR
1.180	Tanah Dibawah Jalan Desa (MENUJU SMP NAJUMAMBE)	MENUJU SMP NAJUMAMBE	6.500	Dinas PUTR
1.181	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTA BUNTUL -DESA SIGURUNGGURUNG)	HUTA BUNTUL -DESA SIGURUNGGURUNG	810	Dinas PUTR
1.182	Tanah Dibawah Jalan Desa (MENUJU SMP PURBATUA)	MENUJU SMP PURBATUA	20.300	Dinas PUTR
1.183	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN PENDIDIKAN-PURBATUA)	JALAN PENDIDIKAN-PURBATUA	1.170	Dinas PUTR
1.184	Tanah Dibawah Jalan Desa (PATADA-AEK GODANG)	PATADA-AEK GODANG	24.500	Dinas PUTR
1.185	Tanah Dibawah Jalan Desa (SP. PATADA -SIMARSALAON)	SP. PATADA -SIMARSALAON	855	Dinas PUTR
1.186	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN SIBANDANG DESA LUMBAN INAINA)	DUSUN SIBANDANG DESA LUMBAN INAINA	1.125	Dinas PUTR
1.187	Tanah Dibawah Jalan Desa (JANGGALEMAN -SIPULTAK)	JANGGALEMAN -SIPULTAK	2.600	Dinas PUTR
1.188	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN LUMBAN NAINGGOLAN DESA SIBARAGAS)	JALAN LUMBAN NAINGGOLAN DESA SIBARAGAS	703	Dinas PUTR
1.189	Tanah Dibawah Jalan Desa (HORISAN-LUMBAN SILINTONG)	HORISAN-LUMBAN SILINTONG	16.100	Dinas PUTR
1.190	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN SIBAYAK DESA LUMBAN INAINA)	DSN SIBAYAK DESA LUMBAN INAINA	1.620	Dinas PUTR
1.191	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTAGURGUR PARSABISABIAN DESA ONAN RUNGGU I)	HUTAGURGUR PARSABISABIAN DESA ONAN RUNGGU I	626	Dinas PUTR
1.192	Tanah Dibawah Jalan Desa (JL. KARIMUDA SITOMPUL DAN JL. ANDREAS SITOMPUL)	JL. KARIMUDA SITOMPUL DAN JL. ANDREAS SITOMPUL	875	Dinas PUTR
1.193	Tanah Dibawah Jalan Desa (BANJAR GODANG DESA AEK NAULI IV)	BANJAR GODANG DESA AEK NAULI IV	475	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.194	Tanah Dibawah Jalan Desa (LBN. SIHOBUK-SABUNGAN NIHUTA)	LBN. SIHOBUK-SABUNGAN NIHUTA	30.100	Dinas PUTR
1.195	Tanah Dibawah Jalan Desa (SMPN 4 KEC. SIPAHUTAR)	SMPN 4 KEC. SIPAHUTAR	3.900	Dinas PUTR
1.196	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN PENTAKOSTA DESA SIBINGKE)	DSN PENTAKOSTA DESA SIBINGKE	1.050	Dinas PUTR
1.197	Tanah Dibawah Jalan Desa (POHAN TONGA-HOMBANG POHAN TONGA)	POHAN TONGA-HOMBANG POHAN TONGA	5.200	Dinas PUTR
1.198	Tanah Dibawah Jalan Desa (SMP KATOLIK -DSN SIHOBUK-HOBUK)	SMP KATOLIK -DSN SIHOBUK-HOBUK	475	Dinas PUTR
1.199	Tanah Dibawah Jalan Desa (LBN. SITUMORANG-DESA PARHORBOAN)	LBN. SITUMORANG-DESA PARHORBOAN	6.500	Dinas PUTR
1.200	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN SAMPINUR-DSN LUMBAN JULU)	DSN SAMPINUR-DSN LUMBAN JULU	663	Dinas PUTR
1.201	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN BINANGA-SITAEDAK)	JALAN BINANGA-SITAEDAK	4.875	Dinas PUTR
1.202	Tanah Dibawah Jalan Desa (SITARINDAK)	SITARINDAK	100	Dinas PUTR
1.203	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA SILOSUNG)	DESA SILOSUNG	918	Dinas PUTR
1.204	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN LUMBAN PARMONANGAN)	DSN LUMBAN PARMONANGAN	3.900	Dinas PUTR
1.205	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN BUNGUS-PARLOMBUAN)	DSN BUNGUS-PARLOMBUAN	5.850	Dinas PUTR
1.206	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN PANGURDOTAN)	JALAN PANGURDOTAN	473	Dinas PUTR
1.207	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN HOLBUNG -SITAMPURUNG)	LUMBAN HOLBUNG -SITAMPURUNG	900	Dinas PUTR
1.208	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA LUMBAN DOLOK)	DESA LUMBAN DOLOK	6.175	Dinas PUTR
1.209	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN HARIARA DESA TORDOLOK NAULI)	JALAN HARIARA DESA TORDOLOK NAULI	318	Dinas PUTR
1.210	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN SITUMORANG)	LUMBAN SITUMORANG	12.600	Dinas PUTR
1.211	Tanah Dibawah Jalan Desa (ONAN SABTU -BATU MANUMPAK)	ONAN SABTU -BATU MANUMPAK	680	Dinas PUTR
1.212	Tanah Dibawah Jalan Desa (DSN TORNAULI -DESA MANALU DOLOK)	DSN TORNAULI -DESA MANALU DOLOK	14.950	Dinas PUTR
1.213	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN MENUJU SMP NEG. 3 PAGARAN DESA BANUALUHU)	JALAN MENUJU SMP NEG. 3 PAGARAN DESA BANUALUHU	3.900	Dinas PUTR
1.214	Tanah Dibawah Jalan Desa (PARMANUHAN -SIBALANGA)	PARMANUHAN -SIBALANGA	4.200	Dinas PUTR
1.215	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN AMBAR HODA)	JALAN AMBAR HODA	29.400	Dinas PUTR
1.216	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN SAMPINUR-DOLOK NAULI)	JALAN SAMPINUR-DOLOK NAULI	1.140	Dinas PUTR
1.217	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DESA SILANDO)	JALAN DESA SILANDO	1.058	Dinas PUTR
1.218	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTABAGASAN SABUNGAN NIHUTA II)	HUTABAGASAN SABUNGAN NIHUTA II	27	Dinas PUTR
1.219	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DESA TAPIAN NAULI II)	JALAN DESA TAPIAN NAULI II	7.800	Dinas PUTR
1.220	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DESA PURBATUA)	JALAN DESA PURBATUA	5.850	Dinas PUTR
1.221	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN LUMBAN SILINTONG)	JALAN LUMBAN SILINTONG	18.200	Dinas PUTR
1.222	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN SIMOTUNG DESA BATU ARIMO)	DUSUN SIMOTUNG DESA BATU ARIMO	4.200	Dinas PUTR
1.223	Tanah Dibawah Jalan Desa (MENUJU LUMBAN RIHIT)	MENUJU LUMBAN RIHIT	613	Dinas PUTR
1.224	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN SIMARPINGGAN)	JALAN SIMARPINGGAN	3.250	Dinas PUTR
1.225	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN SINAGA)	LUMBAN SINAGA	5.600	Dinas PUTR
1.226	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA LUMBAN JULU)	DESA LUMBAN JULU	4.550	Dinas PUTR
1.227	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN DOLOK)	LUMBAN DOLOK	4.900	Dinas PUTR
1.228	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN DOLOK DESA SIGOTOM)	LUMBAN DOLOK DESA SIGOTOM	7.700	Dinas PUTR
1.229	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN HOLBUNG DESA GODUNG BOROTAN)	DUSUN HOLBUNG DESA GODUNG BOROTAN	5.200	Dinas PUTR
1.230	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN SITIOTIO)	JALAN SITIOTIO	19.500	Dinas PUTR
1.231	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN PAKKAT DOLOK)	JALAN PAKKAT DOLOK	4.200	Dinas PUTR
1.232	Tanah Dibawah Jalan Desa (JALAN DUSUN AMBAR ARUNG)	JALAN DUSUN AMBAR ARUNG	7.800	Dinas PUTR
1.233	Tanah Dibawah Jalan Desa (KEC. PARMONANGAN)	KEC. PARMONANGAN	648	Dinas PUTR
1.234	Tanah Dibawah Jalan Desa (KEC. PAGARAN)	KEC. PAGARAN	1.050	Dinas PUTR
1.235	Tanah Dibawah Jalan Desa (KEC. SIPAHUTAR)	KEC. SIPAHUTAR	2.100	Dinas PUTR
1.236	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTAJULU -HUTAJULU PARBALIK)	HUTAJULU -HUTAJULU PARBALIK	4.875	Dinas PUTR
1.237	Tanah Dibawah Jalan Desa (MENUJU GEREJA HKBP PARSAORAN DAN GEREJA GPDI DESA PARHORBOAN)	MENUJU GEREJA HKBP PARSAORAN DAN GEREJA GPDI DESA PARHORBOAN	3.900	Dinas PUTR
1.238	Tanah Dibawah Jalan Desa (PARSOSORAN -SIMATANIARI)	PARSOSORAN -SIMATANIARI	3.900	Dinas PUTR
1.239	Tanah Dibawah Jalan Desa (BUHIT NANGGE DUSUN I PURBASINOMBA DUSUN II GONTING DESA POHAN JAE)	BUHIT NANGGE DUSUN I PURBASINOMBA DUSUN II GONTING DESA POHAN JAE	12.220	Dinas PUTR
1.240	Tanah Dibawah Jalan Desa (JANJI MARIA -BONANIDOLOK)	JANJI MARIA -BONANIDOLOK	21.000	Dinas PUTR
1.241	Tanah Dibawah Jalan Desa (LUMBAN JULU HUTABAGASAN DESA LOBU SIREGAR I)	LUMBAN JULU HUTABAGASAN DESA LOBU SIREGAR I	1.184	Dinas PUTR
1.242	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Simp. Jalan Negara Gereja GSRI - Lontung Dolok Kecamatan Pahae Julu)	Jalan Simp. Jalan Negara Gereja GSRI - Lontung Dolok Kecamatan Pahae Julu	1.000	Dinas PUTR
1.243	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sirihit-rihit Desa Setia Kec. Pahae Jae)	Jalan Sirihit-rihit Desa Setia Kec. Pahae Jae	3.900	Dinas PUTR
1.244	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Batu Marhosing – Sosor Dolok Desa Untemungkur Kecamatan Muara)	Jln. Jrs. Batu Marhosing – Sosor Dolok Desa Untemungkur Kecamatan Muara	28.000	Dinas PUTR
1.245	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Lumban Soburan Desa Lubis Kec. Pagaran)	Jln. Jrs. Lumban Soburan Desa Lubis Kec. Pagaran	1.800	Dinas PUTR
1.246	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Pakkat Dolok Kec. Pahae Jae)	Jalan Dusun Pakkat Dolok Kec. Pahae Jae	1.733	Dinas PUTR
1.247	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Simp. Dolok Martumbur - Dolok Martumbur Kec. Muara)	Jln. Jrs. Simp. Dolok Martumbur - Dolok Martumbur Kec. Muara	7.800	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.248	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Hutatinggi - Dusun Rianauli Kec. Parmonangan)	Jalan Hutatinggi - Dusun Rianauli Kec. Parmonangan	1.800	Dinas PUTR
1.249	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Sihobukhobuk Huta Sibarani Desa Aek Raja Kec. Parmonangan)	Jln. Jrs. Sihobukhobuk Huta Sibarani Desa Aek Raja Kec. Parmonangan	3.250	Dinas PUTR
1.250	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Tarutung II Desa Suka Mulia Kec. Pahae Jae)	Jalan Tarutung II Desa Suka Mulia Kec. Pahae Jae	1.800	Dinas PUTR
1.251	Tanah Dibawah Jalan Desa (Revitalisasi Jalan dan Saluran Jalan Strategis)	Revitalisasi Jalan dan Saluran Jalan Strategis	2.600	Dinas PUTR
1.252	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Lumban Dolok Kec. Pahae Julu)	Jalan Desa Lumban Dolok Kec. Pahae Julu	3.900	Dinas PUTR
1.253	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Simp Gereja Katolik Dusun Lbn Ratus Desa Janji Nauli Kec. Purbatua)	Jln Jrs Simp Gereja Katolik Dusun Lbn Ratus Desa Janji Nauli Kec. Purbatua	35.000	Dinas PUTR
1.254	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Simotung Desa Batuarimo Kec. Parmonangan)	Jalan Dusun Simotung Desa Batuarimo Kec. Parmonangan	900	Dinas PUTR
1.255	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Parlombuan - SMP 6 Kec. Pangaribuan)	Jln. Jrs. Parlombuan - SMP 6 Kec. Pangaribuan	19.600	Dinas PUTR
1.256	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Jurusan Parlombuan - Sigotom Kec. Pangaribuan)	Jalan Jurusan Parlombuan - Sigotom Kec. Pangaribuan	6.900	Dinas PUTR
1.257	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sibingke - Rinangolngolan Kec. Pangaribuan)	Jalan Sibingke - Rinangolngolan Kec. Pangaribuan	22.750	Dinas PUTR
1.258	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Sipahutar II Kec. Sipahutar)	Jalan Desa Sipahutar II Kec. Sipahutar	4.900	Dinas PUTR
1.259	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Simuak Desa Onan Runggu II Kec. Sipahutar)	Jalan Simuak Desa Onan Runggu II Kec. Sipahutar	2.400	Dinas PUTR
1.260	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sitarindak Kec. Pangaribuan)	Jalan Sitarindak Kec. Pangaribuan	3.900	Dinas PUTR
1.261	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Sangkarnihuta Desa Siabalabal VI Kec. Sipahutar)	Jalan Dusun Sangkarnihuta Desa Siabalabal VI Kec. Sipahutar	488	Dinas PUTR
1.262	Tanah Dibawah Jalan Desa (Revitalisasi)	Revitalisasi	640	Dinas PUTR
1.263	Tanah Dibawah Jalan Desa (Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu)	Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu	6.500	Dinas PUTR
1.264	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Hutatinggi - Parmonangan KM.7 Aek Bulu Desa Horison Ranggitgit Kecamatan Parmonangan)	Jln. Jrs. Hutatinggi - Parmonangan KM.7 Aek Bulu Desa Horison Ranggitgit Kecamatan Parmonangan	800	Dinas PUTR
1.265	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Raja Toga Sitompul (menuju Akbid Tarutung) Kec. Siatas Barita)	Jalan Raja Toga Sitompul menuju Akbid Tarutung Kec. Siatas Barita	729	Dinas PUTR
1.266	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Sigotom Timur menuju Desa Godung Borotan Desa Sigotom Timur Kec. Pangaribuan)	Jln. Jrs. Sigotom Timur menuju Desa Godung Borotan Desa Sigotom Timur Kec. Pangaribuan	5.200	Dinas PUTR
1.267	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Parsosoran menuju Gonting Salak Kec. Garoga)	Jalan Desa Parsosoran menuju Gonting Salak Kec. Garoga	18.900	Dinas PUTR
1.268	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Parmonangan - Parratusan Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan)	Jln. Jrs. Parmonangan - Parratusan Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan	663	Dinas PUTR
1.269	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA PARBUBU I KEC. TARUTUNG)	DESA PARBUBU I KEC. TARUTUNG	11.200	Dinas PUTR
1.270	Tanah Dibawah Jalan Desa (HUTA HARAMBIR DESA HUTATORUAN I KEC. TARUTUNG)	HUTA HARAMBIR DESA HUTATORUAN I KEC. TARUTUNG	10.500	Dinas PUTR
1.271	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN SIDARI DESA PAGARAN LAMBUNG I KEC. ADIANKOTING)	DUSUN SIDARI DESA PAGARAN LAMBUNG I KEC. ADIANKOTING	573	Dinas PUTR
1.272	Tanah Dibawah Jalan Desa (JURUSAN SIMARPINGGAN SIMUAK DESA ONAN RUNGGU II KEC. SIPAHUTAR)	JURUSAN SIMARPINGGAN SIMUAK DESA ONAN RUNGGU II KEC. SIPAHUTAR	39	Dinas PUTR
1.273	Tanah Dibawah Jalan Desa (SIPOHOLON LOBU SINGKAM KEC.SIPOHOLON)	SIPOHOLON LOBU SINGKAM KEC.SIPOHOLON	60	Dinas PUTR
1.274	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA PAGARAN MENUJU DESA LUMBAN INA INA KEC. PAGARAN)	DESA PAGARAN MENUJU DESA LUMBAN INA INA KEC. PAGARAN	44	Dinas PUTR
1.275	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA SIPULTAK DOLOK KEC. PAGARAN)	DESA SIPULTAK DOLOK KEC. PAGARAN	1.172	Dinas PUTR
1.276	Tanah Dibawah Jalan Desa (BANUA LUHU KEC. PAGARAN)	BANUA LUHU KEC. PAGARAN	480	Dinas PUTR
1.277	Tanah Dibawah Jalan Desa (DESA SIRAJA OLOAN KEC. TARUTUNG)	DESA SIRAJA OLOAN KEC. TARUTUNG	4	Dinas PUTR
1.278	Tanah Dibawah Jalan Desa (LOBU HARAMBIR DESA BONA NIO DOLOK KEC. PURBATUA)	LOBU HARAMBIR DESA BONA NIO DOLOK KEC. PURBATUA	44	Dinas PUTR
1.279	Tanah Dibawah Jalan Desa (RAKE SIPAPAGAN KELURAHAN HUTAORUAN X KEC. TARUTUNG)	RAKE SIPAPAGAN KELURAHAN HUTAORUAN X KEC. TARUTUNG	77	Dinas PUTR
1.280	Tanah Dibawah Jalan Desa (PARTALI JULU KEC. TARUTUNG)	PARTALI JULU KEC. TARUTUNG	44	Dinas PUTR
1.281	Tanah Dibawah Jalan Desa (DUSUN 5 HUTA HARAMBIR DESA HUTATORUAN I KEC. TARUTUNG)	DUSUN 5 HUTA HARAMBIR DESA HUTATORUAN I KEC. TARUTUNG	76	Dinas PUTR
1.282	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Lobu Sunut Kecamatan Parmonangan)	Jalan Desa Lobu Sunut Kecamatan Parmonangan	75	Dinas PUTR
1.283	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong)	Jalan Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong	1.640	Dinas PUTR
1.284	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong)	Jalan Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong	47	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.285	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Lumban Silintong - Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran)	Jalan Desa Lumban Silintong - Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran	8.400	Dinas PUTR
1.286	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong)	Jalan Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong	3.900	Dinas PUTR
1.287	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Sipahutar - Dolok Nagodang - Parlombuan (Bts. Tobasa) Kec. Sipahutar (DAK))	Jln. Jrs. Sipahutar - Dolok Nagodang - Parlombuan Bts. Tobasa Kec. Sipahutar DAK	7.800	Dinas PUTR
1.288	Tanah Dibawah Jalan Desa (Dyk Semen pada Jalan Desa Hutagalung Siwaluompu Kecamatan Tarutung)	Dyk Semen pada Jalan Desa Hutagalung Siwaluompu Kecamatan Tarutung	4.550	Dinas PUTR
1.289	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga)	Jalan Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga	3.900	Dinas PUTR
1.290	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar)	Jalan Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar	3.600	Dinas PUTR
1.291	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae)	Jalan Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae	2.600	Dinas PUTR
1.292	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Huta Buntul Kec. Pahae Jae)	Jalan Dusun Huta Buntul Kec. Pahae Jae	975	Dinas PUTR
1.293	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Simp. Jalan Negara - Pearaja Kec. Siatas Barita)	Jln Jrs Simp. Jalan Negara - Pearaja Kec. Siatas Barita	3.900	Dinas PUTR
1.294	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Parbubu Desa Pancurbatu Kec. Adiankoting)	Jalan Dusun Parbubu Desa Pancurbatu Kec. Adiankoting	633	Dinas PUTR
1.295	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Adian Padang - Lobu Nauli Kec. Sipahutar)	Jln Jrs Adian Padang - Lobu Nauli Kec. Sipahutar	635	Dinas PUTR
1.296	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Hutaraja - Parlombuan Kec. Pangaribuan)	Jln Jrs Hutaraja - Parlombuan Kec. Pangaribuan	16	Dinas PUTR
1.297	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Parurean - Bts Tapsel Kec. Pangaribuan)	Jln Jrs Parurean - Bts Tapsel Kec. Pangaribuan	550	Dinas PUTR
1.298	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Menuju SMA N. Pahae Julu Kec. Pahae Julu)	Jalan Menuju SMA N. Pahae Julu Kec. Pahae Julu	3.148	Dinas PUTR
1.299	Tanah Dibawah Jalan Desa (Revitalisasi Jalan dan Saluran Strategis II)	Revitalisasi Jalan dan Saluran Strategis II	3.900	Dinas PUTR
1.300	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Situri-turi Desa Lobu Siregar II Kecamatan Siborongborong)	Jalan Situri-turi Desa Lobu Siregar II Kecamatan Siborongborong	1.620	Dinas PUTR
1.301	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Hutatoruan IV Kec. Tarutung)	Jalan Desa Hutatoruan IV Kec. Tarutung	495	Dinas PUTR
1.302	Tanah Dibawah Jalan Desa (Revitalisasi Jalan dan Saluran Jalan Strategis I)	Revitalisasi Jalan dan Saluran Jalan Strategis I	972	Dinas PUTR
1.303	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Tapian Nauli - Lumban Pinasu Parmonangan Kec. Muara)	Jalan Tapian Nauli - Lumban Pinasu Parmonangan Kec. Muara	486	Dinas PUTR
1.304	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Siarang-arang - Peatolong Kec. Tarutung)	Jalan Siarang-arang - Peatolong Kec. Tarutung	1.050	Dinas PUTR
1.305	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Lumban Tonga-tonga menuju Sitandiang Desa Hutabarat Pagar Batu Kecamatan Sipoholon)	Perkerasan Jalan Lumban Tonga-tonga menuju Sitandiang Desa Hutabarat Pagar Batu Kecamatan Sipoholon	655	Dinas PUTR
1.306	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Dusun Lbn Lobu Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung)	Jln Dusun Lbn Lobu Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung	1.038	Dinas PUTR
1.307	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Simp Jln Negara - Sibuntuon Sitabotabo Kec. Siborongborong)	Jln Simp Jln Negara - Sibuntuon Sitabotabo Kec. Siborongborong	702	Dinas PUTR
1.308	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Nahornop - Pangaloan Kec. Sipoholon)	Jln Nahornop - Pangaloan Kec. Sipoholon	16.000	Dinas PUTR
1.309	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Dusun II Pea Desa Aek Raja Kec. Parmonangan)	Jln Dusun II Pea Desa Aek Raja Kec. Parmonangan	5.200	Dinas PUTR
1.310	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Lbn Situmorang Desa Lumban Ina-ina Kec. Pagaran)	Jln Lbn Situmorang Desa Lumban Ina-ina Kec. Pagaran	6.500	Dinas PUTR
1.311	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Sp Sitanggor - Horop Bulu Desa Aritonang Kec. Muara)	Jln Jrs Sp Sitanggor - Horop Bulu Desa Aritonang Kec. Muara	828	Dinas PUTR
1.312	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Lumban Aritonang Desa Banua Luhu Kec. Pagaran)	Jalan Lumban Aritonang Desa Banua Luhu Kec. Pagaran	5.200	Dinas PUTR
1.313	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Bonani Dolok Kecamatan Purbatua)	Jalan Desa Bonani Dolok Kecamatan Purbatua	5.850	Dinas PUTR
1.314	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Desa Partobuan Desa Siopat Bahal Kec. Pahae Jae)	Jln Desa Partobuan Desa Siopat Bahal Kec. Pahae Jae	13.650	Dinas PUTR
1.315	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Huta Dolok Menuju Lumban Tonga-tonga Kec. Sipahutar)	Jalan Huta Dolok Menuju Lumban Tonga-tonga Kec. Sipahutar	630	Dinas PUTR
1.316	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Menuju Tukka Nisolu Desa Siabal-abal III Kec. Sipahutar)	Jln Menuju Tukka Nisolu Desa Siabal-abal III Kec. Sipahutar	475	Dinas PUTR
1.317	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Paraliman Desa Onan Runggu III Kec. Sipahutar)	Jalan Dusun Paraliman Desa Onan Runggu III Kec. Sipahutar	4.875	Dinas PUTR
1.318	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Onan Runggu IV Kec. Sipahutar)	Jalan Desa Onan Runggu IV Kec. Sipahutar	195	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.319	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Jrs SMPN 6 - Parlombuan Kec. Pangaribuan)	Jalan Jrs SMPN 6 - Parlombuan Kec. Pangaribuan	3.900	Dinas PUTR
1.320	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Simoangkir Julu - Ds Siadempuan Kec. Siatas Barita)	Jalan Simoangkir Julu - Ds Siadempuan Kec. Siatas Barita	473	Dinas PUTR
1.321	Tanah Dibawah Jalan Desa (Tembok Penahan Tanah Desa Sihujur Kec. Tarutung)	Tembok Penahan Tanah Desa Sihujur Kec. Tarutung	5.200	Dinas PUTR
1.322	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Unte Mungkur - Batu Binumbun - Simatupang Kec. Muara)	Jln Jrs Unte Mungkur - Batu Binumbun - Simatupang Kec. Muara	636	Dinas PUTR
1.323	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Jrs. Simpang Bolon - Lobu Tonga Kec. Garoga)	Jalan Jrs. Simpang Bolon - Lobu Tonga Kec. Garoga	4.200	Dinas PUTR
1.324	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Hutagugur - Hatupangan Kec. Sipahutar)	Jln. Jrs. Hutagugur - Hatupangan Kec. Sipahutar	4.550	Dinas PUTR
1.325	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Raut Bosi Kec. Pangaribuan)	Jalan Desa Raut Bosi Kec. Pangaribuan	23.100	Dinas PUTR
1.326	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Golat Hutaginjang Kec. Siatas Barita)	Jalan Golat Hutaginjang Kec. Siatas Barita	2.600	Dinas PUTR
1.327	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Lumbanratus Dusun Rihit Bidang Desa Janji Nauli Kec. Purba Tua)	Jalan Dusun Lumbanratus Dusun Rihit Bidang Desa Janji Nauli Kec. Purba Tua	3.250	Dinas PUTR
1.328	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Pendidikan Kec. Sipoholon)	Jalan Pendidikan Kec. Sipoholon	1.013	Dinas PUTR
1.329	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Siborongborong - Butar Kec. Siborongborong)	Jalan Siborongborong - Butar Kec. Siborongborong	4.550	Dinas PUTR
1.330	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Parhorboan Kec. Pagaran)	Jalan Desa Parhorboan Kec. Pagaran	5.200	Dinas PUTR
1.331	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln. Jrs. Siparbue - Sigumbal Kec. Parmonangan)	Jln. Jrs. Siparbue - Sigumbal Kec. Parmonangan	4.914	Dinas PUTR
1.332	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Menuju Lumban Panopa Desa Siborongborong I Kec. Siborongborong)	Jalan Menuju Lumban Panopa Desa Siborongborong I Kec. Siborongborong	4.200	Dinas PUTR
1.333	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Lumban Aritonang Desa Aritonang Kec. Muara)	Jalan Dusun Lumban Aritonang Desa Aritonang Kec. Muara	21.700	Dinas PUTR
1.334	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Pohan Tonga Kec. Siborongborong)	Jalan Desa Pohan Tonga Kec. Siborongborong	7.800	Dinas PUTR
1.335	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Lumban Tanjung Kec. Pagaran)	Jalan Dusun Lumban Tanjung Kec. Pagaran	6.500	Dinas PUTR
1.336	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Sabungan Nihuta IV Kec. Sipahutar)	Jalan Desa Sabungan Nihuta IV Kec. Sipahutar	1.200	Dinas PUTR
1.337	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Simp. Jalan Negara - Panggabean Kec. Sipoholon)	Jalan Simp. Jalan Negara - Panggabean Kec. Sipoholon	7.800	Dinas PUTR
1.338	Tanah Dibawah Jalan Desa (JLN. MANGARA TAMBUNAN DESA PARDOMUAN KEC. PURBATUA)	JLN. MANGARA TAMBUNAN DESA PARDOMUAN KEC. PURBATUA	17.500	Dinas PUTR
1.339	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Simp Jalan Negara - Sitakka Kec. Tarutung)	Jalan Simp Jalan Negara - Sitakka Kec. Tarutung	52.500	Dinas PUTR
1.340	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Aek Nalom-Najumambe Kec Pangaribuan)	Jln Jrs Aek Nalom-Najumambe Kec Pangaribuan	3.250	Dinas PUTR
1.341	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln JrsHutaraja - Parlombuan Kec Pangaribuan)	Jln JrsHutaraja - Parlombuan Kec Pangaribuan	2.600	Dinas PUTR
1.342	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dolok Parmahan - Siriaria Kec Pangaribuan)	Jalan Dolok Parmahan - Siriaria Kec Pangaribuan	18.900	Dinas PUTR
1.343	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln JrsSigotom Timur _ Huta Gultom Kec Pangaribuan)	Jln JrsSigotom Timur _ Huta Gultom Kec Pangaribuan	11.900	Dinas PUTR
1.344	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Harianja I - II Kec Pangaribuan)	Jalan Harianja I - II Kec Pangaribuan	4.875	Dinas PUTR
1.345	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Peanornor Siaparpar Desa Simasom Toruan Kec Pahae Julu)	Jalan Peanornor Siaparpar Desa Simasom Toruan Kec Pahae Julu	23.100	Dinas PUTR
1.346	Tanah Dibawah Jalan Desa (DYK Jalan Buntul Godang Desa Sibaganding Kec Pahae Julu)	DYK Jalan Buntul Godang Desa Sibaganding Kec Pahae Julu	15.400	Dinas PUTR
1.347	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Pantis-Siparpar Desa Pantis Kec Pahae Julu)	Jln Jrs Pantis-Siparpar Desa Pantis Kec Pahae Julu	2.600	Dinas PUTR
1.348	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Dusun Boltok Nihuta-Lumban Baringin Desa Aek Nauli II Kec Sipahutar)	Perkerasan Jalan Dusun Boltok Nihuta-Lumban Baringin Desa Aek Nauli II Kec Sipahutar	3.250	Dinas PUTR
1.349	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Hutatinggi Sukarame Desa Aek Nauli III Kec Sipahutar)	Jalan Hutatinggi Sukarame Desa Aek Nauli III Kec Sipahutar	2.800	Dinas PUTR
1.350	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sianjung-anjung Desa Sipahutar I Kec Sipahutar)	Jalan Sianjung-anjung Desa Sipahutar I Kec Sipahutar	7.800	Dinas PUTR
1.351	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Pahuk Desa Sipahutar III Kec Sipahutar)	Perkerasan Jalan Pahuk Desa Sipahutar III Kec Sipahutar	5.600	Dinas PUTR
1.352	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sosorliang Jae Jonang Desa Sabungan Nihuta II Kec Sipahutar)	Jalan Sosorliang Jae Jonang Desa Sabungan Nihuta II Kec Sipahutar	21.000	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.353	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Siabal-abal I Hutagurgur (Sirindur) Desa Siabalabal I Kec Sipahutar Pengaspalan Jalan Dusun Toruan-Lumban Holbung-Lumban)	Jalan Siabal-abal I Hutagurgur Sirindur Desa Siabalabal I Kec Sipahutar Pengaspalan Jalan Dusun Toruan-Lumban Holbung-Lumban	2.600	Dinas PUTR
1.354	Tanah Dibawah Jalan Desa (Panaehan-Lumban Pinasa Desa Siabalabal III Kec Sipahutar)	Panaehan-Lumban Pinasa Desa Siabalabal III Kec Sipahutar	8.400	Dinas PUTR
1.355	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Ambarhoda Desa Onan Runggu I Kec Sipahutar)	Jalan Ambarhoda Desa Onan Runggu I Kec Sipahutar	10.500	Dinas PUTR
1.356	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Onan Runggu Tangkapan Desa Onan Runggu III Kec Sipahutar)	Perkerasan Jalan Onan Runggu Tangkapan Desa Onan Runggu III Kec Sipahutar	14.000	Dinas PUTR
1.357	Tanah Dibawah Jalan Desa (drainase di Tapian Nauli Desa Tapian Nauli II Kec Sipahutar)	drainase di Tapian Nauli Desa Tapian Nauli II Kec Sipahutar	139	Dinas PUTR
1.358	Tanah Dibawah Jalan Desa (Janji Raja Parpatihan Desa Tapian Nauli III Kec Sipahutar)	Janji Raja Parpatihan Desa Tapian Nauli III Kec Sipahutar	2.700	Dinas PUTR
1.359	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Lobu Sihim - Desa Dolok Sanggul Desa Lobu Sihim Kec Simangumban)	Jln Jrs Lobu Sihim - Desa Dolok Sanggul Desa Lobu Sihim Kec Simangumban	4.200	Dinas PUTR
1.360	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Dusun Parlabian - Batu nabolon Desa Dolok Saut Kec Simangumban)	Jln Jrs Dusun Parlabian - Batu nabolon Desa Dolok Saut Kec Simangumban	12.600	Dinas PUTR
1.361	Tanah Dibawah Jalan Desa (Pengerasan Jalan Lumban Holbung-Lumban Dapdap Desa Lobu Hole Kec Siatas Barita)	Pengerasan Jalan Lumban Holbung-Lumban Dapdap Desa Lobu Hole Kec Siatas Barita	17.500	Dinas PUTR
1.362	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Enda Portibi - Parbabian Desa Enda Portibi Kec Siatas Barita)	Jln Jrs Enda Portibi - Parbabian Desa Enda Portibi Kec Siatas Barita	2.400	Dinas PUTR
1.363	Tanah Dibawah Jalan Desa (jalan Desa Lumban Siagian Julu Kec Siatas Barita)	jalan Desa Lumban Siagian Julu Kec Siatas Barita	5.200	Dinas PUTR
1.364	Tanah Dibawah Jalan Desa (Pengasapalan Jalan menuju Dusun Siadimpuan Desa Simorangkir Habinsaran Kec Siatas Barita)	Pengasapalan Jalan menuju Dusun Siadimpuan Desa Simorangkir Habinsaran Kec Siatas Barita	5.525	Dinas PUTR
1.365	Tanah Dibawah Jalan Desa (Dyk Penahan Tanah Dusun Lumban Batu Desa Simorangkir Julu Kec Siatas Barita)	Dyk Penahan Tanah Dusun Lumban Batu Desa Simorangkir Julu Kec Siatas Barita	5.200	Dinas PUTR
1.366	Tanah Dibawah Jalan Desa (Drainase Huta Rambutan Desa Purbatua Kec Purbatua)	Drainase Huta Rambutan Desa Purbatua Kec Purbatua	2.250	Dinas PUTR
1.367	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Ramba Tonga Desa Parsaoran J Angkola Kec Purbatua)	Perkerasan Jalan Ramba Tonga Desa Parsaoran J Angkola Kec Purbatua	6.300	Dinas PUTR
1.368	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan SMPN 1 Purbatua Desa Janji Nauli Kec Purbatua)	Jalan SMPN 1 Purbatua Desa Janji Nauli Kec Purbatua	21.700	Dinas PUTR
1.369	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Aek Bongbongan Desa Hutanagodang Kec Purbatua)	Jalan Aek Bongbongan Desa Hutanagodang Kec Purbatua	5.200	Dinas PUTR
1.370	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Pagaran-Sigompulon Desa Sitolu Ompu Kec Pahae Jae)	Jln Jrs Pagaran-Sigompulon Desa Sitolu Ompu Kec Pahae Jae	13.650	Dinas PUTR
1.371	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Sitampurung Kec Tarutung)	Jalan Desa Sitampurung Kec Tarutung	19.500	Dinas PUTR
1.372	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Sihujur Kec Tarutung)	Jalan Desa Sihujur Kec Tarutung	3.250	Dinas PUTR
1.373	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Parik Sabungan Desa Siandorandor Kec Tarutung)	Perkerasan Jalan Parik Sabungan Desa Siandorandor Kec Tarutung	3.900	Dinas PUTR
1.374	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Padang Bulan - Batu Nabolon Kec Garoga)	Jln Jrs Padang Bulan - Batu Nabolon Kec Garoga	5.600	Dinas PUTR
1.375	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Lumban Hariara Desa Siraja Hutagalung Kec Siatas Barita)	Jalan Lumban Hariara Desa Siraja Hutagalung Kec Siatas Barita	8.400	Dinas PUTR
1.376	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Simaungmaung - SMP 1 Tarutung Kec Tarutung)	Jln Jrs Simaungmaung - SMP 1 Tarutung Kec Tarutung	18.900	Dinas PUTR
1.377	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Jurusan Adian Padang - Lobu Nauli Kec Sipahutar)	Jalan Jurusan Adian Padang - Lobu Nauli Kec Sipahutar	5.200	Dinas PUTR
1.378	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Simp Holbung Bagas - Liang Sitolutolu - Holbung Bagas Kec Sipahutar)	Jln Simp Holbung Bagas - Liang Sitolutolu - Holbung Bagas Kec Sipahutar	475	Dinas PUTR
1.379	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Lontung Jae II Kec Garoga)	Jln Lontung Jae II Kec Garoga	8.400	Dinas PUTR
1.380	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Jurusan Parinsoran - SMP 5 Kec Garoga)	Jalan Jurusan Parinsoran - SMP 5 Kec Garoga	6.500	Dinas PUTR
1.381	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sipurikpurik Desa Janji Nauli Kec Purbatua)	Jalan Sipurikpurik Desa Janji Nauli Kec Purbatua	5.200	Dinas PUTR
1.382	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Jurusan Sigompulon Pagaran Kec Pahae Julu)	Jalan Jurusan Sigompulon Pagaran Kec Pahae Julu	33.800	Dinas PUTR
1.383	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Jurusan Desa Sitompul - Pansurnapitu Kec Siatas Barita)	Jalan Jurusan Desa Sitompul - Pansurnapitu Kec Siatas Barita	3.900	Dinas PUTR
1.384	Tanah Dibawah Jalan Desa (Drainase Jalan menuju SMA Negeri 2 Siborongborong Kec Siborongborong)	Drainase Jalan menuju SMA Negeri 2 Siborongborong Kec Siborongborong	7.000	Dinas PUTR
1.385	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Kompleks Sandaran Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec Sipoholon)	Jalan Kompleks Sandaran Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec Sipoholon	12.600	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.386	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Dolok Saribu Kec Pagaran)	Jalan Desa Dolok Saribu Kec Pagaran	5.200	Dinas PUTR
1.387	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Silitonga - Lumban Ina-ina Kec Pagaran)	Jln Jrs Silitonga - Lumban Ina-ina Kec Pagaran	5.600	Dinas PUTR
1.388	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Simp Jln Negara - Sibuntuon Sitabotabo Kec Siborongborong)	Jln Simp Jln Negara - Sibuntuon Sitabotabo Kec Siborongborong	18.900	Dinas PUTR
1.389	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Kandang Kec Siborongborong)	Jalan Dusun Kandang Kec Siborongborong	4.900	Dinas PUTR
1.390	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Dusun II - Dusun III Desa Batubinumbun Kec Muara)	Jln Jrs Dusun II - Dusun III Desa Batubinumbun Kec Muara	44.200	Dinas PUTR
1.391	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Pangkirapan Sibunga-bunga Desa Dolok Martumbur Kec Muara)	Perkerasan Jalan Pangkirapan Sibunga-bunga Desa Dolok Martumbur Kec Muara	10.500	Dinas PUTR
1.392	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Sidilani Tano Desa Silando Kec Muara)	Perkerasan Jalan Sidilani Tano Desa Silando Kec Muara	5.600	Dinas PUTR
1.393	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Bonan Dolok Desa Sitanggor Kec Muara)	Jalan Bonan Dolok Desa Sitanggor Kec Muara	8.400	Dinas PUTR
1.394	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Aek Sibontar Desa Tapian Nauli Kec Sipoholon)	Jalan Dusun Aek Sibontar Desa Tapian Nauli Kec Sipoholon	8.400	Dinas PUTR
1.395	Tanah Dibawah Jalan Desa (jalan Dusun Sitorngom Desa Pagaran Lambung III Kec Adian Koting)	jalan Dusun Sitorngom Desa Pagaran Lambung III Kec Adian Koting	7.800	Dinas PUTR
1.396	Tanah Dibawah Jalan Desa (jalan Jrs Dusun Torhasiholan - Nahornop Desa Banuaji II Kec Adian Koting)	jalan Jrs Dusun Torhasiholan - Nahornop Desa Banuaji II Kec Adian Koting	11.900	Dinas PUTR
1.397	Tanah Dibawah Jalan Desa (jalan Gereja Desa Banuaji IV Kec Adian Koting)	jalan Gereja Desa Banuaji IV Kec Adian Koting	540	Dinas PUTR
1.398	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun III Lumban Pasaribu Desa Banualuhu Kec Pagaran)	Jalan Dusun III Lumban Pasaribu Desa Banualuhu Kec Pagaran	5.000	Dinas PUTR
1.399	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Unte Jungga - Rumaijuk Desa Lumban Silintong Kec Pagaran)	Jalan Unte Jungga - Rumaijuk Desa Lumban Silintong Kec Pagaran	9.000	Dinas PUTR
1.400	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jln Jrs Sosor Onan Runggu - Hutagodang Desa Simamora Hasibuan Kec Pagaran)	Perkerasan Jln Jrs Sosor Onan Runggu - Hutagodang Desa Simamora Hasibuan Kec Pagaran	10.500	Dinas PUTR
1.401	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jln Jrs Sosor Godang - Matanggor Desa Hasibuan Kec Pagaran)	Perkerasan Jln Jrs Sosor Godang - Matanggor Desa Hasibuan Kec Pagaran	11.200	Dinas PUTR
1.402	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Tornauli Desa Manalu Dolok Kec Parmonangan)	Jalan Dusun Tornauli Desa Manalu Dolok Kec Parmonangan	10.400	Dinas PUTR
1.403	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln menuju Dusun III Pea Desa Aek Raja KecParmonangan)	Jln menuju Dusun III Pea Desa Aek Raja KecParmonangan	19.600	Dinas PUTR
1.404	Tanah Dibawah Jalan Desa (Peningkatann Jln Jrs Dusun Sihopong (Desa Manalu Dolok)-Desa Hutatua Kec Parmonangan)	Peningkatann Jln Jrs Dusun Sihopong Desa Manalu Dolok-Desa Hutatua Kec Parmonangan	19.600	Dinas PUTR
1.405	Tanah Dibawah Jalan Desa (Lumban Manalu-Simotung Desa Batuarimo Kec Parmonangan)	Lumban Manalu-Simotung Desa Batuarimo Kec Parmonangan	2.600	Dinas PUTR
1.406	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sosor Bagi Dusun I Desa Bahal Batu I Kec Siborongborong)	Jalan Sosor Bagi Dusun I Desa Bahal Batu I Kec Siborongborong	16.100	Dinas PUTR
1.407	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Aek Mas Bata Guru Dusun II Desa Bahal Batu II Kec Siborongborong)	Jalan Aek Mas Bata Guru Dusun II Desa Bahal Batu II Kec Siborongborong	4.550	Dinas PUTR
1.408	Tanah Dibawah Jalan Desa (jalan Desa Bahal Batu III Desa Bahal Batu III Kec Siborongborong)	jalan Desa Bahal Batu III Desa Bahal Batu III Kec Siborongborong	4.200	Dinas PUTR
1.409	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun I Bahal Imbalo dan Sitio-tio Desa Lobu Siregar I Kec Siborongborong)	Jalan Dusun I Bahal Imbalo dan Sitio-tio Desa Lobu Siregar I Kec Siborongborong	5.200	Dinas PUTR
1.410	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkersan jalan Parbasiran Desa Lumban Tonga-tonga Kec Siborongborong)	Perkersan jalan Parbasiran Desa Lumban Tonga-tonga Kec Siborongborong	5.600	Dinas PUTR
1.411	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs SD Ambar Jurjur - Dusun III Desa Paniaran Kec Siborongborong)	Jln Jrs SD Ambar Jurjur - Dusun III Desa Paniaran Kec Siborongborong	5.200	Dinas PUTR
1.412	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sosor Sijaba Desa Pariksabungan Kec Siborongborong)	Jalan Sosor Sijaba Desa Pariksabungan Kec Siborongborong	23	Dinas PUTR
1.413	Tanah Dibawah Jalan Desa (Dyk Jalan Dusun Ambar Bolak Desa Siborongborong I Kec Siborongborong)	Dyk Jalan Dusun Ambar Bolak Desa Siborongborong I Kec Siborongborong	70	Dinas PUTR
1.414	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun II Desa Siborongborong II Kec Siborongborong)	Jalan Dusun II Desa Siborongborong II Kec Siborongborong	12	Dinas PUTR
1.415	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Karya Tani Dusun II Pangasean Desa Siarao Kec Siborongborong)	Jalan Karya Tani Dusun II Pangasean Desa Siarao Kec Siborongborong	38	Dinas PUTR
1.416	Tanah Dibawah Jalan Desa (jalan Parulohan Simpang Butar Desa Sigumbang Kec Siborongborong)	jalan Parulohan Simpang Butar Desa Sigumbang Kec Siborongborong	127	Dinas PUTR
1.417	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Dusun V Siampapaga Desa Sitampurung Kec Siborongborong)	Perkerasan Jalan Dusun V Siampapaga Desa Sitampurung Kec Siborongborong	144	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.418	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Hutatoruan - Lopian Desa Sitabotabo Kec Siborongborong)	Jalan Hutatoruan - Lopian Desa Sitabotabo Kec Siborongborong	405	Dinas PUTR
1.419	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Lbn Sosor Desa Siaro Kecamatan Siborongborong)	Jalan Lbn Sosor Desa Siaro Kecamatan Siborongborong	72	Dinas PUTR
1.420	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Jrs Lehu - Pansinaran Kec Sipoholon)	Jalan Jrs Lehu - Pansinaran Kec Sipoholon	125	Dinas PUTR
1.421	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Hutanagodang - Huta Aritonang Sisoding Kec Muara)	Jln Jrs Hutanagodang - Huta Aritonang Sisoding Kec Muara	18	Dinas PUTR
1.422	Tanah Dibawah Jalan Desa (Drainase Jalan Sibadak Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec Sipoholon)	Drainase Jalan Sibadak Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec Sipoholon	120	Dinas PUTR
1.423	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Menuju Dusun Hutagalung Talpe Desa Pagar batu Kec Sipoholon)	Jalan Menuju Dusun Hutagalung Talpe Desa Pagar batu Kec Sipoholon	105	Dinas PUTR
1.424	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Lumban Sijungkot Desa Hutauruk Parjulu Kec Sipoholon)	Jalan Lumban Sijungkot Desa Hutauruk Parjulu Kec Sipoholon	42	Dinas PUTR
1.425	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Rurajulu Dolok Kec Sipoholon)	Jalan Desa Rurajulu Dolok Kec Sipoholon	170	Dinas PUTR
1.426	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Silagelage Dusun Hutagalung Lumbantobing Desa Pagar Batu Kec Sipoholon)	Jalan Silagelage Dusun Hutagalung Lumbantobing Desa Pagar Batu Kec Sipoholon	311	Dinas PUTR
1.427	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Habinsaran Desa Lobusingkam Kec Sipoholon)	Jalan Dusun Habinsaran Desa Lobusingkam Kec Sipoholon	26	Dinas PUTR
1.428	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong)	Jalan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong	54	Dinas PUTR
1.429	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran)	Jalan Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran	27	Dinas PUTR
1.430	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran)	Jalan Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran	159	Dinas PUTR
1.431	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Simanampang Kecamatan Siatas Barita)	Jalan Desa Simanampang Kecamatan Siatas Barita	160	Dinas PUTR
1.432	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Onan Runggu II Kecamatan Sipahutar)	Jalan Desa Onan Runggu II Kecamatan Sipahutar	82	Dinas PUTR
1.433	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Rahut Bosi Kecamatan Pangaribuan)	Jalan Desa Rahut Bosi Kecamatan Pangaribuan	12	Dinas PUTR
1.434	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Pagaran Lambung II Kecamatan Adiankoting)	Jalan Desa Pagaran Lambung II Kecamatan Adiankoting	37	Dinas PUTR
1.435	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Sirajaoloan Kec Tarutung (BKPSU))	Jalan Desa Sirajaoloan Kec Tarutung BKPSU	30	Dinas PUTR
1.436	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Adianbatu Desa Sabungannihuta IV Kec Sipahutar (BKPSU))	Jalan Adianbatu Desa Sabungannihuta IV Kec Sipahutar BKPSU	50	Dinas PUTR
1.437	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Lumban Dolok Kec Pahae Julu (BKPSU))	Jalan Desa Lumban Dolok Kec Pahae Julu BKPSU	25	Dinas PUTR
1.438	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Sibulanbulan Kec Purbatua (BKPSU))	Jalan Desa Sibulanbulan Kec Purbatua BKPSU	175	Dinas PUTR
1.439	Tanah Dibawah Jalan Desa (Pengasapalan Jln Desa Hutatinggi Dusun Bonan Dolok Kecamatan Parmonangan)	Pengasapalan Jln Desa Hutatinggi Dusun Bonan Dolok Kecamatan Parmonangan	77	Dinas PUTR
1.440	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Menuju GKPI Adiankoting Kec Adiankoting)	Jalan Menuju GKPI Adiankoting Kec Adiankoting	25	Dinas PUTR
1.441	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Hutaraja Simanungkalit Kec Sipoholon)	Jalan Desa Hutaraja Simanungkalit Kec Sipoholon	50	Dinas PUTR
1.442	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Desa Pohan Tonga Kec Siborongborong)	Jalan Desa Pohan Tonga Kec Siborongborong	72	Dinas PUTR
1.443	Tanah Dibawah Jalan Desa (Lanjutan Irigasi Sitihal Desa Pagar Batu Kec Sipoholon)	Lanjutan Irigasi Sitihal Desa Pagar Batu Kec Sipoholon	30	Dinas PUTR
1.444	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Sosor Tolong Kec Sipahutar)	Jalan Sosor Tolong Kec Sipahutar	54	Dinas PUTR
1.445	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Jrs Lumban Tongatonga - Simarpinggan Kec Sipoholon)	Jln Jrs Lumban Tongatonga - Simarpinggan Kec Sipoholon	16	Dinas PUTR
1.446	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan menuju Ds Simarhompa Kecamatan Sipahutar)	Jalan menuju Ds Simarhompa Kecamatan Sipahutar	30	Dinas PUTR
1.447	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan di Dusun Simangonding Ds Lumban Dolok Kec Pahae Julu)	Jalan di Dusun Simangonding Ds Lumban Dolok Kec Pahae Julu	78	Dinas PUTR
1.448	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan di Desa Sabungnihuta IV Kec Sipahutar)	Jalan di Desa Sabungnihuta IV Kec Sipahutar	31	Dinas PUTR
1.449	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Huta Dangir Desa Silangkitang Kec Pahae Jae)	Jalan Huta Dangir Desa Silangkitang Kec Pahae Jae	77	Dinas PUTR
1.450	Tanah Dibawah Jalan Desa (Pembukaan Jln Jrs Lumban Bagasan-Sayur Matio Kec Garoga)	Pembukaan Jln Jrs Lumban Bagasan-Sayur Matio Kec Garoga	11	Dinas PUTR
1.451	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Aek Nauli I Kec Sipahutar)	Jalan Aek Nauli I Kec Sipahutar	77	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.452	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jln Kompleks Asrama Koramil Desa Pohan Tonga Kec Siborong-borong)	Jln Kompleks Asrama Koramil Desa Pohan Tonga Kec Siborong-borong	51	Dinas PUTR
1.453	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perkerasan Jalan Menuju Dusun Lumban Dolok Desa Sitompul Kec Siatas Barita)	Perkerasan Jalan Menuju Dusun Lumban Dolok Desa Sitompul Kec Siatas Barita	33	Dinas PUTR
1.454	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Lobu Siregar II Kec Siborongborong)	Jalan Lobu Siregar II Kec Siborongborong	28	Dinas PUTR
1.455	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Di Desa Siandor - Andor Kecamatan Tarutung)	Jalan Di Desa Siandor - Andor Kecamatan Tarutung	21.000	Dinas PUTR
1.456	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Di Dusun Lumban Lobu Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung)	Longsor Di Dusun Lumban Lobu Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung	2.600	Dinas PUTR
1.457	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Di Dusun I Lumban Dolok III Parbubu II Kecamatan Tarutung)	Longsor Di Dusun I Lumban Dolok III Parbubu II Kecamatan Tarutung	3.600	Dinas PUTR
1.458	Tanah Dibawah Jalan Desa (Kerusakan Irigasi Di Dusun II Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung)	Kerusakan Irigasi Di Dusun II Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung	3.600	Dinas PUTR
1.459	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Jalan Kompleks Kantor Pusat HKBP Pearaja Kelurahan Hutatoruan V Kecamatan Tarutung)	Longsor Jalan Kompleks Kantor Pusat HKBP Pearaja Kelurahan Hutatoruan V Kecamatan Tarutung	28	Dinas PUTR
1.460	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Jalan Dusun Aek Nasia Menuju Desa Pancurbatu Kecamatan Tarutung)	Longsor Jalan Dusun Aek Nasia Menuju Desa Pancurbatu Kecamatan Tarutung	37	Dinas PUTR
1.461	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Di Dusun Lumban Balian Desa Lobu Hole Kecamatan Siatas Barita)	Jalan Di Dusun Lumban Balian Desa Lobu Hole Kecamatan Siatas Barita	33	Dinas PUTR
1.462	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Di Desa Lobu Hole Kecamatan Siatas Barita)	Jalan Di Desa Lobu Hole Kecamatan Siatas Barita	109	Dinas PUTR
1.463	Tanah Dibawah Jalan Desa (Kerusakan Jalan Di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon)	Kerusakan Jalan Di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon	63	Dinas PUTR
1.464	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Dusun Aek Simbontar Desa Huta Raja Hasundutan Kec. Sipoholon)	Jalan Dusun Aek Simbontar Desa Huta Raja Hasundutan Kec. Sipoholon	24	Dinas PUTR
1.465	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Badan Jalan Sitapayan Menuju Sanimatinggi Dusun Kobun Desa Pagar lambung IV Kec. Adiankoting)	Longsor Badan Jalan Sitapayan Menuju Sanimatinggi Dusun Kobun Desa Pagar lambung IV Kec. Adiankoting	45	Dinas PUTR
1.466	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perbaikan Longsor Jalan Di Dusun Lobu Talpe Desa Hutabarat Kec. Pahae Julu)	Perbaikan Longsor Jalan Di Dusun Lobu Talpe Desa Hutabarat Kec. Pahae Julu	9.000	Dinas PUTR
1.467	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perbaikan Tembok Penahan Tanah Di Desa Huta Nagodang Kec. Purbatua)	Perbaikan Tembok Penahan Tanah Di Desa Huta Nagodang Kec. Purbatua	7.200	Dinas PUTR
1.468	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Irigasi Di Dusun IV Sigambogambo Desa Lobu Siregar II Kec. Siborongborong)	Longsor Irigasi Di Dusun IV Sigambogambo Desa Lobu Siregar II Kec. Siborongborong	1.800	Dinas PUTR
1.469	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Di Dusun II Parulohan Simanugkalit Desa Sigumbang Kec. Siborongborong)	Jalan Di Dusun II Parulohan Simanugkalit Desa Sigumbang Kec. Siborongborong	2.700	Dinas PUTR
1.470	Tanah Dibawah Jalan Desa (Bahu Jalan Jrs. Dusun Sibuntuon Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong)	Bahu Jalan Jrs. Dusun Sibuntuon Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong	7.800	Dinas PUTR
1.471	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Di Desa Sipultak Kec. Pagaran)	Jalan Di Desa Sipultak Kec. Pagaran	58	Dinas PUTR
1.472	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Di Desa Simamora Hasibuan Kec. Pagaran)	Jalan Di Desa Simamora Hasibuan Kec. Pagaran	19.500	Dinas PUTR
1.473	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Jalan Jrs Parmonangan - Parratusan Km. 05 Desa Manalu Kec. Parmonangan)	Longsor Jalan Jrs Parmonangan - Parratusan Km. 05 Desa Manalu Kec. Parmonangan	8.400	Dinas PUTR
1.474	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Jalan Hutatinggi Menuju Dusun Simargalung Km.1 Desa Huta Tinggi Kec. Parmonangan)	Longsor Jalan Hutatinggi Menuju Dusun Simargalung Km.1 Desa Huta Tinggi Kec. Parmonangan	5.850	Dinas PUTR
1.475	Tanah Dibawah Jalan Desa (Perbaikan Dyk Semen Di Desa Onan Runggu IV Kecamatan Sipahutar)	Perbaikan Dyk Semen Di Desa Onan Runggu IV Kecamatan Sipahutar	10.500	Dinas PUTR
1.476	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Badan Jalan Pada Ruas Jalan Di Dusun Parlombuan Desa Tapian Nauli III Kec. Sipahutar)	Longsor Badan Jalan Pada Ruas Jalan Di Dusun Parlombuan Desa Tapian Nauli III Kec. Sipahutar	14.000	Dinas PUTR
1.477	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Badan Jalan Dari Dusun Lumban Holbung Desa Onan Rungggu III Kec. Sipahutar)	Longsor Badan Jalan Dari Dusun Lumban Holbung Desa Onan Rungggu III Kec. Sipahutar	4.800	Dinas PUTR
1.478	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Badan Jalan Dan Gorong Gorong Desa Onan Runggu III Kec. Sipahutar)	Longsor Badan Jalan Dan Gorong Gorong Desa Onan Runggu III Kec. Sipahutar	10.500	Dinas PUTR
1.479	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Jalan Dusun Lobu Nauli - Aek Napa Desa Sabungan NiHuta IV Kecamatan Sipahutar)	Longsor Jalan Dusun Lobu Nauli - Aek Napa Desa Sabungan NiHuta IV Kecamatan Sipahutar	6.500	Dinas PUTR
1.480	Tanah Dibawah Jalan Desa (Jalan Di Dusun Hutabaru Desa Situmeang Hasundutan Kecamatan Sipoholon)	Jalan Di Dusun Hutabaru Desa Situmeang Hasundutan Kecamatan Sipoholon	4.200	Dinas PUTR
1.481	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Jalan Dusun Huta Gareja Menuju Dusun Rinabidang Di Desa Banuaji I Kecamatan Adiankoting)	Longsor Jalan Dusun Huta Gareja Menuju Dusun Rinabidang Di Desa Banuaji I Kecamatan Adiankoting	16.100	Dinas PUTR
1.482	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Tembok Penahan Tanah di Desa Simaungmaung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung)	Longsor Tembok Penahan Tanah di Desa Simaungmaung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung	1.950	Dinas PUTR
1.483	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Tembok Penahan Tanah di Dusun I Janji Bilang Desa Parbubu II Kecamatan Tarutung)	Longsor Tembok Penahan Tanah di Dusun I Janji Bilang Desa Parbubu II Kecamatan Tarutung	42.900	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.484	Tanah Dibawah Jalan Desa (Kerusakan Tembok Penahan Tanah Dusun Aek Imbo Desa Sibalanga Kecamatan Adiankoting)	Kerusakan Tembok Penahan Tanah Dusun Aek Imbo Desa Sibalanga Kecamatan Adiankoting	5.200	Dinas PUTR
1.485	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Jalan Penghubung Lobu Nauli Aek Napa Kecamatan Muara)	Longsor Jalan Penghubung Lobu Nauli Aek Napa Kecamatan Muara	3.900	Dinas PUTR
1.486	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor di Dusun II Desa Aritonang Kecamatan Muara)	Longsor di Dusun II Desa Aritonang Kecamatan Muara	3.900	Dinas PUTR
1.487	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Jurusan Lobu Siregar Dusun I Lumban Marubun Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong)	Longsor Jurusan Lobu Siregar Dusun I Lumban Marubun Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong	3.250	Dinas PUTR
1.488	Tanah Dibawah Jalan Desa (Kerusakan Tembok Penahan Tanah dan Drainase di Dusun Peanajagar Desa Siaro Kecamatan Siborongborong)	Kerusakan Tembok Penahan Tanah dan Drainase di Dusun Peanajagar Desa Siaro Kecamatan Siborongborong	5.600	Dinas PUTR
1.489	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor pada Ruas Jalan di Lumban Panopa Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong)	Longsor pada Ruas Jalan di Lumban Panopa Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong	4.500	Dinas PUTR
1.490	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor pada Badan Jalan di Dusun Sihungkus Desa Lumban Inaina Kecamatan Pagaran)	Longsor pada Badan Jalan di Dusun Sihungkus Desa Lumban Inaina Kecamatan Pagaran	29.400	Dinas PUTR
1.491	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor pada Badan Jalan di Dusun Silitonga Hariara Desa Lumban Inaina Kecamatan Pagaran)	Longsor pada Badan Jalan di Dusun Silitonga Hariara Desa Lumban Inaina Kecamatan Pagaran	3.500	Dinas PUTR
1.492	Tanah Dibawah Jalan Desa (Kerusakan Tembok Penahan Tanah dan Drainase di Desa Lumban Julu Kecamatan Pagaran)	Kerusakan Tembok Penahan Tanah dan Drainase di Desa Lumban Julu Kecamatan Pagaran	10.500	Dinas PUTR
1.493	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor Jalan di Desa Sibaragas Menuju Sisordak Kecamatan Parmonangan)	Longsor Jalan di Desa Sibaragas Menuju Sisordak Kecamatan Parmonangan	5.600	Dinas PUTR
1.494	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor pada Ruas Jalan Menuju Sungai Aek Situnggapa Kecamatan Siatas Barita)	Longsor pada Ruas Jalan Menuju Sungai Aek Situnggapa Kecamatan Siatas Barita	14.700	Dinas PUTR
1.495	Tanah Dibawah Jalan Desa (Penanggulangan Benacana Alam Longsor di Dusun Lumban Joro Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae)	Penanggulangan Benacana Alam Longsor di Dusun Lumban Joro Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae	4.550	Dinas PUTR
1.496	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor di Dusun Sibaganding Kecamatan Pahae Julu)	Longsor di Dusun Sibaganding Kecamatan Pahae Julu	1.800	Dinas PUTR
1.497	Tanah Dibawah Jalan Desa (Longsor pada Ruas Jalan Lumban Dolok Kecamatan Pahae Julu)	Longsor pada Ruas Jalan Lumban Dolok Kecamatan Pahae Julu	14.000	Dinas PUTR
1.498	Tanah Dibawah Jalan Desa (Tanah Longsor di Desa Huta Nagodang Kecamatan Purbatua)	Tanah Longsor di Desa Huta Nagodang Kecamatan Purbatua	6.500	Dinas PUTR
1.499	Tanah Dibawah Jalan Desa (Kerusakan Gorong-Gorong di Huta Nagodang Menuju Desa Sidua Bahal Kecamatan Purbatua)	Kerusakan Gorong-Gorong di Huta Nagodang Menuju Desa Sidua Bahal Kecamatan Purbatua	10.500	Dinas PUTR
1.500	Tanah Dibawah Jalan Desa (Penaggulangan Bencana Alam Longsor Jalan Dusun Simaremare Desa Sabungan Ni Huta II Kecamatan Sipahutar)	Penaggulangan Bencana Alam Longsor Jalan Dusun Simaremare Desa Sabungan Ni Huta II Kecamatan Sipahutar	3.500	Dinas PUTR
1.501	Tanah Dibawah Jalan Desa (Di Desa Sidagal Parsorminan I Kecamatan Pangaribuan)	Di Desa Sidagal Parsorminan I Kecamatan Pangaribuan	30	Dinas PUTR
1.502	Tanah dibawah Pembangunan Jln. Desa Siaro	Jln. Desa Siaro	2.190	Dinas PUTR
1.503	Tanah dibawah Lanjutan Pembangunan Dyk Penahan Tanah pada Jalan Desa Siborongborong II Kec. Siborongborong	Dyk Penahan Tanah pada Jalan Desa Siborongborong II Kec. Siborongborong	140	Dinas PUTR
1.504	Tanah dibawah Peningkatan Jln Jrs Hutagurgur-Lobutolong-Sitanpongan Kec. Sipahutar	Jln Jrs Hutagurgur-Lobutolong-Sitanpongan Kec. Sipahutar	295	Dinas PUTR
1.505	Tanah dibawah Peningkatan Jln Jrs Hutaraja - Parlombuan Kec. Pangaribuan	Jln Jrs Hutaraja - Parlombuan Kec. Pangaribuan	1.755	Dinas PUTR
1.506	Tanah dibawah Pembangunan Jln Desa Dolok Martumbur Kec. Muara	Jln Desa Dolok Martumbur Kec. Muara	1.746	Dinas PUTR
1.507	Tanah dibawah Pembangunan Jln Sosor Tolong Kec.Sipahutar	Jln Sosor Tolong Kec.Sipahutar	500	Dinas PUTR
1.508	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Sisoding Kec. Parmonangan	Jalan Sisoding Kec. Parmonangan	1.425	Dinas PUTR
1.509	Tanah dibawah Pengaspalan Jln Pagarbatu - Dolok Imun Kec. Sipoholon	Jln Pagarbatu - Dolok Imun Kec. Sipoholon	2.050	Dinas PUTR
1.510	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Batu Manumpak - Dolok Marsait Kec. Pangaribuan	Jalan Batu Manumpak - Dolok Marsait Kec. Pangaribuan	2.700	Dinas PUTR
1.511	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Endaportibi Kec. Siatas Barita	Jalan Endaportibi Kec. Siatas Barita	1.193	Dinas PUTR
1.512	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Simatalo Kec. Muara	Jalan Simatalo Kec. Muara	2.520	Dinas PUTR
1.513	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Onan Buntul - Janji Nauli Kec. Purbatua	Jalan Onan Buntul - Janji Nauli Kec. Purbatua	1.500	Dinas PUTR
1.514	Tanah dibawah Pengaspalan Jln. Silitonga - Sihukkus Kec. Pagaran	Jln. Silitonga - Sihukkus Kec. Pagaran	1.235	Dinas PUTR
1.515	Tanah dibawah Peningkatan Jln. Harambir - Godung Kec. Purbatua	Jln. Harambir - Godung Kec. Purbatua	1.170	Dinas PUTR
1.516	Tanah dibawah Peningkatan Jln. Sitandiang Kec. Sipoholon	Jln. Sitandiang Kec. Sipoholon	1.958	Dinas PUTR
1.517	Tanah dibawah Peningkatan Jln. Huta Dolok - Lumban Tonga-tonga	Jln. Huta Dolok - Lumban Tonga-tonga	1.904	Dinas PUTR
1.518	Tanah dibawah Pembangunan Jalan Karya Tani Kec. Siborongborong	Jalan Karya Tani Kec. Siborongborong	1.800	Dinas PUTR
1.519	Tanah dibawah Pembangunan Jalan Simp. Jalan Negara - Parik Sabungan Kec. Siborongborong	Jalan Simp. Jalan Negara - Parik Sabungan Kec. Siborongborong	1.688	Dinas PUTR
1.520	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Sitabotabo Toruan Kec. Siborongborong	Jalan Sitabotabo Toruan Kec. Siborongborong	1.350	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.521	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Lumban Jabi Kec. Pagaran	Jalan Lumban Jabi Kec. Pagaran	1.625	Dinas PUTR
1.522	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Hariara/Simabe-mabe Siborongborong II Kec. Siborongborong	Jalan Hariara/Simabe-mabe Siborongborong II Kec. Siborongborong	1.800	Dinas PUTR
1.523	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Rura Pasar Kec. Tarutung	Jalan Rura Pasar Kec. Tarutung	750	Dinas PUTR
1.524	Tanah dibawah Pengaspalan Jln. Jrs. Aek Raja - Pangadangan Kec. Parmonangan	Jln. Jrs. Aek Raja - Pangadangan Kec. Parmonangan	1.355	Dinas PUTR
1.525	Tanah dibawah Pembangunan Jalan Golat - Siadempuan Kec. Siatas Barita	Jalan Golat - Siadempuan Kec. Siatas Barita	1.652	Dinas PUTR
1.526	Tanah dibawah Perkerasan Jalan Sipultak Dolok - Meat Kec. Pagaran	Jalan Sipultak Dolok - Meat Kec. Pagaran	1.913	Dinas PUTR
1.527	Tanah dibawah Pembangunan dusun Paraliman desa Onanrunggu III Sipahutar	Dusun Paraliman desa Onanrunggu III Sipahutar	1.677	Dinas PUTR
1.528	Tanah dibawah Pembangunan Jalan Gg Firdaus Komp. Stadion	Jalan Gg Firdaus Komp. Stadion	1.215	Dinas PUTR
1.529	Tanah dibawah Pengaspalan Jalan Bahal Batu II Kec. Siborongborong	Jalan Bahal Batu II Kec. Siborongborong	1.485	Dinas PUTR
1.530	Tanah Dibawah Jalan Desa Jln Smp Dan Sma Sarulla	Jln Smp Dan Sma Sarulla	600	Dinas PUTR
1.531	Tanah Dibawah Jalan Desa Jalan Merdeka - Smpn Sipahutar	Jalan Merdeka - Smpn Sipahutar	450	Dinas PUTR
1.532	Tanah Dibawah Jalan Desa Jalan Menuju Sekolah Santa Maria Tarutung	Jalan Menuju Sekolah Santa Maria Tarutung	750	Dinas PUTR
1.533	Tanah Dibawah Jalan Desa Jl. Cornelius Lumbantobing Komp. Mesjid	Jl. Cornelius Lumbantobing Komp. Mesjid	900	Dinas PUTR
1.534	Tanah Dibawah Jalan Desa Jalan Cornelius Lumbantobing Kompleks Mesjid	Jalan Cornelius Lumbantobing Kompleks Mesjid	1.755	Dinas PUTR
1.535	Tanah Dibawah Jalan Desa Gereja Katolik Samping Polsek Sipoholon	Gereja Katolik Samping Polsek Sipoholon	150	Dinas PUTR
1.536	Tanah Dibawah Jalan Desa Jalan Gereja Gkpi ADIan Koting Kec. ADIan Koting	Jalan Gereja Gkpi ADIan Koting Kec. ADIan Koting	300	Dinas PUTR
1.537	Tanah Dibawah Jalan Desa Simp. Puskesmas - Ktr. Upt PenDIDIkan	Simp. Puskesmas - Ktr. Upt PenDIDIkan	780	Dinas PUTR
1.538	Tanah Dibawah Jalan Desa Gkpi Siborongborong	Gkpi Siborongborong	750	Dinas PUTR
1.539	Tanah Dibawah Jalan Desa Siandor - Andor - Simp.SibaganDIng	Siandor - Andor - Simp.SibaganDIng	600	Dinas PUTR
1.540	Tanah Dibawah Jalan Desa Lumban Sinaga - Sibarabara - Sosor Silintong	Lumban Sinaga - Sibarabara - Sosor Silintong	450	Dinas PUTR
1.541	Tanah Dibawah Jalan Desa Peningkatan Jalan Menuju Gereja Gkpi/Sd N. Bonan Dolok Desa Hutatinggi II Kec. Parmonangan	Peningkatan Jalan Menuju Gereja Gkpi/Sd N. Bonan Dolok Desa Hutatinggi II Kec. Parmonangan	2.700	Dinas PUTR
1.542	Tanah Dibawah Jalan Desa Pembangunan Jln. Menuju Sd Negeri Nomor73250 Muara Tolang Kec. Simangumban	Pembangunan Jln. Menuju Sd Negeri Nomor73250 Muara Tolang Kec. Simangumban	720	Dinas PUTR
1.543	Tanah Dibawah Jalan Desa Peningkatan Jln Jrs Parmanuhan-Sibalanga Kec Garoga	Peningkatan Jln Jrs Parmanuhan-Sibalanga Kec Garoga	600	Dinas PUTR
1.544	Tanah Dibawah Jalan Desa Ramba Siala - Parsosoran	Ramba Siala - Parsosoran	1.050	Dinas PUTR
1.545	Tanah Dibawah Jalan Desa Peningkatan Jln Menuju Puskesmas Garoga Kec. Garoga	Peningkatan Jln Menuju Puskesmas Garoga Kec. Garoga	450	Dinas PUTR
1.546	Tanah Dibawah Jalan Desa Simp. Bolon - Nauli	Simp. Bolon - Nauli	600	Dinas PUTR
1.547	Tanah Dibawah Jalan Desa Jalan Dame Hutatoruan VII	Jalan Dame Hutatoruan VII	375	Dinas PUTR
1.548	Tanah Dibawah Jalan Desa Pengaspalan Jln Sp Jalan Sadar - Sp Jalan Balige Kec. Siborongborong	Pengaspalan Jln Sp Jalan Sadar - Sp Jalan Balige Kec. Siborongborong	600	Dinas PUTR
1.549	Tanah Dibawah Jalan Desa Peningkatan Jln Ketua Peter Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong	Peningkatan Jln Ketua Peter Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong	600	Dinas PUTR
1.550	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Tarutung	Kecamatan Tarutung	630	Dinas PUTR
1.551	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Siborongborong	Kecamatan Siborongborong	600	Dinas PUTR
1.552	Peningkatan Jln Jrs Parinsoran - Sibudil Kec. Garoga	Parinsoran - Sibudil Kec. Garoga	1.200	Dinas PUTR
1.553	Pengaspalan Jln Keliling Seminarium Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon	Keliling Seminarium Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon	1.200	Dinas PUTR
1.554	Pengaspalan Jln. Jrs. Banuarea - Pangguan Kec Tarutung	Banuarea - Pangguan Kec Tarutung	1.020	Dinas PUTR
1.555	Pengaspalan Jln. Jrs. Simp. Jalan Negara - Sitakka Kec Tarutung	Simp. Jalan Negara - Sitakka Kec Tarutung	1.050	Dinas PUTR
1.556	Pengaspalan Jln. Jrs. Aek Siansimun - Lumban Jurjur Kec Tarutung	Pengaspalan Jln. Jrs. Aek Siansimun - Lumban Jurjur Kec Tarutung	870	Dinas PUTR
1.557	Pengaspalan Jalan Alfalah Kec. Tarutung	Alfalah Kec. Tarutung	570	Dinas PUTR
1.558	Pengaspalan Jln. Jrs. Lbn. Holbung - Aek Nauli III Kec. Sipahutar	Lbn. Holbung - Aek Nauli III Kec. Sipahutar	900	Dinas PUTR
1.559	Pembangunan Jln. Jrs. Simpang Jalan Negara - Sigalagala Kec Simangumban	Simpang Jalan Negara - Sigalagala Kec Simangumban	1.200	Dinas PUTR
1.560	Pengaspalan Jln. Jrs. Pangaribuan - Harianja Kec. Pangaribuan	Pangaribuan - Harianja Kec. Pangaribuan	1.260	Dinas PUTR
1.561	Pembangunan Jln. Sp. Jalan Propinsi - Lokasi Rencana SMK Garoga di Desa Padang Siandomang Kec. Garoga	Sp. Jalan Propinsi - Lokasi Rencana SMK Garoga di Desa Padang Siandomang Kec. Garoga	1.500	Dinas PUTR
1.562	Peningkatan Jln. Jrs. Pangorian - Padang Bulan Kec. Garoga	Pangorian - Padang Bulan Kec. Garoga	1.050	Dinas PUTR
1.563	Pengaspalan Jln. Jrs. Sigompulon - Simangonding Kec. Pahae Julu	Sigompulon - Simangonding Kec. Pahae Julu	660	Dinas PUTR
1.564	Pengaspalan Jln. Sp. Jl. Negara - Kantor Camat Simangumban Kec. Simangumban	Sp. Jl. Negara - Kantor Camat Simangumban Kec. Simangumban	540	Dinas PUTR
1.565	Pengaspalan Jln. Jrs. Golat - Siadempuan Kec. Siatas Barita	Golat - Siadempuan Kec. Siatas Barita	1.650	Dinas PUTR
1.566	Pengaspalan Jln. Jrs. Simarpinggan - Sibaragas Kec. Sipoholon	Simarpinggan - Sibaragas Kec. Sipoholon	780	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.567	Pengaspalan Jln. Jrs. Pagarbatu - Lumban Sitogu - Perumnas Kec Sipoholon	Pagarbatu - Lumban Sitogu - Perumnas Kec Sipoholon	600	Dinas PUTR
1.568	Pengaspalan Jln. Jrs. Siparbue - Pangadangan Kec. Parmonangan	Siparbue - Pangadangan Kec. Parmonangan	1.350	Dinas PUTR
1.569	Peningkatan Jalan Menuju HKBP Sosor Pea Desa Aek Raja Kec. Parmonangan	Jalan Menuju HKBP Sosor Pea Desa Aek Raja Kec. Parmonangan	570	Dinas PUTR
1.570	Pengaspalan Jln. Jrs. Sitampurung - Lumban Julu Kec. Pagaran	Sitampurung - Lumban Julu Kec. Pagaran	900	Dinas PUTR
1.571	Pengaspalan Jln. Jrs. Lumban Tonga-tonga - Mual Tabo Kec. Siborongborong	Lumban Tonga-tonga - Mual Tabo Kec. Siborongborong	780	Dinas PUTR
1.572	Pengaspalan Jln. Jrs. Simp. Jalan Negara - Pohan Tonga Kec. Siborongborong	Simp. Jalan Negara - Pohan Tonga Kec. Siborongborong	780	Dinas PUTR
1.573	Pengaspalan Jln. Jrs. Sitabotabo Toruan Kec Siborongborong	Sitabotabo Toruan Kec Siborongborong	1.140	Dinas PUTR
1.574	Pembangunan Jln. Jrs. Parik Sabungan - Sampuran Kec Siborongborong	Parik Sabungan - Sampuran Kec Siborongborong	780	Dinas PUTR
1.575	Pembangunan Jalan Menuju Parsahektaran Desa Parik Sabungan Kec. Siborongborong	Jalan Menuju Parsahektaran Desa Parik Sabungan Kec. Siborongborong	780	Dinas PUTR
1.576	Peningkatan Jalan Simp Jalan Negara - Parik Sabungan Kec. Siborongborong	Simp Jalan Negara - Parik Sabungan Kec. Siborongborong	780	Dinas PUTR
1.577	Pengaspalan Jalan Dalam Kota Desa Sipahutar	Dalam Kota Desa Sipahutar	780	Dinas PUTR
1.578	Peningkatan Simpang Jalan Propinsi - Jalan Jeges Kec. Siborongborong	Simpang Jalan Propinsi - Jalan Jeges Kec. Siborongborong	900	Dinas PUTR
1.579	Pengaspalan Jalan Simp Jln Negara - Hutagurgur Kec. Sipaholon	Simp Jln Negara - Hutagurgur Kec. Sipaholon	1.350	Dinas PUTR
1.580	Peningkatan Jalan Patuan Natigor Kec. Siborongborong	Patuan Natigor Kec. Siborongborong	1.440	Dinas PUTR
1.581	Peningkatan Jalan Batutindi - Dolok Nauli Desa Horisan Ranggitgit Kec. Parmonangan	Batutindi - Dolok Nauli Desa Horisan Ranggitgit Kec. Parmonangan	750	Dinas PUTR
1.582	Pembangunan dyk Jln Raja Pontas Lumbantobing Kec. Tarutung	Jln Raja Pontas Lumbantobing Kec. Tarutung	600	Dinas PUTR
1.583	Tembok Penahan Tanah (TPT) SD Sitangka Kec. Tarutung	SD Sitangka Kec. Tarutung	630	Dinas PUTR
1.584	Pengaspalan Simp. Jln. Provinsi - Bahal Imbalo Lobu Siregar I Kec. Siborongborong	Simp. Jln. Provinsi - Bahal Imbalo Lobu Siregar I Kec. Siborongborong	1.500	Dinas PUTR
1.585	Pengaspalan Jalan Dalam Kota Siborongborong Kec Siborongborong	Jalan Dalam Kota Desa Siborongborong I Kec Siborongborong	1.440	Dinas PUTR
1.586	Pengaspalan Jln. Jrs. Sibuntuon - Lumban Tonga-tonga Kec Siborongborong	Sibuntuon - Lumban Tonga-tonga Kec Siborongborong	810	Dinas PUTR
1.587	Pembangunan Drainase Jalan Hutagurgur - Silindur Kec. Sipahutar	Jalan Hutagurgur - Silindur Kec. Sipahutar	540	Dinas PUTR
1.588	Pembangunan Jalan keliling Perumnas Silangkitang Kec. Sipoholon (BKP-SU)	keliling Perumnas Silangkitang Kec. Sipoholon	750	Dinas PUTR
1.589	Pengaspalan Jln. Jrs. Lopian - Lumban Ina-ina Kec. Pagaran (BKP-SU)	Lopian - Lumban Ina-ina Kec. Pagaran (BKP-SU)	750	Dinas PUTR
1.590	Peningkatan Jln. Gereja GKPI Parbubu Dolok Kec. Tarutung	Gereja GKPI Parbubu Dolok Kec. Tarutung	600	Dinas PUTR
1.591	Peningkatan Jalan menuju SMA Negeri Purbatua Kec. Purbatua	SMA Negeri Purbatua Kec. Purbatua	630	Dinas PUTR
1.592	Perkerasan Jalan dari Desa Adiankoting Menuju Desa Aek Matio Kec. Adiankoting	Desa Adiankoting Menuju Desa Aek Matio Kec. Adiankoting	720	Dinas PUTR
1.593	Jalan Pangaribuan - Harianja Kec. Pangaribuan	Harianja	2.422	Dinas PUTR
1.594	Sp. Jalan Negara - Siampapaga Kec. Siborongborong	Sitampurung	2.470	Dinas PUTR
1.595	Jalan Pearaja Dusun IV Kec. Siborongborong	Sitabotabo	3.153	Dinas PUTR
1.596	Jalan Lopian Dusun VII Kec. Siborongborong	Sitabotabo toruan	3.380	Dinas PUTR
1.597	Jalan Sp. Jalan Negara - Air Panas Pemda Kec. Sipoholon	Situmeang Habinsaran	1.658	Dinas PUTR
1.598	Jalan Aek Nasia - Huta Gareja Kec. Tarutung	Hutatoruan VIII	2.145	Dinas PUTR
1.599	Jalan Sitampurung - Pananggele Kec. Siborongborong	Sitampurung	3.705	Dinas PUTR
1.600	Jalan Sigurung-gurung Kec. Pahae Jae	Sigurunggurung	1.053	Dinas PUTR
1.601	Jalan Sitapongan - Tor Tonga Tonga Kec. Sipahutar	Siabal abal I	2.765	Dinas PUTR
1.602	Jalan Tapian Nauli I - Tapian Nauli II Kec. Sipahutar	Tapian Nauli I	2.600	Dinas PUTR
1.603	Jalan Huta Ginjang arah Batunangor Kec. Siborongborong	Hutabulu	1.885	Dinas PUTR
1.604	Jalan Hopong menuju Panghirapan Kec. Siborongborong	Sitabotabo	2.405	Dinas PUTR
1.605	Jalan Golat - Siadempuan Kec. Siatas Barita	Simorangkir Habinsaran	1.255	Dinas PUTR
1.606	Jalan Pansurbatu - Banuaji II Kec. Adiankoting	Pancurbatu	1.723	Dinas PUTR
1.607	Jalan Batu Hapur -Lobu Sonak Kec. Pangaribuan	Purbatua	679	Dinas PUTR
1.608	Jalan Pangorian - Padang Bulan Kec. Garoga	Simpang Bolon	1.885	Dinas PUTR
1.609	Jalan Simarpinggan - Sibaragas Kec. Sipoholon	Hutaraja Hasundutan	2.828	Dinas PUTR
1.610	Jalan Dusun Aek Natio Julu Menuju Desa Pagaran Pisang Kec. Adiankoting	Adiankoting	1.235	Dinas PUTR
1.611	Jalan Siparbue-Ranggitgit Kec. Parmonangan	Aek Raja	2.243	Dinas PUTR
1.612	Jalan Keliling Pasar Silantom Tonga Kec. Pangaribuan	Silantom Tonga	774	Dinas PUTR
1.613	Jalan Batu Tindi-Dolok Nauli Kec. Parmonangan	Horisan Ranggitgit	2.795	Dinas PUTR
1.614	Jalan Janjinauli menuju SMP Negeri 1 Purbatua Kec. Purbatua	Janji Nauli	1.697	Dinas PUTR
1.615	Lanjutan Jalan Janjinauli menuju SMP Negeri 1 Purbatua Kec. Purbatua	Janji Nauli	884	Dinas PUTR
1.616	Jalan Lumban Silintong Kec. Siborongborong	Siborongborong II	2.243	Dinas PUTR
1.617	Jalan Menuju Kolam Pancing Hadippu 2 Desa Pohan Tonga Kec. Siborongborong	Pohan Tonga	2.600	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.618	Jalan Batubolon-Martabe-Simatorkis Kec. Garoga	Simpang Bolon	1.838	Dinas PUTR
1.619	Jalan Karya Tani Desa Siaro Kec. Siborongborong	Siaro	2.184	Dinas PUTR
1.620	Jalan Dusun 8 Desa Lobu Siregar II Kec. Siborongborong	Lobu Siregar II	2.210	Dinas PUTR
1.621	Jalan Simp Liang Sitolu tolu - Holbung Bagas Kec. Sipahutar	Onan Runggu II	2.145	Dinas PUTR
1.622	Jalan Pangaloan Desa Tordolok Nauli Kec. Pahae Jae	Tordolok Nauli	1.593	Dinas PUTR
1.623	Jalan Dolok Manalu - Sappinur Kec. Parmonangan	Horisan Ranggitgit	1.625	Dinas PUTR
1.624	Jalan Dusun Parhijangan Kec. Siborongborong	Siborongborong I	2.080	Dinas PUTR
1.625	Jalan Simp. Jalan Negara - Sitakka Kec. Tarutung	Aek Siansimun	1.040	Dinas PUTR
1.626	Jalan Simp. Jalan Negara - Hutabagasan Kec. Siborongborong	Paniaran	3.153	Dinas PUTR
1.627	Jalan Simp. Jalan Provinsi - Bahal Imbalo Kec. Siborongborong	Lobu Siregar I	2.275	Dinas PUTR
1.628	Jalan Dusun Tornauli Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan	Manalu Dolok	1.755	Dinas PUTR
1.629	Jalan Dusun II Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon	Pagar Batu	1.671	Dinas PUTR
1.630	Jalan Dusun Ambarbolak Kec. Siborongborong	Siborongborong I	1.820	Dinas PUTR
1.631	Jalan Lumban Rihit Kec. Sipoholon	Hutauruk Hasundutan	514	Dinas PUTR
1.632	Jalan Dusun Huta Godang menuju Aritonang Dusun Sisoding Kec. Parmonangan	Manalu Dolok	650	Dinas PUTR
1.633	Dyk Penahan di Dusun Hutadangir Kec. Pahae Jae	Silangkitang	45	Dinas PUTR
1.634	Dyk Jalan Dusun Lumbanratus Kec. Siatas Barita	Pansurnapitu	250	Dinas PUTR
1.635	Dyk Penahan Tanah Desa Simasom Kec. Pahae Julu	Simasom	40	Dinas PUTR
1.636	Tembok Penahan di Kel. Hutatoruan VI Siwaluompu Kec. Tarutung	Hutatoruan VI	203	Dinas PUTR
1.637	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Ruas Jalan Karya Tani Desa Siaro Kec. Siborongborong	Siaro	66	Dinas PUTR
1.638	Jalan Sigompulon - Simangonding Kec. Pahae Julu	Simangonding	2.249	Dinas PUTR
1.639	Penanggulangan Bencana Alam Longsor di Dusun Mangiring Kelurahan Hutatoruan I Kecamatan Tarutung	Dusun Mangiring Kelurahan Hutatoruan I Kecamatan Tarutung	25	Dinas PUTR
1.640	Penanggulangan Bencana Alam Tembok Penahan Tanah Jalan Lumban Tanjung Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong	Lumban Tanjung Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong	20	Dinas PUTR
1.641	Pembangunan Jalan Desa Batu Manumpak (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA BATU MANUMPAK	2.535	Dinas PUTR
1.642	Pembangunan Jalan Menuju Dusun Rinangolngolan (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA SIBINGKE	381	Dinas PUTR
1.643	Pembangunan Jalan Desa Lumban Sormin (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA LUMBAN SORMIN	2.600	Dinas PUTR
1.644	Pembangunan Jalan Desa Sigotom Dolok Nauli (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA SIGOTOM DOLOK NAULI	882	Dinas PUTR
1.645	Rehabilitasi Jalan Desa Pakpahan (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA PAKPAHAN	2.402	Dinas PUTR
1.646	Rehabilitasi Jalan Desa Pakpahan - Harianja (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA PAKPAHAN	1.089	Dinas PUTR
1.647	Rehabilitasi Jalan Harianja I - Harianja (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA HARIANJA	2.275	Dinas PUTR
1.648	Rehabilitasi Jalan Pancur Batu - Raut Bosi Hutalama (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA RAHUT BOSI	2.009	Dinas PUTR
1.649	Rekonstruksi Jalan Silantom Tonga - Sioma oma (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA SILANTOM TONGA	746	Dinas PUTR
1.650	Rehabilitasi Jalan Desa Purba Tua (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA PURBATUA	1.242	Dinas PUTR
1.651	Pembangunan Jalan Desa Parsorminan I (PEN)	DESA PARSORMINAN I	872	Dinas PUTR
1.652	Rehabilitasi Jalan Desa Sigotom Timur (PEN) Kecamatan Pangaribuan	DESA PURBATUA	2.600	Dinas PUTR
1.653	Pembangunan Jalan Dusun Panjaitan - Simaninggir Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan	DESA LUMBAN SORMIN	1.155	Dinas PUTR
1.654	Pembangunan Jalan Telford Sosor Silintong Desa Lumban Sinaga	DESA LUMBAN SINAGA SIMATUPANG	1.358	Dinas PUTR
1.655	Pembangunan Jalan Telford Dusun Hutabaru Desa Batunadua	DESA BATUNADUA	1.495	Dinas PUTR
1.656	Rehabilitasi Jalan Lumban Parmonangan Menuju Sitanggubak (PEN) Kec. Pagaran	BANUALUHU	3.185	Dinas PUTR
1.657	Pembangunan Jalan Desa Banuaji II (PEN)	BANUAJI II	1.092	Dinas PUTR
1.658	Pembangunan Jalan Ringroad Air Panas Sipoholon (DID Tambahan Tahap II) Kec. Sipoholon	KEL. SITUMEANG HABINSARAN	1.036	Dinas PUTR
1.659	Pembangunan Jalan Ring Road - Air Panas (PEN)	KEL. SITUMEANG HABINSARAN	1.036	Dinas PUTR
1.660	Rehabilitasi Jalan Dusun Lumban Julu Dolok Desa Lumban Julu (PEN)	DESA LUMBAN JULU	1.495	Dinas PUTR
1.661	Pembangunan Jalan Desa Pancur Batu (PEN)	DESA PANSURBATU I	1.430	Dinas PUTR
1.662	Pembangunan Jalan Dusun Simatanggor Desa Simamora Hasibuan (PEN)	DESA SIMAMORA HASIBUAN	679	Dinas PUTR
1.663	Pemeliharaan Jalan Desa Pancur Batu I (PEN)	DESA PANSURBATU	2.600	Dinas PUTR
1.664	Pemeliharaan Jalan Desa Sibalanga (PEN)	DESA SIBALANGA	1.268	Dinas PUTR
1.665	Pemeliharaan Jalan Desa Dolok Nauli (PEN) Kec. Adiankoting	DESA DOLOK NAULI	823	Dinas PUTR
1.666	Rehabilitasi Jalan Lumban Inaina Desa Lumban Julu (PEN) Kec. Pagaran	DESA LUMBAN JULU	1.099	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.667	Rehabilitasi Jalan Pansinaran - Tapian Nauli (PEN) Kecamatan Sipoholon	KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN	1.430	Dinas PUTR
1.668	Rehabilitasi Jalan Dusun Lumban Rihit Desa Hutauruk (PEN)	DESA HUTAURUK HASUNDUTAN	3.088	Dinas PUTR
1.669	Rehabilitasi Jalan Rianiate Desa Simanungkalit (PEN)	DESA SIMANUNGKALIT	1.125	Dinas PUTR
1.670	Rehabilitasi Jalan Situmorang Desa Parhorboan (PEN)	DESA PARHORBOAN	3.120	Dinas PUTR
1.671	Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Singkam - Sandaran - Huta Sosor (PEN) Kec. Sipoholon	DESA LOBUSINGKAM	2.730	Dinas PUTR
1.672	Rehabilitasi Jalan Sidari - Habinsaran - Lobu Singkam (PEN) Kec. Sipoholon	DESA LOBUSINGKAM	2.665	Dinas PUTR
1.673	Rehabilitasi Jalan Desa Lumban Julu (PEN) Kec. Pagaran	DESA LUMBAN JULU	1.495	Dinas PUTR
1.674	Rehabilitasi Jalan Meat - Desa Sipultak Dolok (PEN)	DESA SIPULTAK DOLOK	2.730	Dinas PUTR
1.675	Rehabilitasi Jalan Silaban Horison Desa Lumban Silintong (PEN)	DESA LUMBAN SILINTONG	910	Dinas PUTR
1.676	Rehabilitasi Jalan Gereja Lumban Motung Desa Lumban Motung (PEN)	DESA LUMBAN MOTUNG	2.800	Dinas PUTR
1.677	Rehabilitasi Jalan Simeme Desa Sipultak (PEN)	DESA SIPULTAK	2.870	Dinas PUTR
1.678	Rehabilitasi Jalan Desa Sipahutar BLK Silangkitang	DESA SIPAHUTAR	1.960	Dinas PUTR
1.679	Pembangunan Jalan Desa Bariba Ni Aek	DESA BARIBA NI AEK	878	Dinas PUTR
1.680	Peningkatan Jalan Ringroad Seminarium Sipoholon	DESA SIMANUNGKALIT	2.240	Dinas PUTR
1.681	Peningkatan Jalan Meat Desa Sipultak Dolok	DESA SIPULTAK DOLOK	1.820	Dinas PUTR
1.682	Rehabilitasi Jalan Firman Simamora (PEN) Kec. Tarutung	DESA HUTAGALUNG SIWALUOMPU	1.365	Dinas PUTR
1.683	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Menuju Gereja HKBP Siualuompu Desa Simamora (PEN) Kec. Tarutung	DESA SIMAMORA	1.575	Dinas PUTR
1.684	Rehabilitasi Jalan Aek Rara - Lumban Toruan Dusun Barbaran (PEN) Kec. Tarutung	DESA HUTAPEA BANUAREA	3.023	Dinas PUTR
1.685	Pembangunan Jalan Sibulon bulon Desa Partali Julu (PEN) Kec. Tarutung	DESA PARBAJU JULU	1.430	Dinas PUTR
1.686	Rehabilitasi Jalan Desa Parbubu II - Parbubu Dolok - Dusun Anyelir (Dusun III) (PEN) Kec. Tarutung	DESA PARBUBU II	2.860	Dinas PUTR
1.687	Rehabilitasi Jalan Parsuratan (PEN) Kec. Siborongborong	DESA LOBU SIREGAR II	3.218	Dinas PUTR
1.688	Rehabilitasi JalanRehabilitasi Jalan Pamandang II Desa Parbaju Julu (PEN) Kec. Tarutung	DESA PARBAJU JULU	609	Dinas PUTR
1.689	Rehabilitasi Jalan Simabe-mabe Desa Siborongborong II (PEN) Kec. Siborongborong	DESA SIBORONGBORONG II	2.925	Dinas PUTR
1.690	Rehabilitasi Jalan Lumban Lobu - Sitio tio (PEN) Kec. Siborongborong	DESA SIBORONGBORONG I	2.800	Dinas PUTR
1.691	Rehabilitasi Jalan Lumban Holbung - Desa Lumban Tongatonga (PEN) Kec. Siborongborong	DESA LUMBAN TONGATONGA	3.250	Dinas PUTR
1.692	Rehabilitasi Jalan Menuju HKBP Pohan Tonga (DID Tambahan Tahap II) Kec. Siborongborong	DESA POHAN TONGA	2.100	Dinas PUTR
1.693	Peningkatan Jalan Sp. Jalan Negara - Pangaloan Kec. Siborongborong (DID Tambahan Tahap II) Kec. Siborongborong	DESA PANIARAN	2.438	Dinas PUTR
1.694	Pembangunan Jalan Dusun III Desa Lobu Siregar I (PEN) Kec. Siborongborong	DESA LOBU SIREGAR I	2.958	Dinas PUTR
1.695	Rehabilitasi Jalan Panghirapan (PEN) Kec. Siborongborong	DESA SITABOTABO	2.730	Dinas PUTR
1.696	Rekonstruksi Jalan Dusun I Sibuntuon (PEN) Kec. Siborongborong	DESA SITABOTABO	3.080	Dinas PUTR
1.697	Rekonstruksi Jalan Ambatan Gadong Desa Pohan Tonga (PEN) Kec. Siborongborong	DESA POHAN TONGA	3.038	Dinas PUTR
1.698	Rekonstruksi Jalan Adaran - Bahal Batu III (PEN) Kec. Siborongborong	DESA BAHAL BATU III	2.940	Dinas PUTR
1.699	Rehabilitasi Jalan Parbubu Dolok - Parbubu II (PEN) Kec. Tarutung	DESA PARBUBU DOLOK	2.660	Dinas PUTR
1.700	Rehabilitasi Jalan Rehabilitasi Jalan Lumban Siantar Desa Parbaju Julu (PEN) Kec. Tarutung	DESA PARBAJU JULU	3.348	Dinas PUTR
1.701	Rehabilitasi Jalan Rambing Dusun Banjar Nauli Desa Parbaju Toruan (PEN) Kec. Tarutung	DESA PARBAJU TORUAN	3.088	Dinas PUTR
1.702	Rekonstruksi Jalan Hariara Nagodang - Pea Rihit (PEN) Kec. Tarutung	HUTATORUAN IX	2.590	Dinas PUTR
1.703	Rekonstruksi Jalan Huta Tambang I - Tambang II Parbubu Pea (PEN) Kec. Tarutung	DESA PARBUBU PEA	2.765	Dinas PUTR
1.704	Rehabilitasi Jalan PGRI Siborongborong (PEN) Kec. Siborongborong	DESA SITABOTABO	1.183	Dinas PUTR
1.705	Rehabilitasi Jalan Lumban Sihobuk (PEN) Kec. Tarutung	DESA PARBAJU TONGA	683	Dinas PUTR
1.706	Pembangunan Jalan Huta Nagodang Aritonang Sisoding Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan	DESA MANALU DOLOK	475	Dinas PUTR
1.707	Pengaspalan Jalan Dusun Lumban Siantar Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung	DESA PARBAJU JULU	1.625	Dinas PUTR
1.708	Pengaspalan Jalan menuju SD Bonan Dolok Desa Huta Tinggi Kec. Parmonangan	DESA HUTATINGGI	1.050	Dinas PUTR
1.709	Pembangunan Jalan Parratusan - Hutatua (DID Tambahan Tahap II)	DESA HUTATUA	1.680	Dinas PUTR
1.710	Pemeliharaan Jln. Jrs. Hutajulu Parbalik Kecamatan Parmonangan	DESA HUTAJULU PARBALIK	475	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.711	Peningkatan Jalan Jeges Desa Lobu Siregar II Kecamatan Siborongborong	DESA LOBU SIREGAR II	1.610	Dinas PUTR
1.712	Rehabilitasi Jalan Dusun III Panduamaan - Dusun II Pea Sonang Desa Horison Ranggitgit (PEN) Kecamatan Parmonangan	DESA HORISAN RANGGITGIT	2.665	Dinas PUTR
1.713	Rehabilitasi Jalan Dusun III Batutindi - Dolok Nauli Desa Horison Ranggitgit (PEN) Kecamatan Parmonangan	DESA HORISAN RANGGITGIT	1.268	Dinas PUTR
1.714	Rehabilitasi Jalan Dusun II Desa Lobu Sunut Desa (PEN) Kecamatan Parmonangan	DESA LOBUSUNUT	1.610	Dinas PUTR
1.715	Rekonstruksi Jalan Parmonangan - Hutatua (PEN) Kecamatan Parmonangan	DESA HUTATUA	2.415	Dinas PUTR
1.716	Rehabilitasi Jalan Dolok Martumbur - Muallassonang (PEN) Kecamatan Muara	Rehabilitasi Jalan Dolok Martumbur - Muallassonang (PEN) Kecamatan Muara	1.268	Dinas PUTR
1.717	Rehabilitasi Jalan Bunturaja - Pardomuan Desa Sitanggor (PEN) Kecamatan Muara	DESA SITANGGOR	2.310	Dinas PUTR
1.718	Rehabilitasi Jalan Dusun Sosor Kobun Desa Hutaginjang (PEN) Kecamatan Muara	DESA HUTAGINJANG	2.660	Dinas PUTR
1.719	Rehabilitasi Jalan Dusun Lumban Tonga-tonga Desa Hutaginjang (PEN) Kecamatan Muara	DESA HUTAGINJANG	3.023	Dinas PUTR
1.720	Rehabilitasi Jalan Ring Road Dusun I Peanariburan Desa Silando (PEN) Kecamatan Muara	DESA SILANDO	2.990	Dinas PUTR
1.721	Rehabilitasi Jalan Dusun I Lumban Nainggolan Desa Silando (PEN)	DESA SILANDO	2.990	Dinas PUTR
1.722	Rehabilitasi Jalan Desa Aritonang (PEN) Kecamatan Muara	DESA ARITONANG	1.885	Dinas PUTR
1.723	Rehabilitasi Jalan Lobu Tangga Desa Silali Toruan (PEN) Kecamatan Muara	DESA SILALI TORUAN	880	Dinas PUTR
1.724	Rehabilitasi Jalan Simpang Empat - Dolmen Desa Hutanagodang (PEN) Kecamatan Muara	DESA HUTANAGODANG	936	Dinas PUTR
1.725	Rehabilitasi Jalan Hutabagasan Desa Dolok Martumbur Kec. Muara (PEN) kecamatan Muara	DESA DOLOK MARTUMBUR	2.100	Dinas PUTR
1.726	Rehabilitasi Jalan Pancur Napitu - Hutabagasan (PEN) Kecamatan Siatas Barita	DESA PANSUR NAPITU	3.010	Dinas PUTR
1.727	Rehabilitasi Jalan Dusun Habinsaran Desa Simorangkir Habinsaran (PEN) Kecamatan Siatas Barita	DESA SIMORANGKIR HABINSARAN	896	Dinas PUTR
1.728	Pembangunan Jalan Desa Toru Nauli (PEN) Pahae Julu	DESA JANJI NATOGU	752	Dinas PUTR
1.729	Pembangunan Jalan Huta Parlombuan Desa Onan Runggu III (PEN) Kecamatan Sipahutar	DESA ONAN RUNGGU III	523	Dinas PUTR
1.730	Rehabilitasi Jalan Enda Portibi Dusun II (PEN) Kecamatan Siatas Barita	DESA ENDA PORTIBI	2.860	Dinas PUTR
1.731	Rehabilitasi Jalan Onan Runggu II - Batara Guru Desa Onan Runggu II (PEN)	DESA BAHAL BATU II	825	Dinas PUTR
1.732	Rehabilitasi Jalan Sp. Lumban Dapdap - Lumban Dapdap (PEN) Kecamatan Siatas Barita	DESA LOBU HOLE	3.055	Dinas PUTR
1.733	Rehabilitasi Jalan Simp. Tugu Desa Sitompul Parserahan (PEN) Kecamatan Siatas Barita	DESA SITOMPUL	2.873	Dinas PUTR
1.734	Pengaspalan Jalan Simp. Liang Sitolu - tolu - Holbung Bagas Kec. Sipahutar	DESA ONAN RUNGGU III	1.495	Dinas PUTR
1.735	Pembangunan Jalan Menuju Dusun Pasir Nauli Kec. Pahae Julu (DID Tambahan Tahap II)	DESA LUMBAN DOLOK	666	Dinas PUTR
1.736	Pembangunan Jalan Dusun Banjar Masin I Desa Aek Nabara (PEN) Simangumban	DESA AEK NABARA	881	Dinas PUTR
1.737	Pembangunan Jalan Muara Tolang Pardomuan (PEN) Simangumban	DESA PARDOMUAN	777	Dinas PUTR
1.738	Rehabilitasi Jalan Desa Silosung (PEN) Kecamatan Simangumban	DESA SILOSUNG	790	Dinas PUTR
1.739	Pembangunan Jalan Dusun Sanpilpil menuju Pandahanan Sira Desa Silangkitang (PEN) Pahae Jae	DESA SILANGKITANG	1.030	Dinas PUTR
1.740	Pembangunan Jalan Dusun Mahansan (PEN) Kec. Purbatua	DESA SITOLU BAHAL	2.258	Dinas PUTR
1.741	Pembangunan Jalan Panongkalan-Hapundung (DID Tambahan Tahap II) Kec. Simangumban	DESA DOLOK SANGGUL	1.645	Dinas PUTR
1.742	Pembangunan Jalan Dusun Mahansan Desa Sitolu Bahal (DID Tambahan Tahap II) Kec. Purbatua	DESA SITOLU BAHAL	1.645	Dinas PUTR
1.743	DESA NAHORNOP MARSADA	DESA NAHORNOP MARSADA	478	Dinas PUTR
1.744	Pembangunan Jalan di Desa Lobu Siregar I (DID Tambahan Tahap II) Kec. Siborongborong	DESA LOBU SIREGAR I	2.015	Dinas PUTR
1.745	Peningkatan Jalan Dusun II Siburian Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae	DESA PARSAORAN SAMOSIR	458	Dinas PUTR
1.746	Peningkatan Jalan Desa Silosung Kecamatan Simangumban	DESA SILOSUNG	1.015	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.747	Pembangunan Jalan menuju SMK Negeri Garoga (DID Tambahan Tahap II) Kec. Garoga	DESA PADANG SIANDOMANG	613	Dinas PUTR
1.748	Pengaspalan Jalan Dusun Lumban Hariara Pancur Napitu Kecamatan Siatas Barita	DESA PANCUR NAPITU	430	Dinas PUTR
1.749	Pengaspalan Jalan Desa Lumban Jaean Kecamatan Pahae Julu	DESA LUMBAN JAEAN	798	Dinas PUTR
1.750	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Hopong - Lumban Tonga-tonga (PEN)	DESA LUMBAN TONGA-TONGA	798	Dinas PUTR
1.751	Perbaikan Gorong -Gorong dan Tembok Penahan Tanah yang Menghubungkan Dusun Lumban Natio Desa Sibaragas Kec. Pagaran (PEN)	Desa Sibaragas Kec. Pagaran (PEN)	48	Dinas PUTR
1.752	PBA Longsor Bahu Jalan Menuju Dusun Banjar Pahae Desa Lumban Tonga Kecamatan Pahae Julu (PEN)	Dusun Banjar Pahae Desa Lumban Tonga Kecamatan Pahae Julu	25	Dinas PUTR
1.753	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Jalan Lobu Sonak Desa Najumambe Kecamatan Pangaribuan	Desa Najumambe Kecamatan Pangaribuan	250	Dinas PUTR
1.754	Penanggulangan Bencana Alam Longsor di Aek Haidupan Desa Siraja Oloan Kecamatan Tarutung	Desa Siraja Oloan Kecamatan Tarutung	45	Dinas PUTR
1.755	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Badan Jalan di Bahal Tombak Dusun II Pangaloan Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong	Pangaloan Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong	20	Dinas PUTR
1.756	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Longsor Jalan Dusun Lobu Talpe Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu	Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu	40	Dinas PUTR
1.757	DESA UNTEMUNGKUR	Rekonstruksi Jalan Menuju Sibuntuon Desa Untemungkur (PEN)	1.364	Dinas PUTR
1.758	DESA HUTAGINJANG	Rekonstruksi Jalan di Desa Hutaginjang (PEN)	1.056	Dinas PUTR
1.759	DESA NAJUMAMBE	Pembangunan Jalan Najumambe menuju LoBU Sonak (DID)	233	Dinas PUTR
1.760	NAJUMAMBE	Pembangunan jalan Najumambe - Lobu Sonak (PEN)	3.054	Dinas PUTR
1.761	DESA HAPOLTAHAN	Pembangunan Jalan Raja Johannes Gg. Damai Lestari (PEN)	868	Dinas PUTR
1.762	DESA SIMAMORA	Rekonstruksi Jalan HKBP Siualuompu (Jalan Gereja) (PEN)	3.260	Dinas PUTR
1.763	SIMASOM TORUAN	Pembangunan Jalan Pantis - Sopo Raru	912	Dinas PUTR
1.764	SIMASOM TORUAN	Pembangunan Jalan Pantis - Sopo Raru (PEN)	14.520	Dinas PUTR
1.765	DESA LUMBAN SIAGIAN JULU	Pembangunan jalan Hutabagasan Desa Lumban Siagian Julu (PEN)	1.575	Dinas PUTR
1.766	DESA PANCUR NAPITU	Pembangunan Jembatan Aek Julu Desa Pancur Napitu (PEN)	45	Dinas PUTR
1.767	DESA LOBU HOLE	Peningkatan Jalan Hutanamora menuju Peternakan Madu Kecamatan Siatas Barita	1.175	Dinas PUTR
1.768	DESA ONAN RUNGGU III	Rehabilitasi Jalan menuju SD Inpres Silima Bahal (PEN)	672	Dinas PUTR
1.769	DESA SIPAHUTAR II	Rehabilitasi Jalan menuju Lumban Sampean Desa Sipahutar II (PEN)	1.208	Dinas PUTR
1.770	DESA TAPIAN NAULI I	Rekonstruksi jalan Tapian Nauli I - Tapian Nauli II (PEN)	2.718	Dinas PUTR
1.771	DESA TAPIAN NAULI I	Pembangunan Jalan Tapian Nauli I - Tapian Nauli II (DID)	1.440	Dinas PUTR
1.772	DESA SIMARDANGIANG	Rekonstruksi jalan Simardangiang - Pasir Nauli (PEN)	8.070	Dinas PUTR
1.773	DESA SIMARDANGIANG	Pembangunan jalan Simangonding - Lumban Dolok (PEN)	150	Dinas PUTR
1.774	DESA JANJI NAULI	DESA JANJI NAULI	432	Dinas PUTR
1.775	DESA SIGURUNG-GURUNG	Pembangunan Jalan menuju Saba Parkopian Hutabuntul Desa Sigurung-gurung	598	Dinas PUTR
1.776	DESA AEK NABARA	Pembangunan Jalan Desa Aek Nabara	535	Dinas PUTR
1.777	DESA SIMASOM DOLOK	Rehabilitasi Jalan Siigarigar Desa Simasom Dolok	565	Dinas PUTR
1.778	DESA BAHAL BATU I	Rehabilitasi Jalan Bahal Batu I - Bahal Batu III Kec. Siborongborong	1.680	Dinas PUTR
1.779	DESA SIARO	Pemeliharaan Jalan Dusun Sitolping Desa Siaro	1.500	Dinas PUTR
1.780	DESA LOBU SIREGAR II	Pembangunan Jalan Sigambogambo Lobu Siregar II (DID)	1.590	Dinas PUTR
1.781	DESA LOBU SIREGAR I	Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong	1.590	Dinas PUTR
1.782	DESA POHAN TONGA	Rekonstruksi Jalan Pargompulon Desa Pohan Tonga (DID)	1.505	Dinas PUTR
1.783	SIPULTAK	Pembangunan Jalan menuju huta aek rangat desa Sipultak (Silpa DID Tambahan)	570	Dinas PUTR
1.784	SIPULTAK	Peningkatan Jalan Desa Sipultak Dusun II Kecamatan Pagaran	2.520	Dinas PUTR
1.785	SIPULTAK	Rekonstruksi Jalan Huta Janggaleman (PEN)	2.170	Dinas PUTR
1.786	DOLOK SARIBU	Rekonstruksi Jalan dari Gereja HKBP Doloksaribu menuju Lokasi Pertanian SMK Negeri I Pagaran (PEN)	2.280	Dinas PUTR
1.787	SISORDAK	Rekonstruksi Jalan di Desa Sisordak (PEN)	2.100	Dinas PUTR
1.788	LUMBAN JULU	Rekonstruksi jalan Lumban Julu - Lumban Siregar - Lumban Inaina (PEN)	1.860	Dinas PUTR
1.789	HUTAJULU PARBALIK	Pembangunan Jalan Pembangunan Huta Julu - Huta Julu Parbalik (PEN)	2.700	Dinas PUTR
1.790	HUTAJULU PARBALIK	Pembangunan Jalan Hutajulu - Hutajulu Parbalik Kec. Parmonangan	702	Dinas PUTR
1.791	DESA BAHAL BATU I	Rehabilitasi Jalan Parsarunean	2.739	Dinas PUTR
1.792	DESA SIBORONGBORONG I	Rehabilitasi Jalan Sitiotio Desa Siborongborong I	10	Dinas PUTR
1.793	DESA PAGAR BATU	Pembangunan Jalan ke Hutabagasan Desa pagar Batu	550	Dinas PUTR
1.794	DESA PAGAR BATU	Rehabilitasi Jalan Keliling Perumnas Pagar Batu (PEN)	1.465	Dinas PUTR
1.795	DESA HUTAURUK	Pembangunan jalan Sp. Jalan Negara - Partangga (PEN)	940	Dinas PUTR
1.796	DESA HUTAURUK	Rekonstruksi Jalan Dalam Kota Sipoholon (No. Ruas 262) (PEN)	1.150	Dinas PUTR
1.797	DESA LUMBAN DOLOK SIGOMPULON	Rehabilitasi Jalan Lumban Dolok	555	Dinas PUTR
1.798	Rekonstruksi Jalan Desa Lobu Siregar I (PEN)	Rekonstruksi Jalan Desa Lobu Siregar I (PEN)	2.395	Dinas PUTR
1.799	DESA LOBU SIREGAR I	Rehabilitasi Jalan Jeges Kec. Siborongborong	2.022	Dinas PUTR
1.800	DESA LOBU SIREGAR I	Pemeliharaan Jalan Simp. Lumban Julu menuju Hutabagasan (PEN)	3.300	Dinas PUTR
1.801	DESA POHAN TONGA	Peningkatan Jalan menuju Pargompulan (PEN)	3.300	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.802	DESA POHAN TONGA	Rekonstruksi jalan Ambatan Gadong Desa Pohan Tonga (PEN)	325	Dinas PUTR
1.803	DESA PANIARAN	Peningkatan jalan Simp. Hutabagasan - Hutabagasan Desa Paniaran (PEN)	3.702	Dinas PUTR
1.804	DESA PANIARAN	Rehabilitasi jalan Lumban Nainggolan (PEN)	935	Dinas PUTR
1.805	DESA POHAN TONGA	Peningkatan Jalan Parhasioran - Sosor Simarhilap (PEN)	1.925	Dinas PUTR
1.806	DESA SITABOTABO TORUAN	Rehabilitasi jalan Sitabotabo Toruan - Lobu Siregar (PEN)	2.100	Dinas PUTR
1.807	DESA LOBU SIREGAR II	Rekonstruksi Jalan Desa Lobu Siregar II (PEN)	1.775	Dinas PUTR
1.808	SITUMEANG PANSINARAN	Rehabilitasi Jalan Menuju Pansinaran	800	Dinas PUTR
1.809	DESA HUTAURUK	Pemeliharaan Jln. Jrs. Aek Haidupan - Pardarian (PEN)	1.530	Dinas PUTR
1.810	DESA SITANGGOR	Pembangunan Jalan Dusun Bonan Dolok	625	Dinas PUTR
1.811	DESA SILAIT-LAIT	Rekonstruksi jalan Keliling Pacuan (PEN)	5.832	Dinas PUTR
1.812	DESA SIARO	Rehabilitasi Jalan Siaro - Lumban Sosor (PEN)	1.183	Dinas PUTR
1.813	PADANG SIANDOMANG	Peningkatan Jalan menuju SMK I Kec. Garoga (PEN)	1.515	Dinas PUTR
1.814	Rekontruksi Jalan Sp. Simangonding - Simangonding	Rekontruksi Jalan Sp. Simangonding - Simangonding	1.443	Dinas PUTR
1.815	Pembangunan Jembatan Aek Dahasan (Bonus Produksi)	Pembangunan Jembatan Aek Dahasan (Bonus Produksi)	52	Dinas PUTR
1.816	Rekonstruksi Jalan Aek Haidupan - Pardarian	Rekonstruksi Jalan Aek Haidupan - Pardarian	2.786	Dinas PUTR
1.817	Pembangunan Jalan Menuju Lumban Holbung	Pembangunan Jalan Menuju Lumban Holbung	527	Dinas PUTR
1.818	Peningkatan Jalan menuju Dusun Adianbatu Desa Sabungan Nihuta IV	Peningkatan Jalan menuju Dusun Adianbatu Desa Sabungan Nihuta IV	1.575	Dinas PUTR
1.819	Rekonstruksi Jalan Tapian Nauli I - Tapian Nauli II	Rekonstruksi Jalan Tapian Nauli I - Tapian Nauli II	700	Dinas PUTR
1.820	Rehabilitasi Jalan Onan Runggu - Lumban Rihit Kec. Sipahutar	Rehabilitasi Jalan Onan Runggu - Lumban Rihit Kec. Sipahutar	1.057	Dinas PUTR
1.821	Pembangunan Jembatan Aek Lobu	Pembangunan Jembatan Aek Lobu	38	Dinas PUTR
1.822	Pembangunan Jalan Desa Parhorboan	Pembangunan Jalan Desa Parhorboan	3.348	Dinas PUTR
1.823	Pembangunan Jalan Simpang Jalan Negara - Partangga	Pembangunan Jalan Simpang Jalan Negara - Partangga	1.120	Dinas PUTR
1.824	Pembangunan Jalan Tor Hasiholan Banuaji II	Pembangunan Jalan Tor Hasiholan Banuaji II	1.788	Dinas PUTR
1.825	Peningkatan Jalan Desa Sipultak	Peningkatan Jalan Desa Sipultak	2.178	Dinas PUTR
1.826	Rekonstruksi Jalan Keliling Perumnas - Silangkitang	Rekonstruksi Jalan Keliling Perumnas - Silangkitang	1.400	Dinas PUTR
1.827	Pembangunan Jalan Lumban Sosor - Siaro	Pembangunan Jalan Lumban Sosor - Siaro	1.528	Dinas PUTR
1.828	Pembangunan Jalan Lumban Tora	Pembangunan Jalan Lumban Tora	1.260	Dinas PUTR
1.829	Peningkatan Jalan Menuju Lapas Siborongborong	Peningkatan Jalan Menuju Lapas Siborongborong	891	Dinas PUTR
1.830	Rekonstruksi Jalan Menuju Siharbangan Desa Dolok Saribu	Rekonstruksi Jalan Menuju Siharbangan Desa Dolok Saribu	1.658	Dinas PUTR
1.831	Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar I	Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar I	1.800	Dinas PUTR
1.832	Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar II	Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar II	1.827	Dinas PUTR
1.833	Pembangunan Jalan Desa Rahut Bosi	Pembangunan Jalan Desa Rahut Bosi	1.950	Dinas PUTR
1.834	Pembangunan Jalan Dusun Hutabagasan Desa Sibingke Kec. Pangaribuan	Pembangunan Jalan Dusun Hutabagasan Desa Sibingke Kec. Pangaribuan	1.190	Dinas PUTR
1.835	Peningkatan Jalan Lobu Tonga Simatorkis	Peningkatan Jalan Lobu Tonga Simatorkis	1.036	Dinas PUTR
1.836	Pembangunan Jembatan Aek Singgolom	Pembangunan Jembatan Aek Singgolom	65	Dinas PUTR
1.837	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Parsaoran - Janji Angkola Kecamatan Purbatua	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Parsaoran - Janji Angkola Kecamatan Purbatua	2.124	Dinas PUTR
1.838	Pembangunan Jalan Desa Sitolu Bahal	Pembangunan Jalan Desa Sitolu Bahal	669	Dinas PUTR
1.839	Rekonstruksi Jalan Desa Purbatua - Desa Selamat	Rekonstruksi Jalan Desa Purbatua - Desa Selamat	5.385	Dinas PUTR
1.840	Rekonstruksi Jalan Desa Partali Julu - Desa Parbaju Julu	Rekonstruksi Jalan Desa Partali Julu - Desa Parbaju Julu	1.843	Dinas PUTR
1.841	Pembangunan Jalan Menuju Air Terjun Situmohap	Pembangunan Jalan Menuju Air Terjun Situmohap	1.698	Dinas PUTR
1.842	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Simanampang	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Simanampang	775	Dinas PUTR
1.843	Pembangunan Jalan Desa Lobu Pining	Pembangunan Jalan Desa Lobu Pining	750	Dinas PUTR
1.844	Pembangunan Jalan Menuju Longat	Pembangunan Jalan Menuju Longat	261	Dinas PUTR
1.845	Pembangunan Jalan Desa Sibandang	Pembangunan Jalan Desa Sibandang	403	Dinas PUTR
1.846	Pembangunan Jalan Menuju Tanah Lapang Sibandang	Pembangunan Jalan Menuju Tanah Lapang Sibandang	298	Dinas PUTR
1.847	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Hutanagodang	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Hutanagodang	410	Dinas PUTR
1.848	Pembangunan Jalan Menuju Tugu Aritonang	Pembangunan Jalan Menuju Tugu Aritonang	781	Dinas PUTR
1.849	Pembangunan Jalan Provinsi - Bahal Imbalo	Pembangunan Jalan Provinsi - Bahal Imbalo	813	Dinas PUTR
1.850	Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar I	Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar I	723	Dinas PUTR
1.851	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Paniaran	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Paniaran	903	Dinas PUTR
1.852	Pemeliharaan Berkala Jalan Lobu Siregar II	Pemeliharaan Berkala Jalan Lobu Siregar II	828	Dinas PUTR
1.853	Rekosntruksi Jalan Desa Manalu	Rekosntruksi Jalan Desa Manalu	295	Dinas PUTR
1.854	Pembangunan Jalan Desa Sipultak	Pembangunan Jalan Desa Sipultak	618	Dinas PUTR
1.855	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Banua Luhu	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Banua Luhu	1.524	Dinas PUTR
1.856	Rekonstruksi Jalan Desa Sipultak Dolok	Rekonstruksi Jalan Desa Sipultak Dolok	1.800	Dinas PUTR
1.857	Pembangunan Jalan Menuju Parriasan Desa Siabalabal I	Pembangunan Jalan Menuju Parriasan Desa Siabalabal I	5.148	Dinas PUTR
1.858	Pembangunan Jalan Adaran Sigalapang	Pembangunan Jalan Adaran Sigalapang	1.634	Dinas PUTR
1.859	Pembangunan Jalan Menuju Pustu Dolok Nauli	Pembangunan Jalan Menuju Pustu Dolok Nauli	300	Dinas PUTR
1.860	Rekonstruksi Jalan Desa Sitompul	Rekonstruksi Jalan Desa Sitompul	2.004	Dinas PUTR
1.861	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Sidagal	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Sidagal	1.551	Dinas PUTR
1.862	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Simorangkir Julu (Marsahit Bosi)	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Simorangkir Julu (Marsahit Bosi)	1.617	Dinas PUTR
1.863	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Simorangkir Habinsaran	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Simorangkir Habinsaran	1.496	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.864	Pemeliharaan Berkala Jalan Siku - Tano Rara	Pemeliharaan Berkala Jalan Siku - Tano Rara	1.416	Dinas PUTR
1.865	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Enda Portibi	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Enda Portibi	1.634	Dinas PUTR
1.866	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Sangkaran (Lumban Rihit)	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Sangkaran (Lumban Rihit)	916	Dinas PUTR
1.867	Pembangunan Jalan Tapian Nauli I - Tapian Nauli II	Pembangunan Jalan Tapian Nauli I - Tapian Nauli II	1.032	Dinas PUTR
1.868	Pembangunan Jalan Menuju Parbalingbalingan	Pembangunan Jalan Menuju Parbalingbalingan	1.771	Dinas PUTR
1.869	Rekonstruksi Jalan Dusun Hapoltahan Desa Banuaji IV Kec. Adian Koting	Rekonstruksi Jalan Dusun Hapoltahan Desa Banuaji IV Kec. Adian Koting	1.672	Dinas PUTR
1.870	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Pakpahan	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Pakpahan	1.065	Dinas PUTR
1.871	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Harianja	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Harianja	1.110	Dinas PUTR
1.872	Rekonstruksi Jalan Desa Batu Manumpak	Rekonstruksi Jalan Desa Batu Manumpak	1.824	Dinas PUTR
1.873	Rekonstruksi Jalan Desa Parsibarungan	Rekonstruksi Jalan Desa Parsibarungan	1.315	Dinas PUTR
1.874	Rekonstruksi Jalan Desa Parlombuan	Rekonstruksi Jalan Desa Parlombuan	820	Dinas PUTR
1.875	Pembangunan Jalan Rahutbosi Dusun Sormin	Pembangunan Jalan Rahutbosi Dusun Sormin	312	Dinas PUTR
1.876	Pembangunan Jalan Desa Rahut Bosi	Pembangunan Jalan Desa Rahut Bosi	1.224	Dinas PUTR
1.877	Pembangunan Jalan Desa Gonting Garoga	Pembangunan Jalan Desa Gonting Garoga	558	Dinas PUTR
1.878	Pembangunan Jalan Desa Sibaganding	Pembangunan Jalan Desa Sibaganding	688	Dinas PUTR
1.879	Pembangunan Jalan Desa Padang Siandomang	Pembangunan Jalan Desa Padang Siandomang	1.212	Dinas PUTR
1.880	Pembangunan Jalan Padang Bulan - Simatorkis	Pembangunan Jalan Padang Bulan - Simatorkis	528	Dinas PUTR
1.881	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Lubis	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Lubis	1.950	Dinas PUTR
1.882	Jl. Lingkar Siborongborong	Jl. Lingkar Siborongborong	79.300	Dinas PUTR
1.883	Rekonstruksi Jalan Simp. Negara - Sosor Padang	Rekonstruksi Jalan Simp. Negara - Sosor Padang	1.344	Dinas PUTR
1.884	Pembangunan Jalan Raja Johannes Gg Damai Lestari	Pembangunan Jalan Raja Johannes Gg Damai Lestari	501	Dinas PUTR
1.885	Rekonstruksi Jalan Aek Haidupan - Pardarian	Rekonstruksi Jalan Aek Haidupan - Pardarian	2.490	Dinas PUTR
1.886	Pembangunan Jalan Hatupangan Desa Hutagalung	Pembangunan Jalan Hatupangan Desa Hutagalung	1.404	Dinas PUTR
1.887	Pembangunan Jalan Partali Toruan Menuju Aek Situmandi	Pembangunan Jalan Partali Toruan Menuju Aek Situmandi	468	Dinas PUTR
1.888	Pembangunan Jalan Menuju SMP N 4 Pahae Julu	Pembangunan Jalan Menuju SMP N 4 Pahae Julu	618	Dinas PUTR
1.889	Pembangunan Jalan Desa Sigurung-gurung	Pembangunan Jalan Desa Sigurung-gurung	861	Dinas PUTR
1.890	Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Jalan Negara - Siigarigar	Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Jalan Negara - Siigarigar	1.260	Dinas PUTR
1.891	Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Jalan Negara - Partangga	Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Jalan Negara - Partangga	840	Dinas PUTR
1.892	Pembangunan Jembatan Desa Situmeang Hasundutan	Pembangunan Jembatan Desa Situmeang Hasundutan	12	Dinas PUTR
1.893	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Lobu Singkam	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Lobu Singkam	1.590	Dinas PUTR
1.894	Rekonstruksi Jalan Desa Hutauruk Hasundutan	Rekonstruksi Jalan Desa Hutauruk Hasundutan	1.925	Dinas PUTR
1.895	Rekonstruksi Jalan Desa Hutauruk Hasundutan (Sp. Jembatan Sirongit)	Rekonstruksi Jalan Desa Hutauruk Hasundutan (Sp. Jembatan Sirongit)	2.640	Dinas PUTR
1.896	Pembangunan Jalan Desa Silosung	Pembangunan Jalan Desa Silosung	900	Dinas PUTR
1.897	Rekonstruksi Jalan Depan Masjid Janji Nauli	Rekonstruksi Jalan Depan Masjid Janji Nauli	780	Dinas PUTR
1.898	Pembangunan Jalan Desa Janji Nauli	Pembangunan Jalan Desa Janji Nauli	900	Dinas PUTR
1.899	Rehabilitasi Jalan Desa Robean	Rehabilitasi Jalan Desa Robean	1.029	Dinas PUTR
1.900	Pembangunan Jalan (Penataan Lapangan Olahraga) Desa Robean	Pembangunan Jalan (Penataan Lapangan Olahraga) Desa Robean	400	Dinas PUTR
1.901	Rekonstruksi Jalan Keliling Pekan Simangumban	Rekonstruksi Jalan Keliling Pekan Simangumban	502	Dinas PUTR
1.902	Rekonstruksi Jalan Desa Parsaoran Samosir	Rekonstruksi Jalan Desa Parsaoran Samosir	432	Dinas PUTR
1.903	Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lumban Motung	Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lumban Motung	1.733	Dinas PUTR
1.904	Pembangunan Jalan Hopong - Hapundung	Pembangunan Jalan Hopong - Hapundung	2.158	Dinas PUTR
1.905	Pembangunan Jalan Dolok Saut - Pardomuan	Pembangunan Jalan Dolok Saut - Pardomuan	705	Dinas PUTR
1.906	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (JL TARUTUNG)	JL TARUTUNG	4.200	Dinas PUTR
1.907	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (JL TARUTUNG)	JL TARUTUNG	3.750	Dinas PUTR
1.908	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (JL TARUTUNG)	JL TARUTUNG	3.750	Dinas PUTR
1.909	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (KEC. MUARA)	KEC. MUARA	3.750	Dinas PUTR
1.910	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (KEC. PURBA TUA)	KEC. PURBA TUA	3.750	Dinas PUTR
1.911	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (RANGGITGIT)	RANGGITGIT	3.750	Dinas PUTR
1.912	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DESA BRON UGAN)	DESA BRON UGAN	3.750	Dinas PUTR
1.913	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DESA SITAKKA)	DESA SITAKKA	3.750	Dinas PUTR
1.914	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DESA AEK HAIDUPAN)	DESA AEK HAIDUPAN	3.750	Dinas PUTR
1.915	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DUSUN GOTI)	DUSUN GOTI	4.225	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.916	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (SILDILANITANO DESA LUMBANTONGATONGAN SIBORONGBORONG)	SILDILANITANO DESA LUMBANTONGATONGAN SIBORONGBORONG	4.550	Dinas PUTR
1.917	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (AEK HALIAN DESA SIMORANGKIR HABINSARAN KEC. SIATAS BARITA)	AEK HALIAN DESA SIMORANGKIR HABINSARAN KEC. SIATAS BARITA	4.800	Dinas PUTR
1.918	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (AEK HALIAN DESA SIMORANGKIR JULU KEC. SIATAS BARITA)	AEK HALIAN DESA SIMORANGKIR JULU KEC. SIATAS BARITA	3.900	Dinas PUTR
1.919	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DESA SITABOTABO TORUAN KEC. SIBORONGBORONG)	DESA SITABOTABO TORUAN KEC. SIBORONGBORONG	3.250	Dinas PUTR
1.920	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DESA BAHAL BATU III KECAMATAN SIBORONBORONG)	DESA BAHAL BATU III KECAMATAN SIBORONBORONG	3.250	Dinas PUTR
1.921	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DUSUN IV JUTA HUTAPEA BANUARAEA KEC. TARUTUNG)	DUSUN IV JUTA HUTAPEA BANUARAEA KEC. TARUTUNG	4.225	Dinas PUTR
1.922	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DESA HUTATINGGI KEC. PARMONANGAN)	DESA HUTATINGGI KEC. PARMONANGAN	3.250	Dinas PUTR
1.923	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (SIHAJANG DESA SIMATUPANG KEC. MUARA)	SIHAJANG DESA SIMATUPANG KEC. MUARA	3.575	Dinas PUTR
1.924	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (LOBU DESA SIPATUPANG KEC. MUARA)	LOBU DESA SIPATUPANG KEC. MUARA	4.550	Dinas PUTR
1.925	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (SIMANOSOR DESA SIMATUPANG KEC. MUARA)	SIMANOSOR DESA SIMATUPANG KEC. MUARA	5.600	Dinas PUTR
1.926	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DESA PARBUBU DOLOK KEC. TARUTUNG)	DESA PARBUBU DOLOK KEC. TARUTUNG	3.380	Dinas PUTR
1.927	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (PANSINARAN KEL. SITUMEANG HABINSARAN KEC. SIPOHOLON)	PANSINARAN KEL. SITUMEANG HABINSARAN KEC. SIPOHOLON	2.600	Dinas PUTR
1.928	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DESA HUTAPEA BANUA REA KEC. TARUTUNG)	DESA HUTAPEA BANUA REA KEC. TARUTUNG	2.600	Dinas PUTR
1.929	Tanah Dibawah Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan (DESA LUMBAN SILINTONG KEC. PAGARAN)	DESA LUMBAN SILINTONG KEC. PAGARAN	630	Dinas PUTR
1.930	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. PANCUR BATU, KEC ADIAN KOTING)	DI. PANCUR BATU, KEC ADIAN KOTING	180	Dinas PUTR
1.931	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK HAJORAN, KEC ADIAN KOTING)	AEK HAJORAN, KEC ADIAN KOTING	210	Dinas PUTR
1.932	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (PAGARAN LAMBUNG KEC. ADIANKOTING)	PAGARAN LAMBUNG KEC. ADIANKOTING	7.650	Dinas PUTR
1.933	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK TANGGA KEC. GAROGA)	AEK TANGGA KEC. GAROGA	5.100	Dinas PUTR
1.934	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIDEMPULA, KEC. MUARA)	SIDEMPULA, KEC. MUARA	5.700	Dinas PUTR
1.935	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sidempula (160 Ha) Kec Muara)	DI Sidempula 160 Ha Kec Muara	480	Dinas PUTR
1.936	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK BUTAR, KEC. PAGARAN)	AEK BUTAR, KEC. PAGARAN	5.250	Dinas PUTR
1.937	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK RAJA KEC. PARMONANGAN)	AEK RAJA KEC. PARMONANGAN	5.250	Dinas PUTR
1.938	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK MABAR KEC. SIBORONGBORONG)	DI. AEK MABAR KEC. SIBORONGBORONG	4.500	Dinas PUTR
1.939	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DS. LUBIS, KEC. PAGARAN)	DS. LUBIS, KEC. PAGARAN	5.460	Dinas PUTR
1.940	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. TABURAN SIBIRIK, KEC. PAGARAN)	DI. TABURAN SIBIRIK, KEC. PAGARAN	4.710	Dinas PUTR
1.941	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK BONGBONGAN KEC. PAHAE JAE)	AEK BONGBONGAN KEC. PAHAE JAE	3.375	Dinas PUTR
1.942	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK BOTIK, KEC. PAHAE JAE)	AEK BOTIK, KEC. PAHAE JAE	498	Dinas PUTR
1.943	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK SITAPEAN, KEC. PAHAE JAE)	AEK SITAPEAN, KEC. PAHAE JAE	6.300	Dinas PUTR
1.944	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (ONAN JORO, KEC. PAHAE JAE)	ONAN JORO, KEC. PAHAE JAE	7.080	Dinas PUTR
1.945	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK MARTINDI, KEC. PAHAE JULU)	AEK MARTINDI, KEC. PAHAE JULU	4.500	Dinas PUTR
1.946	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Irigasi Martindi Desa Sibaganding Kec. Pahae Julu)	Perbaikan Irigasi Martindi Desa Sibaganding Kec. Pahae Julu	180	Dinas PUTR
1.947	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DS. HUTASOIT, KEC. SIBORONGBORONG)	DS. HUTASOIT, KEC. SIBORONGBORONG	4.650	Dinas PUTR
1.948	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK MARTINDI KEC. PAHAE JULU)	DI. AEK MARTINDI KEC. PAHAE JULU	7.500	Dinas PUTR
1.949	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK SABA DESA MANALU DOLOK KEC. PARMONANGAN)	AEK SABA DESA MANALU DOLOK KEC. PARMONANGAN	4.500	Dinas PUTR
1.950	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DS. PARDAMEAN, KEC. PAHAE JAE)	DS. PARDAMEAN, KEC. PAHAE JAE	2.550	Dinas PUTR
1.951	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DS. PARSADAHAN PADUAHON, KEC. PAHAE JAE)	DS. PARSADAHAN PADUAHON, KEC. PAHAE JAE	7.350	Dinas PUTR
1.952	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIMAJAMBU, KEC. PAHAE JAE)	SIMAJAMBU, KEC. PAHAE JAE	5.010	Dinas PUTR
1.953	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (TAMBOKAN BEGU DESA LOBU SINGKAM KEC. SIPOHOLON)	TAMBOKAN BEGU DESA LOBU SINGKAM KEC. SIPOHOLON	5.250	Dinas PUTR
1.954	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIMANGUMBAN, KEC. PAHAE JAE)	SIMANGUMBAN, KEC. PAHAE JAE	5.310	Dinas PUTR
1.955	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK LUMBAN GAROGA, KEC. PAHAE JULU)	AEK LUMBAN GAROGA, KEC. PAHAE JULU	4.650	Dinas PUTR
1.956	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA SILANGKITANG)	DI. DESA SILANGKITANG	6.750	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
1.957	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Longsor Irigasi Sidolgi Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran)	Longsor Irigasi Sidolgi Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran	180	Dinas PUTR
1.958	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIALANG KEC. PAHAE JULU)	DI. SIALANG KEC. PAHAE JULU	5.100	Dinas PUTR
1.959	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. PARHORBOAN KEC. PAGARAN)	DI. PARHORBOAN KEC. PAGARAN	6.000	Dinas PUTR
1.960	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. JALAN JEGES DESA LOBU SIREGAR II)	DI. JALAN JEGES DESA LOBU SIREGAR II	4.800	Dinas PUTR
1.961	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Onan Hasang Kec. Pahae Julu)	DI. Onan Hasang Kec. Pahae Julu	6.399	Dinas PUTR
1.962	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIMARGALUNG, KEC. PAHAE JULU)	SIMARGALUNG, KEC. PAHAE JULU	5.160	Dinas PUTR
1.963	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (LUMBAN PEA, KEC. SIBORONGBORONG)	LUMBAN PEA, KEC. SIBORONGBORONG	4.980	Dinas PUTR
1.964	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI PANAHARAN KEC. TARUTUNG)	DI PANAHARAN KEC. TARUTUNG	2.550	Dinas PUTR
1.965	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DUSUN LUMBAN PEA TORUAN, DES A SIBORONGBORONG I)	DUSUN LUMBAN PEA TORUAN, DES A SIBORONGBORONG I	6.250	Dinas PUTR
1.966	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIMASOM, KEC. PAHAE JULU)	SIMASOM, KEC. PAHAE JULU	7.500	Dinas PUTR
1.967	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK NAMBILUNG, KEC. PAHAE JULU)	AEK NAMBILUNG, KEC. PAHAE JULU	5.220	Dinas PUTR
1.968	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Saluran Irigasi Aek Nambilung - Siarip-arip Desa Simanampang Kec Pahae Julu)	Pembangunan Saluran Irigasi Aek Nambilung - Siarip-arip Desa Simanampang Kec Pahae Julu	195	Dinas PUTR
1.969	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK SIARO, KEC. SIBORONG-BORONG)	AEK SIARO, KEC. SIBORONG-BORONG	4.260	Dinas PUTR
1.970	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DS. HARIARA SILABAN, KEC. SIBORONGBORONG)	DS. HARIARA SILABAN, KEC. SIBORONGBORONG	4.500	Dinas PUTR
1.971	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Hariara SIlaban (80 Ha) Kec Siborongborong)	DI Hariara SIlaban 80 Ha Kec Siborongborong	240	Dinas PUTR
1.972	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK HALIAN, KEC. TARUTUNG)	AEK HALIAN, KEC. TARUTUNG	6.720	Dinas PUTR
1.973	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (BONDAR SIBABIAT, KEC. TARUTUNG)	BONDAR SIBABIAT, KEC. TARUTUNG	10.200	Dinas PUTR
1.974	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (HUTABARAT PARBAJU, KEC. TARUTUNG)	HUTABARAT PARBAJU, KEC. TARUTUNG	2.700	Dinas PUTR
1.975	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK MARUBUN KEC. SIATAS BARITA)	DI. AEK MARUBUN KEC. SIATAS BARITA	4.050	Dinas PUTR
1.976	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Aek Marubun Di Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita)	Kerusakan Irigasi Aek Marubun Di Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita	240	Dinas PUTR
1.977	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIGURUNGGURUNG KEC. PAHAE JAE)	SIGURUNGGURUNG KEC. PAHAE JAE	135	Dinas PUTR
1.978	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (PILO HUTARAJA, SIMANUNGKALIT KEC. SIPOHOLON)	PILO HUTARAJA, SIMANUNGKALIT KEC. SIPOHOLON	352	Dinas PUTR
1.979	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sigansip (100 Ha) Kec Muara)	DI Sigansip 100 Ha Kec Muara	300	Dinas PUTR
1.980	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK SARULLA KEC. PAHAE JAE)	AEK SARULLA KEC. PAHAE JAE	2.910	Dinas PUTR
1.981	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (LOBU SONAK KEC. SIBORONGBORONG)	LOBU SONAK KEC. SIBORONGBORONG	1.740	Dinas PUTR
1.982	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (BANJAR SITABO-TABO, KEC. SIBORONGBORONG)	BANJAR SITABO-TABO, KEC. SIBORONGBORONG	6.900	Dinas PUTR
1.983	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Banjar Sitabotabo (60 Ha) Kec Siborongborong)	DI Banjar Sitabotabo 60 Ha Kec Siborongborong	180	Dinas PUTR
1.984	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI SIDOLGI KEC. PAGARAN)	DI SIDOLGI KEC. PAGARAN	5.400	Dinas PUTR
1.985	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI SIBORGUNG KANAN KEC. TARUTUNG)	DI SIBORGUNG KANAN KEC. TARUTUNG	7.320	Dinas PUTR
1.986	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Siborgung Kanan Kec Tarutung)	Siborgung Kanan Kec Tarutung	795	Dinas PUTR
1.987	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI SIBUNTUON KEC. SIPOHOLON)	DI SIBUNTUON KEC. SIPOHOLON	4.350	Dinas PUTR
1.988	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK RISTOP KEC. TARUTUNG)	AEK RISTOP KEC. TARUTUNG	12.480	Dinas PUTR
1.989	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI HASAK II KEC. SIATAS BARITA)	DI HASAK II KEC. SIATAS BARITA	630	Dinas PUTR
1.990	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI SITAMPURUNG KEC. SIBORONGBORONG)	DI SITAMPURUNG KEC. SIBORONGBORONG	2.280	Dinas PUTR
1.991	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sitampurung (225 Ha) Kec Siborongborong)	DI Sitampurung 225 Ha Kec Siborongborong	675	Dinas PUTR
1.992	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI SIDORAS KIRI KEC. SIBORONGBORONG)	DI SIDORAS KIRI KEC. SIBORONGBORONG	4.920	Dinas PUTR
1.993	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI AEK SIMARTIDI KEC. PAHAE JULU)	DI AEK SIMARTIDI KEC. PAHAE JULU	6.450	Dinas PUTR
1.994	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (PARMOCIAN DESA PANSURNAPITU)	PARMOCIAN DESA PANSURNAPITU	4.650	Dinas PUTR
1.995	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DS. SIGOHIBUTUHA, KEC. PAGARAN)	DS. SIGOHIBUTUHA, KEC. PAGARAN	5.970	Dinas PUTR
1.996	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIMANUNGKALIT KEC. SIPOHOLON)	DI. SIMANUNGKALIT KEC. SIPOHOLON	5.160	Dinas PUTR
1.997	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK BOTIK KEC. PAHAE JAE)	DI. AEK BOTIK KEC. PAHAE JAE	2.850	Dinas PUTR
1.998	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIBATUBATU KEC. PAHAE JAE)	DI. SIBATUBATU KEC. PAHAE JAE	3.750	Dinas PUTR
1.999	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIMOKMOK KEC. SIBORONGBORONG)	DI. SIMOKMOK KEC. SIBORONGBORONG	5.580	Dinas PUTR
2.000	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Simokmok (200 Ha) Kec Siborongborong)	DI Simokmok 200 Ha Kec Siborongborong	600	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.001	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SITAKKUBAK HOLBUNG KEC. PAGARAN)	DI. SITAKKUBAK HOLBUNG KEC. PAGARAN	5.220	Dinas PUTR
2.002	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. MAHANSAN KEC. PURBATUA)	DI. MAHANSAN KEC. PURBATUA	5.280	Dinas PUTR
2.003	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Mahansan Kec Purbatua (BKPSU))	DI Mahansan Kec Purbatua BKPSU	180	Dinas PUTR
2.004	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Mahansan Kec Purbatua)	Mahansan Kec Purbatua	6.048	Dinas PUTR
2.005	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SEBAGAOL DESA SIGUMBANG KEC. SIBORONGBORONG)	DI. SEBAGAOL DESA SIGUMBANG KEC. SIBORONGBORONG	3.600	Dinas PUTR
2.006	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SABA BOLAK KEC. PANGARIBUAN)	DI. SABA BOLAK KEC. PANGARIBUAN	11.250	Dinas PUTR
2.007	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK TORAS KEC. SIPOHOLON)	DI. AEK TORAS KEC. SIPOHOLON	4.830	Dinas PUTR
2.008	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SAMPEAN, KEC. PANGARIBUAN)	SAMPEAN, KEC. PANGARIBUAN	3.900	Dinas PUTR
2.009	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sampean (80 Ha) Kec Pangaribuan)	DI Sampean 80 Ha Kec Pangaribuan	240	Dinas PUTR
2.010	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIAMAOMA, KEC. PANGARIBUAN)	SIAMAOMA, KEC. PANGARIBUAN	1.704	Dinas PUTR
2.011	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK PARINSORAN, KEC. PARMONANGAN)	AEK PARINSORAN, KEC. PARMONANGAN	3.540	Dinas PUTR
2.012	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DS. HUTASOIT, KEC. SIBORONGBORONG)	DS. HUTASOIT, KEC. SIBORONGBORONG	7.200	Dinas PUTR
2.013	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIBORONGBORONG)	SIBORONGBORONG	8.010	Dinas PUTR
2.014	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIDILANITANO, KEC. SIBORONGBORONG)	SIDILANITANO, KEC. SIBORONGBORONG	2.100	Dinas PUTR
2.015	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DS. SIDORAS, KEC. SIBORONGBORONG)	DS. SIDORAS, KEC. SIBORONGBORONG	19.500	Dinas PUTR
2.016	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DSN. PARBUBU, KEC. TARUTUNG)	DSN. PARBUBU, KEC. TARUTUNG	2.010	Dinas PUTR
2.017	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (HUTANAMORA, KEC. TARUTUNG)	HUTANAMORA, KEC. TARUTUNG	5.550	Dinas PUTR
2.018	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIGUMBANG KEC. SIBORONGBORONG)	DI. SIGUMBANG KEC. SIBORONGBORONG	9.600	Dinas PUTR
2.019	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sigumbang (73 Ha) Kec Siborongborong)	DI Sigumbang 73 Ha Kec Siborongborong	219	Dinas PUTR
2.020	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SIMARLAI-LAI KEC. SIATAS BARITA)	SIMARLAI-LAI KEC. SIATAS BARITA	7.320	Dinas PUTR
2.021	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (PARBINONGAN DUSUN IV HUTAGALUNG KEC. SIATAS BARITA)	PARBINONGAN DUSUN IV HUTAGALUNG KEC. SIATAS BARITA	5.400	Dinas PUTR
2.022	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SILANTOM TONGA DESA SILANTOM TONGA KEC. PANGARIBUAN)	DI. SILANTOM TONGA DESA SILANTOM TONGA KEC. PANGARIBUAN	2.850	Dinas PUTR
2.023	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK PARLINTAAN DESA SITAKKA)	DI. AEK PARLINTAAN DESA SITAKKA	3.600	Dinas PUTR
2.024	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA HUTAJULU KEC. PARMONANGAN)	DI. DESA HUTAJULU KEC. PARMONANGAN	4.950	Dinas PUTR
2.025	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIMANUK KEC. SIPAHUTAR)	DI. SIMANUK KEC. SIPAHUTAR	7.770	Dinas PUTR
2.026	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK MAROMBANG KEC. SIMANGUMBAN)	AEK MAROMBANG KEC. SIMANGUMBAN	5.400	Dinas PUTR
2.027	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. LEHU PINASA)	DI. LEHU PINASA	450	Dinas PUTR
2.028	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK DAHANSAN)	DI. AEK DAHANSAN	5.220	Dinas PUTR
2.029	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK SILALAEN KEC. SIPOHOLON)	AEK SILALAEN KEC. SIPOHOLON	5.670	Dinas PUTR
2.030	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SITAMBA KEC. PAGARAN)	DI. SITAMBA KEC. PAGARAN	5.400	Dinas PUTR
2.031	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SILALAHI KEC. SIBORONGBORONG)	SILALAHI KEC. SIBORONGBORONG	5.100	Dinas PUTR
2.032	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (BONDAR PARTOLUAN DS. SITOMPUL KEC. SIATAS BARITA)	BONDAR PARTOLUAN DS. SITOMPUL KEC. SIATAS BARITA	2.250	Dinas PUTR
2.033	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI AEK SIANSIMUN KEC. TARUTUNG)	DI AEK SIANSIMUN KEC. TARUTUNG	3.600	Dinas PUTR
2.034	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK HORASAN KEC. ADIAN KOTING)	DI. AEK HORASAN KEC. ADIAN KOTING	4.680	Dinas PUTR
2.035	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (PANGANAN LOMBU, KEC. TARUTUNG)	PANGANAN LOMBU, KEC. TARUTUNG	10.500	Dinas PUTR
2.036	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI ONAN JORO KEC. PAHAE JAE)	DI ONAN JORO KEC. PAHAE JAE	8.100	Dinas PUTR
2.037	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI AEK BOMBONGAN KEC. PURBATUA)	DI AEK BOMBONGAN KEC. PURBATUA	5.700	Dinas PUTR
2.038	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI HUTABARAT PARBAJU KEC. TARUTUNG)	DI HUTABARAT PARBAJU KEC. TARUTUNG	6.120	Dinas PUTR
2.039	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SABA SIANTAR, KEC. PANGARIBUAN)	SABA SIANTAR, KEC. PANGARIBUAN	2.250	Dinas PUTR
2.040	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI JANGGALEMAN KEC. PAGARAN)	DI JANGGALEMAN KEC. PAGARAN	8.640	Dinas PUTR
2.041	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK HODA SIPAHUTAR KEC. SIPAHUTAR)	AEK HODA SIPAHUTAR KEC. SIPAHUTAR	7.500	Dinas PUTR
2.042	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK HALIAN SOSUNGGULON KEC. TARUTUNG)	AEK HALIAN SOSUNGGULON KEC. TARUTUNG	3.300	Dinas PUTR
2.043	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (LUMBAN TORA KEC. SIBORONGBORONG)	LUMBAN TORA KEC. SIBORONGBORONG	4.500	Dinas PUTR
2.044	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (SAMBARIDA HORBO DESA POHAN TONGA KEC. SIBORONGBORONG)	SAMBARIDA HORBO DESA POHAN TONGA KEC. SIBORONGBORONG	3.750	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.045	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI SIDILANITANO KEC. SIBORONGBORONG)	DI SIDILANITANO KEC. SIBORONGBORONG	4.920	Dinas PUTR
2.046	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI AEK SIRONGIT KEC. PAHAE JAE)	DI AEK SIRONGIT KEC. PAHAE JAE	4.020	Dinas PUTR
2.047	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI AEK BEREBE KEC. PURBATUA)	DI AEK BEREBE KEC. PURBATUA	5.700	Dinas PUTR
2.048	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI SITABUNAN DESA HUTAURUK KEC. SIPOHOLON)	DI SITABUNAN DESA HUTAURUK KEC. SIPOHOLON	11.250	Dinas PUTR
2.049	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK TORAS DESA LOBU SINGKAM KEC. SIPOHOLON)	AEK TORAS DESA LOBU SINGKAM KEC. SIPOHOLON	4.830	Dinas PUTR
2.050	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK HARANGAN KEC. SIPOHOLON)	AEK HARANGAN KEC. SIPOHOLON	3.900	Dinas PUTR
2.051	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Dyk Aek Harangan Kec Sipoholon (BKPSU))	Dyk Aek Harangan Kec Sipoholon BKPSU	204	Dinas PUTR
2.052	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Aek Harangan Di Dusun III Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon)	Kerusakan Irigasi Aek Harangan Di Dusun III Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon	30	Dinas PUTR
2.053	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Tembok Penahan Tanah Sungai Aek Harangan Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon)	Kerusakan Irigasi Tembok Penahan Tanah Sungai Aek Harangan Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon	98	Dinas PUTR
2.054	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (PEA TINGKO DESA SIBARAGAS KEC. PAGARAN)	PEA TINGKO DESA SIBARAGAS KEC. PAGARAN	1.920	Dinas PUTR
2.055	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI SITANGGOR KEC. MUARA)	DI SITANGGOR KEC. MUARA	3.600	Dinas PUTR
2.056	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK SIPARBUE KEC. MUARA)	AEK SIPARBUE KEC. MUARA	3.300	Dinas PUTR
2.057	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK SAH KEC. SIMANGUMBAN)	AEK SAH KEC. SIMANGUMBAN	2.940	Dinas PUTR
2.058	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK BONTAR DESA SAMPAGUL KEC. PANGARIBUAN)	AEK BONTAR DESA SAMPAGUL KEC. PANGARIBUAN	4.980	Dinas PUTR
2.059	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK SAMPEAN DESA LUMBAN SINAGA KEC. PANGARIBUAN)	AEK SAMPEAN DESA LUMBAN SINAGA KEC. PANGARIBUAN	3.750	Dinas PUTR
2.060	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK HORASAN KEC. ADIAN KOTING)	DI. AEK HORASAN KEC. ADIAN KOTING	3.000	Dinas PUTR
2.061	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SALAK KEC. GAROGA)	DI. AEK SALAK KEC. GAROGA	600	Dinas PUTR
2.062	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. PANGASEAN KEC. SIPOHOLON)	DI. PANGASEAN KEC. SIPOHOLON	3.600	Dinas PUTR
2.063	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK HALIAN KEC. SIATAS BARITA)	DI. AEK HALIAN KEC. SIATAS BARITA	7.500	Dinas PUTR
2.064	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK HODA KEC. SIPAHUTAR)	DI. AEK HODA KEC. SIPAHUTAR	4.680	Dinas PUTR
2.065	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SIRONGIT KEC. PAHAE JAE)	DI. AEK SIRONGIT KEC. PAHAE JAE	3.040	Dinas PUTR
2.066	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIBATUBATU KEC. PARMONANGAN)	DI. SIBATUBATU KEC. PARMONANGAN	5.280	Dinas PUTR
2.067	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SIANDURIAN KEC. SIPOHOLON)	DI. AEK SIANDURIAN KEC. SIPOHOLON	4.680	Dinas PUTR
2.068	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK LOSUNG HUTAGURGUR DESA HUTAURUK KEC. SIPOHOLON)	DI. AEK LOSUNG HUTAGURGUR DESA HUTAURUK KEC. SIPOHOLON	7.200	Dinas PUTR
2.069	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA PARDOMUAN NAINGGOLAN KEC. PAHAE JAE)	DI. DESA PARDOMUAN NAINGGOLAN KEC. PAHAE JAE	5.850	Dinas PUTR
2.070	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. HUTABARAT/PARBUBU PEA KEC. TARUTUNG)	DI. HUTABARAT/PARBUBU PEA KEC. TARUTUNG	4.500	Dinas PUTR
2.071	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIPURIKPURIK KEC. PURBATUA)	DI. SIPURIKPURIK KEC. PURBATUA	6.600	Dinas PUTR
2.072	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sipurik-purik (150 Ha) Kec Purbatua)	DI Sipurik-purik 150 Ha Kec Purbatua	450	Dinas PUTR
2.073	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIMANGONDING DESA SITABOTABO KEC. SIBORONGBORONG)	DI. SIMANGONDING DESA SITABOTABO KEC. SIBORONGBORONG	7.770	Dinas PUTR
2.074	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIHOSARI DESA SITABOTABO TORUAN KEC. SIBORONGBORONG)	DI. SIHOSARI DESA SITABOTABO TORUAN KEC. SIBORONGBORONG	2.700	Dinas PUTR
2.075	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (TANGGUL AEK SIGEAON KEC. TARUTUNG)	TANGGUL AEK SIGEAON KEC. TARUTUNG	3.568	Dinas PUTR
2.076	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (TANGGUL AEK SIPARBUE KEC. MUARA)	TANGGUL AEK SIPARBUE KEC. MUARA	960	Dinas PUTR
2.077	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. LOSUNG AEK KEC. SIMANGUMBAN)	DI. LOSUNG AEK KEC. SIMANGUMBAN	2.850	Dinas PUTR
2.078	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA PAGARAN KEC. PAGARAN)	DI. DESA PAGARAN KEC. PAGARAN	2.550	Dinas PUTR
2.079	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SILANGKITANG I DESA SIPAHUTAR KEC. SIPOHOLON)	DI. SILANGKITANG I DESA SIPAHUTAR KEC. SIPOHOLON	2.340	Dinas PUTR
2.080	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. LOPIAN)	DI. LOPIAN	2.640	Dinas PUTR
2.081	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SITABOTABO DOLOK)	DI. SITABOTABO DOLOK	5.550	Dinas PUTR
2.082	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIPULTAK)	DI. SIPULTAK	4.650	Dinas PUTR
2.083	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK PARBATU HUTATUA KEC. PARMONANGAN)	DI. AEK PARBATU HUTATUA KEC. PARMONANGAN	2.610	Dinas PUTR
2.084	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SIPAREME KEC. SIPAHUTAR)	DI. AEK SIPAREME KEC. SIPAHUTAR	6.450	Dinas PUTR
2.085	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK HALIAN HARANGAN KEC. SIPOHOLON)	DI. AEK HALIAN HARANGAN KEC. SIPOHOLON	23.760	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.086	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK HALIAN DESA SOSUNGGULON KEC. TARUTUNG)	DI. AEK HALIAN DESA SOSUNGGULON KEC. TARUTUNG	7.260	Dinas PUTR
2.087	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Aek Halian Desa Siansimun Kecamatan Tarutung)	Kerusakan Irigasi Aek Halian Desa Siansimun Kecamatan Tarutung	219	Dinas PUTR
2.088	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. PANANGGELE KEC. SIBORONGBORONG)	DI. PANANGGELE KEC. SIBORONGBORONG	6.480	Dinas PUTR
2.089	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Pananggele (150 Ha) Kec Siborongborong)	DI Pananggele 150 Ha Kec Siborongborong	660	Dinas PUTR
2.090	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI DESA PARBUBU)	DI DESA PARBUBU	4.500	Dinas PUTR
2.091	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK PARHOMBANAN KEC. SIATAS BARITA)	DI. AEK PARHOMBANAN KEC. SIATAS BARITA	4.650	Dinas PUTR
2.092	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. GUNUNG TUA KEC. PAHAE JAE)	DI. GUNUNG TUA KEC. PAHAE JAE	6.330	Dinas PUTR
2.093	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. BANJAR NAULI PARBAJU TORUAN)	DI. BANJAR NAULI PARBAJU TORUAN	1.290	Dinas PUTR
2.094	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK BUTAR KEC. SIBORONGBORONG)	DI. AEK BUTAR KEC. SIBORONGBORONG	4.950	Dinas PUTR
2.095	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIPONGGOL BABI KEC. PAGARAN)	DI. SIPONGGOL BABI KEC. PAGARAN	6.690	Dinas PUTR
2.096	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK NAMUMBAS)	DI. AEK NAMUMBAS	4.800	Dinas PUTR
2.097	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SIPARPAR KEC. PAHAE JULU)	DI. AEK SIPARPAR KEC. PAHAE JULU	4.980	Dinas PUTR
2.098	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SOMAILA DESA HUTAURUK)	DI. AEK SOMAILA DESA HUTAURUK	5.757	Dinas PUTR
2.099	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. TORU HUTA KEC. PAHAE JULU)	DI. TORU HUTA KEC. PAHAE JULU	5.310	Dinas PUTR
2.100	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI AEK MUAL)	DI AEK MUAL	4.440	Dinas PUTR
2.101	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIPARIAMA KEC. SIBORONGBORONG)	DI. SIPARIAMA KEC. SIBORONGBORONG	4.980	Dinas PUTR
2.102	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Paria ria Desa Parbaju Tonga Kec Tarutung)	Pembangunan Irigasi Paria ria Desa Parbaju Tonga Kec Tarutung	180	Dinas PUTR
2.103	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. PINONDANG SIMATANIARI DESA LUMBAN)	DI. PINONDANG SIMATANIARI DESA LUMBAN	4.980	Dinas PUTR
2.104	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK JAMBATAN TANOH DUSUN III DESA LOBU SINGKAM)	DI. AEK JAMBATAN TANOH DUSUN III DESA LOBU SINGKAM	1.680	Dinas PUTR
2.105	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. HUSOR KEC. SIATAS BARITA)	DI. HUSOR KEC. SIATAS BARITA	5.370	Dinas PUTR
2.106	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. LUMBAN RATUS KEC. SIATAS BARITA)	DI. LUMBAN RATUS KEC. SIATAS BARITA	5.160	Dinas PUTR
2.107	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA PARSAORAN JANJI ANGKOLA KEC. PURBATUA)	DI. DESA PARSAORAN JANJI ANGKOLA KEC. PURBATUA	2.550	Dinas PUTR
2.108	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DOLOK MARTUMBUR KEC. MUARA)	DI. DOLOK MARTUMBUR KEC. MUARA	2.850	Dinas PUTR
2.109	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI DESA PAGARAN KEC. PAGARAN)	DI DESA PAGARAN KEC. PAGARAN	4.200	Dinas PUTR
2.110	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA LUMBAN INAINA KEC. PAGARAN)	DI. DESA LUMBAN INAINA KEC. PAGARAN	1.350	Dinas PUTR
2.111	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DUSUN LUMBAN TONGA KEC. SIATAS BARITA)	DI. DUSUN LUMBAN TONGA KEC. SIATAS BARITA	5.100	Dinas PUTR
2.112	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SITABOTABO DOLOK KEC. SIBORONGBORONG)	DI. SITABOTABO DOLOK KEC. SIBORONGBORONG	5.100	Dinas PUTR
2.113	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. LOBU DESA SIMATUPANG)	DI. LOBU DESA SIMATUPANG	6.420	Dinas PUTR
2.114	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIGANSIP KEC. MUARA)	DI. SIGANSIP KEC. MUARA	5.430	Dinas PUTR
2.115	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIAEKAEK DESA ARITONANG KEC. MUARA)	DI. SIAEKAEK DESA ARITONANG KEC. MUARA	6.000	Dinas PUTR
2.116	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. NAJUMAMBE KEC. PANGARIBUAN)	DI. NAJUMAMBE KEC. PANGARIBUAN	6.000	Dinas PUTR
2.117	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIMATANIARI KEC. SIBORONGBORONG)	DI. SIMATANIARI KEC. SIBORONGBORONG	20.820	Dinas PUTR
2.118	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DUSUN SIMAREMARE DESA SILALI TORUAN KEC. MUARA)	DI. DUSUN SIMAREMARE DESA SILALI TORUAN KEC. MUARA	3.600	Dinas PUTR
2.119	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIBORGUNG KIRI)	DI. SIBORGUNG KIRI	5.400	Dinas PUTR
2.120	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA PADANG SIANDOMANG)	DI. DESA PADANG SIANDOMANG	4.680	Dinas PUTR
2.121	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SIPOLHAS KEC. TARUTUNG)	DI. AEK SIPOLHAS KEC. TARUTUNG	5.490	Dinas PUTR
2.122	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. PANSINARAN KEC. SIPOHOLON)	DI. PANSINARAN KEC. SIPOHOLON	6.000	Dinas PUTR
2.123	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SIBULBULON DESA PARTALI JULU KEC. TARUTUNG)	DI. AEK SIBULBULON DESA PARTALI JULU KEC. TARUTUNG	1.680	Dinas PUTR
2.124	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK NARORONGAN KEC. ADIANKOTING)	DI. AEK NARORONGAN KEC. ADIANKOTING	1.800	Dinas PUTR
2.125	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. LUMBAN BINTATAR DESA BANUALUHU)	DI. LUMBAN BINTATAR DESA BANUALUHU	4.950	Dinas PUTR
2.126	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SIPAREME KEC. SIPAHUTAR)	DI. AEK SIPAREME KEC. SIPAHUTAR	9.900	Dinas PUTR
2.127	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA PARDOMUAN NAINGGOLAN KEC. PAHAE JAE)	DI. DESA PARDOMUAN NAINGGOLAN KEC. PAHAE JAE	8.700	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.128	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK SAMPEAN KEC. PANGARIBUAN)	AEK SAMPEAN KEC. PANGARIBUAN	3.750	Dinas PUTR
2.129	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK SIMARDUNG)	DI. AEK SIMARDUNG	5.250	Dinas PUTR
2.130	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK HODA KEC. SIPAHUTAR)	AEK HODA KEC. SIPAHUTAR	7.500	Dinas PUTR
2.131	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK BONTAR KEC. PANGARIBUAN)	AEK BONTAR KEC. PANGARIBUAN	4.980	Dinas PUTR
2.132	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. AEK BINTANG)	DI. AEK BINTANG	6.690	Dinas PUTR
2.133	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIPAGAPAGA DESA ARITONANG KEC. MUARA)	DI. SIPAGAPAGA DESA ARITONANG KEC. MUARA	5.100	Dinas PUTR
2.134	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. BONDAR NAJUMPUL PARBAJU TONGA)	DI. BONDAR NAJUMPUL PARBAJU TONGA	3.750	Dinas PUTR
2.135	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SABANABOLAK DESA SITAMPURUNG KEC. TARUTUNG)	DI. SABANABOLAK DESA SITAMPURUNG KEC. TARUTUNG	4.950	Dinas PUTR
2.136	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK PANGASEAN KEC. SIPOHOLON)	AEK PANGASEAN KEC. SIPOHOLON	4.830	Dinas PUTR
2.137	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN)	BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	3.920	Dinas PUTR
2.138	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. SIBULANBULAN KEC. PURBATUA)	DI. SIBULANBULAN KEC. PURBATUA	7.320	Dinas PUTR
2.139	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Desa Sibulanbulan Kec Purbatua)	Desa Sibulanbulan Kec Purbatua	477	Dinas PUTR
2.140	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (AEK RISTOP KEC. TARUTUNG)	AEK RISTOP KEC. TARUTUNG	12.000	Dinas PUTR
2.141	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA PARSOSORAN)	DI. DESA PARSOSORAN	3.900	Dinas PUTR
2.142	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA SIBORONGBORONG I)	DI. DESA SIBORONGBORONG I	6.300	Dinas PUTR
2.143	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. DESA SIBORONGBORONG II)	DI. DESA SIBORONGBORONG II	6.000	Dinas PUTR
2.144	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sibuntuon (107 Ha) Kec Sipoholon)	DI Sibuntuon 107 Ha Kec Sipoholon	321	Dinas PUTR
2.145	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Siborgung Hilir Kec Tarutung)	Siborgung Hilir Kec Tarutung	600	Dinas PUTR
2.146	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Siborgung Hilir (200 Ha) Kec Tarutung)	DI Siborgung Hilir 200 Ha Kec Tarutung	600	Dinas PUTR
2.147	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Sipurik-Purik Desa Janji Nauli Kec. Purbatua)	Kerusakan Irigasi Sipurik-Purik Desa Janji Nauli Kec. Purbatua	195	Dinas PUTR
2.148	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Aek Sipareme Kec. Sipahutar)	Aek Sipareme Kec. Sipahutar	4.350	Dinas PUTR
2.149	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Sihujur Kec. Tarutung)	DI. Sihujur Kec. Tarutung	6.450	Dinas PUTR
2.150	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Peaobbus Dusun Sitakka Kec. Tarutung)	Peaobbus Dusun Sitakka Kec. Tarutung	1.920	Dinas PUTR
2.151	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Desa Parbaju Julu Kec. Tarutung)	Desa Parbaju Julu Kec. Tarutung	5.100	Dinas PUTR
2.152	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Parbaju Julu Kec Tarutung (BKPSU))	DI Parbaju Julu Kec Tarutung BKPSU	240	Dinas PUTR
2.153	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Aek Gurun Kec. Adiankoting)	Aek Gurun Kec. Adiankoting	2.400	Dinas PUTR
2.154	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Desa Sianjur Kec. Siborongborong)	Desa Sianjur Kec. Siborongborong	7.200	Dinas PUTR
2.155	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pea Tikko Desa Sibaragas Kec. Pagaran)	Pea Tikko Desa Sibaragas Kec. Pagaran	5.250	Dinas PUTR
2.156	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Sitenibabi Kec. Simangumban)	Sitenibabi Kec. Simangumban	3.630	Dinas PUTR
2.157	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (OP)	OP	3.680	Dinas PUTR
2.158	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Saba raisan)	Saba raisan	3.600	Dinas PUTR
2.159	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Irigasi Sitolu Bahal)	Irigasi Sitolu Bahal	7.500	Dinas PUTR
2.160	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (GORONG-GORONGDUSUN PE SONAK DESA DOLOK SARIBU KEC. PAGARAN)	GORONG-GORONGDUSUN PE SONAK DESA DOLOK SARIBU KEC. PAGARAN	5.824	Dinas PUTR
2.161	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DESA TALPANG)	DESA TALPANG	2.880	Dinas PUTR
2.162	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Jln. Jrs. Simp. IV Hutabarat - Siarangarang Kecamatan Tarutung)	Jln. Jrs. Simp. IV Hutabarat - Siarangarang Kecamatan Tarutung	3.680	Dinas PUTR
2.163	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Siaro Kecamatan Siborongborong)	Siaro Kecamatan Siborongborong	2.580	Dinas PUTR
2.164	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Hasak I Dusun I Hutatoruan I Kecamatan Tarutung)	Hasak I Dusun I Hutatoruan I Kecamatan Tarutung	4.080	Dinas PUTR
2.165	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Sidempula Desa Silali Toruan Kecamatan Muara)	Sidempula Desa Silali Toruan Kecamatan Muara	8.010	Dinas PUTR
2.166	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Sigumbang di Dusun I dan II Desa Sigumbang Kec. Siborongborong)	Sigumbang di Dusun I dan II Desa Sigumbang Kec. Siborongborong	4.920	Dinas PUTR
2.167	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Lumban Nainggolan Dusun Lumban Nainggolan Kelurahan Pasar Siborongboong Kecamatan Siborongborong)	Lumban Nainggolan Dusun Lumban Nainggolan Kelurahan Pasar Siborongboong Kecamatan Siborongborong	8.100	Dinas PUTR
2.168	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pearaja Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong)	Pearaja Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong	4.860	Dinas PUTR
2.169	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Onan Joro (350 Ha) Kec Pahae Jae)	DI Onan Joro 350 Ha Kec Pahae Jae	1.050	Dinas PUTR
2.170	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Sait Nihuta Hutautoruan Kec. Tarutung)	Sait Nihuta Hutautoruan Kec. Tarutung	7.200	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.171	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Banjarnauli Desa Parbaju Toraun Kec. Tarutung)	Banjarnauli Desa Parbaju Toraun Kec. Tarutung	2.250	Dinas PUTR
2.172	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Aek Halian Desa Sosunggulon Kec. Tarutung)	Aek Halian Desa Sosunggulon Kec. Tarutung	39.000	Dinas PUTR
2.173	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Desa Lbn. Siagian Julu Kec. Siatas Barita)	Desa Lbn. Siagian Julu Kec. Siatas Barita	5.160	Dinas PUTR
2.174	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Silakitang Kec. Pahae Jae)	DI Silakitang Kec. Pahae Jae	7.950	Dinas PUTR
2.175	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sigurung-gurung Kec. Pahae Jae)	DI Sigurung-gurung Kec. Pahae Jae	2.850	Dinas PUTR
2.176	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sitolu Bahal Kec. Pahae Jae)	DI Sitolu Bahal Kec. Pahae Jae	1.800	Dinas PUTR
2.177	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Desa Jamburnauli Kec. Tarutung)	DI Desa Jamburnauli Kec. Tarutung	5.400	Dinas PUTR
2.178	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Desa Sitampurung Kec. Tarutung)	DI Desa Sitampurung Kec. Tarutung	19.500	Dinas PUTR
2.179	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Desa Sihujur Kec. Tarutung)	DI Desa Sihujur Kec. Tarutung	11.250	Dinas PUTR
2.180	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Sosor Pea Desa Sangkaran Kec. Siatas Barita)	Sosor Pea Desa Sangkaran Kec. Siatas Barita	5.100	Dinas PUTR
2.181	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Sidua Huta Kec. Siatas Barita)	Sidua Huta Kec. Siatas Barita	9.600	Dinas PUTR
2.182	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Aek Sitihal Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon)	Aek Sitihal Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon	4.800	Dinas PUTR
2.183	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Sitihal - Bahal Desa Huta Ginjang Kec Muara)	Pembangunan Irigasi Sitihal - Bahal Desa Huta Ginjang Kec Muara	900	Dinas PUTR
2.184	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Hutagurgur Kec. Sipoholon)	Hutagurgur Kec. Sipoholon	4.350	Dinas PUTR
2.185	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Simartunjuk Dusun Sibuntuon Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon)	Simartunjuk Dusun Sibuntuon Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon	5.970	Dinas PUTR
2.186	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Partali Julu (100 Ha) Kec Tarutung)	DI Partali Julu 100 Ha Kec Tarutung	300	Dinas PUTR
2.187	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sibontar (55 Ha) Kec Sipoholon)	DI Sibontar 55 Ha Kec Sipoholon	165	Dinas PUTR
2.188	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Saba Bolok Dusun Batu Bolon Desa Sirpang Bolon Kec Garoga)	Pembangunan Irigasi Saba Bolok Dusun Batu Bolon Desa Sirpang Bolon Kec Garoga	360	Dinas PUTR
2.189	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Pagaran Ginjang (84 Ha) Kec Pagaran)	DI Pagaran Ginjang 84 Ha Kec Pagaran	252	Dinas PUTR
2.190	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sigalingging/Pealangge (400 Ha) Kec Siborongborong)	DI Sigalingging/Pealangge 400 Ha Kec Siborongborong	1.200	Dinas PUTR
2.191	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Daerah Aek Sitihal Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon)	Daerah Aek Sitihal Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon	2.512	Dinas PUTR
2.192	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Hasak I)	DI. Hasak I	630	Dinas PUTR
2.193	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Sibatubatu)	DI Sibatubatu	2.400	Dinas PUTR
2.194	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI. Aek Goti Parbaju Julu Kecamatan Tarutung)	DI. Aek Goti Parbaju Julu Kecamatan Tarutung	7.350	Dinas PUTR
2.195	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Saba Dolok (18 Ha) Kec Sipoholon)	DI Saba Dolok 18 Ha Kec Sipoholon	54	Dinas PUTR
2.196	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Munson Liman (50 Ha) Kec Adiankoting)	DI Munson Liman 50 Ha Kec Adiankoting	306	Dinas PUTR
2.197	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Parlombuan (105 Ha) Kec Parmonangan)	DI Parlombuan 105 Ha Kec Parmonangan	330	Dinas PUTR
2.198	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Lobu-Rodang Desa Lumban Dolok Kec Pahae Julu)	Lobu-Rodang Desa Lumban Dolok Kec Pahae Julu	120	Dinas PUTR
2.199	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan Garaga Desa Simataniari Kec Pahae Julu)	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan Garaga Desa Simataniari Kec Pahae Julu	135	Dinas PUTR
2.200	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Persawahan di Desa Sigurunggurung Kecamatan Pahae Jae)	Kerusakan Irigasi Persawahan di Desa Sigurunggurung Kecamatan Pahae Jae	71	Dinas PUTR
2.201	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Sigordang Dusun II Desa Simatupang Kec Muara)	Sigordang Dusun II Desa Simatupang Kec Muara	90	Dinas PUTR
2.202	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Tornauli I Desa Simanungkalit Kec Sipoholon)	Tornauli I Desa Simanungkalit Kec Sipoholon	93	Dinas PUTR
2.203	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Aek Lak-lak Desa Situmeang Hasundutan Kec Sipoholon)	Aek Lak-lak Desa Situmeang Hasundutan Kec Sipoholon	95	Dinas PUTR
2.204	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Desa Sipahutar Kec Sipoholon)	Desa Sipahutar Kec Sipoholon	85	Dinas PUTR
2.205	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Pargondangan Desa Sangkaran Kec Siatas Barita)	Pargondangan Desa Sangkaran Kec Siatas Barita	113	Dinas PUTR
2.206	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Sibanggor - Pansur Simin Sibanggar Desa Lumban Siagian Jae Kec Siatas Barita)	Sibanggor - Pansur Simin Sibanggar Desa Lumban Siagian Jae Kec Siatas Barita	14	Dinas PUTR
2.207	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan irigasi Aek Tobasan Desa Adian Koting Kec Adian Koting)	Aek Tobasan Desa Adian Koting Kec Adian Koting	153	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.208	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan irigasi Bahal Banuaji I Desa Banuaji I Kec Adian Koting)	Bahal Banuaji I Desa Banuaji I Kec Adian Koting	113	Dinas PUTR
2.209	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan irigasi Saba Borsak Desa Pansurbatu I Kec Adian Koting)	Saba Borsak Desa Pansurbatu I Kec Adian Koting	563	Dinas PUTR
2.210	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Rehab irigasi Aek Nabara Desa Pansurbatu Kec Adian Koting)	Rehab irigasi Aek Nabara Desa Pansurbatu Kec Adian Koting	3.140	Dinas PUTR
2.211	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Sihura-hura Desa Robean Kec Purbatua)	Sihura-hura Desa Robean Kec Purbatua	88	Dinas PUTR
2.212	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Bondar Tonga Desa Sidua Bahal Kec Purbatua)	Bondar Tonga Desa Sidua Bahal Kec Purbatua	101	Dinas PUTR
2.213	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Tano Mias Desa Pardamean Nainggolan Kec Pahae Jae)	Tano Mias Desa Pardamean Nainggolan Kec Pahae Jae	168	Dinas PUTR
2.214	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Saluran Irigasi Tano Nias Desa Pardamean Nainggolan Kec Pahae Jae (BKPSU))	Saluran Irigasi Tano Nias Desa Pardamean Nainggolan Kec Pahae Jae BKPSU	165	Dinas PUTR
2.215	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan DI Aek Talian Kec Siborongborong (BKPSU))	Perbaikan DI Aek Talian Kec Siborongborong BKPSU	115	Dinas PUTR
2.216	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Sipaboaboaon Desa Lobu Siregar II Kec Siborongborong)	Sipaboaboaon Desa Lobu Siregar II Kec Siborongborong	88	Dinas PUTR
2.217	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI PANAHARAN KEC. TARUTUNG)	DI PANAHARAN KEC. TARUTUNG	2.550	Dinas PUTR
2.218	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Sosor Topi Aek & Tambang I Desa Parbubu Pea Kec Tarutung)	Sosor Topi Aek & Tambang I Desa Parbubu Pea Kec Tarutung	74	Dinas PUTR
2.219	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Hutabagot Desa Hapoltahan Kec Tarutung)	Hutabagot Desa Hapoltahan Kec Tarutung	13	Dinas PUTR
2.220	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Lumban Siantar Desa Parbaju Julu Kec Tarutung)	Lumban Siantar Desa Parbaju Julu Kec Tarutung	128	Dinas PUTR
2.221	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan IrigasiSaba Rura Najumambe Kec Pangaribuan)	Saba Rura Najumambe Kec Pangaribuan	121	Dinas PUTR
2.222	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Aek Raja Toru Baringin Hutabarat Parbaju Kec Tarutung (BKPSU))	DI Aek Raja Toru Baringin Hutabarat Parbaju Kec Tarutung BKPSU	125	Dinas PUTR
2.223	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Sunge Desa Onan Runggu III Kec Sipahutar (BKPSU))	Sunge Desa Onan Runggu III Kec Sipahutar BKPSU	120	Dinas PUTR
2.224	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (DI Aek Las Kec Simangumban (BKPSU))	DI Aek Las Kec Simangumban BKPSU	120	Dinas PUTR
2.225	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Desa Banuaji Kec Adiankoting (BKPSU))	Desa Banuaji Kec Adiankoting BKPSU	138	Dinas PUTR
2.226	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Desa Sitoluompu Kec Pahae Jae)	Desa Sitoluompu Kec Pahae Jae	327	Dinas PUTR
2.227	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Desa Robean Kec Purbatua)	Desa Robean Kec Purbatua	524	Dinas PUTR
2.228	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Pembangunan Irigasi Pansur Simin Desa Garoga Sibargot Kec Garoga)	Pansur Simin Desa Garoga Sibargot Kec Garoga	203	Dinas PUTR
2.229	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Dusun Siparini - Topi Aek Kec Tarutung)	Dusun Siparini - Topi Aek Kec Tarutung	7.396	Dinas PUTR
2.230	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Saba Dolok Desa Gonting Salak Kec Garoga)	Saba Dolok Desa Gonting Salak Kec Garoga	550	Dinas PUTR
2.231	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Biaya Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	61	Dinas PUTR
2.232	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Di Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung)	Di Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung	231	Dinas PUTR
2.233	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Bondar Tonga -Tonga Di Dusun II Huta Dame 2 Kecamatan Tarutung)	Bondar Tonga -Tonga Di Dusun II Huta Dame 2 Kecamatan Tarutung	231	Dinas PUTR
2.234	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Dan Gorong Gorong Di Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung)	Dan Gorong Gorong Di Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung	94	Dinas PUTR
2.235	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Di Desa Parbubu I KecamatanTarutung)	Di Desa Parbubu I KecamatanTarutung	79	Dinas PUTR
2.236	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Tanggul Aek Siborgung Di Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung)	Tanggul Aek Siborgung Di Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung	225	Dinas PUTR
2.237	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Tanggul Sungai Sibulonbulon Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung)	Tanggul Sungai Sibulonbulon Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung	234	Dinas PUTR
2.238	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Bondar Tonga Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita)	Bondar Tonga Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita	184	Dinas PUTR
2.239	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Saluran Irigasi Aek Doli Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon)	Irigasi Aek Doli Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon	260	Dinas PUTR
2.240	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Saluran Irigasi Aek Bahal Di Desa Banuaji I Kec. Adiankoting)	Saluran Irigasi Aek Bahal Di Desa Banuaji I Kec. Adiankoting	167	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.241	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Irigasi Dan Pembuatan Tembok Penahan Tanah Di Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung)	Irigasi Dan Pembuatan Tembok Penahan Tanah Di Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung	134	Dinas PUTR
2.242	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Talang Saluran Irigasi Onan Hasang Kel.Onan Hasang Kec. Pahae Julu)	Talang Saluran Irigasi Onan Hasang Kel.Onan Hasang Kec. Pahae Julu	72	Dinas PUTR
2.243	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Tanggul Sungai Aek Panggoaran Di Dusun II Lumban Tonga Desa Pardamean Nainggolan Kec. Pahae Jae)	Tanggul Sungai Aek Panggoaran Di Dusun II Lumban Tonga Desa Pardamean Nainggolan Kec. Pahae Jae	150	Dinas PUTR
2.244	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Saluran Air Dusun Pardahanasira Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae)	Saluran Air Dusun Pardahanasira Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae	140	Dinas PUTR
2.245	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Tanggul Irigasi Dusun Tarutung II Desa Sukamaju Kec. Pahae Jae)	Tanggul Irigasi Dusun Tarutung II Desa Sukamaju Kec. Pahae Jae	60	Dinas PUTR
2.246	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Saluran Air Simaninggir Desa Sitolu Ompu Kec. Pahae Jae)	Saluran Air Simaninggir Desa Sitolu Ompu Kec. Pahae Jae	199	Dinas PUTR
2.247	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Irigasi Pada Desa Sibulan - bulan Kec. Purbatua)	Irigasi Pada Desa Sibulan - bulan Kec. Purbatua	252	Dinas PUTR
2.248	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Tali Air Desa Simangumban Jullu Kec. Simangumban)	Tali Air Desa Simangumban Jullu Kec. Simangumban	250	Dinas PUTR
2.249	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Gorong Gorong Dan Dyk Semen Di Desa Bahal Batu I Kec. Siborongborong)	Gorong Gorong Dan Dyk Semen Di Desa Bahal Batu I Kec. Siborongborong	426	Dinas PUTR
2.250	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Longsor Irigasi Siandaliman Di Dusun II Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong)	Longsor Irigasi Siandaliman Di Dusun II Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong	68	Dinas PUTR
2.251	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Tanggul Irigasi Di Dusun II Parsimataan Desa Sigumbang Kec. Siborongborong)	Tanggul Irigasi Di Dusun II Parsimataan Desa Sigumbang Kec. Siborongborong	126	Dinas PUTR
2.252	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Tanggul Irigasi Di Dusun Pangasean Desa Siaro Kec. Siborongborong)	Tanggul Irigasi Di Dusun Pangasean Desa Siaro Kec. Siborongborong	170	Dinas PUTR
2.253	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Jebolnya Saluran Irigasi Sadaran Lumban Panopa Ds. Siborongborong I Kec. Siborongborong)	Saluran Irigasi Sadaran Lumban Panopa Ds. Siborongborong I Kec. Siborongborong	182	Dinas PUTR
2.254	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Saluran Irigasi Sigassip Dusun III Desa Baribaniaek Kec. Muara)	Saluran Irigasi Sigassip Dusun III Desa Baribaniaek Kec. Muara	80	Dinas PUTR
2.255	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Lobu Desa Simatupang Kecamatan Muara)	Lobu Desa Simatupang Kecamatan Muara	158	Dinas PUTR
2.256	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Saluran Irigasi Siaek - Aek Desa Aritonang Kec. Muara)	Saluran Irigasi Siaek - Aek Desa Aritonang Kec. Muara	48	Dinas PUTR
2.257	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Saluran Irigasi Di Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting)	Saluran Irigasi Di Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting	114	Dinas PUTR
2.258	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Longsor Irigasi di Dusun Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong)	Dusun Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong	99	Dinas PUTR
2.259	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Tanggul Aek Horsik di Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran)	Tanggul Aek Horsik di Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran	68	Dinas PUTR
2.260	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Gorong-Gorong dan Irigasi di Desa Lobu Hole Kecamatan Siatas Barita)	Gorong-Gorong dan Irigasi di Desa Lobu Hole Kecamatan Siatas Barita	61	Dinas PUTR
2.261	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Tanggul Pintu Air di Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan)	Tanggul Pintu Air di Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan	12	Dinas PUTR
2.262	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Penaggulangan Bencana Alam Kerusakan Tanggul Irigasi Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung)	Penaggulangan Bencana Alam Tanggul Irigasi Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung	23	Dinas PUTR
2.263	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Tanggul Aek Longat Desa Selamat Kecamatan Purbatua)	Tanggul Aek Longat Desa Selamat Kecamatan Purbatua	208	Dinas PUTR
2.264	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Perbaikan Tali Air Di Dusun II Sianjur Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong)	Tali Air Di Dusun II Sianjur Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong	65	Dinas PUTR
2.265	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Longsor dan Saluran Irigasi Belakang HKBP Kota Siborongborong Kecamatan Siborongborong)	Saluran Irigasi Belakang HKBP Kota Siborongborong Kecamatan Siborongborong	65	Dinas PUTR
2.266	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Aek Sigotigoti Kecamatan Parmonangan)	Aek Sigotigoti Kecamatan Parmonangan	40	Dinas PUTR
2.267	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Saluran Irigasi Aek Sidimpula Desa Silali Toruan Kecamatan Muara)	Irigasi Aek Sidimpula Desa Silali Toruan Kecamatan Muara	120	Dinas PUTR
2.268	Tanah Dibawah Saluran Sekunder (Kerusakan Irigasi Saba Jenek Desa Pancurbatu Kecamatan Adiankoting)	Saba Jenek Desa Pancurbatu Kecamatan Adiankoting	36	Dinas PUTR
2.269	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Siborgung Hilir (200 Ha) Kec. Tarutung	DI. Siborgung Hilir (200 Ha) Kec. Tarutung	2	Dinas PUTR
2.270	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Sigumbang (73 Ha) Kec. Siboronborong	DI. Sigumbang (73 Ha) Kec. Siboronborong	461	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.271	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Sigalingging/Pealangge (41 Ha) Kec. Siborongborong	DI. Sigalingging/Pealangge (41 Ha) Kec. Siborongborong	413	Dinas PUTR
2.272	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Lumban Pea Dolok (79 Ha) Kec. Siborongborong	DI. Lumban Pea Dolok (79 Ha) Kec. Siborongborong	508	Dinas PUTR
2.273	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Sianpapaga (150 Ha) Kec. Siborongborong	DI. Sianpapaga (150 Ha) Kec. Siborongborong	438	Dinas PUTR
2.274	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Sibuntuon (107 Ha) Kec. Sipoholon	DI. Sibuntuon (107 Ha) Kec. Sipoholon	303	Dinas PUTR
2.275	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Tambok Nabegu (52 Ha) Kec. Sipoholon	DI. Tambok Nabegu (52 Ha) Kec. Sipoholon	472	Dinas PUTR
2.276	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Sidempula (160 Ha) Kec. Muara	DI. Sidempula (160 Ha) Kec. Muara	514	Dinas PUTR
2.277	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Parlombuan (105 Ha) Kec. Parmonangan	DI. Parlombuan (105 Ha) Kec. Parmonangan	258	Dinas PUTR
2.278	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Onan Joro (350 Ha) Kec. Pahae Jae	DI. Onan Joro (350 Ha) Kec. Pahae Jae	398	Dinas PUTR
2.279	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Sonak Sigompulon (65 Ha) Kec. Pahae Julu	DI. Sonak Sigompulon (65 Ha) Kec. Pahae Julu	310	Dinas PUTR
2.280	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Saba Bolak (400 Ha) Kec. Pangaribuan	DI. Saba Bolak (400 Ha) Kec. Pangaribuan	407	Dinas PUTR
2.281	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Aek Halian (60 Ha) Kec. Siatas Barita	DI. Aek Halian (60 Ha) Kec. Siatas Barita	248	Dinas PUTR
2.282	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi DI. Parbinong Kec. Tarutung	DI. Parbinong Kec. Tarutung	85	Dinas PUTR
2.283	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi Sosor Sihilap Kec. Pagaran	Irigasi Sosor Sihilap Kec. Pagaran	66	Dinas PUTR
2.284	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi Sitihal Kec. Sipoholon	Irigasi Sitihal Kec. Sipoholon	132	Dinas PUTR
2.285	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi Sitampurung Kec. Siborongborng	Irigasi Sitampurung Kec. Siborongborng	94	Dinas PUTR
2.286	Tanah Dibawah Jaringan Irigasi Sigurunggurung Kec. Pahae Jae	Irigasi Sigurunggurung Kec. Pahae Jae	149	Dinas PUTR
2.287	Tanah Dibawah Irigasi Aek Halian Harangan Kec. Sipoholon	Aek Halian Harangan Kec. Sipoholon	130	Dinas PUTR
2.288	Tanah Dibawah Irigasi Sawah Manompas Dusun IV Simangumban Jae Kec. Simangumban	Sawah Manompas Dusun IV Simangumban Jae Kec. Simangumban	157	Dinas PUTR
2.289	Pembangunan Irigasi di Kelurahan Hutatoruan VII Hutabaginda-saitnihuta Julu Kec. Tarutung	Kelurahan Hutatoruan VII Hutabaginda-saitnihuta Julu Kec. Tarutung	6.000	Dinas PUTR
2.290	Rehabilitasi DI Irigasi Banjar Sitabotabo Kec. Siborongborong	Banjar Sitabotabo Kec. Siborongborong	7.500	Dinas PUTR
2.291	Pembangunan Irigasi Sosor Pea Desa Sangkaran Kec. Siatas Barita	Sosor Pea Desa Sangkaran Kec. Siatas Barita	8.000	Dinas PUTR
2.292	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Sigurunggurung Kec. Pahae Jae	DI. Sigurunggurung Kec. Pahae Jae	8.000	Dinas PUTR
2.293	Rehabilitasi Irigasi Sitihal Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon	Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon	9.000	Dinas PUTR
2.294	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Parik Ginjang Kec. Pagaran	DI. Parik Ginjang Kec. Pagaran	8.500	Dinas PUTR
2.295	Perbaikan DI Banjar Sitabotabo Kec. Siborongborong	DI Banjar Sitabotabo Kec. Siborongborong	8.200	Dinas PUTR
2.296	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sababolak Kec. Pangaribuan	DI. Sababolak Kec. Pangaribuan	8.000	Dinas PUTR
2.297	Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	8.200	Dinas PUTR
2.298	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Sitihal Kec. Sipoholon	Irigasi DI. Sitihal Kec. Sipoholon	9.500	Dinas PUTR
2.299	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sipurik-purik (150 Ha) Kec Purbatua	DI. Sipurik-purik Kec Purbatua	8.000	Dinas PUTR
2.300	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sulum (40 Ha) Kec Purbatua	DI. Sulum Kec Purbatua	8.000	Dinas PUTR
2.301	Peningkatan Jaringan Irigasi Siandurian Kec. Sipoholon (BKP-SU)	Siandurian Kec. Sipoholon	10.000	Dinas PUTR
2.302	Peningkatan Jaringan irigasi Parmocian Kec. Siatas Barita (BKP-SU)	Parmocian Kec. Siatas Barita	10.000	Dinas PUTR
2.303	Peningkatan Jaringan irigasi Sitanggor Kecamatan Muara (BKP-SU)	Sitanggor Kecamatan Muara	10.000	Dinas PUTR
2.304	Peningkatan Jaringan Irigasi Siborgung Kecamatan Tarutung (BKP-SU)	Siborgung Kecamatan Tarutung	10.000	Dinas PUTR
2.305	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Simanuk (125 Ha) (DAK)	Irigasi DI. Simanuk	10.000	Dinas PUTR
2.306	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bondar Sibabiat (66 Ha) (DAK)	Bondar Sibabiat	10.000	Dinas PUTR
2.307	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Partali Julu	DI. Partali Julu	10.000	Dinas PUTR
2.308	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Suppol (60 Ha) (DAK)	DI. Suppol	10.000	Dinas PUTR
2.309	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Siborgung Kiri/Kanan (159 Ha) (DAK)	DI. Siborgung Kiri/Kanan	10.000	Dinas PUTR
2.310	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Aek Marubun	Irigasi DI. Aek Marubun	14.400	Dinas PUTR
2.311	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Simasom (43 Ha) (DAK)	DI. Simasom	12.000	Dinas PUTR
2.312	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Simangumban (70 Ha) (DAK)	DI. Simangumban	36.000	Dinas PUTR
2.313	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Simarompuompu (90 Ha) (DAK)	DI. Simarompuompu	45.600	Dinas PUTR
2.314	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Aek Botik (140 Ha) (DAK)	DI. Aek Botik	25.000	Dinas PUTR
2.315	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sidoras Kiri/Kanan (384 Ha) (DAK)	DI. Sidoras Kiri/Kanan	42.000	Dinas PUTR
2.316	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sigohi Butuha (339 Ha) (DAK)	DI. Sigohi Butuha	66.000	Dinas PUTR
2.317	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sitampurung (225 Ha) (DAK)	DI. Sitampurung	48.000	Dinas PUTR
2.318	Peningkatan Jaringan irigasi Aek Halian Kec. Siatas Barita (BKP-SU)	Aek Halian Kec. Siatas Barita	10.000	Dinas PUTR
2.319	DI. Tambok Bolon (91 Ha)	Lumban Ina ina	510	Dinas PUTR
2.320	DI. Simarhilap (60 Ha)	Sipultak Dolok	578	Dinas PUTR
2.321	DI. Silando (70 Ha)	Silando	602	Dinas PUTR
2.322	DI. Aek Marubun (80 Ha)	Lumban Siagian Julu	338	Dinas PUTR
2.323	DI. Aek Simargalung (75 Ha)	Pantis	570	Dinas PUTR
2.324	DI. Aek Siparpar (43 Ha)	Simasom Toruan	451	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.325	DI. Aek Bontar (100 Ha)	Janji Maria	955	Dinas PUTR
2.326	DI. Sibontar (55 Ha)	Hutaraja Habinsaran	619	Dinas PUTR
2.327	DI. Sigalingging Pealangge (41 Ha)	Sitabotabo Toruan	397	Dinas PUTR
2.328	DI. Sidempula (160 Ha)	Huta Nagodang	335	Dinas PUTR
2.329	DI. Saba Iobu (36 Ha)	Garoga Sibargot	88	Dinas PUTR
2.330	DI. Pansur Batu	Pancur Batu	196	Dinas PUTR
2.331	DI. Bondar Sibabiat	Sosunggulon	108	Dinas PUTR
2.332	DI. Saitnihuta Topi Aek	Hutatoruan I	183	Dinas PUTR
2.333	Irigasi Siborgung Hilir	Parbubu I	135	Dinas PUTR
2.334	Irigasi Aek Bulu Nahornop Marsada	Nahornop Marsada	319	Dinas PUTR
2.335	Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara	Sipultak Dolok	98	Dinas PUTR
2.336	Irigasi DI. Siopat Bahal	Siopat Bahal/Pangaloan	105	Dinas PUTR
2.337	Irigasi DI. Sitabotabo	Sitabotabo	143	Dinas PUTR
2.338	Irigasi Desa Lobu Singkam Kecamatan Sipoholon	Lobu Singkam	176	Dinas PUTR
2.339	Irigasi Desa Lumban Siagian Julu Kecamatan Siatas Barita	Lumban Siagian Julu	181	Dinas PUTR
2.340	Irigasi Desa Lumban Gaol Kecamatan Pahae Julu	Lumban Gaol	189	Dinas PUTR
2.341	Tali Air saba manoppar dusun 4 sipetang desa simangumban jae Kec. Simangumban	Simangumban Jae	189	Dinas PUTR
2.342	Irigasi desa parhopian desa sigurung-gurung Kec.Pahae Jae	Sigurunggurung	154	Dinas PUTR
2.343	Irigasi Aek Toras Dusun III Desa Lobu Singkam Kec. Sipoholon	Lobu Singkam	125	Dinas PUTR
2.344	Irigasi di Dusun Tor Banuaji II Kec. Adiankoting	Banuaji II	145	Dinas PUTR
2.345	Irigasi di Pansur Batu II Kec. Adiankoting	Pancur Batu II	183	Dinas PUTR
2.346	Tembok Penahan Tanah Aek Ristop	Hutatoruan VII	170	Dinas PUTR
2.347	Irigasi di Desa Parbaju Tonga	Parbaju Tonga	96	Dinas PUTR
2.348	Penanggulangan Bencana Alam Kerusakan irigasi Sipurikpurik Desa janji Nauli Kec. Purbatua	Janji Nauli	106	Dinas PUTR
2.349	Penanggulangan Bencana Alam Kerusakan Irigasi Pakkirapan Dusun I Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong I Kec. Siborongborong	Sitabo Tabo	70	Dinas PUTR
2.350	Penanggulangan Bencana Alam Kerusakan Irigasi Lumban Pea Desa Siborongborong I Kec. Siborongborong	Siborongborong I	131	Dinas PUTR
2.351	Pennaggulangan Bencana Alam Kerusakan Tanggul Penahan Aek Marabun Desa Lumban Siagian Julu Kec. Siatas Barita	Lumban Siagian Julu	26	Dinas PUTR
2.352	Penanggulangan Bencana Alam Kerusakan Irigasi Aek Sibatubatu Desa Pardomuan Nainggolan Kec. Pahae Jae	Pardomuan Nainggolan	567	Dinas PUTR
2.353	Penanggulangan Bencana Alam Kerusakan Tanggul Penahan Aek Saba Singkam Desa Pardomuan Nainggolan Kec. Pahae Jae	Pardomuan Nainggolan	77	Dinas PUTR
2.354	DI. Siomaoma (100 Ha)	Silantom Jae	109	Dinas PUTR
2.355	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Jalan di Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu	Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu	56	Dinas PUTR
2.356	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi Hasak II Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung	Irigasi Hasak II Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung	86	Dinas PUTR
2.357	Penanggulangan Bencana Alam Banjir/Rusaknya Irigasi Aek Raisan di Desa Sibulanbulan Kecamatan Purba Tua	Irigasi Aek Raisan di Desa Sibulanbulan Kecamatan Purba Tua	21	Dinas PUTR
2.358	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi di Dusun IV Desa Silaitlait Kecamatan Siborongborong	Saluran Irigasi di Dusun IV Desa Silaitlait Kecamatan Siborongborong	22	Dinas PUTR
2.359	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi Sidimpula di Desa Silali Toruan Kecamatan Muara	Saluran Irigasi Sidimpula di Desa Silali Toruan Kecamatan Muara	18	Dinas PUTR
2.360	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Irigasi Sitampurung Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong	Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong	435	Dinas PUTR
2.361	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung	Saluran Irigasi di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung	216	Dinas PUTR
2.362	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi Aek Sidoras di Dusun Siampaga Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong	Saluran Irigasi Aek Sidoras di Dusun Siampaga Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong	23	Dinas PUTR
2.363	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Dyk Irigasi di Parbabian Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita	Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita	46	Dinas PUTR
2.364	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi Desa Pangurdotan Kecamatan Pahae Julu	Saluran Irigasi Desa Pangurdotan Kecamatan Pahae Julu	81	Dinas PUTR
2.365	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Tanggul di Desa Hutauruk Kecamatan Tarutung	Tanggul di Desa Hutauruk Kecamatan Tarutung	130	Dinas PUTR
2.366	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi Aek Sirongit di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae	Saluran Irigasi Aek Sirongit di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae	48	Dinas PUTR
2.367	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi Aek Sidoras di Dusun III Lumban Sosor Desa Siaro Kecamatan Siborongborong	Sosor Desa Siaro Kecamatan Siborongborong	60	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.368	Pembangunan Jaringan Irigasi Persawahan Silomlom Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban (PEN)	Desa Simangumban Julu	171	Dinas PUTR
2.369	Rehabilitasi Irigasi Buarbuar Di Desa Silaitlait	Desa Silaitlait	156	Dinas PUTR
2.370	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parbubu Pea Kecamatan Tarutung	Desa Parbubu Pea	224	Dinas PUTR
2.371	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Silosung Kecamatan Simangumban	Desa Silosung	109	Dinas PUTR
2.372	Pembangunan Jaringan Irigasi Dusun Ii Aek Marombang Desa Aek Anabara Kecamatan Simangumban (PEN)	Desa Aek Nabara	185	Dinas PUTR
2.373	Pembangunan Jaringan Irigasi Saba Rura Desa Padang Siandomang Kecamatan Garoga	Desa Padang Siandomang	201	Dinas PUTR
2.374	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banjar Pea Di Dusun I Hutabagasan	Desa Sigurung-Gurung	90	Dinas PUTR
2.375	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aek Godung	Desa Pardamean Nainggolan	96	Dinas PUTR
2.376	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bondar Tonga-Tonga Desa Hutatoruan I (PEN)	Desa Hutatoruan I	290	Dinas PUTR
2.377	Pembangunan Jaringan Irigasi Dolok Saut Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban (PEN)	Desa Dolok Saut	187	Dinas PUTR
2.378	Rehabilitasi Jaringan Irigsi Sitenibabi	Desa Hutanagodang	235	Dinas PUTR
2.379	Pembangunan Jaringan Irigasi Lumban Holbung	Desa Situmeang Hasundutan	263	Dinas PUTR
2.380	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Simanungkalit	Desa Simanungkalit	156	Dinas PUTR
2.381	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitihal	Desa Pagar Batu	309	Dinas PUTR
2.382	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Sipahutar III	Desa Sipahutar III	163	Dinas PUTR
2.383	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siranggiting-Danoganjang	Desa Sipahutar III	268	Dinas PUTR
2.384	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Hutabagasan	Desa Hapoltahan	307	Dinas PUTR
2.385	Rehabilitasi Jaringan DI Simangonding	Desa Sitabotabo	246	Dinas PUTR
2.386	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Pagaran/Simaninggir	Desa Sitolu Ompu	251	Dinas PUTR
2.387	Peningkatan Jaringan Irigasi Jeges	Desa Lobu Siregar II	288	Dinas PUTR
2.388	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun II Lumban Pea	Desa Hutatoruan IV	440	Dinas PUTR
2.389	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibaganding	Desa Hutapea Banuarea	261	Dinas PUTR
2.390	Kelurahan Partali Toruan	Kelurahan Partali Toruan	295	Dinas PUTR
2.391	PBA Longsor Irigasi Bondar Lumbantoba Desa Hutanagodang Kecamatan Muara (PEN)	Desa Hutanagodang Kecamatan Muara	175	Dinas PUTR
2.392	PBA Longsor Jaringan Irigasi Aek Raja Desa Simatupang Kecamatan Muara (PEN)	Desa Simatupang Kecamatan Muara	175	Dinas PUTR
2.393	PBA Longsor Irigasi Saba Aek Sah Desa Simangumban Jae Kec. Simangumban (PEN)	Desa Simangumban Jae Kec. Simangumban	72	Dinas PUTR
2.394	PBA Longsor Irigasi Tahalak Godang Aek Sah Desa Simangumban Jae Kec. Simangumban (PEN)	Desa Simangumban Jae Kec. Simangumban	250	Dinas PUTR
2.395	Perbaikan Tali Air Tonga Tonga Dusun IV Desa Silait Lait Kecamatan Siborongborong (PEN)	Desa Silait Lait Kecamatan Siborongborong	90	Dinas PUTR
2.396	Perbaikan Irigasi Sihosari Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong (PEN)	Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong	55	Dinas PUTR
2.397	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi Aek Sirongit Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae	Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae	87	Dinas PUTR
2.398	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Irigasi Aek Ranggitgit Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu	Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu	120	Dinas PUTR
2.399	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Saluran Irigasi di Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan	Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan	160	Dinas PUTR
2.400	Penanggulangan Bencana Alam Longsor Irigasi Aek Mahansam Desa Sitolu Bahal Kecamatan Purbatua	Desa Sitolu Bahal Kecamatan Purbatua	177	Dinas PUTR
2.401	Penanggulangan Bencana Alam Ambruk Saluran Irigasi di Dusun Ragi Idup Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung	Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung	238	Dinas PUTR
2.402	SITUMEANG HABINSARAN	Lanjutan Pembangunan Irigasi Lumban Holbung Desa Situmeang Hasundutan Kec. Sipoholon (PEN)	120	Dinas PUTR
2.403	DESA SIMANUNGKALIT	Pembangunan Irigasi di Desa Simanungkalit	73	Dinas PUTR
2.404	DESA SIGURUNG-GURUNG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parhopian Kec. Pahae Jae	68	Dinas PUTR
2.405	DESA SIGURUNG-GURUNG	Pembangunan Irigasi Pea Desa Sigurung-gurung Kec. Pahae Jae (PAPBD)	87	Dinas PUTR
2.406	DESA SIOPAT BAHAL	Rehabilitasi Irigasi Tano Bato Siopat Bahal Kec. Pahae Jae	115	Dinas PUTR
2.407	DESA SIMAMORA	Rehabilitasi irigasi Hutatoruan VII - Huta Baginda Desa Simamora Kec. Tarutung (DID)	52	Dinas PUTR
2.408	Rehabilitasi Irigasi Sibirong-birong Desa Dolok Saribu	Rehabilitasi Irigasi Sibirong-birong Desa Dolok Saribu	97	Dinas PUTR
2.409	Rehabilitasi Jaringan TPT Sungai Sitonggi-tonggi Desa Suka Maju	Rehabilitasi Jaringan TPT Sungai Sitonggi-tonggi Desa Suka Maju	213	Dinas PUTR
2.410	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibota-bota Desa Simamora	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibota-bota Desa Simamora	115	Dinas PUTR
2.411	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Toru Balobung Desa Sitolu Ama	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Toru Balobung Desa Sitolu Ama	155	Dinas PUTR
2.412	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aek Sah Desa Silosung	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aek Sah Desa Silosung	101	Dinas PUTR
2.413	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitalolo Desa Simatupang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitalolo Desa Simatupang	216	Dinas PUTR
2.414	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Nomensen Desa Hutatoruan IV	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Nomensen Desa Hutatoruan IV	95	Dinas PUTR
2.415	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bondar Sisira Desa Sitompul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bondar Sisira Desa Sitompul	168	Dinas PUTR

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.416	Rehabilitasi Jaringan irigasi Aek Natumpol Desa Hutabarat	Rehabilitasi Jaringan irigasi Aek Natumpol Desa Hutabarat	124	Dinas PUTR
2.417	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silage-lage	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silage-lage	234	Dinas PUTR
2.418	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sosunggulon (Aek Halian Silaka-lakaon)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sosunggulon (Aek Halian Silaka-lakaon)	426	Dinas PUTR
2.419	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hauma Pinasa Desa Parbubu Dolok	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hauma Pinasa Desa Parbubu Dolok	116	Dinas PUTR
2.420	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sihujur	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sihujur	210	Dinas PUTR
2.421	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rimba Desa Siborongborong	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rimba Desa Siborongborong	168	Dinas PUTR
2.422	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumban Tonga-Tonga	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumban Tonga-Tonga	164	Dinas PUTR
2.423	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sihurahura Desa Hutanagodang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sihurahura Desa Hutanagodang	154	Dinas PUTR
2.424	Rehabilitasi Jaringan irigasi Sihapas-hapas Desa Hutatinggi	Rehabilitasi Jaringan irigasi Sihapas-hapas Desa Hutatinggi	154	Dinas PUTR
2.425	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitihal Desa Hutaginjang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitihal Desa Hutaginjang	106	Dinas PUTR
2.426	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Arung Desa Jambur Nauli, Kecamatan Tarutung	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Arung Desa Jambur Nauli, Kecamatan Tarutung	351	Dinas PUTR
2.427	Rehabilitasi Jaringan irigasi Saba Napa Desa Dolok Nauli	Rehabilitasi Jaringan irigasi Saba Napa Desa Dolok Nauli	175	Dinas PUTR
2.428	Tanah SD NEGERI 173366 PARMONANGAN	Parmonangan	540	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.429	Tanah SD NEGERI 173383 HUTA TINGGI	Hutatinggi	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.430	Tanah SMP NEGERI 1 TARUTUNG	JL.NAHUM SITUMORANG	47.068	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.431	Tanah SMP NEGERI 2 TARUTUNG	jl.pemuda no 1 tarutung	3.757	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.432	Tanah SMP NEGERI 1 SIATAS BARITA	JALAN LUMBAN SIAGIAN JULU	2.380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.433	Tanah SMP NEGERI 1 SIPOHOLON	Jln Pancasila Ujung No 7D	281	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.434	Tanah SMP NEGERI 5 SIPOHOLON	Naipospos Tonga HUtaraja Hasundutan Kecamatan Sipoholon	1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.435	Tanah SMP NEGERI 2 PAHAE JAE	Jln Sipirok Pangaloan Kecamatan Pahae Jae	9.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.436	Tanah SMP NEGERI 1 SIPAHUTAR	sipahutar	22.791	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.437	Tanah SMP NEGERI 4 SIPAHUTAR	Desa Aeknauli II Kecamatan Sipahutar	20.768	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.438	Tanah SMP NEGERI 4 PANGARIBUAN	Jalan Sipirok Desa Pansurnatolu Kecamatan Pangaribuan	20.025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.439	Tanah SMP NEGERI 6 PANGARIBUAN	Pangaribuan	8.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.440	Tanah SMP NEGERI 7 PANGARIBUAN	JL. GAROGA DESA NANJUMAMBE, KECAMATAN PANGARIBUAN	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.441	Tanah SMP NEGERI 2 GAROGA	PADANG SIANDOMANG, KECAMATAN GAROGA	18.077	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.442	Tanah SMP NEGERI 5 GAROGA	Parinsoran	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.443	Tanah SMP NEGERI 3 SIBORONGBORONG	Jln Sipahuatar Km 6 Siborongborong Desa Lobusiregar II Kecamatan siborongborong	20.064	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.444	Tanah SMP NEGERI 4 SIBORONGBORONG	jl. siswa no 12 siborongborong	4.204	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.445	Tanah SMP NEGERI 3 PAGARAN	Banualuhu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara	15.407	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.446	Tanah SMP NEGERI 1 PARMONANGAN	Desa Sisordak	16.920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.447	Tanah SMP NEGERI 5 PARMONANGAN	Manalu Purba, Kec. Parmonangan	4.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.448	Tanah SMP NEGERI 4 MUARA	Desa Sibandang Kecamatan Muara	4.360	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.449	Tanah SMP NEGERI 1 ADIANKOTING	Pansurbatu	6.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.450	Tanah SMP NEGERI 3 ADIANKOTING	Jl. Tarutung-Sibolga Km. 9 Sitarealaman	4.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.451	Tanah SMP NEGERI 7 SIBORONGBORONG	SIHATANDOHAN DESA POHAN JULU, KEC.SIBORONGBORONG KAB.TAPUT	4.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.452	Tanah SMP NEGERI 6 SIBORONGBORONG	Purbasinomba	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.453	Tanah SMP NEGERI 7 TARUTUNG	Desa Pagarsinondi	1.640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.454	Tanah SMP NEGERI 6 GAROGA	lontung jae 1 kec . garoga	10.017	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.455	Tanah SD NEGERI 173100 TARUTUNG	Jl. Pemuda Tangsi Tarutung	2.160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.456	Tanah SD NEGERI 173104 TARUTUNG	jl.Pemuda Tarutung	1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.457	Tanah SD NEGERI 177031 HUTABAGINDA	Huta sumur	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.458	Tanah SD NEGERI 173118 PEANAJAGAR	Peanajagar Kecamatan Tarutung	121.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.459	Tanah SD NEGERI 177028 PEANAHUSHUS	desa hutagalung	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.460	Tanah SD NEGERI 176493 PARBUBU PEA	Parbubu Pea	1.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.461	Tanah SD NEGERI 176326 PARBUBU JULU	Jl. Mr. Rupinus Lumbantobing	581	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.462	Tanah SD NEGERI 176329 HUTABARAT	JL AM. TAMBUNAN HUTABARAT KELURAHAN PARTALI TORUAN KECAMATAN TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA	1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.463	Tanah SD NEGERI 173123 HUTABARAT	Hutabarat Kecamatan Tarutung	216	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.464	Tanah SD NEGERI 178209 PEATOLONG	Peatolong	1.650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.465	Tanah SD NEGERI 173103 TARUTUNG	SD NEGERI 173103 TARUTUNG KECAMATAN TARUTUNG	720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.466	Tanah SD NEGERI 173110 HUTARAJA	Jl. Sibolga Km.3	608	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.467	Tanah SD NEGERI 177651 SITAKKA	Sitakka	248	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.468	Tanah SD NEGERI 173106 PARBUBU	Jln. Bagot Tjita Hutapea	450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.469	Tanah SD NEGERI 173108 BANUAREA	jl.bagot djita hutapea	1.376	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.470	Tanah SD NEGERI 173109 SIANDORANDOR	SIANDORANDOR	1.650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.471	Tanah SD NEGERI 173130 SIHUJUR	SIHUJUR	1.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.472	Tanah SD NEGERI 177030 PARRONGITAN	PARRONGITAN DESA JAMBURNAULI KECAMATAN TARUTUNG	2.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.473	Tanah SD NEGERI 173127 SIMANAMPANG	Jln Sosor Gareja Desa Simanampang	1.670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.474	Tanah SD NEGERI 173128 SIDAGAL	SIDAGAL	2.925	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.475	Tanah SD NEGERI 176328 GONTING PEGE	GONTING PEGE	1.568	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.476	Tanah SD NEGERI 177650 LUMBAN HOLBUNG	Lumban Holbung,Siatas Barita	2.654	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.477	Tanah SD NEGERI 173117 PANSURNAPITU	Pansurnapitu	4.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.478	Tanah SD NEGERI 173294 PAMANSURAN	Sitampurung	2.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.479	Tanah SD NEGERI 173298 SITABOTABO	Sitabotabo	7.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.480	Tanah SD NEGERI 173300 LUMBAN TONGA-TONGA	LUMBAN TONGATONGA	3.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.481	Tanah SD NEGERI 173301 LUMBAN TONGA-TONGA	SD Negeri 173301 Lumban Tongatonga	3.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.482	Tanah SD NEGERI 174530 SIAMBOLAS	Siambolas, Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong	2.040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.483	Tanah SD NEGERI 173286 POKKI	POKKI	15.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.484	Tanah SD NEGERI 177661 SITABOTABO TORUAN	Sitabotabo Toruan ,Kecamatan Siborongborong	8.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.485	Tanah SD NEGERI 173282 SIMAROMPUOMPU	Simarompuompu, Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.486	Tanah SD NEGERI 173287 HUTABULU	Desa Hutabulu	13.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.487	Tanah SD NEGERI 173289 NAGASARIBU	Nagasaribu	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.488	Tanah SD NEGERI 173310 HUTAGINJANG	Hutaginjang Kecamatan SIBORONGBORONG	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.489	Tanah SD NEGERI 176499 BUHIT NANGGE	Buhitnangge	5.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.490	Tanah SD NEGERI 177928 PURBASINOMBA	Purbasinomba	15.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.491	Tanah SD NEGERI 175773 LUMBAN HOLBUNG	Lumban Holbung	3.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.492	Tanah SD NEGERI 177662 LUMBAN INAINA	Desa Lumban Ina-Ina, Kecamatan Pagaran	7.350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.493	Tanah SD NEGERI 175774 SIBARAGAS	Sibaragas	7.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.494	Tanah SD NEGERI 174540 HORISAN	HORISAN	2.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.495	Tanah SD NEGERI 175742 LUMBAN RIHIT	LUMBAN RIHIT	1.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.496	Tanah SD NEGERI 173133 LUMBAN BARINGIN	Jln Balige Air Panas Sipoholon	1.980	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.497	Tanah SD NEGERI 173139 SANDARAN	Dusun Sandaran Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara	3.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.498	Tanah SD NEGERI 177920 PANSINARAN	DUSUN PANSINARAN	416	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.499	Tanah SD NEGERI 173134 LUMBAN BARINGIN	Desa Sibuntuon Kecamatan Sipoholon	450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.500	Tanah SD NEGERI 173137 LOBUSINGKAM	Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara	1.620	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.501	Tanah SD NEGERI 174571 SITAREALAMAN	Jln Sibolga Km 9,5 Sitarealaman	4.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.502	Tanah SD NEGERI 174569 PANSURBATU	Pansurbatu	2.774	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.503	Tanah SD NEGERI 173159 TORHONAS	DESA TORHONAS	3.180	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.504	Tanah SD NEGERI 173160 LOBUHAMINJON	Lobuhaminjon, Desa Siantar Naipospos, Kecamatan Adiankoting	2.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.505	Tanah SD NEGERI 173161 SIANTAR NAIPOSPOS	Siantar Naipospos Kecamatan Adian koting	1.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.506	Tanah SD NEGERI 177654 NAIPOSPOS TONGA	NAIPOSPOS TONGA	2.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.507	Tanah SD NEGERI 175753 ONAN HASANG	Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu	216	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.508	Tanah SD NEGERI 173235 SARULLA	LEHU DESA PARSAORAN	1.916	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.509	Tanah SD NEGERI 177037 AEK BULU	Siria-ria Desa Nahornop Marsada	1.644	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.510	Tanah SD NEGERI 176335 SILANGKITANG	SILANGKITANG	4.513	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.511	Tanah SD NEGERI 173246 PAGARAN	Desa Sitolu Ompu, Pagaran Kec. Pahae Jae	1.032	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.512	Tanah SD NEGERI 177656 SIMARPINGGAN	Simarpinggan Desa Sitolu Ama Kecamatan Pahae Jae	2.172	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.513	Tanah SD NEGERI 173242 SIMANGUMBAN	AEK NABARA, SIMANGUMABAN	1.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.514	Tanah SD NEGERI 176334 LOSUNG AEK	LOSUNG AEK, SIMANGUMBAN JULU	3.073	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.515	Tanah SD NEGERI 177924 SILOSUNG	DESA SILOSUNG KECAMATAN SIMANGUMBAN	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.516	Tanah SD NEGERI 173169 TAPIAN NAULI	TAPIANNAULI	4.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.517	Tanah SD NEGERI 173165 SIPAHUTAR	Sipahutar I	1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.518	Tanah SD NEGERI 173190 SIPAHUTAR	DESA SABUNGAN NI HUTA I SIPAHUTAR	6.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.519	Tanah SD NEGERI 173167 ONAN RUNGGU	Desa Onanrunggu III Kecamatan Sipahutar Tapanuli Utara	360	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.520	Tanah SD NEGERI 173176 LUMBAN LOBU	TAPIANNAULI I Kecamatan Sipahutar	1.260	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.521	Tanah SD NEGERI 175757 SILIMABAHAL	Sipahutar	1.650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.522	Tanah SD NEGERI 173183 ADIAN PADANG	Adian Padang Desa Sabungan ni Huta IV Kec Sipahutar	3.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.523	Tanah SD NEGERI 173184 ADIAN PADANG	Lobunauli	8.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.524	Tanah SD NEGERI 173173 AEK NAULI	Aeknauli II	6.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.525	Tanah SD NEGERI 173186 PANJAITAN	Panjaitan Kecamatan Sipahutar	2.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.526	Tanah SD NEGERI 173213 SIBUDIL	Sibudil, Desa batumanumpak, Kecamatan Pangaribuan	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.527	Tanah SD NEGERI 173196 LUMBAN SINAGA	DESA LUMBAN SINAGA SIMATUPANG KECAMATAN PANGARIBUAN	19.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.528	Tanah SD NEGERI 174585 LUMBAN SINAGA	LUMBAN SINAGA	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.529	Tanah SD NEGERI 173199 SILANTOM JULU	Desa Silantom Julu	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.530	Tanah SD NEGERI 173201 PADANG PARSADAAN	Padang Parsadaan Kecamatan Pangaribuan	8.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.531	Tanah SD NEGERI 176498 SIOMAOMA		10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.532	Tanah SD NEGERI 173203 PURBATUA	Desa Purbatua Kec.Pangaribuan	502	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.533	Tanah SD NEGERI 173208 SIGOTOM	Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.534	Tanah SD NEGERI 173210 SIGOTOM	Desa Sigotom Timur	8.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.535	Tanah SD NEGERI 177660 NATUMINGKA	SD NEGERI 177660 Natumingka	9.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	NAMA ASET	ALAMAT	LUAS (M^2)	OPD PENGGUNA BARANG
2.536	Tanah SD NEGERI 178212 SIBIO-BIO	SD NEGERI 178212 Kecamatan Garoga	1.650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.537	Tanah SD NEGERI 178497 SIBARGOT	SD NEGERI 178497 Sibargot	1.670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.538	Tanah SD NEGERI 174578 SIBAGANDING	SD NEGERI 174578 Sibaganding	1.560	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.539	Tanah SD NEGERI 174579 AEKTANGGA JAE	SD NEGERI 174579 Aek Tangga	1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.540	Tanah SD NEGERI 177927 HUTAGURGUR	SD NEGERI 1177927 Hutagurgur	1.430	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.541	Tanah SD NEGERI 175764 LUMBAN SIANTURI	Lumban Sianturi	6.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.542	Tanah SD NEGERI 173217 RAMBASIALA	Ramba Siala	4.560	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.543	Tanah SD NEGERI 173222 PARSOSORAN	SD NEGERI 173222 Parsosoran	3.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.544	Tanah SD NEGERI 173224 SIBALANGA	SD NEGERI 173224 Sibalanga	1.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.545	Tanah SD NEGERI 176342 PARHUDONAN	Parhudonan	1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.546	Tanah SD NEGERI 177044 PARMANUHAN	Parmanuhan	1.230	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.547	Tanah TK NEGERI PEMBINA GAROGA	TK pembina Garoga	650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.548	Tanah SD NEGERI 173380 HUTATUA	SD NEGERI 173380 Hutatua, Kecamatan Parmonangan	1.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.549	Tanah SD NEGERI 173391 SIHOPONG	Sihopong	1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.550	Tanah SD NEGERI 176500 PARRATUSAN	Paratusan	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.551	Tanah SD NEGERI 173385 GONTING	GONTING DESA LOBUSUNUT	1.650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.552	Tanah SD NEGERI 173376 HUTABATU		2.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.553	Tanah SD NEGERI 173377 BATUARIMO	DESA BATUARIMO	600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.554	Tanah SD NEGERI 173378 SIHAPORAS	SD NEGERI 173378 SIHAPORAS DESA MANALU PURBA KECAMATAN PARMONANGAN	4.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.555	Tanah SD NEGERI 173379 DANO JULU	DESA MANALU PURBA SD NEGERI 173379 DANOJULU KECAMATAN PARMONANGAN	2.570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.556	Tanah SMP NEGERI 3 MUARA	Kec. Muara	20.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.557	Tanah SD NEGERI 173351 PAPANDE	DESA PAPANDE	1.170	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.558	Tanah SD NEGERI 173361 SIBANDANG	SIBANDANG	1.550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.559	Tanah SD NEGERI 176357 SIBANDANG	Sibandang	420	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.560	Tanah SD NEGERI 173340 MUARA	BARIBANIAEK	1.605	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.561	Tanah SD NEGERI 173352 SOSOR LONTUNG	Desa Hutalontung	1.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.562	Tanah SD NEGERI 174539 SILINTA	SD NEGERI 174539 SILINTA	1.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.563	Tanah SD NEGERI 175795 LOBUTANGGA	Lobutangga, Desa Silalitoruan Kec. Muara	2.530	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.564	Tanah SD NEGERI 173344 BATUBINUMBUN	SD NEGERI 173344 BATUBINUMBUN	950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.565	Tanah SD NEGERI 177664 SITANGGOR	SD NEGERI 177664 Sitanggor	1.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.566	Tanah SD NEGERI 173348 TAPIAN NAULI	TAPIANNAULI DESA HUTAGINJANG KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA	1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.567	Tanah SD NEGERI 173241 JANJI ANGKOLA	Desa Janji Nauli, Kec. Purbatua, Taput-sumut	1.650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.568	Tanah SD NEGERI 173249 SIBULANBULAN	Desa Sibulanbulan	714	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Lampiran 19

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	111.686.689.151,08	22.995.320.025,00	770.726.650,00	133.911.282.526,08
2	DINAS KESEHATAN	75.363.552.899,90	4.214.211.899,00	344.244.053,00	79.233.520.745,90
3	RSU DAERAH TARUTUNG	88.609.473.577,00	6.700.226.751,00	203.726.299,00	95.105.974.029,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	18.945.965.230,00	55.042.000,00	10.649.000,00	18.990.358.230,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.569.529.597,00	2.551.787.547,00	309.468.981,00	4.811.848.163,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.459.139.999,00	86.818.590,00	223.599.947,00	11.322.358.642,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.337.177.372,00	53.472.500,00	18.560.800,00	4.372.089.072,00
8	DINAS SOSIAL	1.488.677.391,00	14.090.000,00	0,00	1.502.767.391,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	1.658.433.419,00	41.703.698,00	239.792.977,00	1.460.344.140,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.488.912.940,29	208.847.178,80	90.181.925,00	5.607.578.194,09
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.270.214.111,00	170.340.906,00	453.224.766,00	11.987.330.251,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.747.420.875,00	34.157.500,00	276.290.778,00	4.505.287.597,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.351.912.024,00	31.899.999,00	73.386.280,00	1.310.425.743,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.267.609.694,00	535.888.027,00	216.000.000,00	6.587.497.721,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	6.327.791.226,16	143.997.412,95	13.358.845,00	6.458.429.794,11
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.476.075.690,00	151.716.992,00	96.999.992,36	4.530.792.689,64
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.388.549.167,00	19.350.000,00	49.069.431,00	2.358.829.736,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.737.053.738,00	4.171.070,00	42.963.486,00	1.698.261.322,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	824.193.489,00	2.709.200,00	91.139.934,00	735.762.755,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	2.437.691.312,70	72.208.470,00	1.200.000,00	2.508.699.782,70
21	DINAS PARIWISATA	3.931.786.507,68	80.303.528,32	0,00	4.012.090.036,00
22	DINAS PERTANIAN	20.387.724.601,00	1.201.583.060,00	2.555.834.546,00	19.033.473.115,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	35.371.213.589,00	5.951.401.296,00	1.158.165.909,00	40.164.448.976,00
24	SEKRETARIAT DPRD	7.061.887.952,00	1.388.675.500,00	1.300.054.082,00	7.150.509.370,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.722.558.813,00	117.497.000,00	78.848.182,00	1.761.207.631,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.379.238.627,00	759.193.034,80	855.144.850,00	5.283.286.811,80
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.971.456.176,19	29.630.000,01	0,00	2.001.086.176,20
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.274.162.662,00	228.188.396,00	0,00	2.502.351.058,00
29	INSPEKTORAT	4.176.814.763,00	484.816.200,00	70.119.080,00	4.591.511.883,00
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	1.060.367.417,00	12.647.000,00	0,00	1.073.014.417,00
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	401.141.685,00	34.812.500,00	0,00	435.954.185,00
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	432.172.502,00	7.492.500,00	0,00	439.665.002,00
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	550.277.990,00	22.402.410,00	46.171.955,00	526.508.445,00
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	427.864.060,00	15.604.500,00	0,00	443.468.560,00
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	277.632.885,00	39.200.500,00	35.097.061,00	281.736.324,00
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	411.758.853,00	9.625.830,00	0,00	421.384.683,00
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	318.558.907,00	7.492.500,00	28.000.000,00	298.051.407,00
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	373.936.662,00	38.076.264,00	0,00	412.012.926,00
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	383.230.390,00	35.522.500,00	0,00	418.752.890,00
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	397.493.231,00	7.492.500,00	13.000.000,00	391.985.731,00
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	592.919.233,00	34.133.500,00	43.352.910,00	583.699.823,00
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	395.650.326,00	7.492.500,00	0,00	403.142.826,00
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	442.229.294,00	59.318.800,00	3.339.900,00	498.208.194,00
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	586.430.542,00	8.747.385,00	155.047.687,00	440.130.240,00
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	539.547.795,00	14.304.385,00	0,00	553.852.180,00
Total		**454.304.118.366,00**	**48.683.613.354,88**	**9.866.760.306,36**	**493.120.971.414,52**

Lampiran 20

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DIKUASAI PIHAK KETIGA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ASET	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	KET
1	Alat Komunikasi Lainnya	Apple Ipad Air (4 th Generation)	2022	BAIK	Belum dikembalikan An. I.S

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR PENERIMA HIBAH SMART TV
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 21

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
1	SDN 178215 SIMARGALUNG	SD	10258031	Simargalung desa huta tinggi II	Parmonangan	SUDAH
2	SD NEGERI 173260 SIGOMPULON	SD	10206318	SIGOMPULON	PAHAE JULU	SUDAH
3	SDN 173340 MUARA	SD	10206332	Baribaniaek	Muara	SUDAH
4	SDN 174566 HUTABARAT	SD	10206102	Hutabarat partali julu	Tarutung	SUDAH
5	SD Negeri 173141 Hutaraja	SD	10206224	Hutaraja	Sipoholon	SUDAH
6	SD NEGERI 173104 TARUTUNG	SD	10220552	Jalan Pemuda Tarutung , Hutatoruan X	Tarutung	SUDAH
7	SDN 175857 parsorminan	SD	10206055	Parsorminan1	Pangaribuan	SUDAH
8	SDN 173175 Simarpinggan	SD	10206251	Onanrunggu II	Sipahutar	SUDAH
9	SD Negeri 173135 Lumban Baringin	SD	10206291	Hutauruk	Sipoholon	SUDAH
10	SDN 173212 Lobugoti	SD	10206366	Lobugoti,Desa Sigotom Julu	Pangaribuan	SUDAH
11	SDN 173192 Harianja	SD	10206243	Harianja	Pangaribuan	SUDAH
12	SD Negeri 174567 Pansurnapitu	SD	10206101	Jln. Marhusa Panggabean-Pansurnapitu	Siatas Barita	SUDAH
13	SDN 173247 Aeksah	SD	10206388	Aeksah desa Simangunban Jae	Simangumban	SUDAH
14	SDN 173110 HUTARAJA	SD	10206268	Parbubu Dolok	Tarutung	SUDAH
15	SD Negeri 173105 Tarutung	SD	10206263	Jl. Oppu Lalo Lumbantobing	Tarutung	SUDAH
16	SD Negeri 173115 Sitompul	SD	10206296	Sitompul	Siatas Barita	SUDAH
17	SDN 173372 SIURNGAK	SD	10206079	HUTAJULU PARBALIK	Parmonangan	SUDAH
18	SD Negeri 173180 Lumbanrang	SD	10206256	Lumbanrang Onan Runggu IV	Kecamatan Dipahutar	SUDAH
19	SD NEGERI 173269 PAHAE JULU	SD	10206311	HUTABARAT	PAHAE JULU	SUDAH
20	SD N 177650 Lumban holbung	SD	10206172	Lumban Holbung desa lobuhole	siatas barita	SUDAH
21	SDN 173251 Hopong	SD	10206320	Desa Dolok sanggul	Simangumban	SUDAH
22	SD Negeri 173154 Banuaji	SD	10206211	Desa Banuaji I	Adiankoting	SUDAH
23	SD Negeri 176498 Siomaoma	SD	10206179	Padang Parsadaan	Pangaribuan	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
24	SD NEGERI 176341 LOBUGALA	SD	10206066	Pansurnatolu	Pangaribuan	SUDAH
25	SD NEGERI 173342 SIMATUPANG	SD	10206335	Desa Simatupang	Muara	SUDAH
26	SDN 174565 JAMBURNAULI	SD	10206103	Desa Jamburnauli	Tarutung	SUDAH
27	SD NEGERI 176348 HUTAJULU	SD	10206176	Hutajulu	Parmonangan	SUDAH
28	SD NEGERI 173194 BATUMANUMPAK	SD	10258461	Batumanumpak	Pangaribuan	SUDAH
29	Sd173186 panjaitan	SD	10206237	Desa Aeknauli 1 panjaitan	Sipahutar	SUDAH
30	SD Negeri 173114 Dolok Nagodang	SD	10206283	Dolok Nagodang Hutabarat	Tarutung	SUDAH
31	SD NEGERI 174583 SIGOTOM JULU	SD	10206033	Desa Sigotom Julu	Kecamatan Pangaribuan	SUDAH
32	SD NEGERI 173101 TARUTUNG	SD	10220551	JL.Nahum Situmorang , Sigompulon	TARUTUNG	SUDAH
33	SD173204 NAJUMAMBE	SD	10206373	Najumambe	Pangaribuan	SUDAH
34	SDN 174577 Sibaganding	SD	10206098	Lumban jaean	Pahae Julu	SUDAH
35	SD NEGERI 173214 PANGARIBUAN	SD	10206356	Lumban Gaol, Desa Pakpahan	Pangaribuan	SUDAH
36	SD NEGERI 174527 LUMBAN MOTUNG	SD	10206107	LUMBAN MOTUNG	PAGARAN	SUDAH
37	SD N 173201 Padang Parsadaan	SD	10257544	Padang Parsadaan	Pangaribuan	SUDAH
38	SD Negeri 173311 Siborongborong	SD	10220531	Jalan Sadar/Pohan Tonga	Siborongborong	SUDAH
39	SDN 173109 SIANDORANDOR	SD	10220553	Siandorandor	Tarutung	SUDAH
40	SD NEGERI 173256 LOBUPINING	SD	10206326	Lobupining	Pahae Julu	SUDAH
41	SD NEGERI 1754740	SD	10206037	Jl. Mr. Rupinus Lumbantobing	Tarutung	SUDAH
42	SD 173145 NaipisposTonga	SD	10206228	Naipospos Tonga Desa Hutaraja	Sipoholon	SUDAH
43	SD Negeri 173213 Sibudil	SD	10206365	Batumanumpak	Pangaribuan	SUDAH
44	SD NEGERI 173308 SIBARAGAS	SD	10206346	SIBARAGAS	PAGARAN	SUDAH
45	SD NEGERI 173197 RAHUTBOSI	SD	10206362	Rahutbosi Onan	Pangaribuan	SUDAH
46	SD Negeri 175761 Pulo Pakpahan	SD	10206029	Pakpahan	Pangaribuan	SUDAH
47	SDN 173388 DOLOKSARIBU	SD	10220364	DOLOKSARIBU	PAGARAN	SUDAH
48	SD Negeri 173137 Lobusingkam	SD	10257981	Lobusingkam	Sipoholon	SUDAH
49	SDN 173392 PARMONANGAN	SD	10206105	Desa Manalu	Parmonangan	SUDAH
50	SD NEGERI 173266 PANTIS	SD	10206309	PANTIS	Pahae Julu	SUDAH
51	SDN 178209 Peatolong	SD	10206188	Peatolong /Desa : Parbaju Toruan	Tarutung	SUDAH
52	SD N 173248 LOBU HARAMBIR	SD	10206389	Bonani Dolok	Purbatua	SUDAH
53	SD NEGERI 173128 SIDAGAL	SD	10206284	SIDAGAL	SIATAS BARITA	SUDAH
54	SDN 176340 BATUNADUA	SD	10206350	Batunadua	Pangaribuan	SUDAH
55	SD NEGERI 173285 Pariksabungan	SD	10220265	Pariksabungan	Siborong-borong	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
56	Sd negeri 173257 simataniari	SD	10220449	SIMATANIARI	Pahae julu	SUDAH
57	SD Negeri 177656 Simarpinggan	SD	10206200	Desa Sitoluompu, Simarpinggan	Pahae jae	SUDAH
58	SD NEGERI 175743 PANGALOAN	SD	10257984	SITUMEANG HASUNDUTAN	SIPOHOLON	SUDAH
59	SD NEGERI 173199 SILANTOM JULU	SD	10206369	Silantom Julu	Pangaribuan	SUDAH
60	SD N 173250 Muaratolang	SD	10206319	Dolok saut	Simangumban	SUDAH
61	SD NEGERI 173235 Sarulla	SD	10206401	Parsaoran Nainggolan	Pahae Jae	SUDAH
62	SDN 173167 ONANRUNGGU	SD	10220360	onanrunggu 3	sipahutar	SUDAH
63	SDN 175752 LUMBAN GAOL	SD	10206021	DESA LUMBAN GAOL	PAHAE JULU	SUDAH
64	SD NEGERI 177657 SIABAL ABAL	SD	10206201	Jl. Pangaribuan Desa Siabal abal II	Sipahutar	SUDAH
65	SD negeri 173147 Adiankoting	SD	102062030	Adiankoting	Adiankoting	SUDAH
66	SD Negeri 173206 sibingke	SD	10206474	Sibingke	Pangaribuan	SUDAH
67	SD Negeri 173295 Pamansuran	SD	10206315	Pamansuran Desa Lubis	Pagaran	SUDAH
68	SD Negeri 173292 Butar	SD	10206314	Lumban Julu	Pagaran	SUDAH
69	SD Negeri 173238 Pangaloan	SD	10206390	Desa Silangkitang	Pahae Jae	SUDAH
70	SDN 175773 Lumbanholbung	SD	10220536	Bahalbatu lll	Siborongborong	SUDAH
71	SDN 173125 Onan Gadugadu	SD	10207294	Pansurnapitu	Siatas Barita	SUDAH
72	SD NEGEERI 173168 ONANRUNGGU	SD	10206219	ONANRUNGGU II	SIPAHUTAR	SUDAH
73	SD NEGERI 174606 LOBUSINGKAM	SD	10257983	Lobusingkam	Sipoholon	SUDAH
74	SDN 173176 LUMBAN LOBU	SD	10206252	Lumban Lobu Desa Tapian Nauli I	Kec. Sipahutar	SUDAH
75	SDN 173377 BATUARIMO	SD	10206069	Dusun Lumban, Desa Batuarimo	Parmonangan	SUDAH
76	SD NEGERI 173108 BANUAREA	SD	10206266	Jln.Bagot Djita Banuarea Hutapea	Tarutung	SUDAH
77	SD Negeri 173300 Lumban Tongatonga	SD	10220477	Lumban Tongatonga	Siborongborong	SUDAH
78	SD Negeri 174571 Sitarealaman	SD	10258251	Sitarealaman,Banuaji II	Adiankoting	SUDAH
79	SD Negeri 173116 Pansurnapitu	SD	10206297	pansurnapitu	Siatas Barita	SUDAH
80	SD NEGERI 173146 SIPOHOLON	SD	10206229	JLN. PENDIDIKAN KELURAHAN	SIPOHOLON	SUDAH
81	SD Negeri 177031 Hutatoruan VII	SD	10206183	Jln.DR.TB.Simatupang,Hutabaginda	Tarutung	SUDAH
82	SDN 177653 SIBADAK	SD	10206186	SIBADAK	SIPOHOLON	SUDAH
83	SDN 175744 Hutaraja	SD	10206039	Hutaraja	Sipoholon	SUDAH
84	SD Negeri 173106	SD	10206264	Parbubu	Tarutung.	SUDAH
85	SD NEGERI 173273 SIBORONGBORONG	SD	10220454	Sitabotabo	Siborongborong	SUDAH
86	SD NEGERI 173131 TARUTUNG	SD	10206287	JL. OPPU LALO LUMBANTOBING,	TARUTUNG	SUDAH
87	SD NEGERI 173185 HUTAMAMUNGKA	SD	10206246	Hutamamungka	Sipahutar	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
88	SDN 177652 HAUSISADASADA	SD	10257982	HUTARAJA HASUNDUTAN	SIPOHOLON	SUDAH
89	SD NEGERI 173107 BANUAREA	SD	10206265	Jl. Bagot jita	Tarutung	SUDAH
90	SD NEGERI 177030 PARRONGITAN	SD	10206182	Jambur Nauli	Tarutung	SUDAH
91	SDN 173142 Tapian Nauli	SD	10206225	Tapian Nauli	Sipoholon	SUDAH
92	SDN 178314 SIBORONGBORONG	SD	10220544	Jln sentosa	Siborongborong	SUDAH
93	SDN 173133 LUMBAN BARINGIN	SD	10206289	Situmeang Habinsaran	Sipoholon	SUDAH
94	SD Negeri 173124 Gonting Siarangarang	SD	10206295	Jl. Siarangarang, Parbaju Tonga	Tarutung	SUDAH
95	SD Negeri 175742 Lumban Rihit	SD	10206038	Lumban Rihit, Hutauruk Hasundutan	Sipoholon	SUDAH
96	SD NEGERI 173143 SIMARPINGGAN	SD	10257987	Hutaraja Hasundutan	Sipoholon	SUDAH
97	SD NEGERI 173265 ONAN HASANG	SD	10206308	Onan Hasang	Pahae Julu	SUDAH
98	SD N 173252 PARDOMUAN	SD	10206322	DESA PARDOMUAN	KECAMATAN SIMANGUMBA	SUDAH
99	SD NEGERI 173263 SIMANAMPANG	SD	10206316	SIMANAMPANG	PAHAE JULU	SUDAH
100	Sd n 176334 losung aek	SD	10206049	Losung Aek	Simangumban	SUDAH
101	SD Negeri 173132 Lumban Baringin	SD	10206288	Hutauruk	Sipoholon	SUDAH
102	SD Negeri 174573 Hutaraja	SD	10206096	Hutaraja Simanungkalit	Sipoholon	SUDAH
103	SD 173102 Tarutung	SD	10206261	Hutatoruan 1	Tarutung	SUDAH
104	SD Negeri 176493 Parbubu Pea	SD	10220558	Parbubu Pea	Tarutung	SUDAH
105	SDN 177028 PEANAHUSHUS	SD	10206181	Desa Peanahushus	TARUTUNG	SUDAH
106	SD Negeri 173119 Peanajagar	SD	10206300	Sirajaoloan	Tarutung	SUDAH
107	SD NEGERI 173140 PAGAR BATU	SD	10206210	PAGARBATU	SIPOHOLON	SUDAH
108	SD NEGERI 173134 LUMBAN BARINGIN	SD	10206290	Simanungkalit	Sipoholon	SUDAH
109	SD Negeri 173144 Silangkitang	SD	10206227	Sipahutar	Sipoholon	SUDAH
110	SD Negeri 173155 Pansurbatu	SD	10220357	pansurbatu	Adiankoting	SUDAH
111	SD NEGERI 176332 RINABIDANG	SD	10206047	BANUAJI IV	ADIANKOTING	SUDAH
112	SDS FILADELFIA TARUTUNG	SD	10220561	Sutan Sumurung Saitnihuta	Tarutung	SUDAH
113	SD Negeri 175746 adiankoting	SD	10220368	Adiankoting	Adiankoting	SUDAH
114	SD Negeri 174570 Pagaran Pisang	SD	10206094	Desa Pagaran Pisang	Adiankoting	SUDAH
115	SD NEGERI 174569 PANSURBATU	SD	10206093	PANSURBATU I	ADIANKOTING	SUDAH
116	SDN 177654 Naipospos Tonga	SD	10220370	Pardomuan Nauli	Adiankoting	SUDAH
117	SD Negeri 175747 Banuaji	SD	10206040	Banuaji 2	Adiankoting	SUDAH
118	SDN173152 Sitorngom	SD	10206221	Sitorngom Pagaranlambung III	Adiankoting	SUDAH
119	SD Negeri 173127 Simanampang	SD	10206293	Simanampang	Siatas Barita	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
120	SD NEGERI 173100 TARUTUNG	SD	10206260	Hutatoruan X	Tarutung	SUDAH
121	SD Negeri 177920 Pansinaran	SD	10206205	Pansinaran/ Situmeang Habinsaran	Sipoholon	SUDAH
122	SD Negeri 173136 Lumban Baringin	SD	10206292	Pintubosi Desa Situmeang Hasundutan	Sipoholon	SUDAH
123	SD NEGERI 173118 PEANAJAGAR	SD	10206299	Sihobuk, desa Siwaluompu	Tarutung	SUDAH
124	SD Negeri 173121 Hutabarat	SD	10206302	Partali Toruan	Tarutung	SUDAH
125	SD NEGERI 177029 HUTANAMORA	SD	10220559	HUTANAMORA DESA LOBUHOLE	SIATAS BARITA	SUDAH
126	SDN 173122 Hutabarat	SD	10206303	Partali julu	Tarutung	SUDAH
127	SD Negeri 173120 Hutabarat	SD	10206301	Jl.Mayjend J Samosir, Desa Parbaju Tonga	Tarutung	SUDAH
128	SD NEGERI 173302 BAHALBATU	SD	10220474	BAHALBATU I	SIBORONGBORONG	SUDAH
129	SD NEGERI 173158 LOBUNAHOT	SD	10206214	PAGARANLAMBUNG IV	ADIANKOTING	SUDAH
130	SDN 173271 SIBORONGBORONG	SD	10220452	JL.SISWA 08 SIBORONGBORONG	SIBORONGBORONG	SUDAH
131	SD NEGERI 173153 SIBALANGA	SD	10206220	SIBALANGA	ADIANKOTING	SUDAH
132	SD Negeri No. 177651 Sitakka	SD	10205185	Sitakka	Tarutung	SUDAH
133	SDN 177925 LUMBAN HARIARA	SD	10206199	AEKNAULI II	SIPAHUTAR	SUDAH
134	SD Negeri 175755 Lumban Biru	SD	10206024	Aeknauli I	Sipahutar	SUDAH
135	SD NEGERI 173187 HADOMUAN	SD	10206238	Aeknauli III	Sipahutar	SUDAH
136	SD NEGERI 176338 SOSORGANJANG	SD	10206052	Aeknauli lll	SIPAHUTAR	SUDAH
137	SD N 175748 LOBUPINING	SD	10206041	LOBUPINING DESA DOLOK NAULI	ADIANKOTING	SUDAH
138	SD NEGERI 175762 PANSURBATU	SD	10206042	Rahutbosi	Pangaribuan	SUDAH
139	SD Ngeri 176496 Lumban Gukguk	SD	10206178	Siabal-abal VI	Sipahutar	SUDAH
140	SD Negeri 173183 Adian Padang	SD	10206247	Adian Padang Sabungan Nihuta IV	Sipahutar	SUDAH
141	Sdnegeri 173200 silantom tonga	SD	10206370	Silantom tonga	Pangaribuan	SUDAH
142	SDN 173139 SANDARAN	SD	10206184	Sandra and/Lobusingkam	Sipoholon	SUDAH
143	SD Negeri 173112 Hutagalung	SD	10206281	Desa Siraja Hutagalung	Siatas Barita	SUDAH
144	SD NEGERI 175795 LOBUTANGGA	SD	10206065	Silali Toruan	Muara	SUDAH
145	SD N 173161 SIANTAR NAIPOSPOS	SD	10257928	Desa Siantar naipospos	Adiankoting	SUDAH
146	SD NEGERI 174568 SIMORANGKIR	SD	10206092	SIMORANGKIR JULU	SIATAS BARITA	SUDAH
147	SD Negeri No. 173191 Lumban Sormin	SD	10206242	Lumban Sormin	Pangaribuan	SUDAH
148	SD NEGERI 173305 SIPULTAK	SD	10206329	SIPULTAK	PAGARAN	SUDAH
149	SD N 177924 Silosung	SD	10206208	Silosung	Simangumban	SUDAH
150	SD S HKBP SIPOHOLON	SD	10206278	Simanungkalit	Sipoholon	SUDAH
151	SDN 173352 Sosor lontung	SD	10206080	Desa Huta Lontung	Muara	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
152	SDN.173361 Sibandang	SD	10206081	Sibandang	Muara	SUDAH
153	SD NEGERI 173341	SD	10206334	Untemungkur	Muara	SUDAH
154	SD NEGERI 173173 AEKNAULI	SD	10206249	LUMBAN HOLBUNG, DESA AEKNAULI II	SIPAHUTAR	SUDAH
155	SD Negeri 173149 Parsingkaman	SD	10206232	Parsingkaman desa pagaran Lambung I	Adiankoting	SUDAH
156	SDN 173202 PASARBARU	SD	10206371	Pasarbaru Desa Purbatua	pangaribuan	SUDAH
157	SDN 173172 Hutagurgur	SD	10206236	Hutagurgur Desa Onanrunggu 1	Sipahutar	SUDAH
158	SDN 173349 HUTAGINJANG	SD	10206354	Desa hutaginjang	Muara	SUDAH
159	SD NEGERI 173306 SIPULTAK	SD	10206330	JL.RAYA SIPULTAK	PAGARAN	SUDAH
160	SDN 173190 Sipahutar	SD	10206241	Desa Sabungan nihita 1	Sipahutar	SUDAH
161	SD Negeri 173245 Siunggas Julu	SD	10206386	Sitolubahal	Purbatua	SUDAH
162	SD Negeri 176333 Janji Nauli	SD	10206048	Desa Janji Nauli	Purbatua	SUDAH
163	SDN No 175760 Batumanumpak	SD	10206028	Desa Batumanumpak	Pangaribuan	SUDAH
164	Sd Negeri 173299 paniaran	SD	10220472	Paniaran	siborong borong	SUDAH
165	Sd negeri 173249 Si bulan-bulan	SD	10206306	Si bulan-bulan	Purbatua	SUDAH
166	SDN 173347 BUNTU RAJA	SD	10206339	Sitanggor	Muara	SUDAH
167	SD NO177661 SitabotaboToruan	SD	10258383	Sitabotabo Toruan	Siborongborong	SUDAH
168	SDN 173182 Lobutolong	SD	10206248	Siabal Abal VI	Sipahutar	SUDAH
169	SD Negeri 173193 Parsibarungan	SD	10206244	Parsibarungan	Pangaribuan	SUDAH
170	SD S HKBP Siborongborong	SD	10220447	Kel.Pasar Siborongborong	Siborongborong	SUDAH
171	SDN 176336 Pangurdotan	SD	10206051	Desa Pangurdotan	Pahae Julu	SUDAH
172	SD NEGERI 177666 SIMAMORA	SD	10220372	LUMBAN SILINTONG	Pagaran	SUDAH
173	SD NEGERI 175763 PARINSORAN	SD	10206043	Parinsoran	Garoga	SUDAH
174	SD Negeri 173156 Lobupining	SD	10206212	Jl Tarutung Sibolga Km 18 Lobupining	Adiankoting	SUDAH
175	SD Negeri 173239 Pangaloan	SD	10206380	Siopat bahal	Pahae Jae	SUDAH
176	SD Negeri 173217 Rambasiala	SD	10206359	Lontung Jae I	GAROGA	SUDAH
177	SD Negeri 173234 Sarulla	SD	10220363	Nahornop Marsada	Pahae jae	SUDAH
178	SD Negeri 173304 Lumban Holbung	SD	10220476	Lumban Holbung, Bahalbatu III	Siborongborong	SUDAH
179	SD Negeri 173242 Simangumban	SD	10206383	Desa Aek Nabara	Simangumban	SUDAH
180	SD NEGERI 1773037 AEKBULU	SD	10206173	Nahornop Marsada	PAHAE JAE	SUDAH
181	SDN 174575 SARULLA	SD	10220367	Tordolok Nauli	Pahae jae	SUDAH
182	SDN 173163 ADIANKOTING	SD	10220359	Jl Tarutung-Sibolga desa Pagaran Pisang	Adiankoting	SUDAH
183	SD Negeri 173160 Lobuhaminjon	SD	10220358	Lobuhaminjon	Adiankoting	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
184	SD NEGERI 173294 PAMANSURAN	SD	10220469	SITAMPURUNG	SIBORONGBORONG	SUDAH
185	SDN 178213 Pearaja	SD	10220543	Lumban Pearaja, Lobusiregar II	Siborongborong	SUDAH
186	SD Negeri 173344 Batubinumbun	SD	10206336	Batubinumbun	Muara	SUDAH
187	SD NEGERI 177923 PARIKMATIA	SD	10206207	DESA SITOLU AMA, DUSUN PARIKMATIA	PAHAE JULU	SUDAH
188	SD Negeri 176344 Aek Mas	SD	10220538	Aek Mas Bahal Batu II	Siborongborong	SUDAH
189	SD NEGERI 175753 ONAN HASANG	SD	10206022	Onan Hasang, Desa Janji Natogu	Pahae Julu	SUDAH
190	SD Negeri 173345 ARITONANG	SD	10206337	ARITONANG	MAUARA	SUDAH
191	SD Negeri 177928 Purbasinomba	SD	10220542	Pohan Jae	Siborongborong	SUDAH
192	SD Negeri 173386 Onan Runggu	SD	10206089	Simamora Hasibuan	PAGARAN	SUDAH
193	SD Negeri 173223 Gonting Salak	SD	10206378	Gonting Salak	Garoga	SUDAH
194	SD NEGERI 173196 LUMBAN SINAGA	SD	10206355	Lumban Sinaga	Pangaribuan	SUDAH
195	SD Negeri 175758 Hutagurgur	SD	10206027	Onanrunggu I	Sipahutar	SUDAH
196	SDN 173246 PAGARAN	SD	10206387	DESA SITOLU OMPU	PAHAE JAE	SUDAH
197	SD Negeri 173339 Muara	SD	10206331	Hutanagodang	Muara	SUDAH
198	SD NEGERI 177040 LOBUTOLONG	SD	10206165	Lobutolong, Desa Siabal-abal I	Sipahutar	SUDAH
199	SD Negeri 174529 Sigumbang	SD	10220532	Sigumbang	Siborongborong	SUDAH
200	SD NEGERI 177035 LONTUNG DOLOK	SD	10206175	Lontung Dolok	Pahae Julu	SUDAH
201	SDN 173351 PAPANDE	SD	10206067	Papande	Muara	SUDAH
202	SDN 175768 Purbatoruan	SD	10206059	Hajoran, desa manalu purba	Parmonangan	SUDAH
203	SDN 173267 SITOLUAMA	SD	10220450	Desa Sitoluama	Pahae Julu	SUDAH
204	SD Negeri 173162 Parlobulobuan	SD	10206216	Parlobulobuan Desa pagaranlambung 4	Adiankoting	SUDAH
205	SD Negeri 173178 Bonan Dolok	SD	10206254	Siabal abal IV	Sipahutar	SUDAH
206	SD NEGERI 173159 TORHONAS	SD	10206215	TORHONAS, DESA PARDOMUAN NAULI	ADIAN KOTING	SUDAH
207	SD NEGERI 173117 PANSURNAPITU	SD	10206298	Pansurnapitu	Siatas Barita	SUDAH
208	SD Negeri 173237 Pangaloan	SD	10206391	Desa sigurung gurung	Pahae jae	SUDAH
209	SD NEGERI 177064 SILANDO	SD	10206171	DESA SILANDO	MUARA	SUDAH
210	SD PLUS SITAMPURUNG	SD	70060741	Sitampurung	Siborong borong	BELUM
211	SD Negeri 173280 Lobusiregar	SD	10220460	Lobu Siregar II	Siborongborong	SUDAH
212	SD NEGERI 173157 AEKGODANG	SD	10206213	DOLOK NAULI	ADIANKOTING	SUDAH
213	Sd negeri 173298 sitabotabo	SD	10220471	Desa sitabotabo	Siborongborong	SUDAH
214	SD Negeri 173113 Simorangkir	SD	10206282	jl Marhusa Panggabean Simorangkir	siatas barita	SUDAH
215	SDN 176357 SIBANDANG	SD	10206177	Sibandang	Muara	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
216	SDN 174625 Lobusihim	SD	10257959	Lobusihim	Simangumbam	SUDAH
217	SD NEGERI 173243 AEK BOTIK	SD	10206384	Desa Setia	Pahae Jae	SUDAH
218	SDN 173254 Pahae Jae	SD	10206324	Pardomuan Nainggolan	Pahae Jae	SUDAH
219	SD 173382 Hutatinggi	SD	10206074	Desa Sisordak	Parmonangan	SUDAH
220	SD NEGERI 173165 SIPAHUTAR	SD	10206217	Jl. Gereja Desa Sipahutar I	Sipahutar	SUDAH
221	SD Negeri 173171Simarhompa	SD	10220361	Desa Siabal abal III	Sipahutar	SUDAH
222	SD NEGERI 176335 SILANGKITANG	SD	10206050	Sigurung - gurung	Pahae jae	SUDAH
223	SD NEGERI 175767 HUTAJULU	SD	10206058	HUTAJULU	PARMONANGAN	SUDAH
224	SD Negeri 175750 Pardamean	SD	10206030	Jl. Tarutung Sipirok, Pardamean	Pahae Jae	SUDAH
225	SDN 176499 BUKIT NANGGE	SD	10220539	Buhitnangge,desa pohan jae	Siborongborong	SUDAH
226	SD Negeri 177041 Simarhompa	SD	10206166	Simarhompa	Sipahutar	SUDAH
227	SDN 173166 Sipahutar	SD	10206218	Sabungan nihuta 2	Sipahutar	SUDAH
228	Sd Negeri 173391 Sihopong	SD	10206104	Sihopong Desa Manalu Dolok	Parmonangan	SUDAH
229	SD Negeri 173380 Hutatua	SD	10206078	Hutatua	Parmonangan	SUDAH
230	SDN 174579 AEKTANGGA JAE	SD	10206100	Aektangga Desa Aektangga	Garoga	SUDAH
231	SD N 173184 ADIAN PADANG	SD	10220362	Lobu nauli	Sipahutar	SUDAH
232	SD Negeri 173259 Pearaja	SD	10206327	Pearaja	Pahae Julu	SUDAH
233	SD NEGERI 173385 GONTING	SD	10206076	Lobusunut	Parmonangan	SUDAH
234	SD Negeri 175765 Padang Siandomang	SD	10206057	Padang Siandomang	Garoga	SUDAH
235	SD N 173188 sosorsiamporik	SD	10206239	Desa siabal abal IV sosorsiamporik	Sipahutar	SUDAH
236	SD Negeri 173219 Batumamak	SD	10206361	Batumamak, Desa Lontung Jae I	Kecamatan Garoga	SUDAH
237	SDN 174539 SILINTA	SD	10206110	HUTANAGODANG	MUARA	SUDAH
238	SD NEGERI 177048 SITONGGITONGGI	SD	10206169	HORISAN RANGGITGIT	PARMONANGAN	SUDAH
239	SD NEGERI 173297 SIGUMBANG	SD	10220470	SIGUMBANG	SIBORONGBORONG	SUDAH
240	SDN 173222 PARSOSORAN	SD	10206377	PARSOSORAN	GAROGA	SUDAH
241	SD NEGERI 173233 GAROGA	SD	10206400	GAROGA SIBARGOT	GAROGA	SUDAH
242	Sdn 174540 horisan	SD	10206112	Horisan desa lumban silintong	Pagaran	SUDAH
243	SD N 176343 HARIARA SILABAN	SD	10220537	Desa Siborongborong II	Siborongborong	SUDAH
244	SD 173381	SD	10206073	Aekraja	Parmonangan	SUDAH
245	SD Negeri 17	SD	10206396	Simpang Bolon	Garoga	SUDAH
246	SD Negeri 173189 Parulian	SD	10206240	Sosorpahu Desa Sipahutar III	Sipahutar	SUDAH
247	SDN 173179 DOLOKNAGODANG	SD	10206255	SABUNGAN NIHUTA III	SIPAHUTAR	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
248	SD Negeri 173218 Pearaja	SD	10206360	Lontung Jae I	Garoga	SUDAH
249	SD NEGERI 173169 TAPIANNAULI	SD	10206233	Jln. Dr. Td. Pardede	SIPAHUTAR	SUDAH
250	SD NEGERI 173282 SIMAROMPUOMPU	SD	10220462	Lobusiregar II, Simarompuompu	Siborongborong	SUDAH
251	SD N 173379 DanoJulu	SD	10206071	Desa Manalu Purba	Parmonangan	SUDAH
252	SD S LUTHER LUMBAN SIAGIAN	SD	10220550	LUMBAN SIAGIAN JULU	SIATAS BARITA	SUDAH
253	SDN 175757 SILIMABAHAL	SD	10206026	Onan runggu III	Sipahutar	SUDAH
254	SD NEGERI 173346 DOLOKMARTUMBUR	SD	10206338	DOLOKMARTUMBUR	MUARA	SUDAH
255	SD NEGERI 174574 SIMANGUMBAN	SD	10206097	SIMANGUMBAN JAE	SIMANGUMBAN	SUDAH
256	SD NEGERI 173174 AEKNAULI	SD	10206250	Aeknauli IV	Sipahutar	SUDAH
257	SD NEGERI 176328 GONTINGPEGE	SD	10206054	Desa Simanampang	Siatas Barita	SUDAH
258	SDN 174582 Sitapongan	SD	10206032	Siabal abal 5	Sipahutar	SUDAH
259	SDN 175772 Lubis	SD	10206061	LUBIS	Pagaran	SUDAH
260	SDN 173366 PARMONANGAN	SD	10206084	Parmonangan, Desa Manalu	Parmonangan	SUDAH
261	SD NEGERI 174530 SIAMBOLAS	SD	10220533	Siambolas, Desa Paniaran	Siborongborong	SUDAH
262	SDN 173111	SD	10206267	Desa Huta Toruan VIII Aeknasia	Tarutung	SUDAH
263	SDN NO 173376 HUTABATU	SD	10206068	Desa Purba Dolok	Parmonangan	SUDAH
264	SD Negeri 173215 Garoga Jae	SD	10206357	Garoga Sibargot	Garoga	SUDAH
265	SD NEGERI 177659 HUTARAJA	SD	10220560	Desa Hutaraja	Pangaribuan	SUDAH
266	SDN 173103 Tarutung	SD	10206262	Lumban jurjur	Tarutung	SUDAH
267	SD Negeri 177660 Natumingka	SD	10206203	Garoga Sibargot	Garoga	SUDAH
268	SD Negeri 173268 Simasom	SD	10206310	Simasom	Pahae Julu	SUDAH
269	SD N 175759 SIREGAR	SD	10220556	Lumban Sormin	Pangaribuan	SUDAH
270	SD Negeri 173227 Aektangga	SD	10206395	Aektangga	Garoga	SUDAH
271	SD Negeri 173129 Pagarsinondi	SD	10206285	Sitampurung	Tarutung	SUDAH
272	SD NEGERI 173231 PADANG SIANDOMANG	SD	10206398	PADANG SIANDOMANG	GAROGA	SUDAH
273	SDN 176326 Parbubu Julu	SD	10220557	Parbubu I	Tarutung	SUDAH
274	SD NEGERI 173262 LUMBAN GARAGA	SD	10206317	LUMBAN GARAGA	Pahae Julu	SUDAH
275	SD Negeri 173274 Siborongborong	SD	10220455	Jln. Sanif Siborongborong	Siborongborong	SUDAH
276	SD Negeri 173198 Pansurnatolu	SD	10206368	Pansurnatolu	Pangaribuan	SUDAH
277	SD Negeri 176329 Hutabarat	SD	10206045	Hutabarat, partali toruan	Tarutung	SUDAH
278	SD Negeri 173130 Sihujur	SD	10206286	Sihujur	Tarutung	SUDAH
279	SD NEGERI 177038 ROBEAN	SD	10206164	DESA ROBEAN	PURBATUA	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
280	SD 174584 Parsorminan	SD	10206034	Desa Sampagul	Pangaribuan	SUDAH
281	SDN 173208 Sigotom	SD	10206376	Todung Borotan	Pangaribuan	SUDAH
282	SD NEGERI 174581 SIPAHUTAR	SD	10206114	SIPAHUTAR II	SIPAHUTAR	SUDAH
283	SD NEGERI 175774 SIBARAGAS	SD	10206062	Desa Sibaragas	Pagaran	SUDAH
284	SDN 174528 Sipultak	SD	10206108	Sipultak Dolok	Pagaran	SUDAH
285	SD Negeri 183283 Sianjur	SD	10220463	Pohan Julu	Siborongborong	SUDAH
286	Sd Negeri 176347 Dolomsaribu	SD	10220369	Doloksaribu	Pagaran	SUDAH
287	SD Negeri 175769 Hasibuan	SD	10206060	Desa Hasibuan	Pagaran	SUDAH
288	SD NEGERI 173281 LUMBANJULU	SD	10220461	Lobu Siregar I	Siborongborong	SUDAH
289	SDN 173253 LUMBAN GARAGA	SD	10206323	DESA DOLOK SANGGUL	SIMANGUMBAN	SUDAH
290	SD N. 175749 Aek Rau	SD	10206031	Aek Rau Kec. Simangumban Julu	Simangumban	SUDAH
291	SD 173102 Tarutung	SD	102061	Jln il nomensen	Tarutung	SUDAH
292	SD NEGERI 173181 LOBUTOLONG	SD	10206257	Lobutolong, Siabalabal 1	Sipahutar	SUDAH
293	SD NEGERI 173170 LUMBAN JULU	SD	10206235	LUMBAN JULU	SIPAHUTAR	SUDAH
294	SD NEGERI 177045 PEALANGGE	SD	10220540	PANIARAN	SIBORONGBORONG	SUDAH
295	SDN 175756 SIMARHOMPA	SD	10206025	Simarhompa, Siabal-abal III	Sipahutar	SUDAH
296	SD NEGERI 173368 TORNAULI	SD	10206086	MANALU DOLOK	PARMONANGAN	SUDAH
297	SDN 173210 SIGOTOM	SD	10206367	Sigotom Timur	Pangaribuan	SUDAH
298	SD N 173240 Janjiangkola	SD	10206381	Desa Selamat	Purbatua	SUDAH
299	SD NEGERI 173148 ADIANKOTING	SD	10206231	ADIANKOTING	ADIANKOTING	SUDAH
300	SD NEGERI 177662 LUMBAN INAINA	SD	10220371	LUMBAN INAINA	PAGARAN	SUDAH
301	SDN 175798 Aritonang	SD	10206056	Aritonang	Muara	BELUM
302	SD N 173365 Muara	SD	10206083	hUTANAGODANG	Muara	SUDAH
303	SD NEGERI 173277 POHAN TONGA	SD	10220459	POHAN TONGA	SIBORONGBORONG	SUDAH
304	SDN.177664 SITANGGOR	SD	10206204	Desa Sitanggor	Muara	SUDAH
305	SD Negeri 173123 Hutabarat	SD	10206304	Hapoltahan	Tarutung	SUDAH
306	SD NEGERI 173389 DOLOKSARIBU	SD	10220365	DESA DOLOKSARIBU	PAGARAN	SUDAH
307	SD NEGERI NO173224 SIBALANGA	SD	10206379	SIBALANGA	GAROGA	SUDAH
308	SDN 177033 Hutanabolon	SD	69962502	Desa: Pagaran Lambung II	Adiankoting	SUDAH
309	SD NEGERI 176331 Lumban Soit	SD	10206046	Lumban Soit	Sipoholon	SUDAH
310	SD Negeri 177655 Simasom	SD	10206187	Simasom	Pahae Julu	SUDAH
311	SDN.173270 SIBORONGBORONG	SD	1022045	Jl.Tigu no 34/38 Pasar	Siborongborong	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
312	SD Negeri 173276 Hutasoit Pardomuan	SD	10220458	Siborongborong I	Siborongborong	SUDAH
313	SDN 173203 PURBATUA	SD	10206372	Purbatua	Pangaribuan	SUDAH
314	SD NEGERI 173221 HADATARAN	SD	10206364	Hadataran Desa Lontung II	Garoga	SUDAH
315	SD Negeri 177047 Silangit	SD	10220541	Desa Pariksabungan	Siborongborong	SUDAH
316	SD Negeri 173220 Sirumambe	SD	10206363	Sirumambe	Garoga	SUDAH
317	SDN 173348 TAPIANNAULI	SD	10206340	TAPIANNAULI, DESA HUTAGINJANG	MUARA	SUDAH
318	SD NEGERI 173207 PARLOMBUAN	SD	10206375	Parlombuan	Pangaribuan	SUDAH
319	SD NEGERI 173229 PARINSORAN	SD	10206397	Parinsoran	Garoga	SUDAH
320	SDN 173264 Sibaganding	SD	10206307	Sibaganding	Pahae Julu	SUDAH
321	SD negeri 173378 Sihaporas	SD	10206070	Manalu purba	Parmongangan	SUDAH
322	SDN 178492 PAGARBATU	SD	10206193	PAGARBATU	SIPOHOLON	SUDAH
323	SD Negeri 173241 Janji Angkola	SD	10206382	Janji Nauli	Purba Tua	SUDAH
324	SD NEGERI 173244 SIUNGGAS JAE	SD	10206385	HUTANAGODANG	PURBATUA	BELUM
325	SD NEGERI 173303 GONTING	SD	10220475	BAHALBATU II	SIBORONGBORONG	SUDAH
326	SD Negeri 173275 Hariara	SD	10220457	Hariara, Siborongborong II	Siborongborong	SUDAH
327	SD N 175751 PUrbatua	SD	10206020	Selamat	Purbatua	SUDAH
328	SDN 173307 SIPULTAK	SD	10206344	Jalan Raya Sipultak	Pagaran	SUDAH
329	SD N 173286 POKKI	SD	10220466	Pokki, Desa Pohan Julu	Siborongborong	SUDAH
330	Sd Plus Sitampurung	SD	69843352	Sitampurung	Siborong-borong	BELUM
331	SD NEGERI 177044 PARMANUHAN	SD	10206167	Desa Parmanuhan	Garoga	SUDAH
332	SD NEGERI 173290 BUTAR	SD	10206312	Desa Banualuhu	Pagaran	SUDAH
333	SD N.173255 Simardangiang	SD	10206325	Simardangisng	Pahae Julu	SUDAH
334	SDN 173139 SANDARAN	SD	10206305	LOBUSINGKAM	SIPOHOLON	SUDAH
335	SD NEGERI 176500 PARRATUSAN	SD	10206180	Parratusan, Desa Manalu Dolok	Parmonangan	SUDAH
336	SD Negeri 175770 Sitampurung	SD	10220534	Desa Sitampurung	Siborongborong	SUDAH
337	SD Negeri 173289 Nagasaribu	SD	10220468	Pohan Jae	Siborongborong	SUDAH
338	SD Negeri 173301 Lumban Tongatonga	SD	10220473	Lumban Tongatonga	Siborongborong	SUDAH
339	SD NEGERI 178210 PARDOMUAN	SD	10206189	PARDOMUAN, DESA PARSAORAN	PURBATUA	SUDAH
340	SD Hutagurgur	SD	10260233	Desa Aektangga	Garoga	SUDAH
341	SD negeri 177049 parik	SD	10206170	Dusun parik desa Manalu purba	Parmonangan	SUDAH
342	SD Negeri 173209 Sigotom	SD	10220554	Desa Parratusan	Kecamatan Pangaribuan	SUDAH
343	SD NEGERI 173162 PARLOBULOBUAN	SD	10206216	DESA PAGARAN LAMBUNG IV	ADIANKOTING	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
344	SD Negeri 177655 Simasom	SD	10206187	Simasom	Pahae Julu	SUDAH
345	SD Negeri 177655 Simasom	SD	10206187	Simasom	Pahae Julu	SUDAH
346	SDN 173177 Parlombuan	SD	10206253	Tapian Nauli III	Sipahutar	SUDAH
347	SD negeri 173150 Pagaranlambung	SD	10206223	Desa Pagaranlambung I	Adiankoting	SUDAH
348	SDN173390 Bonandolok	SD	10206091	Bonandolok Desa Hutatinggi	Parmonangan	SUDAH
349	SMP Negeri 2 Simangumban	SMP	10221608	Dolok Saut	Simangumban	SUDAH
350	SMP NEGERI 1 SIMANGUMBAN	SMP	10206140	DESA SIMANGUMBAN JULU, KECAMATAN	SIMANGUMBAN	SUDAH
351	SMP N 3 MUARA	SMP	10206152	HUTAGINJANG	MUARA	SUDAH
352	SMP Negeri 7 Pangaribuan	SMP	10261784	Najumambe	Pangaribuan	SUDAH
353	SMP Negeri 6 Pangaribuan	SMP	10220286	Parsorminan I	Pangaribuan	SUDAH
354	SMP NEGERI 5 SIPOHOLON	SMP	10259609	HUTARAJA HASUNDUTAN	SIPOHOLON	SUDAH
355	SMP Negeri 2 Sipoholon	SMP	10220270	Hutaraja	Sipoholon	SUDAH
356	SMP NEGERI 1 TARUTUNG	SMP	10206154	Jln. Nahum Situmorang - Hutatoruan V	Tarutung	SUDAH
357	SMP NEGERI 1 SIPOHOLON	SMP	10220263	Jl. Pancasila Ujung No. 7d, Desa Hutauruk	Sipoholon	SUDAH
358	SMP NEGERI 2 GAROGA	SMP	10220264	Desa Padangsiandomang	Garoga	SUDAH
359	SMP NEGERI 3 MUARA SIATAS BARITA	SMP	60725393	HUTANAMORA, Desa Lobuhole, Kec.	Siatas Barita	SUDAH
360	SMP Negeri 3 Sipoholon	SMP	10220275	Jalan Pagarbatu	Pagarbatu	SUDAH
361	SMP NEGERI 7 TARUTUNG	SMP	69919005	SITAMPURUNG	TARUTUNG	SUDAH
362	SMP NEGERI 5 TARUTUNG	SMP	10206149	HUTAPEA- BANUAREA	TARUTUNG	SUDAH
363	SMP NEGERI 1 SIATAS BARITA	SMP	10220262	Jl. Pahae Lumban Siagian	Siatas Barita	SUDAH
364	SMP NEGERI 3 ADIANKOTING	SMP	10220271	DESA BANUAJI II	ADIANKOTING	SUDAH
365	SMP NEGERI 4 SIPOHOLON	SMP	10220280	Lobusingkam	Sipoholon	SUDAH
366	SMP NEGERI 4 SIPAHUTAR	SMP	10220279	AEKNAULI II	SIPAHUTAR	SUDAH
367	SMP NEGERI 4 PAHAE JULU	SMP	10259667	Pearaja Desa Simasom Toruan	Pahae Julu	SUDAH
368	SMPN 5 Pangaribuan	SMP	10220282	Desa Silantom Tonga	Pangaribuan	SUDAH
369	SMP Negeri 1 Pahae Julu	SMP	10206124	Desa Lumban Garaga	Pahae Julu	SUDAH
370	SMP Negeri 5 Sipahutar	SMP	10220284	Sitapongan Desa Siabalabal V	Sipahutar	SUDAH
371	SMP SANTA LUSIA SIBORONGBORONG	SMP	10259883	Pasar Siborongborog	Siborongborong	SUDAH
372	SMP Negeri 1 Pahae Jae	SMP	10206122	Desa Nahornop Marsada	Pahae Jae	SUDAH
373	SMP N 1 PARMONANGAN	SMP	10206138	Sisordak	Parmonangan	SUDAH
374	SMP Negeri 1 Garoga	SMP	10220260	Garoga sibargot	Garoga	SUDAH
375	SMP NEGERI 3 TARUTUNG	SMP	10206144	JL. JOHANNES	Tarutung	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
376	SMP NEGERI 4 TARUTUNG	SMP	10206148	Jln Pemuda Ujung Tangsi Tarutung	Tarutung	SUDAH
377	SMP Negeri 3 Parmonangan	SMP	10206141	Hutajulu	Parmonangan	SUDAH
378	SMP NEGERI 2 TARUTUNG	SMP	10206161	JL. Pemuda Tangsi Tarutung, Hutatoruan X	TARUTUNG	SUDAH
379	SMP NEGERI 1 MUARA	SMP	10206121	Silalitoruan	Muara	SUDAH
380	SMP Negeri 2 Siborongborong	SMP	10206159	Pasar Siborongborong	Siborongborong	SUDAH
381	SMP NEGERI 2 MUARA	SMP	10206156	Aritonang	Muara	SUDAH
382	SMP N 2 Adiankoting	SMP	10206155	Adiankoting	Adiankoting	SUDAH
383	SMP NEGERI 2 PAHAE JAE	SMP	10259703	JL.SIPIROK DESA PARDOMUAN	PAHAE JAE	SUDAH
384	SMP NEGERI 1 SIBORONGBORONG	SMP	10206139	Jl Pacuan No.2 Kelurahan Pasar	Siborongborong	SUDAH
385	SMP Negeri 5 Siborongborong	SMP	10259868	Bahalbatu 2	Siborongborong	SUDAH
386	SMP NEGERI 3 PURBATUA	SMP	10220274	Desa Sibulanbulan	Purbatua	SUDAH
387	SMP Negeri 2 Pahae Julu	SMP	10220265	Pangurdotan	Pahae Julu	SUDAH
388	SMP NEGERI 2 SIPAHUTAR	SMP	10206160	Onanrunggu III	Sipahutar	SUDAH
389	SMP NEGERI 7 SIBORONGBORONG	SMP	10262163	Sihatandohan Desa Pohan Julu	Siborongborong	SUDAH
390	SMP Negeri 4 Siborongborong	SMP	10206147	Jln. Siswa Kelurahan Pasar	Siborongborong	SUDAH
391	SMP NEGERI 4 MUARA	SMP	10206145	DESA SIBANDANG	MUARA	SUDAH
392	SMP NEGERI 6 SIBORONGBORONG	SMP	10262366	Pohan Jae	Siborongborong	SUDAH
393	SMP NEGERI 3 GAROGA	SMP	10220272	Gontinghopo Desa Gonting Garoga	Garoga	SUDAH
394	SMP Negeri 4 Parmonangan	SMP	10220278	Sihaporas Desa Manalu zourba	Parmonangan	SUDAH
395	SMPN NEGERI 5 Adiankoting	SMP	10220281	Jl Tarutung Sibolga Km 36 Parsingkaman	Adiankoting	SUDAH
396	SMP Negeri 2 Parmonangan	SMP	10220266	Manalu	Parmonangan	SUDAH
397	SMP NEGERI 1 ADIANKOTING	SMP	10220259	PANSURBATU	ADIANKOTING	SUDAH
398	SMP NEGERI 3 PAHAE JULU	SMP	10220273	SIBAGANDING	PAHAE JULU	SUDAH
399	SMP Negeri 4 Adiankoting	SMP	10220276	Siantar Naipospos	Adiankoting	SUDAH
400	SMP NEGERI 2 SIATAS BARITA	SMP	10220269	Simanampang	Siatas Barita	SUDAH
401	SMP Negeri 6 Garoga	SMP	69970309	Desa lontung Jae I	Garoga	SUDAH
402	SMP Negeri 6 Tarutung	SMP	10206162	Parbaju Julu	Tarutung	SUDAH
403	SMP NEGERI 5 GAROGA	SMP	10259662	PARINSORAN	GAROGA	SUDAH
404	SMP Santa Maria Tarutung	SMP	10220256	Jl.D.I Panjaitan	Tarutung	SUDAH
405	SMP NEGERI 2 PURBATUA	SMP	10220267	Hutanagodang	Purbatua	SUDAH
406	smp negeri 4 pagaran	SMP	10220277	simamora hasibuan	pagaran	SUDAH
407	SMP NEGERI 6 SIPAHUTAR	SMP	70039523	Desa Tapian Nauli II	Sipahutar	SUDAH

NO	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Alamat/Desa	Kecamatan	Sudah Memiliki PID
408	SMP N 1 Purbatua	SMP	10257884	Desa Janji nauli	Purbatua	SUDAH
409	SMP NEGERI 3 PANGARIBUAN	SMP	10206150	Sigotom Julu	Pangaribuan	SUDAH
410	SMP Negeri 4 Pangaribuan	SMP	10206146	Pansurnatolu	Pangaribuan	SUDAH
411	SMP Santa Maria Parmonangan	SMP	10220255	Aekraja	Parmonangan	SUDAH
412	SMP NEGERI 4 GAROGA	SMP	10259569	Sibalanga	Garoga	SUDAH
413	SMP NEGERI 3 SIBORONGBORONG	SMP	10206142	Jl.Sipahutar KM.6	Siborongborong	SUDAH
414	SMP NEGERI 1 PANGARIBUAN	SMP	10206125	Pakpahan	Pangaribuan	SUDAH
415	SMP NEGERI 1 SIPAHUTAR	SMP	10206153	Desa Sipahutar 1	Sipahutar	SUDAH

Lampiran 22

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	432.986.332.147,58	8.708.292.685,74	0,24	441.694.624.833,08
2	DINAS KESEHATAN	113.422.116.660,00	996.879.597,00	333.899.878,09	114.085.096.378,91
3	RSU DAERAH TARUTUNG	42.611.387.407,00	797.547.317,00	6.607.695,00	43.402.327.029,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.165.114.690,00	0,00	0,00	3.165.114.690,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.513.695.081,00	401.104.729,36	0,00	26.914.799.810,36
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.445.448.294,58	-0,08	0,00	2.445.448.294,50
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	744.576.050,00	0,00	0,00	744.576.050,00
8	DINAS SOSIAL	878.210.548,00	0,00	0,00	878.210.548,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	2.686.136.409,00	216.923.139,89	1.000,89	2.903.058.548,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.389.851.445,00	671.071.280,00	0,00	9.060.922.725,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.455.754.916,24	399.851.140,10	291.100.000,00	1.564.506.056,34
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	646.387.500,00	0,00	0,00	646.387.500,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAY	4.136.100.290,00	0,00	0,00	4.136.100.290,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	4.156.518.906,56	14.850.949,94	0,00	4.171.369.856,50
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.668.012.000,00	138.000.000,00	0,00	1.806.012.000,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDA	33.286.685.755,00	3.808.904.263,00	0,00	37.095.590.018,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.408.158.360,00	0,00	0,00	4.408.158.360,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.649.005.962,00	0,00	0,00	7.649.005.962,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	1.810.791.379,31	24.999.999,99	0,00	1.835.791.379,30
21	DINAS PARIWISATA	32.819.801.418,55	2.050.853.152,23	258.180.693,28	34.612.473.877,50
22	DINAS PERTANIAN	10.800.995.273,00	205.375.000,00	0,00	11.006.370.273,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	39.875.014.407,00	3.311.573.893,00	0,00	43.186.588.300,00
24	SEKRETARIAT DPRD	8.424.254.500,00	0,00	0,00	8.424.254.500,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA	2.835.806.540,00	106.080.000,00	0,00	2.941.886.540,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.245.841.220,73	406.918.306,97	0,00	10.652.759.527,70
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.770.720.000,00	0,00	0,00	1.770.720.000,00
29	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
31	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	2.193.021.606,00	122.138.000,00	0,00	2.315.159.606,00
32	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	1.186.866.827,00	15.000.000,00	0,00	1.201.866.827,00
33	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	905.200.000,00	0,00	0,00	905.200.000,00
34	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	527.766.000,00	0,00	0,00	527.766.000,00
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	1.021.750.000,00	15.000.000,00	0,00	1.036.750.000,00
36	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	1.306.151.832,00	94.500.000,00	0,00	1.400.651.832,00
37	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	613.217.350,00	15.000.000,00	0,00	628.217.350,00
38	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	671.560.000,00	15.000.000,00	0,00	686.560.000,00
39	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	869.634.358,00	0,00	0,00	869.634.358,00
40	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	1.106.015.000,00	0,00	0,00	1.106.015.000,00
41	KANTOR KECAMATAN GAROGA	985.379.134,00	15.000.000,00	0,00	1.000.379.134,00
42	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	2.884.167.711,00	60.800.000,00	0,00	2.944.967.711,00
43	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	932.042.600,00	0,00	0,00	932.042.600,00
44	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	769.002.200,00	0,00	0,00	769.002.200,00
45	KANTOR KECAMATAN MUARA	1.087.830.474,00	0,00	0,00	1.087.830.474,00
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL KIB C		**816.892.322.252,55**	**22.611.663.454,14**	**889.789.267,50**	**838.614.196.439,19**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR PENERIMA REVITALISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 23

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
1	SD Negeri 177035 Lontung Dolok	SD	TAHAP I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	ruang	844.728.395,00
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	ruang	
				Rehabilitasi ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	ruang	
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	paket	
2	SD Negeri 173383 Hutatinggi	SD	TAHAP I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	ruang	1.479.239.619,00
				Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya	1	paket	
				Pembangunan Ruang UKS	1	ruang	
				Pembangunan Ruang Perpustakaan	1	ruang	
				Rehabilitasi ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	ruang	
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	paket	
3	SD Negeri 173131 Tarutung	SD	TAHAP I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	ruang	580.990.000,00
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	ruang	
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	paket	
4	SD Negeri 173120 Tarutung	SD	TAHAP I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2		734.508.625,00
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	ruang	
				Pembangunan Toilet	1	paket	
5	SD Negeri 173146 Sipoholon	SD	TAHAP I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	ruang	457.633.380,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	ruang	
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	paket	

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
6	SD Negeri 173178 Bonan Dolok	SD	TAHAP I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat minimal sedang	6	ruang	1.402.727.152,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	paket	
				Pembangunan Ruang UKS	1	ruang	
				Pembangunan Ruang Perpustakaan	1	ruang	
				Rehabilitasi Ruang Administrasi dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang	1	ruang	
				Rehabilitasi Toilet dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya	1	paket	
7	SD Negeri 173384 Lobusunut	SD	TAHAP I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	ruang	1.076.650.803,00
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	ruang	
				Rehabilitasi ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	ruang	
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	paket	
8	SD Negeri 173132 Lumban Baringin	SD	TAHAP I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	ruang	731.647.572,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	ruang	
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	ruang	
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	paket	
9	SD Negeri 177666 Simamora	SD	TAHAP I	Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	paket	464.794.257,00
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	ruang	
				Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang	1	ruang	
10	SD Negeri173382 Hutatinggi	SD	TAHAP I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	ruang	981.520.270,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	paket	
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	ruang	
				Rehabilitasi ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	ruang	
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	ruang	
11	SD NEGERI 174569 PANSURBATU	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	778.917.312,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
12	SD NEGERI 177040 LOBUTOLONG	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	831.233.375,00
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
13	SD NEGERI 173157 AEKGODANG	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	732.510.852,00
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
14	SD NEGERI 173269 PAHAE JULU	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	558.976.962,00
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Rehabilitasi ruang adminitrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
15	SD NEGERI 173256 LOBUPINING	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	1.051.155.537,00
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Rehabilitasi ruang adminitrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
16	SD NEGERI 173305 SIPULTAK	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	829.532.609,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
17	SD NEGERI 173347 BUNTU RAJA	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	748.462.262,00
				Rehabilitasi ruang adminitrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
18	SD NEGERI 173309 PARHORBOAN	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	890.465.432,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Rehabilitasi ruang adminitrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
19	SD NEGERI 173238 PANGALOAN	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	870.091.938,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
20	SD NEGERI 173277 POHAN TONGA	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	7	Ruang	849.445.989,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
21	SD NEGERI 173294 PAMANSURAN	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	381.048.322,00
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
22	SD NEGERI 176344 AEKMAS	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	849.081.563,00
				Rehabilitasi ruang adminitrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
23	SD NEGERI 174530 SIAMBOLAS	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	146.883.608,00
24	SD NEGERI 173298 SITABOTABO	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	671.423.779,00
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
25	SD NEGERI 173254 PAHAE JAE	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	7	Ruang	943.765.762,00
26	SD NEGERI 174575 SARULLA	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	902.656.023,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Rehabilitasi ruang adminitrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
27	SD NEGERI 173234 SARULLA	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	586.649.439,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
28	SD NEGERI 173300 LUMBAN TONGATONGA	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	672.945.725,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
29	SD NEGERI 173161 SIANTAR NAIPOSPOS	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	954.614.530,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
30	SD NEGERI 175770 SITAMPURUNG	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	569.655.366,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
31	SD NEGERI 173266 PANTIS	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	879.994.529,00
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
32	SD NEGERI 173276 HUTASOIT PARDOMUAN	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	496.792.268,00
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
33	SD NEGERI 173388 DOLOKSARIBU	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	824.385.046,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
34	SD NEGERI 173212 LOBUGOTI	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	799.388.117,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
35	SD NEGERI 173193 PARSIBARUNGAN	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	828.610.928,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	2	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
36	SD NEGERI 177928 PURBASINOMBA	SD	Tahap 3 Gelombang 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	905.411.067,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	4	Paket	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
37	SD NEGERI 173287 HUTABULU	SD	Tahap 3 Gelombang 2	Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	58.659.224,00

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
38	SD NEGERI 173149 PARSINGKAMAN	SD	Tahap 3 Gelombang 2	Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	136.191.432,00
39	SD NEGERI 173144 SILANGKITANG	SD	Tahap 3 Gelombang 2	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	624.912.221,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	2	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
40	SD NEGERI 173369 RANGGITGIT	SD	Tahap 3 Gelombang 2	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	5	Ruang	856.717.282,00
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang perpustakaan	1	Ruang	
41	SD NEGERI 173380 HUTATUA	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	5	Ruang	717.692.334,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
42	SD NEGERI 173386 ONAN RUNGGU	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	680.481.481,00
				Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan Ruang Perpustakaan	1	Ruang	
43	SD NEGERI 174581 SIPAHUTAR	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	792.255.538,00
				rehabilitasi ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	1	Ruang	
44	SD NEGERI 177038 ROBEAN	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	753.186.462,00
45	SD NEGERI 177041 SIMARHOMPA	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	767.873.753,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	1	Ruang	
				Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	
46	SD NEGERI 177049 PARIK	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	1	Ruang	450.186.000,00
				Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	
47	SD NEGERI 176348 HUTAJULU	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	783.809.936,00
48	SD NEGERI 177655 SIMASOM	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	5	Ruang	789.933.227,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan UKS	1	Ruang	

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
49	SD NEGERI 178212 SIBIOBIO	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	5	Ruang	760.388.071,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan UKS	1	Ruang	
50	SD NEGERI 178492 PAGARBATU	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	5	Ruang	765.438.726,00
				Pembangunan UKS	1	Ruang	
51	SD NEGERI 177931 TUMUS	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	520.983.395,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
52	SD NEGERI 177657 SIABAL ABAL	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	2	Paket	269.976.570,00
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
53	SD NEGERI 177923 PARIKMATIA	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	760.130.448,00
54	SD NEGERI 173159 TORHONAS	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	701.010.342,00
55	SD NEGERI 173166 SIPAHUTAR	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	7	Ruang	827.034.055,00
				Pembangunan UKS	1	Ruang	
56	SD NEGERI 173191 LUMBAN SORMIN	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	803.777.250,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	2	Paket	
				Pembangunan UKS	1	Ruang	
57	SD NEGERI 173182 LOBUTOLONG	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Paket	225.533.331,00
				Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	
58	SD NEGERI 173175 SIMARPINGGAN	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Pembangunan Toilet Beserta saanitasinya	1	Paket	257.179.738,00
				Pembangunan UKS	1	Ruang	
59	SD NEGERI 173181 LOBUTOLONG	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	543.938.869,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	2	Paket	
				Pembangunan UKS	1	Ruang	
60	SD NEGERI 173268 SIMASOM	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	7	Ruang	666.706.760,00
61	SD NEGERI 173262 LUMBANGARAGA	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	478.935.591,00
				Rehabilitasi Ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Ruang	
				Pembangunan UKS	1	Ruang	

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
62	SD NEGERI 173260 SIGOMPULON	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	470.793.509,00
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang Perpustakaan	1	Ruang	
63	SD NEGERI 173215 GAROGA JAE	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	5	Ruang	710.205.162,00
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
64	SD NEGERI 173244 SIUNGGAS JAE	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	728.462.937,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat keerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang Perpustakaan	1	Ruang	
65	SD NEGERI 173245 SIUNGGAS JULU	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	704.233.886,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat keerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Ruang	
				Rehabilitasi ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang Perpustakaan	1	Ruang	
66	SD NEGERI 173229 PARINSORAN	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	5	Ruang	696.533.649,00
				Pembangunan toilet besrta sanitasinya	1	Ruang	
67	SD NEGERI 173233 GAROGA	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	646.687.743,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat keerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Rehabilitasi ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Rehabilitasi rumas dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
68	SD NEGERI 173389 DOLOK SARIBU	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	4	Ruang	790.446.289,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat keerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang Perpustakaan	1	Ruang	

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
69	SD NEGERI 173281 LUMBAN JULU	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	755.180.174,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat keerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	2	Paket	
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang Perpustakaan	1	Ruang	
70	SD NEGERI 173284 SIHATANDOHAN	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	694.626.108,00
				Rehabilitasi Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Rehabilitasi Ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Ruang	
				Pembangunan UKS	1	Ruang	
71	SD NEGERI 173285 PARIKSABUNGAN	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	642.267.479,00
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan ruang Perpustakaan	1	Ruang	
72	SD NEGERI 173289 NAGASARIBU	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	169.890.059,00
				Pembangunan ruang UKS	1	Ruang	
73	SD NEGERI 173311 SIBORONGBORONG	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	585.738.437,00
				Rehabilitasi Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
				Rehabilitasi Ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	2	Ruang	
				Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	
74	SD NEGERI 175773 LUMBAN HOLBUNG	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	705.434.482,00
				Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Paket	
				Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	
				Pembangunan Ruang Pepustakaan	1	Ruang	
75	SD NEGERI 173109 SIANDORANDOR	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	3	Ruang	775.888.968,00
				Rehabilitasi Ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	
				Pembangunan Ruang Pepustakaan	1	Ruang	
76	SD NEGERI 173209 SIGOTOM	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	293.946.970,00
				Rehabilitasi Ruang Administrasi	1	Ruang	
77	SD NEGERI 173267 SITOLUAMA	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	6	Ruang	770.532.974,00

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
78	SD NEGERI 173223 GONTING SALAK	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	667.439.720,00
				Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1	Paket	
				Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	
				Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang	2	Ruang	
79	SD NEGERI 176334 LOSUNG AEK	SD	TAHAP 3 _GEL 3	Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	450.557.584,00
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Rehabilitasi Ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Ruang	
				Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Paket	
80	SMP NEGERI 1 TARUTUNG	SMP	TAHAP I	12 - Pembangunan toilet beserta sanitasinya	3	Paket	2.509.941.951,00
				04 - Rehabilitasi ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	
				01 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	16	Ruang	
				03 - Rehabilitasi ruang laboratorium dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	
				06 - Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	
81	SMP NEGERI 1 SIPOHOLON	SMP	TAHAP I	15 - Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1	Ruang	882.141.214,00
				01 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	5	Ruang	
				07 - Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	2	Paket	
82	SMP NEGERI 4 PAGARAN	SMP	TAHAP I	01 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	3	Ruang	999.684.652,95
				03 - Rehabilitasi ruang laboratorium dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	
				06 - Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	
				07 - Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
83	SMP NEGERI 1 PAHAE JULU	SMP	TAHAP IV	Rehabilitasi Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	2	Paket	246.973.742,00
				Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	1	Ruang	
84	SMP NEGERI 2 PAHAE JULU	SMP	TAHAP IV	Rehabilitasi ruang administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	493.250.497,00
				Pembangunan Runag UKS beserta perabotnya	1	Ruang	

No	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	TAHAP_GELOMBANG	REVITALISASI	VOLUME	SATUAN	DANA
85	SMP NEGERI 2 PAHAE JAE	SMP	TAHAP IV	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	5	Ruang	1.129.921.509,00
				Rehabilitasi ruang Kesenian dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	
				Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	
86	SMP NEGERI 2 TARUTUNG	SMP	TAHAP V	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	2	Ruang	525.562.511,00
				Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
87	SMP NEGERI 4 PANGARIBUAN	SMP	TAHAP V	Rehabilitasi Rumah Dinas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	299.439.500,00
				Pembangunan Toilet	1	Ruang	
88	SMP NEGERI 4 ADIANKOTING	SMP	TAHAP V	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	2	Ruang	790.000.000,00
				Rehabilitasi Ruang Administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	
				Rehabilitasi Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
89	SMP NEGERI 5 PANGARIBUAN	SMP	TAHAP V	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	2	Ruang	435.000.000,00
				Rehabilitasi Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	
90	SMP NEGERI 7 SIBORONGBORONG	SMP	TAHAP VI	Pembangunan RKB dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	2	Ruang	689.094.316,00
				Rehabilitasi Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Toilet	
91	SMP NEGERI 2 PANGARIBUAN	SMP	TAHAP VI	Pembangunan Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	723.256.809,00
				Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	4	Paket	
				Rehabilitasi Toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	2	Paket	
	Total…						**64.284.603.280,95**

Lampiran 24

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR MUTASI ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.291.542.744,64	1.023.295.604,00	0,00	4.314.838.348,64
2	DINAS KESEHATAN	965.567.744,00	106.692.850,00	0,00	1.072.260.594,00
3	RSU DAERAH TARUTUNG	3.630.912.411,00	39.387.300,00	0,00	3.670.299.711,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.584.472.552.946,50	18.909.839.676,29	2.814.792.076,21	1.600.567.600.546,58
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	189.421.708.735,68	25.749.165.138,18	0,00	215.170.873.873,86
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	32.277.269.858,99	0,00	32.277.269.858,99	0,00
8	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	51.303.669,00	105.851.500,00	99.860.000,00	57.295.169,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.226.242.960,00	99.800.000,00	0,00	5.326.042.960,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA B	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5.817.258.848,00	0,00	0,00	5.817.258.848,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.787.616,00	0,00	0,00	38.787.616,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PER	3.867.385.528,00	114.681.934,00	0,00	3.982.067.462,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TER	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DINAS PARIWISATA	11.715.840.842,54	74.681.541,77	0,00	11.790.522.384,31
22	DINAS PERTANIAN	545.432.754,00	27.824.151,00	0,00	573.256.905,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	876.014.830,00	68.475.000,00	0,00	944.489.830,00
24	SEKRETARIAT DPRD	98.000.000,00	5.000.000,00	0,00	103.000.000,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	32.960.500,00	0,00	32.960.500,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	147.750.000,00	25.789.880,00	0,00	173.539.880,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	INSPEKTORAT	36.280.300,00	0,00	0,00	36.280.300,00
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	15.423.521.321,78	680.066.080,92	0,00	16.103.587.402,70

NO	OPD	SALDO AWAL 2025 Rp	PENAMBAHAN Rp	PENGURANGAN Rp	SALDO AKHIR 2025 Rp
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	1.927.025.930,02	107.149.999,98	0,00	2.034.175.930,00
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	2.730.124.399,96	128.899.999,94	0,00	2.859.024.399,90
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	1.608.681.997,00	28.700.000,00	0,00	1.637.381.997,00
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	0,00	0,00	0,00	0,00
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	2.007.331.400,00	75.250.000,00	0,00	2.082.581.400,00
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		**1.866.176.536.837,11**	**47.426.511.156,08**	**35.191.921.935,20**	**1.878.411.126.057,99**

Lampiran 25

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR MUTASI ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28.202.003.438,00	98.036.455.460,01	53.187.000,00	126.185.271.898,01
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSU DAERAH TARUTUNG	18.906.000,00	15.930.000,00	0,00	34.836.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	148.445.000,00	0,00	0,00	148.445.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	211.051.641,00	0,00	211.051.641,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.470.000,00	2.330.000,00	0,00	10.800.000,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.180.791.521,00	0,00	1.180.791.521,00	0,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	535.683.308,00	1.336.768.073,00	0,00	1.872.451.381,00
21	DINAS PARIWISATA	194.248.763,00	0,00	0,00	194.248.763,00
22	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	630.046.165,00	79.920.800,00	35.366.450,00	674.600.515,00
24	SEKRETARIAT DPRD	17.470.001,00	0,00	0,00	17.470.001,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	102.339.000,00	0,00	0,00	102.339.000,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	25.590.000,00	2.886.000,00	0,00	28.476.000,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	0,00	0,00	0,00	0,00
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	0,00	0,00	0,00	0,00
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	0,00	0,00	0,00	0,00
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	0,00	0,00	0,00	0,00
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	OPD	SALDO AWAL 2025 Rp	PENAMBAHAN Rp	PENGURANGAN Rp	SALDO AKHIR 2025 Rp
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		**31.075.123.196,00**	**99.685.341.974,01**	**1.269.344.971,00**	**129.491.120.199,01**

Lampiran 26

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	RUSAK BERAT	PERSEDIAAN RUSAK	HILANG	TIDAK DITEMUKAN FISIK	Aset Lain-Lain Kurang Volume Pekerjaan	Aset Lain-Lain	JUMLAH ASET LAINNYA
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12.441.465.530,09	0,00	0,00	55.354.440,00	0,00	0,00	12.496.819.970,09
2	DINAS KESEHATAN	31.415.774.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.415.774.531,00
3	RSU DAERAH TARUTUNG	6.169.557.286,00	26.915.569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196.472.855,96
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.100.250.872,00	0,00	0,00	0,00	120.978.524,13	0,00	3.221.229.396,13
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	573.211.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.211.955,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	955.336.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.336.844,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	464.808.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.808.490,00
8	DINAS SOSIAL	169.177.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.177.369,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	613.183.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.183.337,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	314.634.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.634.115,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.165.980.300,00	0,00	0,00	100.836.472,00	0,00	0,00	2.266.816.772,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	354.580.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.580.351,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	301.200.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200.969,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	750.257.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.257.382,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.758.461.530,50	0,00	0,00	24.700.000,00	0,00	2.650.571.300,00	4.433.732.830,50
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	137.810.270,00	0,00	0,00	101.020.285,00	0,00	0,00	238.830.555,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	1.087.084.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.084.899,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	221.244.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.244.945,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	186.351.907,00	0,00	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	194.801.907,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	137.760.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.760.617,00
21	DINAS PARIWISATA	1.237.853.536,00	0,00	0,00	87.774.245,00	0,00	0,00	1.325.627.781,00
22	DINAS PERTANIAN	4.518.054.162,00	0,00	0,00	17.970.000,00	0,00	0,00	4.536.024.162,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	6.065.974.186,00	0,00	0,00	356.825.400,00	0,00	0,00	6.422.799.586,00
24	SEKRETARIAT DPRD	1.253.076.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.076.212,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	810.129.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.129.310,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.538.228.355,00	0,00	0,00	53.703.884,00	0,00	0,00	2.591.932.239,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	19.175.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.175.554,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	176.687.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.687.909,00
29	INSPEKTORAT	284.002.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.002.785,00
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	219.043.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.043.199,00
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	127.989.296,00	0,00	0,00	8.325.000,00	0,00	0,00	136.314.296,00
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	127.622.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.622.582,00
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	46.171.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.171.955,00
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	110.306.415,00	0,00	0,00	9.350.000,00	0,00	0,00	119.656.415,00
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	583.395.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.395.361,00
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	113.221.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.221.357,00
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	148.217.470,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	160.217.470,00
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	83.151.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.151.661,00
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	189.148.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.148.615,00
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	115.583.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.583.533,00
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	119.094.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.094.063,00
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	237.131.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.131.839,00
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	156.991.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.991.037,00
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	194.588.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.588.532,00
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924.000,00
	JUMLAH.....	**82.804.896.423,59**	**26.915.569,96**	**8.450.000,00**	**827.859.726,00**	**120.978.524,13**	**2.650.571.300,00**	**86.439.671.543,68**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI DAFTAR AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 27

NO	NAMA BARANG	PEROLEHAN			NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT TAHUN 2025	AMORTISASI			
		Tgl	Bln	Tahun			Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024	Beban penyusutan tahun 2025	Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025	NILAI BUKU 2025
1	Software Windows	20	9	2.013	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
2	Software Database	20	9	2.013	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00
3	Software Aplikasi Sisten Online Payment	14	3	2.016	121.120.772,00	0,00	121.120.772,00	0,00	121.120.772,00	0,00
4	Software Aplikasi SIP PBB	14	3	2.016	198.197.628,00	0,00	198.197.628,00	0,00	198.197.628,00	0,00
BKAD					**363.818.400,00**	**0,00**	**363.818.400,00**	**0,00**	**363.818.400,00**	**0,00**
1	PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	13	11	2.015	49.280.000,00	0,00	49.280.000,00	0,00	49.280.000,00	0,00
2	WEBSITE	4	11	2.015	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
DINAS PERIZINAN					**89.280.000,00**	**0,00**	**89.280.000,00**	**0,00**	**89.280.000,00**	**0,00**
1	SOFTWARE APLIKASI SIMFARS	24	5	2.014	40.123.230,00	0,00	40.123.230,00	0,00	40.123.230,00	0,00
2	SOFTWARE APLIKASI SIRS	26	11	2.015	386.554.244,00	0,00	386.554.244,00	0,00	386.554.244,00	0,00
3	Aplikasi Medicine	18	5	2.017	33.784.615,00	0,00	33.784.615,00	0,00	33.784.615,00	0,00
4	Aplikasi Teleradiologi	18	5	2.017	13.363.636,00	0,00	13.363.636,00	0,00	13.363.636,00	0,00
5	SIMRS	18	11	2.020	500.000.000,00	34,00	416.666.666,67	83.333.333,33	500.000.000,00	0,00
6	Windows Server 2019 Standard 16 Core OLP NL	18	11	2.020	27.603.070,00	10,00	23.002.558,33	4.600.511,67	27.603.070,00	-0,00
7	Software dan API Modul Bridging Ke Sistem BPJS dan Antrian Farmasi Rawat Jalan dan Kiosk	2	8	2.021	220.220.000,00	19,00	150.483.666,67	44.043.999,63	194.527.665,98	25.692.334,02
RSUD TARUTUNG					**1.221.648.795,00**	**63,00**	**1.063.978.616,67**	**131.977.844,63**	**1.195.956.460,98**	
1	Software Proxid Database Mail	15	12	2.007	8.357.340,00	0,00	8.357.340,00	0,00	8.357.340,00	0,00
2	Aplikasi SMS Gateway	17	12	2.015	25.582.077,00	0,00	25.582.077,00	0,00	25.582.077,00	0,00
3	Aplikasi SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	22	11	2.021	80.465.000,00	22,00	50.961.166,67	16.093.000,00	67.054.166,67	29.503.833,33
PERHUBUNGAN					**114.404.417,00**	**22,00**	**84.900.583,67**	**16.093.000,00**	**100.993.583,67**	**29.503.833,33**
1	Program Aplikasi Rumah Ibadah	7	12	2.016	13.135.602,00	0,00	13.135.602,00	0,00	13.135.602,00	0,00
SEKRETARIAT DAERAH					**13.135.602,00**	**0,00**	**13.135.602,00**	**0,00**	**13.135.602,00**	**0,00**
1	Sistem Informasi Adm Kependudukan	30	10	2.008	79.450.000,00	0,00	79.450.000,00	0,00	79.450.000,00	0,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					**79.450.000,00**	**0,00**	**79.450.000,00**	**0,00**	**79.450.000,00**	**0,00**
1	Website	23	5	2.017	39.950.000,00	0,00	39.950.000,00	0,00	39.950.000,00	0,00
DINAS PMD					**39.950.000,00**	**0,00**	**39.950.000,00**	**0,00**	**39.950.000,00**	**0,00**
1	Website Compane Profile	12	6	2.017	49.918.000,00	0,00	49.918.000,00	0,00	49.918.000,00	0,00

NO	NAMA BARANG	PEROLEHAN			NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT TAHUN 2025	AMORTISASI			
		Tgl	Bln	Tahun			Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024	Beban penyusutan tahun 2025	Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025	NILAI BUKU 2025
DINAS PERTANIAN					**49.918.000,00**	**0,00**	**49.918.000,00**	**0,00**	**49.918.000,00**	**0,00**
1	Pembangunan/ Pembuatan WEB SITE BKD	17	2	2.017	49.918.000,00	0,00	49.918.000,00	0,00	49.918.000,00	0,00
2	Aplikasi SIMPEG PNS	13	4	2.017	24.915.000,00	0,00	24.915.000,00	0,00	24.915.000,00	0,00
BKPSDM					**74.833.000,00**	**0,00**	**74.833.000,00**	**0,00**	**74.833.000,00**	**0,00**
1	SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR	2	9	2.019	28.920.000,00	0,00	28.920.000,00	0,00	28.920.000,00	0,00
2	SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR	24	10	2.019	28.920.000,00	0,00	28.920.000,00	0,00	28.920.000,00	0,00
3	SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR	2	10	2.019	28.920.000,00	0,00	28.920.000,00	0,00	28.920.000,00	0,00
DINAS PENDIDIKAN					**86.760.000,00**	**0,00**	**86.760.000,00**	**0,00**	**86.760.000,00**	**0,00**
1	SOFWARE APLIKASI E-BOOK PERPUSTAKAAN DIGITAL	13	12	2.022	49.937.490,00	35,00	20.807.287,50	9.987.498,00	30.794.785,50	29.130.202,50
2	Software E-Book Perpustakaan Digital / E-Pustaha	22	11	2.023	64.676.900,00	46,00	15.091.276,67	12.260.173,99	27.351.450,66	49.585.623,33
3	SOFTWARE E-BOOK PERPUSTAKAAN DIGITAL / E-PUSTAHA	10	12	2.024	41.199.010,86	59,00	686.650,18	686.650,18	1.373.300,36	40.512.360,68
DINAS PERPUSTAKAAN					**155.813.400,86**	**140,00**	**36.585.214,35**	**22.934.322,17**	**59.519.536,52**	**119.228.186,51**
TOTAL AMORTISASI					**2.289.011.614,86**	**225,00**	**1.982.609.416,68**	**171.005.166,80**	**2.153.614.583,16**	**148.732.019,85**

Lampiran 28

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	ASET RUSAK BERAT/HILANG DAN TIDAK DITEMUKAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN-ASET RUSAK BERAT	NILAI BUKU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12.496.819.970,09	(12.496.819.970,09)	0,00
2	DINAS KESEHATAN	31.415.774.531,00	(31.283.841.647,90)	131.932.883,10
3	RSU DAERAH TARUTUNG	6.196.472.855,96	(6.169.557.286,00)	26.915.569,96
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.100.250.872,00	(2.627.869.807,55)	472.381.064,45
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	573.211.955,00	(573.211.955,00)	0,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	955.336.844,00	(955.336.844,00)	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	464.808.490,00	(464.808.490,00)	0,00
8	DINAS SOSIAL	169.177.369,00	(169.177.369,00)	0,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	613.183.337,00	(613.183.337,00)	0,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	314.634.115,00	(314.634.115,00)	0,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.266.816.772,00	(2.036.773.295,43)	230.043.476,57
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	354.580.351,00	(354.580.351,00)	0,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	301.200.969,00	(301.200.969,00)	0,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	750.257.382,00	(750.257.382,00)	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.783.161.530,50	(1.781.286.717,06)	1.874.813,44
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	238.830.555,00	(238.830.555,00)	0,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.087.084.899,00	(1.087.084.899,00)	0,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	221.244.945,00	(221.244.945,00)	0,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	194.801.907,00	(191.201.244,33)	3.600.662,67
20	DINAS PERPUSTAKAAN	137.760.617,00	(137.760.617,00)	0,00
21	DINAS PARIWISATA	1.325.627.781,00	(1.325.627.781,00)	0,00
22	DINAS PERTANIAN	4.536.024.162,00	(4.536.024.162,00)	0,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	6.422.799.586,00	(6.422.799.586,00)	0,00
24	SEKRETARIAT DPRD	1.253.076.212,00	(1.253.076.212,00)	0,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	810.129.310,00	(810.129.310,00)	0,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.591.932.239,00	(2.591.932.239,00)	0,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	19.175.554,00	(19.175.554,00)	0,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	176.687.909,00	(176.687.909,00)	0,00
29	INSPEKTORAT	284.002.785,00	(268.036.445,00)	15.966.340,00
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	219.043.199,00	(219.043.199,00)	0,00
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	136.314.296,00	(136.314.296,00)	0,00
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	127.622.582,00	(127.622.582,00)	0,00
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	46.171.955,00	(46.171.955,00)	0,00
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	119.656.415,00	(119.656.415,00)	0,00
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	583.395.361,00	(583.395.361,00)	0,00
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	113.221.357,00	(113.221.357,00)	0,00
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	160.217.470,00	(160.217.470,00)	0,00
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	83.151.661,00	(83.151.661,00)	0,00
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	189.148.615,00	(189.148.615,00)	0,00
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	115.583.533,00	(115.583.533,00)	0,00
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	119.094.063,00	(119.094.063,00)	0,00
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	237.131.839,00	(237.131.839,00)	0,00
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	156.991.037,00	(156.991.037,00)	0,00
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	194.588.532,00	(194.588.532,00)	0,00
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.924.000,00	(11.924.000,00)	0,00
TOTAL		**83.668.121.719,55**	**(82.785.406.909,36)**	**882.714.810,19**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 29

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
1	Papan Nama Toko	1m x 2m x 2 sisi	10	Lapangan Gantole Huta Ginjang	Muara	23-12-2024 s/d 22-12-2025	10.010.000	10.010.000,00	-
2	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Siborongborong-Tarutung, Desa Paniaran	Siborongborong	23-12-2024 s/d 22-12-2025	834.400	834.400,00	-
3	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Siborongborong-Tarutung, Desa Paniaran	Siborongborong	23-12-2024 s/d 22-12-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
4	Neon Box Pakai Tiang	1M x 1,5 M x 2 sisi	1	Jl. SM. Raja	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	750.750	750.750,00	-
5	Neon Box Pakai Tiang	1M x 1,5 M x 1 sisi	1	Jl. SM. Raja	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	619.500	619.500,00	-
6	Neon Box	1M x 1,5 M x 2 sisi	1	Jl. Melanton Siregar No.35	Muara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	750.750	750.750,00	-
7	Neon Box Pakai Tiang	1M x 1,5 M x 2 sisi	1	Jl. SM. Raja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	750.750	750.750,00	-
8	Neon Box Pakai Tiang	1M x 1,5 M x 2 sisi	1	Jl. SM. Raja	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	750.750	750.750,00	-
9	Neon Box Pakai Tiang	1,5m x 2m x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
10	Neon Box Pakai Tiang	1,5m x 2,5m x 1 sisi	1	Jl. SM. Raja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.548.750	1.548.750,00	-
11	Neon Box	0,8m x 3m	1	Kompleks Terminal Pangaribuan	Pangaribuan	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
12	Neon Box	0,8m x 3m	1	Jl. DI. Panjaitan Tarutung	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
13	Neon Box	0,8m x 3m	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
14	Neon Box	0,8m x 3m	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
15	Neon Box	0,8m x 4m	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.601.600	1.601.600,00	-
16	Neon Box	0,8m x 3m	1	Jl. Melanton Siregar	Muara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
17	Neon Box	0,8m x 3m	1	Jl. Lintas Tarutung-Sibolga	Adian Koting	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
18	Neon Box	0,8m x 3m	1	Pasar Garoga	Garoga	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	
19	Neon Box	0,8m x 3m	1	Jl. Sisingamangaraja	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
20	Neon Box	0,8m x 1,2m	1	Kantor KODIM 0210	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	480.480	480.480,00	-
21	Neon Box	0,6m x 2m	1	Kantor KODIM 0210	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	495.600	495.600,00	-

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
22	Neon Box	0,8m x 1,2m	1	Bandara Silangit	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	480.480	480.480,00	-
23	Neon Box	0,8m x 1,5m	1	RSUD Tarutung, Jl. SM. Raja	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	600.600	600.600,00	-
24	Neon Box	0,8m x 2m	1	RSUD Tarutung, Jl. SM. Raja	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	660.800	660.800,00	-
25	Neon Box	0,8m x 1,2m	1	Kompleks STAKPN	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	480.480	480.480,00	-
26	Neon Box	0,8m x 2m	1	Kompleks STAKPN	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	660.800	660.800,00	-
27	Neon Box	0,8m x 1,2m	1	Graha Kartini, Jl. Menanti Sitompul	Siatas Barita	01-01-2025 s/d 31-12-2025	480.480	480.480,00	-
28	Neon Box	0,6m x 2m	1	Graha Kartini, Jl. Menanti Sitompul	Siatas Barita	01-01-2025 s/d 31-12-2025	495.600	495.600,00	-
29	Neon Box	0,8m x 3m	1	Jl. Sipoholon-Tarutung Pasar Sirongit	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
30	Neon Box	0,8m x 3m	1	Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	Pahae Jae	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
31	Neon Box	0,8m x 1,2m	1	Pemandian Air Panas Lambok	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	480.480	480.480,00	-
32	Neon Box	0,6m x 2m	1	Pemandian Air Panas Lambok	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	495.600	495.600,00	-
33	Neon Box	0,8m x 1,2m	1	Jl. Mayjend. J. Samosir (Dpn Ktr Kajari)	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	480.480	480.480,00	-
34	Neon Box	0,6m x 2m	1	Jl. Mayjend. J. Samosir (Dpn Ktr Kajari)	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	495.600	495.600,00	-
35	Neon Box	0,8m x 1,2m	1	Jl. FL.Tobing (Apotik Glorya)	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	480.480	480.480,00	-
36	Neon Box	0,6m x 2m	1	Jl. FL.Tobing (Apotik Glorya)	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	495.600	495.600,00	-
37	Neon Box	1m x 3m x 2 sisi	1	Capem Siborongborong	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
38	Neon Box	1m x 3m x 2 sisi	1	Cabang Tarutung	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
39	Neon Box	1m x 3m x 2 sisi	1	Capem Tarutung	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
40	Neon Box	1m x 3m x 2 sisi	1	Capem Sarulla	Pahae Jae	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
41	Neon Box	0,8m x 1,2m x 2 sisi	1	Kantor Bupati Tapanuli Utara	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	480.480	480.480,00	-
42	Neon Box	1m x 3m x 2 sisi	1	Capem Pangaribuan	Pangaribuan	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
43	Neon Box	1m x 1,5m x 2 sisi	1	Bandara Silangit Desa Parik Sabungan	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	750.750	750.750,00	-
44	Neon Box	1m x 3m	1	Unit Usaha Tarutung	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
45	Neon Box	2m x 1,6m x 1 sisi	1	Jl. Raja Johannes Tarutung	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.321.600	1.321.600,00	-
46	Neon Box	1,9m x 1,4m x 2 sisi	1	Jl. Raja Johannes Tarutung	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.331.330	1.331.330,00	-
47	Neon Box Pakai Tiang	1M x 1,5 M x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	750.750	750.750,00	-
48	Baliho	2M x 3M x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.478.000	2.478.000,00	-
49	Papan Nama Kantor	4,5 m x 1,2 m x 1 sisi	1	Jl. Ferdinand Lumbantobing	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.267.370	2.267.370,00	-

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
50	Neon Box	1,2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Ferdinand Lumbantobing	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.201.200	1.201.200,00	-
51	Papan Nama Toko Vertical	1 m x 3 m x 2 sisi	1	Toko Toni Sartana , Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	10-01-2025 s/d 10-01-2026	1.955.625	1.792.656,25	162.968,75
52	Papan Nama Toko Vertical	1 m x 3 m x 2 sisi	1	Kevin Ponsel , Jl. Lintas Balige-Silangit, Parik Sabungan	Siborongborong	10-01-2025 s/d 10-01-2026	1.955.625	1.792.656,25	162.968,75
53	Papan Nama Toko Vertical	1 m x 3 m x 2 sisi	1	Kevin Fashion , Jl. Lintas Balige-Silangit, Parik Sabungan	Siborongborong	10-01-2025 s/d 10-01-2026	1.955.625	1.792.656,25	162.968,75
54	Papan Nama Toko Vertical	1 m x 3 m x 2 sisi	1	Kedai Kopi Asli , Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	10-01-2025 s/d 10-01-2026	1.955.625	1.792.656,25	162.968,75
55	Papan Nama Toko Vertical	1 m x 3 m x 2 sisi	1	Rumah Makan Sabas , Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	10-01-2025 s/d 10-01-2026	1.955.625	1.792.656,25	162.968,75
56	Papan Nama Toko Vertical	1 m x 3 m x 2 sisi	1	Toko Simaremare , Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	10-01-2025 s/d 10-01-2026	1.955.625	1.792.656,25	162.968,75
57	Papan Nama Toko Vertical	1 m x 3 m x 2 sisi	1	Toko Ronatio , Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	10-01-2025 s/d 10-01-2026	1.955.625	1.792.656,25	162.968,75
58	Papan Nama Toko Vertical	1 m x 3 m x 2 sisi	1	Toko D. Lumbantoruan , Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	10-01-2025 s/d 10-01-2026	1.955.625	1.792.656,25	162.968,75
59	Papan Nama Toko Vertical	1 m x 3 m x 2 sisi	1	Toko Pancur Leang , Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	10-01-2025 s/d 10-01-2026	1.955.625	1.792.656,25	162.968,75
60	Neon Box	1,5m x 3m x 2 sisi	1	Toko Jaya Keramik, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.252.250	2.252.250,00	-
61	PNT	1m x 5m x 1 sisi	1	Toko Jaya Keramik, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.065.000	2.065.000,00	-
62	Papan Nama Kantor	0,8m x 4m x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.321.600	1.321.600,00	-
63	Neon Box	0,8m x 1,2m x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	480.480	480.480,00	-
64	Neon Box Pakai Tiang	1,5m x 2m x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
65	Baliho	4m X 6m X 1 sisi	1	Jl. SM. Raja (Simp. Jl. Butar)	Siborongborong	02-01-2025 s/d 02-04-2025	3.255.000	3.255.000,00	-
66	Shop Sign	1,5 M x 0,8 M x 2 sisi	10	Jl. Lintas Bandara Silangit & Jl. Lintas SBB- Balige	Siborongborong	15-02-2025 s/d 14-02-2026	9.082.500	7.568.750,00	1.513.750,00
67	Neon Box	1M x 1,5 M x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja Siborongborong	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	750.750	750.750,00	-
68	Neon Box	1M x 1M x 2 sisi	1	Kantor Kas Sipahutar, Jl. Gereja	Sipahutar	01-01-2025 s/d 31-12-2025	500.500	500.500,00	-
69	Neon Box	0,5M x 0,5M x 2 sisi	1	Kantor Kas Pagaran, Jl. Pagaran- Simamora nabolak	Pagaran	01-01-2025 s/d 31-12-2025	125.125	125.125,00	-
70	Papan Nama Toko	1m x 3m x 1 sisi	1	Toko Romaida, Jl. SM. Raja	Siborongborong	09-01-2025 s/d 08-01-2026	1.239.000	1.135.750,00	103.250,00
71	Neon Box Nama Toko	0,8m x 1,2m x 2 sisi	2	Jl. Sisingamangaraja Tarutung	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	960.960	960.960,00	-
72	Spanduk	0,9m x 6m x 1 sisi	17	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	15-02-2025 s/d 15-03-2025	2.581.875	2.581.875,00	-
73	Sunscreen	0,7m x 2m x 1 sisi	30	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	15-02-2025 s/d 15-04-2025	3.543.750	3.543.750,00	-
74	Vertical Banner	0,9m x 3m x 1 sisi	20	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	10-02-2025 s/d 10-03-2025	1.518.750	1.518.750,00	-
75	Spanduk	0,9m x 6m x 1 sisi	20	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	10-02-2025 s/d 10-03-2025	3.037.500	3.037.500,00	-
76	Neon Box	1m x 2,5m	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.251.250	1.251.250,00	-
77	Neon Box	1m x 2,5m	1	Jl. Balige-Sipoholon Pasar Sirongit	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.251.250	1.251.250,00	-

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
78	Neon Box	1m x 2,5m	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.251.250	1.251.250,00	-
79	Baliho	4m x 6m x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	12.516.000	12.516.000,00	-
80	Baliho	4 m x 6 m x 1 sisi	1	Jl. Tarutung-Siborongborong (Depan Air Panas)	Sipoholon	20-02-2025 s/d 19-02-2026	13.020.000	10.850.000,00	2.170.000,00
81	Baliho	4 m x 6 m x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	20-02-2025 s/d 19-02-2026	13.020.000	10.850.000,00	2.170.000,00
82	Baliho	4 m x 6 m x 1 sisi	1	Jl. Tarutung-Pahae Desa Simorangkir Julu	Siatas Barita	20-02-2025 s/d 19-02-2026	13.020.000	10.850.000,00	2.170.000,00
83	Papan Nama Toko	1 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko Jaya Keramik, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	04-12-2024 s/d 03-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
84	Neon Box	0,8 x 1,2 m x 2 sisi	1	Queen Parrona Hotel, Jl. SM. Raja	Siborongborong	24-02-2025 s/d 23-02-2026	500.640	417.200,00	83.440,00
85	Neon Box	1M x 2M x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.001.000	1.001.000,00	-
86	Neon Box	1M x 2M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	826.000	826.000,00	-
87	Neon Box	1,35M x 2M x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.351.350	1.351.350,00	-
88	Neon Box	1M x 2M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	826.000	826.000,00	-
89	Neon Box	0,8m x 4m x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja Siborongborong	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.321.600	1.321.600,00	-
90	Neon Box	0,5m x 7m x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja Siborongborong	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.445.500	1.445.500,00	-
91	Baliho	4m X 6m X 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja (Simp. Jl. Tugu)	Siborongborong	20-02-2025 s/d 19-02-2026	15.645.000	13.037.500,00	2.607.500,00
92	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,2m x 2,5m	1	Mobil Suzuki Carry BB 8005 N	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	900.000	900.000,00	-
93	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 3m	1	L300 BK 9638 WO	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.025.000	2.025.000,00	-
94	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 3m	1	L300 BK 8108 EP	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.025.000	2.025.000,00	-
95	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 2,5m	1	Suzuky Carry BK 8575 WS	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.687.500	1.687.500,00	-
96	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 2,5m	1	Suzuky Carry BK 9756 WO	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.687.500	1.687.500,00	-
97	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 2,5m	1	Grand Max BK 9680 WO	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.687.500	1.687.500,00	-
98	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 8m	1	Truk Hino BK 8096 WP	Wilayah Tapanuli Utara	30-03-2025 s/d 29-03-2026	5.400.000	4.050.000,00	1.350.000,00
99	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 6m	1	Engkel Hino BK 9717 WO	Wilayah Tapanuli Utara	30-03-2025 s/d 29-03-2026	4.050.000	3.037.500,00	1.012.500,00
100	Baliho	2m x 2m x 2 sisi	4	Kecamatan Siborongborong	Siborongborong	02-03-2025 s/d 02-06-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
101	Neon Box	1m x 2m x 2 sisi	1	Maulana Ponsel, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.001.000	1.001.000,00	-
102	Neon Box	0,5m x 1m x 2 sisi	2	Maulana Ponsel, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	500.500	500.500,00	-
103	Neon Box	0,8m x 5m x 1 sisi	1	Maulana Ponsel, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.652.000	1.652.000,00	-
104	Neon Box	1m x 5m x 1 sisi	1	Maulana Ponsel, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.065.000	2.065.000,00	-
105	Neon Box	1,5m x 3m x 2 sisi	1	Maulana Ponsel, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.252.250	2.252.250,00	-

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
106	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Sm.Raja No.126	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
107	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Sm.Raja No.126	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
108	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Sm.Raja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
109	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Sm.Raja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
110	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Sadar	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
111	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Sadar	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
112	Neon Box	0,8m x 2,5m x 2 sisi	1	Jl. Lintas Sipoholon-Trt Dpn Air Panas	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.043.000	1.043.000,00	-
113	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Lintas Sipoholon-Trt Dpn Air Panas	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
114	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Lintas Sipoholon-Trt Pasar Sirongit	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
115	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Lintas Sipoholon-Trt Pasar Sirongit	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
116	Neon Box & PNT	0,8m x 2,5m x 2 sisi	1	Jl. Sm.Raja No.26	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.043.000	1.043.000,00	-
117	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Sm.Raja No.26	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
118	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan (Simp. Huta baginda)	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
119	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan (Simp. Huta baginda)	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
120	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan (Dpn Terminal Trt)	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
121	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan (Dpn Terminal Trt)	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
122	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Ir. Mananti Sitompul	Siatas Barita	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
123	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Ir. Mananti Sitompul	Siatas Barita	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
124	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Bandara Silangit, Desa Parik Sabungan	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
125	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	2	Jl. Sipirok - Tarutung, Onan Joro	Pahae Jae	01-01-2025 s/d 31-12-2025	4.172.000	4.172.000,00	-
126	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Sipirok - Tarutung, Onan Joro	Pahae Jae	01-01-2025 s/d 31-12-2025	834.400	834.400,00	-
127	Papan Nama Toko	1m X 2m X 2 sisi	1	Toko Gloria, Jl. Balige No.68	Sipoholon	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.251.250	1.251.250,00	-
128	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Jl. Lintas Silangit - Muara	Siborongborong	27-02-2025 s/d 26-02-2026	1.652.000	1.376.666,67	275.333,33
129	Neon Box	1,2m x 1,2m x 2 sisi	1	Jl. Lintas Silangit - Muara	Siborongborong	27-02-2025 s/d 26-02-2026	720.720	600.600,00	120.120,00
130	Neon Box Nama Toko	1m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja Siborongborong	Siborongborong	28-03-2025 s/d 27-03-2026	1.001.000	750.750,00	250.250,00
131	Neon Box Nama Toko	1,2m x 1m x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan Tarutung	Tarutung	28-03-2025 s/d 27-03-2026	600.600	450.450,00	150.150,00
132	Neon Box Nama Toko	1.2m x 0,8m x 1 sisi	1	Jl. SM.Raja Tarutung	Tarutung	28-03-2025 s/d 27-03-2026	396.480	297.360,00	99.120,00
133	Neon Box Nama Toko	0,8m x 1,5m x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja Tarutung	Tarutung	28-03-2025 s/d 27-03-2026	600.600	450.450,00	150.150,00

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
134	Neon Box Nama Toko	0,8m x 1,5m x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Pangaribuan	28-03-2025 s/d 27-03-2026	600.600	450.450,00	150.150,00
135	PNT	0,8m x 3m x 1 sisi	1	Jl. DI Panjaitan	Tarutung	28-03-2025 s/d 27-03-2026	991.200	743.400,00	247.800,00
136	Neon Box Nama Toko	1,7m x 0,8m x 2 sisi	1	Jl. Sbb-Balige Desa Pohan Tonga	Siborongborong	28-03-2025 s/d 27-03-2026	680.680	510.510,00	170.170,00
137	Neon Box	0,8m x 2m	1	BNI Capem Siborongborong	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	800.800	800.800,00	-
138	Neon Box	0,8m x 2m	1	BNI Capem Tarutung, Jl. SM.Raja	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	800.800	800.800,00	-
139	Neon Box	0,8m x 2m	1	SPBU BPS Group, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	800.800	800.800,00	-
140	Neon Box	1.22M x 30M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	28-03-2025 s/d 27-03-2026	15.115.800	11.336.850,00	3.778.950,00
141	Neon Box	2.6M x 2.3M x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	28-03-2025 s/d 27-03-2026	3.097.094	2.322.820,50	774.273,50
142	Neon Box	0,3M x 1,66M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	28-03-2025 s/d 27-03-2026	205.674	154.255,50	51.418,50
143	Neon Box	1,04M x 1,14M x1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	28-03-2025 s/d 27-03-2026	489.653	367.239,75	122.413,25
144	Papan Nama Toko	1M x 4M x1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	28-03-2025 s/d 27-03-2026	1.652.000	1.239.000,00	413.000,00
145	Papan Nama Toko	2,4m x 1,2m x 2 sisi	1	Toko Miduk Jaya, Jl. SM.Raja No.140	Tarutung	19-04-2025 s/d 18-04-2026	1.441.440	960.960,00	480.480,00
146	Papan Nama Toko	3m x 1,5m x 2 sisi	1	Toko Simorangkir, Jl. SM.Raja No.164	Tarutung	19-04-2025 s/d 18-04-2026	2.252.250	1.501.500,00	750.750,00
147	Papan Nama Toko	5,5m x 1,5m x 1 sisi	1	Toko Sederhana, Jl. SM.Raja No.78	Siborongborong	19-04-2025 s/d 18-04-2026	3.407.250	2.271.500,00	1.135.750,00
148	Papan Nama Toko	4m x 1m x 1 sisi	1	Toko Paris Jaya, Jl. Tugu No.4	Siborongborong	19-04-2025 s/d 18-04-2026	1.652.000	1.101.333,33	550.666,67
149	Papan Nama Toko	4m x 1,5m x 1 sisi	1	UD. Tunas Baru, Jl. SM.Raja No.130	Siborongborong	19-04-2025 s/d 18-04-2026	2.478.000	1.652.000,00	826.000,00
150	Papan Nama Toko	4m x 1,5m x 1 sisi	1	UD. Tunas Baru, Jl. SM.Raja No.130	Siborongborong	19-04-2025 s/d 18-04-2026	2.478.000	1.652.000,00	826.000,00
151	Papan Nama Toko	1m x 2m x 2 sisi	1	Toko Poltak Jaya, Jl. SM. Raja	Pangaribuan	19-04-2025 s/d 18-04-2026	1.001.000	667.333,33	333.666,67
153	Papan Nama Toko	1m x 2m x 2 sisi	1	Toko Romaida, Jl. SM.Raja No.81	Siborongborong	19-04-2025 s/d 18-04-2026	1.001.000	667.333,33	333.666,67
154	Papan Nama Toko	1m x 2m x 2 sisi	1	Toko Parrona, Jl. SM.Raja No.254	Siborongborong	19-04-2025 s/d 18-04-2026	1.001.000	667.333,33	333.666,67
155	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 3m	1	Mitsubishi L300 BB 8447 FB	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.025.000	2.025.000,00	-
156	Shop Sign	1m x 2m x 2 sisi	5	Jl. Lintas Bandara Silangit- Muara	Siborongborong	12-03-2025 s/d 11-03-2026	6.256.250	4.692.187,50	1.564.062,50
157	Vertical Banner	0,9m x 3m	20	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	07-03-2025 s/d 07-04-2025	1.518.750	1.518.750,00	-
158	Spanduk	0,9m x 6m	5	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	07-03-2025 s/d 07-04-2025	759.375	759.375,00	-
159	Spanduk	0,9m x 6m	8	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	07-03-2025 s/d 07-04-2025	1.215.000	1.215.000,00	-
160	Shop Sign	1m x 2m x 2 sisi	1	Hutanami Resto, JL. SM. Raja	Tarutung	07-03-2025 s/d 07-04-2025	1.251.250	834.166,67	417.083,33
161	Neon Box	1m x 2m x 2 sisi	1	Tio Mart, Jl. Lintas Bandara Silangit-Muara	Siborongborong	09-02-2025 s/d 08-02-2026	1.251.250	1.042.708,33	208.541,67
162	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 3m	1	Mitsubishi L300 BB 8852 FP	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	2.025.000	2.025.000,00	-

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
163	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	2	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	4.130.000	4.130.000,00	-
164	Spanduk	0,9m x 6m x 1 sisi	5	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	24-03-2025 s/d 24-04-2025	759.375	759.375,00	-
165	Papan Nama Toko	1m x 2m x 1 sisi	5	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	5.162.500	5.162.500,00	-
166	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 6m	1	Mitsubishi Engkel BA 8621 BJ	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	4.050.000	4.050.000,00	-
167	Spanduk	0,9m x 6m x 1 sisi	7	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	24-03-2025 s/d 24-04-2025	1.063.125	1.063.125,00	-
168	Vertical Banner	0,9m x 3m x 1 sisi	20	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	24-03-2025 s/d 24-04-2025	1.518.750	1.518.750,00	-
169	Spanduk	0,9m x 6m x 1 sisi	5	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	24-03-2025 s/d 24-04-2025	759.375	759.375,00	-
170	Papan Nama Toko	1m x 3m x 1 sisi	20	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	30.975.000	30.975.000,00	-
171	Papan Nama Toko	1m x 2m x 1 sisi	5	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	5.162.500	5.162.500,00	-
172	Baliho	4m X 6m X 1 sisi	1	Jl. Lintas Silangit-Muara (Simpang Bandara Silangit)	Siborongborong	31-03-2025 s/d 30-03-2026	13.020.000	9.765.000,00	3.255.000,00
173	PNT	1m X 4m X 1 sisi	1	Cozy Ponsel Jl. SM. Raja No.35	Siborongborong	05-05-2025 s/d 05-05-2026	1.652.000	963.666,67	688.333,33
174	PNT	0,84m x 3,50m x 1 sisi	1	Toko Siantar Elektronik, Jl. Sm. Raja	Siborongborong	22-04-2025 s/d 22-04-2026	1.214.220	809.480,00	404.740,00
175	Shop Sign	2 M x 0.8 M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Tarutung	14-03-2025 s/d 13-03-2026	668.730	501.547,20	167.182,40
176	pole sign	2,4 M x 1,55 M x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Tarutung	14-03-2025 s/d 13-03-2026	1.884.203	1.413.152,25	471.050,75
177	Shop Sign	2 M x 0.8 M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, Desa Pakpahan	Pangaribuan	04-04-2025 s/d 03-04-2026	664.765	443.176,53	221.588,27
178	pole sign	2,4 M x 1,55 M x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, Desa Pakpahan	Pangaribuan	04-04-2025 s/d 03-04-2026	1.873.032	1.248.688,00	624.344,00
179	Shop Sign	2 M x 0.8 M x 1 sisi	1	Jl. Makmur, Kel. Pasar Siborongborong	Siborongborong	04-04-2025 s/d 03-04-2026	664.765	443.176,53	221.588,27
180	pole sign	2,4 M x 1,55 M x 2 sisi	1	Jl. Makmur, Kel. Pasar Siborongborong	Siborongborong	04-04-2025 s/d 03-04-2026	1.873.032	1.248.688,00	624.344,00
181	Shop Sign	2 M x 0.8 M x 1 sisi	1	Jl. Raja Naipospos, Kel. Situmeang Habinsaran	Sipoholon	04-04-2025 s/d 03-04-2026	664.765	443.176,53	221.588,27
182	pole sign	2,4 M x 1,55 M x 2 sisi	1	Jl. Raja Naipospos, Kel. Situmeang Habinsaran	Sipoholon	04-04-2025 s/d 03-04-2026	1.873.032	1.248.688,00	624.344,00
183	Shop Sign	2 M x 0.8 M x 1 sisi	1	Jl. Lintas Sbb-Tarutung (Sitabotabo)	Siborongborong	22-04-2025 s/d 21-04-2026	664.765	443.176,53	221.588,27
184	pole sign	2,4 M x 1,55 M x 2 sisi	1	Jl. Lintas Sbb-Tarutung (Sitabotabo)	Siborongborong	22-04-2025 s/d 21-04-2026	1.873.032	1.248.688,00	624.344,00
185	Shop Sign	2 M x 0.8 M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	22-04-2025 s/d 21-04-2026	664.765	443.176,53	221.588,27
186	pole sign	2,4 M x 1,55 M x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	22-04-2025 s/d 21-04-2026	1.873.032	1.248.688,00	624.344,00
187	Shop Sign	2 M x 0.8 M x 1 sisi	1	Jl. Raja Johannes Tarutung	Tarutung	22-04-2025 s/d 21-04-2026	664.765	443.176,53	221.588,27
188	pole sign	2,4 M x 1,55 M x 2 sisi	1	Jl. Raja Johannes Tarutung	Tarutung	22-04-2025 s/d 21-04-2026	1.873.032	1.248.688,00	624.344,00
189	Shop Sign	2 M x 0.8 M x 1 sisi	1	Jl. Patuan Anggi No..1	Tarutung	22-04-2025 s/d 21-04-2026	664.765	443.176,53	221.588,27
190	pole sign	2,4 M x 1,55 M x 2 sisi	1	Jl. Patuan Anggi No..1	Tarutung	22-04-2025 s/d 21-04-2026	1.873.032	1.248.688,00	624.344,00

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
191	Shop Sign	2m x 4m x 1 sisi	1	Grapari Telkomsel, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	3.304.000	3.304.000,00	-
192	Baliho	2m x 4m x 1 sisi	1	Jl. SM. Raja, Pasar Sarulla	Pahae Jae	01-01-2025 s/d 31-12-2025	3.472.000	3.472.000,00	-
193	Sunscreen	0,75m x 1,5m x 1 sisi	150	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-04-2025 s/d 01-10-2025	28.476.563	28.476.563,00	-
194	Neon Box	1,14M x 1,04M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 272	Siborongborong	19-05-2025 s/d 18-05-2026	489.653	285.630,92	204.022,08
195	Neon Box	1,66M x 0,3M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 272	Siborongborong	19-05-2025 s/d 18-05-2026	205.674	119.976,50	85.697,50
196	Neon Box	10,13M x 1,22M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 272	Siborongborong	19-05-2025 s/d 18-05-2026	5.104.102	2.977.392,83	2.126.709,17
197	Neon Box	1M x 4M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 272	Siborongborong	19-05-2025 s/d 18-05-2026	1.652.000	963.666,67	688.333,33
198	Neon Box	1.22M x 30M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	27-03-2026 s/d 26-03-2027	12.170.708	-	12.170.708,00
199	Neon Box	2.6M x 2.3M x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	27-03-2026 s/d 26-03-2027	3.097.094	-	3.097.094,00
200	Neon Box	0,3M x 1,66M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	27-03-2026 s/d 26-03-2027	205.674	-	205.674,00
201	Neon Box	1,04M x 1,14M x1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	27-03-2026 s/d 26-03-2027	489.653	-	489.653,00
202	Papan Nama Toko	1M x 4M x1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	27-03-2026 s/d 26-03-2027	1.652.000	-	1.652.000,00
203	Papan Nama Showroom	2 m x 1 m x 1 sisi	2	Jl. DI. Panjaitan Tarutung	Tarutung	01-01-2024 s/d 31-12-2024	1.210.000	1.210.000,00	-
204	Baliho	2 m x 3 m x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja Siborongborong	Siborongborong	01-01-2024 s/d 31-12-2024	1.920.000	1.920.000,00	-
205	Papan Nama Showroom	2 m x 1 m x 1 sisi	2	Jl. DI. Panjaitan Tarutung	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.210.000	1.210.000,00	-
206	Baliho	2 m x 3 m x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja Siborongborong	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.920.000	1.920.000,00	-
207	Neon Box	1 m x 2 m x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja Siborongborong	Siborongborong	04-06-2025 s/d 04-06-2026	1.001.000	500.500,00	500.500,00
208	Baliho	2m x 2m x 2 sisi	4	Kecamatan Siborongborong	Siborongborong	02-06-2025 s/d 02-09-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
209	Neon Box	1,5m x 1,85m x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Tarutung	18-07-2025 s/d 18-07-2026	1.388.888	578.703,33	810.184,67
210	Neon Box	2m x 2,85m x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Tarutung	18-07-2025 s/d 18-07-2026	2.972.550	1.238.562,50	1.733.987,50
211	Baliho	4m X 6m X 1 sisi	1	Jl. Sm. Raja (Depan Taman Lonceng)	Tarutung	04-06-2025 s/d 03-06-2026	13.020.000	6.510.000,00	6.510.000,00
212	Neon Box	1m x 4m x 1 sisi	1	THE STAR CAFE/FELIX CAFE, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	22-02-2025 s/d 21-02-2026	2.422.000	2.018.333,33	403.666,67
213	Neon Box	1m x 4m x 1 sisi	1	TOKO SP. TOBING, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	05-02-2025 s/d 04-02-2026	2.422.000	2.018.333,33	403.666,67
214	Neon Box	1m x 4m x 1 sisi	1	TOKO LARISMA, Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	05-02-2025 s/d 04-02-2026	2.422.000	2.018.333,33	403.666,67
215	Neon Box	1m x 1m x 1 sisi	1	TOBA DREAM CAFE, Jl. Lintas SBB-Pagaran	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	605.500	605.500,00	-
216	Neon Box	1m x 4m x 1 sisi	1	RAP TARULI CAFE, Jl. Lintas Silangit-Balige	Siborongborong	22-02-2025 s/d 21-02-2026	2.422.000	2.018.333,33	403.666,67
217	Neon Box	0,8m x 2m x 2 sisi	1	TOKO MARLINCA, Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	13-03-2025 s/d 12-03-2026	968.800	726.600,00	242.200,00
218	Neon Box	0,8m x 2m x 2 sisi	1	BASADO CAFE & DRINK, Jl. Sadar	Siborongborong	13-03-2025 s/d 12-03-2026	968.800	726.600,00	242.200,00

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
219	Papan Nama Toko	0,8m x 4m x 1 sisi	1	Jl. Tugu	Siborongborong	14-05-2025 s/d 14-05-2026	1.321.600	770.933,33	550.666,67
220	Spanduk	0,9m x 6m	30	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	07-05-2025 s/d 07-06-2025	4.556.250	4.556.250,00	-
221	Vertical Banner	0,9m x 3m	20	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	07-05-2025 s/d 07-06-2025	1.518.750	1.518.750,00	-
222	Vertical Banner	0,9m x 3m	20	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	26-04-2025 s/d 26-05-2025	1.518.750	1.518.750,00	-
223	Spanduk	0,9m x 6m	18	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	26-04-2025 s/d 26-05-2025	2.733.750	2.733.750,00	-
224	Shop Sign	1m x 2m x 2 sisi	5	Jl. Bandara Silangit, Desa Parik Sabungan	Siborongborong	29-04-2025 s/d 28-04-2026	6.256.250	4.170.833,33	2.085.416,67
225	Baliho	4m X 6m X 1 sisi	1	Jl. SM. Raja (Simp. Jl. Butar)	Siborongborong	02-07-2025 s/d 02-10-2025	3.255.000	3.255.000,00	-
226	Neon Box	1m X 2m X 2 sisi	1	Jl. Marhusa Panggabean	Siatas Barita	08-07-2025 s/d 07-07-2026	1.001.000	417.083,33	583.916,67
227	Neon Box	1M x 2M x 2 sisi	1	Siantar Elektronik, Jl. SM. Raja	Siborongborong	30-05-2025 s/d 29-05-2026	1.001.000	583.916,67	417.083,33
228	Neon Box	1,2 m x 2,5 m x 2 sisi	1	Toko Paris Jaya, Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	01-07-2025 s/d 30-06-2026	1.501.500	750.750,00	750.750,00
229	Neon Box	1.22M x 30M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja, No. 205	Tarutung	27-03-2026 s/d 26-03-2027	2.945.092	2.208.819,00	736.273,00
230	Neon Box	1,5m X 3m X 2 sisi	1	UD. Parrona, Jl. SM. Raja	Siborongborong	10-07-2025 s/d 09-07-2026	2.346.750	977.812,50	1.368.937,50
231	Baliho	4m x 8m x 1 sisi	1	Jl. Guru Mangaloksa (Depan Bank Sumut)	Tarutung	05-08-2025 s/d 05-09-2025	3.472.000	3.472.000,00	-
232	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	UD. Rolas Boy, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.691.648	1.409.706,67	281.941,33
233	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Toko Lena, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.691.648	1.409.706,67	281.941,33
234	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Toko Op. Murni, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.691.648	1.409.706,67	281.941,33
235	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Toko Hans Nainggolan, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.691.648	1.409.706,67	281.941,33
236	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko Obat Romauli, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	20-05-2025 s/d 19-05-2026	1.717.799	1.002.049,51	715.749,65
237	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko Anugrah, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	20-05-2025 s/d 19-05-2026	1.717.799	1.002.049,51	715.749,65
238	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	TOKO INDAH M3, Jl. SM Raja	Siborongborong	29-11-2024 s/d 28-11-2025	1.768.722	1.768.722,06	-
239	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	TOKO Larisma, Jl. SM Raja	Siborongborong	29-11-2024 s/d 28-11-2025	1.768.722	1.768.722,06	-
240	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	TOKO Setia, Jl. SM Raja	Siborongborong	29-11-2024 s/d 28-11-2025	1.768.722	1.768.722,06	-
241	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko J. Sigalingging, Jl. Lintas Sbb-Balige	Siborongborong	29-11-2024 s/d 28-11-2025	1.768.722	1.768.722,06	-
242	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko Romora, Jl. Lintas Sbb-Balige	Siborongborong	29-11-2024 s/d 28-11-2025	1.768.722	1.768.722,06	-
243	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko Rafael, Jl. Sisingamangaraja	Tarutung	29-11-2024 s/d 28-11-2025	1.768.722	1.768.722,06	-
244	Papan Nama Toko	1m x 2m x 1 sisi	15	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	12.390.000	12.390.000,00	-
245	Papan Nama Toko	1m x 3m x 1 sisi	4	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	4.956.000	4.956.000,00	-
246	Papan Nama Toko	1,2m x 4m x 1 sisi	1	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.982.400	1.982.400,00	-

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
247	Baliho	3m x 4m x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	01-01-2025 s/d 31-12-2025	5.208.000	5.208.000,00	-
248	Papan Nama Toko	0,7m x 2m x 1 sisi	2	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.156.400	1.156.400,00	-
249	Papan Nama Toko	1,5m x 1m x 1 sisi	1	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-01-2025 s/d 31-12-2025	619.500	619.500,00	-
250	Layar Toko	1m x 2m x 1 sisi	117	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	01-08-2025 s/d 31-12-2025	15.795.000	15.795.000,00	-
251	Spanduk	0,9m x 6m x 1 sisi	7	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	13-08-2025 s/d 12-09-2025	1.063.125	1.063.125,00	-
252	Vertical Banner	0,9m x 3m x 1 sisi	15	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	13-08-2025 s/d 12-09-2025	1.139.063	1.139.063,00	-
253	Spanduk	0,9m x 6m	25	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	13-08-2025 s/d 12-09-2025	3.796.875	3.796.875,00	-
254	Vertical Banner	0,9m x 3m	25	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	13-08-2025 s/d 12-09-2025	1.898.438	1.898.438,00	-
255	Spanduk	0,9m x 6m	10	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	04-07-2025 s/d 04-08-2025	1.518.750	1.518.750,00	-
256	Shop Sign	1m x 2m x 2 sisi	1	Ramena Mart, Jl. Lintas Sipoholon-Tarutung	Sipoholon	20-05-2025 s/d 19-05-2026	1.303.750	760.520,83	543.229,17
257	Shop Sign	1m x 2m x 2 sisi	5	Desa Parsaoran Janji Angkola	Purba Tua	20-06-2025 s/d 19-06-2026	6.256.250	3.128.125,00	3.128.125,00
258	Shop Sign	1m x 2m x 2 sisi	1	Toko Maxwell, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	20-06-2025 s/d 19-06-2026	1.251.250	625.625,00	625.625,00
259	Spanduk	0,9m x 6m	25	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	07-06-2025 s/d 06-07-2025	3.796.875	3.796.875,00	-
260	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Warung Aritonang, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.701.560	1.417.966,67	283.593,33
261	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	RM. Tampubolon, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.701.560	1.417.966,67	283.593,33
262	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Kedai Berkat Sitinjak, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.701.560	1.417.966,67	283.593,33
263	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	RM. Evi, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.701.560	1.417.966,67	283.593,33
264	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	RM. Muslim Bunda, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.701.560	1.417.966,67	283.593,33
265	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Warung Helen Br. Silaen, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.701.560	1.417.966,67	283.593,33
266	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Warung Op. Marsaulina, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.701.560	1.417.966,67	283.593,33
267	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Warung Nasi Denis Silitonga, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.701.560	1.417.966,67	283.593,33
268	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Warung K. Aritonang, Jl. Lintas Bandara Silangit	Siborongborong	12-02-2025 s/d 11-02-2026	1.701.560	1.417.966,67	283.593,33
269	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Warkop Rajagukguk, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	20-05-2025 s/d 19-05-2026	1.727.984	1.007.990,52	719.993,23
270	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	RM Elsianna, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	20-05-2025 s/d 19-05-2026	1.727.984	1.007.990,52	719.993,23
271	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Warkop Tp.Bolon Br Tobing, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	20-05-2025 s/d 19-05-2026	1.727.984	1.007.990,52	719.993,23
272	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Warkop KKB Sianturi, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	20-05-2025 s/d 19-05-2026	1.727.984	1.007.990,52	719.993,23
273	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Kedai Bakmi Theresia, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	20-05-2025 s/d 19-05-2026	1.727.984	1.007.990,52	719.993,23
274	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Warung Op.Rymma Tp.Bolon, Jl. Lintas Silangit-Muara	Siborongborong	20-05-2025 s/d 19-05-2026	1.727.984	1.007.990,52	719.993,23

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
275	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Kantin Masjid, Jl. SM Raja	Siborongborong	29-11-2025 s/d 28-11-2026	1.778.907	148.242,22	1.630.664,42
276	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	RM. Ummi Pane, Jl. Lintas Sbb-Balige	Siborongborong	29-11-2025 s/d 28-11-2026	1.778.907	148.242,22	1.630.664,42
277	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	Kantin SMP Katolik T Silalahi, Jl. Lintas Sbb-Balige	Siborongborong	29-11-2025 s/d 28-11-2026	1.778.907	148.242,22	1.630.664,42
278	Papan Nama Toko	1,37 m x 3 m x 1 sisi	1	RM Kembar, Jl. Lintas Sbb-Balige	Siborongborong	29-11-2025 s/d 28-11-2026	1.778.907	148.242,22	1.630.664,42
279	Neon Box	1m x 2m x 2 sisi	1	Simp. Jl. Sadar Kel. Pasar Siborongborong	Siborongborong	01-09-2025 s/d 31-08-2026	1.001.000	333.666,67	667.333,33
280	Baliho	2m x 3m x 1 sisi	1	Jl. Lintas Silangit-Muara (Dpn Bandara Silangit)	Siborongborong	01-09-2025 s/d 31-08-2026	2.604.000	868.000,00	1.736.000,00
281	Baliho	2m x 2m x 1 sisi	4	Wilayah Kecamatan Siborongborong	Siborongborong	03-09-2025 s/d 03-12-2025	2.086.000	2.086.000,00	-
282	Neon Box	1m x 3m x 2 sisi	1	Unit Usaha Siborongborong	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.501.500	1.501.500,00	-
283	Neon Box	1m x 2m x 2 sisi	1	Bandara Silangit Desa Parik Sabungan	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	1.001.000	1.001.000,00	-
284	Papan Nama Toko	3,6m x 2,4m x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	31-07-2025 s/d 30-07-2026	3.568.320	1.486.800,00	2.081.520,00
285	Baliho	3m x 3m x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan Tarutung	Tarutung	31-07-2025 s/d 30-07-2026	3.906.000	1.627.500,00	2.278.500,00
286	Neon Box	1,2 m x 2,5 m x 2 sisi	1	CV. Matio Jaya, Jl. Ir. Mananti Sitompul	Siatas Barita	22-08-2025 s/d 21-08-2026	1.501.500	500.500,00	1.001.000,00
287	Baliho	4m X 6m X 1 sisi	1	Jl. SM. Raja Sbb	Siborongborong	13-09-2025 s/d 12-09-2026	13.020.000	3.255.000,00	9.765.000,00
288	Baliho	4m X 6m X 1 sisi	1	Jl. Lintas Sipoholon-Tarutung	Sipoholon	13-09-2025 s/d 12-09-2026	13.020.000	3.255.000,00	9.765.000,00
289	Papan Nama Toko	1 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko Jaya Keramik, Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	04-12-2025 s/d 03-12-2026	1.501.500	-	1.501.500,00
290	Baliho	4m X 6m X 1 sisi	1	Jl. SM. Raja (Simp. Jl. DI. Panjaitan) Sarulla	Pahae Jae	01-11-2025 s/d 31-10-2026	13.020.000	2.170.000,00	10.850.000,00
291	Baliho	4 M x 2,02 M x 1 sisi	1	Erafone Siborongborong, Jl. SM. Raja	Siborongborong	18-10-2025 s/d 17-10-2026	3.506.720	584.453,33	2.922.266,67
292	Spanduk	0,9m x 6m	8	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	13-09-2025 s/d 13-10-2025	1.215.000	1.215.000,00	-
293	Spanduk	0,9m x 6m	15	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	13-09-2025 s/d 13-10-2025	2.278.125	2.278.125,00	-
294	Shop Sign	1m x 2m	1	Delta Cofee & Bilyard, Jl. Sutan Sumurung	Tarutung	29-09-2025 s/d 28-09-2026	1.251.250	312.812,50	938.437,50
295	Spanduk	0,9m x 6m	10	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	29-10-2025 s/d 29-11-2025	1.518.750	1.518.750,00	-
296	Spanduk	0,9m x 6m	12	Wilayah Tapanuli Utara	Wilayah Tapanuli Utara	29-10-2025 s/d 29-11-2025	1.822.500	1.822.500,00	-
297	Shop Sign	1m x 2m	5	Desa Lumban Sinaga Simatupang	Pangaribuan	01-10-2025 s/d 30-09-2026	6.256.250	1.564.062,50	4.692.187,50
298	Baliho	2M x 3M x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	10-11-2025 s/d 09-11-2026	2.478.000	206.500,00	2.271.500,00
299	Neon Box	1m x 1,5m x 2 sisi	1	Jl. Jend. Sudirman No. 5	Tarutung	27-10-2025 s/d 26-10-2026	750.750	125.125,00	625.625,00
300	Neon Box	1m x 3m x 1 sisi	1	Jl. Jend. Sudirman No. 5	Tarutung	27-10-2025 s/d 26-10-2026	1.501.500	250.250,00	1.251.250,00
301	Papan Nama Toko	1 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko Siringoringo, Jl. Lintas Sbb-Balige	Siborongborong	15-11-2025 s/d 14-11-2026	1.564.500	130.375,00	1.434.125,00
302	Papan Nama Toko	1 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko Setia, Jl. SM. Raja	Siborongborong	15-11-2025 s/d 14-11-2026	1.564.500	130.375,00	1.434.125,00

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
303	Papan Nama Toko	1 m x 3 m x 1 sisi	1	Toko Kevin, Jl. SM. Raja	Siborongborong	15-11-2025 s/d 14-11-2026	1.564.500	130.375,00	1.434.125,00
304	Papan Nama Toko	1m x 3m x 1 sisi	1	Toko Romaida (MS), Jl. SM. Raja	Siborongborong	08-01-2026 s/d 09-01-2027	1.239.000	-	1.239.000,00
305	Neon Box	2,4 M x 2,4 M x 2 sisi	1	Erafone Siborongborong, Jl. SM. Raja	Siborongborong	19-10-2025 s/d 18-10-2026	3.003.840	500.640,00	2.503.200,00
306	Neon Box	1,80M x 4,20M x 1 sisi	1	Erafone Siborongborong, Jl. SM. Raja	Siborongborong	19-10-2025 s/d 18-10-2026	3.281.040	546.840,00	2.734.200,00
307	Baliho	4m x 6m x 1 sisi	1	Jl. Gereja Pasar Lama, Desa Sipahutar I	Sipahutar	14-12-2025 s/d 13-12-2026	13.020.000	-	13.020.000,00
308	Baliho	4m x 6m x 1 sisi	1	Jl. SM. Raja Dekat Gerai Samsat Siborongborong	Siborongborong	22-11-2025 s/d 21-11-2026	13.020.000	1.085.000,00	11.935.000,00
309	Baliho	5 m x 10 m x 1 sisi	1	Jl. SM. Raja (Simpang 4) Kec. Tarutung	Tarutung	25-11-2025 s/d 24-11-2026	27.125.000	2.260.416,67	24.864.583,33
310	Baliho	4 M x 2,02 M x 1 sisi	1	Erafone Siborongborong, Jl. SM. Raja	Siborongborong	18-10-2025 s/d 17-10-2026	3.506.720	584.453,33	2.922.266,67
311	Neon Box	1,5m x 3m x 2 sisi	1	Toko Holbung Niaga, Jl. SBB-Balige Pohan Tonga	Siborongborong	24-11-2025 s/d 23-11-2026	2.252.250	187.687,50	2.064.562,50
312	Umbul-Umbul	1m x 3m	10	Jl. Mayjend DI. Panjaitan Tarutung	Tarutung	28-11-2025 s/d 27-11-2025	675.000	675.000,00	-
313	Papan Nama Toko	1m x 2m x 2 sisi	10	Lapangan Gantole Huta Ginjang	Muara	23-12-2025 s/d 22-12-2026	10.010.000	-	10.010.000,00
314	Neon Box	1m x 2m x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	31-07-2025 s/d 30-07-2026	1.001.000	417.083,33	583.916,67
315	Neon Box	0,8m x 6m x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	31-07-2025 s/d 30-07-2026	2.402.400	1.001.000,00	1.401.400,00
316	Neon Box	1,5m x 2,1m x 2 sisi	1	Jl. Mayjend DI. Panjaitan Tarutung	Tarutung	08-12-2025 s/d 07-12-2026	1.642.725	-	1.642.725,00
317	Papan Nama Toko	1m x 3m x 1 sisi	1	Jl. Mayjend DI. Panjaitan Tarutung	Tarutung	08-12-2025 s/d 07-12-2026	1.302.000	-	1.302.000,00
318	Papan Nama Toko	0,8m x 6m x 1 sisi	1	Jl. Tugu	Siborongborong	24-11-2025 s/d 23-11-2026	2.083.000	173.583,33	1.909.416,67
319	Neon Box	0,8m x 6m x 1 sisi	1	Jl. Tugu	Siborongborong	24-11-2025 s/d 23-11-2026	1.043.000	86.916,67	956.083,33

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN	JLH UNIT	LETAK OBJEK	KECAMATAN	TMT	TOTAL PEMBAYARAN	PAJAK 2025	PAJAK 2026
320	PNT	1m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	01-01-2025 s/d 31-12-2025	826.000	826.000,00	-
321	Reklame Berjalan/Mobll Box	1,80m x 3m	2	Mobil Suzuki BM 8067 TO & Mobil L300 B 9746 FXU	Wilayah Tapanuli Utara	29-09-2025 s/d 28-09-2026	3.240.000	810.000,00	2.430.000,00
322	Baliho	2m x 2m x 1 sisi	4	Wilayah Kecamatan Siborongborong	Siborongborong	03-12-2025 s/d 02-03-2026	2.086.000	2.086.000,00	-
323	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Siborongborong-Tarutung, Desa Paniaran	Siborongborong	23-12-2025 s/d 22-12-2026	834.400	-	834.400,00
324	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Siborongborong-Tarutung, Desa Paniaran	Siborongborong	23-12-2025 s/d 22-12-2026	2.086.000	-	2.086.000,00
325	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. Raja Johannes Tarutung	Tarutung	06-11-2025 s/d 05-11-2026	834.400	69.533,33	764.866,67
326	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. Raja Johannes Tarutung	Tarutung	06-11-2025 s/d 05-11-2026	2.086.000	173.833,33	1.912.166,67
327	PNT	0,8m x 2m x 1 sisi	1	Jl. SM. Raja Tarutung	Tarutung	01-12-2025 s/d 30-11-2026	834.400	69.533,33	764.866,67
328	Neon Box	2m x 2m x 2 sisi	1	Jl. SM. Raja Tarutung	Tarutung	01-12-2025 s/d 30-11-2026	2.086.000	173.833,33	1.912.166,67
329	Umbul-Umbul	1m x 3m x 1 sisi	24	Jl. SM. Raja Tarutung	Tarutung	28-11-2025 s/d 27-12-2025	1.620.000	1.620.000,00	-
330	Shop Sign	2 M x 0.8 M x 1 sisi	1	Jl. Raya Sipahutar - Pangaribuan	Sipahutar	22-12-2025 s/d 21-12-2026	660.800	-	660.800,00
331	pole sign	2,4 M x 1,55 M x 2 sisi	1	Jl. Raya Sipahutar - Pangaribuan	Sipahutar	22-12-2025 s/d 21-12-2026	1.861.860	-	1.861.860,00
332	Neon Box	1,5m x 1,85m x 1 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	25-12-2025 s/d 24-12-2026	1.388.888	-	1.388.888,00
333	Neon Box	2m x 2,85m x 2 sisi	1	Jl. Sisingamangaraja	Siborongborong	25-12-2025 s/d 24-12-2026	2.972.550	-	2.972.550,00
334	Neon Box	1,5m x 1,85m x 1 sisi	1	Jl. Tugu	Siborongborong	25-12-2025 s/d 24-12-2026	1.388.888	-	1.388.888,00
335	Neon Box	2m x 2,85m x 2 sisi	1	Jl. Tugu	Siborongborong	25-12-2025 s/d 24-12-2026	2.972.550	-	2.972.550,00
336	Neon Box	1,5m x 1,85m x 1 sisi	1	Jl. Sadar	Siborongborong	25-12-2025 s/d 24-12-2026	1.388.888	-	1.388.888,00
337	Neon Box	2m x 2,85m x 2 sisi	1	Jl. Sadar	Siborongborong	25-12-2025 s/d 24-12-2026	2.972.550	-	2.972.550,00
338	Neon Box	1,5m x 1,85m x 1 sisi	1	Jl. Ferdinand Lumbantobing	Tarutung	25-12-2025 s/d 24-12-2026	1.388.888	-	1.388.888,00
339	Neon Box	2m x 2,85m x 2 sisi	1	Jl. Ferdinand Lumbantobing	Tarutung	25-12-2025 s/d 24-12-2026	2.972.550	-	2.972.550,00
340	Neon Box	1,5m x 1,85m x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	25-12-2025 s/d 24-12-2026	1.388.888	-	1.388.888,00
341	Neon Box	2m x 2,85m x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	25-12-2025 s/d 24-12-2026	2.972.550	-	2.972.550,00
342	Neon Box	1,5m x 1,85m x 1 sisi	1	Jl. Ir. Mananti Sitompul	Siatas Barita	25-12-2025 s/d 24-12-2026	1.388.888	-	1.388.888,00
343	Neon Box	2m x 2,85m x 2 sisi	1	Jl. Ir. Mananti Sitompul	Siatas Barita	25-12-2025 s/d 24-12-2026	2.972.550	-	2.972.550,00
344	Papan Nama Toko	1m x 4m x 1 sisi	1	Jl. Balige Pohan Tonga No.18/19	Siborongborong	01-12-2025 s/d 30-11-2026	2.086.000	-	2.086.000,00
345	Papan Nama Toko	1 x 2 x 1 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	07-12-2025 s/d 06-12-2026	826.000	-	826.000,00
346	Neon Box	1 x 2 x 2 sisi	1	Jl. DI. Panjaitan	Tarutung	07-12-2025 s/d 06-12-2026	1.001.000	-	1.001.000,00
347	Sewa Tanah	1.634.400	1	Silangit	Siborongborong	10-1-2025 s/d 10-1-2026	101.690.000	-	101.690.000,00
						TOTAL REALISASI	**876.647.612,88**	**598.414.510,62**	**379.923.102,26**

Lampiran 30

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR UTANG BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**		**-**	**1.896.141.000,00**	**(1.896.141.000,00)**
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partali Julu Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	142.175.000,00	(142.175.000,00)
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simanungkalit Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	142.090.000,00	(142.090.000,00)
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sialang Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	165.955.000,00	(165.955.000,00)
		Pembangunan Jalan Aek Rangat Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	142.200.000,00	(142.200.000,00)
		Rekonstruksi Jalan Simangumban - Hopong Kec. Simangumban Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	142.250.000,00	(142.250.000,00)
		Rekonstruksi Jalan Simatemate - Aek Godang Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	142.180.000,00	(142.180.000,00)
		Rehabilitasi Jalan Hutaginjang - Sitanggor Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	189.635.000,00	(189.635.000,00)
		Rehabilitasi Jalan Onan Runggu - Silimabahal - Hutagurgur Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara (BKP- SU)	-	166.005.000,00	(166.005.000,00)
		Rehabilitasi Jalan Menuju Sigala-gala Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	141.900.000,00	(141.900.000,00)
		Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar II Kec. Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	142.135.000,00	(142.135.000,00)
		Rehabilitasi Jalan Rappa - Tumus - Hajoran Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara (BKP-SU)	-	189.760.000,00	(189.760.000,00)
		Rehabilitasi Jalan Rappa - Batu Arimo - Batas Tapanuli Tengah Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara (BKP- SU)	-	189.856.000,00	(189.856.000,00)
2	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**		**23.431.171.151,63**	**33.239.258.051,63**	**(9.808.086.900,00)**
		Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)	-	18.046.744.200,00	(18.046.744.200,00)
		Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	1.768.500.000,00	1.768.500.000,00	-
		Utang Belanja Gaji THR	21.578.329.700,00	13.339.672.400,00	8.238.657.300,00
		Utang Belanja Modal Pencatatan Utang Pembangunan PAUD Tahun 2014 koreksi kesalahan tahun sebelumnya	84.341.451,63	84.341.451,63	-
3	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		**-**	**13.588.051.784,00**	**(13.588.051.784,00)**
		Utang Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	-	13.588.051.784,00	(13.588.051.784,00)
4	**SEKRETARIAT DAERAH**		**-**	**278.685.790,00**	**(278.685.790,00)**
		Utang Belanja Iuran Air ke PDAM Tahun 2024	-	268.685.790,00	(268.685.790,00)
		Utang Belanja Iuran Internet ke PT KUSUMA DINATHA JAYA ABADI Tahun 2024	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
5	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**		**461.992.677,00**	**461.992.677,00**	**-**

		Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	356.099.341,00	356.099.341,00	-
		Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	105.893.336,00	105.893.336,00	-
6	**RSUD**		**18.208.709.480,00**	**14.497.289.749,00**	**3.711.419.731,00**
		Utang Belanja BLUD	18.208.709.480,00	14.497.289.749,00	3.711.419.731,00
7	**DINAS PERTANIAN**		**145.000.000,00**	**-**	**145.000.000,00**
		Utang Belanja Modal	145.000.000,00	-	145.000.000,00
	TOTAL		**42.246.873.308,63**	**63.961.419.051,63**	**(21.714.545.743,00)**